



Pemerintah
Kabupaten Kebumen

RKPD 2026

KABUPATEN KEBUMEN

*"Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan
Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan
Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan"*

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Kebumen.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026;
- b. penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
- c. pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

Pasal 5

Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI Rianto

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.....	iii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5. Sistematika Dokumen	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-22
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-43
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-136
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2024.....	II-151
2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah.....	II-261
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-261
2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-277
2.4. Isu Strategis	II-285
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Dinamika Ekonomi Global pada Tahun 2024	III-1
3.1.2. Dinamika dan Kinerja Ekonomi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024.....	III-1
3.1.3. Tantangan Perekonomian pada Tahun 2025 dan 2026.....	III-4
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah pada Tahun 2026.....	III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026	III-8
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-8
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-16
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-23
3.2.4. Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III-27
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026	IV-4
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026...	IV-4
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	IV-5
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026..	IV-15
4.2.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-27
4.2.5. Penanggulangan Kemiskinan.....	IV-28
4.2.6. Penanganan Stunting	IV-30
4.2.7. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur	IV-31
4.2.8. <i>Geopark</i> Kebumen	IV-31
4.2.9. Penguatan Ekosistem Inovasi	IV-33

4.3. Inovasi Daerah	IV-34
4.3.1. Hak Kekayaan Intelektual.....	IV-34
4.3.2. Inovasi Pelayanan Publik.....	IV-46
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan	V-1
5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	V-1
5.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	V-8
5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	V-21
5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	V-27
5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V-28
5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	V-31
5.1.7. Unsur Kewilayahan	V-31
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum	V-32
5.2. Rencana Pendanaan dan Dukungan Program Prioritas Terhadap Prioritas Daerah Tahun 2026.....	V-34
5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026.....	V-74
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1. Penetapan Indikator Kinerja	VI-1
6.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
6.1.2. Indikator Kinerja Daerah	VI-2
6.2. Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal	VI-6
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (Mdpl)	II-2
Tabel 2.2	Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen	II-5
Tabel 2.3	Jumlah Sebaran Mata Air di Rinci Menurut Kecamatan.....	II-5
Tabel 2.4	Keadaan Suhu Udara, Kelembaban, dan Kecepatan Angin di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	II-6
Tabel 2.5	Persentase Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Kebumen	II-8
Tabel 2.6	Persentase Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Kebumen	II-8
Tabel 2.7	Persentase Luas Bahaya Karhutla di Kabupaten Kebumen	II-9
Tabel 2.8	Persentase Luas Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Kebumen.....	II-10
Tabel 2.9	Persentase Luas Bahaya Banjir Tanah Longsor di Kabupaten Kebumen.....	II-11
Tabel 2.10	Persentase Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kebumen.....	II-12
Tabel 2.11	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kebumen.....	II-13
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-17
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024	II-17
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II-18
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Umur Tunggal Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II-19
Tabel 2.16	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Nasional, Jawa Tengah dan Beberapa Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.17	PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2.18	PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024.....	II-24
Tabel 2.19	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-26
Tabel 2.20	PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, Nasional, Jawa Tengah dan Beberapa Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024	II-29
Tabel 2.21	Inflasi Purwokerto, Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-29
Tabel 2.22	Laju Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kebumen, Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah dan Laju Indeks Harga Implisit PDB Nasional Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II-31
Tabel 2.24	Rasio Gini Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-32
Tabel 2.25	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-33
Tabel 2.26	Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024.....	II-34
Tabel 2.27	Perbandingan Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-35
Tabel 2.28	Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 ...	II-36
Tabel 2.29	Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024...	II-36
Tabel 2.30	Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024...	II-37

Tabel 2.31	Perbandingan Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Perbandingan Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024...	II-38
Tabel 2.32	Perbandingan Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-39
Tabel 2.33	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Kebumen, Puroworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2.34	Profil Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.35	Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-43
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020-2024.....	II-44
Tabel 2.37	Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-45
Tabel 2.38	Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.39	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2020- 2024.....	II-46
Tabel 2.40	Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-47
Tabel 2.41	Ketersediaan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2.42	Rasio Guru per Kelas rata-rata Terhadap Jumlah Murid Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2.43	Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-49
Tabel 2.44	Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D4 Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.45	Pemajuan Kebudayaan pada Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2.46	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-50
Tabel 2.47	Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-51
Tabel 2.48	Fasilitasi terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-52
Tabel 2.49	Indeks Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-52
Tabel 2.50	Jumlah Kasus dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2.51	Jumlah Kasus dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-55
Tabel 2.52	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-56
Tabel 2.53	Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-56
Tabel 2.54	Angka dan Jumlah Penderita Stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.55	Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.56	Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020- 2024.....	II-58
Tabel 2.57	Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-58

Tabel 2.58	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.59	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2.60	Angka Morbiditas Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-60
Tabel 2.61	Perkembangan Kasus Penyakit Menular 2020-2024	II-60
Tabel 2.62	Penyakit Tidak Menular Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel 2.63	Perkembangan Kasus Penyakit Tuberkulosis 2020-2024	II-62
Tabel 2.64	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.65	Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2020 - 2024	II-64
Tabel 2.66	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Tipe Konstruksi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2.67	Jumlah dan Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024.....	II-65
Tabel 2.68	Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	II-66
Tabel 2.69	Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024.....	II-66
Tabel 2.70	Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (dalam km).....	II-67
Tabel 2.71	Daftar Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II-67
Tabel 2.72	Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024.....	II-69
Tabel 2.73	Capaian Akses Sanitasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024	II-70
Tabel 2.74	Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024	II-71
Tabel 2.75	Status <i>Backlog</i> Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024.....	II-71
Tabel 2.76	Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024.....	II-71
Tabel 2.77	Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024	II-72
Tabel 2.78	Penanganan Rumah Korban Bencana Tahun 2020 – 2024	II-73
Tabel 2.79	Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.80	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-75
Tabel 2.81	Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-75
Tabel 2.82	Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Tahun 2023.....	II-76
Tabel 2.83	Sumber Daya Manusia (SDM) Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.....	II-76
Tabel 2.84	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.85	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-78
Tabel 2.86	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif pada Kantor Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.87	Kinerja Penanganan Permasalahan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-80

Tabel 2.88	Kondisi Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-81
Tabel 2.89	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Keterserapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel 2.90	Kondisi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel 2.91	Profil Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel 2.92	Profil Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-86
Tabel 2.93	Ketahanan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.94	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024.....	II-87
Tabel 2.95	Penanganan Sengketa Lahan Tahun 2020 – 2024	II-88
Tabel 2.96	Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 2020-2024	II-89
Tabel 2.97	Kinerja Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-90
Tabel 2.98	Emisi dan Serapan GRK Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..	II-91
Tabel 2.99	Kinerja Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-92
Tabel 2.100	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-92
Tabel 2.101	Profil Kemajuan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2024.....	II-94
Tabel 2.102	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-95
Tabel 2.103	Kondisi BUMDes Tahun 2020-2024.....	II-97
Tabel 2.104	Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026	II-98
Tabel 2.105	Perkembangan PKK Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-100
Tabel 2.106	Perkembangan CPR, TFR dan <i>Unmet Need</i> Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.107	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel 2.108	Kondisi Kelengkapan dan Keselamatan Jalan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel 2.109	Persebaran Terminal Tipe A, B, dan C di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	II-103
Tabel 2.110	Data Produksi Terminal Tipe C Tahun 2020 -2024.....	II-103
Tabel 2.111	Jumlah Izin Trayek di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024	II-104
Tabel 2.112	Kondisi Uji KIR di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024	II-105
Tabel 2.113	Profil Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024.....	II-106
Tabel 2.114	Profil Kewirausahaan, Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-107
Tabel 2.115	Kinerja Investasi dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2.116	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-109
Tabel 2.117	Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024	II-110
Tabel 2.118	Kinerja Persandian Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-111
Tabel 2.119	Profil Kebudayaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2.120	Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	II-112
Tabel 2.121	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-114

Tabel 2.122	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.123	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-116
Tabel 2.124	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.125	Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten Kebumen.....	II-118
Tabel 2.126	Luas Penetapan LSD di Kabupaten Kebumen.....	II-119
Tabel 2.127	Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024	II-119
Tabel 2.128	Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Kebumen	II-120
Tabel 2.129	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.130	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.131	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-122
Tabel 2.132	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2.133	Daftar Kunjungan di 9 Obyek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.134	Pendapatan di 9 Daya tarik wisata Kabupaten Kebumen.....	II-124
Tabel 2.135	Daftar Obwis yang Dikelola Masyarakat/Swasta.....	II-124
Tabel 2.136	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.137	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.138	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-129
Tabel 2.139	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.140	Perkembangan Capaian Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.141	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen	II-132
Tabel 2.142	Tingkat Pendidikan ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen	II-132
Tabel 2.143	Perkembangan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.144	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelitbangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.145	Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.146	Capaian Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.147	Capaian Indikator Urusan kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.148	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.149	Distribusi Persentase PDRB menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel 2.150	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.151	Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-140
Tabel 2.152	Profil Fasilitas/Infrastruktur Transportasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-140

Tabel 2.153	Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.154	Kondisi Likuiditas Perbankan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-143
Tabel 2.155	Amenitas Hotel dan Restoran Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-143
Tabel 2.156	Kondisi Fasilitas/Infrastruktur Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.157	Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024.....	II-144
Tabel 2.158	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 ...	II-145
Tabel 2.159	<i>Return On Asset (ROA)</i> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-146
Tabel 2.160	Desa Swasembada di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2.161	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen.....	II-150
Tabel 2.162	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024..	II-151
Tabel 2.163	Status Predikat Kinerja.....	II-151
Tabel 2.164	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Daerah.....	II-152
Tabel 2.165	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Daerah	II-155
Tabel 2.166	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.....	II-161
Tabel 2.167	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan.....	II-163
Tabel 2.168	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pendidikan.....	II-173
Tabel 2.169	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kesehatan.....	II-175
Tabel 2.170	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-177
Tabel 2.171	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-182
Tabel 2.172	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	II-184
Tabel 2.173	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Sosial.....	II-186
Tabel 2.174	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Tenaga Kerja	II-189
Tabel 2.175	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-191
Tabel 2.176	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pangan	II-193
Tabel 2.177	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pertanahan	II-197
Tabel 2.178	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Lingkungan Hidup	II-198
Tabel 2.179	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	II-203
Tabel 2.180	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-205
Tabel 2.181	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ...	II-207
Tabel 2.182	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perhubungan	II-209
Tabel 2.183	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Komunikasi dan Informatika	II-211
Tabel 2.184	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-213

Tabel 2.185	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Penanaman Modal.....	II-215
Tabel 2.186	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kepemudaan dan Olahraga	II-218
Tabel 2.187	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Statistik	II-220
Tabel 2.188	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Persandian.....	II-221
Tabel 2.189	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kebudayaan.....	II-223
Tabel 2.190	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perpustakaan	II-225
Tabel 2.191	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kearsipan.....	II-227
Tabel 2.192	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kelautan dan Perikanan.....	II-228
Tabel 2.193	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pariwisata	II-231
Tabel 2.194	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pertanian	II-233
Tabel 2.195	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-236
Tabel 2.196	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perdagangan.....	II-237
Tabel 2.197	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perindustrian.....	II-239
Tabel 2.198	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Transmigrasi	II-241
Tabel 2.199	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Sekretariat Daerah	II-243
Tabel 2.200	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Sekretariat DPRD	II-245
Tabel 2.201	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perencanaan.....	II-246
Tabel 2.202	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Keuangan	II-248
Tabel 2.203	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kepegawaian	II-250
Tabel 2.204	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pendidikan dan Pelatihan	II-251
Tabel 2.205	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Penelitian dan Pengembangan.....	II-253
Tabel 2.206	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pengawasan.....	II-255
Tabel 2.207	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-257
Tabel 2.208	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kewilayahan.....	II-259
Tabel 2.209	Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Tahun 2026 dengan Misi Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029	II-285
Tabel 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024.....	III-3
Tabel 3.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	III-5

Tabel 3.3	Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2026.....	III-6
Tabel 3.4	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024.....	III-11
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024.....	III-12
Tabel 3.6	Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026.....	III-14
Tabel 3.7	Proporsi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026.....	III-15
Tabel 3.8	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2021-2024.....	III-18
Tabel 3.9	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024.....	III-18
Tabel 3.10	Belanja Daerah pada APBD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026...	III-19
Tabel 3.11	Perhitungan Belanja Fungsi Pendidikan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.....	III-21
Tabel 3.12	Perhitungan Belanja Fungsi Kesehatan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.....	III-21
Tabel 3.13	Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.....	III-22
Tabel 3.14	Perhitungan Belanja Pegawai pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.....	III-23
Tabel 3.15	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2024.....	III-24
Tabel 3.16	Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026.....	III-25
Tabel 3.17	Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	III-26
Tabel 3.18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026.....	III-28
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah RKPD Tahun 2026.....	III-28
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2026.....	IV-1
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2026.....	IV-5
Tabel 4.3	Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah.....	IV-6
Tabel 4.4	Keterkaitan Hasil Evaluasi sampai dengan Tahun 2024, Permasalahan, Isu Aktual, Isu Strategis dan Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2026.....	IV-17
Tabel 4.5	Keselarsan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2026.....	IV-23
Tabel 4.6	Keselarsan Sasaran RPJMD, Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2026.....	IV-25
Tabel 4.7	Hasil Kreasi dan Inovasi Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan HKI Hak Cipta.....	IV-35
Tabel 4.8	Daftar Resmi HKI Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen	IV-38
Tabel 4.9	Hasil Kreasi dan Inovasi Kabupaten Kebumen yang telah Mendapatkan HKI Merek.....	IV-310
Tabel 4.10	Hasil Kreasi dan Inovasi Kabupaten Kebumen yang telah Mendapatkan HKI Paten.....	IV-43

Tabel 4.11	Daftar Kekayaan Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan HKI Komunal	IV-43
Tabel 4.12	Daftar Potensi dan Kekayaan Kabupaten Kebumen yang sedang dan akan diajukan sebagai HKI Komunal.....	IV-44
Tabel 4.13	Daftar Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.....	IV-47
Tabel 5.1	Dukungan terhadap Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.....	V-35
Tabel 5.2	Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026	V-74
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen Tahun 2026.	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026	VI-3
Tabel 6.3	Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan Dan Format Penerapan Standar Pelayanan Minimal	VI-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Lain I-4

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen..... II-1

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen..... II-3

Gambar 2.3 Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen II-7

Gambar 2.4 Peta Bahaya Kekeringan Kabupaten Kebumen II-8

Gambar 2.5 Peta Bahaya Karhutla Kabupaten Kebumen II-9

Gambar 2.6 Peta Bahaya Gempa Bumi Kabupaten Kebumen..... II-10

Gambar 2.7 Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kebumen..... II-11

Gambar 2.8 Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen.. II-12

Gambar 2.9 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen II-15

Gambar 4.1 Konsep THIS pada Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026
..... IV-23

Gambar 4.2 Dashboard Jurnal Online Pemerintah Kabupaten Kebumen..... IV-61

Gambar 4.3 Penerbitan Edisi Jurnal Krisakti dan Jurnal Semarak Kabumian IV-61

Gambar 5.1 Proporsi Anggaran Berdasarkan Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2026 V-33

Gambar 5.2 Proporsi Anggaran Kegiatan Prioritas Berdasarkan Prioritas Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2026 V-33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2025-2029 adalah "Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026. Tema pembangunan akan dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang selengkapnyanya tercantum pada Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai upaya dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2026. Prioritas tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) sesuai masing-masing urusan yang diampu.

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam penyusunannya, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 juga berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJM Nasional Tahun 2024-2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang juga masih dalam proses penyusunan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom-up*, politis, dan *top-down*. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan utamanya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan *bottom up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Proses politis melalui penelaahan atas pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil dari proses penjangkaran aspirasi masyarakat, sedangkan proses *top-down* yaitu merujuk pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Secara substansi, dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan tahunan Daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*specific*), terukur (*measurable*),

dapat dicapai (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan dapat dilaksanakan tepat waktu (*time*). Di samping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral, holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

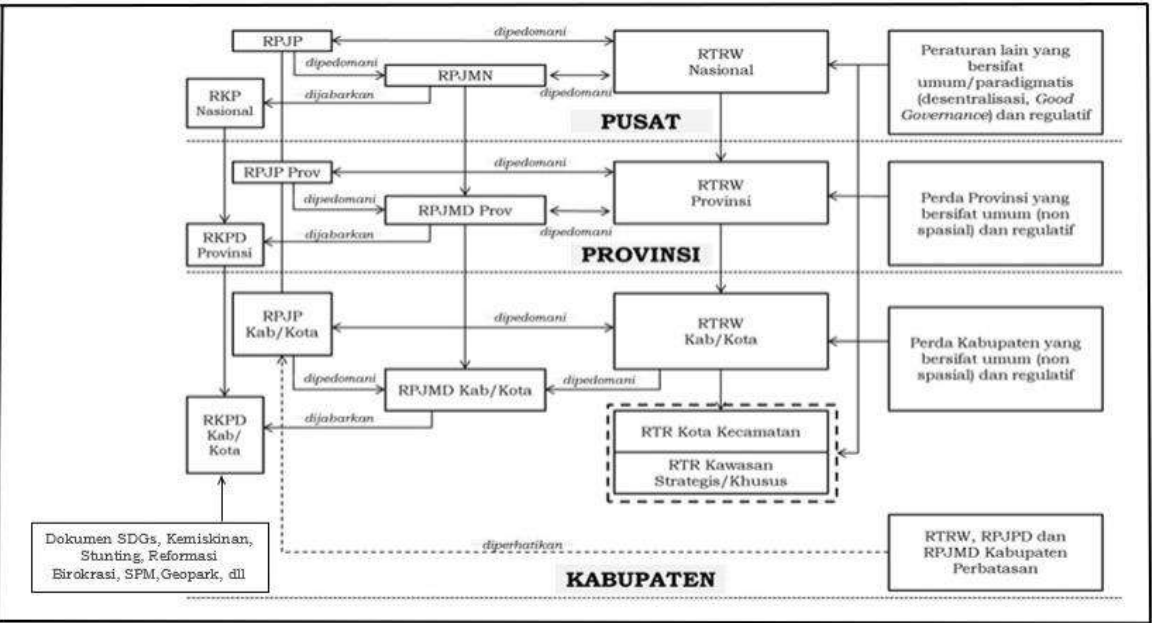
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RKPD dengan dokumen lain secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Lain

Hubungan antara RKPD dengan dokumen lain dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. menunjukkan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah. Hubungan antara RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran visi dan misi Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.
2. RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
3. Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Kemiskinan, *Stunting*, Reformasi Birokrasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Geopark* Kebumen menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.
4. RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044.
5. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.
6. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman/dasar Penyusunan KU APBD dan PPAS yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan APBD Tahun 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagai penjabaran visi dan misi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah:

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah tahun 2026;
2. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2026;
3. Menciptakan sinergitas program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam melaksanakan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional serta daerah dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan daerah;
5. Menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026; dan
6. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD dan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.

1.5. Sistematika Dokumen

Sistematika RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas sasaran pembangunan tahun 2026.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- BAB VII PENUTUP**
Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

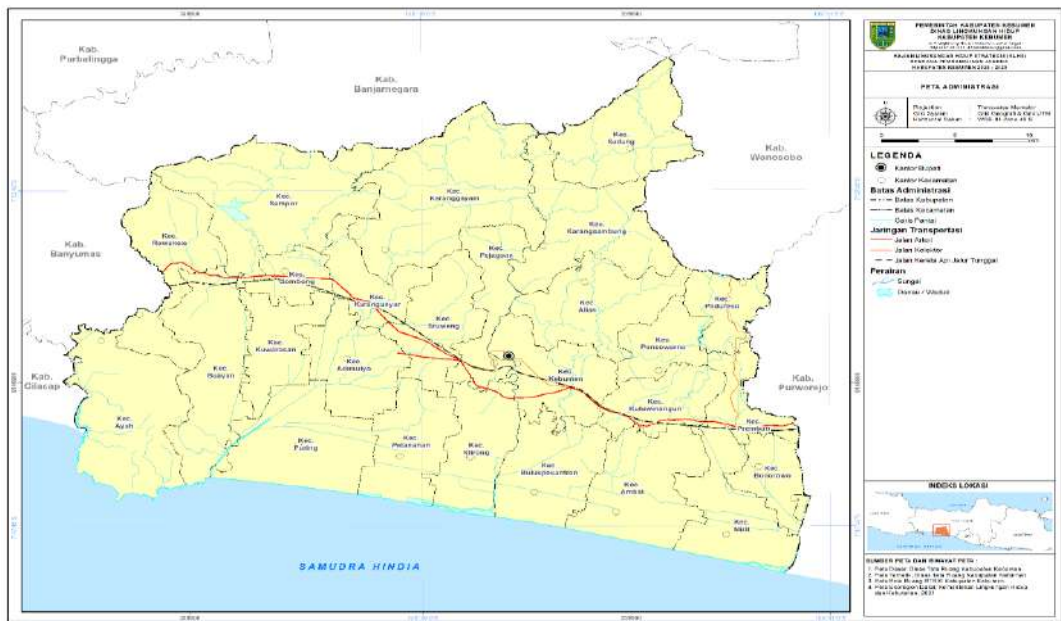
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak dari Kabupaten Kebumen ke Pusat Ibu Kota Provinsi sepanjang 162 km. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Ditinjau secara geografis, wilayah Kabupaten Kebumen terletak di antara terletak antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.949 dan 6.818 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombang, yaitu 19,48 km² atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen.

b. Kondisi Topografi

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Kebumen cukup bervariasi mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, perbukitan, sampai dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 0-300 mdpl. Ketinggian beberapa wilayah kecamatan dari permukaan laut di Kabupaten Kebumen ditunjukkan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (Mdpl).

Tabel 2.1.
Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan
di Kabupaten Kebumen (Mdpl)

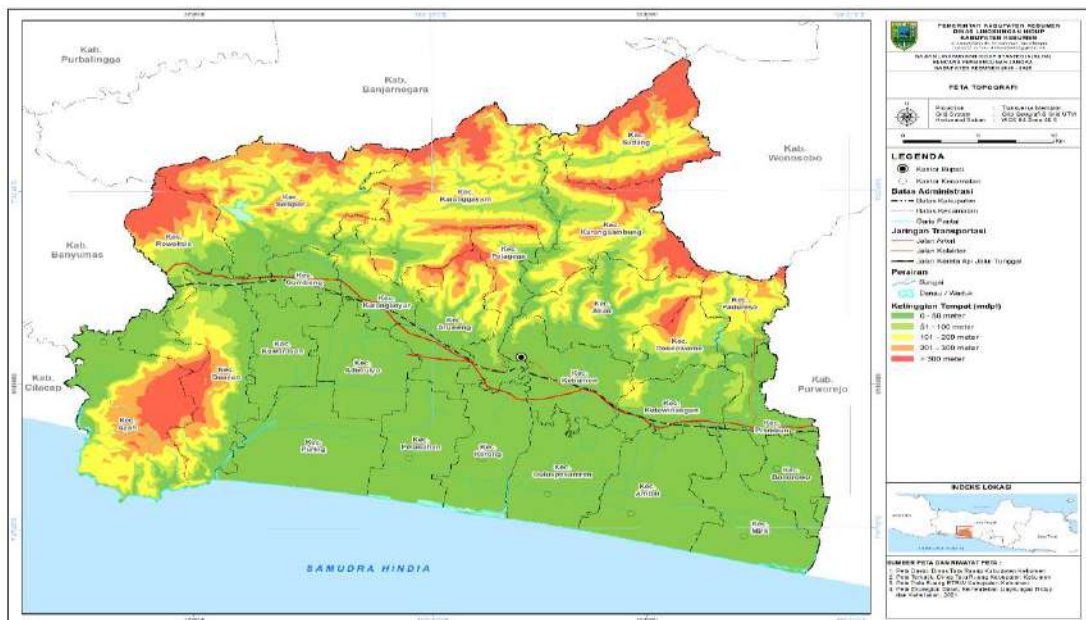
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (meter)
1	Ayah	Demangsari	9,00
2	Buayan	Buayan	14,00
3	Puring	Sitiadi	16,00
4	Petanahan	Petanahan	15,00
5	Klirong	Klirong	18,00
6	Buluspesantren	Setrojenar	17,00
7	Ambal	Ambalresmi	17,00
8	Mirit	Mirit	16,00
9	Bonorowo	Bonorowo	11,00
10	Prembun	Prembun	38,00
11	Padureso	Padureso	198,00
12	Kutowinangun	Kutowinangun	18,00
13	Alian	Krakal	37,00
14	Poncowarno	Poncowarno	21,00
15	Kebumen	Kebumen	27,00
16	Pejagoan	Pejagoan	28,00
17	Sruweng	Sruweng	16,00
18	Adimulyo	Adimulyo	11,00
19	Kuwarasan	Kuwarasan	15,00
20	Rowokele	Rowokele	17,00
21	Sempor	Sempor	29,00
22	Gombong	Gombong	26,00
23	Karanganyar	Karanganyar	20,00
24	Karanganyar	Karanganyar	66,00
25	Sadang	Sadang	117,00
26	Karangsambung	Karangsambung	71,00

Sumber : Kabupaten Kebumen Dalam Angka, 2024

Wilayah Kabupaten Kebumen 61 persen berada pada ketinggian 0-997,5 meter dengan karakteristik wilayah berupa pesisir, dataran rendah, dan kawasan perbukitan. Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kemiringan 0-2 persen seluas 66.953,16 ha atau 52,26 persen;
2. Kemiringan 2-15 persen seluas 5.944,37 hektar (ha) atau 4,64 persen;
3. Kemiringan 15-40 persen seluas 21.919,37 ha atau 17,11 persen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40 persen seluas 33.294,6 ha atau 25,99 persen.

Berdasarkan peta topografi Kabupaten Kebumen, kemiringan lereng wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 5 kelas yaitu agak curam, curam, datar, landai, dan sangat curam. Pada wilayah utara Kabupaten Kebumen berada pada topografi sangat curam, sementara di bagian Tengah dan Selatan relatif datar dan landai karena merupakan wilayah pesisir.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Kebumen

c. Geologi

Secara geologi wilayah Kabupaten Kebumen memiliki kondisi geologi yang sangat beragam. Kabupaten Kebumen tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (Paleosen) hingga termuda (Pliosen) terdiri dari:

1. Kompleks Melange Luk Ulo (KT1) yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);
2. Formasi Karangsambung (Teok) yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Eosen). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit;
3. Formasi Totogan (Tomt) yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo Miosen);
4. Anggota Tuf Formasi Waturanda (Tmwt) yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur Miosen Awal);
5. Formasi Waturanda (Tmw) yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf;
6. Formasi Penosogan (Tmp) yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batulempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah);
7. Diabas (Tmd) adalah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah);
8. Formasi Halang (Tmph) yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen);

9. Formasi Peniron (Tpp) yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
10. Batuan Gunungapi Sumbing Muda (Qsm) yang terdiri atas batupasir tufan, tuf pasiran dan breksi andesit;
11. Endapan Pantai (Qac) yang berupa pasir lepas; dan
12. Alluvium (Qa) yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

d. Hidrologi

Secara hidrologis, sumber daya air di Kabupaten Kebumen adalah berasal dari mata air, sungai, danau/waduk/bendungan, rawa dan air tanah. DAS Luk Ulo Hulu merupakan salah satu DAS yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Kebumen dialiri oleh banyak sungai, yaitu Sungai Luk Ulo, Kali Cicingguling, Kali Ijo, Kali Karanganyar, Kali Kedungbener, Kali Jatinegara, Kali Wawar, Kali Sidomukti, Kali Kretek, Kali Kenteng, Kali Cacaban, Kali Gebang, Kali Kemit, Kali Rama, Kali Cunga, Kali Buntuk dan Kali Kedungsomad. Di Kabupaten Kebumen juga terdapat dua waduk besar yaitu Waduk Sempor yang berada di Kecamatan Sempor dan Waduk Wadaslintang dengan kapasitas penyimpanan air 324.087 m^3 yang digunakan sebagai sumber air untuk wilayah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pembagian wilayah sungai, sungai di wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 4 Sub Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu:

- 1) Sub SWS Telomoyo: $55.613,552 \text{ Ha}$ terdiri atas:
- 2) Sub SWS Jladri 1 Pecaron = $5.593,690 \text{ Ha}$;
- 3) Sub SWS Jatinegara = $18.589,897 \text{ Ha}$ - Sub SWS Kemit = $19.636,080 \text{ Ha}$;
- 4) Sub SWS Karanganyar = $11.789,885 \text{ Ha}$ Dengan volume tampung air = $1.786.863.425 \text{ m}^3$;
- 5) Sub SWS Luk Ulo = $67.553,245 \text{ Ha}$, dengan volume tampung air: $2.170.485.700 \text{ m}^3$;
- 6) Sub SWS Medono (Wawar): 64.984 Ha , dengan volume tampung air $2.087.935.920 \text{ m}^3$;
- 7) Sub SWS Ijo: $4.579,583 \text{ Ha}$, dengan volume tampung air: $147.142.002 \text{ m}^3$. Dengan demikian total aliran sungai di Kabupaten Kebumen adalah $\pm 6.192.427.107 \text{ m}^3$. SWS ini termasuk dalam wilayah pengelolaan BPSDA Probolo (Progo, Bogowonto, Luk Ulo).

Sungai Luk Ulo merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kebumen, yang mempunyai daerah tangkapan air seluas 596 km^2 , dengan panjang sungai utama 62 Km , dengan beberapa anak sungai yaitu Sungai Jeblog, Gebog, Mondo, Lokidang dan Loning. Sungai Luk Ulo melintas sepanjang Kabupaten Kebumen yang berhulu di Kabupaten Banjarnegara dan bermuara di pantai selatan Desa Tanggulangin Klirong. Pada musim hujan debit sungai Luk Ulo meningkat tajam sedangkan pada musim kemarau sangat kecil. Karakteristik sungai Luk Ulo pada bagian hulu berkelok-kelok membentuk meander sehingga banyak mengandung endapan pasir. Daerah tangkapan sungai Luk Ulo seluas 606 km^2 dengan panjang sungai 62 Km yang terbagi menjadi 31 Km upstream di daerah Karangsambung sampai daerah Kebagoran menuju arah muara di selatan Kebumen.

Sementara itu, Kabupaten Kebumen juga mempunyai potensi Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Kroya, Banyumudal, dan CAT KebumenPurworejo. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. Jika dilihat

berdasarkan persebarannya maka potensi CAT tersebut berada di bagian Tengah dan Selatan Kabupaten Kebumen. Sementara itu di bagian utara Kebumen merupakan wilayah non CAT. Sehingga di Kabupaten Kebumen terdapat dua waduk yang berada di wilayah utara yaitu waduk Sempor dan waduk Wadaslintang. Fungsi waduk tersebut yaitu untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kabupaten Kebumen terutama di wilayah utara. Berikut ditampilkan peta persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.2.

Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
CAT Kroya	2.404,64	3,44
CAT Banyumudal	6.961,48	9,97
CAT Kebumen-Purworejo	60.440,13	86,58
Total	69.806,25	100

Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

Selain itu, Kabupaten Kebumen juga memiliki sumber mata air berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan diketahui bahwa jumlah mata air yang terdata sebanyak 277 buah dan tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Tabel 2.3.

Jumlah Sebaran Mata Air di Rinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1	Ayah	18
2	Buayan	37
3	Puring	-
4	Petanahan	-
5	Klirong	-
6	Buluspesantren	-
7	Ambal	-
8	Mirit	-
9	Bonorowo	-
10	Prembun	5
11	Padureso	18
12	Kutowinangun	3
13	Alian	28
14	Poncowarno	12
15	Kebumen	1
16	Pejagoan	14

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
17	Sruweng	25
18	Adimulyo	-
19	Kuwarasan	-
20	Rowokele	27
21	Sempor	22
22	Gombong	-
23	Karanganyar	20
24	Karanganyar	23
25	Sadang	11
26	Karangsambung	13
	TOTAL	277

Sumber : KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, 2022

e. Klimatologi

Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Kabupaten Kebumen memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup signifikan tinggi, bahkan selama bulan terkering. Menurut Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen tahun 2023 berkisar antara 25,26°C sampai dengan 28,28°C. Untuk kelembaban udara berkisar antara 77% sampai dengan 89%. Sedangkan jumlah curah hujan selama tahun 2024 terendah pada bulan Agustus sebesar 3mm dan tertinggi pada bulan Januari sebesar 742mm. Keadaan suhu udara, kelembaban dan jumlah curah hujan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4.
Keadaan Suhu Udara, Kelembaban, dan Kecepatan Angin
di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Bulan	Temperatur (°C)			Kelembaban Rata-rata (%)	Jumlah Curah Hujan (mm)
	Min	Rata-Rata	Max		
Januari	17,60	27,30	33,80	86	742
Februari	17,80	26,70	35,00	89	322
Maret	18,60	27,39	34,80	86	322
April	18,60	27,54	35,00	88	334
Mei	17,60	28,28	33,80	87	27
Juni	16,80	27,11	34,80	85	27
Juli	14,80	26,18	32,80	89	55
Agustus	13,00	25,26	33,60	83	3

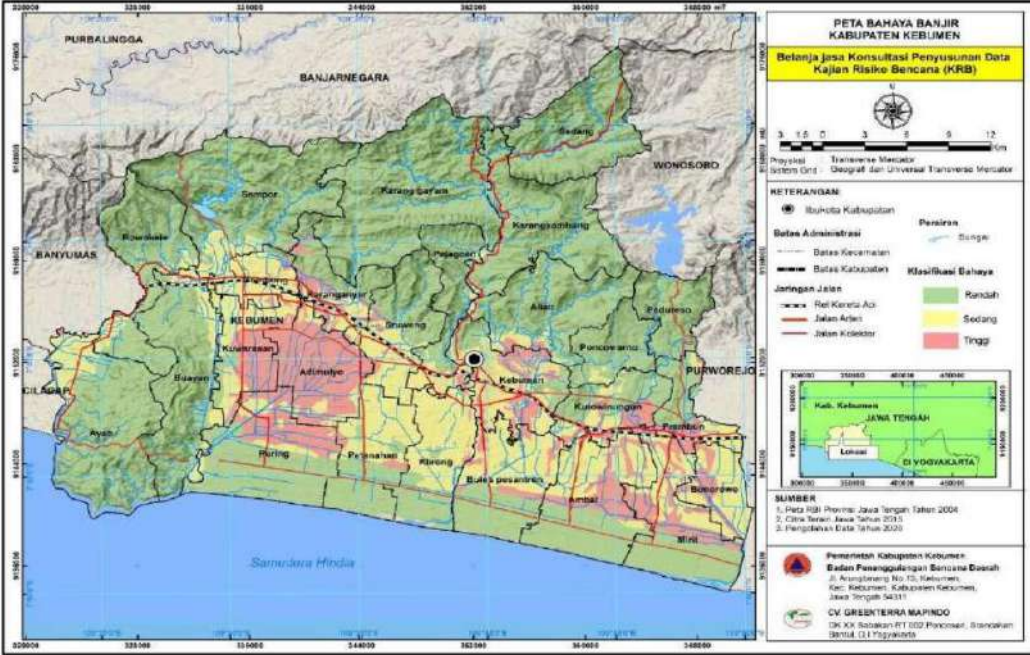
Bulan	Temperatur (°C)			Kelembaban Rata-rata (%)	Jumlah Curah Hujan (mm)
	Min	Rata-Rata	Max		
September	15,50	26,23	34,80	77	30
Oktober	15,60	27,83	34,40	81	174
Nopember	16,20	26,51	37,80	84	703
Desember	17,00	26,85	34,20	89	559

Sumber: Kabupaten Kebumen Dalam Angka, 2024

f. Kawasan Rawan Bencana

1. Banjir

Bahaya banjir sering mengancam wilayah Kabupaten Kebumen bagian selatan. Berdasarkan topografi daerah, Kabupaten Kebumen bagian selatan cenderung landai hingga sangat landai. Sebagian besar banjir di Kabupaten Kebumen diakibatkan oleh adanya luapan air sungai. Air luapan tersebut menggenang di wilayah daratan baik lahan persawahan maupun lahan pemukiman. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan sejarah kejadian bencana banjir, didapatkan peta ancaman bencana banjir sebagai berikut:



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.3.
Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen

Bencana banjir sering terjadi di Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Pejagoan, Prembun, Alian, Mirit dan Puring. Banjir dengan luas genangan dan durasi yang besar umumnya terjadi karena adanya tanggul sungai atau saluran irigasi yang jebol. Bencana banjir dengan klasifikasi tinggi sebesar 11,5%, klasifikasi sedang sebesar 21,7% dan klasifikasi rendah sebesar 66,8%. Selain itu, Kabupaten Kebumen memiliki potensi sekitar 18,66% yang rawan banjir bandang. Seperti data pada Tabel dibawah ini:

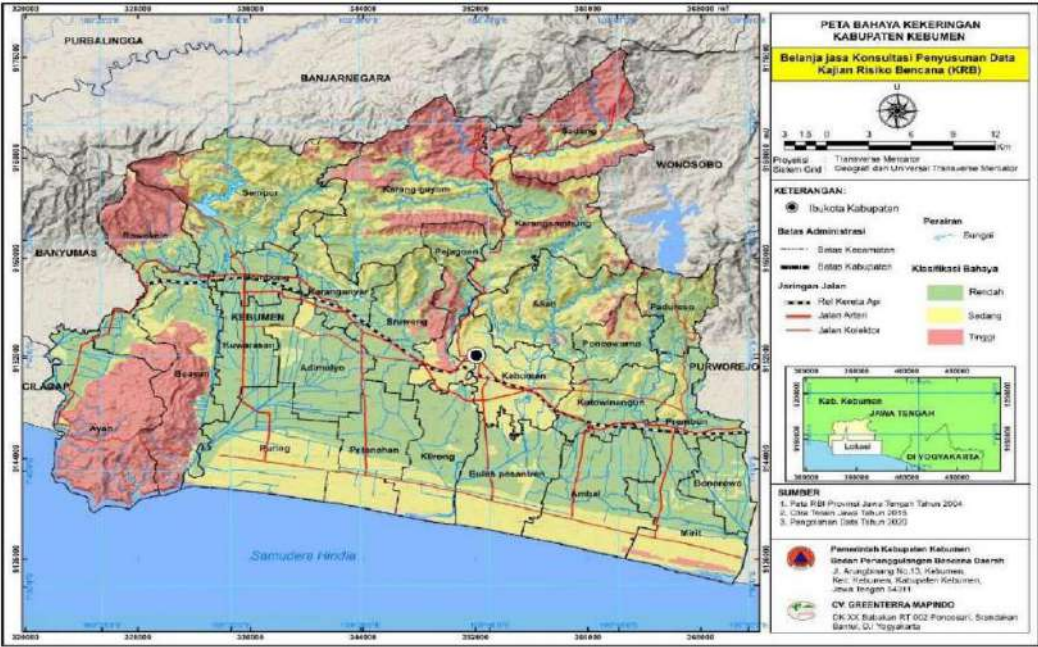
Tabel 2.5.
Persentase Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
14.701,55	11,5	27.788,77	21,7	85.621,18	66,8

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

2. Kekeringan

Bahaya kekeringan di Kabupaten Kebumen bersifat periodik tahunan, umumnya terjadi pada kisaran waktu Bulan Juni hingga September. Berdasarkan data dropping air BPBD, cakupan wilayah yang mengalami bahaya kekeringan cukup banyak yaitu 18 kecamatan dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen.



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.4.
Peta Bahaya Kekeringan Kabupaten Kebumen

Tabel 2.6.
Persentase Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Kebumen

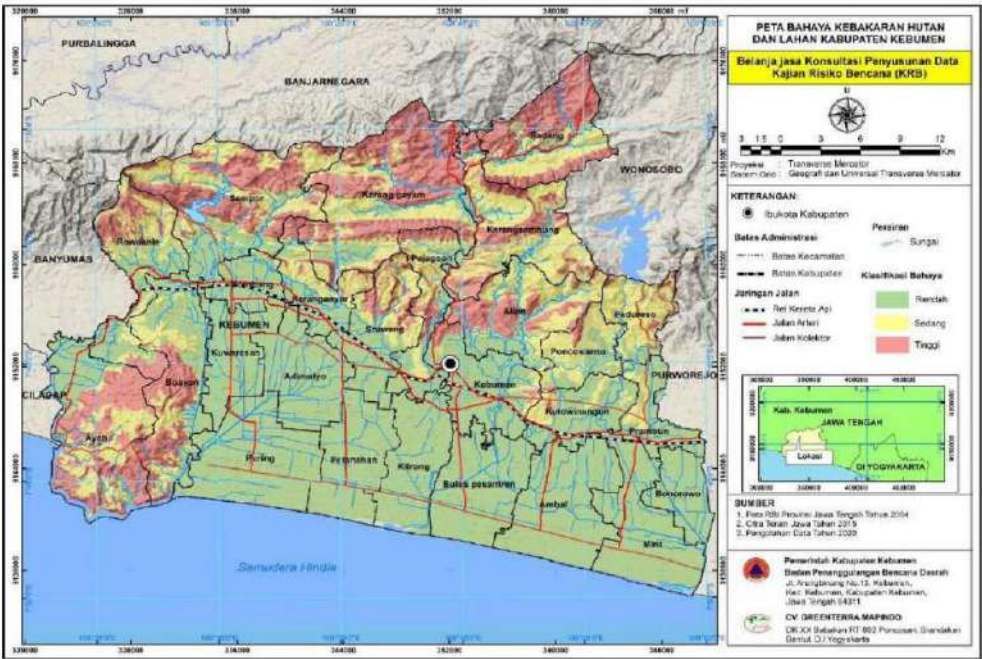
Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
25.167,87	19,6	42.642,32	33,3	60.301,31	47,1

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa wilayah Kabupaten Kebumen didominasi oleh bahaya kekeringan dengan klasifikasi rendah yaitu dengan luas mencapai 60.301,31 Ha atau 47,1% dari luas Kabupaten Kebumen. Bahaya Kekeringan dengan klasifikasi tinggi luasnya 25.167,87 Ha atau 19,6% dari luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan bahaya kekeringan dengan klasifikasi sedang luasnya 42.642,32 Ha atau 33,3% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Sebagai catatan semua wilayah kabupaten di masukan ke dalam 3 kategori yang ada, sehingga wilayah yang secara perhitungan tidak memiliki bahaya kekeringan masuk ke dalam kategori rendah.

3. Kebakaran Lahan dan Hutan

Bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kebumen sering terjadi pada wilayah hutan dan lahan yang dikelola oleh Perhutani. Sebagian besar bahaya kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah/semak-semak pada saat pembersihan lahan, sisa puntung rokok, bekas api unggun yang masih menyala di hutan ataupun lahan. Bahaya kebakaran hutan dan lahan sering sulit dipadamkan dengan cepat karena akses yang cukup sulit dan jauh.



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.5.
Peta Bahaya Karhutla Kabupaten Kebumen

Tabel 2.7.
Persentase Luas Bahaya Karhutla di Kabupaten Kebumen

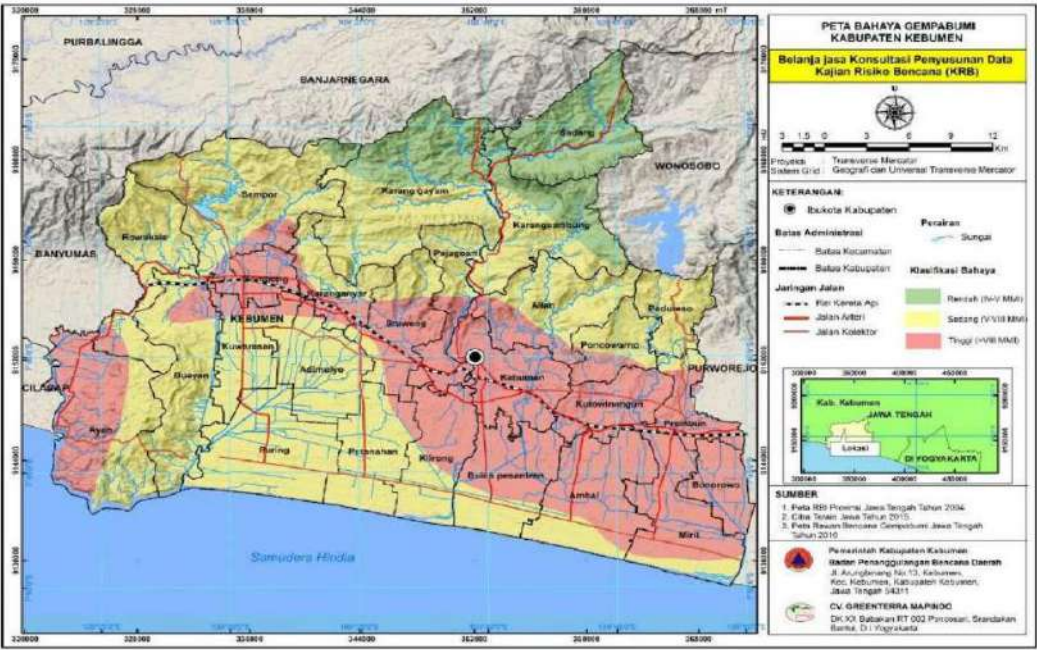
Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
27.833,56	21,7	28.241,02	22	72.036,92	56,2

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa persentase luas wilayah Kabupaten Kebumen didominasi oleh bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan klasifikasi rendah yaitu dengan luas 72.036,92 Ha dan persentase sebesar 56,2% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan klasifikasi tinggi luasnya mencapai 27.833,56 Ha atau 21,7% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen.

4. Gempa Bumi

Kabupaten Kebumen memiliki potensi bahaya gempa bumi tinggi dikarenakan letak Kabupaten Kebumen yang berdekatan dengan Zona Subduksi lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia di bagian selatan Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan wilayah Kabupaten Kebumen masuk dalam zona megathrust. Selain itu, beberapa sesar aktif di wilayah Karangasambung juga berpotensi memicu terjadinya gempa bumi. Berdasarkan catatan kejadian bencana, gempa bumi yang terjadi (dirasakan) di Kabupaten Kebumen secara keseluruhan episentrum gempanya di luar wilayah Kabupaten Kebumen.



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.6.
Peta Bahaya Gempa Bumi Kabupaten Kebumen

Tabel 2.8.
Persentase Luas Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Kebumen

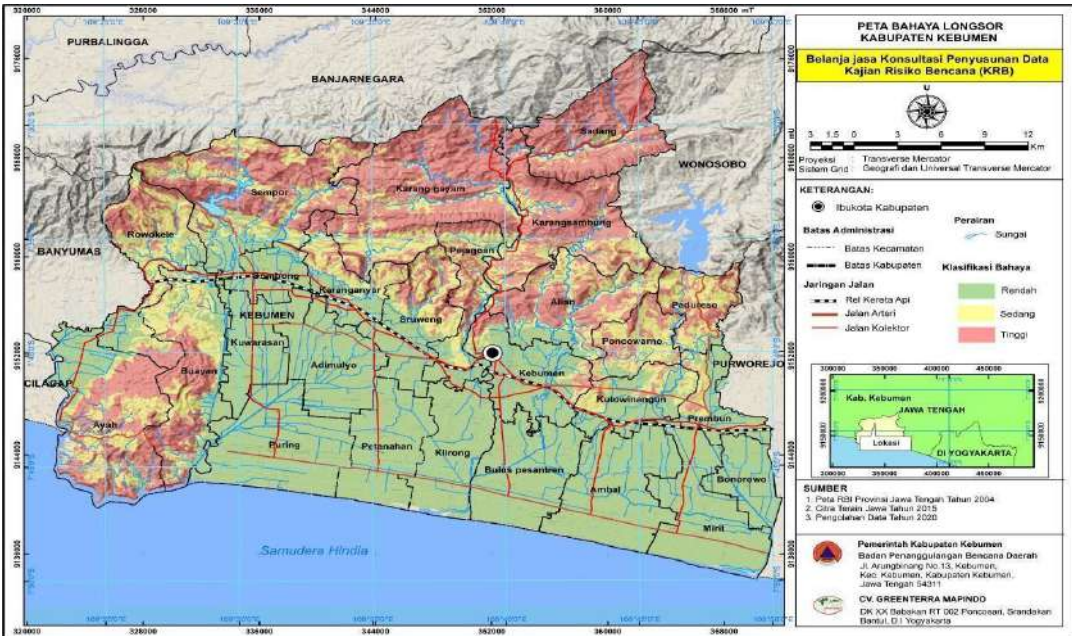
Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
45.510,34	35,52	69.975,47	54,62	12.625,21	9,85

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Secara umum hasil analisis bahaya menunjukkan wilayah Kabupaten kebumen didominasi oleh Bahaya gempa bumi dengan klasifikasi sedang yaitu dengan luas 69.975,47 Ha dan persentase sebesar 54,6% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Bahaya gempa bumi dengan klasifikasi tinggi luasnya mencapai 45.510,34 Ha atau 35,52% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Sedangkan bahaya gempa bumi dengan klasifikasi rendah luasnya 12.625,21 Ha atau 9,85% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen.

5. Tanah Longsor

Topografi daerah, Kabupaten Kebumen bagian utara cenderung terjal dan sangat terjal. Bahaya tanah longsor di Kabupaten Kebumen secara alamiah bersifat periodik terjadi tiap tahun pada periode musim hujan dan sering terjadi di wilayah bagian utara dan perbukitan selatan di Karangbolong. Tingginya frekuensi kejadian longsor, mengakibatkan bencana longsor dijadikan sebagai salah satu bencana prioritas di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan potensi bencana semua wilayah kabupaten di masukkan ke dalam 3 kategori yang ada, sehingga wilayah yang secara perhitungan tidak memiliki bahaya longsor masuk ke dalam kategori rendah.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.7.
Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kebumen

Tabel 2.9.
Persentase Luas Bahaya Banjir Tanah Longsor di Kabupaten Kebumen

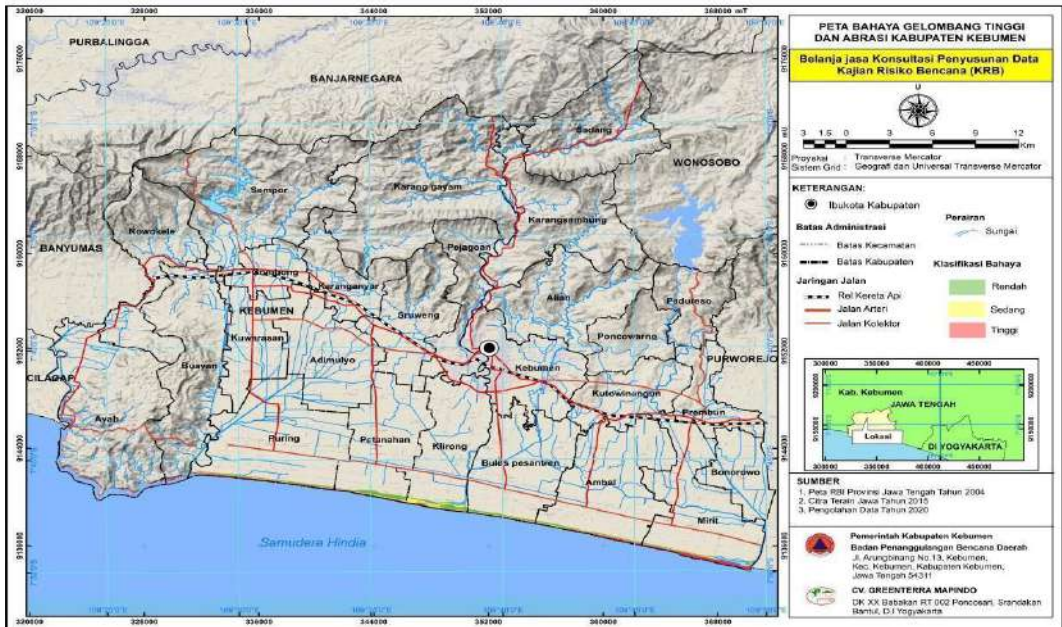
Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
38.589,87	30,1	24.663,87	19,3	64.857,75	50,6

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan Tabel di atas bahwa persentase luas wilayah Kebumen Bahaya longsor dengan klasifikasi tinggi luasnya mencapai 38.589,87 Ha atau 30,1%, bahaya longsor dengan klasifikasi sedang luasnya 24.663,87 Ha atau 19,3%, dan bahaya longsor dengan klarifikasi rendah luasnya 64.857,75 Ha atau 50,6% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Ancaman bencana longsor banyak terjadi pada wilayah kecamatan yang memiliki topografi perbukitan dengan lereng yang terjal seperti di Kecamatan Alian, Sadang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor, Padureso dan Karanggayam.

6. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi berdampak pada wilayah tidak terlalu luas, tetapi pada wilayah-wilayah yang masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan wisata pesisir, seringkali dampaknya menjadi lebih besar. Berdasarkan data kejadian gelombang pasang dan abrasi, wilayah pesisir Kabupaten Kebumen mulai dari Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan dan Ayah pernah terdampak bahaya gelombang ekstrem dan abrasi, terutama masyarakat nelayan dan pedagang di sekitar pantai.



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.8.
Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen

Tabel 2.10.
Persentase Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
620,18	0,48	280,74	0,22	479,78	0,37

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berorientasi pada wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Wilayah dengan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tinggi luasnya mencapai 620,18 Ha atau 0,48%. Wilayah dengan bahaya sedang luasnya 280,74 Ha atau 0,22%. Sedangkan wilayah dengan bahaya rendah luasnya mencapai 479,79 Ha atau 0,37% dari total wilayah Kabupaten Kebumen.

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri atas badan air dengan luas kurang lebih 1.415 hektar, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 3.820 hektar, kawasan konservasi berupa taman pulau kecil dengan luas kurang lebih 0,5 hektar, kawasan lindung geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil dengan luas kurang lebih 5 hektar, kawasan cagar budaya, serta kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 63 hektar.

Sementara itu, kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 13.077 hektar dan

kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 665 hektar, kawasan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 23.788 hektar, kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 44.113 hektar (dimana yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 43.154 hektar), kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 241 hektar, kawasan pertambangan dan energi meliputi kawasan pertambangan dan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 94 hektar, kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu gardu induk dengan luas kurang lebih 5 hektar, kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.310 hektar, kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 172 hektar, kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 12.798 hektar dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 27.605 hektar, serta kawasan pertahanan dan keamanan termasuk daerah latihan TNI AD dengan luas kurang lebih 2.238 hektar.

Tabel 2.11.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kebumen

No	Penggunaan Lahan	Luas (hektar)
A.	Kawasan lindung terdiri atas:	
	1. Badan Air	1.415
	2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung	3.820
	3. Kawasan Konservasi berupa Taman Pulau Kecil	0,5
	4. Kawasan lindung geologi berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.	5
	1. Kawasan Cagar Budaya	
	2. Kawasan Ekosistem Mangrove	63
B.	Kawasan budi daya terdiri atas:	
	1. Kawasan hutan produksi, meliputi:	
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	13.077
	b. Kawasan Hutan Produksi Tetap	655
	2. Kawasan Perkebunan Rakyat	23.788
	3. Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan	44.113 hektar (dimana yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 43.154 hektar)
	4. Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya	241
	5. Kawasan pertambangan dan mineral meliputi:	

No	Penggunaan Lahan	Luas (hektar)
	a. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	94
	b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yaitu Gardu Induk	5
	6. Kawasan Peruntukan Industri	3.310
	7. Kawasan Pariwisata	172
	8. Kawasan permukiman meliputi:	
	a. Kawasan Permukiman Perkotaan	12.798
	b. Kawasan Permukiman Perdesaan	27.605
	9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan termasuk daerah latihan TNI AD	2.238

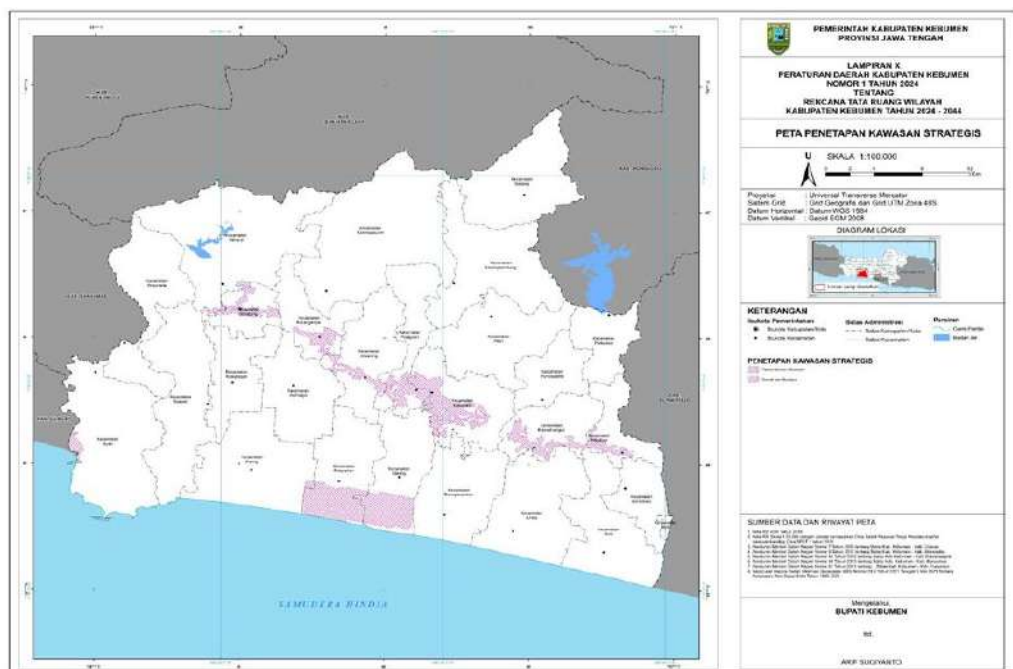
Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi sub wilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif. Berikut ini konsep potensial akan dikembangkan di wilayah Kebumen yaitu:

1. Kawasan Strategis

Kawasan strategis Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan strategis provinsi di Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kebumen, terdiri atas (1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten meliputi: (a) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, (b) Kawasan Stategis Provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan (c) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: (a) Kawasan industri Kebumen, (b) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombang, (c) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng, (d) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen, (e) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun, dan (f) Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.9.

Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan industri Kebumen merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan industri terpadu sedangkan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan strategis pariwisata terpadu. Pengembangan kawasan industri Kebumen bertujuan mewujudkan Kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan arah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong sebagai Kawasan perdagangan dan jasa dan pusat pariwisata budaya dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng sebagai Kawasan pusat perdagangan dan jasa dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen sebagai Kawasan pusat pemerintahan yang didukung perdagangan dan jasa dan industri dengan arah pengembangan pusat pemerintahan, industri, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun sebagai Kawasan pusat perdagangan dan jasa berbasis Agrobisnis dengan arah pengembangan pertanian, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah bertujuan mewujudkan Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah sebagai Kawasan Pariwisata alam yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan arah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kota Pusaka Gombong. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya bertujuan mewujudkan sebagai kawasan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka Gombong di Kecamatan Gombong adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

2. Geopark Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki kawasan Geopark Kebumen yang saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Geopark Kebumen secara administrasi berada di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Geopark Kebumen dengan luas kawasan 1.138,70 kilometer persegi daratan dan 21,98 kilometer persegi laut, mencakup 22 kecamatan dan 374 desa dengan mempunyai morfologi yang bervariasi mulai dari perbukitan, lembah, pedataran sampai pantai. Terdapat 42 *geosite*, 7 *biosite* dan 24 *culturesite* yang berada dalam kawasan Geopark Kebumen yang perlu dikembangkan dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat, termasuk mengembangkannya sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Potensi pariwisata di Kabupaten Kebumen, khususnya dengan keberadaan Geopark Kebumen, hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tulang punggung perekonomian. Peningkatan ekonomi melalui upaya *value creation* area-area konservasi masih relatif minim dilakukan, meski potensi tersebut sangat besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten telah berupaya mendorong Kawasan Geopark Kebumen, setelah ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada Tahun 2018, status *Unesco Global Geopark* akan resmi diperoleh Geopark Kebumen pada Tahun 2025.

Berdasarkan Perpres 9/2019, Pengembangan Taman Bumi (Geopark) adalah tata kelola Geopark guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui tiga pilar pengembangan yakni konservasi, edukasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Mengusung visi **"Terwujudnya Kawasan Geopark Global Kebumen dengan Keragaman Geologi, Hayati, dan Budaya yang Berkelanjutan Demi Kesejahteraan Masyarakat"**, memandu upaya menuju pengembangan geopark yang tidak hanya memiliki nilai geologi, tetapi juga mengutamakan keseimbangan ekosistem, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep Geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya *UNESCO Global Geopark*, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka. Dalam hal ini, Geopark mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis keberlanjutan melalui sektor pariwisata, kerajinan lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dihasilkan dari Geopark, seperti ekowisata dan produk berbasis alam, kawasan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar di sekitar kawasan Geopark, seperti akses jalan, fasilitas air bersih, dan komunikasi, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

2.1.1.3. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.446.833 jiwa, tumbuh sebesar 0,89% dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, namun demikian rata-rata masih di bawah 1% kecuali pada Tahun 2022. Sementara itu, rasio penduduk cukup stabil disekitar 103 selama periode Tahun 2020-2024 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar sekitar 3% dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.399.976	1.406.606	1.421.143	1.434.023	1.446.833
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,83	0,47	1,03	0,91	0,89
Rasio penduduk (%)	103	103	103	103	103

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI, (data diolah) 2024

b. Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Dari segi *sex ratio*, jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 734.040 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 712.793 jiwa, maka *sex ratio* penduduk mencapai 103%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki. Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Kebumen merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 137.292 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Padureso yaitu sebanyak 17.592 jiwa. Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan *sex rasio* per kecamatan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	33.05.01	AYAH	34.796	50,70	33.831	49,30	68.627	4,74
2	33.05.02	BUAYAN	35.835	51,06	34.349	48,94	70.184	4,85
3	33.05.03	PURING	34.298	50,70	33.348	49,30	67.646	4,68
4	33.05.04	PETANAHAN	32.436	50,58	31.697	49,42	64.133	4,43
5	33.05.05	KLIRONG	34.396	50,70	33.441	49,30	67.837	4,69
6	33.05.06	BULUSPESANTREN	31.849	50,94	30.674	49,06	62.523	4,32
7	33.05.07	AMBAL	34.068	50,92	32.842	49,08	66.910	4,62
8	33.05.08	MIRIT	28.943	50,79	28.038	49,21	56.981	3,94
9	33.05.09	PREMBUN	15.298	50,28	15.129	49,72	30.427	2,10
10	33.05.10	KUTOWINANGUN	25.687	50,74	24.942	49,26	50.629	3,50
11	33.05.11	ALIAN	36.491	50,94	35.142	49,06	71.633	4,95
12	33.05.12	KEBUMEN	69.456	50,59	67.836	49,41	137.292	9,49
13	33.05.13	PEJAGOAN	29.567	50,87	28.554	49,13	58.121	4,02
14	33.05.14	SRUWENG	32.787	50,48	32.166	49,52	64.953	4,49
15	33.05.15	ADIMULYO	19.660	49,97	19.682	50,03	39.342	2,72
16	33.05.16	KUWARASAN	27.350	50,98	26.301	49,02	53.651	3,71
17	33.05.17	ROWOKELE	27.451	50,60	26.798	49,40	54.249	3,75
18	33.05.18	SEMPOR	37.397	50,81	36.198	49,19	73.595	5,09
19	33.05.19	GOMBONG	25.377	49,89	25.492	50,11	50.869	3,52

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
20	33.05.20	KARANGANYAR	19.537	50,50	19.153	49,50	38.690	2,67
21	33.05.21	KARANGGAYAM	32.331	51,16	30.859	48,84	63.190	4,37
22	33.05.22	SADANG	12.446	51,43	11.753	48,57	24.199	1,67
23	33.05.23	BONOROWO	11.662	50,95	11.225	49,05	22.887	1,58
24	33.05.24	PADURESO	8.909	50,64	8.683	49,36	17.592	1,22
25	33.05.25	PONCOWARNO	10.104	50,90	9.746	49,10	19.850	1,37
26	33.05.26	KARANGSAMBUNG	25.909	50,98	24.914	49,02	50.823	3,51
Jumlah			734.040	50,73	712.793	49,27	1.446.833	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI, 2024

c. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen relatif meningkat dari 1.093 jiwa/km2 pada tahun 2020 menjadi 1.129 jiwa/km2 pada tahun 2024. Angka kepadatan ini berarti bahwa rata-rata terdapat 1.129 penduduk yang menghuni setiap 1 km2 wilayah di Kabupaten Kebumen. Kecamatan Kebumen merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 3.266 jiwa/km2. Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sadang, sebesar 446 jiwa/km2.

Tabel 2.14.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	AYAH	76,37	68.627	899
2	BUAYAN	68,42	70.184	1.026
3	PURING	61,97	67.646	1.092
4	PETANAHAH	44,84	64.133	1.430
5	KLIRONG	43,25	67.837	1.568
6	BULUSPESANTREN	48,77	62.523	1.282
7	AMBAL	62,41	66.910	1.072
8	MIRIT	52,35	56.981	1.088
9	PREMBUN	22,96	30.427	1.325
10	KUTOWINANGUN	33,73	50.629	1.501
11	ALIAN	57,75	71.633	1.240
12	KEBUMEN	42,04	137.292	3.266
13	PEJAGOAN	34,58	58.121	1.681
14	SRUWENG	43,68	64.953	1.487
15	ADIMULYO	43,43	39.342	906
16	KUWARASAN	33,84	53.651	1.585
17	ROWOKELE	53,8	54.249	1.008
18	SEMPOR	100,15	73.595	735
19	GOMBONG	19,48	50.869	2.611

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
20	KARANGANYAR	31,4	38.690	1.232
21	KARANGGAYAM	109,29	63.190	578
22	SADANG	54,23	24.199	446
23	BONOROWO	20,91	22.887	1.095
24	PADURESO	28,95	17.592	608
25	PONCOWARNO	27,37	19.850	725
26	KARANGSAMBUNG	65,15	50.823	780
	Total 2024	1281,12	1.446.833	1.129
	Total 2023		1.434.023	1.119
	Total 2022		1.421.143	1.109
	Total 2021		1.406.606	1.098
	Total 2020		1.399.976	1.093

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI (data diolah), 2024

d. Struktur Usia Penduduk

Keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada dampak perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Berdasarkan data jumlah penduduk umur tunggal di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menunjukkan proporsi penduduk dengan kategori usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 991.399 orang dan non produktif (0-14 tahun, ditambah 65 tahun ke atas) sebanyak 455.434 orang. Data tersebut menggambarkan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kebumen sebesar 45,94%, artinya setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 45 hingga 46 orang yang masuk usia tidak produktif. Dengan rasio ketergantungan masih di bawah 50% menunjukkan beban ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap usia produktif masih rendah sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas.

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk Umur Tunggal Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Umur	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	0 tahun	7.592	7.039	14.631
2	1 tahun	8.963	8.715	17.678
3	2 tahun	9.846	9.002	18.848
4	3 tahun	10.852	10.164	21.016
5	4 tahun	11.210	10.562	21.772
6	5 tahun	11.130	10.571	21.701
7	6 tahun	11.291	10.330	21.621
8	7 tahun	10.923	10.144	21.067
9	8 tahun	10.889	10.254	21.143
10	9 tahun	11.086	10.278	21.364
11	10 tahun	11.072	10.231	21.303
12	11 tahun	11.158	10.186	21.344

No	Umur	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
13	12 tahun	11.486	10.645	22.131
14	13 tahun	11.714	10.948	22.662
15	14 tahun	11.894	10.895	22.789
16	15 tahun	11.744	10.889	22.633
17	16 tahun	11.520	10.696	22.216
18	17 tahun	9.043	8.594	17.637
19	18 tahun	10.428	10.007	20.435
20	19 tahun	10.298	9.576	19.874
21	20 tahun	10.821	10.448	21.269
22	21 tahun	11.185	10.522	21.707
23	22 tahun	11.007	10.246	21.253
24	23 tahun	11.393	10.675	22.068
25	24 tahun	12.376	11.543	23.919
26	25 tahun	11.953	11.047	23.000
27	26 tahun	11.115	10.370	21.485
28	27 tahun	11.832	10.593	22.425
29	28 tahun	12.178	11.044	23.222
30	29 tahun	12.138	10.788	22.926
31	30 tahun	11.550	10.419	21.969
32	31 tahun	11.436	10.460	21.896
33	32 tahun	11.588	10.266	21.854
34	33 tahun	10.804	9.917	20.721
35	34 tahun	10.893	10.266	21.159
36	35 tahun	11.705	10.592	22.297
37	36 tahun	10.402	9.418	19.820
38	37 tahun	10.612	9.587	20.199
39	38 tahun	11.161	10.310	21.471
40	39 tahun	11.174	10.184	21.358
41	40 tahun	10.960	10.146	21.106
42	41 tahun	10.571	10.020	20.591
43	42 tahun	11.355	10.831	22.186
44	43 tahun	10.022	9.521	19.543
45	44 tahun	10.292	9.437	19.729
46	45 tahun	10.005	9.452	19.457
47	46 tahun	9.901	9.521	19.422
48	47 tahun	9.295	9.007	18.302
49	48 tahun	8.826	8.930	17.756
50	49 tahun	9.326	9.615	18.941
51	50 tahun	8.387	8.348	16.735
52	51 tahun	8.451	8.767	17.218
53	52 tahun	9.613	9.825	19.438
54	53 tahun	7.765	8.050	15.815
55	54 tahun	8.691	9.151	17.842
56	55 tahun	8.871	9.739	18.610
57	56 tahun	8.153	8.880	17.033
58	57 tahun	8.096	8.673	16.769
59	58 tahun	7.401	8.228	15.629
60	59 tahun	8.852	9.861	18.713
61	60 tahun	7.291	8.160	15.451
62	61 tahun	7.569	8.318	15.887
63	62 tahun	7.619	7.797	15.416
64	63 tahun	5.928	6.280	12.208
65	64 tahun	7.686	8.729	16.415
66	65 tahun	6.683	6.833	13.516
67	66 tahun	5.760	6.582	12.342

No	Umur	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
68	67 tahun	5.356	5.728	11.084
69	68 tahun	5.205	5.768	10.973
70	69 tahun	5.104	5.593	10.697
71	70 tahun	5.141	4.838	9.979
72	71 tahun	3.948	4.246	8.194
73	72 tahun	4.046	3.904	7.950
74	73 tahun	3.264	3.156	6.420
75	74 tahun	3.967	4.494	8.461
76	75 tahun	2.490	2.653	5.143
77	76 tahun	2.405	2.800	5.205
78	77 tahun	1.821	2.223	4.044
79	78 tahun	1.711	2.062	3.773
80	79 tahun	2.185	2.853	5.038
81	80 tahun	1.408	1.596	3.004
82	81 tahun	1.482	1.920	3.402
83	82 tahun	1.776	1.847	3.623
84	83 tahun	973	1.084	2.057
85	84 tahun	1.635	2.239	3.874
86	85 tahun	753	953	1.706
87	86 tahun	824	1.030	1.854
88	87 tahun	577	751	1.328
89	88 tahun	546	689	1.235
90	89 tahun	567	856	1.423
91	90 tahun	380	447	827
92	91 tahun	358	466	824
93	92 tahun	298	370	668
94	93 tahun	192	214	406
95	94 tahun	353	400	753
96	95 tahun	89	105	194
97	96 tahun	112	102	214
98	97 tahun	77	80	157
99	98 tahun	39	49	88
100	99 tahun	42	59	101
101	100 tahun	28	30	58
102	101 tahun	19	24	43
103	102 tahun	12	19	31
104	103 tahun	6	7	13
105	104 tahun	10	9	19
106	105 tahun	1	0	1
107	106 tahun	2	1	3
108	107 tahun	2	1	3
109	108 tahun	1	3	4
110	109 tahun	2	1	3
111	110 tahun	0	1	1
112	111 tahun	0	0	0
113	112 tahun	1	0	1
114	113 tahun	0	0	0
115	114 tahun	1	0	1
Total Jumlah Penduduk				1.446.833
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas)				455.434
Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)				991.399
Rasio Ketergantungan				45,94%

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri RI, 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah (negara maupun daerah). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dapat diartikan semakin baik kondisi kehidupan masyarakat. Sepanjang Tahun 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen terus membaik. Dimulai dengan kontraksi sebesar -1,46% pada Tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kebumen terus menguat dalam nilai positif dengan puncaknya pada Tahun 2022 sebesar 5,79%, walaupun kemudian mengalami pelemahan namun masih tumbuh cukup tinggi hingga mencapai 5,30% pada Tahun 2024. Secara umum, kinerja pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Hanya pada Tahun 2021 dimana realisasi pertumbuhan ekonomi sedikit dibawah target sebesar 0,2% lebih rendah.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan 5 Kabupaten tetangga yang berbatasan, secara umum menunjukkan kinerja paling baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 adalah sebesar 3,80%, paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya termasuk nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Pada saat Tahun 2020, besarnya kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen juga masih lebih baik jika dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi Nasional, Jawa Tengah dan 4 Kabupaten sekitar, hanya sedikit di bawah Kabupaten Banjarnegara. Pada Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan hal yang sama dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen hanya sedikit di bawah Kabupaten Banyumas. Namun demikian, pada Tahun 2023 dan 2024 kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen adalah paling baik dibandingkan wilayah lainnya.

Tabel 2.16.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Nasional, Jawa Tengah dan Beberapa Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)									
	Kebumen			Nasional	Jateng	Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap
	Target RPJMD	Realisasi	Kinerja							
2020	-1,46	-1,45	100%	-2,07	-2,65	-1,61	-1,64	-1,32	-1,65	-10,28
2021	3,91	3,71	94,88%	3,7	3,33	3,31	3,68	3,26	4	2,15
2022	4,05-5,36	5,79	100%	5,31	5,31	5,36	5,02	5,29	5,86	5,15
2023	5,00-5,50	5,66	100%	5,05	4,98	5,07	4,3	4,98	5,4	5,34
2024	5,00-5,50	5,30	100%	5,03	4,95	4,79	4,57	5,11	5,29	2,65
Rata-rata Tahun 2020-2024		3,80	98,98%	3,40	3,18	3,38	3,19	3,46	3,78	1,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah), 2024

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Perhitungan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK adalah ukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, yang telah disesuaikan untuk menghilangkan efek inflasi. Dengan kata lain, PDRB ADHK mencerminkan nilai riil dari output ekonomi pada suatu tahun tertentu,

menggunakan harga pada tahun dasar yang ditentukan dimana di Indonesia menggunakan tahun dasar 2010. Kinerja PDRB ADHK Kabupaten Kebumen terus meningkat dari sebesar Rp.19.527.664,95 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp. 23.837.831,97 Juta pada Tahun 2024.

Tabel 2.17.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.055.807,44	4.239.152,12	4.189.036,42	4.283.174,36	4.394.026,19
B. Pertambangan dan Penggalan	842.752,08	850.877,10	851.047,28	846.792,04	882.669,96
C. Industri Pengolahan	3.963.952,93	4.085.490,86	4.365.019,99	4.640.375,19	4.918.654,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.630,46	16.349,67	17.182,85	17.682,99	18.231,57
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.968,55	11.100,23	11.209,74	11.645,43	12.115,51
F. Konstruksi	1.385.896,59	1.472.570,77	1.599.211,86	1.757.339,22	1.907.480,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.237.426,24	3.440.109,19	3.496.212,35	3.697.214,16	3.833.854,42
H. Transportasi dan Pergudangan	727.555,62	749.636,55	1.187.864,85	1.291.940,71	1.329.631,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	440.494,34	466.497,25	598.582,34	695.284,13	767.238,39
J. Informasi dan Komunikasi	745.170,06	790.000,20	808.565,21	888.136,11	964.891,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	538.860,89	548.322,26	561.273,86	569.863,61	589.259,06
L. Real Estate	286.655,36	290.795,36	310.394,97	328.659,74	345.835,30
M,N. Jasa Perusahaan	67.436,49	69.000,92	71.981,76	76.041,00	82.312,72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	613.989,23	623.610,44	631.717,38	661.274,87	712.046,99
P. Jasa Pendidikan	1.780.474,28	1.781.437,98	1.806.021,82	1.888.957,31	2.038.753,95
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	270.855,89	271.484,78	276.930,60	293.516,89	314.906,29
R,S,T,U. Jasa lainnya	543.738,50	546.623,75	643.540,14	690.997,57	725.924,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19.527.664,95	20.253.059,43	21.425.793,42	22.638.895,33	23.837.831,97

Sumber : BPS (data diolah), 2024

Selain PDRB ADHK, serta dalam memberikan gambaran tentang total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada harga pasar saat ini, yang penting untuk memahami ukuran ekonomi saat ini maka digunakan juga PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Selain itu. PDRB ADHB juga memberikan indikasi langsung tentang kinerja ekonomi dan daya beli masyarakat pada waktu tertentu. Hal ini penting karena PDRB ADHB nantinya dapat digunakan untuk menghitung pendapatan daerah termasuk pajak, serta untuk merencanakan anggaran pemerintah. Kinerja PDRB ADHB Kabupaten Kebumen terus meningkat dari sebesar Rp. 28.014.905,70 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp. 38.605.460,47 Juta pada Tahun 2024.

Tabel 2.18.
PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2024

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.105.107,94	6.469.211,83	6.655.983,90	7.162.479,09	7.668.796,25
B, Pertambangan dan Penggalian	1.424.906,39	1.454.544,00	1.500.371,24	1.534.944,15	1.601.739,75
C, Industri Pengolahan	5.956.770,04	6.299.969,84	7.101.867,11	7.954.081,95	8.757.899,27
D, Pengadaan Listrik dan Gas	18.912,40	19.665,06	20.888,46	21.876,35	22.624,43
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.911,21	13.200,54	13.553,80	14.197,72	15.644,17
F, Konstruksi	1.975.139,60	2.181.318,08	2.532.426,03	2.837.827,88	3.090.725,56
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.157.585,07	4.487.261,96	4.805.470,57	5.248.266,76	5.535.806,20
H, Transportasi dan Pergudangan	927.668,84	990.514,94	1.690.483,29	2.001.802,64	2.093.207,35
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	570.542,17	616.018,66	831.655,05	977.529,02	1.099.459,35
J, Informasi dan Komunikasi	714.059,50	757.250,00	775.122,88	852.798,14	931.654,07
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	806.819,75	853.342,46	939.806,35	973.874,46	1.018.454,57
L, Real Estate	341.523,26	349.855,69	379.186,88	405.690,13	428.979,04
M,N, Jasa Perusahaan	100.255,97	103.710,77	114.152,40	125.180,67	137.990,09
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	905.062,04	910.903,26	945.352,25	1.012.431,49	1.120.402,39
P, Jasa Pendidikan	2.918.317,40	2.963.036,01	3.032.069,94	3.238.801,50	3.567.119,77
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	387.883,94	392.340,56	405.493,45	438.817,94	482.459,51

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
R,S,T,U, Jasa lainnya	691.440,18	701.000,38	870.761,10	963.204,54	1.032.498,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	28.014.905,70	29.563.144,02	32.601.944,70	35.763.804,43	38.605.460,47

Sumber : BPS, 2024.

- Berdasarkan distribusi dan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2020-2024 seperti tercantum pada Tabel di bawah, dapat disimpulkan kondisi struktur ekonomi Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
1. Adanya perubahan kontribusi sektor utama PDRB sejak tahun 2022 dari sebelumnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan digantikan oleh sektor industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun kontribusinya terhadap PDRB dari 21,79% pada Tahun 2020 menurun menjadi 19,86% pada Tahun 2024 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2020-2024 sebesar 20,79%. Sebaliknya sektor industri pengolahan semakin meningkat kontribusinya terhadap PDRB dari 21,26% pada Tahun 2020 menjadi 22,69% pada Tahun 2024 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2020-2024 sebesar 21,85%.
 2. Menguatnya sektor industri pengolahan dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2020-2024 sebesar 4,58% untuk sektor industri pengolahan. Hal ini cukup jauh lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2020-2023 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,71%.
 3. Subsektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB adalah industri makanan dan minuman dari 13,15% pada Tahun 2020 menjadi 15,55% pada Tahun 2024 atau kontribusi rata-rata selama Tahun 2020-2024 sebesar 14,27%. Selain itu, subsektor industri makanan dan minuman selama Tahun 2020-2024 mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67% dibandingkan subsektor lain di industri pengolahan. Industri makanan dan minuman adalah subsektor produksi dan pengolahan makanan dan minuman dimana di Kabupaten Kebumen pada umumnya didominasi oleh IKM.
 4. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga yang berkontribusi bagi PDRB dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,75% selama Tahun 2020-2024. Berdasarkan data, menunjukkan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi lebih dari dua kali lipat dibandingkan subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya.
 5. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 10,78%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor yang menyangkut layanan yang menyediakan tempat tinggal sementara (hotel, penginapan) dan makanan/minuman untuk konsumen (restoran, tempat makan, katering). Berdasarkan data pertumbuhan sektor ini sangat didorong oleh pertumbuhan subsector penyediaan makan-minum (restoran, tempat makan, katering) yang mencapai rata-rata selama Tahun 2020-2024 sebesar 11,40% dibandingkan subsektor penyediaan akomodasi (hotel, penginapan) yang justru mengalami kontraksi selama Tahun 2020-2024 sebesar -1,27%.

6. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 10,13% yang menunjukkan semakin berkembangnya sektor tersebut di wilayah Kebumen yang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kebumen dilalui dan dekat dengan akses transportasi nasional bahkan inetrnasional yaitu, jalan nasional, jalur kereta termasuk terdapat beberapa stasiun kereta api, dekat dengan *Yogyakarta International Airport* dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Dengan kemudahan konektivitas ini memudahkan angkutan barang maupun orang dari dan ke Kabupaten Kebumen dengan berbagai wilayah di Pulau Jawa, Indonesia bahkan secara internasional. Dari data menunjukkan angkutan rel mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 11,81%.

Tabel 2.19.
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian		DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)						LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA 2020-2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		21,79	21,88	20,41	20,03	19,86	20,79	0,37	4,52	-1,18	2,25	2,59	1,71
Pertambangan dan Penggalian		5,09	4,92	4,60	4,29	4,15	4,61	2,41	0,96	0,02	-0,50	4,24	1,43
Industri Pengolahan		21,26	21,31	21,78	22,24	22,69	21,85	0,67	3,07	6,84	6,31	6,00	4,58
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Industri Makanan dan Minuman	13,15	13,56	14,20	14,87	15,55	14,27	3,26	5,03	9,07	7,94	8,06	6,67
3	Pengolahan Tembakau	2,93	2,58	2,52	2,45	2,38	2,57	-2,38	-7,91	1,89	3,34	2,27	-0,56
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,40	0,40	0,38	0,37	0,37	0,38	-11,47	3,98	2,67	4,42	3,80	0,68
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,79	0,78	0,77	0,74	0,72	0,76	-3,71	3,20	5,89	2,47	2,68	2,11
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,92	1,87	1,79	1,71	1,60	1,78	-2,79	1,24	1,47	1,39	-0,85	0,09
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,13	-2,20	6,32	0,59	0,12	0,99
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,20	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	3,88	8,76	5,39	4,58	0,79	4,68

Uraian		DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)						LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	RATA- RATA 2020- 2024	2020	2021	2022	2023	2024	RATA- RATA 2020- 2024
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	-9,81	2,26	3,39	4,83	4,49	1,03
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1,51	1,56	1,55	1,54	1,52	1,54	-3,25	6,16	4,45	5,24	3,86	3,29
11	Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	-8,29	1,20	1,16	-2,48	-1,05	-1,89
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	-4,34	1,23	-3,53	0,96	-0,87
14	Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,45	1,14	0,08	-4,11	-0,84	-1,24
15	Industri Furnitur	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09	-1,60	2,35	0,75	1,39	-0,11	0,56
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	-4,90	5,24	1,23	6,95	-0,39	1,63
Pengadaan Listrik dan Gas		0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	1,58	4,60	5,10	2,91	3,10	3,46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	2,54	1,20	0,99	3,89	4,04	2,53
Konstruksi		7,05	7,38	7,76	7,93	8,01	7,63	-3,26	6,25	8,60	9,89	8,54	6,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		14,84	15,18	14,73	14,67	14,34	14,75	-3,81	6,26	1,63	5,75	3,70	2,71
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4,23	4,60	4,17	4,01	3,80	4,16	-12,10	14,34	-2,82	2,23	0,46	0,42
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10,61	10,58	10,56	10,67	10,54	10,59	-1,02	3,85	3,09	6,84	4,65	3,48
Transportasi dan Pergudangan		3,31	3,35	5,18	5,60	5,42	4,57	-22,54	3,03	58,46	8,76	2,92	10,13
1	Angkutan Rel	0,07	0,07	0,12	0,13	0,14	0,11	-37,74	-4,36	81,76	10,91	8,47	11,81
2	Angkutan Darat	3,20	3,24	5,00	5,40	5,22	4,41	-22,18	3,15	58,16	8,73	2,83	10,14
3	Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,99	-4,36	1,29	-11,10	-4,51	-21,14
5	Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian		DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)						LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	RATA- RATA 2020- 2024	2020	2021	2022	2023	2024	RATA- RATA 2020- 2024
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,05	-29,05	2,38	58,26	8,76	2,82	8,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		2,04	2,08	2,55	2,73	2,85	2,45	-6,84	5,90	28,31	16,16	10,35	10,78
1	Penyediaan Akomodasi	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	-43,67	0,65	26,33	13,46	-3,14	-1,27
2	Penyediaan Makan Minum	1,95	2,00	2,45	2,63	2,76	2,36	-4,52	6,10	28,38	16,25	10,81	11,40
Informasi dan Komunikasi		2,55	2,56	2,38	2,38	2,41	2,46	14,21	6,02	2,35	9,84	8,64	8,21
Jasa Keuangan dan Asuransi		2,88	2,89	2,88	2,72	2,64	2,80	2,18	1,76	2,36	1,53	3,40	2,25
Real Estate		1,22	1,18	1,16	1,13	1,11	1,16	-0,06	1,44	6,74	5,88	5,23	3,85
Jasa Perusahaan		0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	-7,47	2,32	4,32	5,64	8,25	2,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		3,23	3,08	2,90	2,83	2,90	2,99	-1,30	1,52	1,35	4,68	7,68	2,79
Jasa Pendidikan		10,42	10,02	9,30	9,06	9,24	9,61	-0,28	0,05	1,38	4,59	7,93	2,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1,38	1,33	1,24	1,23	1,25	1,29	11,23	0,23	2,01	5,99	7,29	5,35
Jasa lainnya		2,47	2,37	2,67	2,69	2,67	2,58	-7,33	0,59	17,67	7,37	5,05	4,67

Sumber : BPS (data diolah), 2024.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di suatu daerah walaupun belum mencerminkan tingkat pemerataan. Seperti halnya PDRB, semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat sehingga standar hidup akan lebih baik. Kinerja PDRB per kapita Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 terus meningkat dari Rp.20,8 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp.27,29 Juta pada Tahun 2024. Akan tetapi, secara umum PDRB per kapita Kabupaten Kebumen masih lebih rendah baik dibandingkan Kabupaten yang berbatasan maupun dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hanya lebih tinggi dari Kabupaten Wonosobo mulai Tahun 2024. Namun demikian, jika dihitung tingkat pertumbuhan selama periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Kebumen sebesar 31,20% hanya dibawah Nasional dan Kabupaten Banyumas. Dengan terus memacu pertumbuhan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Kebumen akan terus meningkat mengejar ketertinggalan dari daerah lain sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.20.
PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, Nasional, Jawa Tengah dan Beberapa Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.Juta)							
	Kebumen	Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
2020	20,80	24,26	21,49	21,38	30,28	53,92	36,96	57,30
2021	21,69	25,31	22,38	22,26	31,79	55,74	38,57	62,30
2022	23,63	27,33	24,02	24,11	34,71	60,88	41,95	71,00
2023	25,59	29,42	25,65	25,96	37,60	65,95	45,20	74,96
2024	27,29	31,19	27,19	27,64	40,15	67,08	47,97	78,61
Pertumbuhan Tahun 2020-2024	31,20%	28,57%	26,52%	29,28%	32,60%	24,41%	29,79%	37,19%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

d. Laju Perubahan Tingkat Harga

Untuk mengukur laju perubahan (kenaikan/penurunan) tingkat harga sekelompok barang dan jasa secara umum menggunakan laju inflasi. Namun demikian mengingat Kabupaten Kebumen bukan wilayah yang terpilih sample SBH (Survei Biaya Hidup), maka dalam perhitungan IHK (Indeks Harga Konsumen) menggunakan diagram timbang Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama dan letak geografis yang berdekatan yaitu Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Berdasarkan data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS, menunjukkan adanya kenaikan inflasi yang sangat signifikan pada Tahun 2022 yang merupakan fenomena global. Namun demikian inflasi di kota Purwokerto dan Cilacap serta di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung terus melandai dan dapat terkendali hingga mencapai di bawah 2% pada Tahun 2024, dimana *targeting inflation* tingkat nasional yang dikeluarkan Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan adalah pada *range* 3±1% setiap tahun. Pada tingkat ini, inflasi yang moderat, rendah dan terkendali diharapkan dapat menciptakan ruang untuk pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan ketidakstabilan harga. Beberapa alasan mengapa inflasi diharapkan moderat, rendah dan terkendali dianggap baik yaitu:

- 1. Inflasi yang moderat dapat mendorong konsumsi dan investasi, karena konsumen cenderung membeli sekarang daripada menunggu harga naik lebih tinggi;
- 2. Inflasi yang rendah membantu mencegah deflasi, yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan dan perlambatan ekonomi; serta
- 3. Inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi pelaku bisnis dalam merencanakan harga dan biaya.

Namun, penting untuk diingat bahwa inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, menjaga inflasi dalam rentang yang stabil adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.21.
Inflasi Purwokerto, Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi (%)			
	Purwokerto	Cilacap	Jateng	Nasional
2020	1,9	1,71	1,56	1,68
2021	2,18	1,88	1,7	1,87
2022	6,49	6,81	5,63	5,51
2023	2,61	2,69	2,89	2,61
2024	1,51	1,82	1,67	1,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Alat ukur lain yang dapat menggambarkan laju perubahan harga adalah laju indeks harga implisit PDRB atau juga disebut deflator PDRB. Indeks ini menghitung perbandingan antara nilai nominal PDRB (yang dihitung berdasarkan harga saat ini) dan nilai riil PDRB (yang dihitung berdasarkan harga konstan). Indeks ini membantu dalam memahami tingkat inflasi dalam perekonomian serta memberikan informasi tentang kinerja ekonomi dan perubahan daya beli masyarakat. Berbeda dengan perhitungan inflasi secara umum yang biasanya menggunakan IHK dan IHP (Indeks Harga Produsen), sebagai perbandingan perhitungan inflasi secara deflator ini menunjukkan perubahan harga seluruh sektor PDRB mencakup semua barang dan jasa dalam perekonomian baik harga bahan baku, produk setengah jadi, produk akhir, dan layanan/jasa.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS menunjukkan laju indeks harga implisit PDRB Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2023 memiliki pola serta *range* yang sama dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Namun pada Tahun 2024 laju indeks harga implisit PDRB Kabupaten Kebumen adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional walaupun sejak Tahun 2022 terus menurun hingga menjadi 2,52%. Dari data juga menunjukkan laju indeks harga implisit PDRB Kabupaten Kebumen cenderung lebih dekat dengan laju indeks harga implisit PDRB Kabupaten Banyumas yang cukup tepat menjadi *sister city* dalam perhitungan inflasi.

Tabel 2.22.
Laju Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kebumen, Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah dan Laju Indeks Harga Implisit PDB Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Laju Indeks Harga Implisit PDRB/PDB (%)				
	Kebumen	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
2020	1,76	1,18	2,11	1,69	-0,4
2021	1,75	1,95	2,68	1,99	6
2022	4,28	4,26	4,96	4,31	9,57
2023	3,78	3,84	3,88	3,64	1,53
2024	2,52	2,46	0,03	2,15	0,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Kabupaten Kebumen selama ini juga terus berupaya ikut mengendalikan perubahan tingkat harga, utamanya di tingkat konsumen dengan menggelar Gerakan Pangan Murah. Gerakan Pangan Murah ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan pokok dan strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Adapun bentuk dari kegiatan ini berupa bazar yang menyajikan produk kebutuhan pokok. Gerakan Pangan Murah tidak hanya diikuti oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mampu urusan terkait ketahanan pangan, melainkan diikuti pula oleh Bulog, BUMD, serta stakeholder lain yang digandeng Pemerintah Kabupaten Kebumen.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Kinerja TPT Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2023

terus membaik dari 6,07% pada Tahun 2020 menjadi 5,07% pada Tahun 2024. Tingkat ketercapaian dibandingkan target yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menunjukkan mendekati 100% pada Tahun 2021-2022 dan berhasil jauh lebih baik pada Tahun 2023-2024.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten yang berbatasan, TPT Kabupaten Kebumen masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purworejo yang telah mencapai dibawah 4% dan Wonosobo yang sudah mencapai sekitar 4%, namun demikian masih lebih baik dibandingkan Kabupaten tetangga yang lainnya. Akan tetapi TPT Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 masih lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang telah mencapai di bawah 5%.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi dan tingkat perubahan harga yang moderat seperti ini cukup mampu mengurangi TPT di Kabupaten Kebumen. Namun demikian, kinerja penurunan TPT relatif kecil pada Tahun 2024 yaitu hanya 0,04% dibandingkan Tahun 2023 yang mampu turun sebesar 0,81% dibandingkan Tahun 2022. Hal ini terjadi walaupun terdapat penerimaan sekitar 1.700 tenaga kerja yang dipekerjakan pada perusahaan manufaktur baru di wilayah Kebumen, namun juga terdapat PHK sekitar 252 tenaga kerja pada 4 perusahaan yang tutup di Tahun 2024. Untuk itu, dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen terus dilakukan kolaborasi semua stakeholder utamanya Perangkat Daerah terkait, Balai Latihan Kerja hingga Lembaga Pelatihan Kerja. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan UMK/IKM yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, serta pelatihan dan penempatan tenaga kerja termasuk di luar negeri.

Tabel 2.23.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka		2020	2021	2022	2023	2024
Kebumen	Target RPJMD	6,07	5,80	5,51-5,58	5,40-5,50	5,30-5,40
	Realisasi	6,07	6,03	5,92	5,11	5,07
	Kinerja	100%	96,19%	94,26%	100%	100%
Purworejo		4,04	3,59	4,45	4,02	3,89
Wonosobo		5,37	5,26	5,01	4,95	4,02
Banjarnegara		5,86	5,86	6,38	6,26	5,57
Banyumas		6,00	6,05	6,05	6,35	6,18
Cilacap		9,10	9,97	9,62	8,74	7,83
Jawa Tengah		6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
Nasional		7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : BPS, 2024

f. Ketimpangan

Ketimpangan secara umum diukur menggunakan rasio gini yaitu sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna merata (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang ekstrem (semua pendapatan berada di tangan satu orang). Secara umum rasio gini kurang dari 0,3 dianggap ketimpangan rendah, rasio gini 0,3 hingga 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 dianggap ketimpangan tinggi.

Berdasarkan data BPS, rasio gini Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 0,328 pada Tahun 2020 menjadi 0,354 pada Tahun 2022, namun demikian kembali menurun menjadi 0,327 pada Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan rasio gini di Kabupaten yang berbatasan, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional menunjukkan rasio gini Kabupaten Kebumen lebih rendah yang menunjukkan ketimpangan di Kabupaten Kebumen lebih rendah. Dengan rasio gini di sekitar 0,3 menunjukkan ketimpangan di Kabupaten Kebumen masuk dalam kategori sedang.

Tabel 2.24.
Rasio Gini Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Gini							
	Kebumen	Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
2020	0,328	0,356	0,36	0,372	0,358	0,368	0,362	0,38
2021	0,35	0,337	0,384	0,365	0,364	0,34	0,372	0,38
2022	0,354	0,353	0,363	0,365	0,353	0,356	0,374	0,38
2023	0,333	0,337	0,356	0,376	0,397	0,364	0,369	0,39
2024	0,327	0,354	0,334	0,357	0,385	0,355	0,367	0,38

Sumber : BPS, 2024

BPS sendiri belum menjamin setiap tahun akan merilis data rasio gini hingga tingkat Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu untuk mengukur ketimpangan juga dapat menggunakan indikator distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia yang membagi 3 kelompok masyarakat yaitu 20% masyarakat dengan pendapatan teratas, 40% masyarakat dengan pendapatan menengah dan 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah. Ketimpangan sendiri dalam indikator distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia diukur berdasarkan 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah hanya memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan tinggi;
2. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah memperoleh pendapatan antara 12% hingga kurang dari 17% dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan sedang; serta
3. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah dapat memperoleh pendapatan sebesar 17% atau lebih dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2.25.
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Distibusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk 40% Pendapatan Terendah (%)									
	Kebumen			Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
	Target	Realisasi	Kinerja							
2020	20,02	20,02	100%	19,76	18,76	17,92	18,47	18,23	18,53	17,73
2021	20,45	19,3	94,38%	20,24	17,61	18,19	18,85	20,31	18,34	17,76
2022	20,50 - 21,00	19,86	96,88%	20,1	18,61	18,74	19,33	19,39	18,51	18,06
2023	21	20,38	97,05%	20,76	19,35	18,48	17,32	19,27	18,74	18,04
2024	21,00 - 21,50	20,76	98,86%	19,71	20,35	18,93	18,65	19,38	18,90	18,40

Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan data distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia yang merupakan hasil Susenas BPS menunjukkan ketimpangan di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif membaik dari 20,02% pada Tahun 2020 menjadi 20,76% pada Tahun 2024. Kecenderungan fluktuatif ini sangat dipengaruhi oleh indikator makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat harga maupun TPT. Hal ini dikarenakan masyarakat terbawah cenderung mendapatkan penghasilannya tidak tetap atau bersifat harian dan akan dihabiskan untuk membiayai pengeluaran pada saat itu juga sehingga akan sangat dipengaruhi utamanya oleh perubahan tingkat harga yang berfluktuatif setiap hari.

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menunjukkan realisasi kinerja masih sedikit dibawah 100%. Secara umum ketimpangan di Kabupaten Kebumen masih lebih baik jika dibandingkan seluruh kabupaten tetangga, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Dengan 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah dapat memperoleh pendapatan sebesar 17% atau lebih dari total pendapatan baik di Kabupaten Kebumen dan wilayah lain yang terdapat dalam tabel, menunjukkan masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

g. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Data terkait kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Secara umum tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh indikator makro yang lain baik pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB per kapita, inflasi maupun TPT.

Tabel 2.26.
Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – 2024

Profil Kemiskinan		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	Target pada RPJMD	17,59%	16,85%	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00
	Realisasi	17,59%	17,83%	16,41%	16,34%	15,71%
	Kinerja	100%	94,50%	100%	97,92%	95,48%
Jumlah Penduduk Miskin		211.090	212.900	196.160	195.450	187.950
Garis Kemiskinan		380.557	390.599	416.004	451.678	471.824
Kenaikan Garis Kemiskinan		4,88%	2,64%	6,50%	8,58%	4,46%
Inflasi (deflator)		1,76%	1,75%	4,28%	3,78%	2,52%
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		2,62	3,24	3,41	2,89	2,35
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		0,55	0,88	1,02	0,75	0,48

Sumber : BPS 2024

Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan hasil yang membaik. Tingkat kemiskinan sempat kembali meningkat dari 17,59% pada Tahun 2020 menjadi 17,83% pada Tahun 2021 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19. Namun demikian dengan semakin membaiknya perekonomian daerah mampu memperbaiki kinerja tingkat kemiskinan yang terus menurun menjadi 15,71% pada Tahun 2024. Secara umum kinerja penurunan tingkat kemiskinan setiap tahun telah hampir mencapai 100% jika dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin. Walaupun sempat meningkat dikarenakan Pandemi Covid-19 dari 211.090 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 212.900 pada Tahun 2021, pasca pandemi jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 187.950 jiwa pada Tahun 2024.

Kenaikan garis kemiskinan menjadi salah satu isu dalam penanggulangan kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus merangkak naik dari Rp.380.557,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.471.824,00 pada Tahun 2024. Walaupun kenaikan garis kemiskinan dapat berarti terjadinya peningkatan standar hidup, namun disisi lain kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan garis kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan inflasi (menggunakan perhitungan deflator) tahun sebelumnya cukup mempengaruhi kenaikan garis kemiskinan berikutnya. Sebagai contoh seperti yang tercantum dalam tabel, ketika terjadi kenaikan inflasi tertinggi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 4,28% menyebabkan kenaikan garis kemiskinan tertinggi di tahun berikutnya yaitu sebesar 8,58% pada Tahun 2023. Untuk itu kenaikan garis kemiskinan seharusnya diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Kinerja Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi kinerja P1 maupun P2 yang meningkat dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 dan kembali meningkat pada Tahun 2021 ke Tahun 2022 yang lebih dikarenakan pengaruh inflasi pada tahun yang sama. Kinerja P1 dan P2 terus membaik di Tahun 2023 dan 2024 dengan semakin membaiknya perekonomian daerah pasca Pandemi Covid-19 serta semakin terkendalinya tingkat inflasi secara bersamaan. Penurunan P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk

miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan, sedangkan penurunan P2 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan selama kurun waktu 2020-2024 dengan Kabupaten berbatasan, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Secara umum fluktuasi tingkat kemiskinan memiliki pola yang sama yaitu sempat meningkat pada Tahun 2021 dikarenakan Pandemi Covid-19. Walaupun Kabupaten Kebumen masih menjadi Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, akan tetapi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan utamanya dengan pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan yang tepat lokus, fokus maupun tepat secara waktu. Keberhasilan upaya ini bisa terlihat dengan kinerja penurunan tingkat kemiskinan selama Tahun 2020-2024 Kabupaten Kebumen mencapai 1,88% hanya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 2,08%. Namun demikian dengan terus pulihnya perekonomian daerah pasca Pandemi Covid-19 dan semakin terkendalinya inflasi menunjukkan kinerja penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2023-2024 menunjukkan kinerja paling baik dibanding wilayah lain dalam tabel yaitu sebesar 0,63%.

Tabel 2.27.
Perbandingan Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	% Penduduk Miskin					% Kinerja Penurunan 2020-2024	% Kinerja Penurunan 2023-2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Kebumen	17,59	17,83	16,41	16,34	15,71	1,88	0,63
Purworejo	11,78	12,40	11,53	11,33	10,87	0,91	0,46
Wonosobo	17,36	17,67	16,17	15,58	15,28	2,08	0,3
Banjarnegara	15,64	16,23	15,20	14,90	14,71	0,93	0,19
Banyumas	13,26	13,66	12,84	12,53	11,95	1,31	0,58
Cilacap	11,46	11,67	11,02	10,99	10,68	0,78	0,31
Jawa Tengah	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47	0,94	0,3
Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03	0,75	0,33

Sumber : BPS 2024

Sementara itu sejak tahun 2021 jika dihitung angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pada Tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen tercatat 4,42% dan meningkat menjadi 5,52% pada Tahun 2022 yang merupakan angka tertinggi di Jawa Tengah. Namun demikian dengan berbagai upaya yang telah dilakukan secara integratif, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen terus menurun menjadi 1,25% pada Tahun 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan Kabupaten Rembang, Sragen, Purworejo, Cilacap, Magelang dan Wonosobo.

Tabel 2.28.

Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024

Uraian	% Penduduk Miskin					% Kinerja Penurunan 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen	BELUM DI HITUNG	4,42	5,51	2,49	1,25	3,17

Sumber : Kemenko PMK, 2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Tabel 2.29.

Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Kinerja Kenaikan 2023-2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kebumen	Target dalam RPJMD	69,81	70	70,57	71	71,50	
	Realisasi	70,32	70,56	71,29	71,88	72,48	0,6
	Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	0
Purworejo		72,76	73,06	73,67	74,35	75,16	0,81
Wonosobo		69,04	69,24	69,69	70,18	70,63	0,45
Banjarnegara		67,46	67,87	68,62	69,16	69,62	0,46
Banyumas		72,13	72,59	73,3	73,96	74,52	0,56
Cilacap		70,19	70,66	71,22	72,04	72,55	0,51
Jawa Tengah		71,88	72,17	72,8	73,39	73,87	0,48
Nasional		72,81	73,16	73,77	74,39	75,02	0,63

Sumber : BPS 2024

Kinerja IPM Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana sejak tahun 2020 telah mencapai lebih dari 70, yaitu sebesar 70,32, menjadi 72,48 pada Tahun 2024. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Dengan demikian sejak Tahun 2020, kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi. Realisasi kinerja IPM setiap tahun juga telah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional menunjukkan IPM Kabupaten Kebumen hanya lebih baik dari Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Namun demikian, kinerja selama Tahun 2023-2024 yang mencapai kenaikan IPM sebesar 0,6 menunjukkan hanya kalah cepat dari kinerja Kabupaten Purworejo dan Nasional. Peningkatan IPM Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh peningkatan komponen pembentuknya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Pengeluaran Perkapita, sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas (pada saat sekarang) untuk mengenyam pendidikan formal pada masa mendatang.

Tabel 2.30.
Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian		Harapan Lama Sekolah (HLS dalam Tahun)					Kinerja Kenaikan 2023-2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kebumen	Target dalam RPJMD	13,34	13,44	13,54	13,64	13,74	
	Realisasi	13,34	13,35	13,36	13,37	13,39	0,02
	Kinerja	100%	99,33%	98,67%	98,02%	97,45%	
Purworejo		13,5	13,51	13,52	13,53	13,55	0,02
Wonosobo		11,75	11,76	11,78	11,8	11,81	0,01
Banjarnegara		11,46	11,63	11,81	11,82	11,83	0,01
Banyumas		12,85	13,03	13,21	13,26	13,34	0,08
Cilacap		12,5	12,63	12,66	12,67	12,69	0,02
Jawa Tengah		12,7	12,77	12,81	12,85	12,86	0,01
Nasional		12,98	13,08	13,1	13,15	13,21	0,06

Sumber : BPS 2024

Sesuai data BPS, kinerja HLS Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 13,34 tahun pada Tahun 2020 menjadi 13,39 tahun pada Tahun 2024. Hal ini dapat diartikan anak berusia 7 tahun atau lebih saat ini berpeluang dapat mengenyam pendidikan hingga lebih dari 1 tahun kuliah (atau dapat mengenyam pendidikan hingga lebih dari diploma 1). Walaupun demikian kinerja HLS ini masih sedikit dibawah target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten tetangga, menunjukkan HLS Kabupaten Kebumen hanya lebih rendah dari Kabupaten Purworejo dan Banyumas serta lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Peningkatan kinerja selama Tahun 2023-2024 sebesar 0,02 menunjukkan hanya kalah dari Kabupaten Banyumas dan tingkat Nasional.

Cukup tingginya HLS di Kabupaten Kebumen dikarenakan wilayahnya yang dekat dengan kota-kota yang memiliki perguruan tinggi bereputasi baik seperti Yogyakarta, Surakarta dan Purwokerto. Secara umum banyak warga Kabupaten Kebumen yang melanjutkan kuliah di kota-kota tersebut. Selain itu, semakin berkembang kehadiran perguruan tinggi di Kabupaten Kebumen termasuk Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang memiliki kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Selain itu mulai Tahun 2024, UNS juga membuka program studi reguler diluar PGSD.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah mengalokasikan beasiswa bagi warga untuk dapat berkuliah di antaranya di Universitas Terbuka, Universitas Pertamina dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Hal ini dilakukan selain dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya secara akademik, juga dapat memberikan pengalaman kehidupan kampus yang mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kebumen di tengah ketatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan maupun berusaha.

2. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Tabel 2.31.
Perbandingan Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian		Rata-rata Lama Sekolah (RLS dalam Tahun)					Kinerja Kenaikan 2023-2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kebumen	Target dalam RPJMD	7,54	7,64	7,74	7,84	7,94	
	Realisasi	7,54	7,55	7,85	7,86	7,87	0,01
	Kinerja	100%	98,82%	100%	100%	99,12%	
Purworejo		8,12	8,21	8,32	8,46	8,65	0,19
Wonosobo		6,81	6,82	6,88	6,89	6,90	0,01
Banjarnegara		6,74	6,75	6,84	6,86	6,87	0,01
Banyumas		7,52	7,63	7,78	7,87	7,91	0,04
Cilacap		6,97	7,09	7,18	7,39	7,40	0,01
Jawa Tengah		7,69	7,75	7,93	8,01	8,02	0,01
Nasional		8,48	8,54	8,69	8,77	8,85	0,08

Sumber : BPS 2024

Kinerja RLS Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 7,54 pada Tahun 2020 menjadi 7,87 pada Tahun 2024. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,87 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Sementara itu, mendasari target RLS pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

menunjukkan pada Tahun 2021 dan 2024 sedikit di bawah target sedangkan pada Tahun 2022-2023 telah melebihi target.

Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten tetangga, menunjukkan RLS Kabupaten Kebumen masih di bawah Kabupaten Purworejo dan Banyumas serta juga masih di bawah tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan kinerja selama Tahun 2023-2024 yang hanya mengalami kenaikan 0,01 menunjukkan kalah cepat dengan kinerja Kabupaten Banyumas dan Purworejo serta Nasional.

Masih lemahnya kinerja RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2020-2024. Faktor penghambat kinerja RLS di Kabupaten Kebumen selain kondisi sosial dan ekonomi beberapa kelompok masyarakat, adalah masih rendahnya RLS pada penduduk usia tua ataupun lanjut usia dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program Kejar Paket A, B maupun C. Selain itu peningkatan kemudahan akses pelayanan pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) juga terus ditingkatkan

3. Usia Harapan Hidup (UHH)

Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. UHH merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan IPM. Kinerja UHH Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 74,58 tahun pada Tahun 2020 menjadi 75,22 tahun pada Tahun 2024. Realisasi kinerja IPM setiap tahun juga telah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Semakin meningkatnya UHH di Kabupaten Kebumen mengindikasikan bahwa derajat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen semakin membaik.

Tabel 2.32.
Perbandingan Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian		Usia Harapan Hidup (UHH dalam Tahun)					Kinerja Kenaikan 2023-2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kebumen	Target dalam RPJMD	73,4	73,5	73,6	73,7	73,8	
	Realisasi	74,58	74,73	74,85	74,98	75,22	0,24
	Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	
Purworejo		74,91	75,05	75,2	75,37	75,64	0,27
Wonosobo		73,7	73,82	73,89	74,01	74,25	0,24
Banjarnegara		74,21	74,31	74,4	74,5	74,70	0,2
Banyumas		74,05	74,13	74,16	74,2	74,34	0,14
Cilacap		74,28	74,45	74,59	74,73	74,97	0,24
Jawa Tengah		74,39	74,49	74,58	74,69	74,91	0,22
Nasional		73,37	73,46	73,7	73,93	74,15	0,22

Sumber : BPS 2024

Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten tetangga, menunjukkan UHH Kabupaten Kebumen hanya lebih rendah dari Kabupaten Purworejo dan juga lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Peningkatan kinerja selama Tahun 2023-2024 sebesar 0,24 juga hanya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Purworejo. Cukup tingginya UHH di Kabupaten Kebumen menunjukkan sudah cukup baiknya kualitas akses dan pelayanan kesehatan serta ketahanan pangan. Namun demikian kemudahan dan peningkatan kualitas akses pelayanan kesehatan terus dilakukan diantaranya dengan cakupan *coverage* Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kebumen yang semakin mendekati 100%. Selain itu juga terus dilakukan peningkatan ketahanan pangan serta perbaikan gizi masyarakat diantaranya dengan program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak hingga lanjut usia, serta bagi ibu hamil dan balita sebagai bagian upaya penanganan *stunting*.

b. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi masing-masing anggota rumah tangga (individu) selama setahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (tingkat harga/inflasi dan besarnya standar biaya hidup di masing-masing wilayah/daerah). Pengeluaran per kapita menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Semakin tinggi pengeluaran per kapita berarti semakin tinggi kemampuan daya belinya sehingga semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi pengeluaran per kapita masing-masing individu di suatu daerah juga menunjukkan semakin kuatnya perekonomian di daerah tersebut.

Tabel 2.33.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Kebumen, Puroworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)					% Pertumbuhan 2023-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kebumen	8.901.000	9.028.000	9.282.000	9.734.000	10.176.000	4,54%
Purworejo	10.163.000	10.275	10.671.000	11.110.000	11.584.000	4,27%
Wonosobo	10.621.000	10.760	11.108.000	11.577.000	11.980.000	3,48%
Banjarnegara	9.263.000	9.407	9.776.000	10.226.000	10.595.000	3,61%
Banyumas	11.448.000	11.546	11.905.000	12.492.000	12.960.000	3,75%
Cilacap	10.440.000	10.534	10.904.000	11.432.000	11.868.000	3,81%
Jawa Tengah	10.930.000	11.034.000	11.377.000	11.835.000	12.276.000	3,73%
Nasional	11.013.000	11.156.000	11.479.000	11.899.000	12.341.000	3,71%

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data BPS menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp.8.910.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.10.176.000,00 pada Tahun 2024. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabuoaten Kebumen masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Seperti halnya RLS, pengeluaran per

kapita dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2020-2024. Hal ini terlihat dalam tabel, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen adalah yang terendah dibandingkan semua wilayah. Walaupun demikian pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2023-2024 yaitu sebesar 4,54% dibandingkan wilayah lainnya dalam tabel. Peningkatan per kapita masyarakat terus ditingkatkan dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan agar meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, upaya pengendalian harga juga terus di lakukan agar kemampuan daya beli masyarakat lebih meningkat selanjutnya pengeluaran per kapita dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni, budaya dan olahraga akan menjadi salah satu aspek untuk mewujudkan arah pembangunan ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 yaitu pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter. Pembangunan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter dalam ketahanan sosial budaya diwujudkan dalam proses pembangunan Kabupaten Kebumen di tengah modernisasi dan globalisasi yang dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir, perilaku, identitas, dan karakter masyarakat. Pembangunan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter dalam ketahanan sosial budaya untuk mencegah berbagai dampak negatif akibat pengaruh global.

Tabel 2.34.
Profil Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022		2023	2024
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (Persen)	2,19%	5,19%	5,19%		4,61%	11,50%
Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)	112.644	88.889	163.421		158.758	46.636
Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (Persen)	0,21%	0,20%	9,10%		87,53%	46%
Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengurusutamakan kebudayaan (Persen)	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA		63,57	64,07
Indeks Kesalehan Sosial (Angka)	Target dalam RPJMD	N/A	75,70	76,00-76,50	77,00-77,50	78,00-78,50
	Realisasi	N/A	75,70	80,36	82,16	82,38
	Kinerja	N/A	100%	100%	100%	100%
Prestasi Olah Raga (Jumlah perolehan medali pada even olahraga nasional dan internasional)	0	0	17		15	44

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, 2024

Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter diantaranya dinilai dari kinerja bidang kebudayaan dan pendidikan yang terkait kebudayaan. Hal ini tercermin dari kinerja persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan terus meningkat dari 2,19% pada Tahun 2020 menjadi 11,50% pada Tahun 2024. Terdapat 10 cagar budaya yang dilestarikan yaitu Benteng Van Der Wijck, Masjid Soko Tunggal, Rumah Sakit DKT Gombong, Gudang SMP Negeri 1 Prembun, Makam Kolopaking, Makam Tirtokusumo, Makam Purbanegara, Makam Bodronolo, Punden Berundak Lurah Karsa di Desa Giyanti dan Lingga Yoni di Desa Sumberadi. Sementara itu terdapat 2 warisan budaya tak benda yang dilestraikan yaitu kesenian Jamjaneng dan Cepetan.

Sementara itu, jumlah pengunjung tempat bersejarah cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 112.644 orang pada Tahun 2020 menjadi 46.636 orang pada Tahun 2024 dimana data diambil dari jumlah kunjungan terhadap 10 cagar budaya seperti tercantum di atas. Penurunan kunjungan ke tempat bersejarah dikarenakan wisatawan lebih tertarik mengunjungi obyek wisata terbaru yang lebih menarik dan *instagramable* untuk ditampilkan di akun media sosial mereka. Selain itu, kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir terus sempat meningkat dari 0,21% pada Tahun 2020 menjadi 87,53% pada Tahun 2023, namun turun menjadi 46% dikarenakan penurunan penyelenggaraan even di tahun 2024 mengingat sebagai tahun politik. Sedangkan satuan pendidikan yang telah memiliki guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan juga meningkat dari 63,57% pada Tahun 2023 menjadi 64,07% pada Tahun 2024. Ke depan hal ini menjadi penting dan akan terus dikembangkan mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen telah masuk dalam wilayah Geopark Kebumen yang telah diakui sebagai *Global Geopark* oleh UNESCO pada Tahun 2025 dimana salah satunya adalah pengembangan *cultural diversity*.

Sejak tahun 2021 Kabupaten Kebumen juga telah menghitung Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Penghitungan IKS Kabupaten Kebumen menyesuaikan perhitungan kesalehan sosial yang telah banyak dipakai dalam penelitian yang meliputi (Mahfud S, 1994):

1. Solidaritas sosial, adalah kesediaan untuk memberi dan peduli kepada orang lain tanpa mengharap imbalan;
2. Kerja sama atau mutualitas adalah melakukan pekerjaan atau aktivitas secara bersama sama berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama pula;
3. Toleransi ialah mampu menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, tidak memaksakan nilai pada orang lain serta tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda;
4. Adil dan seimbang merupakan perilaku yang mampu bertindak sesuai dengan proporsi, tersedianya kesempatan yang sama dalam bekerja dan beraktualisasi; dan
5. Menjaga ketertiban umum yaitu suatu tindakan yang berhubungan dengan orang lain tanpa mengganggu, merugikan dan melanggar kesejahteraan orang lain.

Selain itu, kesalehan sosial juga dipengaruhi faktor pengetahuan tentang kesalehan sosial, dan pengetahuan berpengaruh terhadap praktik-praktik kesalehan sosial. Pengetahuan dan praktik kesalehan sosial dipengaruhi faktor-faktor pendidikan, pendapatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan status keagamaan (tokoh agama, pengurus atau jamaah). Kemudian kesalehan sosial juga dipengaruhi faktor kesalehan individu yang digambarkan dengan ibadah rutinitas/ritual keagamaan masing-masing individu. Kinerja IKS Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 75,70 pada Tahun 2021 menjadi 82,38 pada Tahun 2024 dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Hal ini dapat terjadi karena dukungan

yang besar dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengembangan keagamaan seperti bantuan tempat ibadah, pondok pesantren, organisasi keagamaan hingga acara keagamaan.

Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter juga dapat didukung oleh pengembangan olahraga utamanya membentuk karakter yang kuat dan sehat secara jasmani. Oleh karena itu, Kabupaten Kebumen juga terus mengembangkan olahraga prestasi. Hal ini tercermin dari keberhasilan atlet Kabupaten Kebumen memperoleh medali pada even olahraga nasional dan internasional. Dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19, pada Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat even olahraga yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional. Baru pada Tahun 2022 mulai diselenggarakan even kembali diantaranya penyelenggaraan Porprov, Pra PON dan PON. Prestasi atlet Kabupaten Kebumen terus meningkat dari memperoleh sebanyak 17 medali pada Tahun 2022 menjadi memperoleh sebanyak 44 medali pada Tahun 2024. Peningkatan kinerja olahraga terus meningkat diantaranya banyaknya dukungan Pemerintah Daerah diantaranya dengan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlet hingga penyelenggaraan dan pengiriman atlet ke even olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mengelola potensi yang ada pada anak usia sekolah melalui pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Selain itu, penduduk non usia sekolah juga mendapatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan non formal. Secara umum bidang pendidikan akan mendukung pencapaian IPM beserta kedua komponennya yaitu HLS dan RLS. Gambaran secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat sebagai berikut:

1) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan mengukur tingkat pencapaian pendidikan suatu populasi yang diperoleh dari perhitungan komponen IPM dimensi pendidikan yaitu RLS dan HLS. Dalam perhitungannya batas atas untuk RLS adalah 15 tahun (setara dengan tingkat Pendidikan sarjana) dan untuk HLS adalah 18 tahun (perkiraan maksimum dalam sistem pendidikan formal). Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen relatif meningkat dari 62,20 pada Tahun 2020 menjadi 63,34 pada Tahun 2024. Dengan capaian baru sekitar 63,34 menunjukkan perlu upaya peningkatan RLS maupun HLS agar mencapai skala maksimum 100 yaitu RLS sebesar 15 tahun dan HLS sebesar 18 tahun.

Tabel 2.35.
Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	62,20	62,25	63,28	63,34	63,34

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

2) **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APS adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan formal pada kelompok usia tertentu. APS mencakup seluruh penduduk yang bersekolah pada kelompok usia tertentu, tanpa memperhatikan apakah mereka berada di tingkat pendidikan yang sesuai umur. APS mencerminkan proporsi penduduk suatu kelompok usia yang sedang bersekolah yang dapat menilai keberhasilan akses pendidikan (wajib belajar) di suatu wilayah.

Kinerja APS untuk kelompok usia 5-6 tahun terus meningkat dari 41,38% pada Tahun 2020 menjadi 85,86% pada Tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan semakin mudahnya akses dan fasilitas pendidikan anak usia dini serta meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sejak dini. Sementara itu belum diperoleh data untuk Jawa Tengah dan Nasional sehingga belum dapat diperbandingkan.

Kinerja APS untuk kelompok usia 7-12 tahun relatif terus meningkat dari 99,58% pada Tahun 2020 menjadi 99,74% pada Tahun 2023 dan menurun sedikit menjadi 99,73% pada Tahun 2024. Seperti halnya pada usia 7-12 tahun, kinerja APS untuk kelompok usia 13-15 tahun juga relatif terus meningkat dari 99,03% pada Tahun 2020 menjadi 99,56% pada Tahun 2024. Secara umum APS pada kedua kelompok usia ini telah mendekati 100% yang menunjukkan akses pendidikan yang merata serta orang tua dan masyarakat yang telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Belum mencapai 100% dapat diindikasikan masih terdapat jumlah anak usia di luar target yang mungkin tidak terlayani semisal anak-anak berkebutuhan khusus, anak terlantar maupun anak jalanan. Jika dibandingkan dengan kinerja APS di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, kinerja APS kedua kelompok usia tersebut di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 cenderung terus meningkat dan relatif lebih tinggi.

Sementara itu kinerja APS untuk kelompok usia 16-18 tahun cenderung menurun dari 79,84% pada Tahun 2020 menjadi 77,32% pada Tahun 2024. Dikarenakan pada usia ini sebagian besar mengenyam pendidikan SMA/SMK yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mengoordinasikannya agar akses terhadap pelayanan pendidikan SMA/SMK terus meningkat. Walaupun cenderung menurun, kinerja APS Kabupaten Kebumen pada kelompok usia 16-18 tahun selama Tahun 2020-2024 tetap masih lebih tinggi dibandingkan APS tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Tabel 2.36.
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020-2024

Usia	Angka Partisipasi Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
5-6 Tahun	Kebumen	41,38	44,86	47,85	82,57	85,86
	Jawa Tengah	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia
	Nasional	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia
7 - 12 Tahun	Kebumen	99,58	99,56	99,67	99,74	99,73
	Jawa Tengah	99,73	99,66	99,58	99,57	99,57
	Nasional	99,26	99,19	99,10	99,16	99,19

Usia	Angka Partisipasi Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
13 - 15 Tahun	Kebumen	99,03	99,33	97,69	98,57	99,56
	Jawa Tengah	96,37	96,84	96,77	97,08	97,12
	Nasional	95,74	95,99	95,92	96,1	96,17
16 - 18 Tahun	Kebumen	79,84	79,91	76,77	76,32	77,32
	Jawa Tengah	70,14	70,79	70,82	70,87	71,60
	Nasional	72,72	73,09	73,15	73,42	74,64

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

3) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Seperti halnya APS, APtS dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan keberhasilan program wajib belajar yang ditunjukkan dengan pemerataan dan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Sesuai dengan kewenangan wajib belajar di tingkat Kabupaten, kinerja APtS Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 untuk tingkat SD/MI cukup fluktuatif. Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 73 siswa SD/MI yang putus sekolah, kemudian merangkak naik menjadi 301 siswa SD/MI yang putus sekolah pada Tahun 2022. Salah satu upaya untuk menurunkan APtS adalah pemberian beasiswa sebagai bagian program penanggulangan kemiskinan terbukti dapat menekan APtS di tingkat SD/MI yang pada Tahun 2023 menurun hingga 48 siswa saja yang putus sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat SMP/MTs dimana pada Tahun 2020 terdapat 99 siswa putus sekolah dan terus merangkak naik hingga terdapat 191 siswa SMP/MTs yang putus sekolah pada Tahun 2022. Dengan terus ditingkatkannya program beasiswa, APtS di tingkat SMP/MTs pada Tahun 2023 dapat ditekan hingga mencapai 73 siswa saja yang putus sekolah.

Tabel 2.37.
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI					
Σ Siswa Putus Sekolah	73	110	301	48	data belum tersedia
Σ Seluruh Siswa	125.585	123.087	122.137	121.049	data belum tersedia
% Anak Putus Sekolah	0,058%	0,089%	0,246%	0,039%	data belum tersedia
SMP/MTs					
Σ Siswa Putus Sekolah	99	188	191	73	data belum tersedia
Σ Seluruh Siswa	61.109	61.976	62.422	61.545	data belum tersedia
% Anak Putus Sekolah	0,16%	0,30%	0,31%	0,12%	data belum tersedia

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

4) **Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan**

Persentase kelulusan terus meningkat dan menunjukkan angka yang cukup bagus karena di semua jenjang pendidikan mulai tahun 2021 terus mencapai angka kelulusan 100%. Hal ini dapat diartikan lembaga pendidikan sekolah (PAUD, SD dan SMP) di Kabupaten Kebumen dapat memenuhi program wajib belajar sesuai dengan tingkat pendidikan yang merupakan kewenangan Kabupaten.

Tabel 2.38.
Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
SMP	94,26%	100%	100%	100%	100%
SD	93,70%	100%	100%	100%	100%
PAUD	58,30%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

5) **Kualitas Siswa berdasarkan Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional**

Tidak hanya sekedar lulus, program wajib belajar juga harus mampu meningkatkan kualitas kecerdasan siswa agar nantinya diperoleh sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Kualitas kecerdasan siswa sekolah dapat diukur berdasarkan kemampuan literasi membaca dan numerasi yang menjadi dasar dalam pengembangan kemampuan analitikal. Kemampuan literasi membaca dan numerasi diperoleh dari Rapor Pendidikan yang menjadi standar kompetensi minimum pada Asesmen Tingkat Nasional. Rapor Pendidikan ini diperoleh dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang dimulai sejak Tahun 2022. Berdasarkan data Rapor Pendidikan selama Tahun 2022-2024 menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa SD dan SMP meningkat, yaitu Siswa SD dari sebesar 58,59 persen menjadi 84,28 persen dan siswa SMP dari sebesar 79,1 persen menjadi 87,29 persen. Kemampuan numerasi siswa SD dan SMP juga menunjukkan peningkatan selama Tahun 2022-2024, yaitu siswa SD dari 42,83 persen menjadi 73,69 persen dan siswa SMP dari 57,69 persen menjadi sebesar 82,28 persen. Kemampuan literasi membaca maupun numerasi baik untuk tingkat SD/ sederajat maupun SMP/ sederajat pada Tahun 2024 telah mencapai lebih dari 70 yang menunjukkan telah masuk kategori baik.

Tabel 2.39.
Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat SD/ Sederajat					
Kemampuan literasi membaca	N/A	N/A	58,59	78,08	84,28
Kemampuan numerasi	N/A	N/A	42,83	60,38	73,69
Tingkat SMP/ Sederajat					
Kemampuan literasi membaca	N/A	N/A	79,1	84,12	87,29
Kemampuan numerasi	N/A	N/A	57,69	61,72	82,28

Sumber: BPS, 2024

6) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam mendukung program wajib belajar perlu di dukung pendidikan pra sekolah yaitu PAUD. Lembaga PAUD Formal di Kabupaten Kebumen yang berakreditasi terus meningkat dari hanya 17,77% pada Tahun 2020 menjadi 92,72% pada Tahun 2024. Hal ini disebabkan mulai Tahun 2019 Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD PNF memasukkan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dimana sebagian besar TK telah terakreditasi. Walaupun terdapat moratorium akreditasi pada Tahun 2020 guna memperbaiki komponen penilaian akreditasi, namun akreditasi dimulai kembali pada tahun 2021. Sementara itu sejak Tahun 2022 kuota untuk mengikuti akreditasi terus meningkat disertai dengan pendampingan secara intensif oleh pemerintah daerah serta optimalisasi peran asesor PAUD untuk mendampingi pengisian pada sistem akreditasi (SISPENA) menyebabkan kenaikan signifikan pada cakupan PAUD Formal Berakreditasi di Kabupaten Kebumen. Jumlah Lembaga PAUD cenderung fluktuatif setiap tahun dan rasio lembaga PAUD terhadap penduduk usia 0-6 tahun hingga tahun 2024 sebesar 1:114 menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 1:125 yang menunjukkan akses terhadap PAUD semakin terbuka.

Tabel 2.40.
Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PAUD Formal Berakreditasi	%	17,77	20,88	47,12	92,72	92,72
Σ Lembaga PAUD	unit	1.152	1.144	1.152	1.144	1,131
Σ Penduduk Usia 0-6 Tahun	anak	134.132	142.230	143.905	132.148	128.438
Rasio	rasio	1:116	1:124,33	1:125	1:116	1:114

Sumber: Disdikpora, 2024

7) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan dapat diukur dengan ketersediaan sekolah. Jumlah SD/MI mengalami penurunan dari 873 pada Tahun 2020 menjadi 864 pada Tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan dilakukannya *regrouping* yang sejalan dengan menurunnya jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Secara rasio, ketersediaan SD/MI terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun juga terus menurun dari 1:152,69 pada Tahun 2020 menjadi 1:147,84 pada Tahun 2024 yang menunjukkan akses terhadap sekolah semakin terbuka.

Sementara itu, ketersediaan SMP/MTs sempat menurun dari 211 sekolah pada 2020 menjadi 200 sekolah pada 2022, walaupun kembali meningkat hingga menjadi 206 sekolah pada 2024. Selain juga dilakukan *regrouping* untuk SMP Satu Atap (Satap), fluktuasi jumlah SMP/MTs juga dipengaruhi dari keberadaan SMP/MTs swasta yang sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa yang diterima setiap tahunnya. Secara rasio, ketersediaan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun cenderung meningkat dari 1:303,86 pada Tahun 2020 menjadi 1:327,55 pada Tahun 2024.

Tabel 2.41.
Ketersediaan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI					
Jumlah Sekolah	873	876	866	864	864
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	133.302	132.026	131.750	128.981	127.731
Rasio ketersediaan sekolah	1:152,69	1:150,71	1:152,14	1:149,28	1:147,84
SMP/MTs					
Jumlah Sekolah	211	213	200	208	206
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	64.115	63.950	64.888	67.086	67.475
Rasio ketersediaan sekolah	1:303,86	1:300,23	1:324,44	1:322,53	1:327,55

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

8) Rasio Murid per Kelas

Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan juga dapat diukur dengan rasio murid per kelas. Rasio murid per kelas pada jenjang SD/MI Tahun 2023 adalah 1:20,78, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 32 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SD/MI telah mencukupi. Adapun rasio Kelas-Murid pada jenjang SMP/MTs Tahun 2023 adalah 1:26,06 jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 36 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SMP/MTs telah mencukupi. Kondisi rasio guru dan murid terhadap kelas di Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.42.
Rasio Guru per Kelas rata-rata Terhadap Jumlah Murid
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI					
Jumlah kelas	4.659	5.855	5.855	5.825	DATA BELUM TERSEDIA
Jumlah Murid	125.585	123.807	122.132	121.049	DATA BELUM TERSEDIA
Rasio Murid per Kelas	1:26,96	1:21,15	1:20,86	1:20,78	DATA BELUM TERSEDIA
SMP/MTs					
Jumlah Kelas	2.259	2.282	2.191	2.362	DATA BELUM TERSEDIA
Jumlah Murid	61.109	61.976	62.422	61.545	DATA BELUM TERSEDIA
Rasio Murid per Kelas	1:27,05	1:27,16	1:28,49	1:26,06	DATA BELUM TERSEDIA

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

9) Rasio Murid per Guru

Sebagai tenaga pengajar, ketersediaan guru terhadap jumlah murid yang ada juga mencerminkan peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan. Rasio Murid per Guru pada jenjang SD/MI Tahun 2024 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:13,86. Sedangkan rasio Guru-Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 1:15,80. Rasio ini menggambarkan ketersediaan tenaga pengajar

dalam rangka pencapaian mutu pendidikan. Kondisi rasio guru terhadap murid Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.43.
Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI					
Jumlah Guru	6.855	7.280	7.298	7.224	8.207
Jumlah Murid	125.585	123.087	122.132	121.012	113.794
Rasio Guru/Murid	1:18,32	1: 16,91	1 : 16,73	1:16,75	1:13,86
SMP/MTs					
Jumlah Guru	3.362	4.100	3.879	3.874	3.891
Jumlah Murid	61.109	61.976	62.422	61.512	61.499
Rasio Guru/Murid	1:18,18	1:15,12	1 : 16,09	1:15,88	1:15,80

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

Rasio ideal guru per murid adalah satu guru untuk 20 siswa. Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio guru dibandingkan dengan murid di Kabupaten Kebumen untuk tiap jenjang pendidikan dasar ada pada rasio ideal yaitu rata-rata satu guru untuk 16-17 siswa. Akan tetapi rasio tersebut tidak memilah berdasarkan status kepegawaian guru, mengingat kondisi di Kabupaten Kebumen sebagian besar tenaga pendidik adalah tenaga non PNS.

10) Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan, kualitas guru sebagai tenaga pengajar juga harus ditingkatkan dimana hal ini tercermin dari guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4. Persentase guru dengan kualitas S1/D4 pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP/MTs terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2024 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 pada jenjang pendidikan dasar sudah cukup baik karena sudah diatas 90%, yaitu 97,97% pada jenjang SD/MI dan 97,76% pada jenjang SMP/MTs. Walaupun terus mengalami peningkatan, namun demikian untuk jenjang PAUD masih cukup rendah yaitu baru mencapai 71,12% pada tahun 2024. Persentase guru dengan kualitas S1/D4 di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.44.
Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D4
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SMP/MTS	94,30%	95,63%	92,58%	90,97%	97,76%
SD/MI	93,78%	92,75%	96,27%	95%	97,97%
PAUD (Formal)	62,93%	63,17%	67,43%	68,94%	71,12%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

11) Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan atau Ekskul Kesenian

Pemajuan kebudayaan memiliki peran penting dalam bidang pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Pemajuan kebudayaan perlu terus ditingkatkan dan diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri masyarakat termasuk pada dunia pendidikan dalam upaya menghadapi tantangan budaya global. Selain itu, pemajuan kebudayaan dalam bidang pendidikan juga mendukung program Geopark Kebumen sebagai UNESCO Global Geopark. Pemajuan kebudayaan dalam bidang pendidikan dapat diukur dengan indikator satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian. Data menunjukkan terjadi peningkatan satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian di Kabupaten Kebumen dari 63,57% pada Tahun 2023 meningkat menjadi 64,07% pada Tahun 2024.

Tabel 2.45.
Pemajuan Kebudayaan pada Urusan Pendidikan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan atau Ekskul Kesenian	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	63,57%	64,07%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

12) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Menghadapi tantangan daya saing sumber daya manusia diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat tercermin dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (yang merupakan usia angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Walaupun data menunjukkan terjadi peningkatan proporsi dari 5,94% pada Tahun 2023 menjadi 7,96% pada Tahun 2024, namun proporsi ini masih sangat kecil yang menggambarkan kualitas SDM Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah mengalokasikan beasiswa bagi warga untuk dapat berkuliah di antaranya di Universitas Terbuka, Universitas Pertamina dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Hal ini dilakukan selain dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya secara akademik, juga dapat memberikan pengalaman kehidupan kampus yang mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kebumen di tengah ketatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan maupun berusaha.

Tabel 2.46.
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	5,94%	7,96%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

13) Kondisi Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah solusi alternatif yang diberikan kepada masyarakat yang tidak bisa atau telah keluar dari sistem pendidikan formal. Pendidikan ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah formal karena berbagai alasan seperti ekonomi, geografis, sosial, atau pribadi. Pendidikan kesetaraan di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh lembaga-lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) . Jumlah PKBM hingga tahun 2024 sebanyak 24 lembaga. Dari 26 PKBM yang aktif hingga Tahun 2024, terdapat 15 PKBM yang telah terakreditasi, dimana jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 sebanyak 9 lembaga PKBM terakreditasi.

Tabel 2.47.
Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SKB	1	1	1	1	1
Jumlah PKBM	24	24	24	24	24
Jumlah PKBM terakreditasi	9	14	14	14	15

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

Akreditasi pendidikan kesetaraan merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu lembaga atau program pendidikan kesetaraan memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan. Akreditasi ini penting untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan setara dengan pendidikan formal. Namun, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam akreditasi pendidikan kesetaraan diantaranya standar akreditasi untuk pendidikan kesetaraan seringkali tidak jelas atau konsisten. Hal ini menyulitkan lembaga pendidikan kesetaraan dalam memahami dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Permasalahan yang lain adalah lembaga pendidikan kesetaraan sering kali memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari segi finansial, tenaga pengajar, maupun fasilitas. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Selain itu proses akreditasi sering kali dianggap rumit dan memakan biaya tinggi, yang menjadi beban bagi lembaga pendidikan kesetaraan. Sementara itu, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan kesetaraan sering kali kurang optimal. Akibatnya, beberapa lembaga mungkin tidak benar-benar memenuhi standar akreditasi meskipun telah mendapatkan status terakreditasi.

14) Dukungan Terhadap Pendidikan Keagamaan

Perkembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan kekhasannya telah memberikan kontribusi penting dalam mempersiapkan santri/peserta didik untuk menjalankan peranannya terhadap penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya guna melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan memiliki peran nyata dalam pembangunan pendidikan. Terkait hal ini Kabupaten Kebumen telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Walaupun mengalami keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap berupaya untuk memfasilitasi anggaran kepada sejumlah pesantren dan pendidikan keagamaan. Kedepan selain anggaran, fasilitas pendampingan juga akan dilakukan kepada sejumlah pesantren dan pendidikan agama.

Tabel 2.48.
Fasilitasi terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	N/A	2	4	12	6
Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SETDA dan Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan yang tercermin pada pencapaian harapan hidup yang merupakan salah satu komponen IPM.

1) Indeks Kesehatan

Mendasari perhitungan komponen IPM harapan hidup saat lahir, dapat diukur kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin dari Indeks Kesehatan. Sesuai dengan aturan UNDP, batas bawah harapan hidup adalah 20 tahun sedangkan batas atas 85 tahun menunjukkan kinerja indeks kesehatan Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 84,00 pada Tahun 2020 menjadi 84,95 pada Tahun 2024. Dengan capaian tersebut menunjukkan pencapaian sektor kesehatan sudah sangat tinggi karena mendekati nilai maksimum 100 yang menunjukkan secara umum kondisi kesehatan sudah baik.

Tabel 2.49.
Indeks Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesehatan	84,00	84,20	84,38	84,58	84,95

Sumber: Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen, 2024

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985). Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Berdasarkan data, jumlah kasus kematian ibu selama Tahun 2020-2024 cukup fluktuatif dari 15 kasus pada Tahun 2020 meningkat menjadi masing-masing 38 kasus pada Tahun 2021 dan 29 kasus pada Tahun 2022 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya jumlah kasus kematian ibu. Pasca Pandemi Covid-19, jumlah kasus kematian ibu kembali menurun hingga sebanyak 15 kasus pada Tahun 2024. Namun perhitungan AKI justru menunjukkan hal sebaliknya yaitu cenderung meningkat dari 76,75 pada Tahun 2020 menjadi 108,96 pada Tahun 2024 dikarenakan pembandingnya yaitu jumlah kelahiran menurun. Sementara itu penyebab kasus kematian ibu pada Tahun 2024 antara lain dikarenakan perdarahan sebanyak 4 kasus, kelainan jantung pembuluh darah 4 kasus, hipertensi pada kehamilan sebanyak 3 kasus, infeksi 1 kasus, dan lain –lain 3 kasus. Faktor faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) terpadu yang sesuai standar; belum semua faskes jejaring Puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri, Bidan Praktek Mandiri) yang belum berkolaborasi dengan Puskesmas dalam pelaksanaan ANC Terpadu; masih banyak ibu hamil yang resiko tinggi; serta asih banyak ibu hamil dengan penyakit penyerta. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan kasus kematian ibu diantaranya melalui pengelolaan pelayanan ibu hamil di masyarakat melalui kelas ibu, pengelolaan kesehatan ibu hamil resiko tinggi melalui pendampingan tim ahli, penguatan jejaring sistem rujukan maternal neonatal di Kabupaten Kebumen, meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan maternal neonatal di Faskes Rujukan dengan telah terdapat 4 (empat) rumah sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) yaitu pada RSUD Dr. Soedirman, RSUD Prembun, RS PKU Muhammadiyah Gombong dan RSU Purwogondo.

Tabel 2.50.
Jumlah Kasus dan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayah	2	2	0	1	1
2	Buayan	0	0	1	1	0
3	Puring	0	2	2	0	0
4	Petanahan	1	1	5	1	1
5	Klirong	0	1	2	1	0
6	Buluspesantren	0	1	0	1	1
7	Ambal	0	4	2	3	4
8	Mirit	0	1	2	1	1
9	Bonorowo	0	2	0	0	0
10	Prembun	0	1	0	0	0
11	Kutowinangun	1	3	1	0	0
12	Alian	2	3	2	1	2
13	Padureso	0	0	0	0	0
14	Poncowarno	0	1	0	1	0

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
15	Kebumen	0	0	1	0	1
16	Pejagoan	1	3	0	2	0
17	Sruweng	1	3	1	0	0
18	Adimulyo	0	1	3	1	1
19	Kuwarasan	2	1	1	0	0
20	Rowokele	1	2	4	0	2
21	Sempor	1	0	0	0	0
22	Gombong	1	1	0	1	0
23	Karanganyar	0	0	0	0	0
24	Karanggayam	1	2	1	0	0
25	Sadang	1	1	1	0	0
26	Karangsambung	0	2	0	0	1
Total Jumlah Kasus Kematian Ibu		15	38	29	15	15
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		76,75	201,6	165,3	92,26	108,96

Sumber : Dinkes PPKB, 2024

3) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah 70 (sangat tinggi), 40 – 70 (tinggi), 20-39 (sedang) dan <20 (rendah). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi dari pada AKI. Meskipun target program terkait khusus dengan kematian balita, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Data menunjukkan jumlah kasus kematian bayi terus meningkat selama periode 2020-2023 yaitu dari 136 kasus pada Tahun 2020 menjadi 203 kasus pada Tahun 2023, namun demikian berhasil turun kembali menjadi 144 kasus pada Tahun 2024. Hal yang sama juga tercermin pada AKB yang meningkat dari 6,96 pada Tahun 2020 menjadi 12,49 pada Tahun 2023, namun dapat menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 10,46. Kasus penyebab kematian bayi diantaranya disebabkan oleh kasus hipertensi tinggi serta adanya edaran terminasi kehamilan usia 33 minggu pada indikasi pre eklamsi sehingga meningkatkan berat badan lahir rendah dan resiko keamatan.

Tabel 2.51.
Jumlah Kasus dan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayah	4	5	8	6	0
2	Buayan	3	9	2	12	7
3	Puring	3	10	9	3	7
4	Petanahan	4	9	6	6	3
5	Klirong	9	5	6	10	9
6	Buluspesantren	3	9	12	13	7
7	Ambal	11	4	13	8	9
8	Mirit	7	3	7	9	14
9	Bonorowo	3	1	2	1	4
10	Prembun	5	6	4	6	1
11	Kutowinangun	7	5	5	10	1
12	Alian	3	7	7	6	5
13	Padureso	2	5	1	4	1
14	Poncowarno	2	6	4	3	1
15	Kebumen	14	8	13	16	9
16	Pejagoan	1	0	2	3	8
17	Sruweng	10	13	11	10	7
18	Adimulyo	3	5	4	10	6
19	Kuwarasan	7	8	13	5	8
20	Rowokele	4	6	5	6	5
21	Sempor	6	9	11	10	9
22	Gombang	4	2	9	2	8
23	Karanganyar	5	3	9	3	1
24	Karanggayam	6	11	12	7	6
25	Sadang	2	3	2	0	7
26	Karangsambung	8	5	3	7	1
Jumlah kasus kematian bayi		136	174	180	203	144
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran		6,96	9,23	10,26	12,49	10,46

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

4) Persentase Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu *maternal* serta bayi baru lahir dapat terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terus meningkat dari 99,95% pada Tahun 2020 menjadi 100% tertangani sejak Tahun 2024.

Tabel 2.52.
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ibu hamil yang ditolong oleh tenaga kesehatan	19.518	18.863	17.549	16.289	13.845
Jumlah total Ibu Bersalin	19.526	18.879	17.559	16.289	13.845
Presentase	99,95	99,92	99,94	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

5) Status Gizi dan Prevalensi Stunting

Gizi buruk cenderung menyerang setelah balita berusia 18 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak, terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu: ekonomi, sanitasi, pendidikan orangtua, dan perilaku orang tua. Kemiskinan salah satu determinan sosial-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakang penyakit dan kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerang siapa saja, terutama bayi dan anak yang tengah tumbuh-kembang. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnya menjadi perhatian karena berbagai penelitian menunjukan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.

Selain AKI dan AKB, status gizi masih perlu menjadi perhatian. Dimana hal ini ditandai masih ditemukannya kasus balita gizi kurang, balita gizi buruk dan tingginya angka *stunting*. Persentase balita gizi kurang pada tahun 2020 mencapai 0,5% dan meningkat menjadi 4,8% pada Tahun 2024. Sementara itu, persentase balita gizi buruk sempat meningkat dari 0,02% pada Tahun 2020 hingga mencapai 0,059% pada Tahun 2023 dan dapat menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 0,02%.

Kecukupan gizi menjadi salah satu hal yang penting guna mempersiapkan generasi sumberdaya manusia yang gemilang di masa yang akan datang. Pemenuhan gizi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian makanan tambahan dan vitamin, namun perlu upaya edukasi dalam pola asuh anak mulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Optimalisasi peran Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu sebagai wadah edukasi pada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan, selain itu kader kesehatan menjadi agen *screening* awal kejadian kasus di sekitarnya.

Tabel 2.53.
Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	0,5	0,55	3,80	4,2	4,8
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,02	0,03	0,04	0,059	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

Selanjutnya, *stunting* adalah isu strategis di bidang kesehatan yang juga harus menjadi perhatian seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. *Stunting* disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Menurut WHO, Pertumbuhan *stunting* yang terjadi pada usia dini dapat berlanjut dan berisiko untuk tumbuh pendek pada usia dewasa muda. *Stunting* dalam jangka panjang memiliki akibat buruk yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan disabilitas di usia tua. (Atikah, Rahayu, 2018). Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah telah mengupayakan percepatan penurunan *stunting* yang mempunyai pengertian yaitu setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut eletronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (*e*-PPGBM) prevalensi *stunting* Kabupaten Kebumen sebesar 15,34 dan terus menurun menjadi 9,14 pada Tahun 2024. Sedangkan jumlah penderita *stunting* juga relatif menurun dari 10.484 orang pada Tahun 2020 menjadi 6,752 pada Tahun 2024.

Tabel 2.54.
Angka dan Jumlah Penderita Stunting Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Angka stunting (%)	15,34	12,13	10,23	9,87	9,17
Jumlah Penderita Stunting (orang)	10.484	8.572	7.472	7.591	6.752

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

Meskipun angka penderita *stunting* di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, penanganan *stunting* tetap menjadi perhatian pemerintah mengingat dampak yang ditimbulkan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat dalam mengupayakan percepatan penurunan *stunting*. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kebumen perlu untuk mengidentifikasi dan menentukan strategi sebagai bagian dari konvergensi penurunan *stunting* agar angka *stunting* dan jumlah penderita *stunting* dapat menurun.

Salah satu upaya dalam menurunkan angka *stunting* adalah dengan menurunkan prevalensi ibu hamil KEK, untuk mengurangi risiko lahirnya bayi berpotensi *stunting*. Ibu hamil KEK yaitu ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm atau Indeks Masa Tubuh (IMT) pada pra hamil atau Trimester I (usia kehamilan ≤ 12 minggu) dibawah 18,5 kg/m2 (kurus). Berdasarkan data, persentase ibu hamil KEK justru mengalami peningkatan dari 8,26% pada Tahun 2020 menjadi 10,9% pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan pola makan yang kurang tepat, body image sebelum hamil, ataupun keterbatasan

ketersediaan makanan. Kenaikan ibu hamil KEK ini dapat menyebabkan kenaikan angka stunting karena ibu hamil KEK memiliki peluang lebih besar untuk melahirkan bayi stunting.

Tabel 2.55.
Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ibu Hamil KEK (persen)	8,26	9,13	2,66	11,6	10,9

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

6) Rasio Dokter dan Penduduk

Untuk memenuhi derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan perluasan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan, salah satunya dengan ketersediaan dokter. Rasio dokter terhadap penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 cukup fluktuatif dari 1:3341 pada Tahun 2020 justru meningkat hingga menjadi 1:5.433 pada Tahun 2021, namun demikian cenderung menurun hingga menjadi 1:3.028 pada Tahun 2024. Dengan nilai rasio hingga tahun 2024 tersebut menunjukkan masih jauh dari kondisi ideal rasio dokter terhadap penduduk yaitu 1: 2.500.

Tabel 2.56.
Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter (Umum dan Spesialis)	419	255	326	475	476
Jumlah Penduduk	1.399.976	1.385.577	1.409.951	1.426.832	1.441.425
Rasio Dokter per Penduduk	1: 3.341	1: 5.433	1 : 4.325	1 : 3.003	1 : 3.028

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

7) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Fungsi posyandu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar sehingga turut berkontribusi untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data, jumlah posyandu cenderung meningkat dari 2.116 unit pada Tahun 2020 menjadi 2.128 pada Tahun 2024. Namun demikian berdasarkan perhitungan rasio jumlah posyandu per 100 balita cenderung meningkat dari 1:25 pada Tahun 2020 hingga menjadi 1:41 pada Tahun 2021 walaupun kembali menurun menjadi 1:32 pada Tahun 2024.

Tabel 2.57.
Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu	2.116	2.126	2.130	2.127	2.128
Jumlah Balita	83.924	85.576	74.232	78.790	69.080
Rasio Posyandu per 100 balita	1:25	1:41	1:34	1:37	1 : 32

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

8) Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2024. Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada tahun 2020 sebesar 1:39.99 dan terus meningkat menjadi 1:57.657 pada Tahun 2024. Nilai rasio tersebut masih belum dalam kondisi ideal rasio Puskesmas per satuan penduduk yaitu sebesar 1:30.000. Meskipun demikian, keberadaan Puskesmas Pembantu dan Poliklinik yang tersebar secara merata dapat membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Namun demikian dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 71 unit juga jauh belum mencapai standar sebesar 1:1.500 penduduk atau 1 puskesmas pembantu harusnya melayani maksimal 1.500 penduduk.

Tabel 2.58.
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas	35	/35	35	35	35
2	Jumlah Puskesmas Keliling	35	35	49	49	38
3	Jumlah Poliklinik/PKD /Polindes	387	357	280	304	349
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	77	65	69	70	71
5	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	534	492	433	409	455
6	Jumlah Penduduk	1.399.976	1.385.577	1.409.951	1.426.832	1.441.425
7	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:39.999	1:39.295	1:39.296	1:40.767	1:57.657

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

9) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Berdasarkan data hingga Tahun 2024 terdapat 12 rumah sakit bertambah 1 rumah sakit baru jika dibandingkan Tahun 2023. Dengan semakin banyak rumah sakit yang tersedia diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan bertambahnya 1 rumah sakit baru pada Tahun 2024 menyebabkan rasio rumah sakit terhadap penduduk dapat menurun dari 1:127.270 pada Tahun 2020 dan terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 1:120.118 pada Tahun 2024.

Tabel 2.59.
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RSUD	2	2	2	2	2
Jumlah RS Swasta	9	9	9	9	10
Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh RS	11	11	11	11	12
Jumlah Penduduk	1.399.976	1.385.577	1.409.951	1.426.832	1.441.425
Rasio	1 :127.270	1 :125.962	1:128.177	1.129.712	1 : 120.118

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

10) Angka Kesakitan dan Perkembangan Penyakit Menular

Menurut Blum (1974), bahwa derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka morbiditas di Kebumen cenderung mengalami peningkatan dari 21,52% pada Tahun 2020 menjadi 22,97% pada Tahun 2024. Namun demikian perlu diketahui secara detil kasus-kasus penyakit menular atau kronis yang terjadi masyarakat.

Tabel 2.60.
Angka Morbiditas Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Morbiditas (Kesakitan)	21,52	14,24	23,02	22,39	22,97

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

Terkait penyakit menular, Pemerintah pusat masih menetapkan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria sebagai tujuan/sasaran prioritas dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Hal ini sejalan dengan komiktmen Indonesia dalam penyepakatan global untuk mengakhiri AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) pada tahun 2030. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian penyakit baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Sementara itu, prevalensi penyakit menular utama yang masih tinggi di Kebumen adalah kasus HIV/AIDS, TB, dan Demam Berdarah.

Kasus baru HIV AIDS cenderung mengalami penurunan dari 227 kasus pada Tahun 2020 menjadi 151 kasus pada Tahun 2024. Kasus HIV AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari yang ada di masyarakat. Ada kemungkinan masih banyak kasus yang belum ditemukan karena orang-orang yang berperilaku risiko tinggi tidak semuanya mau memeriksakan diri sehingga status HIV-nya tidak bisa diketahui.

Sementara itu, angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) justru meningkat dari 12 kasus pada Tahun 2020 menjadi 20 kasus pada Tahun 2024. Faktor kebersihan lingkungan, kepadatan penduduk hingga cuaca dan perubahan iklim menjadi penyebab peningkatan angka DBD. Hal yang sama juga terjadi dengan malaria yang meningkat menjadi 20 kasus di Tahun 2024 yang bukan kasus indigenous melainkan berasal dari pendatang dari luar daerah. Program surveilans migrasi malaria tetap dijalankan untuk penanganan dan pencegahan kasus. Program surveilans migrasi malaria merupakan salah satu upaya pencegahan penularan penyakit malaria dengan jalan pemantauan penduduk yang akan atau dari luar pulau Jawa.

Tabel 2.61.
Perkembangan Kasus Penyakit Menular 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus baru HIV AIDS	227	181	152	141	151
Angka Kesakitan DBD	12	13	11	5,8	20
Jumlah Kasus Malaria	0	4	3	7	20

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

Pola hidup masyarakat yang kurang sehat dan rendahnya kesadaran untuk menjaga kebugaran dengan berolahraga meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, stroke, jantung,

kanker dan diabetes. Selain itu kebiasaan merokok menjadi salah satu pemicu penyakit tidak menular seperti gangguan pernafasan, kanker, penyakit paru dan jantung. Peningkatan kasus penyakit tidak menular menimbulkan dampak ekonomi dan produktivitas karena kasus PTM ditemukan pada penduduk usia produktif. Cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan baru dilakukan ketika sudah dalam kondisi lanjut, upaya preventif untuk PTM masih kurang.

Tabel 2.62.
Penyakit Tidak Menular Kebumen Tahun 2020-2024

No	Jenis Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ca servik	N/A	19	94	20	62
2	Ca Mamae	N/A	149	650	152	486
3	Ca Hepar	N/A	0	0	NA	0
4	Ca Paru	N/A	0	0	43	45
5	ID DM	N/A	98	371	462	652
6	ND DM	N/A	10482	14.964	9910	13353
7	AMI	N/A	118	32	57	20
8	Dekom Kordis	N/A	666	774	706	420
9	Hemoragik	N/A	750	539	587	
10	Non-Hemoragik	N/A		Hemoragik dan Non Hemoragik data menjadi 1 merupakan kategori penyakit stroke.	NA	NA
11	PPOK	N/A	638	1.108	876	2010
12	Asma Bronkial	N/A	293	1.178	969	1468
13	Psikosis	N/A	4123	3.768	66	4655
14	Hipertensi	N/A	69899	89.803	60044	64187
15	Diabetes	N/A	10580	13.251	10372	
16	Tumor Benjolan	N/A	14	56	67	111
17	ODGJ	N/A	5041	3.914	4214	5487
18	Iva positif	N/A	25	32	59	68

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

11) Eliminasi Penyakit Tuberkulosis (TB)

Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi,

ekstensifikasi dan inovasi program. Oleh karena itu dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, eliminasi tuberkulosis menjadi bagian dalam salah satu dari 13 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia

Dari data yang ada, perkembangan kasus Tuberkulosis adalah sebagai berikut:

1. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis cenderung fluktuatif dari 71% pada Tahun 2020 sempat menjadi 101,66% pada Tahun 2022 namun turun kembali menjadi 74% pada Tahun 2024. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Oleh karena itu tinggi rendahnya cakupan ini sangat tergantung dari upaya penemuan kasus TB maupun keberhasilan pengobatannya.
2. Surveilans (pengawasan) atau pelaporan kasus tuberkulosis terus ditingkatkan. Praktik epidemiologi yang memantau penyebaran penyakit ini dilakukan untuk memprediksi, mengamati dan meminimalisir hal berbahaya yang disebabkan oleh situasi-situasi wabah, epidemi dan pandemi, serta meningkatkan pengetahuan soal faktor yang berkontribusi terhadap keadaan semacam itu. Hal ini tercermin dari case notification rate semua kasus TB per 100.000 penduduk yang cenderung meningkat dari 99 kasus pada Tahun 2020 menjadi 201 pada Tahun 2024 karena meningkatnya upaya deteksi dini.
3. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis cenderung meningkat dari 86% pada Tahun 2020 menjadi 116% pada Tahun 2024 yang menunjukkan adanya keberhasilan pengobatan pada penderita yang tercatat mengidap tuberkulosis pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pengobatan TB mengalami beberapa kendala diantaranya kurang disiplinnya pasien dalam mengikuti proses pengobatan sesuai standar serta terjadinya kasus resistensi obat.
4. Penanganan TB tidak hanya dilakukan terhadap penderita positif TB, namun juga keluarga, kerabat dan orang lain yang terdekat yang kemungkinan dapat tertular dari pasien positif. Dengan upaya surveilans dan deteksi, jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat dari 8.440 orang pada Tahun 2020 menjadi 18.640 orang pada Tahun 2024. Cakupan pelayanan ini juga terus meningkat dari 65,3% pada Tahun 2020 dan berhasil mencapai 100% sejak Tahun 2022.
5. Upaya penanggulangan TB cukup berhasil dimana terlihat dari penurunan tingkat kematian karena TB per 100.000 orang cenderung meningkat dari 6,6 pada Tahun 2021 menjadi 4,42 pada Tahun 2024.

Tabel 2.63.
Perkembangan Kasus Penyakit Tuberkulosis 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	71	79	101,66	95	74
<i>Case Notification Rate</i> semua kasus TB per 100.000 penduduk	99	119	165	194	201
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	86	43	81	82,9	116
Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.440	6.705	13.624	16.568	18.604

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	65,3	51.88	100	100	100
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	6.6	7.8	6.2	4.42

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

12) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 pasal 20 ayat 1 juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 86% pada tahun 2020 menjadi 99,07% pada Tahun 2024. Semakin tingginya cakupan kepesertaan JKN ini mengindikasikan meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, semakin tingginya kesadaran masyarakat (terutama peserta mandiri) dalam meningkatkan derajat kesehatannya serta semakin meningkatnya komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menanggung beban biaya JKN bagi masyarakat kurang mampu. Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Tabel 2.64.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	86	89,10	90,3	96,76	99,07

Sumber: Dinas Kesehatan dan PPKB, 2024

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pekerjaan Umum
 - a) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Sesuai Keputusan Bupati Kebumen Nomor 600.1.1/554 Tahun 2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, terdapat 289 ruas jalan kewenangan Kabupaten dengan total Panjang 1.017,15 km yang tersebar di semua wilayah Kabupaten Kebumen. Panjang jalan kewenangan Kabupaten Kebumen ini meningkat dari sebelumnya sepanjang 960,36 km. Hingga Tahun 2024 terdapat 411,814 km jalan kabupaten dalam kondisi baik atau 40,49%, dalam kondisi sedang sepanjang 335,543 km atau 32,99%, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 166,827 km atau 16,40% dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 102,966 km atau 10,12%. Dari data tersebut menunjukkan persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten hingga Tahun 2024 sebesar 73,48% yang diperoleh dari proporsi baik ditambah proporsi sedang. Dengan

proporsi lebih dari 70% menunjukkan infrastruktur jalan telah cukup baik dan tidak mengganggu fungsi jalan secara signifikan. Namun demikian masih terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati over dimensi dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas.

Tabel 2.65.
Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	PANJANG JALAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi Baik (km)	103,67	584,11	292,179	450,569	411,814
2	Kondisi Sedang (km)	417,49	167,52	416,841	271,269	335,543
3	Kondisi Rusak Ringan (km)	169,28	115,41	162,026	157,79	166,827
4	Kondisi Rusak Berat (km)	283,94	93,32	89,312	137,522	102,966
5	Jalan secara keseluruhan (km)	960,356	960,356	960,356	1017,15	1017,15
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	10,64	60,82	30,424	44,30	40,49
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	42,85	17,44	43,405	26,67	32,99
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	17,35	12,02	16,871	15,51	16,40
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	29,14	9,72	9,3	13,52	10,12
10	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%)	53,49	78,26	73,829	70,97	73,48

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2024

Adapun dari segi jenis konstruksi jalan Kabupaten, terdapat 4 jenis konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Kebumen meliputi jalan beton, aspal, kerikil dan tanah. Hingga Tahun 2024 terdapat 207,197 km atau 20,37% jalan beton, 778,914 km atau 76,58% jalan aspal, 23,492 km atau 2,31% jalan kerikil dan 7,548 km atau 0,74% jalan tanah. Selain menurunkan panjang maupun proporsi jalan kerikil dan tanah, ke depan juga akan terus ditingkatkan panjang serta proporsi jalan beton yang memiliki kualitas kekuatan jalan yang lebih baik mengingat kondisi tanah dan tingginya volume kendaraan.

Tabel 2.66.
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Tipe Konstruksi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	PANJANG JALAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan beton	123,041	123,231	146,506	193,164	207,197
2	Panjang jalan aspal	734,516	742,145	767,914	801,536	778,914
3	Panjang jalan batu kerikil	91,701	86,382	35,688	19,800	23,492
4	Panjang jalan tanah	11,1	8,6	10,25	2,650	7,548
5	Proporsi panjang jalan beton	12,81%	12,83%	15,26%	18,99%	20,37%
6	Proporsi panjang jalan aspal	76,48%	77,28%	79,96%	78,80%	76,58%

NO	URAIAN	PANJANG JALAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Proporsi panjang jalan batu kerikil	9,55%	8,99%	3,72%	1,95%	2,31%
8	Proporsi panjang jalan tanah	1,16%	0,90%	1,07%	0,26%	0,74%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2024

Sementara itu, kualitas jembatan di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir cenderung terus menurun sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini dapat dilihat dari jembatan dalam kondisi baik yang menurun dari 375 unit atau 49,21% pada Tahun 2020 menjadi hanya 44 unit atau 6,91% pada Tahun 2024. Jembatan dalam kondisi baik ini menurun kualitasnya menjadi dalam kondisi sedang yang cukup fluktuatif dari 320 unit atau 41,99% pada Tahun 2020 menjadi 185 unit atau 29,04% pada Tahun 2024. Sementara itu, kondisi rusak ringan cenderung meningkat dari 17 unit pada Tahun 2020 atau 2,23% pada Tahun 2020 menjadi 388 unit atau 60,91% pada Tahun 2024. Sedangkan kondisi rusak berat cenderung turun dari 50 unit atau 6,56% pada Tahun 2020 menjadi 20 unit atau 3,14% pada Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu melakukan usaha perbaikan jembatan mengingat jembatan adalah infrastruktur yang penting untuk menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Kebumen terutama pada wilayah tertinggal.

Tabel 2.67.
Jumlah dan Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi
di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	JUMLAH JEMBATAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi Baik (unit)	375	144	45	56	44
2	Kondisi Sedang (unit)	320	35	202	211	185
3	Kondisi Rusak Ringan (unit)	17	439	357	343	388
4	Kondisi Rusak Berat (unit)	50	9	23	17	20
7	Jumlah Jembatan secara keseluruhan (unit)	762	627	627	627	637
8	Proporsi Kondisi Baik (%)	49,21	22,97	7,18	8,93	6,91
9	Proporsi Kondisi Sedang (%)	41,99	5,58	32,22	33,65	29,04
10	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	2,23	70,02	56,94	54,7	60,91
11	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	6,56	1,44	3,67	2,71	3,14

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2024

b) Irigasi

Kabupaten Kebumen memiliki daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 8.621 Ha dengan Daerah Irigasi sejumlah 172 Daerah Irigasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Selain itu di Kabupaten Kebumen juga terdapat Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat dan provinsi. DI kewenangan pusat meliputi DI Sempor (6.478 Ha), DI Serayu (380 Ha) dan DI Waduk Wadaslintang (21.422 Ha). Sedangkan DI

kewenangan provinsi yaitu DI Buniayu (di Kecamatan Rowokele) dengan luas 140 Ha. Daerah irigasi yang terdapat di Kabupaten Kebumen secara lengkap disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.68.
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	172 DI Kabupaten	8.621	23,27%
2	Sempor (Pusat)	6.478	17,49%
3	Wadaslintang (Pusat)	21.422	57,83%
4	Serayu (Pusat)	380	1,03%
5	Buniayu (Prov) (Rowokele)	140	0,38%
Jumlah		37.041	100,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2024

Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga Tahun 2024 yaitu irigasi teknis sekunder sepanjang 186.105 meter dan irigasi teknis tersier sepanjang 28.300 meter. Dari data tersebut menunjukkan proporsi irigasi dalam kondisi baik terus meningkat dari 73,7% pada Tahun 2020 menjadi 78,75% pada Tahun 2024, sedangkan proporsi irigasi kondisi sedang relatif menurun dari 1,73% pada Tahun 2020 menjadi 1,4% pada Tahun 2024. Sementara itu, irigasi kondisi rusak ringan relatif meningkat dari 1,06% pada Tahun 2020 menjadi 1,17% pada Tahun 2024 dan irigasi kondisi rusak berat menurun dari 23,51% pada Tahun 2020 menjadi 18,67% pada Tahun 2024. Secara menyeluruh, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) pada Tahun 2024 telah mencapai 59,21%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan nilai indeks sebesar 59,21% maka kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

Tabel 2.69.
Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Irigasi Teknis Sekunder (m)	184.418	186.105	186.105	186.105	186.105
2	Irigasi Teknis Tersier (m)	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3	Irigasi Kondisi Baik (%)	73,7	75,17	76,31	78,71	78,75
4	Irigasi Kondisi Sedang (%)	1,73	1,55	1,51	1,44	1,4
5	Irigasi Kondisi Rusak Ringan (%)	1,06	1,23	1,23	1,17	1,17
6	Irigasi Kondisi Rusak Berat (%)	23,51	22,04	20,95	18,67	18,67
7.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	N/A	N/A	N/A	57,42	59,21

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2024

c) Drainase

Drainase yang ditangani oleh kabupaten terdiri dari drainase jalan kewenangan kabupaten dan drainase buangan irigasi. Panjang drainase jalan kabupaten adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 600.1.1/554 Tahun 2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten sedangkan drainase buangan irigasi kewenangan Kabupaten adalah sepanjang 72,272 Km. Secara umum, persentase saluran drainase dalam kondisi baik cenderung meningkat dari 15,98% pada Tahun 2020 menjadi 24,76% pada Tahun 2024.

Tabel 2.70.
Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024 (dalam km)

No	Saluran Drainase Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Drainase Perkotaan	34,93	34,93	34,93	50,32	50,32
	a. Perkotaan Kebumen	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	60,81	60,81	35,60
	b. Perkotaan Prembun	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	3,33	3,33	1,51
	c. Perkotaan Karanganyar	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	2,89	2,89	4,79
	d. Perkotaan Gombang	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	0,76	3,76	8,42
2	Drainase Non Perkotaan	919,43	919,43	919,43	966,83	966,83
3	Total Drainase Jalan	960,36	960,36	960,36	1017,15	1017,15
4.	Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan	72,272	72,272	72,272	72,272	72,272
5.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik (%)	15,98	15,98	16,00	16,19	24,76

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2024 data diolah

Adapun daftar saluran drainase buangan irigasi yang ada di Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 2.71.
Daftar Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Nama Saluran Drainase	Desa	Kecamatan	Panjang Saluran (Km)
1	Aren	Jogosimo – Pandanlor	Klirong	5,500
2	Bedogol	Bumiharjo – Banjarwinangun	Petanahan	2,200
3	Bengkelung	Redisari	Rowokele	0,500
4	Binangun	Bumiharjo – Trikarso	Sruweng	1,600
5	Bojongsari	Bojongsari	Alian	1,500
6	Badongan	Podoluhur – Keadongan	Klirong	4,000
7	Buatan	Demangsari	Ayah	2,000
8	Era	Redisari	Rowokele	2,000

No	Nama Saluran Drainase	Desa	Kecamatan	Panjang Saluran (Km)
9	Garung	Jlegiwinangun	Kutowinangun	2,000
10	Jomboran	Purwosari – Tukinggedong	Puring	4,536
11	Jogomulyo	Jogomulyo – Purbowangi	Buayan	2,700
12	Kaligending	Krandegan	Puring	0,650
13	Kaliori	Rowokele	Rowokele	2,740
14	Kebantengan	Tambakagung - Karangglonggong	Klirong	2,500
15	Kedungkeji	Kretek	Rowokele	1,500
16	Kenteng	Kenteng	Sempor	2,000
17	Klepupayung	Sugihwaras	Adimulyo	2,000
18	Krandegan	Krandegan	Puring	0,665
19	Krasak	Jatimalang	Klirong	2,000
20	Lumpang	Bumiagung	Rowokele	1,500
21	Munggu	Munggu – Tambakmulyo	Petanahan, Puring	10,000
22	Pacor	Jemur Clowok	Kebumen	2,000
23	Rangga Ula	Pringtutul	Rowokele	2,500
24	Siwarak	Jatiroto	Buayan	2,500
25	Semali	Semali	Sempor	1,000
26	Sosogan	Seling	Karangsambung	2,50
27	Sokadana	Kajoran	Karanggayam	2,00
28	Tanjungrejo	Tanjungrejo – Sangubanyu	Buluspesantren	2,750
29	Tembelang	Mangunweni	Ayah	1,600
30	Widakan	Purwoharjo	Puring	0,950
31	Kalibej	Karangsari	Buayan	0,381
Total				72,272

Sumber: SK Bupati Kebumen Nomor 611/216/Kep/2016, Tentang Daerah Irigasi Dan Saluran Drainase YangMenjadi Kewenangan Pemkab Kebumen

d) Air Minum dan Sanitasi

Aspek air bersih dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam rangka memenuhi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ke-6 yakni air bersih dan sanitasi layak, Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap aspek tersebut. Akses air minum perpipaan menjadi parameter dikarenakan proses pemanfaatannya oleh masyarakat dapat lebih terjamin dalam hal kualitas dan kebersihan air. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan cenderung menurun dari 22,11% pada Tahun 2020 menjadi 18,74% pada Tahun 2024. Jaringan perkotaan yakni jaringan yang dikelola oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen serta jaringan SPAM Regional Keburejo yang dikelola oleh PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah. Beberapa permasalahan pemenuhan akses air minum oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa adalah masih rendahnya *idle capacity* khususnya SPAM Keburejo rata rata tahun 2023 penyerapan konsumen 60 liter/det masih dibawah kapasitas 150 liter/detik ini berarti masih ada potensi air perpipaan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

Sementara itu, akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan juga cenderung mengalami penurunan dari 11,62% pada Tahun 2020 menjadi 11,12% pada Tahun 2024. Jaringan pedesaan yakni jaringan yang dibangun dan dikelola oleh

masyarakat di pedesaan, baik yang berasal dari dana APBN maupun APBD, seperti dari Program Pamsimas, Hibah Air Bersih/Minum, DAK dan sebagainya. Penyelenggaraan sistem air minum pedesaan dikelola oleh KPSPAM, permasalahan dan kendala di setiap desa bervariasi, namun secara umum kendala penyelenggaraan air minum pedesaan yaitu terbatasnya sumber air baku dan manajemen KPSPAM yang perlu ditingkatkan. Selain itu berbeda dengan air minum PDAM, air minum perpipaan di pedesaan belum mendapatkan uji kualitas air minum sehingga belum masuk kategori air siap minum aman.

Secara umum persentase rumah tangga mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baik di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami penurunan dari 20,94% pada Tahun 2020 menjadi 19,62% pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena pengembangan air minum perpipaan baik di pedesaan maupun perkotaan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang terjadi. Sedangkan akses rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen telah mencapai 100% sejak Tahun 2023.

Tabel 2.72.
Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	22,11	23,91	17,96	18,42	18,74
2	Akses Rumah Tangga Pedesaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	11,62	12,57	10,50	11,04	11,12
3	Persentase Rumah Tangga mendapatkan Pelayanan Air Minum Perpipaan (Pedesaan dan Perkotaan dalam %)	20,94	22,13	17,96	18,73	19,62
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota (%)	86,37	87,8	96,84	100	100

Sumber: DPUPR dan PDAM Kab. Kebumen 2024 (data diolah)

Sementara itu, kondisi sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kebumen mayoritas menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (on-site sistem/SPALD-S) yaitu pengolahan limbah yang diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber tanpa dialirkan. Sistem ini memanfaatkan fasilitas tangki septik skala rumah tangga dan tangki septik di beberapa rumah tangga (5-10 SR), serta cubluk di pedesaan. Sistem ini menyediakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai sarana pengolahan lumpur dari tangki septik. Pada saat ini Kabupaten Kebumen memiliki 2 (dua) sarana IPLT yang berada di Kaligending Karangsembung dan IPLT yang berada di Semali Kecamatan Sempor (beroperasi tahun 2023).

Meskipun persentasenya masih kecil, Kabupaten Kebumen juga menerapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (off-site sistem/SPALD-T), yaitu pengolahan limbah yang diselesaikan secara terpusat/komunal melalui jaringan pengumpul

yang diteruskan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,78% pada Tahun 2020 menjadi 3,67% pada Tahun 2024. Walaupun akses sanitasi layak sempat menurun dari 93% pada Tahun 2020 menjadi 86,97% pada Tahun 2023, namun kembali meningkat pada Tahun 2024 mencapai 96,22%. Selama ini budaya masyarakat membangun *septic tank* masih pada kriteria belum layak secara fisik dengan kondisi bawah dan dinding belum kedap dan belum dilakukan penyedotan secara rutin 2-3 tahun sekali, bahkan dari segi fisik belum sesuai persyaratan yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat membangun akses sanitasi aman dan kemampuan pembiayaan masyarakat masih rendah. Sedangkan kasus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terbuka sudah tidak ada atau 0% dan BABS tertutup telah mencapai 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.73.
Capaian Akses Sanitasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0,78	0,85	1,18	2,02	3,67
2	Akses Layak (%)	93,00	91,99	78,81	86,97	96,22
3	Akses Belum Layak (%)	6,20	5,07	18,67	10,92	3,78
4	BABS Tertutup (%)	100	100	100	100	100
5	BABS Terbuka (%)	0	0	0	0	0

Sumber: DispekimHub Kab. Kebumen 2024 (data diolah)

2) Penataan Ruang

Penataan ruang di Kabupaten Kebumen diselenggarakan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran dari RTRW.

Kabupaten Kebumen memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, yang mana peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Revisi Perda RTRW ini bertujuan untuk lebih menyesuaikan kebutuhan dan penataan wilayah Kabupaten Kebumen terhadap kebutuhan, permasalahan dan isu pembangunan di Kabupaten Kebumen, provinsi dan Nasional. Terkait kinerja penyelenggaraan tata ruang menunjukkan terjadinya peningkatan persentase ketaatan terhadap RTRW yang diukur dari kesesuaian lahan dengan pola ruang RTRW dari 75% pada Tahun 2020 menjadi 91,35% pada Tahun 2024.

Tabel 2.74. Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ketaatan terhadap RTRW (%)	75	75	91,15	91,25	91,35

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen 2024

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan program prioritasnya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak. Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga

Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 adalah 476.112 dengan jumlah rumah yang tersedia sebesar 354.807. Ini berarti terdapat rumah tangga yang masih menumpang dengan KK induknya. Sesuai data BKKBN tahun 2020 terdapat data backlog sebanyak 64.093 dan terus meningkat menjadi 121.305 pada Tahun 2024. Berdasarkan data ini terdapat kekurangan kepemilikan rumah (*backlog*) yang sangat besar dan harus dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 2.75. Status <i>Backlog</i> Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024					
URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah	354.807	354.807	354.807	354.807	354,807
Jumlah Rumah Tangga	325.963	356.220	369.138	461.823	476,112
Backlog	64.093	64.093	64.070	64.070	121,305

Sumber : BPS, Disperkimhub, 2024

Selain terkait backlog kepemilikan rumah, penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen berjalan membaik. Hal ini ditunjukkan dengan luas permukiman kumuh perkotaan yang tertangani dari 52,35 Ha pada Tahun meningkat menjadi 125,92 Ha pada Tahun 2024. Sehingga, luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani semakin berkurang dari 290,92 Ha pada Tahun 2020 menjadi 217,35 Ha pada Tahun 2024. Dengan demikian, persentase wilayah kumuh perkotaan juga semakin berkurang dari 5,04% pada Tahun 2020 menjadi 3,76% pada Tahun 2024.

Tabel 2.76. Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Area Permukiman (Ha)	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82
	a. Permukiman Perkotaan	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96
	b. Permukiman Perdesaan	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Luas Permukiman Kumuh perkotaan sesuai SK (Ha)	343,27	343,27	343,27	343,27	343,27
3	Luas Permukiman kumuh perkotaan yang tertangani (kumulatif) (Ha)	52,35	54,65	55,15	83,82	125,92
4	Luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani (kumulatif) (Ha)	290,92	288,62	288,12	259,45	217,35
5	Persentase wilayah kumuh perkotaan (%)	5,04%	5,00%	4,99%	4,49%	3,76%

Sumber: Disperkimhub Kab. Kebumen 2024

Penanganan kawasan kumuh merupakan pekerjaan yang terintegrasi dari beberapa perangkat daerah, dimana terdapat 7 aspek penilaian yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, dimana suatu wilayah bila mendapatkan skor 16 ke atas dari 7 aspek maka akan masuk dalam wilayah kumuh. Rata rata kekumuhan perkotaan Kebumen masuk dalam kriteria kumuh ringan sampai kumuh sedang.

Dikarenakan kondisi keuangan daerah, jumlah RTLH yang tertangani setiap tahun cenderung menurun dari 5.412 unit pada Tahun 2020 menjadi hanya 806 unit pada Tahun 2024. Namun demikian sisa RTLH yang belum tertangani terus menurun jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar 26.342 unit menjadi 22.460 unit pada Tahun 2024. Walaupun menurun pada Tahun 2021 jika dibandingkan Tahun 2020, persentase rumah layak huni cenderung meningkat kembali dari 92,58% pada Tahun 2021 menjadi 93,67% pada Tahun 2024. Hal ini selaras dengan persentase RTLH yang cenderung menurun mulai Tahun 2021 sebesar 7,42% menjadi 6,33% pada Tahun 2024. Sementara diakibatkan kemampuan pendanaan yang menurun serta meningkatnya jumlah rumah baru dalam kondisi RTLH, persentase RTLH tertangani juga menurun dari 90,02% pada Tahun 2020 menjadi 3,46% pada Tahun 2024.

Secara umum akses hunian layak diukur dengan ketentuan rumah layak huni, akses air minum layak dan akses sanitasi layak. Dalam hal rumah layak huni diukur dengan ketahanan bangunan yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah yang memenuhi syarat serta kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2. Berdasarkan data Susenas menunjukkan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak cenderung menurun dari 93,96% pada Tahun 2020 menjadi 69,80% pada Tahun 2024. Indikator ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sektor perumahan.

Tabel 2.77.
Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah	306,885	354,807	354,807	354,807	354,807
2	Jumlah rumah layak huni	306,285	328,465	329,912	331,541	332,347
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6,012	28,635	26,342	24,895	23,266

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah RTLH tertangani	5,412	2,293	1,447	1,629	806
5	Sisa RTLH yang belum tertangani	600	26,342	24,895	23,266	22,460
6	Persentase rumah layak huni	99.80	92.58	92.98	93.44	93.67
7	Persentase rumah tidak layak huni	0.20%	7.42%	7.02%	6.56%	6.33%
8	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	90.02%	8.01%	5.49%	6.54%	3.46%
9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	93.96	73.26	71.44	71.09	69.80

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, Tahun 2024

Pada tahun 2024 penanganan rumah akibat korban bencana masih terbatas yaitu sebanyak 10 unit. Keterbatasan pemenuhan SPM ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dialokasikan di bidang perumahan. Sampai akhir tahun 2024 jumlah rumah korban bencana di Kabupaten Kebumen yang belum tertangani sebanyak 70 unit. Pemenuhan SPM perumahan korban bencana tetap terus dilaksanakan di tahun mendatang. Diharapkan tahun 2025 semua rumah korban bencana dapat tertangani.

Tabel 2.78.
Penanganan Rumah Korban Bencana Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah korban bencana	127	118	112	91	80
2	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	9	6	21	11	10
3	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani s/d tahun n	9	15	36	47	57
4	Jumlah rumah korban bencana yang belum tertangani s/d tahun n	118	112	91	80	70

Sumber: Disperkimhub Kab. Kebumen 2024

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a) Kebencanaan

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Kebumen menyebabkan Kabupaten Kebumen terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi mengalami peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Data kejadian dan taksiran kerugian bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut seperti tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.79.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	Jumlah kejadian	Kerusakan (Rp)	Kerugian (Rp)	Meninggal (orang)	Luka Berat (orang)	Luka Ringan (orang)	Pengungsi (orang)
TAHUN 2020								
1	Tanah Longsor	144	4.686.850.000	3.890.125.000	0	1	0	114
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	37	2.569.200.000	3.100.750.000	0	0	0	2353
4	Angin	96	234.100.000	108.030.000	0	0	0	0

No	Jenis Bencana	Jumlah kejadian	Kerusakan (Rp)	Kerugian (Rp)	Meninggal (orang)	Luka Berat (orang)	Luka Ringan (orang)	Pengungsi (orang)
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	376	0	0	0	0	0	0
TAHUN 2021								
1	Tanah Longsor	55	2.082.000.000	1.384.950.000	3	0	0	132
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	11	283.500.000	2.251.500.000	1	0	0	0
4	Angin	47	398.650.000	217.600.000	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	0	0	0	0	0	0	0
TAHUN 2022								
1	Tanah Longsor	67	7.624.450.000	6.127.475.000	2	0	0	269
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	13	2.554.100.000	69.786.885.000	1	0	0	12605
4	Angin	86	1.157.688.000	645.987.500	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	0	0	0	0	0	0	0
TAHUN 2023								
1	Tanah Longsor	29	1.173.800.000	396.050.000	0	0	0	0
2	Gempa Bumi	0	0		0	0	0	0
3	Banjir	3	75.500.000	69.000.000	0	0	0	0
4	Angin	34	501.067.000	158.800.000	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	20	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	1387	0	472.285.000	0	0	0	0
TAHUN 2024								
1	Tanah Longsor	69	0	0	0	0	0	0
2	Gempa Bumi	1	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	24	716,090,000	662,350,000	0	0	0	135
4	Angin	109	0	0	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	13	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	52	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2024

Pada periode lima tahun terakhir, dari 7 (tujuh) potensi bencana yang ada di Kabupaten Kebumen, bencana yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian adalah tanah longsor, banjir dan angin. Pada musim hujan bencana yang sering terjadi adalah banjir di daerah cekungan dan tanah longsor di daerah pegunungan. Di sisi lain, bencana kekeringan cukup sering terjadi pada saat musim kemarau. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan adalah dengan dropping air bersih pada titik-titik kekeringan.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Kebumen tersebar di daerah dataran rendah di wilayah selatan, dari Kecamatan Ayah sampai dengan Mirit. Sungai besar di Kebumen barat yang rawan banjir adalah Sungai Telomoyo di daerah Adimulyo, Kuwarasan dan Puring. Di daerah Kebumen tengah, sungai yang rawan banjir adalah Sungai Kedungbener yang melintasi Kecamatan Kebumen dan Buluspesantren. Adapun di daerah Kebumen timur sungai yang rawan banjir adalah Sungai Gentan di daerah Kecamatan Prembun, Mirit, dan Bonorowo.

Tabel 2.80.
Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Jenis	Jumlah					Kebutuhan	Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	EWS Tsunami	17	23	23	24	24	29	titik
2	EWS Longsor	4	15	21	24	25	85	titik
3	EWS Banjir	3	3	3	3	3	21	titik
4	Detektor Gempa BMKG	1	2	2	3	3	3	unit

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2024

Sistem peringatan dini EWS (early warning system) menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka suatu peristiwa yang dapat menimbulkan bencana dahsyat dapat diperkecil dampak negatifnya. Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah Alat Deteksi Dini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat dan seluruh stakeholder kebencanaan pada saat (dugaan) akan terjadi datangnya bencana. Namun demikian jumlah alat EWS yang ada masih kurang dari kebutuhan sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak.

Tabel 2.81.
Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Desa Tangguh Bencana	Dropping Air Bersih (tangki)	Evakuasi Bencana (kejadian)	Rehab Rekon Jalan/Jembatan Pasca Bencana	Rehab Tebing Sungai Pasca Bencana
1	2020	70	34	744	1 Paket	5 Paket
2	2021	460	3	113	1 Paket	4 Paket
3	2022	460	0	166	0 Paket	5 Paket
4	2023	460	1387	140	1 Paket	0 Paket
5	2024	460	578	0	0 Paket	2 Paket

Sumber : BPBD 2024

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci Desa Tangguh Bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Jumlah Destana yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2021 sebanyak 460 Destana di seluruh desa/kelurahan. Untuk meningkatkan kemampuannya, setiap tahun terus dilakukan peningkatan kapasitas Destana secara bergilir. Pada tahun 2024, kegiatan yang terkait dengan Destana adalah berupa peningkatan kapasitas Destana pada 13 desa/kelurahan yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.82.
Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas
Desa Tangguh Bencana Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Sumber Dana	Keterangan
1	Buayan	Jogomulyo	APBD 2024	
2	Klirong	Tambakagung	APBD 2024	
3	Mirit	Pekutan	APBD 2024	
4	Poncowarno	Tirtomoyo	APBD 2024	
5	Kebumen	Bandung	APBD 2024	
6	Sruweng	Karangsari	APBD 2024	
7	Sruweng	Donosari	APBD 2024	
8	Adimulyo	Banyurata	APBD 2024	
9	Kuwarasan	Gandusari	APBD 2024	
10	Sempor	Tunjungseto	APBD 2024	
11	Karanganyar	Wonorejo	APBD 2024	
12	Karanganyar	Jatiluhur	APBD 2024	
13	Alian	Kambang Sari	APBD 2024	

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2024

Sebagai upaya peningkatan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat maka jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu menjadi perhatian. Jumlah SDM BPBD meningkat di Tahun 2024 menjadi 48 orang dari sebelumnya 45 orang, namun demikian jumlah relawan penanggulangan bencana menurun drastis menjadi hanya 165 orang di Tahun 2024 dari sebelumnya 540 orang.

Tabel 2.83.
Sumber Daya Manusia (SDM) Penanggulangan Bencana
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	BPBD	Orang	45	45	45	45	48
2	Relawan Penanggulangan Bencana	Orang	540	540	540	540	165

Sumber: BPBD Kab. Kebumen

Sejak tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2026 menunjukkan tingkat risiko multibahaya Kabupaten Kebumen pada kategori tinggi untuk kelas bahaya, kategori sedang untuk kelas kerentanan, kategori tinggi untuk untuk kelas kapasitas dan kategori sedang untuk kelas risiko.

IRBI Kabupaten Kebumen cenderung meningkat yang menunjukkan lebih meningkat risiko terhadap bencana yaitu dari 114,67 pada Tahun 2020 menjadi 121,38 pada Tahun 2024. Untuk meminimalisir risiko bencana, dari ketiga komponen pembentuk IRBI dapat diupayakan dengan menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas Kabupaten Kebumen dalam mengelola bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mencapai 0,87 pada Tahun 2024 dimana perlu memaksimalkan peningkatan 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.

Tabel 2.84.
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	114,67	114,67	102,05	110,78	121,38
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	N.A.	0,87	N.A.	0,90	0,87

Sumber: BPBD Kab. Kebumen

b) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kinerja urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen relatif stabil selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dengan persentase Penyelesaian Penegakkan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan Persentase Penegakkan Perda yang mencapai 100% pada setiap tahunnya. Sempat terjadi peningkatan jumlah pelanggaran K3 pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan adanya sejumlah pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Sampai dengan tahun 2024, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 206 orang yang terdiri dari 41 ASN 165 Non ASN. Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah ideal Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kebumen serendah-rendahnya 251 orang dan setinggi-tingginya 350 orang. Angka ini didapatkan dari perhitungan total skor kriteria umum ditambah kriteria teknis Kabupaten Kebumen sebesar 736 (masuk kategori interval 500-750).

Berdasarkan data, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per jumlah 10.000 penduduk cenderung meningkat selama kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio jumlah Polisi Pamong Praja (ASN dan Non ASN) per jumlah 10.000 penduduk sebesar 1,01 meningkat menjadi 1,43 pada Tahun 2024. Peningkatan rasio ini disebabkan adanya kenaikan jumlah aparaturnya Polisi Pamong Praja Non ASN. Pemenuhan SDM Polisi Pamong Praja diperlukan karena adanya tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen. Walaupun

kedua pelanggaran tersebut dapat diatasi dan diselesaikan secara penuh sebesar 100, namun hingga Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pelanggaran K3 sebesar 35.226 kasus dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah sebanyak 35.969 kasus.

Sementara itu penanganan kebakaran di Kabupaten Kebumen telah cukup optimal. Hal ini terlihat dari *respon time* penanganan kebakaran di Kabupaten Kebumen yang pada Tahun 2024 mencapai 8,6 menit. Pencapaian ini cukup baik karena *respon time* penanganan kebakaran idealnya paling lambat 15 menit sejak menerima laporan hingga tim pemadam kebakaran tiba di lokasi penanganan.

Tabel 2.85.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	814	814	777	826	826
Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	7	7	7	7	7
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja (ASN)	50	49	47	38	41
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja (Non ASN)	102	103	97	165	165
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (ASN dan Non ASN) per 10.000 Penduduk	1,01	0.34	0.99	1,46	1,43
Jumlah Pos Siskamling	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
Jumlah Desa/Kelurahan	460	460	460	460	460
Rasio Pos Kamling per desa/kelurahan	9	8,75	8,75	8,75	8,75
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	49	2	21	6	6
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	10.033	9.750	9.750	12.422	12.422
Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	72,4	72,21	71,59	87,2	87,2
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	21	195	307	16.747	35.226
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	21	195	307	16.747	35.226
Presentase Penyelesaian Penegakkan K3	100	100	100	100	100
Jumlah Pelanggaran Perda	72	65	118	16.796	35.969
Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda	72	65	118	16.796	35.969
Persentase Penyelesaian Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran (menit)	DATA BELUM TERSEDIA	7.5	10.1	9	8,6

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan Polres Kebumen, 2024

f. Sosial

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah khususnya bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak perlu terus ditingkatkan cakupan fasilitas publik yang inklusif. Fasilitas ini disediakan agar dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, kondisi kesehatan atau kebutuhan khusus lainnya. Data menunjukkan masih minimnya perangkat daerah, kantor kecamatan, kelurahan dan desa yang telah menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak yaitu sebesar 4,34% pada Tahun 2023 dan 2024. Hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.86.
Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif pada Kantor Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	Rumus	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif (%)	jumlah jumlah kantor perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa yang telah menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak dibagi jumlah keseluruhan kantor perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa dikalikan 100%	0	0	0	4,34	4,34

Sumber: Dinsos P3A Kab. Kebumen

Sementara itu, upaya penanganan masalah sosial juga terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sepanjang Tahun 2020-2024. Hal ini dapat dilihat dengan semakin menurunnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga menjadi 0,67% dari total keseluruhan populasi penduduk di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024. Secara jumlah terdapat 9.674 orang yang masuk ke dalam golongan PMKS di Tahun 2024 dimana secara umum dapat ditangani 100% selama Tahun 2024. Hal tersebut tercermin dari persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti telah mencapai 100% sejak Tahun 2023. Selain itu, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terus meningkat dari 6,65% pada Tahun 2020 menjadi 60,53% pada Tahun 2024. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti juga telah mencapai 100% sejak Tahun 2023 sedangkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti telah mencapai 100% sejak Tahun 2022. Hal yang sama terjadi pada rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti yang telah mencapai 100% sejak Tahun 2022 sedangkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti telah mencapai 100% sejak Tahun 2021. Selain itu, persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas juga telah mencapai 100% sejak Tahun 2023. Untuk persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan

dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota telah mencapai 100% setiap tahunnya. Kinerja ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok marginal dan rentan.

Tabel 2.87.
Kinerja Penanganan Permasalahan Sosial
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	45.77	58.96	2.25	10.27	0.67
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (%)	44,59	98,22	99,74	100	100
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	6,65	10,92	16,17	17,05	60,53
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)	19,48	99,34	99,64	100	100
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti (%)	32,16	98,67	100	100	100
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)	53,29	84,09	100	100	100
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)	29,57	100	100	100	100
8	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)	31,94	99,34	99,64	100	100
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos P3A, 2024

2.1.3.2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

a. **Ketenagakerjaan**

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Selain itu bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat mendorong penurunan angka pengangguran utamanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terjadi dikarenakan adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

1) **Kondisi Pencari Kerja**

Pencari kerja terdaftar, diperoleh berdasarkan data pemohon kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu AK1. Pemilik kartu AK1 secara otomatis akan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sehingga bila sewaktu-waktu ada informasi lowongan kerja, maka pihak dinas akan memprioritaskan pemilik kartu AK1 untuk mendapatkan informasi. Disnaker juga akan mempromosikan pemilik kartu AK1 kepada perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan baru. Adapun data jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.88.
Kondisi Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari Kerja Terdaftar	15.113	14.695	15.104	12.367	13.650
	a. Laki-laki	7.628	6.800	6.894	5.892	5.810
	b. Perempuan	7.485	7.895	8.210	6.475	7.840
2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	872	7.569	12.459	4.355	3.553
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (persen)	5,76	51,5	82,49	29,22	26,02

Sumber : Disnaker 2024

Pelayanan kartu AK-1 merupakan bentuk pelayanan publik sebagai salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan di perusahaan/ instansi baik negeri maupun swasta. Pembuatan kartu AK-1 mendasari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Sampai dengan saat ini, kesadaran perusahaan masih relatif rendah untuk melaporkan data penempatan tenaga kerja di perusahaannya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, hal ini sejalan dengan pentingnya Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Dalam hal pengawasan ketenagakerjaan perusahaan menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja di tingkat Provinsi. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kebumen

cenderung menurun dari 15.113 orang pada Tahun 2020 menjadi 13.650 orang pada Tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan masih belum optimalnya pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. Sementara itu, dari data pencari kerja terdaftar tersebut juga terlihat jumlah pencari kerja perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan laki-laki sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Walaupun jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada Tahun 2022 yaitu mencapai 12.459 orang atau sekitar 82,49% berhasil ditempatkan atau mendapat pekerjaan, namun sejak Tahun 2023 justru mengalami penurunan hingga hanya mencapai 3.553 orang atau 26,02% pada Tahun 2024. Situasi perekonomian global hingga daerah yang tidak menentu sebagai dampak lanjutan Pandemi Covid-19, fenomena ekonomi digital, inflasi hingga deflasi menyebabkan banyak perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan melakukan PHK dikarenakan beberapa perusahaan bahkan harus tutup. Selain itu pesatnya perkembangan teknologi juga mampu menggeser keberadaan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti halnya pekerjaan yang dikerjakan oleh *artificial intelligence*. Walaupun demikian, Dinas Tenaga Kerja tetap berupaya untuk mencari lowongan pekerjaan di perusahaan dengan *Job Canvasing* dan meningkatkan *soft skill* para pekerja.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan TPAK Perempuan serta Keterserapan Tenaga Kerja

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tabel 2.89.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Keterserapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK dalam %)	69,63	67,76	71,57	74,54	77,37
	a. TPAK Laki-Laki	81,88	80,22	82,42	86,37	88,08
	b. TPAK Perempuan	57,67	55,59	60,96	62,49	66,46
	Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja (%)	15,76	42,00	57,29	30,66	37,56

Sumber : BPS dan Disnaker 2024

Berdasarkan hasil Sakernas dengan penimbang jumlah penduduk usia kerja, TPAK di Kabupaten Kebumen selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan dari 69,63% pada Tahun 2020 menjadi 77,37% pada Tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pasokan tenaga kerja *labour supply* yang aktif di Kabupaten Kebumen semakin meningkat. Hal ini memang berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja yang cenderung menurun dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran tersebut.

Sementara itu selaras dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara total, masing-masing TPAK laki-laki maupun perempuan juga mengalami peningkatan, namun demikian TPAK laki-laki cenderung lebih besar dari perempuan dimana hingga Tahun 2024 TPAK perempuan hanya sebesar 66,46% dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 88,08%. Hal ini kemungkinan dapat terjadi dikarenakan:

- a) Masih terdapat peran gender tradisional dimana perempuan lebih berperan pada urusan domestik/rumah tangga sehingga tidak aktif sebagai angkatan kerja;
- b) Perempuan mungkin masih memiliki akses yang lebih terbatas pada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja;
- c) Perempuan mungkin menghadapi kesenjangan upah atau tidak tertarik memasuki pasar tenaga kerja karena pekerjaan tertentu kurang menguntungkan;
- d) Tugas dan tanggung jawab sebagai perempuan (ibu) dapat mempengaruhi persepsi penerima kerja dalam mempekerjakan perempuan serta masih belum optimalnya fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak atau kebijakan cuti melahirkan yang memadai dapat membatasi partisipasi perempuan di tempat kerja; serta
- e) Perempuan mungkin masih menghadapi budaya dan norma sosial yang membatasi mobilitas dan pilihan pekerjaan perempuan.

Namun demikian, capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja cenderung sepertinya sejalan dengan capaian jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada Tahun 2022 yaitu mencapai 57,29% berhasil terserap atau memiliki pekerjaan, namun kemudian cenderung menurun hingga mencapai 37,56% pada Tahun 2024. Hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan situasi perekonomian yang tidak menentu selama beberapa tahun terakhir menyebabkan banyak perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan melakukan PHK dikarenakan beberapa perusahaan bahkan harus tutup. Selain itu perkembangan ekonomi digital dan *artificial intelligence* semakin mempengaruhi jumlah lapangan kerja yang tersedia atau semakin membutuhkan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu.

3) Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selain tidak menganggur, masyarakat yang menjadi angkatan kerja diharapkan juga mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kehidupannya sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum terjamin. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang terus meningkat dari Rp.1.835.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.2.121.947,00 pada Tahun 2024. Peningkatan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMK biasanya lebih mungkin diterapkan pada sektor formal. Sektor formal lebih dimungkinkan dapat memberikan jaminan atas pekerjaan yang bersifat tetap hingga adanya jaminan sosial bagi kesejahteraan pegawainya. Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal cenderung menurun dari 30,21% pada Tahun 2020 menjadi 25,50% pada Tahun 2024. Hal ini juga menyebabkan persentase tenaga kerja informal cenderung meningkat dan semakin mendominasi hingga Tahun 2024 mencapai 74,50%. Sementara itu, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercermin dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cenderung menurun dari 54% pada Tahun 2022 menjadi 53,71% pada Tahun 2024. Hal ini disebabkan terjadinya penutupan 4 perusahaan selama Tahun 2024 yang menyebabkan terjadinya PHK terhadap 252 orang tenaga kerja.

Tabel 2.90.
Kondisi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	1.835.000	1.895.000	1.906.782	2.035.890	2.121.947
2	Persentase tenaga kerja formal (%)	30,21	30,4	26,79	31,17	25,50
3	Persentase tenaga kerja informal (%)	69,79	69,6	73,21	68,83	74,50
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten (%)	BELUM TERSEDIA DATA	BELUM TERSEDIA DATA	54	61	53,71

Sumber : BPS dan Disnaker 2024

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah proses memberikan perempuan akses, kesempatan, dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, baik secara individu maupun kolektif dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta memberikan kepada perempuan kendali atas sumber daya dan hak-hak yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan.

Tabel 2.91.
Profil Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,416	0,359	0,349	0,344	0,328
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,05	93,06	93,26	93,37	93,39
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,89	66,86	66,87	67,78	69,71
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	54,76	47,37	58,53	59,65	59,50
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	22	22	22	22	24
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	34,26	43,66	48,87	32,97	32,97
7	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan (%)	0,005	0,007	0.009	0.010	0,007

Sumber : Dinsos P3A, 2024

Terdapat beberapa indiktator yang dapat mengukur ketercapaian pemberdayaan perempuan. Yang pertama adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang memberikan gambaran bagaimana ketimpangan gender berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi akan mempengaruhi pembangunan manusia. IKG Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang membaik dari 0,416 pada Tahun 2020 menjadi 0,328 pada Tahun 2024 yang menunjukkan

ketimpangan gender semakin mengecil. Indikator berikutnya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana seperti halnya IPM, diukur berdasarkan dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG dihitung sebagai rasio antara IPM Perempuan terhadap IPM Laki-Laki sehingga jika nilainya mendekati 1 menunjukkan semakin tingginya tingkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Kebumen juga cenderung membaik dari 93,05 pada Tahun 2020 menjadi 93,39 pada Tahun 2024 yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia (SDM) semakin setara antara perempuan dan laki-laki serta permasalahan gender semakin mampu ditangani.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. IDG Kabupaten Kebumen relatif membaik dari 66,89 pada Tahun 2020 menjadi 69,71 pada Tahun 2024 yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan gender yang perlu diperbaiki. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga cenderung meningkat dari 54,76% pada Tahun 2020 menjadi 59,65% pada Tahun 2023, namun sedikit menurun pada Tahun 2024 menjadi 59,50% . Sementara untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD juga meningkat dari 22% pada Tahun 2020 menjadi 24% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga parlemen tingkat Kabupaten Kebumen masih berada di bawah 30 persen. Peningkatan partisipasi perempuan perlu terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait peraturan perundang-undangan yang pro perempuan maupun anak. Terkait partisipasi perempuan di lembaga swasta juga cenderung menurun dari 34,36% pada Tahun 2020 menjadi 32,97% pada Tahun 2024. Selain isu pemberdayaan, isu lain yang penting adalah perlindungan perempuan dimana hal ini tercermin dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun persentase kekerasan terhadap perempuan sempat meningkat dari 0,005% pada Tahun 2020 menjadi 0,010% pada Tahun 2023, namun dapat kembali menurun di Tahun 2024 menjadi sebesar 0,007%. Dalam upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya penanganan, rehabilitasi, bantuan hukum hingga pemulihan dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

2) Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Perlindungan mencakup pencegahan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran atau perlakuan yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik dan mental anak. Perlindungan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh keluarga, masyarakat hingga lembaga terkait lainnya. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Tabel 2.92.
Profil Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kekerasan Anak (%)	0.022	0.018	0.015	0.014	0,016
2	Jumlah perkawinan anak di bawah usia 19 tahun (kasus)	148	282	269	278	165
3	Indeks Kabupaten Layak Anak	NA	Madya	Madya	Madya	Madya

Sumber : Dinsos P3A, 2024

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen terhadap perlindungan anak. Walaupun persentase kekerasan terhadap anak sempat menurun dari 0,022% pada Tahun 2020 menjadi 0,014% pada Tahun 2023, namun sedikit meningkat pada Tahun 2024 menjadi 0,016%. Selain itu jumlah perkawinan anak di bawah usia 19 Tahun di Kabupaten Kebumen masih terjadi walaupun cenderung menurun hingga pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 165 kasus. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak juga terus dilakukan dimana hal ini tercermin dari indeks Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah mencapai tingkatan madya sejak Tahun 2021. Hal ini menunjukkan Kabupaten Kebumen telah memenuhi sebagian besar dari 31 indikator KLA khususnya terkait hak anak, telah memiliki kebijakan dan infrastruktur yang lebih ramah anak, terdapat sinergi yang cukup kuat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program anak serta program dan kegiatan hak anak sudah mulai dilakukan secara berkelanjutan meskipun belum sempurna. Dengan kata lain, KLA tingkatan madya menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen telah berkomitmen serius terhadap hak anak, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.

Namun demikian agar bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi yaitu nindya, maka ke depan perlu dilakukan:

- a) Memastikan kebutuhan seluruh indikator hak anak dengan standar lebih tinggi;
- b) Memperluas akses dan kualitas program seperti pendidikan inklusif, kesehatan anak serta perlindungan khusus bagi anak yang rentan; dan
- c) Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap program terkait anak.

c. Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

Untuk mengukur sejauh mana sebuah wilayah mampu menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan, dapat tercermin pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks ini secara umum mengukur ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, serta stabilitas pangan. Kinerja IKP Kabupaten Kebumen cenderung membaik dari 80,41% pada Tahun 2020, walaupun sempat menurun sejak Tahun 2021, kembali meningkat menjadi 81,21 pada Tahun 2024. Dengan skor IKP di atas 80 mencerminkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen sangat baik. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen tidak hanya bebas dari kerawanan pangan, tetapi juga memiliki sistem pangan yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat tercermin dari persentase ketersediaan pangan yang relatif meningkat dari 6,4% pada Tahun 2020 melonjak naik menjadi 33,42% pada Tahun 2024. Namun demikian dengan angka baru sebesar 33,42% menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Kebumen masih dipasok dari luar daerah.

Tabel 2.93.
Ketahanan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	80,41	78,56	79,29	80,34	81,21
Persentase Ketersediaan Pangan (%)	6,4	2,81	5,31	21,35	33,42

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2024

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

Selain diukur dari ketahanannya, juga perlu diukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi. Hal ini dapat tercermin dari Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) yang mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. PoU Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 12,55% pada Tahun 2020 menjadi 9,2% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan walaupun terus menurun, masih terdapat 9,2% dari total penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pangan dan gizi, seperti melalui bantuan pangan, subsidi atau peningkatan produksi pangan lokal. Dampak kekurangan gizi seperti ini juga dapat menurunkan produktivitas, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial seperti tingginya beban kesehatan masyarakat.

Tabel 2.94.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

Uraian	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU dalam %)	-	12,55	13,52	12,46	12,00	9,2
Skor Pola Pangan Harapan (PPH dalam %)	100,0	87	85,9	90	91,9	93,05
Skor PPH masing-masing Kelompok Pangan:						
Padi-padian (%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Umbi-umbian (%)	2,5	1,2	1,0	0,9	1,1	0,84
Pangan Hewani (%)	24,0	17,6	17,5	18,2	19,2	20,92
Minyak & Lemak (%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Buah/ biji Berminyak (%)	1,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,38
Kacang-kacangan (%)	10,0	6,8	6,4	8,7	9,2	8,97
Gula (%)	2,5	2,3	2,3	1,9	2,0	1,94
Sayur & Buah (%)	30,0	28,8	28,3	30,0	30,0	30,0

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2024

Dalam perencanaan penyediaan pangan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat, untuk mewujudkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dinilai dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. PPH merupakan susunan beragam pangan, berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari Sembilan kelompok pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan (mencakup konsumsi terhadap karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.

Berdasarkan hasil analisis Skor PPH selama 5 tahun terakhir, capaian Skor PPH Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 87% pada Tahun 2020 menjadi 93,05% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dengan skor PPH telah melebihi 90% menunjukkan pola konsumsi pangan Kabupaten Kebumen sudah mendekati ideal atau seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi yang di lanjutkan. Capaian ini merupakan akumulasi dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditandai dengan penurunan konsumsi beras, serta diimbangi penambahan konsumsi sayur, buah, umbi dan protein hewani. Skor PPH Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 menunjukkan adanya beberapa kelompok pangan yang masih berada di bawah standar PPH yakni umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula. Selain padi-padian serta minyak dan lemak yang selalu sesuai standar PPH, konsumsi sayur dan buah juga telah mencapai standar PPH sejak Tahun 2022.

d. Pertanian

Berdasarkan nomenklatur yang telah diatur pada Permendagri 90/2021, bidang urusan pertanahan pada pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini tercermin dari kinerja capaian indikator persentase penanganan sengketa lahan yang setiap tahun selalu dapat terealisasi sebesar 100%. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi yang baik antar instansi Perangkat Daerah serta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari konflik sosial pertanahan dengan memfasilitasi penyelesaian pertanahan.

Tabel 2.95.
Penanganan Sengketa Lahan Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Sengketa Lahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber DPUPR dan BPN, Tahun 2024

e. Lingkungan Hidup

- 1) Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibangun dari komponen kualitas air, udara, tanah, dan penanganan sampah. IKLH merupakan penilaian kinerja perbaikan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.96.
Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92	64,43	68,17	67,16	69,86
2	Indeks Kualitas Air	57,69	52,37	54,49	51,74	53,11
3	Indeks Kualitas Udara	90,75	89,99	90,94	90,41	91,42
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	70,66	37,86	49,53	50,63	58,73

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang. IKA masih cukup rendah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami.

2) Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen memang cenderung menurun dari 47,65% pada Tahun 2020 menjadi 25,69% pada Tahun 2024. Penurunan persentase sampah terangkut dikarenakan tidak aktifnya layanan angkut oleh beberapa Tempat Pengolahan Sampah (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Untuk itu, permasalahan penanganan sampah ini harus diupayakan dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah yang lebih tepat yaitu dengan peningkatan kegiatan pengurangan sampah melalui gerakan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) melalui optimalisasi operasional bank sampah dan TPS3R yang ada serta menyelesaikan sampah pada sumbernya.

Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan hal ini tercermin melalui upaya peningkatan gerakan 3R yang mengalami peningkatan dari 20,33% pada Tahun 2020 menjadi 53,59% pada Tahun 2024. Selain itu, berdasarkan olahan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah juga mengalami peningkatan dari 37,38% pada Tahun 2020 menjadi 53,27% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja tempat-tempat pengolahan sampah maupun fasilitas daur ulang yang aktif terus meningkat. Proses pengolahan ini melibatkan berbagai metode diantaranya pemilahan, pengomposan, daur ulang dan teknologi pengolahan lain. Untuk itu keberhasilan pengolahan sampah di fasilitas ini sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam memisahkan sampah sejak dari sumbernya dan efektivitas pengelolaan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Tabel 2.97.
Kinerja Penanganan dan Pengelolaan Sampah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	47,65	53,75	60,51	30,28	25,69
2.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	20,33	23,41	26,17	49,74	53,59
3.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	37,38	37,16	21,34	52,45	53,27

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2024

3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK telah dituangkan dalam *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC) yang diterbitkan pada Tahun 2022 sebagai bagian dari kesepakatan global dalam Perjanjian Paris yang mencakup:

- a. Target penurunan emisi GRK secara kondisional sebesar 43,20% pada Tahun 2030 dengan dukungan internasional (pendanaan, transfer teknologi dan penguatan kapasitas). Sedangkan secara tidak kondisional sebesar 31,89% melalui upaya mandiri nasional;
- b. Indonesia memfokuskan penurunan emisi pada 5 sektor utama yaitu:
 - a) kehutanan dan penggunaan lahan dengan mengurangi deforestasi, meningkatkan rehabilitasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - b) energi dengan transisi ke energi terbarukan, efisiensi energi dan penghentian penggunaan batubara secara bertahap;
 - c) pertanian dengan penerapan teknologi rendah emisi dan praktik berkelanjutan;
 - d) pengolahan limbah dengan pengurangan emisi dari limbah rumah tangga maupun industri; serta
 - e) proses industri dan penggunaan produk dengan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- c. Komitmen jangka panjang Indonesia adalah mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) pada Tahun 2060 atau dapat lebih cepat dengan pengurangan energi fosil secara bertahap, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan seperti surya, angin dan hidro serta rehabilitasi ekosistem karbon biru (mangrove dan laut).

Komitmen Indonesia yang tercantum pada dokumen ENDC Tahun 2022 menunjukkan kontribusi Indonesia dalam mendukung target global untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C.

Secara umum hal ini sesuai dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang menargetkan menuju *net zero emission* pada Tahun 2045. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu sebagai salah satu kabupaten yang peduli dengan penurunan emisi GRK, Kabupaten Kebumen telah menyusun dokumen profil emisi GRK pada tahun 2023. Sebagai dokumen inventarisasi GRK yang pertama, yang meliputi empat sektor yaitu sektor energi, sektor IPPU (*Industrial Processes and Product Use*), sektor AFOLU/pertanian dan sektor limbah sebagai

penghasil/penyerap emisi. Sejak Tahun 2023 melalui aplikasi AKSARA dari pemerintah pusat, telah mulai dihitung penurunan emisi GRK yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO2eq pada Tahun 2023 menjadi 151.888,21 TonCO2eq pada Tahun 2024. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada Tahun 2025 yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 206.765,97 TonCO2eq. Target Tahun 2025 ini sendiri ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan Kabupaten Kebumen terhadap komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK.

Sementara itu Kabupaten Kebumen juga melakukan penghitungan dengan metode berbasis Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines 2006 dan dilaporkan menggunakan aplikasi SIGN-SMART untuk menjamin akurasi, transparansi, dan konsistensi data. Data yang dikumpulkan berasal dari instansi terkait, mencakup informasi tentang konsumsi energi, populasi ternak, perubahan tutupan lahan, pengelolaan limbah, dan lainnya. Hasil inventarisasi menunjukkan tren emisi dan serapan GRK, yang menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Kebumen. Laporan ini juga memuat rencana perbaikan inventarisasi, termasuk peningkatan metode pengumpulan data dan analisis sektoral. Melalui laporan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah mitigasi yang efektif untuk menekan emisi, meningkatkan kualitas lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan kalkulasi masing-masing sektor 5 tahun terakhir, emisi GRK sebagian besar dihasilkan dari sektor pertanian sebesar 44,50% atau 3.003,61 Gg CO2 eq, diikuti oleh sektor energi sebesar 32,15% atau 2.170,05 Gg CO2 eq. Sedangkan sektor dengan emisi terkecil adalah Proses Industri dan Penggunaan Produk sebesar 1,34% atau setara dengan 90,68 Gg CO2 eq. Pada tahun 2023, sektor kehutanan tidak hanya menyumbangkan emisi GRK, namun juga melakukan penyerapan karbon sebesar 978,66 Gg CO2 eq. Penyerapan karbon menjadi salah satu keuntungan bagi Kabupaten Kebumen sehingga perlunya diadakan pemantauan dan pemeliharaan lebih lanjut untuk meningkatkan potensi penyerapan emisi lebih besar lagi.

Tabel 2.98.
Emisi dan Serapan GRK Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Sektor	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Limbah	Gg CO2eq	136,59	114,27	227,71	17,07	DATA BELUM TERSEDIA
2.	Kehutanan		923,42	847,29	1,34	-978,66	DATA BELUM TERSEDIA
3.	Pertanian		517,63	658,45	500,12	745,08	DATA BELUM TERSEDIA
4.	IPPU		43,74	0,00	3,19	0,01	DATA BELUM TERSEDIA
5.	Energi		417,56	367,13	514,67	397,02	DATA BELUM TERSEDIA

Sumber: SIGN-SMART dan DLHKP Kabupaten Kebumen, 2024

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga terus ditingkatkan melalui berbagai program. Beberapa program tersebut diantaranya gerakan menanam pohon melalui program 1 anak 2 pohon dan 1 pernikahan 2 pohon serta program desa mandiri energi dengan pengembangan energi alternatif, melalui penggantian/pemanfaatan lampu LPJU dengan Solar cell. Selain itu juga terdapat program “Sampah Komoditas Ekonomi Masyarakat” dalam meningkatkan kinerja persampahan dengan optimalisasi sistem manajemen pengelolaan persampahan, program pengelolaan sampah mandiri, serta peningkatan pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik untuk menggantikan pupuk anorganik sebagai penyumbang emisi GRK.

Tabel 2.99.
Kinerja Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penurunan emisi GRK (TonCO2eq)	NA	NA	NA	145.971,89	151.888,21

Sumber: AKSARA dan DLHKP Kabupaten Kebumen, 2024

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil cenderung stabil. Kinerja tersebut meliputi Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Cakupan Akte Kelahiran serta Cakupan Akte kematian. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga selalu mencapai 100%, sedangkan cakupan penduduk memiliki KTP cenderung meningkat dari 99,36% pada Tahun 2020 menjadi 99,99% pada Tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada perekaman KTP elektronik yang meningkat dari 99,36% pada Tahun 2020 menjadi 99,62% pada Tahun 2024. Sementara itu untuk cakupan akte kelahiran juga terus meningkat dari 90,36% pada Tahun 2020 menjadi 99,44% pada Tahun 2024 sedangkan cakupan akte kematian yang selalu mencapai 100% setiap tahun.

Terkait kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga menunjukkan peningkatan dari 31,21% pada Tahun 2020 menjadi 60,82% pada Tahun 2024. Sedangkan terkait penggunaan identitas kependudukan digital (KTP digital), sampai dengan tahun 2024 baru sebanyak 11,41% dari total keseluruhan yang telah memiliki e-KTP. Angka ini masih dibawah target nasional yaitu sebesar 25% dari total pemilik e-KTP. Data kependudukan sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan sektoral dalam pembangunan daerah. Data kependudukan juga dijadikan data dasar dalam menentukan perencanaan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Tabel 2.100.
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	URAIAN KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga terhadap jumlah kepala keluarga	100	100	100	100	100
2.	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk terhadap jumlah penduduk	99,36	98,95	98,00	98,25	99,99
3	Perekaman KTP elektronik (%)	99,36	98,09	99,11	98,25	99,62
4.	Cakupan Akte Kelahiran	90,36	96,60	99,15	99,43	99,44

No	URAIAN KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Cakupan Akte Kematian	100	100	100	100	100
6.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	31,21	39,66	44,43	55,79	60,82
7.	Penggunaan identitas kependudukan digital (KTP digital)	NA	NA	0,65	5,41	11,41

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2024

Upaya peningkatan kinerja terus dilakukan dengan beberapa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diantaranya program pelayanan penelitian jemput bola ke rumah (*door to door*) “ORA ANTRI, ORA SUWE, CEPET DADI”, dimana sasarannya adalah anak sekolah, disabilitas, ODGJ, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Program Ketapel-17 inovasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen yang diperuntukan bagi wajib KTP pemula atau usia 17 tahun, dimana pada saat usia 17 tahun, langsung menerima KTP-el sebagai hadiah ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Program inovasi penerbitan akta kelahiran cepat bagi bayi yang lahir di bangsal, rumah sakit atau Puskesmas bekerjasama dengan 40 rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Kebumen. Program inovasi bayi lahir dapat paket akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas nak dan Kartu Indonesia Sehat). Program ini bekerja sama dengan BPJS, rumah sakit, puskesmas, dan klinik bersalin untuk memudahkan masyarakat mendapat pelayanan tersebut. Program *Sunmorning* (Pesona *Sunday Morning*) merupakan Pelayanan Adminduk untuk Semua Orang, “Sinambi santai Dokumen Adminduk bisa anyar maning” yang dilaksanakan hari minggu di alun-alun dan kantor Disdukcapil Kabupaten Kebumen serta inovasi-inovasi lain yang mendukung kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terlihat dari berapa besar pengembangan potensi sumber daya manusia yang ada di desa. Selain itu, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan Masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di desa melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, serta Kemasyarakatan Desa menjadi penting dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dan desa. Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk membangun sinergitas pembangunan desa dan pembangunan daerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pemanfaatan hasil- hasil pembangunan.

1) Kemajuan dan Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa

yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2024 telah mencapai 152 desa yang masuk kategori desa mandiri. Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status mandiri sejak tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan pemutakhiran data kepada desa sehingga dapat meningkatkan nilai dan juga disebabkan oleh meningkatnya pemahaman para kepala desa beserta jajarannya untuk mengisi indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing. Motivasi desa juga semakin meningkat karena bagi desa yang dapat mencapai kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja. Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,22% pada Tahun 2020 menjadi 33,85% pada Tahun 2024.

Sementara itu, jumlah desa maju juga terus meningkat dari 90 desa pada Tahun 2020 menjadi 246 desa pada Tahun 2024. Hal ini menyebabkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,6709 pada Tahun 2020 menjadi 0,8864 pada Tahun 2024. Selain itu sejak Tahun 2022 sudah tidak ada lagi desa di Kabupaten Kebumen yang masuk kategori desa tertinggal maupun sangat tertinggal.

Tabel 2.101.
Profil Kemajuan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020 – Tahun 2024

No	Klasifikasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa mandiri	1	1	5	60	152
2	Desa maju	90	123	194	261	246
3	Desa berkembang	348	319	250	128	51
4	Desa tertinggal	10	6	0	0	0
5	Desa sangat tertinggal	0	0	0	0	0
6	Persentase Desa Mandiri (%)	0,22	0,22	1,11	13,36	33,85
7	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6709	0,6861	0,6978	0,758	0,8864

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2024

2) Peningkatan kapasitas aparatur desa

Peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen pemerintahan di tingkat desa. Melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi, aparatur desa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang administrasi, manajemen keuangan, dan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kapasitas ini juga melibatkan penyediaan fasilitas yang memadai, seperti peralatan teknologi dan akses internet yang baik, guna mendukung efisiensi kerja dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat.

Selain aspek teknis, peningkatan kapasitas aparatur desa juga mencakup penguatan kelembagaan dan regulasi yang mendukung kinerja aparatur. Pendampingan dari pihak berpengalaman dan supervisi berkala memastikan bahwa aparatur desa dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dengan efektif. Memberikan penghargaan dan insentif kepada aparatur yang berprestasi juga penting untuk menjaga motivasi dan semangat kerja. Dengan demikian, aparatur desa yang lebih kompeten dan termotivasi akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan

dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di desa. Selama Tahun 2020-2024 telah dilakukan berbagai rangkaian dalam peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Kebumen yang selengkapnya terdapat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.102.
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelatihan/Bimtek Kepala Desa Tahun 2019					
2	Bimtek Profil Desa Tahun 2019					
3	Bimtek Sistem Informasi Desa (SID) Tahun 2019	439 Orang				
4	Bimtek Profil Desa/Kelurahan Tahun 2020	60 Orang				
5	Bimtek Kepala Desa Tahun 2020	130 Orang				
6	Bimtek Kepala Dusun Tahun 2020	449 Orang				
7	Bimtek BPD Tahun 2020	449 Orang				
8	Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2020	26 Camat + 182 Kepala Desa				
9	Bimtek Kepala Dusun Tahun 2021		130 Desa			
10	Sosialisasi Pilkades Antar Waktu Tahun 2021		60 Orang			
11	Sosialisasi Peraturan Bupati Tahun 2021		40 Orang			
12	Sosialisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2021		400 Orang			
13	Bimtek Aplikasi Desa Online Tahun 2021		140 Orang			
14	Bimtek BPD Tahun 2021		130 Orang			
15	Bimtek Perangkat Desa Baru Tahun 2022			130 Orang		
16	Bimtek Kepala Dusun Tahun 2022			130 Kadus + 26 Kecamatan + 26 Pendamping		
17	Peningkatan kapasitas BPD dalam Musyawarah Desa Tahun 2022			40 Orang		
18	Bimtek Kepala Desa Baru Tahun 2022			15 Kades + 16 Ketua BPD + 15 Kecamatan		
19	Sosialisasi Pikades PAW Gelombang I dan II Tahun 2022			100 Orang		
20	Sosialisasi Pikades PAW Gelombang II Tahun 2022			50 Orang		
21	Sosialisasi Peraturan Bupati Tahun 2022			26 PAPDESI + 26 Kecamatan + 4 Forkom BPD		

NO	NAMA KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
22	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik/SPM Desa Tahun 2022			26 Kecamatan + 26 PPDI + 26 PAPDESI + 7 Forkom BPD		
23	Bimtek Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022			449 Desa + 26 Kecamatan + 26 Pendamping Desa		
24	Bimtek Penyusunan Sistem Informasi Desa dan Desa Online Tahun 2022			449 Desa + 26 Kecamatan + 26 Pendamping Desa		
25	Bimtek Anggota BPD Tahun 2022			130 Orang + 26 Kecamatan + 26 Pendamping Desa		
26	Bimtek Sekretaris Desa Tahun 2023				78 Orang	
27	Pembinaan Pencegahan Korupsi dari Kejaksaan Negeri Kebumen Tahun 2023 dalam Kegiatan Konferensi Kades/Sekdes				26 Kecamatan	
28	Peningkatan Kapasitas BPD Tahun 2023				50 Orang	
29	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023				150 Orang	
30	Sosialisasi Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Tahun 2023				60 Orang	
31	Bimtek IDM dan Desmeli Tahun 2023				200 Desa	
32	Bimtek Anggota BPD Tahun 2023				130 Orang	78 orang
33	Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus Sarana Prasarana Tahun 2023				25 Kecamatan	
34	Sosialisasi ADD dan DD Tahun 2022			26 Kecamatan + 449 Desa + 26 Pendamping Desa		
35	Sosialisasi BHPRD Tahun 2021		26 Kecamatan			
36	Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Aset Desa Tahun 2019					
37	Sosialisasi Sipades	90 desa		26 kecamatan/ 120 desa	269 desa	

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2024

3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Perkembangan desa dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur dasar dan membangun ekonomi desa. Pembangunan ekonomi desa salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penilaian kategori BUMDes baru dimulai pada tahun 2019 karena BUMDes secara massif baru mulai berdiri di desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa. Pada tahun 2019 seluruh desa di Kabupaten Kebumen telah mendirikan BUMDes dengan jenis usaha yang sangat bervariasi. Dalam perkembangannya pertumbuhan BUMDes telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa meskipun belum optimal karena beberapa faktor seperti SDM pengelola BUMDes yang kurang kompeten, permodalan yang masih kurang, pemilihan bidang usaha yang kurang tepat, masih terdapat BUMDes yang belum berbadan hukum, dan sinergitas antara pengelola dengan pemerintah desa yang masih kurang.

Kemajuan BUMDes di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan BUMDes tingkat maju yang terus meningkat dari 17 BUMDes pada Tahun 2020 menjadi 100 BUMDes pada Tahun 2024 yang merupakan kenaikan kelas dari BUMDes tingkat berkembang. Sementara itu BUMDes tingkat tumbuh juga cenderung meningkat hingga mencapai 206 BUMDes pada Tahun 2024 mengurangi BUMDes yang masih pada tingkat dasar.

Tabel 2.103.
Kondisi BUMDes Tahun 2020-2024

No	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penilaian BUMDes Tingkat Maju	17	42	42	51	100
2	Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang	2	5	9	17	4
3	Penilaian BUMDes Tingkat Tumbuh	124	83	109	77	206
4.	Penilaian BUMDes Tingkat Dasar	246	272	283	304	135

Sumber : Dinas PMD, 2024

4) Pengembangan Kawasan Perdesaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki visi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk menegaskan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, secara khusus pemerintah juga mengesahkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pembangunan Kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi atau pemecahan

masalah kawasan perdesaan dan penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Kabupaten Kebumen telah mempunyai 5 (lima) kawasan perdesaan yang telah terbentuk sejak tahun 2016 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 410/178/KEP/2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen yang meliputi:

- 1. Kawasan Wisata Pesisir Menganti;
- 2. Kawasan Kampung Peternakan Sapi;
- 3. Kawasan Anyaman Pandan;
- 4. Kawasan Produk Unggulan Gula Semut; dan
- 5. Kawasan Kampung Batik.

Dalam rangka pengembangan saat ini masih dilakukan proses penambahan 1 kawasan perdesaan pertanian yaitu di 13 desa di Kecamatan Mirit.

Tabel 2.104. T
Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021–2026

No	Kawasan Perdesaan	Kinerja	Kendala yang dihadapi
1.	a. 3 (tiga) desa di Kecamatan Karanganyar (Desa Grenggeng, Desa Wonorejo dan Desa Pohkumbang) b. 2 (dua) desa di Kecamatan Karanggayam (Desa Karanggayam dan Desa Penimbun)	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	a. Sebagian besar masyarakat menekuni pengrajin anyaman pandan sebagai aktivitas semi produktif dan termasuk masyarakat prasejahtera. b. Kondisi jalan dipengaruhi oleh kontur perbukitan. c. Lahan-lahan pandan Sebagian ditanam di lahan-lahan kosong bukan milik pribadi. Sebagian ditanam di lahan kritis seperti di tepaian tanggul dan di pinggir sungai d. Hama daun pandan (ulat gendon) sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas bahan baku e. Instalasi pembuangan dan pengelolaan sampah terpadu di Kawasan belum tersedia f. Belum massif dihasilkannya produk anyaman pandan dari bahan setengah jadi (complong) menjadi barang jadi. g. Ketidakberdayaan pengrajin yang tidak mempunyai posisi tawar karena besarnya peran <i>middleman</i> (tengkulak) yang menentukan harga dan mengirim barang setengah jadi untuk memenuhi pesanan dari luar daerah (Tasikmalaya dan Yogyakarta)

No	Kawasan Perdesaan	Kinerja	Kendala yang dihadapi
2.	2 (dua) desa di Kecamatan Klirong yaitu Desa Jogosimo dan Desa Tanggulangin	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Kampung Peternakan Sapi Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	a. Harga Sapi Tidak Stabil b. Kemandirian pemasaran dan penjualan masih kurang c. Bibit Sapi yang berkualitas di jual ke luar Kawasan d. Pemanfaatan lahan kering untuk hijauan masih belum optimal e. Belum semua peternak merapkan teknologi pangan f. Program pengelolaan limbah ternak belum berjalan baik dan teknologi pengolahan limbah belum mencukupi
3.	6 (enam) Desa di Kecamatan Ayah yaitu: 1) Desa Candirenggo 2) Desa Argopeni 3) Desa Karangduwur 4) Desa Srati 5) Desa Pasir 6) Desa Karangbolong	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Pesisir Menganti Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	a. Perbedaan mekanisme kemitraan antar desa b. Status lahan objek wisata sebagian besar di kawasan perhutanan sosial c. Ekowisata berbasis desa wisata belum berkembang d. Minimnya event kesenian budaya e. Tradisi sedekah bumi/laut belum dikemas untuk mendukung wisata f. Kebersihan kawasan kurang terjaga
4.	a. 2 (dua) desa di Kecamatan Kebumen yaitu Desa Gemeksekti dan Desa Jemur b. 2 (dua) desa di Kecamatan Pejagoan yaitu Desa Jemur dan Desa Pejagoan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Kampung Batik Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	a. Sebagian besar masyarakat menekuni pengrajin batik sebagai aktivitas semi produktif b. Pemasaran batik masih terbatas di lingkup lokal c. Plangkan/alat cetak dan bahan batik tergantung dari daerah lain d. Kapasitas produksi masih kurang terutama untuk batik printing masal e. Mutu produksi belum standar dan konsisten f. Desain pola batik belum berkembang mengikuti tren saat ini g. Belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Limbah secara terpadu yang mencakup banyak pengrajin dan masyarakat masih membuang limbah batik ke sungai/selokan

Sumber: Dinas PMD, 2021

5) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun mengarahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21). Program PKK adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mampu menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kegiatan pertumbuhan Desa.

Peran PKK untuk mendukung jalannya program pembangunan pemerintah daerah sangat penting. PKK dapat berkontribusi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan pembangunan dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. PKK mempunyai peran penting dalam pembangunan dengan berbagai inovasi dan kegiatan yang dilakukan lewat partisipasi dan pemberdayaan keluarga. Kegiatan PKK pada umumnya diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa melalui program-program yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pada kurun waktu 2020-2024 perkembangan PKK di Kabupaten Kebumen relatif sama pada setiap tahunnya dimana seluruh kelompok PKK selalu aktif dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.105.
Perkembangan PKK Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKK	487	487	487	487	487
2	Jumlah PKK aktif	487	487	487	487	487
3	Presentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Kelompok Binaan PKK	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2024

Kelompok Binaan PKK terdiri dari 2 desa per kecamatan setiap tahunnya. Materi pembinaan berupa administrasi desa dan pengikutsertaan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten. Namun demikian, kaderisasi pengurus TP PKK perlu menjadi perhatian karena pada umumnya pengurus PKK sudah berusia lanjut.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya adalah angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*), angka pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*), dan *Unmet need* KB. *Total Fertility Rate* (TFR) didefinisikan sebagai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator ini digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Capaian TFR cenderung menurun dari 2,35 pada Tahun 2020 menjadi 2,17 pada Tahun 2024 yang berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak (semakin mendekati 2 anak) selama masa usia suburnya atau semakin mendekati target Keluarga Berencana yaitu 2 anak cukup.

Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya PUS (Pasangan Usia Subur) yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. CPR digunakan untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, pemasangan IUD,

persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Idealnya CPR dan TFR memiliki hubungan yang negatif, yaitu semakin banyak perempuan subur menggunakan kontrasepsi (semakin tinggi CPR) maka semakin rendah tingkat kelahiran total (TFR) dan sebaliknya. Namun demikian CPR di Kabupaten Kebumen juga cenderung menurun dari 70,77% pada Tahun 2020 menjadi 67,48% pada Tahun 2024. Hal ini dapat terjadi kemungkinan wilayah Kabupaten Kebumen sedang melalui transisi demografi yaitu tingkat kelahiran lebih rendah dari tingkat kematian sehingga pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Hal ini dapat dikarenakan meningkatnya kesadaran keluarga berencana, meningkatnya peran wanita di pendidikan/karier, meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.

Sementara itu, *unmet need* dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Angka *unmet need* Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 16,34% pada tahun 2020 menjadi 13,48% pada tahun 2024. Walaupun terus menurun, angka *unmet need* Kabupaten Kebumen masih lebih tinggi dari target Nasional yaitu 10%. Hal ini kemungkinan dikarenakan oleh karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan dan karena banyaknya warga pasangan usia subur yang suaminya bekerja di luar Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.106.
Perkembangan CPR, TFR dan *Unmet Need*
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	CPR	TFR	<i>Unmet Need</i>
2020	70,77%	2,35	16,34%
2021	68,56%	2,35	17,85%
2022	69,05%	2,38	15,98%
2023	69,96%	2,17	14,66%
2024	67,48%	2,17	13,48%

Sumber: Dinkes PPKB, 2024

Selain pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kualitas keluarga juga harus terus ditingkatkan. Hal ini penting karena keluarga berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Tingkat kualitas keluarga tercermin dari Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai alat pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Kinerja iBangga Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 58,67 pada Tahun 2022 menjadi 63,17 pada Tahun 2024. Walaupun meningkat, dengan masih berada di bawah nilai 70 menunjukkan kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen baru masuk pada kategori cukup baik atau berkembang. Perlu peningkatan upaya agar dapat masuk kategori baik dengan nilai lebih dari 70.

Tabel 2.107.
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	NA	NA	58,67	63,17	63,17

Sumber: Dinkes PPKB, 2024

i. Perhubungan

Pada urusan perhubungan, terdapat beberapa aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah antara lain penyediaan kelengkapan dan keselamatan jalan, pengaturan arus penumpang angkutan umum, kelayakan kendaraan umum dan penyediaan fasilitas terminal.

1) Kelengkapan dan Keselamatan Jalan

Kondisi Ideal pada jalan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda-beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen terus meningkat dari 33,62% pada Tahun 2020 menjadi 60,67% pada Tahun 2024.

Tabel 2.108.
Kondisi Kelengkapan dan Keselamatan Jalan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Data kecelakaan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kab/kota (%)	33,62	38,43	53,99	59,23	60,67
2.	Jumlah kecelakaan (kejadian)	618	649	895	1.039	1.178
3.	Korban Meninggal (orang)	121	129	148	140	140
4.	Korban luka berat (orang)	0	0	0	0	0
5.	Korban luka ringan (orang)	732	760	1.017	1.189	1.373
6.	Kerugian Material (rupiah)	890.150.000	160.365.000	370.500.000	760.000.000	821.100.000

Sumber: Dinas Perhubungan dan Polres Kebumen, 2024

Namun demikian angka kecelakaan di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 618 kejadian pada Tahun 2020 menjadi 1.178 kejadian pada Tahun 2024 karena angka kecelakaan ini terjadi tidak hanya di ruas jalan kabupaten, tapi juga ruas jalan nasional, provinsi hingga desa. Korban meninggal juga cenderung meningkat dari 121 orang pada Tahun 2020 menjadi 140 orang pada Tahun 2024. Begitu juga dengan korban luka ringan cenderung meningkat dari 732 orang pada Tahun 2020 menjadi 1.373 orang pada Tahun 2024. Kerugian material cenderung menurun dari Rp.890.150.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.821.100.000,00 pada Tahun 2024. Beberapa faktor penyebab kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Kebumen diantaranya:

1. Faktor manusia.
Tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya masih rendah dalam berlalu lintas dengan baik dan mentaati aturan.
2. Faktor Sarana dan Prasarana.
Pada umumnya jalan nasional, provinsi, jalan kabupaten dan desa yang rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang berlubang, bergelombang dan minim rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan utamanya ketika malam hari.

2) Infrastruktur Terminal

Infrastruktur terminal di Kabupaten Kebumen masih mengelola transportasi lokal. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan terminal bus tipe C di Kabupaten Kebumen berjumlah 4 terminal (terminal tipe A sebanyak 1 lokasi dan tipe C sebanyak 3 lokasi). Masih belum optimalnya pengoperasian terminal menjadi tantangan yang harus diselesaikan yaitu: sepihnya penumpang, kuantitas dan kualitas armada, dan manajemen angkutan secara menyeluruh yang perlu dilakukan penataan. Kondisi infrastruktur terminal di Kabupaten Kebumen pada kondisi kurang memadai sehingga perlu perbaikan. Saat ini baru terminal Tipe C Kebumen yang terintegrasi dengan pasar pagi sehingga fungsinya kurang optimal. Data terminal bus di Kabupaten Kebumen secara lengkap tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.109.
Persebaran Terminal Tipe A, B, dan C
di Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Uraian	Tipe A		Tipe B		Tipe C	
		Jml	Lokasi	Jml	Lokasi	Jml	Lokasi
1	Persebaran Terminal	1	Kec Kebumen	-	-	3	Kec Kebumen 1 lokasi, Kec Karanggayam 1 lokasi, Kec. Gombong 1 lokasi,

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

Tabel 2.110.
Data Produksi Terminal Tipe C Tahun 2020 -2024

No	Angkutan umum	2020	2021	2022	2023	2024
Data Produksi Terminal Tipe C (Kunjungan Bus per hari)						
1	Terminal Tipe C Kebumen	13	18	28	23	21
2	Terminal Tipe C Gombong	21	26	31	36	30
3	Terminal Tipe C Karanggayam	2	4	7	6	4
Jumlah		36	48	66	65	55
Data Produksi Terminal Tipe C (Jumlah Penumpang per hari)						
1	Terminal Tipe C Kebumen	30	80	103	91	78
2	Terminal Tipe C Gombong	50	90	124	107	86
3	Terminal Tipe C Karanggayam	15	30	44	37	31
Jumlah		95	200	271	235	195

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

Kunjungan Bus per hari di terminal tipe C Kebumen pada Tahun 2024 paling banyak di terminal Gombong 30 bus per hari diikuti terminal Kebumen 21 bus per hari. Sedang terminal karanggayam kunjungan bus per hari sejumlah 4 bis. Sedikitnya dan semakin turunnya kunjungan bus dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh berkurangnya armada dan trayek bus yang ada. Selain itu bila dilihat dari penumpang yang menggunakan angkutan umum di terminal juga cenderung menurun sejak Tahun 2022 yaitu sebanyak 271 penumpang menjadi hanya 195 penumpang di Tahun 2024. Penurunan ini diakibatkan persaingan antar armada khususnya beroperasinya perusahaan bus yang memiliki terminal sendiri serta persaingan dengan moda kereta api.

3) Angkutan Umum

Jumlah angkutan umum di Kabupaten Kebumen terus mengalami penurunan dari 1.706 pada tahun 2020 menjadi hanya 594 unit di tahun 2024. Bersamaan dengan itu, jumlah izin trayek juga mengalami penurunan dari 82 trayek di 2020 menjadi 35 trayek di tahun 2024.

Tabel 2.111.
Jumlah Izin Trayek di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan umum	1.706	1746	1472	887	594
2	Jumlah izin trayek	82	37	85	35	35

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

Penurunan angkutan penumpang dan kepemilikan izin trayek disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi baik sepeda motor atau mobil serta persaingan dengan layanan transportasi berbasis daring. Selain itu, terdapat penyesuaian kepemilikan yang semula milik perorangan menjadi badan hukum dan pembatasan usia kendaraan angkutan umum serta pembaruan sistem pelayanan perizinan menjadi faktor penurunan jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek di Kabupaten Kebumen. Untuk mengatasi keterbatasan layanan angkutan yang ada di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menyediakan moda transportasi trans Kebumen namun hanya melayani rute Kebumen- Prembun sebanyak 2 unit. Diharapkan dengan pengadaan tersebut akan membantu pelayanan masyarakat di bidang transportasi yang nyaman, murah dan representatif guna mendukung angkutan yang terintegrasi. Untuk itu perlu disusun perencanaan jangka panjang untuk mewujudkan sarana transportasi kebumen yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan dalam bentuk dokumen rencana induk transportasi Kebumen.

Sementara itu, adanya layanan angkutan umum berbasis daring yang lebih tersedia dan tepat waktu dalam perkembangannya ke depan perlu diintegrasikan dengan angkutan umum bertrayek, yaitu angkutan umum berbasis daring untuk difokuskan pada wilayah-wilayah yang belum terdapat trayek. Layanan angkutan umum berbasis daring juga perlu dioptimalkan karena dapat membuka lapangan kerja bagi pengemudi maupun pelaku UMKM dengan adanya layanan antar jemput. Kehadiran layanan angkutan umum berbasis daring juga dapat mengisi *gap* konektivitas layanan angkutan umum bertrayek di Kabupaten Kebumen ini.

Dalam rangka menunjang keamanan dan kenyamanan transportasi publik, maka dilakukan uji KIR pada kendaraan umum untuk menjamin persyaratan dan kelayakan kendaraan. Jumlah uji KIR angkutan umum

terus menurun dari 8.058 unit pada Tahun 2020 menjadi hanya 4.414 unit pada Tahun 2024 dikarenakan semakin menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi. Hal ini juga menyebabkan cakupan kepemilikan KIR angkutan umum meningkat drastis dari 13,235% pada Tahun 2021 menjadi 84% pada Tahun 2024.

Tabel 2.112.
Kondisi Uji KIR di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah uji KIR angkutan umum (unit)	8.058	7.658	7.571	6.749	4.414
2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (persen)	DATA BELUM TERSEDIA	13,235	14,424	80,77	84,00

Sumber : Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

4) Stasiun dan Perlintasan Kereta Api

Jumlah stasiun kereta api di Kabupaten Kebumen sebanyak 6 stasiun terdiri dari Stasiun Ijo, Stasiun Gombong, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutowinangun, dan Stasiun Prembun. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Nomor: KP.004/1/23/DJKA/2022 Tanggal 25 April 2022, tentang Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang, dimana DAOP diamanatkan untuk menutup perlintasan sebidang KA yang belum ada palang pintu tidak terjaga yang rawan kecelakaan.

Jumlah perlintasan kereta api di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2023 sebanyak 36 perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api yang dijaga oleh PT. KAI sebanyak 19 perlintasan, 14 perlintasan kereta api di jaga oleh Dinas Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dan 3 perlintasan kereta api di jaga oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen bersama masyarakat. Sementara itu, terdapat 10 perlintasan kereta api yang belum dijaga yaitu, perlintasan kereta api Selokerto, perlintasan kereta api Patemon Timur, perlintasan kereta api Guyangan, perlintasan kereta api Jabres, perlintasan kereta api Simpang Kawat, perlintasan kereta api Muktisari 1, perlintasan kereta api Muktisari 2, perlintasan kereta api Sidomukti 1, perlintasan kereta api Keceme dan perlintasan kereta api Sruweng.

j. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten Kebumen mendapatkan tugas untuk mengotimalkan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat pemerintah dalam rangka peningkatan dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penilaian indeks SPBE dilakukan oleh Kementerian PAN RB pada tiap tahunnya yaitu terkait kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE. Semakin tinggi tingkat kematangan layanan SPBE menunjukkan semakin mudah dan nyaman bagi pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh instansi pusat dan daerah. Dalam hal ini, sistem aplikasi harus dapat diakses oleh pengguna SPBE secara daring. Indeks SPBE Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari 3,42 atau kategori baik pada Tahun 2020 menjadi 4,07 atau telah masuk kategori sangat baik pada Tahun 2024. Pada tahun 2021 terjadi perubahan penilaian indeks, sehingga nilai SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020.

Selain itu, dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik berbasis *e-government* perlu terus dilakukan peningkatan jangkauan *fiber* optik untuk mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Kebumen, kualitas dan kuantitas sarana teknologi informasi (*server*, sarana dan prasarana), serta profesionalitas SDM dalam bidang IT baik di Diskominfo maupun perangkat daerah.

Selain itu, akses masyarakat umum terhadap teknologi informasi dalam hal ini internet juga harus terus ditingkatkan karena kemudahan akses ini dapat membantu aktivitas masyarakat baik sosial, budaya maupun ekonomi. Hal ini tercermin dari persentase rumah tangga dengan akses internet yang pada Tahun 2024 telah mencakup 89,41%. Selain kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah sosial, budaya dan ekonomi di tengah masyarakat.

Tabel 2.113.
Profil Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020 - 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	3,42	3,05	3,44	3,70	4,07
	Baik	Baik	Baik	sangat baik	sangat baik
Persentase Rumah Tangga dengan akses internet (%)	74,95	80,77	90,82	82,31	89,41*

Sumber: BPS dan Diskominfo Kabupaten Kebumen, 2024

Keterangan: *) Angka Sementara

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran besar sekaligus penting dalam perekonomian Kabupaten Kebumen karena sebagian besar sektor usaha adalah usaha mikro, kecil hingga menengah. Koperasi dan UKM juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi berbagai lapisan masyarakat termasuk perempuan dan pekerja informal. Koperasi dan UKM membantu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan mandiri serta mendorong kewirausahaan masyarakat. Berdasarkan data Satkernas yang menunjukkan status pekerjaan di Kabupaten Kebumen menunjukkan orang yang berusaha dibantu buruh tetap cukup fluktuatif. Sempat meningkat pada Tahun 2022, namun kemudian terus menurun dan pada Tahun 2024 tinggal sebesar 10.129 orang. Orang yang berusaha dibantu buruh tetap adalah jenis usaha yang mempekerjakan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan memiliki jaminan kerja secara berkelanjutan, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Usaha yang dimaksud dapat berbentuk badan usaha maupun tidak/belum berbentuk badan usaha.

Penurunan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap terjadi dikarenakan situasi perekonomian global hingga daerah yang tidak menentu sebagai dampak lanjutan Pandemi Covid-19, fenomena ekonomi digital, inflasi khususnya pada Tahun 2022 hingga deflasi. Hal tersebut menyebabkan banyak usaha/perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan penurunan skala usaha, efisiensi operasional, perubahan status tenaga kerja yang dipekerjakan (misal buruh tetap menjadi pekerja kontrak, *outsourcing*, atau *freelance*) hingga penutupan usaha. Hal ini berdampak terhadap rasio kewirausahaan di Kabupaten Kebumen yang

sempat mencapai 4,06% pada Tahun 2022, kemudian terus menurun menjadi hanya 1,18% pada Tahun 2024 yang merupakan angka terendah sejak Tahun 2020.

Namun demikian beberapa upaya peningkatan sektor UKM terus ditingkatkan. Diantaranya dengan peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha dari 3,70% pada Tahun 2021 menjadi 99,99% pada Tahun 2024. Usaha mikro menjadi wirausaha adalah usaha mikro yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sejak Tahun 2021. Dengan memiliki NIB maka usaha dianggap legal secara formal dan mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan kemudahan akses fasilitas keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga banyak program pemerintah untuk pengembangan UKM yang mensyaratkan kepemilikan NIB. Selain itu juga dapat mendapatkan kemudahan izin terpadu, akses pasar karena lebih dipercaya konsumen dan mitra bisnis, akses digitalisasi dimana NIB menjadi syarat untuk bisa mengakses *platform e-commerce* dan *marketplace* besar hingga pemenuhan kewajiban pajak.

Sementara itu, peningkatan kinerja koperasi di Kabupaten Kebumen juga terus dilakukan. Cakupan koperasi aktif terus meningkat dari 84,68% pada Tahun 2020 menjadi 91,29% pada Tahun 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi. Walaupun keaktifan koperasi semakin meningkat, berdasarkan data ODS menunjukkan peningkatan koperasi berkualitas di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 54,03% pada Tahun 2020 menjadi 42,29% pada Tahun 2024. Penurunan ini diantaranya dikarenakan oleh penurunan volume usaha dan aset sesuai dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Terkait nilai volume usaha koperasi sempat mencapai puncak pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.850.290.612.000,00 namun setelah itu cenderung menurun hingga mencapai Rp.496.976.951.000,00 pada Tahun 2024. Hal ini menyebabkan rasio nominal volume usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kebumen sempat meningkat hingga 2,61% pada Tahun 2022 namun kemudian turun kembali menjadi 1,29% pada Tahun 2024.

Tabel 2.114.
Profil Kewirausahaan, Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kewirausahaan (%)	2,78	2,21	4,06	2,17	1,18
2	Orang yang berusaha dibantu buruh tetap (orang)	17.589	13.693	26.698	17.641	10.129
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)	n/a	3,70	17,28	99,87	99,99
4	Persentase Koperasi Aktif (%)	84,68	92,37	92,37	90,05	91,29
5	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	54,03	43,95	44,21	43,28	42,29
6	Volume Usaha Koperasi (Rp.000)	461.458.055	543.439.955	850.290.612	180.283.160	496.976.951

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,65	1,84	2,61	0,50	1,29

Sumber : BPS dan Disperindag KUKM, 2024

I. Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Peran Investasi begitu penting karena merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dengan pertumbuhan investasi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian terutama usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja bagi masyarakat Kebumen.

Berdasarkan data PDRB dari sisi Pengeluaran menunjukkan proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap total PDRB cenderung menurun dari 19,79% pada Tahun 2020 menjadi 18,50% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PMTB sebagai proksi investasi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB secara agregat. Selain itu, secara umum PMTB terdiri dari investasi di sektor pemerintah (dari desa hingga pusat) maupun swasta (individu dan badan usaha). Untuk itu upaya untuk mengoptimalkan investasi dan penanaman modal terus dilakukan utamanya investasi padat karya serta investasi dengan skala yang besar. Secara nominal realisasi investasi masih meningkat dari Rp.388,644 Milyar pada Tahun 2020 menjadi Rp.686,760 Milyar pada Tahun 2024. Untuk itu, upaya peningkatan investasi juga dilakukan dengan kemudahan perizinan dimana jumlah perizinan yang dikeluarkan semakin meningkat dari 2.380 izin yang terbit pada Tahun 2020 menjadi 25.132 izin yang terbit pada Tahun 2024.

Tabel 2.115.
Kinerja Investasi dan Penanaman Modal
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19,79	20,37	19,63	18,82	18,50
2	Realisasi Investasi (Rp.Miliar)	388,644	488,529	564,646	628,230	686,760
3	Jumlah perizinan yang dikeluarkan (izin yang terbit)	2.380	6.699	12.024	21.887	25.132

Sumber : BPS dan DPMPTSP, 2024

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan di Kabupaten Kebumen terus dioptimalkan. Jumlah organisasi kepemudaan terus berkembang mencapai 123 organisasi pada Tahun 2024 dengan terjadi peningkatan keaktifannya menjadi 43% dari sebelumnya 42%. Namun persentase wirausaha muda

justru menurun hingga hanya mencapai 2,4% di Tahun 2023 dan 2024. Jumlah kegiatan olahraga cenderung terjadi peningkatan dari hanya 4 kegiatan pada Tahun 2020 menjadi 7 kegiatan pada Tahun 2024 yang menunjukkan masih minimnya kegiatan olahraga. Jumlah lapangan olahraga tetap sebanyak 1.031 unit yang digunakan untuk sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, tenis dan tenis meja. Gedung olahraga bertambah pada Tahun 2022 menjadi 39 unit dari sebelumnya 37 unit yang arena futsal, gedung serba guna, kolam renang dan sasana tinju. Jumlah organisasi olahraga meningkat menjadi 42 organisasi pada Tahun 2024 dengan prestasi olahraga yang juga terus meningkat sejak pasca Pandemi dari 16 prestasi pada Tahun 2021 menjadi 44 prestasi di Tahun 2024 yang berhasil diraih. Raihan ini melibatkan banyak atlet berprestasi yang terus meningkat dari 181 atlet pada Tahun 2020 menjadi 228 atlet pada Tahun 2024 berhasil meraih prestasi. Namun demikian kendala masih dihadapi khususnya dalam upaya pembibitan atlet dari usia dini atau muda.

Tabel 2.116.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	48	48	122	122	123
2	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	42	42	42	42	43
3	Persentase wirausaha muda	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDI A	4.68	2,4	2,4*
4	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Olahraga	4	5	5	7	7
5	Jumlah Klub Olahraga	255	255	258	258	263
6	Lapangan Olah Raga	1031	1031	1031	1031	1031
	Sepakbola	340	340	340	340	340
	Bola Voli	195	195	195	195	195
	Bola Basket	14	14	14	38	38
	Bulutangkis	232	232	232	110	110
	Tenis	36	36	214	236	236
	Meja Tenis Meja	214	214	214	214	214
7	Gedung Olahraga	37	37	39	39	39
	Futsal	20	20	20	20	20
	Gedung Serba Guna	6	6	6	7	7
	Kolam Renang	9	9	6	12	12
	Sasana Tinju	2	2	2	2	2
8	Jumlah Organisasi Olahraga	35	35	39	40	42

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
9	Jumlah prestasi olahraga	(tidak ada even karena pandemi)	16	23	15	44
10	Jumlah atlit berprestasi	(tidak ada even karena pandemi)	181	194	92	228

Sumber:Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2024

n. Statistik

Data/informasi statistik (dokumen statistik) adalah salah satu instrumen analisis yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik yang baik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Namun demikian permasalahan utama yang dihadapi diantaranya adalah masih rendahnya kualitas pengelolaan data di seluruh perangkat daerah serta terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola dan penganalisis data. Pemanfaatan data statistik telah dilakukan oleh OPD dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah maupun melakukan evaluasi pembangunan daerah yang telah mencapai 100% setiap tahunnya. Kabupaten Kebumen juga telah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi yaitu aplikasi Satu Data Kebumen yang telah mendapatkan dukungan dari seluruh OPD dengan setiap tahun telah mencapai 100% dalam mengisi website Satu Data sesuai dengan SOP. Dokumen data seperti Buku “Kabupaten Dalam Angka” dan “PDRB” juga selalu rilis oleh BPS sebagai sumber data. Namun demikian terdapat beberapa data penting yang tidak diterbitkan atau tidak ditebitkan setiap tahun oleh BPS untuk level kabupaten/kota seperti inflasi dan indeks gini, sub data/detail data agregat (seperti sub-sub sektor PDRB) serta data pada level hingga kecamatan atau desa.

Tabel 2.117.
Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	ada	ada	ada	ada
4.	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	ada	ada	ada	ada
5.	Buku “PDRB”	Ada	ada	ada	ada	ada
6.	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Kebumen, 2024

o. **Persandian**

Capaian urusan persandian Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari evaluasi tingkat keamanan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 (standar keamanan informasi) serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk Kabupaten Kebumen yang meningkat dari 501 pada Tahun 2022 menjadi 506 pada Tahun 2023 namun turun kembali pada Tahun 2024 menjadi 504. Dengan nilai Indeks KAMI 504 dari nilai maksimal 645 menunjukkan tingkat kesiapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pencapaian menuju kategori yang lebih tinggi. Sementara itu, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah atau telah mencapai 100% setiap tahunnya. Sedangkan penggunaan tanda tangan elektronik di tingkat desa dan kelurahan hingga Tahun 2024 telah mencapai 434 desa dan kelurahan dari total 460 desa dan kelurahan. Untuk meningkatkan pencapaian indeks KAMI serta memaksimalkan penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dan tanda tangan elektronik maka diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, kesadaran keamanan informasi, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Tabel 2.118.
Kinerja Persandian Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks KAMI	NA	NA	501	506	504
2	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100
3	Penggunaan tanda tangan elektronik di tingkat desa dan kelurahan (desa dan kelurahan)	167	182	268	377	434

Sumber: Diskominfo, 2024

p. **Kebudayaan**

Pembangunan di bidang Kebudayaan sebagai amanat pemajuan kebudayaan sangat penting dilakukan untuk membangun kemandirian, harkat martabat, budi pekerti luhur bangsa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selain itu kebudayaan juga bisa diartikan sebagai segala hal yang kompleks, yang didalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat serta keahlian ataupun ciri khas lainnya yang diperoleh individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat.

Dengan ditetapkannya *Geopark* Kebumen sebagai *Global Geopark* oleh UNESCO pada Tahun 2025, pengembangan budaya menjadi salah satu fokus utama dengan mengedepankan keragaman dalam *cultural diversity*. Keragaman budaya di Kabupaten Kebumen tercermin dari adat istiadat, ritus, festival seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya, hingga karya budaya. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan pelestarian adat istiadat dan ritus dengan capaian 100% setiap tahunnya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya sempat rutin dilaksanakan, namun tidak diselenggarakan pada Tahun 2024 karena merupakan tahun politik.

Sebanyak 10 benda, situs dan kawasan cagar budaya telah dilestarikan pada Tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya hanya 4. Kesepuluh benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut yaitu Benteng Van Der Wijck, Masjid Soko Tunggal, Rumah Sakit DKT Gombong, Gudang SMP Negeri 1 Prembun, Makam Kolopaking, Makam Tirtokusumo, Makam Purbanegara, Makam Bodronolo, Punden Berundak Lurah Karsa di Desa Giyanti dan Lingga Yoni di Desa Sumberadi. Kesepuluh lokasi tersebut sekaligus sebagai cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Selain itu juga terdapat 2 karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi yaitu kesenian jamjaneng dan cepetan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Tabel 2.119.
Profil Kebudayaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Persen)	100	100	100	100	100
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	tidak ada even karena Pandemi	3	4	4	0
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	3	3	4	10
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2	3	3	4	10
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	2	2	2	2

Sumber: Disparbud, 2024

Keragaman budaya di Kabupaten Kebumen direpresentasikan dengan banyaknya kawasan cagar budaya yang masih dilestarikan. Cukup banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Hal ini sebagai upaya peningkatan pemajuan kebudayaan yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang ada agar dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemajuan kebudayaan juga berfungsi untuk memperkaya identitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi budaya lokal. Sebagai fokus upaya pemajuan kebudayaan telah ditentukan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Tabel 2.120.
Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Lokus Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Kebumen
1	Adat istiadat	Inggungan Kuwarisan Banyumudal
2	Manuskrip	Naskah kuno Al Quran tulisan tangan dari Somalangu
3	Pengetahuan tradisional	Resep sate ambal, nasi penggel, jamu

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Lokus Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Kebumen
4	Ritus	Ritual Bulu Pitu
5	Teknologi tradisional	Cangkul
6	Bahasa	Ngapak
7	Olahraga tradisional	Kasti
8	Permainan rakyat	Gundu/kelereng
9	Seni	Tari, musik, rupa, teater
10	Tradisi lisan	Dongeng
11	Cagar budaya	Benteng Van Der Wijck, Masjid Soko Tunggal, Rumah Sakit DKT Gombong, Gudang SMP Negeri 1 Prembun, Makam Kolopaking, Makam Tirtokusumo, Makam Purbanegara, Makam Bodronolo, Punden Berundak Lurah Karsa di Desa Giyanti dan Lingga Yoni di Desa Sumberadi
12	Warisan budaya tak benda	Jamjaneng dan cepetan

Sumber: Disparbud, 2024

q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wahana penyediaan bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Kualitas bahan pustaka dan kuantitas perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna. Hal ini juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Walaupun relatif masih rendah, pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Hal ini tercermin dari tingkat pemanfaatan perpustakaan yang terus membaik dari hanya 6,06% pada Tahun 2020 menjadi 31,45% pada Tahun 2024. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat terus dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang terus meningkat dari 12,39 pada Tahun 2020 hingga menjadi 18,95 pada Tahun 2023 namun turun menjadi 16,91 pada Tahun 2024. Sedangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk meningkat dari 0,99 pada Tahun 2020 menjadi 1,03 pada Tahun 2024.

Sementara itu, jumlah kunjungan *onsite* dan *online* di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen juga terus meningkat dari 59.073 orang pada Tahun 2020 menjadi 307.633 orang pada Tahun 2024. Hal ini didukung dengan penyediaan sebanyak 44.426 koleksi buku dan 29.276 koleksi judul buku serta 283 pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang telah memiliki sertifikat hingga Tahun 2024.

Tabel 2.121.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan (%)	6,06	25,35	29,42	29,71	31,45
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12,39	12,85	18,69	18,85	16,91
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,99	0,993	0,998	1,016	1,03
4	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	59,073	270,777	278,174	290.399	307.633
5	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.561	45.844	47.344	43.940	44.426
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	26.229	27.242	27.992	29.036	29.276
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	141	229	283

Sumber: Disarpus, Kabupaten Kebumen, 2024

r. Kearsipan

Kegiatan kearsipan memiliki peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan keorganisasian baik sebagai sumber informasi maupun pusat ingatan bagi organisasi itu sendiri sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengelolaan pengarsipan di Kabupaten Kebumen terus meningkat tercermin dari peningkatan indeks kearsipan dari 80,23 pada Tahun 2021 menjadi 93,15 pada Tahun 2024. Hal ini didukung dengan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang selalu mencapai 100%. Namun demikian persentase perangkat daerah yang menerapkan arsip baku perlu dioptimalkan karena sampai Tahun 2024 baru mencapai 84,24%.

Tabel 2.122.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kearsipan	NA	80,23	81,58	92,07	93,15
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100	100	100	100	100
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip baku (%)	64,56	67,62	72,35	74,51	84,24

Sumber: Disarpus Kabupaten Kebumen, 2024

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen yang berada di wilayah selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Samudera Hindia memiliki panjang pantai 57,55 kilometer. Wilayah pesisir dan pantai ini memiliki potensi dalam pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya serta potensi lainnya seperti garam. Selain itu, wilayah daratan di sebelah utara dan selatan juga memiliki potensi Cekungan Air Tanah (CAT) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan budidaya air tawar. Data menunjukkan produksi perikanan tangkap terus meningkat dari 9.068.530,00 kg pada Tahun 2020 menjadi 12.898.015,49 kg pada Tahun 2023, namun menurun pada Tahun 2024 menjadi 9.522.860 kg. Walaupun menurut volumen produksi perikanan tangkap menurun hingga Tahun 2024, secara umum nilai produksi cenderung meningkat dari Rp.196.258.500.419,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.239.742.697.384,00 pada Tahun 2024 karena terjadi kenaikan harga jual. Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap terus dilakukan diantaranya dengan meningkatkan cakupan bina kelompok nelayan dimana hingga Tahun 2023 mencapai 13,51%, namun pada Tahun 2024 justru menurun hingga hanya menjadi 2,03%.

Sementara itu, volume produksi perikanan budidaya juga menunjukkan peningkatan dari 3.139.317,00 kg pada Tahun 2020 menjadi 3.590.480 kg pada Tahun 2024. Hal ini menyebabkan nilai produksi perikanan budidaya juga meningkat dari Rp.130.669.387.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp. 153.838.453.500,00 pada Tahun 2024. Data ini merupakan penjumlahan dari berbagai jenis komoditas yang dihasilkan oleh pembudidaya di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Produksi perikanan diharapkan juga mendukung pemenuhan gizi masyarakat dengan peningkatan angka konsumsi ikan. Walaupun cenderung fluktuatif, angka konsumsi ikan cenderung meningkat dari 22,46 kg/kapita/tahun pada Tahun 2020 menjadi 28,08 kg/kapita/tahun pada Tahun 2024. Namun demikian angka ini masih jauh jika dibandingkan target ideal konsumsi ikan yang ditetapkan pemerintah pusat pada Tahun 2024 yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun.

Sebagian produksi perikanan tidak dikonsumsi secara langsung namun diolah terlebih dahulu sehingga memberikan nilai tambah pada produksi perikanan sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Produksi pengolahan hasil perikanan terus mengalami kenaikan dari 288.066,00 kg pada Tahun 2020 menjadi 745.670,00 kg pada Tahun 2024 dengan nilai produksi yang juga semakin meningkat tajam dari Rp.6.464.341.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.282.358.587.562 pada Tahun 2024. Selain itu seperti telah disebutkan di atas, Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi produksi garam. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir produksi garam cenderung menurun dari 144.620,00 kg pada Tahun 2020 menjadi hanya 54.110,00 kg pada Tahun 2024 namun demikian nilai produksinya justru meningkat dari Rp.578.480.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp. 1.977.850.000,00 pada Tahun 2024 karena adanya kenaikan harga jual.

Tabel 2.123.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan Tangkap (kg)	9.068.530,00	9.646.661,67	9.138.317,30	12.898.015,49	9.522.860,00
2	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp)	196.258.500.419	212.457.910.669	173.982.608.774	176.664.480.191	239.742.697.384
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	13,33	13,33	13,33	13,51	2,03
4	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	3.139.317,00	3.220.874,00	3.355.110,00	3.453.930,00	3.590.480,00
5	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp)	130.669.387.000	135.191.978.000	138.501.573.000	152.416.467.300	153.838.453.500
6	Angka Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	22,46	24,54	27,19	22,33	28,08
7	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (kg)	288.066,00	452.173,00	722.690,29	526.588,65	745.670,00
8	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp)	6.464.341.000	29.218.550.300	37.715.056.339	34.486.245.497	282.358.587.562
9	Produksi Garam (kg)	144.620,00	155.945,00	136.265,00	97.448,00	54.110,00
10	Nilai Produksi Garam (Rp)	578.480.000	623.780.000	599.757.500	374.274.300	1.977.850.000

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2024

b. Pertanian

Menurut data PDRB menunjukkan sub sektor pertanian (yang terdiri dari pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian) masih berkontribusi cukup besar. Namun demikian kontribusi tersebut terus menurun dari 20,80% pada Tahun 2020 menjadi 18,97% pada Tahun 2024. Walaupun demikian, nilai produksinya sebenarnya masih meningkat dari Rp.5.828.042,20 juta pada Tahun 2020 menjadi Rp.7.324.663,42 juta pada Tahun 2024. Masing-masing komponen secara rinci seperti tercantum pada Tabel dibawah menunjukkan hanya nilai produksi tanaman hortikulura semusi yang mengalami penurunan, sedangkan yang lain cenderung mengalami peningkatan.

Sementara itu selain sebagai bahan pangan utama, Kabupaten Kebumen juga masih menjadi lumbung padi nasional. Namun demikian, produktivitas padi cenderung mengalami penurunan dari 6,08 ton/ha pada Tahun 2020 menjadi 5,67 ton/ha pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena anomali cuaca menyebabkan mundurnya musim tanam. Hal yang sama terjadi pada 5 komoditas bahan pangan utama lokal yang mengalami penurunan dari 5,72 ton/ha pada Tahun 2020 menjadi 5,61 ton/ha pada Tahun 2024.

Pada bidang peternakan menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan nilai produksi PDRB hingga Rp. 892.897,83 juta pada Tahun 2024. Kenaikan ini diantaranya ditunjang oleh optimalisasi penanganan kejadian penyakit hewan menular walaupun sempat merebak kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di Tahun 2022.

Tabel 2.124.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%)	20,80	20,89	19,46	19,08	18,97
2	Nilai produksi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Rp.Juta):	5.828.042,20	6.175.451,32	6.345.926,58	6.823.185,44	7.324.663,42
	a. Nilai produksi Tanaman Pangan (Rp. Juta)	2.273.379,25	2.389.232,47	2.289.384,98	2.443.409,88	2.579.705,52
	b. Nilai produksi Tanaman Hortikultura Semusim (Rp. Juta)	52.655,82	51.836,02	50.526,05	48.406,60	53.534,11
	c. Nilai produksi Perkebunan Semusim (Rp. Juta)	5.477,93	5.403,96	5.318,07	5.559,65	6.089,36
	d. Nilai produksi Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya (Rp. Juta)	2.019.280,63	2.135.350,32	2.304.737,32	2.492.105,31	2.701.222,15
	e. Nilai produksi Perkebunan Tahunan (Rp. Juta)	750.781,09	812.596,04	817.818,24	876.986,88	974.106,94
	f. Nilai produksi Peternakan (Rp. Juta)	625.468,00	675.550,12	767.831,95	843.401,73	892.897,83
	g. Nilai produksi Jasa Pertanian dan Perburuan (Rp. Juta)	100.999,48	105.482,40	110.309,97	113.315,39	117.107,52
3	Produktivitas padi (ton/ha)	6,08	6,93	6,25	5,93	5,67
4	Produktivitas tanaman padi/bahan pangan utama lokal terdiri dari 5 komoditas (ton/ha)	5,72	6,74	6,1	5,66	5,61
5	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-26,12	-4,97	2,93	-0,025	-19,16

Sumber: Distapang Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan data eksisting lahan pertanian di Kabupaten Kebumen terbagi ke dalam kategori LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), LCP2B (Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Luasan KP2B diambil dari

delineasi LP2B ditambah LCP2B, yakni 38.389,27 Ha LP2B dan 4.764,60 Ha LCP2B, sehingga didapat 43.153,86 Ha KP2B. Dasar penetapan LP2B, LCP2B KP2B adalah Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 521.1/431 Tahun 2022. Lahan yang sudah ditetapkan LP2B dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan kecuali oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum, bencana alam dan PSN (Proyek Strategis Nasional). Luasan masing-masing LP2B, LCP2B, dan KP2B pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.125.
Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten Kebumen

No	Nama Kecamatan	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	KP2B (Ha)
1	Adimulyo	2.789,51	92,35	2.881,86
2	Alian	1.317,39	125,69	1.443,08
3	Ambal	3.279,74	183,06	3.462,80
4	Ayah	855,74	134,05	989,79
5	Bonorowo	1.268,95	14,11	1.283,06
6	Buayan	1.265,64	128,51	1.394,15
7	Buluspesantren	2.530,38	170,57	2.700,95
8	Gombong	955,65	60,98	1.016,63
9	Karanganyar	702,20	131,18	833,38
10	Karanggayam	1.532,63	561,59	2.094,22
11	Karangsambung	1.447,73	316,46	1.764,19
12	Kebumen	1.900,48	183,44	2.083,92
13	Klirong	1.528,25	46,51	1.574,76
14	Kutowinangun	1.220,68	78,52	1.299,19
15	Kuwarasan	2.102,60	67,42	2.170,02
16	Mirit	2.592,22	126,19	2.718,40
17	Padureso	297,19	29,41	326,60
18	Pejagoan	532,34	67,40	599,74
19	Petanahan	1.905,82	106,79	2.012,61
20	Poncowarno	874,89	86,19	961,08
21	Prembun	924,95	78,05	1.003,00
22	Puring	3.422,47	457,01	3.879,48
23	Rowokele	1.021,11	79,07	1.100,18
24	Sadang	794,15	220,42	1.014,57
25	Sempor	1.074,07	156,99	1.231,05
26	Sruweng	1.262,64	52,79	1.315,43
Grand Total		39.399,39	3.754,75	43.154,14

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2024

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada tanggal 16 Desember 2021 telah mengeluarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK/02.01/XII/2021 tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dalam rangka mempercepat penetapan LP2B di berbagai kabupaten/kota sehingga diharapkan luasan LSD yang ditetapkan dapat menjadi data persiapan informasi lahan sawah.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut didapat bahwa Kabupaten Kebumen ditunjuk memiliki Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 43.267,44 Ha. Namun selama tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan sejumlah usulan koreksi atas luasan tersebut, hingga didapat luasan LSD hasil verifikasi aktual seluas 37.984,85 Ha sesuai Berita Acara Kesepakatan

Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang antara Bupati Kebumen dengan Kementerian ATR/BPN.

Tabel 2.126.
Luas Penetapan LSD di Kabupaten Kebumen

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas LSD berdasarkan Kepmen ATR/BPN No.1589/SK-HK.02.01/XII/2021	43.267,44
2	Luas koreksi LSD	3.731,70
3	Luas kesepakatan yang tidak dipertahankan	1.550,89
4	Luas Hasil Verifikasi Aktual yang disepakati untuk dipertahankan (1-2-3)	37.984,85

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2024

Sejak tahun 2022 luasan sawah LSD yang dipertahankan masih seluas 37.984,85 ha, namun hingga tahun 2024 ada beberapa pengajuan dari masyarakat dan pengusaha untuk alih fungsi lahan LSD menjadi lahan dengan fungsi lain. Pengajuan ijin ditujukan ke Kementerian ATR/BTN melalui BTN Kabupaten Kebumen, namun jumlah lahan yang diizinkan untuk alih lahan belum diketahui.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi prioritas pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral. Hal ini dalam upaya dukungan penurunan emisi GRK sekaligus mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Banyaknya infrastruktur energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Kebumen seperti tercantum pada tabel di bawah, namun demikian pemanfaatan potensi EBT masih bisa dioptimalkan akan tetapi terkendala investasi, inovasi dan teknologi.

Tabel 2.127.
Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024

No	Uraian	Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan, Jumlah, Kapasitas Total di Kabupaten Kebumen							
		Jumlah Unit				Kapasitas Total			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Biogas (m3)	20	22	27	DATA	327	367	397,5	DATA
2	PLTA (kW)	4	4	4	BELUM	20.500	20.500	20.500	BELUM
3	PLTMH (kVa)	2	2	2	TERSEDIA	400	400	400	TERSEDIA
4	PLTS SHS (kWp)	457	457	457	DATA	23	22,85	22,85	DATA
5	PLTS Ground Mounted (kWp)	-	1	-	BELUM TERSEDIA	-	1,8	-	BELUM TERSEDIA
6	PLTS Rooftop (kWp)	3	3	5	DATA BELUM	15	15	36	DATA BELUM
7	PJUTS (watt)	370	370	370	TERSEDIA	67.200	62.400	62.400	TERSEDIA
8	Pompa Air Tenaga Surya (kWp)	-	-	1	DATA BELUM TERSEDIA	-	-	1,8	DATA BELUM TERSEDIA

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2024

Sementara itu berdasarkan data dari Kementerian ESDM RI, Kabupaten Kebumen memiliki potensi komoditas EBT yaitu potensi angin (*onshore*), potensi surya (PLTS dan PLTS Terapung), potensi hidro (PLTA *RoR*), serta potensi biomassa baik dari sampah sampah kota maupun hutan produksi kritis.

Tabel 2.128.
Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Kebumen

Komoditas EBT		Satuan	Angka Potensi	
Potensi Angin	Onshore	MW	150,4	
	Offshore	MW		
Potensi Surya	PLTS	GWp	8,0	
	PLTS Terapung	MW	9,7	
Potensi Hidro	PLTA RoR	MW	2,0	
	PLTA Bendungan	MW	-	
Potensi Bioenergi	Potensi Biomassa Existing Limbah Industri	Gula	MW	-
		Kayu	MW	-
		Kelapa Sawit	MW	-
		Padi	MW	-
		Pulp dan Kertas	MW	-
		Tapioka	MW	-
	Potensi Biomassa Existing Produk Utama	Sampah Kota Teknis	MW	6,3
		Sampah Kota Teoritis	MW	21,1
	Potensi Biomassa Pengembangan	Hutan Produksi Kritis	Ha	4,2
Potensi Panas Bumi	Cadangan	Spekulatif	MW	-
		Hipotetik	MW	-
		Mungkin	MW	-
		Terduga	MW	-
		Terbukti	MW	-
	Total Potensi Panas Bumi		MW	-

Sumber: Kementerian ESDM

d. Perdagangan

Urusan perdagangan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat sampai ke masyarakat sebagai konsumen akhir dengan tingkat harga yang stabil dan terjangkau. Hal ini dapat dilihat dari disparitas harga yang mulai dihitung sejak Tahun 2023 yaitu sebesar 1,03% dan terus menurun hingga mencapai -1,98% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan harga komoditas di Kabupaten Kebumen cenderung masih lebih murah sekitar -1,98% dibandingkan rata-rata harga komoditas di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 13 komoditas yang dihitung yaitu beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu , kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih impor kating serta ikan kembung. Dengan nilai disparitas tergolong kecil dibawah 10% bahkan minus, dapat diartikan adanya efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah.

Dalam hal mendukung kelancaran distribusi di wilayah Kabupaten Kebumen, kualitas sarana perdagangan juga terus ditingkatkan. Hal ini tercermin dengan peningkatan persentase pasar tradisional dalam kondisi baik dari 83% pada Tahun 2020 menjadi 85% pada Tahun 2024. Sementara itu nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Kebumen juga terus meningkat dari Rp.34.269.581.605,00 pada Tahun 2020 menjadi

Rp.41.748.073.223,00 pada Tahun 2023. Peningkatan ekspor ini menunjukkan adanya peningkatan daya saing produk dan komoditas yang dihasilkan Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.129.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Disparitas Harga (%)	N/A	N/A	N/A	1,03	-1,98
2	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	83	88	84	83	85
3	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp.)	34.269.581.605	41.890.418.021	34.867.795.457	41.279.344.347	41.748.073.223

Sumber: Disperindag Kabupaten Kebumen, 2024

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga terus berupaya seoptimal mungkin meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri baik melalui upaya sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan BUMD, untuk selanjutnya menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mendorong UMKM unggulan daerah agar lebih produktif dengan pemasaran yang penuh inovasi. Diantaranya memanfaatkan aplikasi Blangkon yang telah memasarkan produk UMKM di Jateng. Selain itu, menjalin kerja sama dengan perbankan, serta lembaga keuangan lainnya. Upaya lainnya adalah melakukan fasilitasi dan pendampingan membantu mempermudah UMKM dalam pengurusan izin berusaha, dan syarat-syarat lain agar UMKM yang berkualitas dapat masuk aplikasi e-Katalog yang merupakan aplikasi untuk memfasilitasi belanja pemerintah daerah secara elektronik.

e. Perindustrian

Pengembangan perindustrian menjadi sangat penting dalam upaya hilirisasi yaitu untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja masyarakat. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kebumen semakin menguat dengan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar bagi PDRB daerah sejak Tahun 2022. Hal ini tercermin dari rasio PDRB industri pengolahan yang semakin meningkat dari 21,26% pada Tahun 2020 menjadi 22,69% pada Tahun 2024. Hal ini diantaranya didukung jumlah industri kecil menengah yang bertambah hingga mencapai 56.466 unit pada Tahun 2024 serta industri besar yang mencapai 4 unit di Tahun 2024. Namun dari data tersebut menunjukkan rendahnya pertumbuhan/penambahan industri kecil dan menengah serta masih sedikitnya industri besar.

Tabel 2.130.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	21,26	21,31	21,78	22,24	22,69
2	Jumlah Industri Kecil Menengah (unit)	56.408	56.420	56.430	56.465	56.466
3	Jumlah Industri Besar (unit)	3	3	3	4	4

Sumber: Disperindag Kabupaten Kebumen, 2024

f. Transmigrasi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang difasilitasi untuk bertransmigrasi terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen seperti tercantum pada tabel di bawah. Pada tahun 2020-2021 tidak dilakukan program transmigrasi karena terjadinya Pandemi Covid-19. Sementara itu pada Tahun 2024 terdapat 1 KK transmigran swakarsa yang melakukan pembiayaan sendiri, namun tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan transmigrasi yaitu karena terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk calon transmigrasi Kabupaten, belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi serta terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran.

Tabel 2.131.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang difasilitasi untuk bertransmigrasi (KK)	0 KK	0 KK	10 KK	3 KK	2 KK
2	Jumlah transmigran swakarsa (KK)	N/A	N/A	N/A	N/A	1 KK

Sumber: Disperindag Kabupaten Kebumen, 2024

g. Pariwisata

Pengembangan pariwisata menjadi sangat penting bagi Kabupaten Kebumen dikarenakan selain memiliki sumber daya alam dan budaya yang potensial dalam pengembangan pariwisata, juga dikarenakan *Geopark* Kebumen telah disahkan sebaga UNESCO *Global Geopark* pada Tahun 2025. Kinerja pariwisata juga cukup menggembirakan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sedikit demi sedikit meningkat dari hanya 5 orang pasca Pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 menjadi 23 orang pada Tahun 2024. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara juga terus meningkat dari 854.315 orang pada Tahun 2020 menjadi 2.614.639 pada Tahun 2024. Sementara itu, rata-rata lama tinggal wisatawan cenderung menurun sejak 2022 menjadi 1,29 hari pada Tahun 2024. Untuk itu perlu diwujudkan paket wisata yang terintegratif agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Kebumen. Namun demikian tingkat hunian akomodasi seperti hotel dan tempat penginapan tetap meningkat dari 23,09% pada Tahun 2020 menjadi 53,97% pada Tahun 2024 karena didorong aktivitas lain seperti MICE (*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*). Namun dengan tingkat hunian masih sedikit di atas 50% menunjukkan tingkat hunian belum

optimal karena menurut patokan umum berdasarkan tren industri perhotelan menunjukkan tingkat hunian 60-70% pada banyak kasus dianggap menguntungkan untuk di wilayah kota kecil. Walaupun demikian, hal ini menyebabkan rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum semakin meningkat dari 2,04% pada Tahun 2020 menjadi 2,85% pada Tahun 2024. Perkembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kelengkapan amenities diantaranya hotel dan akomodasi lainnya dimana sampai dengan Tahun 2024 terdapat 1 hotel berbintang 4, 3 hotel berbintang 3 serta 45 unit akomodasi lainnya. Selain itu, sektor pariwisata juga didorong dalam pengembangan ekonomi kreatif dimana setiap tahun capaian pelaku ekonomi kreatif yang dibina mencapai 100%.

Tabel 2.132.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	0	5	9	11	23
2	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (orang)	854.315	966.936	1.623.856	2.151.098	2.614.639
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	0,23	0,5	1,44*	1,64	1,29
4	Tingkat hunian akomodasi (%)	23,09	28,58	30,08	36,08	53,97
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,04	2,08	2,55	2,73	2,85
6	Jumlah hotel dan akomodasi lainnya					
	a. Hotel bintang 3 (unit)	2	2	3	3	3
	b. Hotel bintang 4 (unit)	0	0	0	0	1
	c. Akomodasi lainnya (unit)	38	36	38	37	45
7	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2024

Dari 9 obyek wisata milik Pemerintah Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2024 terdapat 4 obyek wisata yang telah dipihakketigakan pengelolaannya yaitu Goa Jatijajar, PAP Krakal, Pantai Petanahan dan Pantai Karangbolong. Jumlah kunjungan pada ke-9 obyek wisata tersebut cenderung menurun sejak Tahun 2022 hingga mencapai 505.396 orang yang berkunjung pada Tahun 2024. Namun demikian pendapatan meningkat tajam khususnya pada Tahun 2024 dikarenakan cukup efektifnya pengelolaan oleh pihak ketiga, adanya kenaikan harga tiket serta beberapa obyek wisata yang sebelumnya mengalami pengembangan signifikan mulai beroperasi penuh pada Tahun 2024.

Tabel 2.133.
Daftar Kunjungan di 9 Obyek Wisata
Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Daya tarik wisata	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Goa Jatijajar	103.948	84.079	187.048	158.249	72,667
2	Goa Petruk	2.776	1.881	2.916	2.247	1,808
3	Pantai Karangbolong	19.070	15.550	24.113	4.064	126,446
4	Pantai Logending	36.632	27.099	47.703	37.986	27,121
5	Pantai Petanahan	62.537	47.793	67.110	81.775	161,545
6	Pantai Suwuk	92.295	81.819	114.800	76.853	24,660
7	PAP. Krakal	31.037	25.546	71.198	74.293	30,417
8	Waduk Sempor	24.008	34.746	92.224	93.006	43,687
9	Waduk Wadaslintang	10.817	16.216	43.132	35.159	17,045
Jumlah		383.120	334.729	651.244	563.632	505,396

Sumber data: Disparbud, 2024

Tabel 2.134.
Pendapatan di 9 Daya tarik wisata Kabupaten Kebumen

No	Daya tarik wisata	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Goa Jatijajar	1.260.772.280	1.055.450.760	2.196.292.760	1.774.994.265	3.663.979.530
2	Goa Petruk	24.158.500	16.136.500	28.448.500	17.700.000	37.409.500
3	Pantai Karangbolong	141.787.500	122.696.500	188.207.000	351.809.500	711.964.000
4	Pantai Logending	260.622.000	205.451.400	380.934.624	277.009.500	311.292.500
5	Pantai Petanahan	390.569.000	315.965.500	460.209.000	467.051.120	1.872.346.000
6	Pantai Suwuk	698.331.950	655.928.700	890.367.300	602.219.660	636.524.500
7	PAP Krakal	293.003.900	256.245.900	652.299.000	851.594.780	802.345.000
8	Waduk Sempor	157.962.000	235.685.000	598.957.000	574.520.400	438.372.500
9	Waduk Wadaslintang	27.436.800	36.782.400	101.565.800	75.408.500	93.182.700
Jumlah		3.254.643.930	2.900.342.660	5.497.280.984	4.992.307.725	8.567.416.230

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, LKJIP 2023

Tabel 2.135.
Daftar Obwis yang Dikelola Masyarakat/Swasta

No	Daya tarik wisata	Pengunjung (orang)			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pantai Menganti	-	581.633	357.467	387.687
2	Surumanis	-	7.545	3.586	13.468

No	Daya tarik wisata	Pengunjung (orang)			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3	Rahayu River Tubing	-	5.678	6.374	7.324
4	Pantai Bocor	-	235.000	162.002	135.003
5	Lembupurwo	-	117.000	144.063	120.053
6	Waduk Jembangan	-	25.765	27.221	23.683
7	Sagara View	-	-	89.802	202.625
8	Pitris	-	-	93.244	77.703
9	Purangga Park	-	-	7.903	5,660
10	Peniron	-	-	3.765	2.357
11	Sendangdalem Kecamatan Padureso	-	-	1.217	5.967
12	Desa Cangkring Kecamatan Sadang	-	-	4.524	10.628
13	Desa Wisata Karangsambung	-	-	6.851	1.611
14	Pantai Mliwis	-	-	652.862	740.548
15	Desa Wisata Gunungsari	-	-	7.206	2.500
16	Desa Wisata Buayan	-	-	13.748	DATA BELUM TERSEDIA
17	Desa Wisata Penusupan	-	-	2.299	2.194
18	Desa Wisata Seboro	-	-	1.810	1.912
19	Pantai Lampon	-	-	1.533	7.156
Jumlah		632.212	972.621	1.587.477	DATA BELUM TERSEDIA

Sumber data: Disparbud, 2024

2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan dalam IRB yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) pelayanan publik. Hal ini cukup berdampak

pada pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang terus meningkat dari 58,4 pada Tahun 2020 menjadi 85,74 pada Tahun 2024. Dengan meningkatnya IRB, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Untuk upaya peningkatan implementasi IRB perlu terus dilakukan agar indeks IRB bisa meningkat menuju kategori Sangat Baik (80-89) bahkan kategori Memuaskan (90-100).

Sedangkan terkait penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dapat tercermin dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 63,84 pada Tahun 2020 menjadi 67,54 pada Tahun 2024 atau masuk kategori B/Baik (Nilai > 60 – 70). Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja diantaranya pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Sementara itu, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen juga dianggap terus membaik oleh Kementerian PAN-RB dengan terus meningkatnya indeks pelayanan publik Kabupaten Kebumen dari 4,23 pada Tahun 2021 menjadi 4,59 pada Tahun 2024. Indeks ini diukur dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarpras pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi. Kementrian Hukum dan HAM RI juga memberikan predikat AA (istimewa) dengan nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 telah mencapai 98,52. Pencapaian ini menunjukkan Kabupaten Kebumen berprestasi dalam reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi.

Tabel 2.136.
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	58.4	59.54	62.81	79.91	85,74
2	Indeks Pelayanan Publik (angka)	N/A	4.23	4.37	4.55	4,59
3	Indeks Reformasi Hukum (angka)	N/A	N/A	N/A	57,54	98,52

Sumber: SETDA Kabupaten Kebumen, 2024

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD terus mengoptimalkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan perda, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan naskah akademik, pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan laporan semester, dan pembahasan pertanggungjawaban APBD, pengawasan semua urusan pemerintahan dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan

keuangan oleh BPK serta pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah, orientasi DPRD, bimbingan teknis DPRD, publikasi dan dokumentasi Dewan, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penyusunan program kerja DPRD, kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan pelaksanaan reses, penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja. Secara umum hal ini mendukung:

- 1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota;
- 2) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); serta
- 3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Sementara itu, realisasi penetapan Peraturan Daerah dari pengajuan Raperda menunjukkan kecenderungan peningkatan ketepatan waktu dimana pada Tahun 2024 telah mencapai 100%. Sementara itu proporsi Perda inisiatif secara jumlah dibandingkan Perda usulan eksekutif menunjukkan proporsi yang semakin berimbang dimana pada Tahun 2024 terdapat 6 Perda inisiatif sedikit di bawah Perda usulan eksekutif sebanyak 7 Perda.

Tabel 2.137.
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah PERDA yang ditetapkan	14	11	13	16	14
5	Jumlah RAPERDA yang diajukan	20	12	18	19	13
6	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu (%)	70	91,67	72,22	84,21	107,69
7	Jumlah Perda/Raperda Inisiatif dari DPRD	7	3	5	5	6
8	Jumlah Perda/Raperda usulan dari Eksekutif	13	9	13	14	7

Sumber: Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, 2024

c. Perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adanya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban terintegrasi dalam satu sistem yang terhubung mulai penyusunan perencanaan Tahun 2021.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) telah di launching oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Kominfo, serta KPK pada tanggal 12 Desember tahun 2023 bertepatan dengan Acara Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai aplikasi umum bagi pemerintah daerah dan satu-satunya sistem yang digunakan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mulai Tahun Perencanaan 2024 Pemerintah Daerah diharapkan sudah menggunakan SIPD RI. Untuk Kabupaten Kebumen telah menerapkan aplikasi SIPD RI dalam perencanaan pembangunan. Penerapan SIPD RI juga dilakukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dua puluh tahunan (RPJPD), lima tahunan (RPJMD) dan tahunan (RKPD).

Perencanaan juga merupakan salah satu komponen SAKIP dimana kinerja nilai SAKIP perencanaan Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari 21,77 pada Tahun 2020 menjadi 22,9 pada Tahun 2024. Namun demikian perlu dioptimalkan agar dapat mencapai nilai hingga 30. Berdasarkan hasil evaluasi capaian Visi RPJMD Tahun 2021-2026, menunjukkan pencapaian RPJMD sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai 96,85% atau telah masuk kategori Sangat Tinggi. Angka ini diperoleh dari rata-rata capaian IKU Tujuan Daerah dan IKU Sasaran Daerah sampai dengan Tahun 2024. Walaupun telah mencapai kategori Sangat Tinggi, namun demikian perlu dilakukan optimalisasi pencapaian utamanya terhadap

IKU dengan tingkat capaian terendah. Dari hasil evaluasi menunjukkan 3 besar IKU dengan capaian paling rendah yaitu PDRB ADHK Sektor Perdagangan, PDRB ADHK Sektor Tersier dan Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK. Hal ini juga akan menjadi masukan yang penting dalam penyusunan RPJMD kedepan. Beberapa permasalahan lain juga terjadi dalam perencanaan pembangunan diantaranya masih lemahnya pengelolaan data yang memperlemah analisis dan perumusan kebijakan, belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan daerah sehingga belum mampu memberikan masukan secara optimal, belum optimalnya inovasi daerah yang mendukung perumusan perencanaan dan kebijakan daerah, sangat dinamisnya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat yang menuntut kecepatan dan ketepatan perencanaan pembangunan yang dinamis serta belum optimalnya kualitas dan kapabilitas SDM perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan diantaranya dengan ketersediaan dan kelengkapan dokumen perencanaan seperti RPJPD yang pada Tahun 2024 telah ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD maupun RKPD sebagai dokumen arahan pembangunan daerah. Selain itu, Kabupaten Kebumen juga telah menetapkan revisi RTRW yaitu dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044. Selain itu konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan selanjutnya ke dalam APBD setiap tahunnya selalu mencapai 100%..

Tabel 2.138.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Komponen perencanaan dalam SAKIP	21.77	22.19	22.28	22.9	22.9
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Kebumen, 2024

d. **Keuangan**

memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kepada masyarakat.

Kemampuan daerah dalam dengan lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan daerah perlu terus dioptimalkan. Hal ini tercermin dari rasio pajak daerah terhadap PDRB yang cenderung menurun dari 1,44% pada Tahun 2020 menjadi 1,25% pada Tahun 2024. Dari realisasi APBD juga terlihat masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah yang juga cenderung menurun hingga mencapai 15,44% pada Tahun 2024 menunjukkan masih lemahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga menyebabkan kapasitas fiskal yang selama 3 tahun terakhir (2022-2024) masuk kategori rendah. Sementara itu indeks pengelolaan keuangan daerah juga cenderung menurun dari 74,0909 pada Tahun 2020 menjadi 72,25 pada Tahun 2023. Namun demikian laporan keuangan Kabupaten Kebumen tetap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya.

Tabel 2.139.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,44	1,60	1,57	1,30	1,25
2	Kapasitas Fiskal	tinggi	tinggi	Rendah	Rendah	rendah
3	Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	14,59	16,67	17,99	15,98	15,44
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	74,0909	64,2253	77,674	72,25	DATA BELUM TERSEDIA
5	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	DATA BELUM TERSEDIA

Sumber: BPKPD Kabupaten Kebumen, 2024

e. **Kepegawaian**

Urusan kepegawaian memiliki tugas memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan kepuasan pegawai, dan terwujudnya budaya kerja yang berdasarkan pada prestasi dan integritas. Hal ini ditunjukkan dengan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks sistem merit Kabupaten Kebumen terus membaik dari sebelumnya hanya 179 (kategori kurang) kemudian dapat meningkat hingga mencapai 253,5 (kategori baik) pada Tahun 2024.

Tabel 2.140.
Perkembangan Capaian Sistem Merit
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Merit (indeks)	NA	179	179	253,5	253,5

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kebumen, 2024

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN melalui sistem merit dengan fokus pada 8 aspek penilaiannya yaitu :

- 1) perencanaan kebutuhan ASN;
- 2) pengadaan ASN,
- 3) pembagian karir;
- 4) promosi dan mutasi;
- 5) manajemen kinerja;
- 6) penggajian;
- 7) penghargaan dan disiplin;
- 8) perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Arapatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2028 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerapkan sistem Merit. Beberapa hal yang dilakukan dalam penerapan sistem merit meliputi:

- 1) Ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan
- 2) Seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama)
- 3) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi; dalam hal ini Pemetaan Kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki,
- 4) Ketersediaan *talent pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja
- 5) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi
- 6) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai
- 7) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja, pertukaran pegawai, *coaching* dan *mentoring*.

Sistem merit diharapkan dapat mengatasi permasalahan sekaligus mengoptimalkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus mengalami penurunan dari 10.573 orang pada Tahun 2020 menjadi hanya sebanyak 8.458 orang pada Tahun 2024. Sejak Tahun 2021 dilakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sebagian besar berasal dari tenaga honorer dan Petugas Penunjang Kegiatan (P2K) Kantor/Lapangan. Hal ini dapat menambah jumlah SDM Aparatur untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen peningkatan pelayanan publik. Walaupun demikian secara total jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung menurun kembali sejak Tahun 2022 yang sempat berjumlah 11.843 orang menjadi 11.394 orang pada Tahun 2024. Hal ini dikarenakan jumlah ASN yang pensiun dan mutasi keluar Pemkab Kebumen setiap tahunnya masih lebih besar dibandingkan ASN baru (baik CPNS, P3K Baru maupun mutasi masuk Pemkab Kebumen).

Tabel 2.141.
Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen

Tahun	PNS			P3K			ASN (PNS + P3K)		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
2020	4.913	5.660	10.573						
2021	4.641	5.711	10.352	63	106	169	4.767	5.817	10.521
2022	4.294	5.453	9.747	683	1.413	2.096	4.977	6.866	11.843
2023	3.853	5.171	9.024	861	1.804	2.665	4.714	6.975	11.689
2024	3.533	4.925	8.458	965	1.971	2.936	4.498	6.896	11.394

Sumber : BKPSDM, 2024

Mayoritas tingkat pendidikan ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengenyam pendidikan tinggi yaitu sebesar 89,3%, utamanya pada tingkat pendidikan D-IV dan S1 sebesar 72,2% hingga Tahun 2024. Proporsi ASN yang berpendidikan di bawah Perguruan Tinggi (SD-SLTA) terus mengalami penurunan dari 19,91% pada Tahun 2020 menjadi 10,7% pada Tahun 2024. Hal ini dikarenakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) minimal berpendidikan diploma, sedangkan formasi P3K Baru sebagian besar juga telah minimal berpendidikan diploma.

Tabel 2.142.
Tingkat Pendidikan ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen

Persentase Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD-SLTA (%)	19,91	16,82	13,23	11,75	10,7
DI – D III (%)	18,16	13,66	11,84	11,48	11,61
D IV – S1(%)	56,99	63,36	69,29	71,12	72,2
S2 – S3 (%)	4,93	6,16	5,55	5,62	5,49

Sumber : BKPSDM, 2024

f. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya peningkatan kapasitas ASN dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan teknis, fungsional maupun diklat jenjang kepemimpinan guna meningkatkan profesionalitas ASN terus ditingkatkan. Namun demikian keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama sehingga hanya jenis diklat tertentu yang diprioritaskan seperti diklat kepemimpinan dalam rangka mengisi jabatan struktural tertentu, prajabatan untuk CPNS (jika terdapat formasi CPNS di tahun tersebut) serta orientasi P3K. Sementara itu untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan pemeblajaran *online* melalui aplikasi SINAU KEBUMEN. Hal ini dalam rangka mendukung Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 yang diantaranya menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) dalam 1 tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah bekerja sama dengan berbagai instansi dalam penyusunan konten pembelajarannya, diantaranya adalah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional Kawasan Geodiversitas Karangsambung, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Yogyakarta dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah.

Tabel 2.143.
Perkembangan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Diklat	2020	2021	2022	2023	2024
Teknis	792	792	116	229	90
Fungsional	60	60	19	16	2
Kepemimpinan	29	29	13	23	31
Prajabatan	498	498	310	568	0
Orientasi P3K					287
Pengiriman PNS ke Lembaga Diklat	107	107	354	0	44
Jumlah	1.486	1.486	812	836	454

Sumber : BKPSDM, 2024

g. Penelitian dan Pengembangan

Secara umum, penelitian dan pengembangan atau riset dan inovasi daerah lebih difokuskan pada keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang. Hal ini tercermin dari nilai kapabilitas inovasi (yang merupakan salah satu bagian IDSD) yang menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses-proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. Kinerja kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami kenaikan dari 2,00 pada Tahun 2020 menjadi 2,92 pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan kinerja IDSD secara keseluruhan dan masih masuk pada kategori sedang yang dapat berarti kapabilitas inovasi telah memadai namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki seperti kapasitas, efektivitas, dan kinerja lembaga riset serta jumlah belanja riset baik lembaga riset pemerintah maupun swasta (perguruan tinggi dan industri). Untuk itu perlu dioptimalkan kolaborasi antara unsur pemerintah dan swasta khususnya perguruan tinggi untuk meningkatkan kapabilitas inovasi.

Untuk itu beberapa upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pembangunan atau riset dan inovasi daerah yang berujung pada peningkatan daya saing daerah. Salah satunya dengan pemanfaatan hasil kelitbangan yang cukup fluktuatif dan cenderung meningkat dari 75% pada Tahun 2020 menjadi 85,71% pada Tahun 2024 Walaupun demikian masih perlu dioptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan serta perlunya dievaluasi apakah hasil kelitbangan memang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi pengambil kebijakan.

Tabel 2.144.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelitbangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	2,00	1,87	1,62	2,30	2,92
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	75	72,73	77,08	75	85,71

Sumber: Bappeda Kabupaten Kebumen, 2024

h. Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kebumen antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan. Pengawasan yang diberikan kepada penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan tujuan yang diharapkan tidak tercapai optimal. Rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah ini akan menjadi umpan balik dalam rangka mengambil tindakan perbaikan pada pelaksanaan berikutnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap semua obyek pemeriksaan di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kebumen. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk kategori. Indikator yang menunjukkan kinerja Inspektorat berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pemeriksaan perangkat daerah adalah besaran rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti dan banyaknya LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Kebumen sampai pada tahun 2024 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi. Jika dilihat dari tingkat kapabilitas APIP unsur pengawasan di Kabupaten Kebumen masih pada level 3 hingga tahun 2024.

Terkait kinerja pencegahan korupsi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Nilai persepsi korupsi terus meningkat dari Tahun 2020 sebesar 3,34 menjadi 3,90 pada Tahun 2023 namun turun pada Tahun 2024 menjadi 3,75 yang masih masuk kategori Bersih dari Korupsi. Penurunan dikarenakan adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun. Hal ini sejalan dengan Indeks Integritas Nasional untuk Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas menunjukkan kinerja yang meningkat dari 76,46 pada Tahun 2021 menjadi 78,19 pada Tahun 2023 namun turun menjadi 75 pada Tahun 2024 dan masuk dalam kategori Waspada. Penurunan terjadi dikarenakan alasan yang sama yaitu adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata

responden internal menjawab menurun. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.145.
Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No	Kinerja Pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Maturitas SPIP	n/a	n/a	3,13	3,19	3,301
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Nilai Persepsi Korupsi	3,34	3,34	3,74	3,90	3,75
4.	Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas)	NA	76,46	74,8	78,19	75

Sumber: Inspektorat, 2024

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

Keamanan dan ketertiban adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam menjaga hal tersebut diperlukan peningkatan kewaspadaan serta peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Hal ini dapat tercermin dari kejadian konflik SARA yang terjadi di wilayah. Kejadian konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Sepanjang tahun 2020-2024, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada Tahun 2021, 2023 dan 2024. Walaupun selalu dapat tertangani, optimalisasi pengawasan dini perlu dioptimalkan dengan memantau hubungan antar kelompok masyarakat yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan.

Sementara itu, urusan kesatuan bangsa dan politik juga memiliki tugas meningkatkan pendidikan politik masyarakat sebagai upaya meningkatkan kehidupan demokrasi. Hal ini dapat tercermin dari capaian partisipasi warga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Capaian partisipasi warga Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 (pemilihan legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah serentak) mencapai 75,85% meningkat jika dibandingkan partisipasi pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kebumen di Tahun 2020 yang hanya mencapai 64%.

Tabel 2.146.
Capaian Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Kinerja Pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	1	0	1	1
2	Partisipasi warga dalam pemilu	64%	NA	NA	NA	75,85%

Sumber: Bakesbangpol, 2024

j. **Kewilayahan**

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Secara kelembagaan, kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui peraturan daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Selain tugas tersebut, kecamatan juga mendapatkan tugas lain yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Implementasi penyelenggara kecamatan di Kabupaten Kebumen dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya lebih mendukung pada peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik dan melayani. Indikator kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai pengampu urusan kewilayahan di Kabupaten Kebumen ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan. Baik IKM Kecamatan maupun Kelurahan terus mengalami peningkatan hingga masing-masing mencapai 90,67% untuk IKM Kecamatan dan 88,35% untuk IKM Kelurahan pada Tahun 2024. Selain itu sebagai pengampu urusan kewilayahan, Kecamatan juga mendapatkan tugas untuk menjaga kondusivitas wilayah yang selalu terjaga dengan tingkat capaian 100%.

Tabel 2.147.
Capaian Indikator Urusan Kewilayahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan (%)	83,92	85.26	87.80	89.85	90,67
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan (%)	83,7	83	88,14	88,14	88,35
3.	Indeks Kondusivitas Kecamatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: SETDA Kabupaten Kebumen, 2024

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah salah satunya diukur menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kinerja Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, kinerja IDSD Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 3,10 pada Tahun 2020 menjadi 3,77 pada Tahun 2024 yang menunjukkan masuk dalam kategori sedang-tinggi dan dapat diartikan kinerja baik tetapi masih memiliki ruang untuk peningkatan di beberapa komponen diantaranya fleksibilitas pasar tenaga kerja, kedalaman sistem keuangan, serta kapabilitas inovasi.

Tabel 2.148.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,10	3,125	3,05	3,41	3,77

Sumber: Bappeda Kabupaten Kebumen, 2024

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. PDRB Komponen Pengeluaran

Secara umum kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari PDRB komponen pengeluaran yang dihitung berdasarkan total nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Dengan PDRB ini dapat digambarkan pola konsumsi rumah tangga, peran pemerintah dalam mendukung pembangunan, tingkat investasi daerah serta daya saing perdagangan daerah. Hal ini dapat terlihat dari distribusi persentase PDRB menurut komponen pengeluaran yang menunjukkan proporsi masing-masing komponen pengeluaran terhadap Total PDRB.

Data menunjukkan PDRB Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh konsumsi yaitu sekitar 74-75% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan ekonomi daerah masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat dimana dikhawatirkan jika daya beli masyarakat menurun maka pertumbuhan ekonomi dapat terdampak signifikan. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan rendahnya kontribusi komponen lain, utamanya investasi (PMTB) dan net ekspor yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar. Namun demikian jika kontribusi konsumsi tinggi juga dapat memberikan potensi lebih bagi bagi sektor ritel, perdagangan dan jasa lainnya. Tingginya konsumsi menunjukkan aktivitas ekonomi cukup aktif di tingkat rumah tangga, tetapi tidak selalu berarti terjadi peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil hanya di kisaran 7-8% setiap tahun yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah ini terdiri dari pengeluaran semua tingkat pemerintah dari pusat, daerah hingga desa dengan fokus dan lokus program di wilayah Kabupaten Kebumen, diluar belanja modal yang tercatat sebagai PMTB. Persentase pengeluaran pemerintah di wilayah Kabupaten Kebumen yang kecil dapat menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik (pemerintah). Selain itu dapat diartikan belanja pemerintah tidak cukup signifikan berdampak pada perekonomian daerah jika komponen utama PDRB lainnya (misal konsumsi rumah tangga atau investasi) menurun.

Tingkat investasi memberikan kontribusi bagi PDRB cenderung menurun setiap tahunnya dari 22,71% pada Tahun 2020 menjadi 20,43% pada Tahun 2024 yang menunjukkan tingkat investasi relatif masih rendah, sehingga potensi untuk meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang dan kemampuan memberikan efek multiplier menjadi terbatas. Hal ini juga dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang tahan terhadap guncangan eksternal, karena investasi adalah salah satu motor penggerak utama inovasi dan produktivitas. Disisi lain perubahan inventori juga sangat kecil hanya sekitar 1,8% setiap tahunnya yang dapat menunjukkan produsen terbatas dalam melakukan ekspansi bisnis sehingga skala usahanya relatif stagnan, begitu juga upaya penyerapan tenaga kerja juga stagnan. Idealnya menurut Bank Dunia dan IMF, proporsi investasi terhadap suatu perekonomian yang masih berkembang minimal di kisaran 30% agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Untuk peningkatan investasi masih sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kebumen.

Daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen juga masih sangat lemah, hal ini bisa dilihat dari *net* ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat

tergantung pada barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Dapat juga berarti lebih banyak uang yang keluar daerah dibandingkan ke dalam daerah dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dengan berbelanja ke wilayah perkotaan besar utamanya di dekat Kabupaten Kebumen seperti Yogyakarta atau Purwokerto serta cukup tingginya aktivitas membeli barang secara *online* dengan *marketseller* berasal dari luar Kabupaten Kebumen. *Net* ekspor yang masih negatif juga dapat menunjukkan masih lemahnya daya saing produk/komoditas yang dihasilkan di dalam daerah yang disebabkan oleh biaya produksi tinggi (kurang efisien), kualitas dan diversifikasi produk rendah serta masih lemahnya pemasaran. Untuk itu investasi yang dapat menghasilkan produk/komoditas lokal yang berdaya saing sangat dibutuhkan oleh perekonomian Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.149.
Distribusi Persentase PDRB menurut Komponen Pengeluaran
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Komponen PDRB Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga (%), terdiri dari:	75,79	74,63	74,87	75,36	75,42
	a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (%)	73,94	72,80	73,04	73,52	73,47
	b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)	1,85	1,83	1,83	1,84	1,95
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Expenditure</i> (%)	8,87	8,65	7,99	7,71	7,58
3	Tingkat Investasi (%) terdiri dari:	22,71	22,26	21,84	21,48	20,43
	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	19,79	20,37	19,63	18,82	18,50
	b. Perubahan Inventori	2,92	1,89	2,21	2,66	1,93
4	Net Ekspor (%)	-7,36	-5,54	-4,71	-4,56	-3,71

Sumber : BPS Kebumen (data diolah), 2024

b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Hal ini dapat terlihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS yaitu rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang secara nominal terus mengalami peningkatan dari Rp.883.889,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp. 1.060.534,00 pada Tahun 2024. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk dimana pengeluaran dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Walaupun PDRB masih didominasi konsumsi rumah tangga, namun secara umum pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non

makanan. Hal ini terlihat dari proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun di atas 51% bahkan meningkat menjadi 53.30% pada Tahun 2024 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih berada di kelompok menengah kebawah yang baru mampu memenuhi kebutuhan dasar (primer) sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masih terbatas. Untuk itu investasi yang mampu memproduksi barang primer yang dibutuhkan masyarakat lokal masih sangat dibutuhkan, walau investasi untuk memproduksi barang sekunder maupun tersier tetap juga harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan nilai tambah.

Tabel 2.150.
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp.)	883.889	920.590	988.371	1.049.508	1.060.534
	a. Pengeluaran untuk Makanan (Rp.)	453.597	476.516	504.646	538.343	565.260
	b. Pengeluaran untuk Non Makanan (Rp.)	430.292	444.075	483.725	511.167	495.274
2.	Proporsi Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan:					
	a. Proporsi Pengeluaran untuk Makanan (%)	51,32	51,76	51,05	51,29	53,30
	b. Proporsi Pengeluaran untuk Non Makanan (%)	48,68	48,24	48,95	48,71	46,70

Sumber : BPS Kebumen, 2024

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
a. Infrastruktur Daerah

Kebijakan pemantapan infrastruktur daerah harus memedomani kebijakan pengembangan struktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah. Selain itu, juga harus memperhatikan kebijakan pengembangan pola ruang wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai upaya mewujudkan tertib tata ruang. Pemantapan infrastruktur diprioritaskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Kemantapan infrastruktur dilihat dari Indeks Infrastruktur Daerah yang dibentuk dari 3 indikator infrastruktur, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Indeks Infrastruktur Perhubungan.

Data menunjukkan indeks infrastruktur daerah terus meningkat dari 46,53% pada Tahun 2020 menjadi 68,85% pada tahun 2024. Hal ini ditunjang oleh kenaikan ketiga komponennya yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang meningkat dari 56,15% pada Tahun 2020 menjadi 59,00% pada Tahun 2024. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman menunjukkan peningkatan tajam dari 11,89% pada Tahun 2020 menjadi 71,16% pada Tahun 2024. Indeks ini

merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan meningkat dari 71,56% pada Tahun 2020 menjadi 75,78% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan kinerja sampai dengan Tahun 2024 baru mencapai 68,85% menunjukkan perlunya peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infrastruktur daerah.

Tabel 2.151.
Indeks Infrastruktur Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur Daerah (%)	46,53	51,86	57,89	64,00	68,85
2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)	56,15	56,55	57,89	57,95	59,00
3	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	11,89	27,12	35,26	58,70	71,16
4	Indeks Infrastruktur Perhubungan (%)	71,56	71,89	73,55	75,30	75,78

Sumber : DPUPR dan Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2024

b. Transportasi

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung meningkat, hal ini menunjukkan adanya penambahan volume kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan penambahan panjang jalan. Oleh karena itu beberapa ruas jalan di Kabupaten Kebumen mulai mengalami kemacetan utamanya pada saat pagi hari ketika jam berangkat kerja dan sekolah serta sore hari ketika jam pulang kerja dan sekolah. Kemacetan juga terjadi ketika musim liburan termasuk ketika lebaran dan *long weekend*. Sementara itu kinerja kapasitas angkutan umum dan terminal di wilayah Kabupaten Kebumen juga cenderung meningkat hingga mampu mengangkut sebanyak 1.219.282 orang/barang pada Tahun 2024. Untuk itu pemantapan sarana jalan dan transportasi masih perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen utamanya dalam rangka mengendalikan beban biaya logistik.

Tabel 2.152.
Profil Fasilitas/Infrastruktur Transportasi
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	16	16	14	17	17
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang/barang)	DATA BELUM TERSEDIA	1.140.893	1.181.840	1.218.291	1.219.282
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun (orang/barang)	DATA BELUM TERSEDIA	1.140.893	1.181.840	1.218.291	1.219.282

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, 2024

c. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen mendasari RTRW Tahun 2011-2031 untuk kinerja Tahun 2020 hingga 2023 dan RTRW Tahun 2024-2044 untuk kinerja Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan ketaatan terhadap RTRW sesuai dengan peruntukannya yaitu dari 75% pada Tahun 2020 menjadi 91,35% pada Tahun 2024. Sementara itu berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024-2044 yang menggantikan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031 menunjukkan adanya penurunan luasan seluruh kawasan budidaya dari 221.434 hektar menjadi 128.106 hektar. Hal ini menyebabkan rasio luas kawasan produktif terhadap luas seluruh kawasan budidaya berubah dari 85,01% menjadi 64,13%. Sedangkan luas kawasan industri telah ditentukan pada RTRW Tahun 2024-2044 yaitu sebesar 3.310 hektar atau mencakup 2,58% dari luas seluruh kawasan budidaya. Untuk rasio luas kawasan perkotaan terhadap luas seluruh kawasan budidaya juga berubah dari 4,35% menjadi 9,99% dikarenakan semakin berkembangnya permukiman perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus tumbuh. Untuk itu pengoptimalan peruntukan lahan dapat dioptimalkan dengan tetap melakukan pengendalian agar sesuai dengan peruntukan pada RTRW yang berlaku.

Tabel 2.153.
Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	RTRW 2011-2031				RTRW 2024-2044
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	75	75	91,15	91,25	91,35
2	Luas seluruh kawasan budidaya (penjumlahan dari no.3 s.d. 13 dalam hektar), terdiri dari:	221.434	221.434	221.434	221.434	128.106
3	Luas kawasan peruntukan hutan produksi	14.245	14.245	14.245	14.245	13.742
4	Luas kawasan hutan rakyat	30.926	30.926	30.926	30.926	0
5	Luas kawasan perkebunan rakyat	0	0	0	0	23.788
6	Luas kawasan peruntukan pertanian	143.073	143.073	143.073	143.073	44.113
7	Luas kawasan peruntukan perikanan	0	0	0	0	241
8	Luas kawasan peruntukan pertambangan	0	0	0	0	99
9	Luas kawasan peruntukan pariwisata	0	0	0	0	172
10	Luas kawasan peruntukan industri	0	0	0	0	3.310
11	Luas kawasan peruntukan permukiman kota	9.632	9.632	9.632	9.632	12.798
12	Luas kawasan peruntukan permukiman desa	23.558	23.558	23.558	23.558	27.605

No	Uraian	RTRW 2011-2031				RTRW 2024-2044
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Luas kawasan pertahanan dan keamanan	0	0	0	0	2.238
14	Rasio luas kawasan produktif (no. 3 s.d. 9) per luas seluruh kawasan budidaya	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	64,13%
15	Rasio luas kawasan industri (no. 10) per luas seluruh kawasan budidaya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%
16	Rasio luas kawasan perkotaan (no. 11) per luas seluruh kawasan budidaya	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	9,99%

Sumber : DPUPR Kabupaten Kebumen, 2024

d. Fasilitas/Infrastruktur Lembaga Keuangan

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan penguatan lembaga intermediasi keuangan utamanya perbankan. Lembaga ini penting untuk menghubungkan pihak yang kelebihan dana (kreditor dan investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitor dan pelaku usaha). Kelancaran aliran modal (likuiditas) sangat penting dalam perekonomian karena adanya efisiensi alokasi sumber daya dana yang berlebih kepada kelompok produktif serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Lembaga internediasi keuangan juga membantu mengurangi risiko bagi individu atau perusahaan dengan menyediakan instrumen keuangan seperti tabungan, deposito hingga asuransi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko kredit lebih baik dibandingkan individu. Lembaga intermediasi keuangan terutama yang berskala mikro dapat mewujudkan inklusi keuangan yaitu dengan membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan untuk mendapatkan layanan tersebut, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Kondisi likuiditas utamanya perbankan di Kabupaten Kebumen dapat tercermin diantaranya dari kondisi dana pihak ketiga (simpanan) dan kredit (pinjaman) di perbankan yang berada di Kabupaten Kebumen. Rasio total dana pihak ketiga pada seluruh bank umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB menunjukkan kecenderungan menurun dari 23,60% pada tahun 2020 menjadi 16,71% pada Tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin berkurangnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memberikan kredit dan menjalankan operasionalnya secara optimal. Hal yang sama juga terjadi pada rasio total dana pihak ketiga pada Bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB yang cenderung menurun dari 1,93% pada Tahun 2020 menjadi 1,59% pada Tahun 2023. Untuk itu perlu ditingkatkan literasi keuangan bagi masyarakat luas untuk dapat menyimpan kelebihan dana atau asetnya pada lembaga keuangan seperti perbankan.

Sementara itu, rasio total kredit pada Bank Umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB mengalami fluktuasi hingga hanya mencapai 15,01% pada Tahun 2024. Sedangkan rasio total kredit pada Bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB cenderung menurun dari 1,54% pada Tahun 2020 menjadi 1,43% pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya fungsi perbankan milik daerah sebagai

lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Akan tetapi terjadi peningkatan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit dari 45,41% pada Tahun 2020 menjadi 71,89% pada Tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan inklusi keuangan. Kinerja perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen didukung dengan jenis jumlah kantor bank yang mencapai 66 unit pada Tahun 2024 yang terdiri dari Bank BUMN, BUMD, Swasta Nasional (Konvensional dan Syariah) dan BPR (Konvensional dan Syariah).

Tabel 2.154.
Kondisi Likuiditas Perbankan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum dan BPR per PDRB	23,60%	20,53%	19,42%	17,44%	16,71%
2	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	1,93%	1,97%	1,75%	1,59%	DATA BELUM TERSEDIA
3	Total Kredit Pada Bank Umum dan BPR per PDRB	17,85%	18,66%	21,79%	17,95%	15,01%
4	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB	1,54%	1,53%	1,56%	1,43%	DATA BELUM TERSEDIA
5	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	45,41%	54,48%	56,27%	55,65%	71,89%
6	Jumlah kantor bank (unit)	101	110	72	66	66

Sumber : Setda dan BPS Kebumen (data diolah), 2024

e. Amenitas Hotel dan Restoran

Sebagai daerah yang potensial untuk pengembangan wisata serta penyelenggaraan even, Kabupaten Kebumen telah didukung amenities hotel dan restoran. Hingga Tahun 2024 jumlah restoran/rumah makan mencapai 339 unit sedangkan hotel dan akomodasi lainnya sebanyak 40 unit termasuk hotel berbintang 3 dan 4. Hal ini juga sangat mendukung pengembangan *Geopark* Kebumen yang mendapatkan status *Global Geopark* oleh UNESCO pada Tahun 2025. Dengan demikian peningkatan maupun potensi usaha hotel dan restoran perlu ditingkatkan dalam mendukung penyediaan amenities pariwisata maupun *Geopark*.

Tabel 2.155.
Amenitas Hotel dan Restoran
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah restoran/rumah makan	209	221	238	317	339
2	Jumlah hotel dan akomodasi lainnya	40	38	41	40	49

Sumber : BPS Kebumen, 2024

f. Fasilitas/Infrastruktur Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi

Penyediaan fasilitas air bersih, listrik dan telekomunikasi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sejak Tahun 2023 cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih telah mencapai 100%. Hal ini mendasari data rumah tangga yang telah memperoleh akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Sementara itu persentase rumah tangga yang menggunakan listrik juga telah mencapai 100% dimana semua bersumber dari PLN. Sedangkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan penggunaan HP/komputer telah mencapai 84,61% pada Tahun 2024. Untuk itu fasilitas ini harus terus dioptimalkan utamanya kemudahan bagi para pengguna baru khususnya sektor usaha.

Tabel 2.156.
Kondisi Fasilitas/Infrastruktur Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)	86,37	87,80	96,84	100,00	100,00
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	99,66	99,67	99,66	100,00	100,00
3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Penggunaan HP/Komputer	81,81	82,97	86,33	83,22	84,61

Sumber : DPUPR dan BPS Kebumen (data diolah), 2024

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi
a. Tingkat Kriminalitas dan Demonstrasi

Kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Kebumen relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai upaya penciptaan kantrantibmas diupayakan oleh segenap stakeholder terkait, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk tetap menjaga keamanan lingkungannya. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2024 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan kekerasan seksual dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.157.
Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Tindak Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Narkoba	28	36	32	37	29
2	Pembunuhan	1	0	3	0	2
3	Kekerasan Seksual	27	28	0	26	29
4	Penganiayaan	9	6	5	14	5
5	Pencurian	74	46	41	54	35
6	Penipuan	6	16	16	13	9
7	Pemalsuan Uang	0	0	1	0	1
	Jumlah Total	145	132	98	144	110

Sumber: Polres Kebumen, 2024

Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 masih tergolong cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan di Tahun 2024 dikarenakan tahun politik. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik. Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Kebumen relatif dapat berjalan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian dan tidak berdampak negatif terhadap iklim investasi yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.158.
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Bidang	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bidang Politik	4	4	5	2	8
2	Bidang Ekonomi	1	0	3	2	4
Jumlah		5	4	8	4	12

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Kebumen, 2024

b. Perizinan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perizinan menjadi hal yang sangat penting bagi peningkatan daya saing investasi karena berkaitan dengan legalitas, kelancaran operasional, serta kepastian hukum bagi investor. Dengan optimalnya kinerja perijinan, maka akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Menurut Peraturan Bupati tersebut layanan perizinan yang diberikan mencapai 70 jenis.

Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan tersebut, upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran izin di Kabupaten Kebumen dilakukan dalam kurun waktu 7 hari. Saat ini untuk melakukan perizinan sudah dilakukan dalam satu pintu di Mal Pelayanan Publik. Berbagai ijin sudah terintegrasi di sana termasuk perizinan untuk investasi. Melalui Sistem OSS (One Single Submission), izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari satu jam. Keuntungan adanya OSS antara lain:

- 1) Integrasi Sistem Pelayanan Perizinan. OSS merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan perizinan terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini menggunakan SPIPISE dengan PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Di dalam OSS juga terintegrasi berbagai sistem dari lembaga-lembaga perizinan lainnya seperti Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Indonesia National Single Window (INSW), serta Sistem Informasi Administrasi Kemendagri demi memudahkan perizinan
- 2) Mudah dan Cepat saat Mengurus Perizinan, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor-kantor yang bersangkutan.

- 3) Pengawasan Sistem Semakin Ketat, pemerintah pusat telah menetapkan aturan yang tegas berupa sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkannya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal dinyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Pemberian Insentif dapat berbentuk : a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah. b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. Pemberian Kemudahan dapat berbentuk : a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan Investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Tabel 2.159.
Return On Asset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,37%	3,58%	2,73%	4,01%	DATA BELUM TERSEDIA

Sumber : Setda dan BPS Kebumen (data diolah), 2024

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kebumen juga ikut serta secara aktif dalam sektor riil perekonomian daerah tertentu/prioritas dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai sebuah lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan efek multiplier yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. BUMD juga diharapkan dapat berperan lebih strategis pada era otonomi, baik dalam upayanya mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah hingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab pada prinsipnya, muara dari otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian dalam sektor pendanaan pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Secara umum, tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan, dalam bentuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan bagi pemerintah daerah.

Untuk itu optimalisasi kinerja BUMD perlu terus ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas perusahaan (BUMD) melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Hal ini tercermin dari *Return On Asset* (ROA) BUMD yang menunjukkan kinerja yang positif dari 3,37% pada Tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 4,01% pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan kemampuan BUMD untuk menghasilkan laba bersih (*profitable*) semakin meningkat

c. Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Dukungan pemerintah sangat penting daya menjaga iklim usaha dan daya saing investasi di Kabupaten Kebumen. Kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Walaupun bersifat pungutan, namun jika dikelola dengan baik maka kebijakan pajak dan retribusi daerah dapat mendukung iklim usaha dan daya saing investasi. Pajak dan retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik seperti jalan, listrik, air bersih serta fasilitas umum lainnya termasuk peningkatan keamanan dan stabilitas sosial. Kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia lokal sehingga tercipta tenaga kerja lokal yang berkualitas yang dibutuhkan bagi dunia usaha. Selain itu juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan *start up* serta adanya kebijakan insentif pajak bagi mereka juga dapat meningkatkan daya saing usaha bisnisnya.

Mendasari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Kebumen terdiri dari:

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);
 - b) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 - c) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT (Pajak Air Tanah);
 - f) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
 - i) Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
- 2) Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a) Pelayanan kesehatan;
 - b) Pelayanan kebersihan;
 - c) Pelayanan parkir di tepi Jalan umum;
 - d) Pelayanan Pasar
 - e) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - f) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - g) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - h) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - i) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - j) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - k) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - l) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung); dan
 - n) Penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing).

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan, pemberian fasilitas pajak dan retribusi serta insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi.

Selain kebijakan fiskal terkait pajak dan retribusi daerah, beberapa Peraturan Daerah (Perda) juga telah ditetapkan untuk mendukung iklim usaha dan daya saing daerah di wilayah Kabupaten Kebumen, yaitu:

- 1) Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan pelaku usaha dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha sesuai kewenangan daerah;
- 2) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa; bahwa dalam rangka pembinaan pemerintah desa di bidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya;
- 3) Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; bahwa tempat pelelangan ikan merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan dan pembudidayaan ikan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen, perlu mengoptimalkan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- 4) Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi, perlu diwujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha di bidang perdagangan agar dapat tumbuh berkembang;
- 5) Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata; bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha;
- 6) Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; bahwa pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah serta Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah;
- 7) Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana di daerah, sehingga perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta lingkungan yang baik dan sehat;
- 8) Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; bahwa Pasar Rakyat merupakan sarana perdagangan bagi masyarakat yang

- memiliki potensi ekonomi kerakyatan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan diberdayakan; serta
- 9) Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa serta bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi.

d. Pengembangan Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang telah mencapai tingkat perkembangan yang tinggi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial dan infrastruktur. Semakin banyak desa swasembada dalam suatu daerah maka semakin tinggi daya saing daerah, karena desa swasembada mencerminkan wilayah yang memiliki kemampuan ketahanan pangan yang baik, ekonomi yang lebih mandiri, infrastruktur memadai, kemandirian sosial serta pemerintahan desa yang efektif. Kinerja desa swasembada di Kabupaten Kebumen masih terbatas dimana sempat mencapai jumlah tertinggi sebesar 72 desa atau 16,04% pada Tahun 2022, namun kembali turun menjadi 23 atau 5,12% pada Tahun 2024 yang sama dengan Tahun 2020.

Tabel 2.160.
Desa Swasembada di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah desa berstatus swasembada (desa)	23	31	72	41	23
Persentase desa berstatus swasembada (%)	5,12	6,90	16,04	9,13	5,12

Sumber : Setda dan BPS Kebumen (data diolah), 2024

2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung daya saing daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan sumberdaya manusia merupakan sektor strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Analisis fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang S1/S2/S3 serta rasio ketergantungan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja diukur dengan rasio penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang S1/S2/S3. Dalam hal ini jika semakin banyak penduduk yang telah menamatkan pendidikannya hingga S1 ke atas dianggap kualitas SDM penduduk juga semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang yang terlihat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan akan lebih produktif dalam bekerja yang dapat mencerminkan sebagai tenaga kerja yang berkualitas. Berdasarkan data Agregat Kependudukan Kabupaten Kebumen menunjukkan jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan S1, S2 maupun S3 terus mengalami peningkatan. Secara total jumlah lulusan S1/S2/S3 meningkat dari 35.944 orang pada Tahun 2020 menjadi 45.894 orang pada Tahun 2024. Hal ini juga menyebabkan rasio penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang S1/S2/S3 juga

meningkat dari 2,58% pada Tahun 2020 menjadi 3,17% pada Tahun 2024. Namun demikian dengan rasio penduduk yang menamatkan pendidikannya hingga S1 ke atas hanya sekitar 3% menunjukkan kualitas SDM Kabupaten Kebumen masih relatif rendah.

Tabel 2.161.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah lulusan S1 (orang)	34.644	36.602	39.825	41.813	44.016
2.	Jumlah lulusan S2 (orang)	1.253	1.344	1.542	1688	1.815
3.	Jumlah lulusan S3 (orang)	47	57	56	56	63
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3 (orang)	35.944	38.003	41.423	43.557	45,894
5.	Jumlah Penduduk (orang)	1.394.038	1.405.644	1.421.143	1.434.023	1.446.833
6.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	2,58%	2,70%	2.91%	3,04%	3,17%

Sumber: Disdukcapil, 2024

b. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Angka ketergantungan Kabupaten Kebumen cukup flukutatif, namun demikian ada kecenderungan meningkat dari 45,41% pada Tahun 2020 menjadi 45,94% pada Tahun 2024. Jika dilihat dari usia menunjukkan penduduk usia di atas 64 tahun terus bertambah, salah satunya dikarenakan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kebumen. Sementara usia di bawah 15 tahun cenderung mengalami penurunan

Semakin meningkatnya angka ketergantungan mengandung arti semakin meningkat pula beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dalam menanggung kelompok usia non produktif. Persentase ketergantungan Kabupaten Kebumen tahun 2023 mencapai angka 46,06% yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk usia non produktif. Untuk itu peluang masih melimpahnya usia produktif saat ini harus dilakukan dengan meningkatkan produktivitas mereka salah satunya dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk usia di bawah 15 tahun harus dioptimalkan kualitas pendidikannya agar nantinya siap bekerja dengan produktivitas yang tinggi Ketika telah memasuki usia kerja sehingga tenaga kerja Kabupaten Kebumen akan lebih berdaya saing.

Tabel 2.162.
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia <15 thn (orang)	317.928	317.595	297.631	306.173	304.696
Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun (orang)	119.254	132.653	145.909	144.267	150.738
Jumlah Penduduk usia tidak produktif (Usia <15 thn ditambah Usia > 64 tahun dalam orang)	437.182	450.248	443.540	450.440	455.434
Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64 (orang)	962.794	966.721	977.603	976.392	991.399
Rasio Ketergantungan (%)	45,41	46,57	45,37	46,1	45,94

Sumber: Disdukcapil, 2024

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2024

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih mendasari target RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan sampai dengan tahun n-2 yaitu Tahun 2024 dengan target RKPD Tahun 2024 dan target sampai dengan akhir tahun/periode RPJMD yaitu Tahun 2026. Capaian IKU terdiri dari IKU Tujuan Daerah, IKU Sasaran Daerah, IKU Daerah dan IKU Urusan (sebagai IKU Sasaran Perangkat Daerah) sedangkan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan terdiri dari IKU Urusan dan IKU Program seperti yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Status predikat kinerja menggunakan skala nilai peringkat kinerja Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.163.
Status Predikat Kinerja

Status Predikat Kinerja	Interval Nilai Capaian Kinerja
ST = Sangat Tinggi	91% ≤100%
T = Tinggi	76% ≤90%
S = Sedang	66% ≤75%
R = Rendah	51% ≤65%
SR = Sangat Rendah	≤50%

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. IKU Tujuan Daerah

Terdapat 7 IKU Tujuan Daerah sesuai yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dimana seluruhnya juga menjadi IKU Daerah. Hasil evaluasi kinerja IKU Tujuan Daerah sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.164.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Daerah

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	79,91	65,33	85,74	100%	ST	69,33	100%	ST
2	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	71,88	71,50	72,48	100%	ST	72,50	99,97%	ST
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,00-5,50	5,30	100%	ST	5,00-5,50	100%	ST
4	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	20,38	21,00-21,50	20,76	98,86%	ST	22,00	94,36%	ST
5	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	64,95	66,46	69,01	100%	ST	71,82	96,09%	ST
6	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	82,16	78,00-78,50	82,38	100%	ST	80,00-80,50	100%	ST
7	Indeks Kondusivitas Wilayah	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian RKPD 2024						99,84%	ST	Rata-rata Capaian RPJMD s.d. 2024	98,63%	ST

Sumber: BPS dan Pemerintah Kabupaten Kebumen (berbagai sumber), 2024
Keterangan: *) Angka menggunakan realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan 6 IKU Tujuan telah mencapai tingkat capaian 100% dan hanya 1 IKU yang belum mencapai 100% yaitu Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dengan tingkat capaian sebesar 98,86% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Berdasarkan data distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia yang merupakan hasil Susenas BPS menunjukkan ketimpangan di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif membaik dari 20,02% pada Tahun 2020 menjadi 20,76% pada Tahun 2024. Kecenderungan fluktuatif ini sangat dipengaruhi oleh indikator makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat harga maupun TPT. Hal ini dikarenakan masyarakat terbawah cenderung mendapatkan penghasilannya tidak tetap atau bersifat harian dan akan dihabiskan untuk membiayai pengeluaran pada saat itu juga sehingga akan sangat dipengaruhi utamanya oleh perubahan tingkat harga yang berfluktuatif setiap hari. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mengendalikan harga utamanya harga pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dengan Gerakan Pangan Murah. Selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat utamanya melalui UMKM juga terus ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan. Secara agregat rata-rata capaian RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 99,84 atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Sementara itu, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan 4 IKU Tujuan telah mencapai tingkat capaian 100% hingga Tahun 2024, sedangkan 3 IKU yang belum mencapai 100% yaitu:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat capaian sebesar 99,97% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Kinerja IPM Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana sejak tahun 2020 telah mencapai lebih dari 70, yaitu sebesar 70,32, menjadi 72,48 pada Tahun 2024. Berdasarkan skala internasional (UNDP), sejak Tahun 2020 kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi karena nilai $IPM \geq 80$). Realisasi kinerja IPM setiap tahun juga telah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia baik pada segi pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b) Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dengan tingkat capaian sebesar 94,36% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- c) Indeks infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan tingkat capaian sebesar 96,09% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Indeks ini merupakan gabungan dari indeks infrastruktur pekerjaan umum, indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, serta indeks kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan perlu upaya pencapaian target untuk indeks infrastruktur pekerjaan umum dan indeks kualitas lingkungan hidup hingga akhir periode RPJMD. Permasalahan pada infrastruktur pekerjaan umum diantaranya terjadinya penurunan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati *over dimension* dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas. Upaya terus dilakukan diantaranya dengan penguatan unit reaksi cepat pemeliharaan jalan dan jembatan. Sementara itu, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian karena kondisi baik baru mencapai 59,21% pada Tahun 2024. Peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi terus dilakukan

selain itu juga dilakukan pengoptimalan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selain itu, cakupan rumah tangga mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baik di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami penurunan dari 20,94% pada Tahun 2020 menjadi 19,62% pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena pengembangan air minum perpipaan baik di pedesaan maupun perkotaan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang terjadi. Namun demikian peningkatan sambungan rumah tetap diprioritaskan dalam peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan. Sedangkan permasalahan pada pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup diantaranya Indeks Kualitas Air (IKA) masih cukup rendah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. Dalam mengatasi hal ini, optimalisasi pengolahan persampahan dan limbah terus ditingkatkan termasuk dengan peningkatan kesadaran masyarakat secara luas. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami. Upaya dilakukan dengan penataan ruang terbuka hijau hingga optimalisasi pengadaan tanaman konservasi.

Secara agregat rata-rata capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 98,63 atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

2. IKU Sasaran Daerah

Terdapat 21 IKU Sasaran Daerah sesuai yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dimana salah satu IKU yaitu Tingkat Kemiskinan juga menjadi IKU Daerah. Hasil evaluasi kinerja IKU Sasaran Daerah sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.165.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Daerah

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	90,16	85,00	90,99	100%	ST	86,00	100%	ST
2	Nilai SAKIP	nilai	66,11	71,00	67,54	95,13%	ST	77,00	87,71%	T
3	Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP*	100%	ST	WTP	100%	ST
4	Indeks SPBE	indeks	3,70	3,50	4,07	100%	ST	3,60	100%	ST
5	Angka Harapan Hidup	tahun	74,98	73,80	75,22	100%	ST	74,00	100%	ST
6	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86	7,94	7,87	99,12%	ST	8,14	96,68%	ST
7	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,37	13,74	13,39	97,45%	ST	13,94	96,05%	ST
8	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,37	93,45	93,39	99,94%	ST	93,65	99,72%	ST
9	Cakupan Perlindungan anak	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
10	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.129,97	5.969,07	5.276,70	88,40%	T	6.643,72	79,42%	T
11	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	6.427,04	4.830,22	6.856,48	100%	ST	5.376,15	100%	ST

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
12	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.081,89	12.994,28	11.704,65	90,08%	T	14.462,95	80,93%	T
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.244,70	4.657,54	4.381,31	94,07%	ST	5.183,96	84,52%	T
14	Tingkat Kemiskinan	%	16,34	14,00-15,00	15,71	95,54%	ST	13,00-13,50	85,99%	T
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,11	5,30-5,40	5,07	100%	ST	5,10-5,20	100%	ST
16	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	64	63,10	68,65	100%	ST	70,69	97,11%	ST
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,16	74,28	69,86	94,05%	ST	74,45	93,83%	ST
18	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	71,43	100	100%	ST	78,57	100%	ST
19	Persentase Budaya yang Dilestarikan	%	88,075	34,05	58,71	100%	ST	43,04	100%	ST
20	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
21	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian RKPD 2024						97,80%	ST	Rata-rata Capaian RPJMD s.d 2024	95,33%	ST

Sumber: BPS dan Pemerintah Kabupaten Kebumen (berbagai sumber), 2024
Keterangan: *) Angka menggunakan realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan 19 IKU Sasaran telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dimana 12 IKU telah mencapai tingkat capaian 100%. Terdapat 7 IKU Sasaran status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) tapi belum mencapai 100% serta 2 IKU Sasaran baru mencapai status predikat Tinggi (T) yaitu:

- a) Nilai SAKIP dengan tingkat capaian sebesar 95,13% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 sebesar 67,54 atau berpredikat B (Baik) yang menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 (sepertiga) unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Selain itu, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 per unit kerja. Untuk itu upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP lebih dari 70 atau berpredikat BB (Sangat Baik) terus diupayakan dengan meningkatkan jumlah unit kerja bernilai AKIP sangat baik dari 1/3 (sepertiga) unit kerja menjadi 2/3 (dua pertiga) unit kerja, baik unit kerja utama maupun pendukung. Selain itu juga dilakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, optimalisasi sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

- b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan tingkat capaian sebesar 99,12% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Kinerja RLS Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 7,54 pada Tahun 2020 menjadi 7,87 pada Tahun 2024. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,87 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Faktor penghambat kinerja RLS di Kabupaten Kebumen selain kondisi sosial dan ekonomi beberapa kelompok masyarakat, adalah masih rendahnya RLS pada penduduk usia tua ataupun lanjut usia dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program Kejar Paket A, B maupun C. Selain itu peningkatan kemudahan akses pelayanan pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) juga terus ditingkatkan.

- c) Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan tingkat capaian sebesar 97,45% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Sesuai data BPS, kinerja HLS Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 13,34 tahun pada Tahun 2020 menjadi 13,39 tahun pada Tahun 2024. Hal ini dapat diartikan anak berusia 7 tahun atau lebih saat ini berpeluang dapat mengenyam pendidikan hingga lebih dari 1 tahun kuliah (atau dapat mengenyam pendidikan hingga lebih dari diploma 1). Walaupun demikian kinerja HLS ini masih sedikit dibawah target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Cukup tingginya HLS di Kabupaten Kebumen dikarenakan wilayahnya yang dekat dengan kota-kota yang memiliki perguruan tinggi bereputasi baik seperti Yogyakarta, Surakarta dan Purwokerto. Secara umum banyak warga Kabupaten Kebumen yang melanjutkan kuliah di kota-kota tersebut. Selain itu, semakin berkembang kehadiran perguruan tinggi di Kabupaten Kebumen termasuk Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang memiliki kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Selain itu mulai Tahun 2024, UNS juga membuka program studi reguler diluar PGSD. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah mengalokasikan beasiswa bagi warga untuk dapat berkuliah di antaranya di Universitas Terbuka, Universitas Pertamina dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Hal ini dilakukan selain dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya secara akademik, juga dapat memberikan pengalaman

kehidupan kampus yang mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kebumen di tengah ketatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan maupun berusaha.

- d) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan tingkat capaian sebesar 99,94% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

IPG Kabupaten Kebumen juga cenderung membaik dari 93,05 pada Tahun 2020 menjadi 93,39 pada Tahun 2024 yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia (SDM) semakin setara antara perempuan dan laki-laki serta permasalahan gender semakin mampu ditangani. Namun demikian capaiannya masih di bawah target RPJMD sehingga beberapa upaya terus dilakukan baik pada segi pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- e) PDRB ADHK Sektor Primer dengan tingkat capaian sebesar 88,40% atau baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

PDRB ADHK Sektor Primer Kabupaten Kebumen hanya tumbuh sebesar 2,86% pada Tahun 2024. PDRB ADHK Sektor Primer didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh sebesar 2,59% pada Tahun 2024, jauh jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara agregat pada Tahun 2024 yaitu sebesar 5,30%. Bahkan berdasarkan data distribusi PDRB menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi pada PDRB dari sebelumnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan digantikan oleh sektor industri pengolahan sejak Tahun 2022. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun kontribusinya terhadap PDRB dari 21,79% pada Tahun 2020 menurun menjadi 19,86% pada Tahun 2024 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2020-2024 sebesar 20,79%. Sebaliknya sektor industri pengolahan semakin meningkat kontribusinya terhadap PDRB ADHK dari 21,26% pada Tahun 2020 menjadi 22,69% pada Tahun 2024 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2020-2024 sebesar 21,85%. Namun demikian beberapa upaya tetap dilakukan diantaranya dengan mengoptimalkan produktivitas komoditas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang bernilai tinggi.

- f) PDRB ADHK Sektor Tersier dengan tingkat capaian sebesar 90,08% atau baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

Hingga tahun 2024, PDRB ADHK Sektor Tersier baru mencapai Rp.11.704.654,68 Milyar masih dibawah target Tahun 2025 sebesar Rp.13.708.960,00 Milyar. Untuk itu upaya peningkatan sektor tersier terus dilakukan dengan optimalisasi aktivitas ekonomi pada sektor ritel, *hospitality* dan tempat makan, jasa keuangan, *real estate*, hingga jasa pendidikan (termasuk perguruan tinggi) dan jasa kesehatan.

- g) Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK (PMTB ADHK) dengan tingkat capaian sebesar 94,07% atau baru mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Berdasarkan data PDRB dari sisi Pengeluaran menunjukkan proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap total PDRB cenderung menurun dari 19,79% pada Tahun 2020 menjadi 18,50% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PMTB sebagai proksi investasi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB secara agregat. Untuk itu, upaya peningkatan investasi juga dilakukan dengan kemudahan perizinan dimana jumlah perizinan yang dikeluarkan semakin meningkat dari 2.380 izin yang terbit pada Tahun 2020 menjadi 25.132 izin yang terbit pada Tahun 2024.

- h) Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian sebesar 95,54% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan hasil yang membaik. Tingkat kemiskinan sempat kembali meningkat dari 17,59% pada Tahun 2020 menjadi 17,83% pada Tahun 2021 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19. Namun demikian dengan semakin

membaiknya perekonomian daerah mampu memperbaiki kinerja tingkat kemiskinan yang terus menurun menjadi 15,71% pada Tahun 2024. Secara umum kinerja penurunan tingkat kemiskinan setiap tahun telah hampir mencapai 100% jika dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin. Walaupun sempat meningkat dikarenakan Pandemi Covid-19 dari 211.090 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 212.900 pada Tahun 2021, pasca pandemi jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 187.950 jiwa pada Tahun 2024. Kenaikan garis kemiskinan menjadi isu penting dalam penanggulangan kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus merangkak naik dari Rp.380.557,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.471.824,00 pada Tahun 2024. Walaupun kenaikan garis kemiskinan dapat berarti terjadinya peningkatan standar hidup, namun disisi lain kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan garis kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan inflasi tahun sebelumnya cukup mempengaruhi kenaikan garis kemiskinan berikutnya. Untuk itu kenaikan garis kemiskinan seharusnya diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

- i) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tingkat capaian sebesar 94,05% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang. IKA masih cukup rendah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami.

Secara agregat rata-rata capaian RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 97,80% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan 16 IKU Sasaran telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dimana 11 IKU telah mencapai tingkat capaian 100%. Terdapat 5 IKU Sasaran status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) tapi belum mencapai 100% serta 5 IKU Sasaran baru mencapai status predikat Tinggi (T) yaitu:

- a) Nilai SAKIP dengan tingkat capaian sebesar 87,71% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan tingkat capaian sebesar 96,68% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- c) Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan tingkat capaian sebesar 96,05% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- d) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan tingkat capaian sebesar 99,72% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

- e) PDRB ADHK Sektor Primer dengan tingkat capaian sebesar 79,42% atau baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- f) PDRB ADHK Sektor Tersier dengan tingkat capaian sebesar 80,93% atau baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- g) Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK (PMTB ADHK) dengan tingkat capaian sebesar 84,52% atau baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- h) Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian sebesar 85,59% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- i) Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dengan tingkat capaian sebesar 97,11% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
 Indeks ini merupakan gabungan dari indeks infrastruktur pekerjaan umum dan indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan perlu upaya pencapaian target untuk indeks infrastruktur pekerjaan umum dimana terdapat permasalahan diantaranya terjadinya penurunan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati *over dimension* dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas. Upaya terus dilakukan diantaranya dengan penguatan unit reaksi cepat pemeliharaan jalan dan jembatan. Sementara itu, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian karena kondisi baik baru mencapai 59,21% pada Tahun 2024. Peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi terus dilakukan selain itu juga dilakukan pengoptimalan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selain itu, cakupan rumah tangga mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baik di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami penurunan dari 20,94% pada Tahun 2020 menjadi 19,62% pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena pengembangan air minum perpipaan baik di pedesaan maupun perkotaan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang terjadi. Namun demikian peningkatan sambungan rumah tetap diprioritaskan dalam peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan.
- j) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tingkat capaian sebesar 93,83% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Secara agregat rata-rata capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 95,33 atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

3. IKU Daerah

Terdapat 8 IKU Daerah sesuai yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terdiri dari 7 IKU Tujuan Daerah dan 1 IKU Sasaran Daerah yaitu Tingkat Kemiskinan. Hasil evaluasi kinerja IKU Daerah sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut::

Tabel 2.166.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	79,91	65,33	85,74	100%	ST	69,33	100%	ST
2	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	71,88	71,50	72,48	100%	ST	72,50	99,97%	ST
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,00-5,50	5,30	100%	ST	5,00-5,50	100%	ST
4	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	20,38	21,00-21,50	20,76	98,86%	ST	22,00	94,36%	ST
5	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	64,95	66,46	69,01	100%	ST	71,82	96,09%	ST
6	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	82,16	78,00-78,50	82,38	100%	ST	80,00-80,50	100%	ST
7	Indeks Kondusivitas Wilayah	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
8	Tingkat Kemiskinan	%	16,34	14,00-15,00	15,71	95,54%	ST	13,00-13,50	85,99%	T
Rata-rata Capaian RKPD 2024						99,30%	ST	Rata-rata Capaian RPJMD s.d. 2024	97,05%	ST

Sumber: BPS dan Pemerintah Kabupaten Kebumen (berbagai sumber), 2024

Keterangan: *) Angka menggunakan realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan 6 IKU Tujuan telah mencapai tingkat capaian 100% dan hanya 2 IKU yang belum mencapai 100% yaitu:

- a) Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dengan tingkat capaian sebesar 98,86% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- b) Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian sebesar 95,54% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Secara agregat rata-rata capaian RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 99,30% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Sementara itu, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan 4 IKU Tujuan telah mencapai tingkat capaian 100% hingga Tahun 2024, sedangkan 4 IKU yang belum mencapai 100% yaitu:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat capaian sebesar 99,97% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- b) Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) dengan tingkat capaian sebesar 94,36% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- c) Indeks infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan tingkat capaian sebesar 96,09% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- d) Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian sebesar 85,99% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

Secara agregat rata-rata capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 97,05% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST)..

4. IKU Urusan (sebagai IKU Sasaran Perangkat Daerah)

Terdapat 47 IKU Urusan seperti yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi IKU Sasaran Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampu. Hasil evaluasi kinerja IKU Urusan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.167.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan

No	Urusan	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
1	Pendidikan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
2	Kesehatan	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	58,94	61,48	59,00	95,97%	ST	65,89	89,54%	T
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	39,53	48,72	71,16	100%	ST	65,73	100%	ST
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
6	Sosial	Persentase Capaian SPM Sosial	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
7	Tenaga Kerja	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	%	30,66	25,32	37,56	100%	ST	28,75	100%	ST
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
9	Pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	6,52	4	4,52	100%	ST	6	75,33%	T

No	Urusan	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
10	Pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,16	74,28	69,86	94,05%	ST	74,45	93,83%	ST
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,77	95,15	99,57	100%	ST	95,45	100%	ST
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	71,49	34,08	88,64	100%	ST	42,09	100%	ST
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	69,95	64,50	67,11	100%	ST	65,00	100%	ST
15	Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	75,30	79,11	75,78	95,79%	ST	80,44	94,21%	ST
16	Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	%	3,70	3,50	4,07	100%	ST	3,60	100%	ST
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Sehat	%	83,33	46,67	63,33	100%	ST	63,33	100%	ST
		Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	%	12,42	11,76	13,22	100%	ST	13,22	100%	ST
18	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	16,35	4,21	15,05	100%	ST	6,27	100%	ST
19	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	34,42	3,92	34,96	100%	ST	4,60	100%	ST
		Persentase Prestasi Olahraga	%	54,10	63,33	146,67	100%	ST	70,00	100%	T

No	Urusan	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
20	Statistik	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
21	Persandian	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	%	70,65	83,48	94,35	100%	ST	100	94,35%	ST
22	Kebudayaan	Persentase Budaya yang Dilestarikan	%	88,08	34,05	22,23	65,29%	R	43,05	51,64%	R
23	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	19,68	12,97	16,91	100%	ST	13,06	100%	ST
24	Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	73,92	76,27	84,31	100%	ST	80,20	100%	ST
25	Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan	%	8,97	6,00	21,19	100%	ST	9,00	100%	ST
26	Pariwisata	Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	2,03	1,31	2,24	100%	ST	1,91	100%	ST
27	Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	15,98	4,00	14,33	100%	ST	6,00	100%	ST
28	Energi dan sumber daya mineral	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
29	Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	6,84	4,89	4,65	95,09%	ST	4,45	100%	ST
30	Perindustrian	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	6,31	5,47	6,00	100%	ST	4,93	100%	ST

No	Urusan	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
31	Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%	15,00	20,00	10,00	50%	SR	100,00	36%	SR
32	Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	90,16	85,00	90,99	100%	ST	86,00	100%	ST
		Tingkat Kemiskinan	%	16,34	14,00-15,00	15,71	95,54%	ST	13,00-13,50	85,99%	T
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,00-5,50	5,30	100%	ST	5,00-5,50	100%	ST
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP*	100%	ST	WTP	100%	ST
33	Sekretariat DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
34	Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
35	Keuangan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,98	15,40	15,44**	100%	ST	15,63	98,78%	ST
36	Kepegawaian	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	99,00	92,00	99,96	100%	ST	93,99	100%	ST
37	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	59	73,18	61,89	84,57%	T	77,21	80,16%	T
38	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	75	83,33	85,71	100%	ST	91,67	93,50%	ST
39	Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	nilai	3,19	3,30	3,302**	100%	ST	3,50	94,34%	ST

No	Urusan	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
40	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	%	89,85	87,00	90,67	100%	ST	89,00	100%	ST
41	Kesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	71,43	100	100%	ST	78,57	100%	ST
Rata-rata Capaian RKPD 2024							97,37%	ST	Rata-rata Capaian RPJMD s.d. 2024	95,48%	ST

Sumber: BPS dan Pemerintah Kabupaten Kebumen (berbagai sumber), 2024
Keterangan: *) Angka menggunakan realisasi Tahun **) Angka sementara

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan terdapat 44 IKU Sasaran Perangkat Daerah telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dimana 39 telah mencapai tingkat capaian 100%. Sementara itu, 5 IKU walau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) tapi belum mencapai 100%, 1 IKU baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T), 1 IKU baru mencapai status predikat kinerja Rendah (R) serta 1 IKU masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR), yaitu:

- a) Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan tingkat capaian sebesar 95,97% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Berdasarkan capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan perlu upaya pencapaian target untuk indeks infrastruktur pekerjaan umum dimana terdapat permasalahan diantaranya terjadinya penurunan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati *over dimension* dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas. Upaya terus dilakukan diantaranya dengan penguatan unit reaksi cepat pemeliharaan jalan dan jembatan. Sementara itu, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian karena kondisi baik baru mencapai 59,21% pada Tahun 2024. Peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi terus dilakukan selain itu juga dilakukan pengoptimalan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selain itu, cakupan rumah tangga mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baik di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami penurunan dari 20,94% pada Tahun 2020 menjadi 19,62% pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena pengembangan air minum perpipaan baik di pedesaan maupun perkotaan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang terjadi. Namun demikian peningkatan sambungan rumah tetap diprioritaskan dalam peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan.
- b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tingkat capaian sebesar 94,05% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST)
- c) Indeks Infrastruktur Perhubungan dengan tingkat capaian sebesar 95,79% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Beberapa permasalahan perhubungan diantaranya persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen terus meningkat dari 33,62% pada Tahun 2020 menjadi 50,004% pada Tahun 2024. Namun demikian angka kecelakaan di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 618 kejadian pada Tahun 2020 menjadi 1.178 kejadian pada Tahun 2024 karena angka kecelakaan ini terjadi tidak hanya di ruas jalan kabupaten, tapi juga ruas jalan nasional, provinsi hingga desa. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya masih rendah dalam berlalu lintas dengan baik dan mentaati aturan serta pada umumnya jalan nasional, provinsi, jalan kabupaten dan desa yang rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang berlubang, bergelombang dan minim rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan utamanya ketika malam hari. Sementara itu pada prasarana terminal menunjukkan kunjungan Bus per hari di terminal tipe C Kebumen paling banyak di terminal Gombang 36 bus per hari diikuti terminal Kebumen 23 bus per hari. Sedang terminal karanggayam kunjungan bus per hari sejumlah 6 bis. Sedikitnya kunjungan bus dipengaruhi oleh berkurangnya armada dan trayek bus yang ada. Selain itu bila dilihat dari penumpang yang menggunakan angkutan umum di terminal juga cenderung menurun sejak Tahun 2022 yaitu sebanyak 271 penumpang menjadi hanya 195 penumpang di Tahun 2024. Penurunan ini diakibatkan persaingan antar armada khususnya beroperasinya perusahaan bus yang memiliki terminal sendiri serta persaingan dengan moda kereta api. Sedangkan terkait jumlah angkutan umum di Kabupaten Kebumen juga terus

mengalami penurunan dari 1.706 pada tahun 2020 menjadi hanya 594 unit di tahun 2024. Bersamaan dengan itu, jumlah izin trayek juga mengalami penurunan dari 82 trayek di 2019 menjadi 35 trayek di tahun 2024. Penurunan angkutan penumpang dan kepemilikan izin trayek disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi baik sepeda motor atau mobil serta persaingan dengan layanan transportasi berbasis daring. Selain itu, terdapat penyesuaian kepemilikan yang semula milik perorangan menjadi badan hukum dan pembatasan usia kendaraan angkutan umum serta pembaruan sistem pelayanan perizinan menjadi faktor penurunan jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek di Kabupaten Kebumen. Untuk mengatasi keterbatasan layanan angkutan yang ada di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menyediakan moda transportasi trans Kebumen namun hanya melayani rute Kebumen- Prembun sebanyak 2 unit. Diharapkan dengan pengadaan tersebut akan membantu pelayanan masyarakat di bidang transportasi yang nyaman, murah dan representatif guna mendukung angkutan yang terintegrasi. Untuk itu perlu disusun perencanaan jangka panjang untuk mewujudkan sarana transportasi kebumen yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan dalam bentuk dokumen rencana induk transportasi Kebumen. Sementara itu, adanya layanan angkutan umum berbasis daring yang lebih tersedia dan tepat waktu dalam perkembangannya ke depan perlu diintegrasikan dengan angkutan umum bertrayek, yaitu angkutan umum berbasis daring untuk difokuskan pada wilayah-wilayah yang belum terdapat trayek. Layanan angkutan umum berbasis daring juga perlu dioptimalkan karena dapat membuka lapangan kerja bagi pengemudi maupun pelaku UMKM dengan adanya layanan antar jemput. Kehadiran layanan angkutan umum berbasis daring juga dapat mengisi *gap* konektivitas layanan angkutan umum bertrayek di Kabupaten Kebumen ini.

- d) Persentase budaya yang dilestarikan dengan tingkat capaian sebesar 65,29% atau masih mencapai status predikat kinerja Rendah (R).

Permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya sarpras pengembangan kesenian di Kabupaten Kebumen (seragam Kesenian, peralatan kesenian, jenis Kesenian), belum adanya inovasi dan kolaborasi kesenian tradisional dengan kesenian modern, belum optimalnya informasi tentang situs budaya atau sejarah dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kebumen yang dikelola oleh pemerintah, kurang minatnya pelaku kesenian untuk mengembangkan potensi kesenian budaya lokal, belum terjadi sinergitas dalam pembangunan modern sehingga mengabaikan kepentingan cagar budaya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya serta keterbatasan tenaga ahli dalam bidang cagar budaya. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan optimalisasi keterlibatan komunitas organisasi kesenian daerah, evaluasi secara berkala untuk meningkatkan selera publik terhadap kecintaan kesenian daerah serta sosialisasi tentang penetapan cagar budaya untuk memahami lebih dalam nilai dan konteks historisnya.

- e) Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan dengan tingkat capaian sebesar 95,09% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Permasalahan yang dihadapi masih belum optimalnya cakupan pasar tradisional dalam kondisi baik walaupun terus meningkat dari 83% pada Tahun 2020 menjadi 85% pada Tahun 2024. Selain kondisi pasar tradisional terus ditingkatkan kualitasnya, pengoptimalan aktivitas ekonomi di pasar tradisional juga perlu ditingkatkan

- f) Persentase transmigrasi yang ditempatkan dengan tingkat capaian sebesar 50% atau masih mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan transmigrasi yaitu karena terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk calon

transmigrasi Kabupaten, belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi serta terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran. Upaya yang dilakukan adalah optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga Pemerintah Daerah tujuan transmigrasi. Selain itu juga dioptimalkan transmigrasi swakarsa yang melakukan pembiayaan sendiri, namun tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah.

- g) Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian sebesar 95,54% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- h) Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dengan tingkat capaian sebesar 84,57% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

Dalam upaya peningkatan kapasitas ASN dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan teknis, fungsional maupun diklat jenjang kepemimpinan guna meningkatkan profesionalitas ASN terus ditingkatkan. Namun demikian keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama sehingga hanya jenis diklat tertentu yang diprioritas seperti diklat kepemimpinan dalam rangka mengisi jabatan struktural tertentu, prajabatan untuk CPNS (jika terdapat formasi CPNS di tahun tersebut) serta orientasi P3K. Sementara itu untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan pembelajaran *online* melalui aplikasi SINAU KEBUMEN. Hal ini dalam rangka mendukung Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 yang diantaranya menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) dalam 1 tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah bekerja sama dengan berbagai instansi dalam penyusunan konten pembelajarannya, diantaranya adalah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional Kawasan Geodiversitas Karangsambung, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Yogyakarta dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah.

Secara agregat rata-rata capaian RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 97,37% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan terdapat 41 IKU Sasaran Perangkat Daerah telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dimana 35 telah mencapai tingkat capaian 100%. Sementara itu, 6 IKU walau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) tapi belum mencapai 100%, 4 IKU baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T), 1 IKU masih berstatus predikat kinerja Rendah (R), serta 1 IKU masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR), yaitu:

- a) Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan tingkat capaian sebesar 89,54% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- b) Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan dengan tingkat capaian sebesar 75,33% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

Untuk mengukur sejauh mana sebuah wilayah mampu menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan, dapat tercermin pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks ini secara umum mengukur ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, serta stabilitas pangan. Kinerja IKP Kabupaten Kebumen cenderung membaik dari 80,41% pada Tahun 2020, walaupun sempat menurun sejak Tahun 2021, kembali meningkat menjadi 81,21 pada Tahun 2024. Dengan skor IKP di atas 80 mencerminkan tingkat ketahanan

pangan di Kabupaten Kebumen sangat baik. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen tidak hanya bebas dari kerawanan pangan, tetapi juga memiliki sistem pangan yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat tercermin dari persentase ketersediaan pangan yang relatif meningkat dari 6,4% pada Tahun 2020 melonjak naik menjadi 33,42% pada Tahun 2024. Namun demikian dengan angka baru sebesar 33,42% menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Kebumen masih dipasok dari luar daerah. Beberapa upaya telah dilakukan dengan peningkatan diversifikasi dan produktivitas pangan di wilayah Kabupaten Kebumen.

- c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tingkat capaian sebesar 93,83% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST)
- d) Indeks Infrastruktur Perhubungan dengan tingkat capaian sebesar 94,21% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- e) Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dengan tingkat capaian sebesar 94,35% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Dari 460 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen, masih terdapat 43 desa yang belum menggunakan persandian dalam komunikasi diantaranya tanda tangan elektronik. Hal ini diantaranya dikarenakan tanda tangan elektronik harus mendapatkan verifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk itu upaya pengoptimalan terus dilakukan dan diharapkan pada Tahun 2026 seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen telah menerapkan tanda tangan elektronik.
- f) Persentase budaya yang dilestarikan dengan tingkat capaian sebesar 51,64% atau masih mencapai status predikat kinerja Rendah (R).
- g) Persentase transmigrasi yang ditempatkan dengan tingkat capaian sebesar 36% atau masih mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).
- h) Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian sebesar 85,99% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- i) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan tingkat capaian sebesar 98,78% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Ketergantungan sumber pendanaan APBD dari dana transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Hal ini juga menyebabkan kapasitas fiskal yang selama 3 tahun terakhir (2022-2024) masuk kategori rendah. Namun demikian upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah terus dilakukan diantaranya melalui

- 1) Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi peningkatan kepatuhan, pemeriksaan ketelitian, optimalisasi penagihan rutin maupun tunggakan, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta penerapan sanksi yang tegas;
- 2) Ekstensifikasi PDRD yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pendataan dan pengawasan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat serta perluasan potensi pajak berupa penyesuaian tarif sesuai kondisi perekonomian daerah;
- 3) Peningkatan koordinasi dan penguatan sinergi antara Provinsi dan Kabupaten dalam upaya optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 4) Peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD;

- 6) Peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga bank/deposito; serta
- 8) Pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola PDRD.
- j) Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dengan tingkat capaian sebesar 80,16% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- k) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dengan tingkat capaian sebesar 93,50% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Kinerja kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami kenaikan dari 2,00 pada Tahun 2020 menjadi 2,92 pada Tahun 2024. Namun demikian hal ini menunjukkan kemampuan kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan kinerja IDSD secara keseluruhan dan masih masuk pada kategori sedang yang dapat berarti kapabilitas inovasi telah memadai namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki seperti seperti kapasitas, efektivitas, dan kinerja lembaga riset serta jumlah belanja riset baik lembaga riset pemerintah maupun swasta (perguruan tinggi dan industri). Untuk itu beberapa upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pembangunan atau riset dan inovasi daerah yang berujung pada peningkatan daya saing daerah. Salah satunya dengan pemanfaatan hasil kelitbangan yang cukup fluktuatif dan cenderung meningkat dari 75% pada Tahun 2020 menjadi 85,71% pada Tahun 2024 Walaupun demikian masih perlu dioptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan serta perlunya dievaluasi apakah hasil kelitbangan memang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi pengambil kebijakan.

- l) Nilai Maturitas SPIP dengan tingkat capaian sebesar 94,34% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Kebumen sampai pada tahun 2024 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi.

Secara agregat rata-rata capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 95,48% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

b. Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan pemerintahan sampai dengan Tahun 2024 mencerminkan evaluasi kinerja masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Tabel 2.168.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pendidikan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Urusan Pendidikan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	82,61	84,58	83,38	98,58%	ST	86,71	96,16%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						98,58%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	96,16%	ST

Sumber: Disdikpora, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pendidikan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan capaian program dengan 1 indikator menunjukkan telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru sebesar 98,58% yaitu untuk indikator Angka Partisipasi Kasar (APK). Sementara itu, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan kondisi yang sama dimana urusan pendidikan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan capaian program dengan 1 indikator menunjukkan telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru sebesar 96,16% yaitu untuk indikator Angka Partisipasi Kasar (APK). Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat ketercapaian APK diantaranya adalah banyak siswa yang memilih bersekolah di luar Kabupaten Kebumen, dimana kebijakan zonasi juga cukup berpengaruh karena terdapat siswa yang tidak masuk zona manapun ataupun tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, maka memutuskan keluar dari wilayah Kabupaten Kebumen termasuk dengan memilih sekolah sekaligus pondok pesantren di luar daerah. Upaya optimalisasi akses pelayanan Pendidikan terus dilakukan untuk meningkatkan APK di semua tingkatan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2. Kesehatan

Tabel 2.169.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kesehatan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Kesehatan	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%	99,26	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	%	100	100	100	100%	S	100	100%	ST
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	%	96,50	77,17	97,8	100%	ST	81,96	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Dinkes PPKB, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan kesehatan **Capaian kinerja RKPD Tahun 2024** menunjukkan urusan kesehatan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan capaian program dengan 4 indikator juga menunjukkan semua indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. Sementara itu, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan kondisi yang lama dimana urusan kesehatan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan capaian program dengan 4 indikator juga menunjukkan semua indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.170.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	58,94	61,48	59,00	95,97%	ST	65,89	89,54%	T
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						95,97%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	89,54%	T
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	78,71	82,5	78,75	95,45%	ST	87,50	90%	T
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	24,14	22,5	24	100%	ST	25,00	80%	T
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	%	16,19	18,01	24,76	100%	ST	20,04	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	%	80,81	82,15	82,49	100%	ST	83,84	98,39%	ST
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,91	15	15	100%	ST	15,00	100%	ST
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	70,97	73,48	73,48	100%	ST	85,18	86,26%	T
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	%	50,15	55,08	55,08	100%	ST	64,92	84,84%	T
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	91,25	91,35	91,35	100%	ST	91,55	99,78%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						99,43%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	92,41%	ST

Sumber: DPUPR, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pekerjaan umum dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian baru mencapai 95,97% yaitu dengan indikator indeks infrastruktur pekerjaan umum. Berdasarkan capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan perlu upaya pencapaian target untuk indeks infrastruktur pekerjaan umum dimana terdapat permasalahan diantaranya terjadinya penurunan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati *over dimension* dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas. Upaya terus dilakukan diantaranya dengan penguatan unit reaksi cepat pemeliharaan jalan dan jembatan. kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) pada Tahun 2024 telah mencapai 59,21%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selain itu, cakupan rumah tangga mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baik di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami penurunan dari 20,94% pada Tahun 2020 menjadi 19,62% pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena pengembangan air minum perpipaan baik di pedesaan maupun perkotaan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang terjadi. Namun demikian peningkatan sambungan rumah tetap diprioritaskan dalam peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan. Sedangkan capaian program dengan 8 indikator menunjukkan terdapat 7 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan 1 indikator mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 95,45% yaitu persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian karena kondisi baik baru mencapai 59,21% pada Tahun 2024 sejalan dengan kinerja Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik yang baru mencapai 78,75% pada Tahun 2024. Peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi terus dilakukan selain itu juga dilakukan pengoptimalan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Secara agregat, rata-rata capaian program pada RKPD 2024 sebesar 99,43% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan pekerjaan dengan 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 89,54% yaitu dengan indikator indeks infrastruktur pekerjaan umum. Sementara itu, capaian program dengan 8 indikator menunjukkan hanya 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. 2 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian masih di bawah 100% serta 4 indikator yang lain baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T), yaitu:

- a) Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan tingkat capaian sebesar 90% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
- b) Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan dengan tingkat capaian sebesar 80% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
Hal ini dapat ditunjukkan dengan cakupan rumah tangga mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baik di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami penurunan dari 20,94% pada Tahun 2020 menjadi 19,62% pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena pengembangan air minum perpipaan baik di pedesaan maupun perkotaan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang terjadi. Namun demikian peningkatan sambungan rumah tetap diprioritaskan dalam peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan.
- c) Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Perpipaan dengan tingkat capaian sebesar 73,48% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
Tingkat capaian menunjukkan terdapat permasalahan diantaranya terjadinya penurunan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati *over dimension* dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas. Upaya terus dilakukan diantaranya dengan penguatan unit reaksi cepat pemeliharaan jalan dan jembatan
- d) Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik dengan tingkat capaian sebesar 84,84% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
Beberapa permasalahan diantaranya kewenangan OSS penyedia jasa konstruksi ada di pemerintah pusat sehingga sulit untuk dilakukan verifikasi lapangan serta kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi terhadap regulasi. Optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memudahkan kebutuhan verifikasi lapangan serta optimalisasi bimbingan bagi penyedia jasa konstruksi dalam memahami regulasi yang berlaku serta penerapan sertifikasi jasa konstruksi.
- e) Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik dengan tingkat capaian sebesar 98,39% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Permasalahan yang terjadi diantaranya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur desa, kondisi geografis, serta banyaknya lokasi yang perlu ditangani. Optimalisasi rehabilitasi ringan dilakukan agar bangunan gedung pemerintah tidak cepat rusak.
- f) Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW dengan tingkat capaian sebesar 99,78% telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

- g) Beberapa permasalahan diantaranya ketaatan masyarakat terhadap pemanfaatan lahan sesuai tata ruang serta kebutuhan lahan meningkat sehingga terjadi alih fungsi lahan. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan penerapan Perda RTRW yang telah ditetapkan serta adanya SITARU REMEN (Sistem Informasi Tata Ruang) sebagai salah satu instrumen pengendali tata ruang.

Secara agregat, rata-rata capaian program RPJMD sampai dengan Tahun 2024 sebesar 92,41% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.171.

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	39,53	48,72	71,16	100%	ST	65,73	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	%	16,37	21,12	48,63	100%	ST	31,46	100%	ST
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	%	62,35	76,32	64,56	85,59%	T	100	64,56	R
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase peningkatan akses air limbah aman	%	2,02	1,17	3,67	100%	ST	1,17	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						96,40%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	91,14%	ST

Sumber: Disperkimhub, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan perumahan dan Kawasan permukiman dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan capaian program menunjukkan dari 4 indikator, 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 1 indikator yaitu persentase rumah tidak layak huni tertangani baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian telah mencapai 85,59%. Dikarenakan kondisi keuangan daerah, jumlah RTLH yang tertangani setiap tahun cenderung menurun dari 5.412 unit pada Tahun 2020 menjadi hanya 806 unit pada Tahun 2024. Namun demikian sisa RTLH yang belum tertangani terus menurun jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar 26.342 unit menjadi 22.460 unit pada Tahun 2024. Walaupun menurun pada Tahun 2021 jika dibandingkan Tahun 2020, persentase rumah layak huni cenderung meningkat kembali dari 92,58% pada Tahun 2021 menjadi 93,67% pada Tahun 2024. Hal ini selaras dengan persentase RTLH yang cenderung menurun mulai Tahun 2021 sebesar 7,42% menjadi 6,33% pada Tahun 2024. Sementara persentase RTLH tertangani meningkat dari 19,48% pada Tahun 2020 menjadi 64,56% pada Tahun 2024. Upaya penanganan RTLH dilakukan dengan mengusulkan alokasi anggaran penanganan ke pemerintah provinsi, pusat dan CSR. Secara agregat rata-rata capaian program pada RKPD 2024 adalah sebesar 96,40% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan perumahan dan Kawasan permukiman dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan capaian program menunjukkan dari 4 indikator, 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 1 indikator yaitu persentase rumah tidak layak huni tertangani baru mencapai status predikat kinerja Rendah (R) dengan tingkat capaian telah mencapai 64,56%. Secara agregat rata-rata capaian program pada RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 91,14% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST)

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.172.

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100%	ST	100	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda
	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	Persentase Desa Tangguh Bencana
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100%	ST	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	%	86,66	73,08	86,66*	100%	ST	76,92	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024	
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian					
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024							100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Satpol PP dan BPBD, 2024
Keterangan: *) Angka menggunakan realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian kinerja RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

6. Sosial

Tabel 2.173.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Sosial

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Sosial	Persentase Capaian SPM Sosial	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	%	70,51	71	80,12	100%	ST	73,00	100%	ST
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	%	104,94	100	104,25	100%	ST	100	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan jaminan sosial	%	83,30	78,76	89,05	100%	ST	81,78	89,05%	T
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Yang Dikelola	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	98,25%	ST

Sumber: Dinsos P3A, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan sosial dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 6 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan sosial dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara capaian program menunjukkan dari 6 indikator, 5 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 1 indikator program yaitu cakupan perlindungan sosial baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian telah mencapai 89,05%. Beberapa permasalahan terkait indikator ini diantaranya data BNBA dalam Aplikasi SIKS-NG tidak bisa diunduh sehingga pengolahan data tidak bisa optimal sesuai kebutuhan pengelolaan data di daerah dan desa/kelurahan serta pengelolaan data *by* aplikasi terpadu se-Indonesia sehingga memudahkan proses pengusulan, perbaikan dan penidaklayakan penerima bantuan sosial. Upaya dilakukan dengan mendorong dan mensosialisasikan kepada desa/kelurahan untuk melakukan update data dengan akurat dan rutin. Secara agregat rata-rata capaian program pada RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah 98,25% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

7. Tenaga Kerja

Tabel 2.174.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Tenaga Kerja

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Tenaga Kerja	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	%	30,66	25,32	37,56	100%	ST	28,75	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai"A"	%	100	100	96,42	96,42%	ST	100	96,42%	ST
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar	%	27,66	28,5	26,02	91,30%	ST	35,91	72,46%	S
Program Hubungan Industrial	Persentase kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	150	100	130	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						95,91%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	89,63%	T

Sumber: Disnaker, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan tenaga kerja dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara capaian program menunjukkan dari 3 indikator, 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 2 indikator program lainnya telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian masih di bawah 100% yaitu:

- a) persentase tenaga kerja yang dilatih bernilai "A" dengan tingkat capaian 96,42%.

Beberapa permasalahan diantaranya terdapat pelatihan yang dilaksanakan kurang diminati oleh calon pencari kerja, sehingga dalam pelaksanaannya menunggu calon peserta pelatihan. Upaya mengatasinya dilakukan dengan menginventarisir pelatihan yang diminati serta optimalisasi koordinasi dengan BLK di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

- b) Persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat capaian 91,30%.

Walaupun jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada Tahun 2022 yaitu mencapai 12.459 orang atau sekitar 82,49% berhasil ditempatkan atau mendapat pekerjaan, namun sejak Tahun 2023 justru mengalami penurunan hingga hanya mencapai 3.553 orang atau 26,02% pada Tahun 2024. Situasi perekonomian global hingga daerah yang tidak menentu sebagai dampak lanjutan Pandemi Covid-19, fenomena ekonomi digital, inflasi hingga deflasi menyebabkan banyak perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan melakukan PHK dikarenakan beberapa perusahaan bahkan harus tutup. Selain itu pesatnya perkembangan teknologi juga mampu menggeser keberadaan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti halnya pekerjaan yang dikerjakan oleh *artificial intelligence*. Walaupun demikian, Dinas Tenaga Kerja tetap berupaya untuk mencari lowongan pekerjaan di perusahaan dengan *Job Canvassing* dan meningkatkan *soft skill* para pekerja.

Secara agregat, rata-rata capaian program pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 95,91% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan tenaga kerja dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara capaian program menunjukkan dari 3 indikator, 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 1 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu persentase tenaga kerja yang dilatih bernilai "A" dengan tingkat capaian 96,42% sedangkan 1 indikator program lainnya yaitu persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar masih berada pada status predikat kinerja Sedang (S) dengan tingkat capaian 72,46%. Secara agregat, rata-rata capaian program pada RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 89,63% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.175.

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	51,36	16,99	15,68	92,29%	ST	19,73	79,47%	T
Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Program Perlindungan Perempuan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	%	20	16,8	24,98	100%	ST	19,78	100%	ST
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	pratama/ madya/ nindya/ utama/ KLA	madya	madya	madya	100%	ST	Madya	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						98,72%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	96,58%	ST

Sumber: Dinsos P3A, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan capaian program menunjukkan dari 6 indikator, 5 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 1 indikator walaupun telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaiannya masih di bawah 100% yaitu indikator cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan tingkat capaian sebesar 92,29%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya luasnya wilayah serta banyaknya desa di Kabupaten Kebumen menyebabkan program pemberdayaan perempuan belum dapat menjangkau seluruh desa. Untuk itu beberapa upaya dilakukan diantaranya melalui kerjasama dengan dunia usaha dalam peningkatan pemberdayaan perempuan terutama dalam hal pemasaran produk yang sudah diproduksi oleh kelompok perempuan. Secara agregat rata-rata capaian program pada RKPD Tahun 2024 adalah 98,72% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Seperti halnya pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan capaian program menunjukkan dari 6 indikator, 5 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) yaitu indikator cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan tingkat capaian sebesar 79,47%. Secara agregat rata-rata capaian program pada RKPD Tahun 2024 adalah 96,58% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

9. Pangan

Tabel 2.176.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pangan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pangan	Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	6,52	4	4,52	100%	ST	6	75,33%	T
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	75,33%	T
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	%	20,22	21,74	20,22	93,09%	ST	24,78	81,60%	T
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan	%	47,30	47,94	48,38	100%	ST	52,70	91,80%	ST
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	%	58,78	59,54	58,78	98,72%	ST	64,12	91,67%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	91,63	91,76	92,63	100%	ST	95,29	97,21	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						97,95%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	90,57	ST

Sumber: Distapang, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pangan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan capaian program menunjukkan dari 4 indikator, 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 2 indikator yang lain walaupun telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaiannya masih di bawah 100% yaitu:

- a) Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan dengan tingkat capaian 93,09%.

Permasalahan dalam pencapaian target diantaranya masih minimnya lumbung pangan di daerah serta pengelolaan dan keterlanjutan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian pangan oleh masyarakat belum optimal. Untuk itu beberapa upaya dilakukan dengan fasilitasi prasarana dan sarana lumbung pangan untuk masyarakat serta pembinaan pengelolaan dan keberlanjutan infrastruktur dan kemandirian pangan

- b) Persentase desa yang tertangani kerawanan pangannya dengan tingkat capaian 98,72%.

Masalah yang dihadapi diantaranya penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten yang belum mencukupi, peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan perlu diperbaharui serta terjadinya perubahan dan anomali iklim yang tidak menentu menyebabkan kemungkinan kerawanan pangan. Beberapa upaya dilakukan diantaranya dengan penyediaan Dana Talangan untuk masyarakat guna memperdayakan kelompok usaha pada desa rawan pangan serta pembuatan Peta Rawan Pangan yang berkelanjutan.

Secara agregat rata-rata capaian program dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 97,95% atau indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan pangan dengan 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan indikator Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan yang tingkat capaiannya sebesar 75,33%. Untuk mengukur sejauh mana sebuah wilayah mampu menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan, dapat tercermin pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks ini secara umum mengukur ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, serta stabilitas pangan. Kinerja IKP Kabupaten Kebumen cenderung membaik dari 80,41% pada Tahun 2020, walaupun sempat menurun sejak Tahun 2021, kembali meningkat menjadi 81,21 pada Tahun 2024. Dengan skor IKP di atas 80 mencerminkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen sangat baik. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen tidak hanya bebas dari kerawanan pangan, tetapi juga memiliki sistem pangan yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat tercermin dari persentase ketersediaan pangan yang relatif meningkat dari 6,4% pada Tahun 2020 melonjak naik menjadi 33,42% pada Tahun 2024. Namun demikian dengan angka baru sebesar 33,42% menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Kebumen masih dipasok dari luar daerah. Beberapa upaya telah dilakukan dengan peningkatan diversifikasi dan produktivitas pangan di wilayah Kabupaten Kebumen

Sementara itu capaian program pada RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 81,60% atau mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

- b) Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,80% atau mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya belum mantapnya pengelolaan cadangan makanan masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), masih

rendahnya diversifikasi pangan. masih tingginya makanan sisa/terbuang (*food waste*) serta masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan. Beberapa upaya dilakukan diantaranya dengan memberikan informasi yang jelas tentang stok cadangan pangan serta mekanisme distribusinya kepada masyarakat serta melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat dengan diberi pemahaman tentang pentingnya cadangan makanan pribadi dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat serta melakukan sosialisasi dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan (P2L).

- c) Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,67% atau mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
- d) Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,21% atau mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Permasalahan yang terjadi diantaranya masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta masih kurangnya pengetahuan sertifikasi hasil pertanian oleh masyarakat. Beberapa upaya dilakukan dengan pengoptimalan pengawasan dan sertifikasi hasil/produk pertanian serta pembinaan tentang pangan yang memenuhi B2SA.

Secara agregat rata-rata capaian program dalam RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 90,57% atau indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

10. Pertanian

Tabel 2.177.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pertanian

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: DPUPR, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pertanian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian kinerja RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan urusan pertanian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%..

11. Lingkungan Hidup

Tabel 2.178.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Lingkungan Hidup

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,16	74,28	69,86	94,05%	ST	74,45	93,83%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						94,05%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	93,83%	ST
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	68,75	75	75	100%	ST	100,00	75%	S
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitaas lingkungan Hidup	%	67,16	74,28	69,86	94,05%	ST	74,45	93,83%	ST
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	%	36,67	40	36,67	91,68%	ST	53,33	68,76%	S

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	%	40,17	45	44	97,78%	ST	55,00	80%	T
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	%	8,64	13,5	11,66	86,37%	T	19,63	59,40%	R
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	%	15,22	18,48	16,52	89,37%	T	24,13	68,46%	S

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup	%	70,83	66,67	72,55	100%	ST	100,00	72,55%	S
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100,00	100	100	100%	ST	100,00	100%	ST
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	35,23	28	53,59	100%	ST	30,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						95,47%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	79,78%	T

Sumber: DLHKP, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan lingkungan hidup dengan 1 indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian masih di bawah 100% yaitu sebesar 94,05%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang. IKA masih cukup rendah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami. Sementara itu untuk capaian program dari 9 indikator, 4 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan 5 indikator program lainnya dengan tingkat capaian sebagai berikut:

- a) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup telah mencapai status predikat kinerja Sedang (S) dengan tingkat capaian sebesar 75%.
Permasalahan yang dihadapi diantaranya adanya perubahan regulasi di tingkat pusat sehingga daerah perlu segera melakukan sinkronisasi/ penyesuaian terhadap dokumen perencanaan lingkungan hidup serta masih kurangnya ketaatan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan hidup karena belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi sinkronisasi dokumen RPPLH dan RTRW.
- b) Indeks kualitas lingkungan Hidup telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian sebesar 94,05%.
- c) Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian sebesar 91,68%.
Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian vegetasi pohon ayoman jalan (masyarakat banyak yang mengajukan penebangan pohon ayoman jalan), terbatasnya jenis tanaman langka karena tidak ada proses pembibitan/ tidak ada yang menyediakan serta terdapat kelangkaan tanaman/ satwa liar. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menambah lokasi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), memperbaharui perhitungan luasan RTH sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan mensinkronkan dengan penambahan deliniasi RDTR Kabupaten Kebumen yang terbaru dari sebelumnya 5 kecamatan kota menjadi 8 kecamatan kota.
- d) Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian sebesar 97,78%.
Beberapa permasalahan diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus peijinan penyimpanan sementara limbah B3 serta Fasilitasi Pelayanan Kesehatan belum semuanya memiliki ijin penyimpanan sementara limbah B3. Upaya yang dilakukan dengan memperbaiki SOP disesuaikan regulasi terbaru serta optimalisasi sosialisasi ke masyarakat terutama ke faskes dan industri.
- e) Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 86,37%.
Permasalahan yang terjadi diantaranya kurangnya sosialisasi kepada pelaku kegiatan atau usaha terkait dengan penyimpanan sementara LB3 sehingga pemahaman dan kesadaran mereka juga masih rendah. Beberapa upaya dilakukan dengan memperbaiki SOP disesuaikan regulasi terbaru serta optimalisasi sosialisasi ke masyarakat terutama ke faskes dan industri.

- f) Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 89,37%.

Dalam hal ini perlunya setiap desa memiliki peraturan lingkungan hidup untuk melindungi kelestarian desa tersebut. Upaya dilakukan dengan pemetaan perdes berdasarkan karakteristik dan bahaya bencana di seluruh desa pada Kabupaten Kebumen.

Secara agregat capaian program pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 95,47% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan lingkungan hidup dengan 1 indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian masih di bawah 100% yaitu sebesar 93,83%. Sementara itu untuk capaian program dari 9 indikator, 2 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan 7 indikator program lainnya dengan tingkat capaian sebagai berikut:

- a) Indeks kualitas lingkungan Hidup telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian sebesar 93,83%.
- b) Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah telah mencapai status predikat kinerja Sedang (S) dengan tingkat capaian sebesar 68,78%.
- c) Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 80%.
- d) Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan telah mencapai status predikat kinerja Rendah (R) dengan tingkat capaian sebesar 59,40%.
- e) Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup telah mencapai status predikat kinerja Sedang (S) dengan tingkat capaian sebesar 68,46%.
- f) Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup telah mencapai status predikat kinerja Sedang (S) dengan tingkat capaian sebesar 72,55%.

Dalam hal ini masih kurangnya minat masyarakat terhadap fasilitasi penghargaan lingkungan hidup diantaranya karena nominal penghargaan yang dianggap kurang besar. Selain dengan mengoptimalkan besaran penghargaan juga dilakukan dengan melibatkan lebih banyak masyarakat dan terasa manfaatnya dari kegiatan tersebut.

Secara agregat capaian program pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 79,78% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

12. Adminsitration Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.179.

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Adminsitration Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,77	95,15	99,57	100%	ST	95,45	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	%	100,00	100	100	100%	ST	100,00	100%	ST
Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	%	100,00	100	100	100%	ST	100,00	100%	ST
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100	100	100%	ST	100,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Disdukcapil, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian kinerja RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.180.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	71,49	34,08	88,64	100%	ST	42,09	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata	%	2,00	4,9	100	100%	R	8,91	100%	SR
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	%	100	100	100	100%	T	100	100%	T
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya	BUMDesa	58	67	56	83,58%	T	89	62,92%	R
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	15,87	18,7	18,7	100%	ST	24,35	76,80%	T
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						95,90%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	84,93%	T

Sumber: Dinas PMD, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian 4 indikator program, terdapat 3 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%, sedangkan 1 indikator program yaitu jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian telah mencapai 83,58%. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pendampingan untuk BUMDes belum optimal, terdapat BUMDes yang tidak berkembang serta keterlibatan personel BUMDes merangkap dengan jabatan lain/pekerjaan lain. Secara agregat rata-rata capaian program pada RKPD Tahun 2024 sebesar 95,90% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian 4 indikator program, terdapat 2 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%, sedangkan 2 indikator program lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya baru mencapai status predikat kinerja Rendah (R) dengan tingkat capaian telah mencapai 62,92%.
- b) Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian telah mencapai 76,80%.

Permasalahan yang terjadi diantaranya kader PKK rangkap jabatan dengan kader yang lain di desa serta kurangnya inovasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat sampai dengan tingkat dasawisma. Upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya pedoman teknis dalam pembinaan tertib administrasi PKK serta adanya program 1 desa 1 inovasi.

Secara agregat rata-rata capaian program pada RPJMD sampai dengan Tahun 2024 sebesar 84,93% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.181.

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	69,95	64,50	67,11	100%	ST	65,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	52	41,67	76,47	100%	ST	54,17	100%	ST
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Cakupan peserta KB Aktif	%	69,93	64,5	67,11	100%	ST	65	100%	ST
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	%	71,55	70,41	84,23	100%	ST	70,42	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Dinkes PPKB, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian kinerja RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

15. Perhubungan

Tabel 2.182.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perhubungan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	75,30	79,11	75,78	95,79%	ST	80,44	94,21%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						95,79%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	94,21%	ST
Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	75,30	79,11	75,78	95,79%	ST	80,44	94,21%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						95,79%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	94,21%	ST

Sumber: Disperkimhub, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan perhubungan dengan 1 indikator urusan dan 1 indikator program yaitu indeks infrastruktur perhubungan telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 95,79%. Beberapa permasalahan perhubungan diantaranya persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen terus meningkat dari 33,62% pada Tahun 2020 menjadi 50,004% pada Tahun 2024. Namun demikian angka kecelakaan di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 618 kejadian pada Tahun 2020 menjadi 1.178 kejadian pada Tahun 2024 karena angka kecelakaan ini terjadi tidak hanya di ruas jalan kabupaten, tapi juga ruas jalan nasional, provinsi hingga desa. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya masih rendah dalam berlalu lintas dengan baik dan mentaati aturan serta pada umumnya jalan nasional, provinsi, jalan kabupaten dan desa yang rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang berlubang, bergelombang dan minim rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan utamanya ketika malam hari. Sementara itu pada prasarana terminal menunjukkan kunjungan Bus per hari di terminal tipe C Kebumen paling banyak di terminal Gombang 36 bus per hari diikuti terminal Kebumen 23 bus per hari. Sedang terminal karanggayam kunjungan bus per hari sejumlah 6 bis. Sedikitnya kunjungan bus dipengaruhi oleh berkurangnya armada dan trayek bus yang ada. Selain itu bila dilihat dari penumpang yang menggunakan angkutan umum di terminal juga cenderung menurun sejak Tahun 2022 yaitu sebanyak 271 penumpang menjadi hanya 195 penumpang di Tahun 2024. Penurunan ini diakibatkan persaingan antar armada khususnya beroperasinya perusahaan bus yang memiliki terminal sendiri serta persaingan dengan moda kereta api. Sedangkan terkait jumlah angkutan umum di Kabupaten Kebumen juga terus mengalami penurunan dari 1.706 pada tahun 2020 menjadi hanya 594 unit di tahun 2024. Bersamaan dengan itu, jumlah izin trayek juga mengalami penurunan dari 82 trayek di 2019 menjadi 35 trayek di tahun 2024. Penurunan angkutan penumpang dan kepemilikan izin trayek disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi baik sepeda motor atau mobil serta persaingan dengan layanan transportasi berbasis daring. Selain itu, terdapat penyesuaian kepemilikan yang semula milik perorangan menjadi badan hukum dan pembatasan usia kendaraan angkutan umum serta pembaruan sistem pelayanan perizinan menjadi faktor penurunan jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek di Kabupaten Kebumen. Untuk mengatasi keterbatasan layanan angkutan yang ada di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menyediakan moda transportasi trans Kebumen namun hanya melayani rute Kebumen- Prembun sebanyak 2 unit. Diharapkan dengan pengadaan tersebut akan membantu pelayanan masyarakat di bidang transportasi yang nyaman, murah dan representatif guna mendukung angkutan yang terintegrasi. Untuk itu perlu disusun perencanaan jangka panjang untuk mewujudkan sarana transportasi kebumen yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan dalam bentuk dokumen rencana induk transportasi Kebumen. Sementara itu, adanya layanan angkutan umum berbasis daring yang lebih tersedia dan tepat waktu dalam perkembangannya ke depan perlu diintegrasikan dengan angkutan umum bertrayek, yaitu angkutan umum berbasis daring untuk difokuskan pada wilayah-wilayah yang belum terdapat trayek. Layanan angkutan umum berbasis daring juga perlu dioptimalkan karena dapat membuka lapangan kerja bagi pengendara maupun pelaku UMKM dengan adanya layanan antar jemput. Kehadiran layanan angkutan umum berbasis daring juga dapat mengisi *gap* konektivitas layanan angkutan umum bertrayek di Kabupaten Kebumen ini.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan perhubungan dengan 1 indikator urusan dan 1 indikator program yaitu indeks infrastruktur perhubungan telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 94,21%.

16. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.183.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Komunikasi dan Infomatika

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	%	3,70	3,50	4,07	100%	ST	3,60	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	%	32,16	34,51	34,51	100%	ST	43,14	80%	T
Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	nilai	4,44	3,86	4,44	100%	ST	3,87	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	90%	T

Sumber: Diskominfo, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan komunikasi dan informatika dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan komunikasi dan informatika dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara itu capaian program dengan 2 indikator menunjukkan 1 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan capaian 1 indikator program yang lainnya yaitu indeks PPID baru mencapai 80% atau mencapai status predikat kinerja Tinggi (T). Permasalahan yang terjadi diantaranya kesadaran OPD tentang keterbukaan informasi publik belum tinggi, Aplikasi berbasis website PPID belum di-*update* serta penyedia informasi dan dokumen belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Upaya yang dilakukan diantaranya adanya lomba desa dan pemeringkatan *website* OPD ikut meningkatkan kesadaran untuk meng-*upload* dokumen di website masing-masing OPD maupun desa. Secara agregat rata-rata capaian program pada RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 90%.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.184.

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Sehat	%	83,33	46,67	63,33	100%	ST	63,33	100%	ST
	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	%	12,42	11,76	13,22	100%	ST	13,22	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	83,33	46,67	77,36	100%	ST	63,33	100%	ST
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	%	32,06	29,9	64,07	100%	ST	42,27	100%	ST
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase advokasi kepada koperasi	%	44,48	36,98	88,82	100%	ST	51,78	100%	ST
Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase peningkatan UKM yang berkualitas	%	11,11	10,89	11,82	100%	ST	13,22	89,41%	T

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)										
Program Pengembangan Umkm	Jumlah unit usaha mikro terbina yang meningkat omsetnya	unit usaha	250	45	275	100%	T	55	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	97,88%	ST

Sumber: Disperindag KUKM, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 5 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara itu untuk capaian program yang terdiri dari 5 indikator, menunjukkan 4 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. 1 indikator program yaitu persentase peningkatan UKM yang berkualitas baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 89,41%. Permasalahan yang terjadi diantaranya SDM pelaku usaha yang masih rendah serta sarana dan prasarana pendukung digitalisasi usaha yang belum memadai. Beberapa upaya dilakukan diantaranya dengan optimalisasi fasilitasi dalam pemasaran produk UMKM. Secara agregat, rata-rata capaian program dalam RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 97,88% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

18. Penanaman Modal

Tabel 2.185.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Penanaman Modal

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	16,35	4,21	15,05	100%	ST	6,27	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar rupiah	628,23	405	686,76	100%	ST	2.025	94,54%	ST
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	Dokumen	50	55	35	63,64%	R	65	53,85%	R
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelayanan kegiatan usaha yang berlaku	%	29,00	29,67	55,39	100%	ST	31,89	100%	ST
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						92,73%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	89,68%	T

Sumber: DPMPTSP, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan penanaman modal dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara itu untuk capaian program dari 5 indikator, 4 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan 1 indikator program lainnya yaitu jumlah dokumen kepeminatan investasi daerah baru mencapai 63,64% atau mencapai status predikat kinerja Rendah (R). Permasalahan yang terjadi diantaranya aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat sangat tergantung otorisasi pusat sehingga susah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan riil yang ada di daerah. Upaya yang dilakukan adalah optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat. Secara agregat rata-rata capaian program dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 92,73% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan penanaman modal dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara itu untuk capaian program dari 5 indikator, 3 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Capaian 2 indikator program lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) dengan tingkat capaian sebesar 94,54% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya kepeminatan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen, belum optimalnya pembaharuan potensi investasi daerah, serta banyak pelaku usaha yang belum mengetahui insentif investasi di Kabupaten Kebumen. Upaya yang dilakukan dengan promosi dan sosialisasi kebijakan penanaman modal sehingga kepeminatan dan data investasi lebih akurat.
- b) Jumlah dokumen kepeminatan investasi daerah baru mencapai 53,85% atau mencapai status predikat kinerja Rendah (R).

Secara agregat rata-rata capaian program dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 89,68% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

19. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.186.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kepemudaan dan Olahraga

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	34,42	3,92	34,96	100%	ST	4,60	100%	ST
	Persentase Prestasi Olahraga	%	50	63,33	146,67	100%	ST	70,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	34,42	3,92	34,14	100%	ST	4,60	100%	ST
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	%	50	63,33	146,67	100%	ST	70,00	100%	ST
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Prestasi Kepramukaan	%	70	60	100	100%	ST	60,67	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Disdikpora, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan kepemudaan dan olahraga dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan kepemudaan dan olahraga dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%

20. Statistik

Tabel 2.187.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Statistik

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Statistik	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Diskominfo, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan statistik dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan statistik dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

21. Persandian

Tabel 2.188.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Persandian

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Persandian	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	%	70,65	83,48	94,35	100%	ST	100	94,35%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	94,35%	ST
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	%	70,65	83,48	94,35	100%	ST	100	94,35%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	94,35%	ST

Sumber: Diskominfo, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan persandian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan persandian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 94,35%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 94,35%. Dari 460 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen, masih terdapat 43 desa yang belum menggunakan persandian dalam komunikasi diantaranya tanda tangan elektronik. Hal ini diantaranya dikarenakan tanda tangan elektronik harus mendapatkan verifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk itu upaya pengoptimalan terus dilakukan dan diharapkan pada Tahun 2026 seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen telah menerapkan tanda tangan elektronik.

22. Kebudayaan

Tabel 2.189.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kebudayaan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Kebudayaan	Persentase Budaya yang Dilestarikan	%	88,08	34,05	22,23	65,29%	R	43,05	51,64%	R
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						65,29%	R	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	51,64%	R
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	%	44,44	40,63	30,16	74,23%	S	53,13	56,77%	R
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	76,15	27,47	14,29	52,02%	R	32,97	43,34%	SR
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						63,13%	R	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	50,06%	SR

Sumber: Disparbud, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan kebudayaan dengan 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Rendah (R) dengan tingkat capaian hanya mencapai 65,29%. Sementara untuk capaian program secara agregat menunjukkan rata-rata capaian sebesar 63,13% atau baru mencapai status predikat kinerja Rendah (R) dengan rincian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kesenian yang dikembangkan dengan tingkat capaian sebesar 74,23% atau baru mencapai status predikat kinerja Sedang (S).
- b) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan tingkat capaian sebesar 52,02% atau baru mencapai status predikat kinerja Rendah (R).

Permasalahan yang terjadi pada bidang kebudayaan secara umum yaitu belum optimalnya sarpras pengembangan kesenian di Kabupaten Kebumen (seragam Kesenian, peralatan kesenian, jenis Kesenian), belum adanya inovasi dan kolaborasi kesenian tradisional dengan kesenian modern, belum optimalnya informasi tentang situs budaya atau sejarah dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kebumen yang dikelola oleh pemerintah, kurang minatnya pelaku kesenian untuk mengembangkan potensi kesenian budaya lokal, belum terjadi sinergitas dalam pembangunan modern sehingga mengabaikan kepentingan cagar budaya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya serta keterbatasan tenaga ahli dalam bidang cagar budaya. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan optimalisasi keterlibatan komunitas organisasi kesenian daerah, evaluasi secara berkala untuk meningkatkan selera publik terhadap kecintaan kesenian daerah serta sosialisasi tentang penetapan cagar budaya untuk memahami lebih dalam nilai dan konteks historisnya.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan kebudayaan dengan 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Rendah (R) dengan tingkat capaian hanya mencapai 51,64%. Sementara untuk capaian program secara agregat menunjukkan rata-rata capaian sebesar 50,06% atau baru mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR) dengan rincian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kesenian yang dikembangkan dengan tingkat capaian sebesar 56,77% atau baru mencapai status predikat kinerja Rendah (R).
- b) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan tingkat capaian sebesar 43,34% atau baru mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

23. Perpustakaan

Tabel 2.190.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perpustakaan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	19,68	12,97	16,91	100%	ST	13,06	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	18,85	12,97	16,91	100%	ST	13,06	100%	ST
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	%	60	80	80	100%	ST	100	80%	T
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	90%	T

Sumber: Disarpus, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan perpustakaan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan perpustakaan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program menunjukkan dari 2 indikator, 1 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan 1 indikator yang lain yaitu persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 80%. Permasalahan yang terjadi diantaranya belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga secara umum masyarakat belum sadar akan pentingnya pendokumentasian naskah kuno. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendokumentasian naskah kuno. Secara agregat rata-rata capaian program pada RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 90% atau baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

24. Kearsipan

Tabel 2.191.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kearsipan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	73,92	76,27	84,31	100%	ST	80,20	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengelolaan Arsip	Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	%	73,92	76,27	84,31	100%	ST	80,20	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Disarpus, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan kearsipan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan kearsipan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

25. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.192.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kelautan dan Perikanan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan	%	8,97	6,00	21,19	100%	ST	9,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	42,23	5	4,9	98%	ST	7,50	65,33%	R
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya	%	16,64	20	20,01	100%	ST	30	66,70%	S
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	%	78,57	85,71	107,14	100%	ST	100,00	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi usaha perikanan	%	394,98	40	300,62	100%	ST	55,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						99,5%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	83,01	T

Sumber: DLHKP, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan kelautan dan perikanan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program dari 4 indikator, 3 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedang 1 indikator program lainnya yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap juga telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 98%. Permasalahan yang dihadapi diantaranya produksi perikanan tangkap masih sangat dipengaruhi cuaca sehingga produksi fluktuatif. Selain itu harga perikanan tangkap juga cukup fluktuatif di pasaran. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan optimalisasi pemenuhan sarana tangkap bagi nelayan. Secara agregat, rata-rata capaian program pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 99,5% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan kelautan dan perikanan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program dari 4 indikator, 2 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedang 2 indikator program lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tingkat capaian sebesar 65,33% atau mencapai status predikat kinerja Rendah (R).
- b) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan tingkat capaian sebesar 66,70% atau mencapai status predikat kinerja Sedang (S).

Permasalahan yang dihadapi diantaranya keterbatasan sarpras budidaya ikan dan SDM pembudidaya ikan serta terbatasnya kemampuan pelaku usaha budidaya ikan untuk mandiri. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengusulkan anggaran hibah kepada provinsi maupun pusat, melaksanakan diklat teknis budidaya ikan, optimalisasi BBI Pringtutul, serta peningkatan produksi tambak udang masyarakat maupun BUBK.

Secara agregat, rata-rata capaian program pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 83,01% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

26. Pariwisata

Tabel 2.193.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pariwisata

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pariwisata	Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	2,03	1,31	2,24	100%	ST	1,91	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	%	88,72	86,52	84,31	97,45%	ST	90,26	93,41%	ST
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	32,47	25,00	38,69	100%	ST	35,00	100%	ST
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	%	100	20,00	100	100%	ST	20,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						99,15%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	97,80%	ST

Sumber: Disparbud, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pariwisata dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program dari 3 indikator, 2 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedang 1 indikator program lainnya yaitu persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata juga telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 97,45%. Permasalahan yang dihadapi diantaranya belum optimalnya pengembangan infrastruktur pariwisata, pengembangan atraksi pariwisata, kerjasama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan industri pariwisata, daya tarik wisatawan terhadap objek wisata yang dikelola oleh Pemda, diversifikasi produk pariwisata serta masih adanya pungutan liar. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan kolaborasi dalam penyusunan paket wisata dengan pihak biro perjalanan wisata serta optimalisasi penyediaan sarana prasarana, akomodasi hingga obyek pariwisata yang dikelola swasta/masyarakat. Secara agregat, rata-rata capaian program dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 99,15% atau indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan pariwisata dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program dari 3 indikator, 2 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedang 1 indikator program lainnya yaitu persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata juga telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 93,41%. Secara agregat, rata-rata capaian program dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 97,80% atau indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

27. Pertanian

Tabel 2.194.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pertanian

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	15,98	4,00	14,33	100%	ST	6,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	28,63	12,7	13,25	100%	ST	12,91	100%	ST
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	%	17,70	24	20,9	87,09%	T	28,00	74,64%	S
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0,25	2,98	19,16	100%	ST	3,17	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	1,77	10,01	1,54	15,38%	SR	11,18	13,77%	SR
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	%	100,00	100	100	100%	ST	100,00	100%	ST
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	%	56,00	58	58	100%	ST	60,00	96,67%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						83,75%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	80,85%	T

Sumber: Distapang, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pertanian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program dari 6 indikator, 4 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedang 2 indikator program lainnya capaiannya adalah sebagai berikut:

- a) Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak dengan tingkat capaian sebesar 87,09% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
Permasalahan yang terjadi diantaranya masih terjadinya alih fungsi lahan ke non pertanian sehingga ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang, minimnya rata-rata luas kepemilikan dan penguasaan lahan petani, kondisi jaringan irigasi belum optimal, kurang efektifnya pemanfaatan air irigasi. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya optimalisasi peran aktif dari kelompok masyarakat (GP3A, P3A) dalam memelihara saluran irigasi, penerapan regulasi pemerintah terkait lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) serta optimalisasi operasionalisasi, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi yang ada untuk memastikan distribusi air yang efisien dan merata.
- b) Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan tingkat capaian sebesar 15,38% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Permasalahan yang terjadi yaitu semakin beragamnya wabah penyakit akibat semakin terdegradasinya lingkungan serta pengaruh perubahan iklim. Upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan optimalisasi peran aktif penyuluh pertanian dalam mengedukasi para petani mengenai praktik pertanian yang baik untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit, termasuk rotasi tanaman dan kebersihan lahan, membangun sistem pemantauan dini berbasis teknologi untuk mendeteksi gejala awal hama dan penyakit pada tanaman atau hewan sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat, mendorong penggunaan biopestisida yang ramah lingkungan dan mengurangi risiko dampak negatif terhadap ekosistem dibandingkan pestisida kimia.

Secara agregat, rata-rata capaian program RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 83,75% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan pertanian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program dari 6 indikator, 3 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedang 3 indikator program lainnya capaiannya adalah sebagai berikut:

- a) Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak dengan tingkat capaian sebesar 74,64% atau telah mencapai status predikat kinerja Sedang (S).
- b) Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan tingkat capaian sebesar 13,77% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).
- c) Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian dengan tingkat capaian sebesar 96,67% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Permasalahan yang terjadi diantaranya masih rendahnya kapasitas SDM penyuluh terkait Kelembagaan Ekonomi Petani dan konsolidasi petani untuk berkorporasi. Upaya yang dilakukan diantaranya mengembangkan program magang dan pelatihan yang menarik dan praktis, dengan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pertanian modern dan berkelanjutan, menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis, seperti pengelolaan usaha pertanian pemasaran, dan manajemen, untuk meningkatkan daya saing petani dan peternak.

Secara agregat, rata-rata capaian program RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 80,85% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T)..

28. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 2.195.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Energi dan sumber daya mineral	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Disnaker, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan energi dan sumber daya mineral dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan energi dan sumber daya mineral dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

29. Perdagangan

Tabel 2.196.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perdagangan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	6,84	4,89	4,65	95,09%	ST	4,45	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						95,09%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai pendapatan retribusi pasar	Miliar rupiah	82,76	8,4	90,89	100%	ST	64,00	100%	ST
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	%	3,78	1,5	0,5	100%	ST	1,70	100%	ST
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan	Juta rupiah	41.279,00	2.100	41.748	100%	ST	10.500	100%	ST
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP Yang Tertera	%	87,34	63,79	102,75	100%	ST	73,60	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	%	70,27	71,77	74,53	100%	ST	74,77	99,68%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	99,94%	ST

Sumber: Disperindag KUKM, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan perdagangan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 95,09%. Permasalahan yang dihadapi masih belum optimalnya cakupan pasar tradisional dalam kondisi baik walaupun terus meningkat dari 83% pada Tahun 2020 menjadi 85% pada Tahun 2024. Selain kondisi pasar tradisional terus ditingkatkan kualitasnya, pengoptimalan aktivitas ekonomi di pasar tradisional juga perlu ditingkatkan. Sementara itu, capaian program dengan 5 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 juga menunjukkan urusan perdagangan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program menunjukkan dari 5 indikator, 4 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan 1 indikator program yaitu cakupan pemasaran produk UMKM menunjukkan telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 99,68%. Permasalahan yang terjadi diantaranya dengan kurangnya kapasitas UMKM dalam digital marketing serta belum semua produk memenuhi standar dalam mengikuti pameran. Upaya yang dilakukan diantaranya optimalisasi fasilitasi dari Pemda dalam pemasaran UMKM serta penggunaan media sosial yang meningkat dari masyarakat. Secara agregat, rata-rata capaian program dalam RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 99,94% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

30. Perindustrian

Tabel 2.197.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perindustrian

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Perindustrian	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	6,31	5,47	6,00	100%	ST	4,93	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	%	26,35	20,43	31,18	100%	ST	31,50	98,98%	ST
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri	dokumen	1	1	1	100%	ST	5	80%	T
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	92,99	ST

Sumber: Disperindag KUKM, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan perindustrian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 juga menunjukkan urusan perindustrian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sementara untuk capaian program menunjukkan dari 3 indikator, 1 indikator program telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan 2 indikator program yang lain, capaian programnya adalah sebagai berikut:

- a) Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT dengan tingkat capaian sebesar 98,98% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Permasalahan yang terjadi diantaranya pemeliharaan pohon kelapa penghasil nira membutuhkan perlakuan khusus dengan biaya yang cukup tinggi serta kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait mutu dan kualitas produk dalam pengembangan pangsa pasar dan legalitas produk untuk Produk Rokok berpita cukai. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan produksi dan skala pemasaran rokok, melakukan pembinaan kepada pelaku usaha bersama Bea Cukai serta pelatihan dan pembinaan secara berkala bagi petani perajin gula semut.

- b) Jumlah dokumen informasi industri dengan tingkat capaian sebesar 80% atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

Permasalahan yang terjadi diantaranya respon dari para pelaku usaha kurang aktif dalam memberikan info dikarenakan data perpajakan. Upaya yang dilakukan diantaranya optimalisasi dukungan para pelaku usaha dalam pelaksanaan survei dan diskusi grup.

Secara agregat, rata-rata capaian program pada RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 92,99% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

31. Transmigrasi

Tabel 2.198.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Transmigrasi

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%	15,00	20,00	10,00	50%	SR	100,00	36%	SR
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						50%	SR	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	36%	SR
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang di tempatkan	%	15,00	36%	SR	50%	SR	100,00	50%	SR
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						50%	SR	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	36%	SR

Sumber: Disnaker, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan transmigrasi dengan 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR) dengan tingkat capaian sebesar 50%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 juga baru mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR) dengan tingkat capaian sebesar 50%.

Hal tersebut menyebabkan **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan urusan transmigrasi dengan 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR) dengan tingkat capaian sebesar 36%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 juga baru mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR) dengan tingkat capaian sebesar 36%. Indikator urusan maupun program yaitu persentase transmigran yang ditempatkan, dimana permasalahan yang terjadi yaitu karena terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk calon transmigrasi Kabupaten, belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi serta terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran. Upaya yang dilakukan adalah optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga Pemerintah Daerah tujuan transmigrasi. Selain itu juga dioptimalkan transmigrasi swakarsa yang melakukan pembiayaan sendiri, namun tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah.

32. Sekretariat Daerah

Tabel 2.199.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Sekretariat Daerah

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	90,16	85,00	90,99	100%	ST	86,00	100%	ST
	Tingkat Kemiskinan	%	16,34	14,00-15,00	15,71	95,54%	ST	13,00-13,50	85,99%	T
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,00-5,50	5,30	100%	ST	5,00-5,50	100%	ST
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP*	100%	ST	WTP	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						98,89%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	96,50%	ST
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Setda	Nilai	90,37	85	91,08	100%	ST	86	100%	ST
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,27*	2,95	3,27*	100%	ST	3,29	99,39%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	%	97,10	89	97,09	100%	ST	91	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	99,80%	ST

Sumber: SETDA, 2024

Keterangan: *) menggunakan angka realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan sekretariat daerah yang mengampu 4 indikator urusan, 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan 1 indikator yaitu tingkat kemiskinan juga telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 95,54%. Secara agregat rata-rata capaian urusan pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 98,89% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara untuk capaian program dengan 3 indikator, semua telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan sekretariat daerah yang mengampu 4 indikator urusan, 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan 1 indikator yaitu tingkat kemiskinan juga telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) namun tingkat capaian baru mencapai 85,99%. Secara agregat rata-rata capaian urusan pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 96,50% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara untuk capaian program dari 3 indikator, 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Sedangkan 1 indikator yaitu nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 99,39%. Permasalahan yang terjadi yaitu jumlah indikator yang terlalu banyak sehingga dirasa kurang efektif (indikator output dan indikator outcome) sedangkan yang menjadi penilaian hanya indikator outcome serta beberapa indikator tidak tersedia di level daerah atau perangkat daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan penyederhanaan indikator LPPD, pembuatan jadwal penyusunan serta optimalisasi OPD dalam melengkapi data-data terkait dengan indikator dalam IKK LPPD.

33. Sekretariat DPRD

Tabel 2.200.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Sekretariat DPRD

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Sekretariat DPRD	Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Sekretariat DPRD, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan sekretariat DPRD dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan sekretariat DPRD dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

34. Perencanaan

Tabel 2.201.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Perencanaan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	%	100	90	100	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Bappeda, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan perencanaan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan perencanaan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

35. Keuangan

Tabel 2.202.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Keuangan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Keuangan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,98	15,40	15,44*	100%	ST	15,63	98,78%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	98,78%	ST
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	99,32	95,72	100,75	100%	ST	96,05	100%	ST
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100*	88,67	100*	100%	ST	90,56	100%	ST
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	102,11	100	109,6	100%	ST	100	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: BPKPD, 2024
Keterangan: *) menggunakan angka realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan keuangan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan keuangan dengan 1 indikator yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 98,78%. Sementara untuk capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Permasalahan yang terjadi yaitu ketergantungan sumber pendanaan APBD dari dana transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Hal ini juga menyebabkan kapasitas fiskal yang selama 3 tahun terakhir (2022-2024) masuk kategori rendah. Namun demikian upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah terus dilakukan diantaranya melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi peningkatan kepatuhan, pemeriksaan ketelitian, optimalisasi penagihan rutin maupun tunggakan, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta penerapan sanksi yang tegas; ekstensifikasi PDRD yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pendataan dan pengawasan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat serta perluasan potensi pajak berupa penyesuaian tarif sesuai kondisi perekonomian daerah; peningkatan koordinasi dan penguatan sinergi antara Provinsi dan Kabupaten dalam upaya optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD; peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku; peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga bank/deposito; serta pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola PDRD.

36. Kepegawaian

Tabel 2.203.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kepegawaian

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Kepegawaian	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	99,00	92,00	99,96	100%	ST	93,99	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	99,00	92,00	99,96	100%	ST	93,99	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: BKPSDM, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan kepegawaian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan kepegawaian dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%

37. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.204.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pendidikan dan Pelatihan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	59	73,18	61,89	84,57%	T	77,21	80,16%	T
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						84,57%	T	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	80,16%	T
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang meningkat Kapasitasnya	%	59,00	73,18	61,89	84,57%	T	77,21	80,16%	T
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						84,57%	T	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	80,16%	T

Sumber: BKPSDM, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pendidikan dan pelatihan dengan 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 84,75%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 juga baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 84,75%.

Hal tersebut menyebabkan **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** menunjukkan urusan pendidikan dan pelatihan dengan 1 indikator baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 80,16%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 juga baru mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 80,16%. Secara umum, dalam upaya peningkatan kapasitas ASN dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan teknis, fungsional maupun diklat jenjang kepemimpinan guna meningkatkan profesionalitas ASN terus ditingkatkan. Namun demikian keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama sehingga hanya jenis diklat tertentu yang diprioritas seperti diklat kepemimpinan dalam rangka mengisi jabatan struktural tertentu, prajabatan untuk CPNS (jika terdapat formasi CPNS di tahun tersebut) serta orientasi P3K. Sementara itu untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan pemebelajaran *online* melalui aplikasi SINAU KEBUMEN. Hal ini dalam rangka mendukung Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 yang diantaranya menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) dalam 1 tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah bekerja sama dengan berbagai instansi dalam penyusunan konten pembelajarannya, diantaranya adalah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional Kawasan Geodiversitas Karangsambung, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Yogyakarta dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah.

38. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.205.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Penelitian dan Pengembangan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	75	83,33	85,71	100%	ST	91,67	93,50%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	93,50%	ST
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	75	83,33	85,71	100%	ST	91,67	93,50%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	93,50%	ST

Sumber: Bappeda, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan penelitian dan pengembangan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan penelitian dan pengembangan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 93,50%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 93,50%. Indikator urusan maupun program yaitu persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dimana kinerja kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami kenaikan dari 2,00 pada Tahun 2020 menjadi 2,92 pada Tahun 2024. Namun demikian hal ini menunjukkan kemampuan kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan kinerja IDSD secara keseluruhan dan masih masuk pada kategori sedang yang dapat berarti kapabilitas inovasi telah memadai namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki seperti seperti kapasitas, efektivitas, dan kinerja lembaga riset serta jumlah belanja riset baik lembaga riset pemerintah maupun swasta (perguruan tinggi dan industri). Untuk itu beberapa upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pembangunan atau riset dan inovasi daerah yang berujung pada peningkatan daya saing daerah. Salah satunya dengan pemanfaatan hasil kelitbangan yang cukup fluktuatif dan cenderung meningkat dari 75% pada Tahun 2020 menjadi 85,71% pada Tahun 2024 Walaupun demikian masih perlu dioptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan serta perlunya dievaluasi apakah hasil kelitbangan memang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi pengambil kebijakan.

39. Pengawasan

Tabel 2.206.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Pengawasan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	nilai	3,19	3,30	3,302**	100%	ST	3,50	94,34%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	94,34%	ST
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 1/ Level 2/ Level 3/ Level 4/ Level 5	3	3	3	100%	ST	3	100%	ST
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	Nilai	3,90	3,45	3,75	100%	ST	3,50	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Inspektorat, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan pengawasan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 2 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan urusan pengawasan dengan 1 indikator yaitu nilai maturitas SPIP telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) namun tingkat capaian baru mencapai 94,34%. Dalam hal ini, unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Kebumen sampai pada tahun 2024 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi. Sementara itu untuk capaian program dengan 3 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

40. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.207.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Kesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	71,43	100	100%	ST	78,57	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah per 100.000 penduduk	317,53	55,93	380,47	100%	ST	133,79	100%	ST
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	%	64,00	69,38	75,85	100%	ST	69,38	100%	ST
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	jumlah per 100.000 penduduk	492,43	75	536,05	100%	ST	129,15	100%	ST
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100,00	71,43	100	100%	ST	78,57	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: Bakesbangpol, 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2024 menunjukkan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 5 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPD, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 5 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%..

41. Kewilayahan

Tabel 2.208.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Program Kewilayahan

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPD 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	%	89,85	87,00	90,67	100%	ST	89,00	100%	ST
Rata-rata Capaian Urusan RKPD 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Urusan RPJMD s.d. 2024	100%	ST
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	89,85	87,00	90,67	100%	ST	89,00	100%	ST
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	%	88,14	86,00	88,35	100%	ST	88,00	100%	ST
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	%	100	100	100	100%	ST	100	100%	ST

Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Status Predikat Kinerja RKPd 2024	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2024	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	71,49	34,04	88,64	100%	ST	42,09	100%	ST
Rata-rata Capaian Program RKPd 2024						100%	ST	Rata-rata Capaian Program RPJMD s.d. 2024	100%	ST

Sumber: SETDA, Dinas PMD, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan, 2024

Capaian kinerja RKPd Tahun 2024 menunjukkan urusan kewilayahan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 4 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

Seperti halnya capaian pada RKPd, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024** juga menunjukkan urusan kewilayahan dengan 1 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian program dengan 4 indikator telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan tingkat capaian telah mencapai 100%.

2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah permasalahan prioritas dari beberapa permasalahan pembangunan yang ada di daerah. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah meliputi permasalahan pembangunan multisektor yang akan diintervensi melalui cross cutting strategy dengan mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing serta beberapa aspek pelayanan umum yang terkait dengan sasaran dan prioritas daerah. Selain itu juga terdapat permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

Mendasari hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing serta beberapa aspek pelayanan umum yang terkait dengan sasaran dan prioritas daerah dapat ditentukan permasalahan pembangunan daerah yang bersifat makro dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yaitu:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan.

Kabupaten Kebumen masih menjadi Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini didukung dengan beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

1.a. Kenaikan garis kemiskinan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus merangkak naik dari Rp.380.557,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.471.824,00 pada Tahun 2024. Walaupun kenaikan garis kemiskinan dapat berarti terjadinya peningkatan standar hidup, namun disisi lain kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan garis kemiskinan. Untuk itu kenaikan garis kemiskinan seharusnya diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

1.b. Masih rendahnya PDRB perkapita sebagai proksi masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kinerja PDRB per kapita Kabupaten Kebumen selama Tahun 2020-2023 terus meningkat dari Rp.20,8 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp.27,29 Juta pada Tahun 2024. Akan tetapi, secara umum PDRB per kapita Kabupaten Kebumen masih lebih rendah baik dibandingkan Kabupaten yang berbatasan maupun dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

1.c. Masih rendahnya pengeluaran perkapita sebagai proksi masih rendahnya daya beli masyarakat Kebumen.

Berdasarkan data BPS menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp.8.910.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.10.176.000,00 pada Tahun 2024. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan pengeluaran per kapita dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen.

1.d. Pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk dimana pengeluaran dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk. Walaupun PDRB masih didominasi konsumsi rumah tangga, namun secara umum pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan. Hal ini terlihat dari proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun di atas 51% bahkan meningkat menjadi 53.30% pada Tahun 2024 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih berada di kelompok menengah kebawah yang baru mampu memenuhi kebutuhan dasar (primer) sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masih terbatas.

1.e. Masih rendahnya penempatan pencari kerja serta keterserapan tenaga kerja

Walaupun jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada Tahun 2022 yaitu mencapai 12.459 orang atau sekitar 82,49% berhasil ditempatkan atau mendapat pekerjaan, namun sejak Tahun 2023 justru mengalami penurunan hingga hanya mencapai 3.553 orang atau 26,02% pada Tahun 2024. Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja cenderung sepertinya sejalan dengan capaian jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada Tahun 2022 yaitu mencapai 57,29% berhasil terserap atau memiliki pekerjaan, namun kemudian cenderung menurun hingga mencapai 37,56% pada Tahun 2024. Situasi perekonomian global hingga daerah yang tidak menentu sebagai dampak lanjutan Pandemi Covid-19, fenomena ekonomi digital, inflasi hingga deflasi menyebabkan banyak perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan melakukan PHK dikarenakan beberapa perusahaan bahkan harus tutup. Selain itu pesatnya perkembangan teknologi juga mampu menggeser keberadaan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti halnya pekerjaan yang dikerjakan oleh *artificial intelligence* semakin mempengaruhi jumlah lapangan kerja yang tersedia atau semakin membutuhkan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu.

1.f. Tingginya tingkat pekerja informal.

Sektor formal lebih dimungkinkan dapat memberikan jaminan atas pekerjaan yang bersifat tetap hingga adanya jaminan sosial bagi kesejahteraan pegawainya dibandingkan sektor informal. Namun demikian dikarenakan rendahnya keterserapan tenaga kerja khususnya pada sektor formal, menyebabkan beralih ke sektor informal. Hal ini ditunjukkan dengan persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 30,21% pada Tahun 2020 menjadi 25,50% pada Tahun 2024. Hal ini juga menyebabkan persentase tenaga kerja informal cenderung meningkat dan semakin mendominasi hingga Tahun 2024 mencapai 74,50%.

1.g. Belum optimalnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercermin dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cenderung menurun dari 54% pada Tahun 2022 menjadi 53,71% pada Tahun 2024. Hal ini disebabkan masih banyak yang berkerja di sektor informal serta terjadinya penutupan 4 perusahaan selama Tahun 2024 yang menyebabkan terjadinya PHK terhadap 252 orang tenaga kerja.

1.h. Masih rendahnya TPAK Perempuan.

TPAK laki-laki cenderung lebih besar dari perempuan dimana hingga Tahun 2024 TPAK perempuan hanya sebesar 66,46% dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 88,08%. Hal ini kemungkinan dapat terjadi dikarenakan:

- a. Masih terdapat peran gender tradisional dimana perempuan lebih berperan pada urusan domestik/rumah tangga sehingga tidak aktif sebagai angkatan kerja;
- b. Perempuan mungkin masih memiliki akses yang lebih terbatas pada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja;
- c. Perempuan mungkin menghadapi kesenjangan upah atau tidak tertarik memasuki pasar tenaga kerja karena pekerjaan tertentu kurang menguntungkan;
- d. Tugas dan tanggung jawab sebagai perempuan (ibu) dapat mempengaruhi persepsi penerima kerja dalam mempekerjakan perempuan serta masih belum optimalnya fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak atau kebijakan cuti melahirkan yang memadai dapat membatasi partisipasi perempuan di tempat kerja; serta
- e. Perempuan mungkin masih menghadapi budaya dan norma sosial yang membatasi mobilitas dan pilihan pekerjaan perempuan.

1.i. Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Walaupun persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga semakin menurun hingga menjadi 0,67% dari total keseluruhan populasi penduduk di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024. Namun secara jumlah masih terdapat 9.674 orang yang masuk ke dalam golongan PMKS di Tahun 2024 yang tetap harus dapat ditangani.

1.j. Masih minimnya penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.

Data menunjukkan masih minimnya perangkat daerah, kantor kecamatan, kelurahan dan desa yang telah menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak yaitu sebesar 4,34% pada Tahun 2023 dan 2024.

1.k. Masih rendahnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, begitu juga dengan masih rendahnya akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan.

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan cenderung menurun dari 22,11% pada Tahun 2020 menjadi 18,74% pada Tahun 2024. Beberapa permasalahan pemenuhan akses air minum oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa adalah masih rendahnya *idle capacity* khususnya SPAM Keburejo rata rata tahun 2023 penyerapan konsumen 60 liter/det masih dibawah kapasitas 150 liter/detik ini berarti masih ada potensi air perpipaan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sementara itu, akses rumah tangga pedesaan terhadap air

minum perpipaan juga cenderung mengalami penurunan dari 11,62% pada Tahun 2020 menjadi 11,12% pada Tahun 2024. Penyelenggaraan sistem air minum perdesaan dikelola oleh KPSPAM, permasalahan dan kendala di setiap desa bervariasi, namun secara umum kendala penyelenggaraan air minum perdesaan yaitu terbatasnya sumber air baku dan manajemen KPSPAM yang perlu ditingkatkan. Selain itu berbeda dengan air minum PDAM, air minum perpipaan di pedesaan belum mendapatkan uji kualitas air minum sehingga belum masuk kategori air siap minum aman.

1.l. Masih rendahnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman.

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,78% pada Tahun 2020 menjadi 3,67% pada Tahun 2024 namun dengan capaian 3,67% menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kebumen belum memiliki akses sanitasi aman. Selama ini budaya masyarakat membangun *septic tank* masih pada kriteria belum layak secara fisik dengan kondisi bawah dan dinding belum kedap dan belum dilakukan penyedotan secara rutin 2-3 tahun sekali, bahkan dari segi fisik belum sesuai persyaratan yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat membangun akses sanitasi aman dan kemampuan pembiayaan masyarakat masih rendah.

1.m. Masih tingginya angka *backlog*/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen.

Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 adalah 476.112 dengan jumlah rumah yang tersedia sebesar 354.807. Ini berarti terdapat rumah tangga yang masih menumpang dengan KK induknya. Sesuai data BKKBN tahun 2020 terdapat data backlog sebanyak 64.093 dan terus meningkat menjadi 121.305 pada Tahun 2024. Berdasarkan data ini terdapat kekurangan kepemilikan rumah (*backlog*) yang sangat besar dan harus dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

1.n. Masih adanya rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Dikarenakan kondisi keuangan daerah, jumlah RTLH yang tertangani setiap tahun cenderung menurun dari 5.412 unit pada Tahun 2020 menjadi hanya 806 unit pada Tahun 2024. Namun demikian sisa RTLH yang belum tertangani terus menurun jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar 26.342 unit menjadi 22.460 unit pada Tahun 2024. Walaupun menurun pada Tahun 2021 jika dibandingkan Tahun 2020, persentase rumah layak huni cenderung meningkat kembali dari 92,58% pada Tahun 2021 menjadi 93,67% pada Tahun 2024. Hal ini selaras dengan persentase RTLH yang cenderung menurun mulai Tahun 2021 sebesar 7,42% menjadi 6,33% pada Tahun 2024. Sementara persentase RTLH tertangani meningkat dari 19,48% pada Tahun 2020 menjadi 64,56% pada Tahun 2024.

1.o. Menurunnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.

Secara umum akses hunian layak diukur dengan ketentuan rumah layak huni, akses air minum layak dan akses sanitasi layak. Dalam hal rumah layak huni diukur dengan ketahanan bangunan yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah yang memenuhi syarat serta kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m². Berdasarkan data Susenas menunjukkan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak cenderung menurun dari 93,96% pada Tahun 2020 menjadi 69,80% pada Tahun 2024. Indikator ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sektor perumahan. Semakin rendah persentase rumah tangga yang menghuni

hunian layak maka semakin menurun tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sektor perumahan.

1.p. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.

Hal ini ditunjukkan dengan luas permukiman kumuh perkotaan yang tertangani dari 52,35 Ha pada Tahun meningkat menjadi 125,92 Ha pada Tahun 2024. Sehingga, luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani semakin berkurang dari 290,92 Ha pada Tahun 2020 menjadi 217,35 Ha pada Tahun 2024. Dengan demikian, persentase wilayah kumuh perkotaan juga semakin berkurang dari 5,04% pada Tahun 2020 menjadi 3,76% pada Tahun 2024.

2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

2.a. Masih terdapat kasus *stunting*.

Selain AKI dan AKB, status gizi masih perlu menjadi perhatian. Dimana hal ini ditandai masih ditemukannya kasus balita gizi kurang, balita gizi buruk dan tingginya angka *stunting*. Persentase balita gizi kurang pada tahun 2020 mencapai 0,55% dan meningkat menjadi 4,8% pada Tahun 2024. Sementara itu, persentase balita gizi buruk sempat meningkat dari 0,02% pada Tahun 2020 hingga mencapai 0,059% pada Tahun 2023 dan dapat menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 0,02%. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut eletronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (*e-PPGBM*) prevalensi *stunting* Kabupaten Kebumen sebesar 15,34 dan terus menurun menjadi 9,17 pada Tahun 2024. Sedangkan jumlah penderita *stunting* juga relatif menurun dari 10.484 orang pada Tahun 2020 menjadi 6,752 pada Tahun 2024.

2.b. Masih terdapat penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) yang mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. PoU Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 12,55% pada Tahun 2020 menjadi 9,2% pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan walaupun terus menurun, masih terdapat 9,2% dari total penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pangan dan gizi, seperti melalui bantuan pangan, subsidi atau peningkatan produksi pangan lokal. Dampak kekurangan gizi seperti ini juga dapat menurunkan produktivitas, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial seperti tingginya beban kesehatan masyarakat.

2.c. Belum seimbangya kualitas konsumsi pangan ditunjukkan pada skor PPH yang masih di bawah standar pada beberapa kelompok pangan.

Berdasarkan hasil analisis Skor PPH selama 5 tahun terakhir, capaian Skor PPH Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 87% pada Tahun 2020 menjadi 93,5% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dengan skor PPH telah melebihi 90% menunjukkan pola konsumsi pangan Kabupaten Kebumen sudah mendekati ideal atau seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi yang dilanjutkan. Capaian ini merupakan akumulasi dari

berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditandai dengan penurunan konsumsi beras, serta diimbangi penambahan konsumsi sayur, buah, umbi dan protein hewani. Skor PPH Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 menunjukkan adanya beberapa kelompok pangan yang masih berada di bawah standar PPH yakni umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula. Selain padi-padian serta minyak dan lemak yang selalu sesuai standar PPH, konsumsi sayur dan buah juga telah mencapai standar PPH sejak Tahun 2022.

2.d. Masih rendahnya angka konsumsi ikan.

Walaupun cenderung fluktuatif, angka konsumsi ikan cenderung meningkat dari 22,46 kg/kapita/tahun pada Tahun 2020 menjadi 28,08 kg/kapita/tahun pada Tahun 2024. Namun demikian angka ini masih jauh jika dibandingkan target ideal konsumsi ikan yang ditetapkan pemerintah pusat pada Tahun 2024 yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun.

2.e. Masih rendahnya ketersediaan pangan.

Hal ini tercermin dari persentase ketersediaan pangan yang relatif meningkat dari 6,4% pada Tahun 2020 melonjak naik menjadi 33,42% pada Tahun 2024. Namun demikian dengan angka baru sebesar 33,42% menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Kebumen masih dipasok dari luar daerah.

2.f. Masih terjadi Angka Kematian Ibu (AKI).

Pasca Pandemi Covid-19, jumlah kasus kematian ibu kembali menurun hingga sebanyak 15 kasus pada Tahun 2024. Namun perhitungan AKI justru menunjukkan hal sebaliknya yaitu cenderung meningkat dari 76,75 pada Tahun 2020 menjadi 108,96 pada Tahun 2024 dikarenakan pembandingnya yaitu jumlah kelahiran menurun. Sementara itu penyebab kasus kematian ibu pada Tahun 2024 antara lain dikarenakan perdarahan sebanyak 4 kasus, kelainan jantung pembuluh darah 4 kasus, hipertensi pada kehamilan sebanyak 3 kasus, infeksi 1 kasus, dan lain –lain 3 kasus. Faktor faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) terpadu yang sesuai standar; belum semua faskes jejaring Puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri, Bidan Praktek Mandiri) yang belum berkolaborasi dengan Puskesmas dalam pelaksanaan ANC Terpadu; masih banyak ibu hamil yang resiko tinggi; serta asih banyak ibu hamil dengan penyakit penyerta.

2.g. Masih tingginya Angka Kematian Bayi.

Data menunjukkan jumlah kasus kematian bayi terus meningkat selama periode 2020-2023 yaitu dari 136 kasus pada Tahun 2020 menjadi 203 kasus pada Tahun 2023, namun demikian berhasil turun kembali menjadi 144 kasus pada Tahun 2024. Hal yang sama juga tercermin pada AKB yang meningkat dari 6,96 pada Tahun 2020 menjadi 12,49 pada Tahun 2023, namun dapat menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 10,46. Kasus penyebab kematian bayi diantaranya disebabkan oleh kasus hipertensi tinggi serta adanya edaran terminasi kehamilan usia 33 minggu pada indikasi pre eklamsi sehingga meningkatkan berat badan lahir rendah dan resiko keamatan.

2.h. Belum optimalnya eliminasi tuberkulosis

Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Kasus tuberkulosis di Kabupaten Kebumen menunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis cenderung fluktuatif dari 71% pada Tahun 2020 sempat menjadi 101,66% pada Tahun 2022 namun turun kembali menjadi 74% pada Tahun 2024. Indikator ini

adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Oleh karena itu tinggi rendahnya cakupan ini sangat tergantung dari upaya penemuan kasus TB maupun keberhasilan pengobatannya. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis cenderung meningkat dari 86% pada Tahun 2020 menjadi 116% pada Tahun 2024 yang menunjukkan adanya keberhasilan pengobatan pada penderita yang tercatat mengidap tuberkulosis pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pengobatan TB mengalami beberapa kendala diantaranya kurang disiplinnya pasien dalam mengikuti proses pengobatan sesuai standar serta terjadinya kasus resistensi obat.

2.i. Masih rendahnya tingkat capaian pendidikan.

Hal ini tercermin dari Indeks Pendidikan yang mengukur tingkat pencapaian pendidikan suatu populasi yang diperoleh dari perhitungan komponen IPM dimensi pendidikan yaitu RLS dan HLS. Dalam perhitungannya batas atas untuk RLS adalah 15 tahun (setara dengan tingkat Pendidikan sarjana) dan untuk HLS adalah 18 tahun (perkiraan maksimum dalam sistem pendidikan formal). Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen relatif meningkat dari 62,20 pada Tahun 2020 menjadi 63,34 pada Tahun 2024. Dengan capaian baru sekitar 63,34 menunjukkan perlu upaya peningkatan RLS maupun HLS agar mencapai skala maksimum 100 yaitu RLS sebesar 15 tahun dan HLS sebesar 18 tahun.

2.j. Masih lemahnya kinerja RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen.

Kinerja RLS Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 7,54 pada Tahun 2020 menjadi 7,87 pada Tahun 2024. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,87 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten tetangga, menunjukkan RLS Kabupaten Kebumen masih di bawah Kabupaten Purworejo dan Banyumas serta juga masih di bawah tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan kinerja selama Tahun 2023-2024 yang hanya mengalami kenaikan 0,01 menunjukkan kalah cepat dengan kinerja Kabupaten Banyumas dan Purworejo serta Nasional. Masih lemahnya kinerja RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2020-2023. Faktor penghambat kinerja RLS di Kabupaten Kebumen selain kondisi sosial dan ekonomi beberapa kelompok masyarakat, adalah masih rendahnya RLS pada penduduk usia tua ataupun lanjut usia dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH).

2.k. Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Walaupun proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (yang merupakan usia angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan terjadi peningkatan dari 5,94% pada Tahun 2023 menjadi 7,96% pada Tahun 2024, namun proporsi ini masih sangat kecil yang menggambarkan kualitas SDM Kabupaten Kebumen.

2.l. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan.

Walaupun relatif masih rendah, pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Hal ini tercermin dari tingkat pemanfaatan perpustakaan yang terus membaik dari hanya 6,06% pada Tahun 2020 menjadi 31,45% pada Tahun 2024. Upaya

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat terus dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang terus meningkat dari 12,39 pada Tahun 2020 hingga menjadi 18,95 pada Tahun 2023 namun turun menjadi 16,91 pada Tahun 2024. Sedangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk meningkat dari 0,99 pada Tahun 2020 menjadi 1,03 pada Tahun 2024.

2.m. Masih terdapat kesenjangan pemberdayaan gender bagi perempuan.

IDG Kabupaten Kebumen relatif membaik dari 66,89 pada Tahun 2020 menjadi 69,71 pada Tahun 2024 yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan gender yang perlu diperbaiki. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga cenderung meningkat dari 54,76% pada Tahun 2020 menjadi 59,65% pada Tahun 2023, sedangkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD juga meningkat dari 22% pada Tahun 2020 menjadi 24% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga parlemen tingkat Kabupaten Kebumen masih berada di bawah 30 persen. Peningkatan partisipasi perempuan perlu terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait peraturan perundang-undangan yang pro perempuan maupun anak. Terkait partisipasi perempuan di lembaga swasta juga cenderung menurun dari 34,36% pada Tahun 2020 menjadi 32,97% pada Tahun 2024.

2.n. Masih terdapat kekerasan pada perempuan dan anak.

Walaupun persentase kekerasan terhadap perempuan sempat meningkat dari 0,005% pada Tahun 2020 menjadi 0,010% pada Tahun 2023, namun dapat kembali menurun di Tahun 2024 menjadi sebesar 0,007%. Sementara persentase kekerasan terhadap anak sempat menurun dari 0,022% pada Tahun 2020 menjadi 0,014% pada Tahun 2023, namun sedikit meningkat pada Tahun 2024 menjadi 0,016%.

2.o. Masih cukup tinggi angka kasus perkawinan anak.

Jumlah perkawinan anak di bawah usia 19 Tahun di Kabupaten Kebumen masih terjadi walaupun cenderung menurun hingga pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 165 kasus.

2.p. Belum optimalnya kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen.

Tingkat kualitas keluarga tercermin dari Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai alat pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Kinerja iBangga Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 58,67 pada Tahun 2022 menjadi 63,17 pada Tahun 2024. Walaupun meningkat, dengan masih berada di bawah nilai 70 menunjukkan kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen baru masuk pada kategori cukup baik atau berkembang. Perlu peningkatan upaya agar dapat masuk kategori baik dengan nilai lebih dari 70.

3. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

3.a. Terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi

Sepanjang Tahun 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen terus membaik. Dimulai dengan kontraksi sebesar -1,46% pada Tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19, pertumbuhan

ekonomi Kebumen terus menguat dalam nilai positif dengan puncaknya pada Tahun 2022 sebesar 5,79%, walaupun kemudian mengalami pelemahan selama periode Tahun 2022-2024 hingga mencapai 5,30% pada Tahun 2024.

3.b. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan.

Berdasarkan data Satkernas yang menunjukkan status pekerjaan di Kabupaten Kebumen menunjukkan orang yang berusaha dibantu buruh tetap cukup fluktuatif. . Sempat meningkat pada Tahun 2022, namun kemudian terus menurun dan pada Tahun 2024 tinggal sebesar 10.129 orang. Orang yang berusaha dibantu buruh tetap adalah jenis usaha yang mempekerjakan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan memiliki jaminan kerja secara berkelanjutan, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Usaha yang dimaksud dapat berbentuk badan usaha maupun tidak/belum berbentuk badan usaha. Penurunan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap terjadi dikarenakan situasi perekonomian global hingga daerah yang tidak menentu sebagai dampak lanjutan Pandemi Covid-19, fenomena ekonomi digital, inflasi khususnya pada Tahun 2022 hingga deflasi. Hal tersebut menyebabkan banyak usaha/perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan penurunan skala usaha, efisiensi operasional, perubahan status tenaga kerja yang dipekerjakan (misal buruh tetap menjadi pekerja kontrak, *outsourcing*, atau *freelance*) hingga penutupan usaha. Hal ini berdampak terhadap rasio kewirausahaan di Kabupaten Kebumen yang sempat mencapai 4,06% pada Tahun 2022, kemudian terus menurun menjadi hanya 1,18% pada Tahun 2024 yang merupakan angka terendah sejak Tahun 2020.

3.c. Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah serta masih sedikitnya industri besar.

Jumlah industri kecil dan menengah hanya bertambah 58 unit selama periode Tahun 2020-2024 sehingga mencapai 56.466 unit pada Tahun 2024 yang menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan/penambahan industri kecil dan menengah. Sementara itu, jumlah industri besar baru mencapai 4 unit hingga Tahun 2024 yang menunjukkan masih sedikitnya industri besar.

3.d. Masih rendahnya volume usaha dan kualitas perkoperasian di Kabupaten Kebumen.

Cakupan koperasi aktif terus meningkat dari 84,68% pada Tahun 2020 menjadi 91,29% pada Tahun 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi. Walaupun keaktifan koperasi semakin meningkat, berdasarkan data ODS menunjukkan peningkatan koperasi berkualitas di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 54,03% pada Tahun 2020 menjadi 42,29% pada Tahun 2024. Penurunan ini diantaranya dikarenakan oleh penurunan volume usaha dan aset sesuai dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Terkait nilai volume usaha koperasi sempat mencapai puncak pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.850.290.612.000,00 namun setelah itu cenderung menurun hingga mencapai Rp.496.976.951.000,00 pada Tahun 2024. Hal ini menyebabkan rasio nominal volume usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kebumen sempat meningkat hingga 2,61% pada Tahun 2022 namun kemudian turun kembali menjadi 1,29% pada Tahun 2024. Dengan rasio tersebut menunjukkan masih rendahnya volume usaha koperasi.

3.e. Menurunnya produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya.

Selain sebagai bahan pangan utama, Kabupaten Kebumen juga masih menjadi lumbung padi nasional. Namun demikian, produktivitas padi cenderung mengalami penurunan dari 6,08 ton/ha pada Tahun 2020 menjadi 5,67 ton/ha pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena anomali cuaca menyebabkan mundurnya musim tanam. Sementara itu, 5 komoditas bahan pangan utama lokal juga mengalami penurunan produktivitas dari 5,72 ton/ha pada Tahun 2020 menjadi 5,61 ton/ha pada Tahun 2024.

3.f. Menurunnya volume produksi perikanan tangkap.

Data menunjukkan produksi perikanan tangkap terus meningkat dari 9.068.530,00 kg pada Tahun 2020 menjadi 12.898.015,49 kg pada Tahun 2023, namun menurun pada Tahun 2024 menjadi 9.522.860 kg atau turun sebesar 26,17% antara periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024.

3.g. Menurunnya volume produksi garam.

Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi produksi garam. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir produksi garam cenderung menurun dari 144.620,00 kg pada Tahun 2020 menjadi hanya 54.110,00 kg pada Tahun 2024 atau turun sebesar -62,58% antara periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

3.h. Masih rendahnya daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen.

Hal ini bisa dilihat dari *net* ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya yaitu dari -7,36% pada Tahun 2020 menjadi -3,71% pada Tahun 2024. Angka minus menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Dapat juga berarti lebih banyak uang yang keluar daerah dibandingkan ke dalam daerah dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dengan berbelanja ke wilayah perkotaan besar utamanya di dekat Kabupaten Kebumen seperti Yogyakarta atau Purwokerto serta cukup tingginya aktivitas membeli barang secara *online* dengan *marketseller* berasal dari luar Kabupaten Kebumen. *Net* ekspor yang masih negatif juga dapat menunjukkan masih lemahnya daya saing produk/komoditas yang dihasilkan di dalam daerah yang disebabkan oleh biaya produksi tinggi (kurang efisien), kualitas dan diversifikasi produk rendah serta masih lemahnya pemasaran. Untuk itu investasi yang dapat menghasilkan produk/komoditas lokal yang berdaya saing sangat dibutuhkan oleh perekonomian Kabupaten Kebumen.

3.i. Menurunnya rata-rata lama tinggal wisatawan.

Pengembangan pariwisata menjadi sangat penting bagi Kabupaten Kebumen dikarenakan selain memiliki sumber daya alam dan budaya yang potensial dalam pengembangan pariwisata, juga dikarenakan *Geopark* Kebumen telah disahkan sebagai UNESCO *Global Geopark* pada Tahun 2025. Kinerja pariwisata juga cukup menggembirakan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Namun demikian, rata-rata lama tinggal wisatawan cenderung menurun sejak Tahun 2022 hingga menjadi 1,29 hari pada Tahun 2024. Untuk itu perlu diwujudkan paket wisata yang terintegratif agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Kebumen. Sementara

itu, tingkat hunian akomodasi seperti hotel dan tempat penginapan tetap meningkat dari 23,09% pada Tahun 2020 menjadi 53,97% pada Tahun 2024 karena didorong aktivitas lain seperti MICE (*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*). Namun dengan tingkat hunian masih sedikit di atas 50% menunjukkan tingkat hunian belum optimal karena menurut patokan umum berdasarkan tren industri perhotelan menunjukkan tingkat hunian 60-70% pada banyak kasus dianggap baru menguntungkan untuk di wilayah kota kecil.

3.j. Kontribusi investasi bagi PDRB masih rendah yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Tingkat investasi memberikan kontribusi bagi PDRB cenderung menurun setiap tahunnya dari 22,71% pada Tahun 2020 menjadi 20,43% pada Tahun 2024 yang menunjukkan tingkat investasi relatif masih rendah, sehingga potensi untuk meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang dan kemampuan memberikan efek multiplier menjadi terbatas. Hal ini juga dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang tahan terhadap guncangan eksternal, karena investasi adalah salah satu motor penggerak utama inovasi dan produktivitas. Disisi lain perubahan inventori juga sangat kecil hanya sekitar 1,8% setiap tahunnya yang dapat menunjukkan produsen terbatas dalam melakukan ekspansi bisnis sehingga skala usahanya relatif stagnan, begitu juga upaya penyerapan tenaga kerja juga stagnan. Idealnya menurut Bank Dunia dan IMF, proporsi investasi terhadap suatu perekonomian yang masih berkembang minimal di kisaran 30% agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Untuk peningkatan investasi masih sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kebumen.

3.k. Masih rendahnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen termasuk perbankan BUMD.

Kondisi likuiditas utamanya perbankan di Kabupaten Kebumen dapat tercermin diantaranya dari kondisi dana pihak ketiga (simpanan) dan kredit (pinjaman) di perbankan yang berada di Kabupaten Kebumen. Rasio total dana pihak ketiga pada seluruh bank umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB menunjukkan kecenderungan menurun dari 23,60% pada tahun 2020 menjadi 17,44% pada Tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin berkurangnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memberikan kredit dan menjalankan operasionalnya secara optimal. Hal yang sama juga terjadi pada rasio total dana pihak ketiga pada Bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB yang cenderung menurun dari 1,93% pada Tahun 2020 menjadi 1,59% pada Tahun 2023. Untuk itu perlu ditingkatkan literasi keuangan bagi masyarakat luas untuk dapat menyimpan kelebihan dana atau asetnya pada lembaga keuangan seperti perbankan. Sementara itu, rasio total kredit pada Bank Umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB mengalami fluktuasi hingga hanya mencapai 15,01% pada Tahun 2024. Sedangkan rasio total kredit pada Bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB cenderung menurun dari 1,54% pada Tahun 2020 menjadi 1,43% pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya fungsi perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.

3.1. Masih rendahnya kapabilitas inovasi daerah.

Kinerja kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami kenaikan dari 2,00 pada Tahun 2020 menjadi 2,30 pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan kinerja IDSD secara keseluruhan dan masih masuk pada kategori sedang yang dapat berarti kapabilitas inovasi telah memadai namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki seperti efisiensi pemerintah, aksesibilitas infrastruktur atau kualitas tenaga kerja. Sementara itu, kinerja IDSD Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 3,10 pada Tahun 2020 menjadi 3,41 pada Tahun 2023 yang menunjukkan masuk dalam kategori sedang-tinggi dan dapat diartikan kinerja baik tetapi masih memiliki ruang untuk peningkatan di beberapa komponen. Namun demikian beberapa hal masih harus menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan produktivitas yang berdaya saing.

4. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah.

4.a. Belum mantapnya infrastruktur daerah

Data menunjukkan indeks infrastruktur daerah terus meningkat dari 46,53% pada Tahun 2020 menjadi 68,85% pada tahun 2024. Hal ini ditunjang oleh kenaikan ketiga komponennya yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang meningkat dari 56,15% pada Tahun 2020 menjadi 59,00% pada Tahun 2024. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastruktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman menunjukkan peningkatan tajam dari 11,89% pada Tahun 2020 menjadi 71,16% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan meningkat dari 71,56% pada Tahun 2020 menjadi 75,78% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan kinerja sampai dengan Tahun 2024 baru mencapai 68,85% menunjukkan perlunya peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infrastruktur daerah.

4.b. Terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap.

Hingga Tahun 2024 terdapat 411,814 km jalan kabupaten dalam kondisi baik atau 40,49%, dalam kondisi sedang sepanjang 335,543 km atau 32,99%, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 166,827 km atau 16,40% dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 102,966 km atau 10,12%. Dari data tersebut menunjukkan persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten hingga Tahun 2024 sebesar 73,48% yang diperoleh dari proporsi baik ditambah proporsi sedang. Dengan proporsi lebih dari 70% menunjukkan infrastruktur jalan telah cukup baik dan tidak mengganggu fungsi jalan secara signifikan. Namun demikian masih terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati *over dimensi* dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas.

4.c. Kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun kondisi sedang terus menurun.

Hal ini dapat dilihat dari jembatan dalam kondisi baik yang menurun dari 375 unit atau 49,21% pada Tahun 2020 menjadi hanya 44 unit atau 6,91% pada Tahun 2024. Jembatan dalam kondisi baik ini menurun kualitasnya menjadi dalam kondisi sedang yang cukup fluktuatif dari 320 unit atau 41,99% pada Tahun 2020 menjadi 185 unit atau 29,04% pada Tahun 2024. Sementara itu, kondisi rusak ringan cenderung meningkat dari 17 unit pada Tahun 2020 atau 2,23% pada Tahun 2020 menjadi 388 unit atau 60,91% pada Tahun 2024. Sedangkan kondisi rusak berat cenderung turun dari 50 unit atau 6,56% pada Tahun 2020 menjadi 20 unit atau 3,14% pada Tahun 2024.

4.d. Belum optimalnya cakupan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen.

Kondisi Ideal pada jalan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda-beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen terus meningkat dari 33,62% pada Tahun 2020 menjadi 60,67% pada Tahun 2024. Dengan capaian ini masih perlu dioptimalkan ke depan.

4.e. Kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga Tahun 2024 yaitu irigasi teknis sekunder sepanjang 186.105 meter dan irigasi teknis tersier sepanjang 28.300 meter. Dari data tersebut menunjukkan proporsi irigasi dalam kondisi baik terus meningkat dari 73,7% pada Tahun 2020 menjadi 78,75% pada Tahun 2024, sedangkan proporsi irigasi kondisi sedang relatif menurun dari 1,73% pada Tahun 2020 menjadi 1,4% pada Tahun 2024. Sementara itu, irigasi kondisi rusak ringan relatif meningkat dari 1,06% pada Tahun 2020 menjadi 1,17% pada Tahun 2024 dan irigasi kondisi rusak berat menurun dari 23,51% pada Tahun 2020 menjadi 18,67% pada Tahun 2024. Secara menyeluruh, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) pada Tahun 2024 telah mencapai 59,21%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan nilai indeks sebesar 59,21% maka kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

5. Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

5.a. Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama dikarenakan masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks

Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang. IKA masih cukup rendah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami.

5.b. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen memang cenderung menurun dari 47,65% pada Tahun 2020 menjadi 25,69% pada Tahun 2024. Penurunan persentase sampah terangkut dikarenakan tidak aktifnya layanan angkut oleh beberapa Tempat Pengolahan Sampah (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan hal ini tercermin melalui upaya peningkatan gerakan 3R yang mengalami peningkatan dari 20,33% pada Tahun 2020 menjadi 53,59% pada Tahun 2024, namun dengan capaian sedikit di atas 50% menunjukkan kinerja yang belum optimal. Selain itu data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah juga mengalami peningkatan dari 37,38% pada Tahun 2020 menjadi 53,27% pada Tahun 2024, namun dengan capaian sedikit di atas 50% menunjukkan kinerja yang belum optimal.

5.c. Belum optimalnya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

Sejak Tahun 2023 melalui aplikasi AKSARA dari pemerintah pusat, telah mulai dihitung penurunan emisi GRK yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO₂eq pada Tahun 2023 menjadi 151.888,21 TonCO₂eq pada Tahun 2024. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada Tahun 2025 yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 206.765,97 TonCO₂eq. Target Tahun 2025 ini sendiri ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan Kabupaten Kebumen terhadap komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK.

5.d. Terjadinya peningkatan risiko terhadap bencana.

IRBI Kabupaten Kebumen cenderung meningkat yang menunjukkan lebih meningkat risiko terhadap bencana yaitu dari 114,67 pada Tahun 2020 menjadi 121,38 pada Tahun 2024. Untuk meminimalisir risiko bencana, dari ketiga komponen pembentuk IRBI dapat diupayakan dengan menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas Kabupaten Kebumen dalam mengelola bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mencapai 0,87 pada Tahun 2024 dimana perlu memaksimalkan peningkatan 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.

6. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

6.a. Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan dalam IRB yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) pelayanan publik. Hal ini cukup berdampak pada pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang terus meningkat dari 58,4 pada Tahun 2020 menjadi 79,91 pada Tahun 2023. Dengan meningkatnya IRB, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Untuk upaya peningkatan implementasi IRB perlu terus dilakukan agar indeks IRB bias meningkat menuju kategori Sangat Baik (80-89) bahkan kategori Memuaskan (90-100). Sementara itu, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen juga dianggap terus membaik oleh Kementerian PAN-RB dengan terus meningkatnya indeks pelayanan publik Kabupaten Kebumen dari 4,23 pada Tahun 2021 menjadi 4,59 pada Tahun 2024. Indeks ini diukur dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarpras pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

6.b. Masih belum optimalnya kinerja instansi pemerintah yang tercermin dari nilai SAKIP.

Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 63,84 pada Tahun 2020 menjadi 67,54 pada Tahun 2024 atau masuk kategori B/Baik (Nilai > 60 – 70). Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja diantaranya pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

6.c. Masih diperlukan optimalisasi pencegahan korupsi.

Nilai persepsi korupsi sempat meningkat dari Tahun 2020 sebesar 3,34 menjadi 3,90 pada Tahun 2023 namun turun pada Tahun 2024 menjadi 3,75 yang masih masuk kategori Bersih dari Korupsi. Penurunan dikarenakan adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun. Hal ini sejalan dengan Indeks Integritas Nasional untuk Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas menunjukkan kinerja yang meningkat dari 76,46 pada Tahun 2021 menjadi 78,19 pada Tahun 2023 namun juga turun menjadi 75 pada Tahun 2024 dan masuk dalam kategori Waspada. Penurunan terjadi dikarenakan alasan yang sama yaitu adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun.

6.d. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah.

Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil hanya di kisaran 7-8% setiap tahun yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah ini terdiri dari pengeluaran semua tingkat pemerintah dari pusat, daerah hingga desa dengan fokus dan lokus program di wilayah Kabupaten Kebumen, diluar belanja modal yang tercatat sebagai PMTB. Persentase pengeluaran pemerintah di wilayah Kabupaten Kebumen yang kecil dapat menunjukkan

keterbatasan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik (pemerintah). Selain itu dapat diartikan belanja pemerintah tidak cukup signifikan berdampak pada perekonomian daerah jika komponen utama PDRB lainnya (misal konsumsi rumah tangga atau investasi) menurun. Kemampuan daerah dengan lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan daerah perlu terus dioptimalkan. Namun demikian kemampuan APBD sangatlah terbatas. Hal ini tercermin dari rasio pajak daerah terhadap PDRB yang cenderung menurun dari 1,44% pada Tahun 2020 menjadi 1,25% pada Tahun 2024. Dari realisasi APBD juga terlihat masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah yang juga cenderung menurun hingga mencapai 15,44% pada Tahun 2024 menunjukkan masih lemahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga menyebabkan kapasitas fiskal yang selama 3 tahun terakhir (2022-2024) masuk kategori rendah.

6.e. Masih rendahnya jumlah desa yang telah berstatus mandiri.

Dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2024 telah mencapai 152 desa yang masuk kategori desa mandiri. Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status mandiri sejak tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan pemutakhiran data kepada desa sehingga dapat meningkatkan nilai dan juga disebabkan oleh meningkatnya pemahaman para kepala desa beserta jajarannya untuk mengisi indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing. Motivasi desa juga semakin meningkat karena bagi desa yang dapat mencapai kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja. Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,22% pada Tahun 2020 menjadi 33,85% pada Tahun 2024. Namun demikian, dengan cakupan sebesar 33,85% menunjukkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen belum optimal.

6.f. Belum optimalnya kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.

Akses masyarakat umum terhadap teknologi informasi dalam hal ini internet juga harus terus ditingkatkan karena kemudahan akses ini dapat membantu aktivitas masyarakat baik sosial, budaya maupun ekonomi. Hal ini tercermin dari persentase rumah tangga dengan akses internet yang pada Tahun 2024 telah mencakup 89,41%. Selain kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah sosial, budaya dan ekonomi di tengah masyarakat.

7. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban.

Hal ini tercermin dari cukup tingginya angka kriminalitas dan aksi unjuk rasa. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2024 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan kekerasan seksual dan pemalsuan uang. Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 masih tergolong cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan di Tahun 2024 yang merupakan tahun politik. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik. Selain itu juga terdapat tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen. Walaupun kedua pelanggaran tersebut dapat diatasi dan diselesaikan secara

penuh sebesar 100, namun hingga Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pelanggaran K3 sebesar 35.226 kasus dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah sebanyak 35.969 kasus. Selain itu juga diperlukan peningkatan kewaspadaan serta peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Hal ini dapat tercermin dari kejadian konflik SARA yang terjadi di wilayah. Kejadian konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Sepanjang tahun 2020-2024, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada Tahun 2021, 2023 dan 2024. Walaupun selalu dapat tertangani, optimalisasi pengawasan dini perlu dioptimalkan dengan memantau hubungan antar kelompok masyarakat yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan.

8. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

8.a. Masih rendahnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

Hal ini tercermin dari kinerja persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan terus meningkat dari 2,19% pada Tahun 2020 menjadi 11,50% pada Tahun 2024 dimana dengan capaian tersebut masih perlu upaya lebih untuk terus ditingkatkan.

8.b. Menurunnya pengunjung tempat bersejarah karena dianggap kurang menarik.

Jumlah pengunjung tempat bersejarah cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 112.644 orang pada Tahun 2020 menjadi 46.636 orang pada Tahun 2024 dimana data diambil dari jumlah kunjungan terhadap 10 cagar budaya seperti tercantum di atas. Penurunan kunjungan ke tempat bersejarah dikarenakan wisatawan lebih tertarik mengunjungi obyek wisata terbaru yang lebih menarik dan *instagramable* untuk ditampilkan di akun media sosial mereka

8.c. Masih rendahnya kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian.

Kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir terus sempat meningkat dari 0,21% pada Tahun 2020 menjadi 87,53% pada Tahun 2023, namun turun menjadi 46% dikarenakan penurunan penyelenggaraan even di tahun 2024 mengingat sebagai tahun politik.

2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan disusun mendasari gambaran aspek pelayanan umum serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.3.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pembangunan di sektor pendidikan memiliki fungsi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, pembangunan di sektor pendidikan di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- 1) Masih rendahnya tingkat capaian Pendidikan tercermin dari Indeks Pendidikan;
- 2) Masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
- 3) Belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) utamanya pada usia 5-6 tahun dan 16-18 tahun;
- 4) Belum optimalnya Angka Partisipasi Kasar (APK);
- 5) Masih terdapat angka putus sekolah baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs;
- 6) Perlu ditingkatkan standar kompetensi minimum siswa;
- 7) Belum optimalnya kualifikasi S1/D4 guru PAUD (formal);
- 8) Masih rendahnya satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekstrakurikuler kesenian; serta
- 9) Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

b. Kesehatan

Permasalahan di sektor kesehatan di Kabupaten Kebumen yaitu:

- 1) Masih terjadinya kasus kematian ibu;
- 2) Cukup tingginya kasus kematian bayi;
- 3) Masih terdapat kasus prevalensi *stunting*;
- 4) Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular; serta
- 5) Belum optimalnya eliminasi tuberkulosis.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kebumen yaitu:

- 1) terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati over dimensi dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas;
- 2) kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun kondisi sedang terus menurun;
- 3) kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian;
- 4) masih sedikit saluran drainase dalam kondisi baik;
- 5) masih rendahnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, begitu juga dengan masih rendahnya akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan; serta
- 6) masih rendahnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Masih tingginya angka *backlog*/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen;
- 2) Masih adanya rumah yang tidak layak huni (RTLH);
- 3) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani;
- 4) Adanya rumah terdampak bencana yang belum tertangani; serta
- 5) Menurunnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah permasalahan yang terkait dengan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

- 1) Adanya tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen;
- 2) Belum optimalnya kesiapsiagaan pemadam kebakaran;
- 3) Terjadinya peningkatan risiko terhadap bencana;

- 4) Menurunnya relawan penanggulangan bencana; serta
- 5) Masih kurangnya peralatan *Early Warning System* (EWS).

f. Sosial

Permasalahan sosial di Kabupaten Kebumen diantaranya:

- 1) Masih minimnya penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak; serta
- Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2.3.2.2. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga kerja

Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen diantaranya:

- 1) Masih rendahnya penempatan pencari kerja;
- 2) Masih rendahnya keterserapan tenaga kerja;
- 3) Masih rendahnya TPAK Perempuan;
- 4) Tingginya tingkat pekerja informal; serta
- 5) Belum optimalnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen diantaranya:

- 1) Masih terdapat kesenjangan pemberdayaan gender bagi perempuan;
- 2) Masih terdapat kekerasan pada perempuan dan anak; serta
- 3) Masih cukup tinggi angka kasus perkawinan anak.

c. Pangan

Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen diantaranya:

- 1) Masih terdapat penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi;
- 2) Masih rendahnya ketersediaan pangan; serta
- 3) Belum seimbang kualitas konsumsi pangan ditunjukkan pada skor PPH yang masih di bawah standar pada beberapa kelompok pangan.

d. Pertanahan

Berdasarkan nomenklatur yang telah diatur pada Permendagri 90/2021, bidang urusan pertanahan pada pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini tercermin dari kinerja capaian indikator persentase penanganan sengketa lahan yang setiap tahun selalu dapat terealisasi sebesar 100%. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi yang baik antar instansi Perangkat Daerah serta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari konflik sosial pertanahan dengan memfasilitasi penyelesaian pertanahan.

e. Lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan meliputi:

- 1) Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama dikarenakan masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH);
- 2) Menurunnya kemampuan penanganan sampah;
- 3) Belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
- 4) Belum optimalnya pengolahan timbulan sampah di fasilitas pengolahan sampah; serta
- 5) Belum optimalnya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi pelayanan publik yang profesional. Arah administrasi kependudukan antara lain untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan dan mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. Beberapa permasalahan administrasi kependudukan diantaranya:

- 1) Masih rendahnya penggunaan identitas kependudukan digital (KTP digital);
- 2) Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP serta cakupan perekaman KTP elektronik;
- 3) Belum optimalnya cakupan Akte Kelahiran; serta
- 4) Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Beberapa permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

- 1) Menurunnya jumlah desa berstatus swasembada;
- 2) Masih rendahnya jumlah desa yang telah berstatus mandiri; serta
- 3) Masih rendahnya BUMDes yang telah mendapatkan status tingkat maju.

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Beberapa permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya:

- 1) Masih tingginya angka *unmet need* Kabupaten Kebumen yang masih melebihi target Nasional yaitu 10%; serta
- 2) Belum optimalnya kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen.

i. Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan di antaranya:

- 1) Belum optimalnya cakupan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen;
- 2) Meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas;
- 3) Masih belum optimalnya pengoperasian terminal; serta
- 4) Semakin menurunnya jumlah angkutan umum dan izin trayek.

j. Komunikasi dan informatika

Beberapa permasalahan terkait komunikasi dan informatika diantaranya:

- 1) Belum optimalnya jangkauan fiber optik untuk mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 2) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana teknologi informasi (server, sarana-prasarana);
- 3) Belum optimalnya SDM dalam bidang IT baik di Diskominfo maupun perangkat daerah; serta
- 4) Belum optimalnya kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.

k. Koperasi, usaha kecil dan menengah

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian nasional dan daerah, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat

kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor Koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- 1) Masih rendahnya tingkat kewirausahaan; serta
- 2) Masih rendahnya volume usaha dan kualitas perkoperasian di Kabupaten Kebumen.

i. Penanaman modal

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu:

- 1) Masih rendahnya tingkat investasi di Kabupaten Kebumen;
- 2) Belum optimalnya investasi padat karya; serta
- 3) Masih rendahnya penanaman modal dalam skala investasi kategori besar.

m. Kepemudaan dan olahraga

Berikut adalah permasalahan terkait dengan kepemudaan dan olahraga:

- 1) Masih rendahnya kreativitas dan kewirausahaan pemuda dapat dilihat dari tingkat wirausaha muda yang masih rendah;
- 2) Masih minimnya jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- 3) Masih terbatasnya pembibitan atlet.

n. Statistik

Kondisi urusan statistik daerah yang baik dapat menjadi pendukung perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Meski demikian masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya:

- 1) masih rendahnya kualitas pengelolaan data di seluruh perangkat daerah;
- 2) terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola dan penganalisis data; serta
- 3) terdapat beberapa data penting yang tidak diterbitkan atau tidak ditebitkan setiap tahun oleh BPS untuk level kabupaten/kota seperti inflasi dan indeks gini, sub data/detail data agregat (seperti sub-sub sektor PDRB), serta data pada level hingga kecamatan atau desa.

o. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik dengan persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik telah mencapai 100%. Meski begitu tantangan ke depan yang perlu disiapkan yakni:

- 1) Belum optimalnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah;
- 2) Masih diperlukan perluasan cakupan penggunaan tanda tangan elektronik hingga ke semua desa/kelurahan; serta
- 3) Belum optimalnya penguatan infrastruktur teknologi informasi, kesadaran keamanan informasi, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar yang berlaku.

p. Kebudayaan

Beberapa permasalahan terkait urusan kebudayaan di antaranya:

- 1) masih rendahnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda;
- 2) menurunnya pengunjung tempat bersejarah; serta
- 3) masih rendahnya kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian.

q. Perpustakaan

Beberapa permasalahan perpustakaan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan; serta
- 2) Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat.

r. Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan yaitu masih belum optimalnya jumlah desa/kelurahan, sekolah, lembaga masyarakat dan OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku.

2.3.2.3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan urusan perikanan dan kelautan di antara yaitu:

- 1) Menurunnya volume produksi perikanan tangkap;
- 2) Menurunnya cakupan bina nelayan;
- 3) Masih rendahnya angka konsumsi ikan; serta
- 4) Menurunnya volume produksi garam.

b. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- 1) Menurunnya kontribusi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB; serta
- 2) Menurunnya produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi prioritas pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral. namun demikian pemanfaatan potensi EBT belum optimal karena terkendala investasi, inovasi dan teknologi.

d. Perdagangan

Nilai sektor perdagangan konsisten menjadi salah satu yang memiliki kontribusi cukup besar pada pendapatan daerah. Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masih rendahnya daya saing perdagangan menurut perhitungan PDRB komponen pengeluaran; serta
- 2) Masih terdapat pasar tradisional dalam kondisi kurang baik.

e. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam kurun 5 tahun terakhir kontribusi sektor industri pengolahan mencapai lebih dari 20%

terhadap PDRB. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah; serta
- 2) Masih sedikitnya industri besar.

f. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dari Pusat dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran. Kemudian permasalahan lainnya yang terjadi di Kabupaten Kebumen sebagaimana berikut:

- 1) Terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk Calon transmigrasi Kabupaten.
- 2) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi
- 3) Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran

g. Pariwisata

Pengembangan pariwisata menjadi sangat penting bagi Kabupaten Kebumen dikarenakan selain memiliki sumber daya alam dan budaya yang potensial dalam pengembangan pariwisata, juga dikarenakan *Geopark* Kebumen telah disahkan sebaga UNESCO *Global Geopark* pada Tahun 2025. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada urusan pariwisata di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menurunnya rata-rata lama tinggal wisatawan;
- 2) Belum adanya paket wisata yang terintegratif agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Kebumen; serta
- 3) Belum optimalnya tingkat hunian akomodasi.

2.3.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah Kabupaten Kebumen antara lain:

- 1) Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan manajemen kinerja;
- 3) Perlu terus ditingkatkan kualitas pelayanan publik oleh masing masing perangkat daerah; serta
- 4) Perlu dioptimalkan profitabilitas BUMD.

b. Sekretariat DPRD

Beberapa permasalahan yang ada pada fungsi Sekretariat DPRD antara lain:

- 1) Optimalisasi pengesahan Perda tepat waktu; serta
- 2) Optimalisasi Perda Inisiatif dibandingkan dengan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

c. Perencanaan

Permasalahan yang terkait dengan perencanaan antara lain:

- 1) Belum optimalnya capaian nilai perencanaan dalam SAKIP;
- 2) Belum optimalnya pencapaian kinerja IKU khususnya IKU dengan tingkat capaian terendah;
- 3) Masih lemahnya pengelolaan data yang memperlemah analisis dan perumusan kebijakan;
- 4) Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan daerah sehingga belum mampu memberikan masukan secara optimal;

- 5) Belum optimalnya inovasi daerah yang mendukung perumusan perencanaan dan kebijakan daerah;
- 6) Sangat dinamisnya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat yang menuntut kecepatan dan ketepatan perencanaan pembangunan yang dinamis; serta
- 7) Belum optimalnya kualitas dan kapabilitas SDM perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

d. Keuangan

Permasalahan yang terkait dengan keuangan antara lain:

- 1) Masih rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB;
- 2) Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah;
- 3) Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah; serta
- 4) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

e. Kepegawaian

Urusan kepegawaian memiliki tugas memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan kepuasan pegawai, dan terwujudnya budaya kerja yang berdasarkan pada prestasi dan integritas. Hal ini ditunjukkan dengan sistem merit dimana indeks sistem merit Kabupaten Kebumen terus membaik dari sebelumnya hanya 179 (kategori Kurang) kemudian dapat meningkat hingga mencapai 253,5 (kategori Baik) pada Tahun 2024. Namun demikian perlu pengoptimalan penerapan sistem merit agar bisa mencapai kategori Sangat Baik dengan nilai minimal 325 yaitu dengan penerapan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

f. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya peningkatan kapasitas ASN dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan teknis, fungsional maupun diklat jenjang kepemimpinan guna meningkatkan profesionalitas ASN terus ditingkatkan. Namun demikian keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama sehingga hanya jenis diklat tertentu yang diprioritaskan seperti diklat kepemimpinan dalam rangka mengisi jabatan struktural tertentu, prajabatan untuk CPNS (jika terdapat formasi CPNS di tahun tersebut) serta orientasi P3K. Sementara itu untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan pembelajaran *online* melalui aplikasi SINAU KEBUMEN. Hal ini dalam rangka mendukung Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 yang diantaranya menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) dalam 1 tahun.

g. Penelitian dan Pengembangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan yaitu:

- 1) Masih rendahnya kapabilitas inovasi daerah;
- 2) Perlu ditingkatkan produktivitas yang berdaya saing; serta
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan.

h. Pengawasan

Masalah yang terkait dengan unsur pengawasan pemerintahan antara lain:

- 1) Diperlukannya optimalisasi pengendalian dan pengawasan intern pemerintah; serta
- 2) Diperlukannya optimalisasi pencegahan korupsi.

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa permasalahan yang terkait kesatuan bangsa dan politik antara lain:

- 1) Masih terjadi kejadian konflik SARA;

- 2) Belum optimalnya partisipasi warga dalam Pemilu; serta
- 3) Meningkatnya demonstrasi terutama di tahun politik.

j. Kewilayahan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait unsur kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan adalah belum optimalnya pelayanan public yang diukur dari tingkat kepuasan masyarakat.

2.4. ISU STRATEGIS

Mendasari permasalahan pembangunan daerah yang telah dirumuskan di atas maka dapat diperoleh isu strategis daerah pada Tahun 2026 yang juga telah sinkron dengan Misi Daerah pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.209.

Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Tahun 2026 dengan Misi Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029

PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	MISI DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029
a. Masih tingginya tingkat kemiskinan;	a. Penanggulangan kemiskinan;	Misi 1: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Adil dan Inklusif
b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;	b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	
c. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	c. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	Misi 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah
d. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	d. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	Misi 3: Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
e. Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan;	e. Peningkatan pembangunan kawasan lingkungan;	
f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	f. Pengoptimalan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi
g. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban;	g. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;	Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub Rukun atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal
h. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.	h. Peningkatan pemajuan kebudayaan.	

1. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi masalah mendasar sekaligus isu penting bagi Kabupaten Kebumen karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan hasil yang membaik. Tingkat kemiskinan sempat kembali meningkat dari 17,59% pada Tahun 2020 menjadi 17,83% pada Tahun 2021 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19. Namun demikian dengan semakin membaiknya perekonomian daerah mampu memperbaiki kinerja tingkat kemiskinan yang terus menurun menjadi 15,71% pada Tahun 2024. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin. Walaupun sempat meningkat dikarenakan Pandemi Covid-19 dari 211.090 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 212.900 pada Tahun 2021, pasca pandemi jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 187.950 jiwa pada Tahun 2024. Akan tetapi berdasarkan tingkat kemiskinan dalam persentase masih menunjukkan Kabupaten Kebumen masih menjadi kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu beberapa hal perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Kenaikan garis kemiskinan; yang belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
2. Masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dikarenakan oleh:
 - a. Masih rendahnya PDRB perkapita sebagai proksi masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kebumen;
 - b. Masih rendahnya pengeluaran perkapita sebagai proksi masih rendahnya daya beli masyarakat Kebumen; serta
 - c. Pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
3. Terdapat permasalahan pada ketenagakerjaan yaitu:
 - a. Masih rendahnya penempatan pencari kerja serta keterserapan tenaga kerja;
 - b. Tingginya tingkat pekerja informal;
 - c. Belum optimalnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; serta
 - d. Masih rendahnya TPAK Perempuan;
4. Masih terdapat masalah sosial yaitu:
 - a. Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); serta
 - b. Masih minimnya penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
5. Masih rendahnya tingkat infrastruktur dasar masyarakat, diantaranya yaitu:
 - a. Masih rendahnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, begitu juga dengan masih rendahnya akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan;
 - b. Masih rendahnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman;
 - c. Masih tingginya angka *backlog*/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen;
 - d. Masih adanya rumah yang tidak layak huni (RTLH);
 - e. Menurunnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak; serta
 - f. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Kualitas sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting karena pembangunan pada dasarnya adalah membangun manusia itu sendiri sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat tercermin dari kinerja IPM Kabupaten Kebumen yang selama Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana sejak tahun 2020 telah mencapai lebih dari 70, yaitu sebesar 70,32, menjadi 72,48 pada Tahun 2024. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Dengan demikian sejak Tahun 2020, kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi. Namun demikian kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan mengingat semakin meningkat pula daya saing sumber daya manusia di era globalisasi seperti saat ini. Selain itu, mendasari perumusan permasalahan perlu diperhatikan berbagai hal berikut dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu:

- a. Masih terdapat permasalahan gizi dan pangan di masyarakat yaitu:
 - 1) Masih terdapat kasus *stunting*;
 - 2) Masih terdapat penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan;
 - 3) Belum seimbangnya kualitas konsumsi pangan ditunjukkan pada skor PPH yang masih di bawah standar pada beberapa kelompok pangan;
 - 4) Masih rendahnya angka konsumsi ikan; serta
 - 5) Masih rendahnya ketersediaan pangan.
- b. Masih terdapat berbagai isu kesehatan diantaranya yaitu:
 - 1) Masih terjadi Angka Kematian Ibu (AKI);
 - 2) Masih tingginya Angka Kematian Bayi; serta
 - 3) Belum optimalnya eliminasi tuberkulosis.
- c. Masih rendahnya tingkat capaian Pendidikan diantaranya dikarenakan oleh:
 - 1) Masih lemahnya kinerja Rata-rata Lama Sekolah;
 - 2) Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi; serta
 - 3) Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan.
- d. Terdapat isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga yaitu:
 - 1) Masih terdapat kesenjangan pemberdayaan gender bagi perempuan;
 - 2) Masih terdapat kekerasan pada perempuan dan anak;
 - 3) Masih cukup tinggi angka kasus perkawinan anak; serta
 - 4) Belum optimalnya kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen.

3. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah.

Kinerja perekonomian daerah terus membaik pasca Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja PDRB ADHK Kabupaten Kebumen terus meningkat dari sebesar Rp.19.527.664,95 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp. 23.837.831,97 Juta pada Tahun 2024. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kinerja PDRB ADHB Kabupaten Kebumen yang terus meningkat dari sebesar Rp. 28.014.905,70 Juta pada Tahun 2020 menjadi Rp. 38.605.460,47 Juta pada Tahun 2024. Namun demikian berbagai masalah, tantangan sekaligus potensi perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen diantaranya:

- a. Masih rendahnya produktivitas ekonomi daerah dikarenakan oleh:
 - 1) Terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Masih rendahnya tingkat kewirausahaan;
 - 3) Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah serta masih sedikitnya industri besar;
 - 4) Masih rendahnya volume usaha dan kualitas perkoperasian di Kabupaten Kebumen;
 - 5) Menurunnya produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya;
 - 6) Menurunnya volume produksi perikanan tangkap; serta
 - 7) Menurunnya volume produksi garam;
- b. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah diantaranya dikarenakan oleh:
 - 1) Masih rendahnya daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen serta belum terbangunnya ekosistem berorientasi ekspor;
 - 2) Menurunnya rata-rata lama tinggal wisatawan;
 - 3) Kontribusi investasi bagi PDRB masih rendah yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar serta belum terbangunnya ekosistem investasi hijau;

- 4) Masih rendahnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen termasuk perbankan BUMD; serta
 - 5) Masih rendahnya kapabilitas inovasi daerah.
- c. Perekonomian daerah juga memiliki tantangan sekaligus potensi yang dapat dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Kebumen yaitu sebagai berikut:
- 1) Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tantangan pengembangan sektor ini ke depan.
Adanya perubahan kontribusi sektor utama PDRB sejak tahun 2020 dari sebelumnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan digantikan oleh sektor industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun kontribusinya terhadap PDRB dari 21,79% pada Tahun 2020 menurun menjadi 19,86% pada Tahun 2024 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2020-2024 sebesar 20,79%. Sebaliknya sektor industri pengolahan semakin meningkat kontribusinya terhadap PDRB dari 21,26% pada Tahun 2020 menjadi 22,69% pada Tahun 2024 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2020-2024 sebesar 21,85%;
 - 2) Potensi semakin menguatnya kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Kebumen.
Menguatnya sektor industri pengolahan dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2020-2024 sebesar 4,58% untuk sektor industri pengolahan. Hal ini cukup jauh lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2020-2023 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,71%;
 - 3) Potensi semakin meningkatnya kontribusi subsektor industri makanan dan minuman yang didominasi oleh UMKM.
Subsektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB adalah industri makanan dan minuman dari 13,15% pada Tahun 2020 menjadi 15,55% pada Tahun 2024 atau kontribusi rata-rata selama Tahun 2020-2024 sebesar 14,27%. Selain itu, subsektor industri makanan dan minuman selama Tahun 2020-2024 mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67% dibandingkan subsektor lain di industri pengolahan. Industri makanan dan minuman adalah subsektor produksi dan pengolahan makanan dan minuman yang pada umumnya didominasi oleh IKM;
 - 4) Potensi pengembangan sektor perdagangan sebagai sektor terbesar ketiga yang berkontribusi bagi PDRB Kabupaten Kebumen utamanya pada sub sektor perdagangan besar dan eceran.
Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga yang berkontribusi bagi PDRB dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,75% selama Tahun 2020-2024. Berdasarkan data, menunjukkan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi lebih dari dua kali lipat dibandingkan subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya;
 - 5) Potensi pengembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi utamanya pada subsektor penyediaan makan-minum (restoran, tempat makan, katering, dsb).
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 10,78%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor yang menyangkut layanan yang menyediakan tempat tinggal sementara (hotel, penginapan) dan makanan/minuman untuk

konsumen (restoran, tempat makan, katering). Berdasarkan data pertumbuhan sektor ini sangat didorong oleh pertumbuhan subsektor penyediaan makan-minum (restoran, tempat makan, katering) yang mencapai rata-rata selama Tahun 2020-2024 sebesar 11,40% dibandingkan subsektor penyediaan akomodasi (hotel, penginapan) yang justru mengalami kontraksi selama Tahun 2020-2024 sebesar -1,27%; serta

6) Potensi pengembangan transportasi dan pergudangan karena wilayah Kebumen yang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Tengah. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 10,13% yang menunjukkan semakin berkembangnya sektor tersebut di wilayah Kebumen yang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kebumen dilalui dan dekat dengan akses transportasi nasional bahkan internasional yaitu, jalan nasional, jalur kereta termasuk terdapat beberapa stasiun kereta api, dekat dengan *Yogyakarta International Airport* dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Dengan kemudahan konektivitas ini memudahkan angkutan barang maupun orang dari dan ke Kabupaten Kebumen dengan berbagai wilayah di Pulau Jawa, Indonesia bahkan secara internasional. Dari data menunjukkan angkutan rel mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 11,81%.

4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.

Pemantapan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah menjadi hal yang penting untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan indeks infrastruktur daerah terus meningkat dari 46,53% pada Tahun 2020 menjadi 68,85% pada tahun 2024. Hal ini ditunjang oleh kenaikan ketiga komponennya yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang meningkat dari 56,15% pada Tahun 2020 menjadi 59,00% pada Tahun 2024. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman menunjukkan peningkatan tajam dari 11,89% pada Tahun 2020 menjadi 71,16% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan meningkat dari 71,56% pada Tahun 2020 menjadi 75,78% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan kinerja sampai dengan Tahun 2024 baru mencapai 68,85% menunjukkan perlunya peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infrastruktur daerah. Untuk itu beberapa hal perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur daerah diantaranya:

- a. Terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap;
- b. Kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun kondisi sedang terus menurun;
- c. Belum optimalnya cakupan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen; serta
- d. Kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

5. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Permasalahan semakin terdegradasinya lingkungan hidup menjadi hal yang serius untuk itu diperlukan peningkatan mitigasi dan adaptasi oleh seluruh masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang. IKA masih cukup rendah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan dalam beberapa hal berikut yaitu:

- a. Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama dikarenakan masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH);
- b. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
- c. Belum optimalnya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca); serta
- d. Terjadinya peningkatan risiko terhadap bencana.

6. Pengoptimalan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan dalam IRB yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) pelayanan publik. Hal ini cukup berdampak pada pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang terus meningkat dari 58,4 pada Tahun 2020 menjadi 86,16 pada Tahun 2024. Dengan meningkatnya IRB, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Untuk itu upaya peningkatan implementasi IRB perlu terus dilakukan agar indeks IRB bisa meningkat menuju kategori Sangat Baik (80-89) bahkan kategori Memuaskan (90-100). Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan harus terus dioptimalkan untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi;
- b. Masih belum optimalnya kinerja instansi pemerintah yang tercermin dari nilai SAKIP;
- c. Masih diperlukan optimalisasi pencegahan korupsi;
- d. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah;
- e. Masih rendahnya jumlah desa yang telah berstatus mandiri; serta
- f. Belum optimalnya kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.

7. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Penciptaan wilayah yang aman, tertib dan kondusif perlu terus dioptimalkan, namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Hal ini tercermin dari cukup tingginya angka kriminalitas dan aksi unjuk rasa. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2024 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan kekerasan seksual dan pemalsuan uang. Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 masih tergolong cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan di Tahun 2024 yang merupakan tahun poltik. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik. Selain itu juga terdapat tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen. Walaupun kedua pelanggaran tersebut dapat diatasi dan diselesaikan secara penuh sebesar 100, namun hingga Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pelanggaran K3 sebesar 35.226 kasus dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah sebanyak 35.969 kasus. Selain itu juga diperlukan peningkatan kewaspadaan serta peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Hal ini dapat tercermin dari kejadian konflik SARA yang terjadi di wilayah. Kejadian konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Sepanjang tahun 2020-2024, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada Tahun 2021, 2023 dan 2024. Walaupun selalu dapat tertangani, optimalisasi pengawasan dini perlu dioptimalkan dengan memantau hubungan antar kelompok masyarakat yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan.

8. Peningkatan pemajuan kebudayaan.

Peningkatan pemajuan kebudayaan perlu terus dioptimalkan untuk memupuk jatidiri masyarakat sekaligus menciptakan ekspresi budaya yang mendukung pengembangan *Geopark* Kebumen, untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda;
- b. Menurunnya pengunjung tempat bersejarah karena dianggap kurang menarik; serta
- c. Masih rendahnya kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan dinamika perekonomian global, nasional, serta daerah, baik di tingkat Propinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Kebumen selama tahun 2024, serta tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun 2025 hingga 2026.

3.1.1. Dinamika Ekonomi Global pada Tahun 2024

Ketidakpastian perekonomian global terus terjadi hingga tahun 2024 utamanya dipicu oleh:

1. Ketegangan geopolitik utamanya di Kawasan Timur Tengah, Ukraina dan Eropa hingga Asia;
2. Persaingan dan perang dagang melalui perang tarif/sangsi ekonomi hingga restriksi perdagangan lainnya utamanya pemberlakuan tarif resiprokal oleh AS ke sebagian besar negara lain termasuk Indonesia, yang memberikan dampak negatif tidak hanya pada perdagangan internasional tetapi juga terhadap perekonomian secara keseluruhan;
3. Tech Cold War yang merupakan persaingan dan perang industri teknologi (utamanya teknologi informasi) diantaranya dengan restriksi perdagangan komponen untuk teknologi Artificial Intelligence. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi, dominasi teknologi, serta pertahanan keamanan untuk bersaing menjadi yang paling maju dalam pemanfaatan teknologi;
4. Ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, badai, kebakaran, kekeringan, dan gempa bumi, menyebabkan terjadinya peningkatan kerugian akibat bencana. Selain itu, terus terjadi peningkatan ancaman perubahan iklim dan pemanasan global terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan ancaman bencana, serta penurunan produksi dan produktivitas, khususnya di sektor pangan, pertanian, dan perikanan;
5. Geopolitik, restriksi perdagangan, dan persaingan industri teknologi, serta ancaman bencana, perubahan iklim, dan pemanasan global menyebabkan terjadinya disrupsi pada rantai distribusi, volatilitas harga, pasar tenaga kerja (banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja/PHK), penurunan produksi dan produktivitas output, volatilitas nilai tukar, pasar keuangan dan pasar komoditas, hingga pelemahan pertumbuhan ekonomi. Penurunan produksi dan produktivitas output serta pelemahan pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan penurunan pendapatan negara khususnya pada sektor pajak serta peningkatan defisit fiskal; serta
6. Ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi direspon dengan kebijakan pengetatan suku bunga yang berdampak pada peningkatan pembayaran utang.

3.1.2. Dinamika dan Kinerja Ekonomi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024

Ketidakpastian geopolitik, geoekonomi, persaingan teknologi industri, serta ancaman bencana, perubahan iklim, dan pemanasan global telah memberikan dampak yang besar bagi perekonomian nasional maupun daerah baik wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen hingga tahun 2024. Pasca pandemi Covid-19, perekonomian dihantam dengan tingginya tingkat inflasi pada tahun 2022 yang menjadi fenomena global. Hal ini menyebabkan terjadinya dinamika yang signifikan terhadap perekonomian nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen yang dapat tercermin dari perilaku pertumbuhan ekonomi, sektor dan komponen PDB/PDRB, inflasi, serta tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022-2024.

Walaupun tetap tumbuh positif secara signifikan, pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen selama tahun 2022-2024 cenderung mengalami pelambatan. Pertumbuhan ekonomi Nasional masih selalu tumbuh di atas 5% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,13%. Namun demikian, terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022-2024 yaitu sebesar -0,28%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai di bawah 5% sejak tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan masih sekitar 5,08%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2022-2024 terhitung sekitar -0,36% lebih besar dari Nasional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen menunjukkan tingkat pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dibandingkan Nasional maupun Jawa Tengah dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,58%. Namun demikian, laju pelambatan pertumbuhannya cenderung lebih cepat dibandingkan di tingkat Nasional maupun Jawa Tengah yaitu sebesar -0,49% selama tahun 2022-2024.

Sektor industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar bagi perekonomian Nasional, Jawa Tengah, maupun Kabupaten Kebumen. Dengan kontribusi hampir mendekati 20% bagi PDB Nasional, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan selalu di atas 4% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,65% lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional secara agregat. Pelambatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar -0,46% selama tahun 2022-2024 lebih tinggi jika dibandingkan pelambatan pertumbuhan ekonomi Nasional secara agregat yang menunjukkan adanya fenomena deindustrialisasi yang terjadi di tingkat Nasional. Kontribusi industri pengolahan yang hanya mencapai kisaran 18% terhadap total PDB Nasional lebih kecil dibandingkan di Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen juga menunjukkan tidak terdapat sektor yang dominan pada perekonomian Nasional. Sementara itu, dengan kontribusi selalu melebihi 30% bagi PDRB Jawa Tengah, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan di kisaran 3-4% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,91% lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara agregat maupun jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri pengolahan di tingkat Nasional. Pelambatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor industri pengolahan Jawa Tengah yaitu sebesar -0,36% selama tahun 2022-2024 sama dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara agregat serta menunjukkan terjadinya fenomena deindustrialisasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, dengan kontribusi melebihi 20% bagi PDRB Kabupaten Kebumen, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sekitar 6% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,38% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen secara agregat serta lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri pengolahan di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, pelambatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar -0,84% selama tahun 2022-2024 lebih tinggi jika dibandingkan pelambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen secara agregat maupun jika dibandingkan pelambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan fenomena deindustrialisasi juga terjadi di Kabupaten Kebumen.

Perekonomian Nasional, Jawa Tengah maupun Kabupaten Kebumen cenderung masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50% bagi PDB Nasional dengan pertumbuhan cenderung meningkat di kisaran 4-5% dan rata-rata pertumbuhan sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan semakin signifikannya konsumsi rumah tangga bagi perekonomian Nasional yang juga ditunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama tahun 2022-2024 yaitu sebesar 0,15%. Sementara itu, dengan kontribusi melebihi 60% bagi PDRB Jawa Tengah, konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 5% dengan rata-rata pertumbuhan 5,52% lebih tinggi dibandingkan di tingkat Nasional. Namun demikian, selama tahun 2022-2024 menunjukkan terjadi pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar -0,16%. Sedangkan di Kabupaten Kebumen dengan kontribusi melebihi 70% bagi PDRB Kabupaten Kebumen, konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 5% dengan rata-rata pertumbuhan 5,76% lebih tinggi dibandingkan di tingkat Nasional maupun Provinsi

Jawa Tengah. Namun demikian, selama tahun 2022-2024 menunjukkan terjadi pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar -0,33%.

Dikarenakan PDRB adalah nilai yang dihitung dari volume (quantity) dan harga (price), menunjukkan kontribusi dan pertumbuhan nilai konsumsi rumah tangga masih sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Tingkat inflasi Nasional cenderung lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah maupun Kabupaten Kebumen dengan rata-rata sebesar 3,23% menyebabkan kontribusi dan laju pertumbuhan nilai konsumsi rumah tangga di tingkat Nasional lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen. Secara umum tingkat inflasi Nasional mengalami penurunan cukup signifikan mencapai -3,94% selama tahun 2022-2024, bahkan selama tahun 2024 sempat mengalami deflasi. Namun demikian, penurunan inflasi lebih dikarenakan menurunnya tingkat permintaan akibat menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi Jawa Tengah menunjukkan rata-rata sebesar 3,40% lebih tinggi dibandingkan tingkat Nasional dan cenderung menurun mencapai sebesar -3,96% selama tahun 2022-2024. Sedangkan tingkat inflasi di wilayah Kabupaten Kebumen secara resmi tidak dihitung oleh BPS, sehingga menggunakan tingkat inflasi pada sister city yaitu Purwokerto. Tingkat inflasi di Purwokerto menunjukkan rata-rata sebesar 3,54% lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional maupun Jawa Tengah dan cenderung menurun sebesar -4,98% selama tahun 2022-2024. Sebagai perbandingan, Laju Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kebumen atau PDRB deflator sebagai proksi inflasi menunjukkan rata-rata 3,53% mendekati tingkat inflasi Purwokerto dan cenderung menurun sebesar -1,76% selama tahun 2022-2024 dikarenakan tingkatnya cenderung lebih landai selama periode tersebut dibandingkan tingkat inflasi Nasional, Jawa Tengah, maupun Purwokerto.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah dengan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. TPT Indonesia cenderung menurun selama tahun 2022-2024 dengan rata-rata TPT 5,36% dan mengalami penurunan sebesar -0,95%. Sementara itu, TPT Jawa Tengah cenderung menurun selama tahun 2022-2024 dengan rata-rata TPT 5,16% dan mengalami penurunan sebesar -0,79%. Sama halnya dengan tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, TPT Kabupaten Kebumen juga cenderung menurun selama tahun 2022-2024 dengan rata-rata TPT 5,37% dan mengalami penurunan sebesar -0,85%. Namun demikian, dikarenakan TPT dihitung berdasarkan survei Satkernas oleh BPS hingga Agustus 2024, maka fenomena PHK yang terjadi sejak akhir tahun 2024 belum dapat terindikasi pada publikasi data TPT tahun 2024.

Tabel 3.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran
Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen
Tahun 2022-2024

Uraian		2022	2023	2024	Rata-rata Tahun 2022-2024	Peningkatan/ Penurunan/ Pelambatan Tahun 2022-2024
Nasional	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,05	5,03	5,13	-0,28
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	4,89	4,64	4,43	4,65	-0,46
	Pertumbuhan kosumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	4,96	4,94	5,11	5,00	0,15

Uraian		2022	2023	2024	Rata-rata Tahun 2022-2024	Peningkatan/ Penurunan/ Pelambatan Tahun 2022-2024
	Inflasi (%)	5,51	2,61	1,57	3,23	-3,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,32	4,91	5,36	-0,95
Jawa Tengah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	4,98	4,95	5,08	-0,36
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	3,88	4,32	3,52	3,91	-0,36
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	5,51	5,71	5,35	5,52	-0,16
	Inflasi (%)	5,63	2,89	1,67	3,40	-3,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,57	5,13	4,78	5,16	-0,79
Kebumen	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,79	5,66	5,30	5,58	-0,49
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	6,84	6,31	6,00	6,38	-0,84
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	5,82	5,97	5,49	5,76	-0,33
	Inflasi <i>Sister City</i> Purwokerto (%)	6,49	2,61	1,51	3,54	-4,98
	Laju Indeks Harga Implisit PDRB atau PDRB deflator sebagai proksi inflasi	4,28	3,78	2,52	3,53	-1,76
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,92	5,11	5,07	5,37	-0,85

Sumber : BPS (data diolah), 2025

3.1.3. Tantangan Perekonomian pada Tahun 2025 dan 2026

Ketidakpastian perekonomian global yang terjadi hingga tahun 2024 secara umum diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2025 dan 2026 yaitu:

1. Ketegangan geopolitik terus memanas utamanya di Kawasan Timur Tengah, Ukraina dan Eropa, hingga Asia seperti konflik Pakistan-India dan ketegangan di kawasan Asia Timur baik di semenanjung Korea maupun antara Cina dan Taiwan serta Kawasan Laut Cina Selatan;
2. Penerapan tarif impor secara resiprokal oleh Amerika Serikat (AS), dapat menyebabkan meningkatnya perang dagang dan restriksi perdagangan. Sebagai salah satu negara penyebab defisit perdagangan nomor 15 terbesar bagi AS, Indonesia mendapatkan tarif resiprokal sebesar 32% yang termasuk tergolong tinggi diantara beberapa negara sehingga kemungkinan dapat melemahkan kinerja ekspor Indonesia terutama ke AS yang masih menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor Indonesia. Hal ini kemungkinan dapat memberikan dampak berkelanjutan

- pada kinerja sektor riil, *output*, hingga penyerapan tenaga kerja serta pada kestabilan nilai tukar rupiah dan pasar modal akibat menurunnya devisa ekspor;
3. *Tech Cold War* yang merupakan persaingan dan perang industri teknologi (utamanya teknologi informasi) semakin meningkat diantaranya selain terdapat restriksi perdagangan komponen untuk teknologi *Artificial Intelligence* oleh AS, Cina yang menjadi tujuan utama restriksi tersebut justru mampu menciptakan komponen alternatif;
 4. Ancaman bencana alam masih tinggi seperti banjir, tanah longsor, badai, kebakaran, kekeringan, dan gempa bumi menyebabkan terjadinya peningkatan kerugian akibat bencana. Selain itu juga terus terjadi peningkatan ancaman perubahan iklim dan pemanasan global terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan ancaman bencana serta penurunan produksi dan produktivitas khususnya di sektor pangan, pertanian dan perikanan;
 5. Geopolitik, restriksi perdagangan dan persaingan industri teknologi, serta ancaman bencana, perubahan iklim dan pemanasan global akan terus meningkatkan terjadinya disrupsi pada rantai distribusi, volatilitas harga, pasar tenaga kerja (banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja/PHK), penurunan produksi dan produktivitas *output*, volatilitas nilai tukar, pasar keuangan dan pasar komoditas, hingga kemungkinan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Penurunan produksi dan produktivitas *output* serta pelemahan pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan penurunan pendapatan negara khususnya pada sektor pajak serta peningkatan defisit fiskal; serta
 6. Ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ditanggapi dengan kebijakan kenaikan/pengetatan suku bunga, peningkatan upaya menjaga/intervensi terhadap nilai tukar mata uang, serta peningkatan penghematan (*austerity*) dan realokasi belanja fiskal yang difokuskan pada belanja untuk mengintervensi perekonomian/subsidi, peningkatan anggaran militer/pembelian senjata akibat ketidakpastian geopolitik, serta peningkatan pembayaran hutang sebagai dampak kenaikan/pengetatan suku bunga. *Austerity* sendiri telah dilakukan pada APBN tahun 2025 dan sementara juga berdampak negatif utamanya pada sektor jasa perhotelan.

Tabel 3.2.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
Pertumbuhan Ekonomi Global (IMF dalam %)	3,2	2,8	3,0
Pertumbuhan Ekonomi Global (OECD dalam %)		3,1	3,0
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (IMF dalam %)	5,03	4,7	4,7
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (OECD dalam %)		4,9	5,0
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (BI dalam %)		4,7-5,5	4,9-5,7
Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam RPJM Nasional 2025-2029 (%)		5,3	6,3
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (Rancangan RPJMD Jateng 2025-2029 dalam %)	4,95	4,9-5,6	5,0-6,0

Sumber : IMF, Kementerian Keuangan RI dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diperoleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional oleh IMF lebih rendah dibandingkan tahun 2024. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global masing-masing 2,8% pada tahun 2025 dan 3,0% pada Tahun 2026. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, IMF memproyeksikan sebesar 4,7% baik pada tahun 2025 maupun 2026. Hal yang sama juga terjadi pada proyeksi yang dilakukan oleh OECD yang

memperkirakan adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi ke depan baik secara global maupun di Indonesia. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada tahun 2025 dan kembali menurun menjadi 3,0% pada tahun 2026. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, OECD memproyeksikan sebesar 4,9% pada tahun 2025 dan diharapkan meningkat menjadi 5,0% pada tahun 2026.

Sementara itu Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7-5,5%, dipengaruhi dampak langsung kebijakan tarif AS yang menurunkan ekspor Indonesia ke AS dan dampak tidak langsung akibat penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang lain Indonesia, terutama Cina. Sedangkan pada Tahun 2026, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan Indonesia sedikit menguat pada kisaran 4,9-5,7%. Namun demikian, sesuai dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 terdapat skenario pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 5,3% pada Tahun 2025 dan 6,3% pada Tahun 2026 sehingga diharapkan pada Tahun 2029 akan mencapai 8,0%. Mendasari hal tersebut sesuai dengan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan sebesar 4,9-5,6% pada Tahun 2025 dan 5,0-6,0% pada Tahun 2026.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah pada Tahun 2026

Mendasari hal tersebut di atas, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen diharapkan akan dapat tumbuh pada kisaran 5,00-5,50% pada tahun 2025 dan meningkat pada Tahun 2026 sebesar 5,80-6,30% yang merupakan hasil kesepakatan dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional dalam upaya mencapai skenario pertumbuhan ekonomi mencapai 8,0% pada Tahun 2029.

Dengan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan juga dapat menurunkan angka pengangguran menjadi di bawah 5% yaitu masing-masing sebesar 4,765% pada tahun 2025 dan terus membaik hingga mencapai 4,30% pada tahun 2026. PDRB perkapita juga diharapkan terus meningkat menjadi Rp.27,775 juta pada tahun 2025 dan Rp.33,75 juta pada tahun 2026.

Selain itu, dengan terus meningkatnya kinerja ekonomi makro daerah diharapkan juga akan memperbaiki indikator kesejahteraan daerah pada tahun 2025 dan 2026. Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia diproyeksikan mencapai sebesar 20,38-21,48% baik pada tahun 2025 dan 2026. Tingkat kemiskinan diharapkan terus menurun mencapai 14,305% pada tahun 2025 dan 14,30-13,40% pada tahun 2026. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan terus meningkat menjadi 72,88% pada tahun 2025 dan 73,80% pada tahun 2026.

Tabel 3.3.
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
dan Proyeksi Tahun 2025-2026

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	-1,45	3,71	5,79	5,66	5,30	5,00-5,50*	5,80-6,30***
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,07	6,03	5,92	5,11	5,07	4,765**	4,60***
3	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	20,80	21,69	23,63	25,59	27,29	27,775**	33,75**
4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	20,02	19,30	19,86	20,38	20,76	20,38-21,48**	20,38-21,48**
5	Tingkat Kemiskinan (%)	17,59	17,83	16,41	16,34	15,71	14,305**	14,30-13,40***
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,32	70,56	71,29	71,88	72,48	72,88**	73,80***

Sumber : BPS 2020-2024, Bappeda Kabupaten Kebumen 2025 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2025

Keterangan : *) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

**) Target pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

***) Target sebagai hasil kesepakatan Rakortek oleh Bappeda Provinsi

Berbagai tantangan perekonomian dari tingkat global dan nasional akan mempengaruhi perekonomian daerah di tahun 2025 dan 2026, maka arah kebijakan ekonomi tahun 2026 akan berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan harga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

1. Memperluas lapangan kerja melalui penyiapan (pendidikan dan pelatihan) tenaga kerja terampil, peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*, peningkatan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, fasilitasi bagi sektor informal, serta peningkatan investasi padat karya;
2. Optimalisasi sektor pertanian (dalam arti luas) melalui:
 - a. Program petani milenial dalam upaya regenerasi pelaku usaha pertanian;
 - b. Peningkatan kapasitas teknis sumber daya pertanian melalui program sekolah lapang;
 - c. Peningkatan manajemen kelembagaan dengan menciptakan *corporate farming*;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian;
 - e. Optimalisasi akses permodalan melalui fasilitasi kredit, subsidi bunga dan dana talangan;
 - f. Pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi; serta
 - g. Peningkatan fasilitasi pemasaran hasil pertanian;
3. Pembangunan kedaulatan pangan melalui:
 - a. Pemanfaatan pekarangan rumah melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 - b. Gerakan pangan murah dan subsidi harga pangan strategis dalam rangka menjamin kestabilan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat;
 - c. Pengembangan infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) berbasis Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); serta
 - d. Peningkatan pemantauan ketersediaan pasokan harga pangan di pasar, serta pemantauan harga berkala (Harga Eceran Tertinggi/HET maupun Harga Acuan Penjualan atau Pembelian/HAP) dalam upaya pengendalian inflasi.
4. Pengembangan industri melalui:
 - a. Hilirisasi industri kecil dan menengah;
 - b. Pengembangan agroindustri;
 - c. Pengembangan industri berbasis produk unggulan;
 - d. Pengembangan industri padat karya;
 - e. Pengembangan inkubator bisnis dan *start up*;
 - f. Peningkatan inovasi, produktivitas dan mutu produk UMKM;
 - g. Perluasan pemasaran;
 - h. Kemudahan permodalan; serta
 - i. Peningkatan konsumsi produk UMKM lokal.
5. Pengembangan sektor jasa melalui:
 - a. Optimalisasi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan memanfaatkan bahan baku dari hasil pertanian lokal; serta
 - b. Optimalisasi sektor pariwisata melalui peningkatan promosi, even, paket wisata yang terintegratif, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi *Geopark* Kebumen melalui pengembangan *geosite* prioritas agar wisatawan lebih lama tinggal serta berbelanja di Kabupaten Kebumen.
6. Meningkatkan pengendalian harga melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
7. Meningkatkan pengembangan dan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pengembangan sektor potensial lainnya yaitu sektor perdagangan serta sektor transportasi dan pergudangan sekaligus dalam rangka memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Kebumen di wilayah selatan Jawa Tengah;

8. Peningkatan pelayanan publik melalui penciptaan kemudahan berusaha untuk sektor berbasis pertanian, industri, dan jasa, serta fasilitasi sertifikasi produk utamanya yang mengoptimalkan potensi lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
9. Peningkatan inovasi yang akan mengakselerasi pembangunan daerah; serta
10. Pengembangan sumber ekonomi baru melalui penguatan kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu, mulai tahun 2025 diberlakukan *opsen* Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya 30% menjadi 66% bagi PAD Kabupaten/Kota, maka penjualan kendaraan bermotor cukup mempengaruhi PAD. Sementara itu, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini pun akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional dan provinsi.

3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024

Realisasi pendapatan daerah pasca pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja yang terus membaik. Realisasi pendapatan daerah selama tahun 2021-2024 mengalami peningkatan sebesar 3,60% per tahun yaitu dari Rp.1.832.035.015.733,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.3.137.694.279.634,00 pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. PAD mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,87% selama tahun 2021-2024, terkecil jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah cenderung menurun dari 16,67% pada tahun 2021 menjadi 15,43% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 16,52%. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya kemandirian keuangan daerah. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,99% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 4,43%;
 - b. Retribusi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,50% atau tertinggi dibandingkan komponen PAD yang lain, dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,97%;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,68% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,64%; serta
 - d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi satu-satunya yang mengalami rata-rata pertumbuhan minus/berkontrasi yaitu sebesar -3,09%. Hal ini

dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan BLUD, dimana dengan telah berakhirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2023 menyebabkan permintaan layanan terkait Covid-19 (seperti tes PCR) terus menurun/atau sudah tidak terdapat *demand* lagi. Pada tahun 2022, layanan terkait Covid-19 sempat memberikan kenaikan pendapatan yang cukup signifikan bagi BLUD. Namun demikian, proporsi terhadap total pendapatan daerah tetap menjadi yang terbesar dibandingkan komponen PAD yang lainnya yaitu dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 10,48%.

2. Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,02% selama tahun 2021-2024. Namun demikian, proporsi terhadap total pendapatan daerah tetap menjadi yang terbesar, yaitu dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 83,20%, bahkan cenderung meningkat dari 83,02% pada tahun 2021 menjadi 83,97% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih bergantungnya pembiayaan APBD Kabupaten Kebumen dari pendapatan transfer. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat secara agregat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,72% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 76,21%. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -5,97%. Penurunan ini dikarenakan adanya kecenderungan strategi dari pemerintah pusat dengan mengganti/menggeser menjadi insentif fiskal khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu rata-rata proporsi DBH terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 1,28%;
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,59% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 41,81% yang merupakan sumber pendanaan terbesar bagi APBD Kabupaten Kebumen. Namun demikian, sejak tahun 2023 telah diberlakukan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yaitu adanya DAU *Earmark* yang secara nominal menambah alokasi DAU, akan tetapi penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat (*mandatory*) sehingga sangat membatasi fleksibilitas ruang fiskal APBD;
 - 3) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -4,38% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 2,28%. Hal ini dikarenakan alokasi DAK Fisik sangat dipengaruhi oleh lokus prioritas nasional, dimana terkadang tidak semua daerah menjadi lokus bagi beberapa bidang DAK Fisik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
 - 4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-NF) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,97% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 15,31%. DAK-NF lebih bersifat rutin yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, DAK-NF didominasi oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - 5) Insentif Fiskal (IF) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -18,37% dikarenakan tidak memperoleh alokasi pada tahun 2022. Adanya perubahan ketentuan penerima IF

dari sebelumnya untuk semua daerah yang mendapatkan opini WTP, menjadi diberikan kepada daerah yang memperoleh prestasi misalkan penanganan kemiskinan, *stunting*, dan inflasi. Namun demikian, jika diperhatikan pemberian alokasi IF cenderung hanya mengurangi/memindahkan dari alokasi DBH. Sementara itu, rata-rata proporsi IF terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,68%, terkecil dari seluruh komponen pendapatan transfer yang diperoleh; serta

- 6) Dana Desa (DD) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,61% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 14,84%. DD bersifat transfer atau hanya melewati rekening kas pemerintah kabupaten untuk selanjutnya ditransfer langsung ke rekening kas pemerintah desa;
- b. Pendapatan transfer antardaerah secara keseluruhan diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara agregat mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan yaitu sebesar 21,43% karena adanya signifikansi kenaikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.86.528.970.500,00. Sementara itu, rata-rata proporsi pendapatan transfer antardaerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 6,99%. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer antardaerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan bagi hasil mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,15% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 5,88% yang menunjukkan mendominasi terhadap keseluruhan pendapatan transfer antardaerah sekitar 73,68%. Hingga tahun 2024, PKB masih menjadi bagian dari pendapatan bagi hasil sebesar 30% dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota; serta
 - 2) Seperti disebutkan di atas, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan hingga 459,87% per tahun selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 1,10%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2021-2024 hanya bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang bersifat *reimburse*. Sepanjang tahun 2021-2024, pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mendapatkan hibah air minum, sedangkan hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) telah berakhir pada tahun 2022 serta hibah sanitasi pada tahun 2023 oleh pemerintah pusat dialihkan dalam bentuk DAK Fisik. Pada tahun 2024, Kabupaten Kebumen juga mendapatkan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Oleh karena itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah selama tahun 2021-2024 yang berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat mengalami peningkatan cukup signifikan hingga 37,02% per tahun dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,28%.

Tabel 3.4.
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2021-2024
	TOTAL PENDAPATAN	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.901.129.535.425	3.137.694.279.634	3,60%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705	484.291.013.938	0,87%
A.1.	Pajak daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	137.222.705.502	139.432.389.479	7,99%
A.2.	Retribusi daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	28.881.046.419	33.229.154.159	13,50%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	19.123.340.688	21.856.399.056	10,68%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	319.336.632.833	336.486.804.682	278.423.869.096	289.773.071.244	-3,09%
B	Pendapatan Transfer	2.351.223.178.918	2.329.703.641.941	2.435.850.438.454	2.634.840.256.696	4,02%
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.187.883.684.115	2.123.296.694.941	2.250.967.223.263	2.366.495.205.883	2,72%
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.736.189.371.115	1.706.540.321.941	1.783.201.602.063	1.884.387.249.883	2,85%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	41.397.337.217	38.220.093.261	36.123.723.591	33.987.975.000	-5,97%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.306.369.023.000	3,59%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.732.325.023	70.275.269.743	49.510.073.990	68.388.503.136	-4,38%
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	436.770.798.875	424.339.890.137	457.636.890.052	475.641.748.747	2,97%
B.1.2.	Insentif Fiskal	46.433.860.000	0	11.805.728.000	20.849.462.000	-18,37%
B.1.3.	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	455.959.893.200	461.258.494.000	4,61%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	184.883.215.191	268.345.050.813	21,43%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	157.491.424.803	175.763.136.000	174.243.934.191	181.816.080.313	5,15%
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	5.848.070.000	30.643.811.000	10.639.281.000	86.528.970.500	459,87%
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.794.749.700	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	37,02%
C.1.	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	37,02%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

Tabel 3.5.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Rata-rata Proporsi Tahun 2021-2024
	TOTAL PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16,67%	17,99%	15,98%	15,43%	16,52%
A.1.	Pajak daerah	3,97%	4,56%	4,73%	4,44%	4,43%
A.2.	Retribusi daerah	0,84%	1,00%	1,00%	1,06%	0,97%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,58%	0,62%	0,66%	0,70%	0,64%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	11,28%	11,82%	9,60%	9,24%	10,48%
B	Pendapatan Transfer	83,02%	81,82%	83,96%	83,97%	83,20%
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	77,25%	74,58%	77,59%	75,42%	76,21%
B.1.1.	Dana Perimbangan	61,31%	59,94%	61,47%	60,06%	60,69%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1,46%	1,34%	1,25%	1,08%	1,28%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	41,64%	41,22%	42,74%	41,63%	41,81%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2,78%	2,47%	1,71%	2,18%	2,28%
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	15,42%	14,90%	15,77%	15,16%	15,31%
B.1.2.	Insentif Fiskal	1,64%	0,00%	0,41%	0,66%	0,68%
B.1.3.	Dana Desa	14,31%	14,64%	15,72%	14,70%	14,84%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5,77%	7,25%	6,37%	8,55%	6,99%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	5,56%	6,17%	6,01%	5,79%	5,88%
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	0,21%	1,08%	0,37%	2,76%	1,10%
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,31%	0,18%	0,05%	0,59%	0,28%
C.1.	Pendapatan Hibah	0,31%	0,18%	0,05%	0,59%	0,28%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

3.2.1.2. Asumsi Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2026

Pada RKPD Tahun 2026, pendapatan daerah diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 8,95% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 menjadi Rp3.254.002.991.619,00. Perbandingan dilakukan terhadap RAPBD Perubahan Tahun 2025 yang telah menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD TA 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025. Selain itu RAPBD Perubahan Tahun 2025 juga telah memberikan analisis dinamika keuangan dan pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang lebih riil serta telah memasukkan kebijakan dari kepala daerah terpilih. Secara rinci, asumsi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. PAD diasumsikan naik 4,11% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025, namun rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah menurun dari 18,99% pada RAPBD Perubahan Tahun 2025 menjadi 18,20% pada RKPD Tahun 2026. Akan tetapi secara umum, proporsi pada RKPD Tahun 2026 masih meningkat jika dibandingkan rata-rata proporsi selama tahun 2021-2024 yaitu sebesar 16,52% yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah. Rincian masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak daerah diasumsikan meningkat 8,75% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sedikit meningkat menjadi 7,77%. Mulai tahun 2025, *opsen* PKB telah masuk pada komponen pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah diasumsikan meningkat 0,99% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 namun rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah menurun menjadi 9,41%. Mulai tahun 2025, pendapatan BLUD telah masuk pada komponen retribusi daerah. Pendapatan BLUD diasumsikan menurun sekitar -2% dan dikarenakan besarnya proporsi pendapatan BLUD terhadap retribusi daerah (sekitar 85%) maupun total PAD (sekitar 44%), maka penurunan pendapatan BLUD menjadi penyebab utama penurunan retribusi daerah maupun total PAD;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan meningkat 23,38% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah masih sama yaitu sebesar 0,81%. Komponen PAD ini bersumber dari deviden BUMD; serta
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi satu-satunya komponen PAD yang diasumsikan turun sebesar -41,75% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah juga menurun menjadi 0,21%. Penurunan dikarenakan adanya asumsi penurunan pendapatan denda pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan semakin tertibnya wajib pajak dan masyarakat terhadap penerapan PDRD.
2. Pendapatan transfer diasumsikan naik 9,71% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan kenaikan PAD. Oleh karena itu, rata-rata proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah diasumsikan meningkat dari 81,01% pada RAPBD Perubahan Tahun 2025 menjadi 81,80% pada RKPD Tahun 2026. Walaupun demikian, proporsi ini masih lebih kecil jika dibandingkan rata-rata proporsi selama tahun 2021-2024 yaitu sebesar 83,20% yang menunjukkan adanya upaya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Rincian masing-masing komponen pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat diasumsikan meningkat 10,76% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025, dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah juga diasumsikan meningkat menjadi 77,86%. Rincian masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
 - 1) DBH diasumsikan meningkat 64,90% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 disebabkan oleh adanya penambahan asumsi Insentif Fiskal. Hal ini mendasari dinamika pada APBD Tahun 2024 dan 2025 dimana alokasi Insentif Fiskal diberikan oleh pemerintah pusat namun alokasi DBH mengalami penurunan. Oleh karena itu menyebabkan rata-rata proporsi DBH terhadap total pendapatan daerah juga meningkat menjadi 1,93%;
 - 2) DAU diasumsikan meningkat 18,99% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah juga diasumsikan meningkat menjadi 46,51%.

- Komponen DAU yang bersifat *earmark* diasumsikan sama dengan RAPBD Perubahan Tahun 2025, kecuali pada RKPD Tahun 2026 diasumsikan mendapatkan DAU *Earmark* Pekerjaan Umum yang sempat diterima pada APBD Murni Tahun 2025 namun dirasionalisasi pasca turunnya Inpres Nomor 1/2025. Sementara itu untuk komponen DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya diasumsikan meningkat dalam rangka untuk mendanai pengangkatan Calon ASN baru yang terdiri dari 335 CPNS dan 815 P3K Baru serta pengangkatan P3K Paruh Waktu sebesar 2.370 orang, jauh lebih besar dari rata-rata ASN yang pension sejumlah sekitar 500 orang per tahun. Selain itu Kabupaten Kebumen juga memerlukan peningkatan pendanaan untuk membiayai *Universal Health Coverage*;
- 3) DAK Fisik diasumsikan sama dengan RAPBD Perubahan Tahun 2025;
 - 4) DAK Nonfisik diasumsikan sama dengan alokasi yang ada sebelumnya pada APBD Murni Tahun 2025, namun mendapatkan rasionalisasi pasca turunnya Inpres Nomor 1/2025 sehingga sedikit lebih tinggi dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025;
 - 5) Insentif Fiskal diasumsikan menjadi bagian DBH seperti tersebut di atas; serta
 - 6) Dana Desa diasumsikan sama dengan RAPBD Perubahan Tahun 2025.
- b. Pendapatan transfer antardaerah yang diasumsikan hanya pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk bantuan keuangan tidak diasumsikan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bagi hasil diasumsikan meningkat 8,56% dibandingkan APBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah diasumsikan tetap yaitu sebesar 3,94%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak diasumsikan karena belum adanya rencana pengajuan hibah kepada pemerintah pusat.

Tabel 3.6.
Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026

NO.	URAIAN PENDAPATAN	RAPBD Perubahan Tahun 2025	Asumsi RKPD Tahun 2026	Kenaikan/ (penurunan) TA 2026 dibanding TA 2025
	TOTAL PENDAPATAN	2.995.075.495.372	3.254.002.991.619	8,65%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	568.903.531.827	592.312.574.590	4,11%
A.1.	Pajak daerah	232.526.294.000	252.872.408.254	8,75%
A.2.	Retribusi daerah	303.068.953.000	306.081.999.686	0,99%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	21.427.594.405	26.438.212.432	23,38%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	11.880.690.422	6.919.954.218	-41,75%
B	Pendapatan Transfer	2.426.171.963.545	2.661.690.417.029	9,71%
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.287.320.348.438	2.533.510.499.906	10,76%
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.828.833.594.438	2.099.286.936.906	14,79%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.116.461.000	62.852.155.075	64,90%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.272.048.621.000	1.513.551.810.831	18,99%

NO.	URAIAN PENDAPATAN	RAPBD Perubahan Tahun 2025	Asumsi RKPD Tahun 2026	Kenaikan/ (penurunan) TA 2026 dibanding TA 2025
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.495.981.000	14.495.981.000	0,00%
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	504.172.531.438	508.386.990.000	0,84%
B.1.2.	Insentif Fiskal	24.263.191.000	0	-100,00%
B.1.3.	Dana Desa	434.223.563.000	434.223.563.000	0,00%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	138.851.615.107	128.179.917.123	-7,69%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	118.074.615.107	128.179.917.123	8,56%
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	20.777.000.000	tidak diasumsikan	0,00%
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0,00%
C.1.	Pendapatan Hibah	0	0	0,00%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

Tabel 3.7.
Proporsi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026

NO.	URAIAN PENDAPATAN	RAPBD Perubahan Tahun 2025	Asumsi RKPD Tahun 2026
	TOTAL PENDAPATAN	100,00%	100,00%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18,99%	18,20%
A.1.	Pajak daerah	7,76%	7,77%
A.2.	Retribusi daerah	10,12%	9,41%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,72%	0,81%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0,40%	0,21%
B	Pendapatan Transfer	81,01%	81,80%
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	76,37%	77,86%
B.1.1.	Dana Perimbangan	61,06%	64,51%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1,27%	1,93%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	42,47%	46,51%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,48%	0,45%
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	16,83%	15,62%
B.1.2.	Insentif Fiskal	0,81%	0,00%
B.1.3.	Dana Desa	14,50%	13,34%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4,64%	3,94%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	3,94%	3,94%
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	0,69%	tidak diasumsikan
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00%	0,00%
C.1.	Pendapatan Hibah	0,00%	0,00%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

3.2.1.3. Kebijakan Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2026

Mendasari dinamika yang terjadi dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan, kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2026 diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pencapaian target PAD yang diantaranya melalui:

1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi peningkatan kepatuhan, pemeriksaan ketelitian, optimalisasi penagihan rutin maupun tunggakan, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta penerapan sanksi yang tegas;
2. Ekstensifikasi PDRD yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pendataan dan pengawasan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat serta perluasan potensi pajak berupa penyesuaian tarif sesuai kondisi perekonomian daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan penguatan sinergi antara Provinsi dan Kabupaten dalam upaya optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
4. Peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
5. Peningkatan pelayanan prima perizinan terpadu satu pintu dan kemudahan penanaman modal;
6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD;
7. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan, serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga bank/deposito; serta
10. Pembinaan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola PDRD.

Sementara itu dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah perlu dilakukan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat pusat maupun provinsi. Selain itu juga perlu dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, badan-badan sosial, komunitas dan organisasi yang ada di Kabupaten Kebumen termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan daerah, pemanfaatan aset daerah termasuk kerjasama dengan pihak ketiga serta sumber pembiayaan lain.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah secara *agregat* sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan *netto*. Secara distributif, belanja daerah dialokasikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan. Pengalokasian belanja daerah diharapkan akan memberikan efek multiplier pada perekonomian daerah.

3.2.2.1. Kinerja Belanja Daerah pada Tahun 2021-2024

Kinerja belanja daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan sebagai kontribusi peran pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 serta menjaga kestabilan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan APBD. Realisasi belanja daerah selama tahun 2021-2024 mengalami peningkatan sebesar 4,16% per tahun yaitu dari Rp.2.779.840.698.100,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.3.126.694.533.457,00 pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,26% selama tahun 2021-2024 dengan proporsi terhadap Total Belanja Daerah cenderung meningkat dari 68,44% pada tahun 2021 menjadi 68,63% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 68,21%. Hal ini menunjukkan masih dominannya komponen belanja operasi terhadap APBD Kabupaten Kebumen. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen belanja operasi adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,38% selama tahun 2021-2024, terendah dibandingkan komponen belanja operasi lainnya. Sedangkan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah juga mengalami penurunan dari 41,06% pada tahun 2021 menjadi 38,01% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 39,58%. Hal ini menunjukkan upaya meningkatkan efisiensi belanja pegawai agar dapat memenuhi maksimal 30% dari total belanja pada tahun 2027 nanti sesuai ketentuan UU HKPD;
 - b. Belanja barang dan jasa mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,69% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 6,69%;
 - c. Belanja subsidi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 66,28% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,02%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024 yang digunakan untuk subsidi bunga sebagai dukungan kemudahan permodalan bagi wirausaha dan subsidi harga dalam rangka menjaga kestabilan harga;
 - d. Belanja hibah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 33,51% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 3,42%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yang digunakan penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024; serta
 - e. Belanja bantuan sosial menjadi satu-satunya komponen belanja operasi yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -18,01% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,46%. Penurunan disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi puncak Pandemi Covid-19 dan sesuai arahan pemerintah pusat pada saat itu pemerintah daerah harus melakukan refocusing belanja daerah dalam rangka meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Selanjutnya pandemi Covid-19 terus mereda hingga pencabutan status pandemi pada tahun 2023 sehingga pemberian bantuan sosial juga mengalami penyesuaian.
2. Belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 1,58% selama tahun 2021-2024 dengan proporsi terhadap Total Belanja Daerah cenderung menurun dari 9,57% pada tahun 2021 menjadi 8,91% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 9,38%. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya belanja modal pada APBD Kabupaten Kebumen padahal tingginya belanja modal diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang lebih bagi perekonomian daerah. Terbatasnya belanja modal karena selama

- ini masih mengandalkan dari sumber pendanaan DAK Fisik, DAU *Earmark* Pekerjaan Umum, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pendapatan hibah;
3. Belanja tidak terduga mengalami rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -13,59% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,02%. Hal ini dikarenakan tidak adanya situasi darurat khususnya bencana yang memerlukan pendanaan secara signifikan; serta
 4. Belanja transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,98% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 22,39%. Secara umum adalah belanja transfer kepada pemerintah desa yang selain didominasi oleh belanja transfer bersumber dana DD, juga terdapat belanja transfer dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.8.
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2021-2024

No	Uraian Belanja	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2021-2024
A.	Belanja Operasi	1.902.638.912.710	1.914.481.482.971	2.020.914.516.871	2.145.786.592.502	4,26%
1.	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.153.775.444.865	1.188.427.007.238	1,38%
2.	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	701.119.022.403	726.725.182.478	800.813.552.333	6,69%
3.	Belanja Subsidi	484.527.400	313.864.348	675.656.402	1.447.997.750	66,28%
4.	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	128.698.064.603	145.222.914.681	33,51%
5.	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	11.040.168.523	9.875.120.500	-18,01%
B.	Belanja Modal	266.110.950.340	272.301.599.864	278.842.913.538	278.735.832.493	1,58%
C.	Belanja Tidak Terduga	545.318.400	1.295.204.500	409.940.801	323.000.000	-13,59%
D.	Belanja Transfer	610.545.516.650	632.491.265.300	676.974.543.619	701.849.108.462	4,98%
	Total Belanja (A+B+C+D)	2.779.840.698.100	2.820.569.552.635	2.977.141.914.829	3.126.694.533.457	4,16%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

Tabel 3.9.
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024

No	Uraian Belanja	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2021-2024
A.	Belanja Operasi	68,44%	67,88%	67,88%	68,63%	68,21%
1.	Belanja Pegawai	41,06%	40,50%	38,75%	38,01%	39,58%
2.	Belanja Barang dan Jasa	23,99%	24,86%	24,41%	25,61%	24,72%
3.	Belanja Subsidi	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,02%
4.	Belanja Hibah	2,60%	2,12%	4,32%	4,64%	3,42%
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,77%	0,39%	0,37%	0,32%	0,46%
B.	Belanja Modal	9,57%	9,65%	9,37%	8,91%	9,38%
C.	Belanja Tidak Terduga	0,02%	0,05%	0,01%	0,01%	0,02%
D.	Belanja Transfer	21,96%	22,42%	22,74%	22,45%	22,39%
	Total Belanja (A+B+C+D)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

3.2.2.2. Asumsi Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2026

Belanja daerah pada RKPD Tahun 2026 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 6,05% atau menjadi Rp.3.365.045.254.336,00 dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025. Hal ini sesuai yang telah terentri pada aplikasi SIPD-RI dimana secara rinci asumsi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Belanja Daerah pada APBD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026

No	Uraian Belanja	RAPBD Perubahan Tahun 2025	Asumsi RKPD Tahun 2026	Kenaikan/ (penurunan) TA 2026 dibanding TA 2025	Proporsi Belanja pada RAPBD Perubahan Tahun 2025	Proporsi Belanja pada Asumsi RKPD Tahun 2026
	Total Belanja (A+B+C+D)	3.173.041.187.318	3.365.045.254.336	6,05%	100,00%	100,00%
A.	Belanja Operasi	2.202.492.441.236	2.223.070.334.483	0,93%	69,41%	66,06%
1.	Belanja Pegawai	1.322.791.811.150	1.319.089.854.015	-0,28%	41,69%	39,20%
2.	Belanja Barang dan Jasa	788.243.758.103	815.757.010.483	3,49%	24,84%	24,24%
3.	Belanja Subsidi	1.261.000.000	2.920.000.000	131,56%	0,04%	0,09%
4.	Belanja Hibah	83.172.555.750	79.030.652.985	-4,98%	2,62%	2,35%
5.	Belanja Bantuan Sosial	7.023.316.233	6.272.817.000	-10,69%	0,22%	0,19%
B.	Belanja Modal	280.577.521.082	413.677.365.987	47,44%	8,84%	12,29%
C.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	2.000.000.000	-83,33%	0,38%	0,06%
D.	Belanja Transfer	677.971.225.000	726.297.553.866	7,13%	21,37%	21,58%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

1. Belanja operasi diasumsikan meningkat -0,93% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah menurun menjadi 66,06%. Secara rinci, komponen belanja operasi adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai diasumsikan turun -0,28% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah juga menurun menjadi 39,20%. Hal ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi belanja pegawai agar dapat memenuhi maksimal 30% dari total belanja pada tahun 2027 nanti sesuai ketentuan UU HKPD. Belanja pegawai telah mengasumsikan *accress* 1% serta alokasi pengadaan 335 CPNS, 815 P3K Baru serta 2.370 P3K Paruh Waktu;
 - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan turun 3,49% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025. Namun demikian, rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah diasumsikan menurun menjadi 24,24%;
 - c. Belanja subsidi diasumsikan naik signifikan sebesar 131,56% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah juga meningkat menjadi 0,09%. Kenaikan belanja subsidi berupa subsidi bunga dalam rangka meningkatkan kemudahan permodalan bagi wirausaha dan subsidi harga dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian harga di masa ketidakpastian situasi perekonomian secara umum;
 - d. Belanja hibah diasumsikan turun -4,98% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah juga menurun menjadi 2,35%; serta

- e. Belanja bantuan sosial diasumsikan turun -10,69% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah juga menurun menjadi 0,19%;
2. Penurunan alokasi belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial dan tidak terduga akan dioptimalkan untuk peningkatan belanja modal. Dalam hal ini, belanja modal diasumsikan naik cukup signifikan sebesar 47,44% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah juga meningkat menjadi 12,29%. Hal ini sebagai upaya mengoptimalkan *multiplier effect* belanja modal terhadap perekonomian daerah;
3. Belanja tidak terduga diasumsikan turun -83,33% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah juga menurun menjadi 0,06%; serta
4. Belanja transfer diasumsikan naik 7,13% dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total belanja daerah juga meningkat menjadi 21,58%.

3.2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2026

Kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar (pemenuhan SPM), pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Hal tersebut juga sekaligus dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan, serta mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah tahun 2026 dialokasikan secara efisien melalui analisis kewajaran biaya dalam rangka dan diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD diantaranya:

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana sosial dan dana hibah;
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam bentuk uang;
7. Menyesuaikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (yang masih dalam proses penyusunan);
8. Mendukung penguatan *earmarking* Transfer Ke Daerah (TKD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) khususnya dalam mendukung pencapaian SPM, Prioritas Nasional, serta untuk meningkatkan belanja yang produktif (seperti infrastruktur fisik, pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, inovasi, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, dan transportasi publik);
9. Integrasi dan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan;
10. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (seperti penanggulangan kemiskinan dan *stunting*);
11. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
12. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian internal;

- 13. Melakukan efisiensi dan realokasi belanja operasional (misal honorarium, alat tulis kantor, perjalanan dinas, makan minum) yang tidak mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan merubahnya menjadi belanja yang lebih berkualitas; serta
- 14. Meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Adapun prioritas belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

- 1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, dan halaman 111 Permendagri 15/2023). Dari perhitungan belanja fungsi Pendidikan menunjukkan anggaran fungsi pendidikan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku (telah melebihi 20%), yaitu mencapai 33,79% pada RKPD Tahun 2026. Belanja fungsi pendidikan yang besar diantaranya digunakan untuk belanja gaji guru (termasuk TPG) dan belanja operasional sekolah (DAK non Fisik).

Tabel 3.11.
Perhitungan Belanja Fungsi Pendidikan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026

No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2026
A	Total anggaran fungsi pendidikan (A1+A2+A3+A4)	1.137.015.251.087
A.1.	Urusan bidang pendidikan	1.088.188.194.721
A.2.	Urusan bidang kebudayaan	10.515.715.559
A.3.	Urusan bidang perpustakaan	6.182.330.807
A.4.	Urusan bidang kepemudaan dan olahraga	32.129.010.000
B	Total belanja daerah	3.365.045.254.336
C	Rasio anggaran pendidikan (A/B)	33,79%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

- 2. Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan halaman 113 Permendagri 15/2023). Belanja fungsi kesehatan sudah tidak diwajibkan minimal 10% dari APBD, namun demikian dalam RKPD Tahun 2026 telah jauh mencapai 23,64%. Belanja kesehatan yang besar diantaranya belanja BLUD, belanja operasional Kesehatan (DAK non Fisik) dan belanja iuran BPJS (termasuk dari Pajak Rokok).

Tabel 3.12.
Perhitungan Belanja Fungsi Kesehatan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026

No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2026
A	Total anggaran fungsi kesehatan (A1+A2)	596.917.046.245
A.1.	Urusan bidang kesehatan	578.373.202.245
A.2.	Urusan bidang PPKB	18.543.844.000
B	Total belanja daerah	3.365.045.254.336
C	Gaji ASN	839.665.470.664

No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2026
D	Total belanja daerah dikurangi gaji ASN (B-C)	2.525.379.783.672
E	Rasio anggaran kesehatan (A/D)	23,64%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (halaman 114 Permendagri 15/2023). Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dari perhitungan menunjukkan proporsi belanja infrastruktur daerah pada RKPD Tahun 2026 sebesar 18,91%, masih cukup jauh dari ketentuan minimal 40%.

Tabel 3.13.
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026

No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2026
A	Total belanja daerah	3.365.045.254.336
B	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	726.297.553.866
C	Selisih (A-B)	2.638.747.700.470
E	Jumlah belanja infrastruktur daerah (E1+E2+E3)	498.980.835.972
E.1.	Belanja modal	413.677.365.987
E.2.	Belanja hibah	79.030.652.985
E.3.	Belanja bantuan sosial	6.272.817.000
F	Proporsi belanja infrastruktur daerah (E/C)	18,91%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

4. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah menurut perhitungan masih melebihi 30% (tiga puluh persen). Untuk itu, pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (halaman 46 Permendagri 15/2023) yaitu pada Tahun 2027. Dari perhitungan menunjukkan proporsi belanja pegawai pada RKPD Tahun 2026 sebesar 30,76%, hampir mendekati dari ketentuan maksimal 30%.

Tabel 3.14. Perhitungan Belanja Pegawai pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026		
No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2026
A	Belanja pegawai	1.319.089.854.015
B	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	282.870.523.000
C	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.052.500.000
D	Total belanja pegawai yang berasal dari luar TKD yang telah ditentukan penggunaannya (A-B-C)	1.035.166.831.015
E	Total belanja daerah	3.365.045.254.336
F	Proporsi belanja pegawai yang berasal dari luar TKD yang telah ditentukan penggunaannya terhadap belanja daerah (D/E)	30,76%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah akan mempengaruhi kemampuan fiskal daerah melalui pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit. Pembiayaan netto diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Dalam perhitungannya, pembiayaan netto sangat dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai komponen penerimaan pembiayaan.

3.2.3.1. Kinerja Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021-2024

- Kinerja pembiayaan daerah secara umum terbagi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan selama tahun 2021-2024 cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -6,43% dimana secara umum sangat dipengaruhi oleh besarnya SiLPA. Secara rinci masing-masing komponen penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -8,38%. Penurunan ini menunjukkan semakin efektifnya penyerapan APBD dan semakin sesuainya pelaksanaan APBD dengan perencanaan yang ada;
 2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena belum optimalnya penyerapan dana talangan pangan sesuai alokasi yang telah disiapkan; serta
 3. Pencairan dana cadangan telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 untuk pembiayaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai kesepakatan dengan KPUD dan Bawaslu.

- Secara umum, realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2021-2024 juga cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -5,20%. Secara rinci masing-masing komponen pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:
1. Pembentukan dana cadangan sempat dilakukan pada tahun 2022 dan 2024 yang kemudian digunakan untuk pembiayaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024;
 2. Penyertaan modal (investasi) daerah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen;
 3. Seperti halnya penerimaan kembali pemberian pinjaman, pemberian pinjaman daerah mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena belum optimalnya penyerapan dana talangan pangan sesuai alokasi yang telah disiapkan sebelumnya.

Dengan masing-masing kinerja pada sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto yang juga cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar - 6,46% selama tahun 2021-2024.

Tabel 3.15.
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN PEMBIAYAAN	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2021-2024
A.	Penerimaan Pembiayaan	222.085.309.566	271.279.627.199	283.142.890.877	179.270.945.769,98	-6,43%
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	219.985.309.566	269.179.627.199	258.817.350.877	164.691.485.769,98	-8,38%
2.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	1.805.000.000,00	-4,68%
3.	Pencairan dana cadangan	-	-	22.225.540.000	12.774.460.000,00	-42,52%
B.	Pengeluaran pembiayaan	5.100.000.000	35.300.000.000	42.331.000.000	4.305.000.000,00	-5,20%
1.	Pembentukan dana cadangan	-	15.000.000.000	20.000.000.000	0,00	33,33%
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	3.000.000.000	18.200.000.000	20.231.000.000	2.500.000.000,00	-5,56%
3.	Pemberian pinjaman daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	1.805.000.000,00	-4,68%
	Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)	216.985.309.566	235.979.627.199	240.811.890.877	174.965.945.769,98	-6,46%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

3.2.3.2. Asumsi Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2026

Pada RKPD Tahun 2026, penerimaan pembiayaan diasumsikan menurun sebesar -9,42 dibandingkan RAPBD Perubahan Tahun 2025 yaitu menjadi Rp.170.352.262.717,00. Sumber penerimaan pembiayaan terbesar adalah Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang diasumsikan sebesar Rp.168.252.262.717,00 atau 5% dari total belanja yang diasumsikan masih sesuai dengan ketentuan batas maksimal deficit yaitu sebesar 5%. SiLPA dalam hal ini termasuk SiLPA yang berasal dari BLUD.

Sementara itu, pada sisi pengeluaran pembiayaan diasumsikan mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 487,23% dikarenakan oleh:

1. Dilakukan pembentukan dana cadangan pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp.20.000.000.000,00 yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2029;
2. Adanya kenaikan penyertaan modal sebesar 365,13% hingga menjadi Rp.37.210.000.000,00 mendasari Naskah Akademik Peraturan Daerah Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 serta tambahan penyertaan modal sebesar Rp.20 Milyar untuk pembangunan pasar Gombang yang sempat terbakar;
3. Sedangkan pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan RAPBD Perubahan Tahun 2025.

Tabel 3.16.
Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026

NO.	URAIAN PEMBIAYAAN	RAPBD Perubahan Tahun 2025	Asumsi RKPD Tahun 2026	Kenaikan/ (penurunan) TA 2026 dibanding TA 2025
A.	Penerimaan Pembiayaan	188.065.691.946	170.352.262.717	-9,42%
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	185.965.691.946	168.252.262.717	-9,53%
2.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
3.	Pencairan dana cadangan			0,00%
B.	Pengeluaran pembiayaan	10.100.000.000	59.310.000.000	487,23%
1.	Pembentukan dana cadangan		20.000.000.000	100,00%
1.	Penyertaan modal (investasi) daerah	8.000.000.000	37.210.000.000	365,13%
2.	Pemberian pinjaman daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
	Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)	177.965.691.946	111.042.262.717	-37,60%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

3.2.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2026

Mendasari dinamika yang terjadi, kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan melakukan optimalisasi:

1. Peningkatan monitoring evaluasi dan pengendalian internal penyaluran dana talangan pangan dan perikanan;
2. Melakukan identifikasi SiLPA *mandatory* yang akan digunakan kembali untuk belanja *mandatory* pada Perubahan RKPD/APBD;
3. Melakukan identifikasi SiLPA *non-mandatory* untuk menutup defisit RKPD/APBD atau digunakan untuk belanja daerah di perubahan RKPD/APBD;
4. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dana penyertaan modal BUMD;
5. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan; serta
6. Mengkaji rencana penyiapan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2029.

3.2.3.4. Sumber Pembiayaan Alternatif

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menginisiasi pembiayaan alternatif utamanya dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan/aktivitas CSR di Kabupaten Kebumen seperti yang tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 3.17.
Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Badan Usaha	Nama Kegiatan/Aktivitas CSR	Nilai CSR	Sasaran	Volume sasaran
1.	PT Sucofindo	Pemberian Infak & Sodaqoh, Kegiatan sosial keagamaan	Rp100.000.000	Kepala Keluarga (KK)	13 KK
2.	PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan Surveyor Indonesia Gas Metan	Bantuan Paket Sembako Ramadhan 1444 H/ 2023	Rp200.000.000	Kepala Keluarga (KK)	21 KK
3.	BAZNAS Kabupaten Kebumen	Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni	Rp269.000.000	RTLH	24 unit
4.	PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Jumlah Bantuan Paket Sembako	Rp7.150.000	Warga miskin	100
		Jumlah Bantuan Paket Sembako	Rp2.429.000	Warga miskin	25
		Jumlah Bantuan Paket Sembako	Rp800.000	Warga miskin	10
		Jumlah Bantuan Paket Sembako	Rp6.000.000	Warga miskin	50
		Jumlah fakir miskin yang dibantu	Rp750.000	Warga miskin	
5.	PT BPR BKK KEBUMEN (Perseroda)		Rp6.000.000	Warga miskin	200
6.	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Dukungan Kegiatan untuk Kontingen Perkumpulan Olahraga Tunanetra Indonesia	6.000.000		
		Dukungan Kegiatan Penguatan Kapasitas Bunda PAUD Kebumen	3.525.000		
		Bantuan Kegiatan capacity Building Peningkatan SDM	25.000.000		
		Bantuan Mudik Lebaran dan Balik Rantau Gratis	4.500.000		
		Bantuan Paket Sembako Tahrim Ramadhan 1445 H	22.500.000		
		Sembako Kegiatan Tahrim 1445 H untuk Masyarakat Duafa dan tidak mampu	7.500.000		
		Dukungan Paket Sembako Hari Raya Idul Fitri 1445 H	4.125.000		
		Dukungan Kegiatan Olahraga dan Gowes	12.500.000		
		Dukungan Paket Sembako Kegiatan Sosialisasi Sanitasi Lingkungan	9.000.000		
		Dukungan Kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1556 H	6.000.000		
		Dukungan Kegiatan Khataman Akbar Kemerdekaan RI	6.000.000		

Sumber : *Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kebumen Tahun 2024*

- Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berupaya meningkatkan pendanaan CSR diantaranya sebagai berikut:
1. Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan;

2. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah;
3. memberikan arahan kepada Badan Usaha di Daerah dalam pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang tepat sasaran dan tepat manfaat di Daerah;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan komitmen Badan Usaha untuk berkontribusi pada program pembangunan Daerah secara melembaga dan berkelanjutan;
5. memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk: hibah, beasiswa, subsidi, bantuan sosial, pelayanan sosial, pemberdayaan, promosi, dan/atau bentuk lainnya yang ditentukan Badan Usaha;
7. Usaha Kecil, Menengah dan koperasi dapat turut aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan kesukarelaan dan kemampuan;
8. Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
9. Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; serta
10. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah dimana hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Selain CSR, pemerintah Kabupaten Kebumen akan berupaya menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD, dan pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya memaksimalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, penguatan kerjasama antar wilayah serta antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, peningkatan peran filantropi, dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan, lingkungan hidup, dan/atau lainnya dalam kegiatan pembangunan.

3.2.4. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Untuk mendanai pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2026, dilakukan analisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan kinerja ASN termasuk DAU *Earmark* untuk gaji P3K, gaji dan tunjangan KDH dan DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan, DAK Nonfisik untuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru serta pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk mendanai belanja prioritas daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2026 diperoleh alokasi sebesar Rp.2.045.955.400.321,00. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk membiayai belanja prioritas yang terbagi menjadi Prioritas I sebesar Rp.1.397.550.456.350,00 dan Prioritas II sebesar Rp.648.404.943.971,00.

Tabel 3.18.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026

No	Uraian	Asumsi RKPD 2026
A.	Pendapatan	3.254.002.991.619
B.	Penerimaan Pembiayaan	170.352.262.717
C.	Total penerimaan (A+B)	3.424.355.254.336
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:	
D.	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan kinerja ASN, DAU <i>Earmark</i> Gaji P3K, Gaji dan tunjangan KDH dan DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan serta DAK Nonfisik tunjangan profesi dan tamsil guru)	1.319.089.854.015
E.	Pengeluaran Pembiayaan	59.310.000.000
F.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (C-D-E)	2.045.955.400.321

Sumber : Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

Tabel 3.19.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
RKPD Tahun 2026

No	Uraian	Asumsi RKPD 2026
A.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan, yang selanjutnya digunakan untuk belanja prioritas sebagai berikut:	2.045.955.400.321
B.	Prioritas I adalah belanja mandatory yang terdiri dari:	1.397.550.456.350
B.1.	Belanja minimal 10% dari penerimaan PKB dan opsen PKB	12.230.990.215
B.2.	Belanja minimal 10% dari penerimaan Pajak Tenaga Listrik	5.177.130.793
B.3.	Belanja minimal 37,5% dari penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok untuk JKN	27.805.914.880
B.4.	Belanja minimal 12,5% dari penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum tentang rokok	9.268.638.293
B.5.	Belanja minimal 10% dari penerimaan Pajak Air Tanah	42.973.941
B.6.	Belanja BLUD dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD (pendapatan BLUD)	262.440.702.830
B.7.	Belanja BLUD dari SiLPA BLUD	14.189.087.000
B.8.	Belanja dari penerimaan DBHCHT	19.216.338.000
B.9.	Belanja dari penerimaan DAU <i>Earmark</i> Kelurahan	2.200.000.000
B.10.	Belanja dari penerimaan DAU <i>Earmark</i> Pendidikan	88.612.618.000
B.11.	Belanja penerimaan dari DAU <i>Earmark</i> Kesehatan	30.807.786.000
B.12.	Belanja dari penerimaan DAU <i>Earmark</i> Pekerjaan Umum	25.977.721.000
B.13.	Belanja dari penerimaan DAK Fisik	14.495.981.000
B.14.	Belanja dari penerimaan DAK Non Fisik (diluar untuk Tunjangan Profesi dan Tamsil Guru)	224.463.967.000
B.15.	Belanja dari penerimaan Insentif Fiskal'	-
B.16.	Belanja transfer ke desa dari penerimaan Dana Desa	434.223.563.000
B.17.	ADD	199.756.666.400
B.18.	BPJS perangkat desa	5.596.730.000
B.19.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.043.647.997
B.20.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
B.21.	Belanja dari penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi	-
B.22.	Belanja dari pendapatan hibah	-
B.23.	Belanja dari penerimaan dana cadangan	-
C.	Prioritas II terdiri dari:	648.404.943.971
C.1.	Belanja operasional dan prioritas OPD dan Kecamatan	198.389.474.179
C.2.	Belanja kebijakan	450.015.469.791
D	Surplus anggaran riil atau Berimbang (A-B-C)	-

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Visi Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu *"Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya"*. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif;
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah;
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun keterkaitan visi. misi. tujuan. dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 beserta target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2026 secara lengkap diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2026
VISI : "KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA" MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif	Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,80*
			Tingkat Kemiskinan	Persen	14,30-13,40*
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Rupiah perkapita perbulan	1.173.461
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	65,45
		Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	85,7

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2026
MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, <i>ngopeni</i>, <i>ngayomi</i>, dan <i>ngayemi</i> MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, <i>guyub</i>, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal		Sasaran I.4 Meningkatnya kualitas perempuan Kebumen dan perannya dalam pembangunan daerah	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,305
		Sasaran I.5 Meningkatnya kualitas kaum marjinal berbasis keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,22
	Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80-6,30*
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta rupiah	33,75
		Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,86
		Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,13
		Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,62
		Sasaran 2.4. Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	11,47
		Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,60*

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2026
	Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan		Indeks Infrastruktur	Indeks	74,04
			Penurunan Emisi GRK	Ton CO2Eq	1.303.133,41
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	75,24
		Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	94,05
		Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	51,41
		Sasaran 3.4 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	49,44
		Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,45-74,76
		Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	Indeks	94,19
	Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,33
		Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70,03

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2026
		Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,53
		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,63
	Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan		Indeks Kebudayaan	Persen	14,72
			Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,79
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	13,38
		Sasaran 5.2 Terwujudnya kondusifitas wilayah	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	100

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

*) Target sebagai hasil kesepakatan Rakortek oleh Bappeda Provinsi

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada tabel di atas mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan. Sesuai dengan dokumen RPJMD tersebut, maka terdapat 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yang akan dicapai hingga akhir tahun periode RPJMD Tahun 2025-2029.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang telah disusun diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan isu aktual strategis sebagai berikut:

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026

Prioritas pembangunan Nasional pada Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan; serta
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional. Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

- Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis;
- Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; serta
- Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Sementara itu, tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
Tujuan: Mewujudkan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan			
	Tingkat Kemiskinan	%	8,70-8,53
	PDRB Perkapita	Juta rupiah	52,0-55,0
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,00
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis			
	Indeks Integritas Nasional	Angka	81,78

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	86,46 - 89,50
	Otonomi Fiskal Daerah	%	65,72
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan			
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00-6,00
	Inflasi	%	1,5 - 3,5
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,73
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter			
	Indeks Modal Manusia	Angka	0,61
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 - 4,27

Sumber: Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain itu, dalam meningkatkan sinergitas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen juga terdapat dukungan dari Kabupaten Kebumen terhadap beberapa program prioritas Jawa Tengah Tahun 2026 yang secara rinci tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
Indeks Reformasi Birokrasi				
	PP.	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa		
			Peningkatan TPP ASN	TPP PNS Pemkab Kebumen (di luar guru dan BLUD)
			Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah *)	Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah
			Peningkatan Gaji Perangkat Desa	Gaji Perangkat Desa
			Pendidikan dan Pelatihan ASN	Pendidikan dan Pelatihan ASN
			Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa	Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa
	PI.	Digitalisasi Manajemen Arsip		
			Penyusunan regulasi manajemen arsip	Penyusunan regulasi manajemen arsip
			Pembuatan Digital Arsip terintegrasi	Pembuatan Digital Arsip terintegrasi

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
	PA.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak		
			Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan
	PA.	Program Kerjasama Forkopimda		
			Koordinasi Hubungan Kerjasama Pembangunan Daerah melalui Forkopimda	Koordinasi Hubungan Kerjasama Pembangunan Daerah melalui Forkopimda
	PT.	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah		
			Penambahan anggaran penegakan Peraturan Daerah	Anggaran penegakan Peraturan Daerah
			Penambahan SDM penegakan Peraturan Daerah	SDM penegakan Peraturan Daerah
			Revitalisasi sarana dan prasarana PPNS	Revitalisasi sarana dan prasarana PPNS
	PT.	Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan)		
			Kerjasama dengan akademisi	Kerjasama dengan akademisi
			Kerjasama dengan Bisnis	Kerjasama dengan Bisnis
			Kerjasama dengan Komunitas	Kerjasama dengan Komunitas
			Memperkuat Kerjasama Pemerintah	Memperkuat Kerjasama Pemerintah
			Kerjasama dengan Media	Kerjasama dengan Media
	PT.	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah		
			Memperkuat ekosistem riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Memperkuat ekosistem riset dan inovasi dalam pembangunan daerah
Indeks Integritas Nasional				
	PI.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD		
			Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas
			Evaluasi Zona Integritas	Evaluasi Zona Integritas
	PI.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa		
			Penyusunan Pergub tentang kewenangan Inspektorat	Penyusunan Perbup tentang kewenangan Inspektorat
			Sistem informasi pengawasan terintegrasi	Sistem informasi pengawasan terintegrasi
	PA.	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK		
			Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN	Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
			Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa	Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa
Otonomi Fiskal Daerah				
	PI.	Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah		
			Riset potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala	Riset potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala
			Menyusun riset potensi pembangunan desa	Menyusun riset potensi pembangunan desa
			Menyusun rencana pembangunan kawasan pedesaan	Menyusun rencana pembangunan kawasan pedesaan
			Sistem informasi peta potensi desa dan kelurahan	Sistem informasi peta potensi desa dan kelurahan
	PA.	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal		
			Menyusun Regulasi Daerah tentang Pendayagunaan Aset Idle Daerah	Menyusun Regulasi Daerah tentang Pendayagunaan Aset Idle Daerah
			Menempatkan SDM di UPTD Pemanfaatan Aset	Menempatkan SDM di UPTD Pemanfaatan Aset
			Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait pemanfaatan Aset	Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait pemanfaatan Aset
			Promosi pemanfaatan aset potensial	Promosi pemanfaatan aset potensial
			Melakukan kerjasama pengelolaan aset	Melakukan kerjasama pengelolaan aset
	PA.	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD		
			Reformasi Struktur Organisasi	Reformasi Struktur Organisasi
			Peningkatan kompetensi SDM	Peningkatan kompetensi SDM
			Menyusun Rencana Aksi tata kelola BUMD	Menyusun Rencana Aksi tata kelola BUMD
Pertumbuhan Ekonomi				
	PP.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri		
		Pupuk mudah bagi petani	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
		Subsidi solar bagi nelayan	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
		Day care untuk buruh di Kawasan Industri	Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri	Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri
	PP.	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja		
			Pendataan Pemuda (16 - 30 tahun)	Pendataan Pemuda (16 - 30 tahun)
			Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota (terkait dengan data pemuda)	Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota (terkait dengan data pemuda)
	PI.	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru		
			Pemetaan sasaran desa wisata	Pemetaan sasaran desa wisata

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
			Menyiapkan infrastruktur dan SDM pengelola	Mendukung upaya provinsi dalam penyiapan infrastruktur dan SDM pengelola
	PI.	Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah		
		Pengembangan wisata alam	Dieng - Wonosobo	Sinergitas dengan Geopark Kebumen
			Geopark Kebumen	Geopark Kebumen
		Pengembangan wisata religi	Prambanan dan Borobudur - Magelang	Sinergitas dengan Geopark Kebumen
	PI.	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening		
			Pengembangan Kawasan Borobudur	Sinergitas dengan Geopark Kebumen
	PA.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis		
			Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM
			Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM	Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM
			Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM
			Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM
	PA.	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM		
			Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)	Subsidi Bunga
			Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM yang bekerjasama dengan Diaspora	Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM
		Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi baik di Wilayah Perbatasan maupun di Kabupaten / Desa		
			Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Kabupaten
	PA.	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan		
			Penyesuaian dan Implementasi Regulasi Daerah terkait Industri Ramah Lingkungan	Penyesuaian dan Implementasi Regulasi Daerah terkait Industri Ramah Lingkungan
			Pemberian Insentif bagi Investor yang telah menerapkan Industri Ramah Lingkungan	Pemberian Insentif bagi Investor yang telah menerapkan Industri Ramah Lingkungan
	PA.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya		

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
			DAS Serayu	Program lingkungan hidup di wilayah DAS Serayu yang berada di Kabupaten Kebumen
	PA.	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi		
			Sewa Lahan Pertanian dari Masyarakat, Pekerja oleh Masyarakat, tapi dikelola oleh Investor Swasta dengan Mengedepankan Kesejahteraan Petani	Corporate Farming
	PA.	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian		
			Adanya sistem kolaborasi pertanian, swasta melakukan sewa lahan kepada pemilik lahan kemudian dilakukan penyesuaian lahannya dan yang mengelola dikembalikan ke pemilik lahan agar yang awalnya panenya 3 kali setahun bisa 4 kali setahun	Corporate Farming
	PA.	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora		
			Identifikasi budaya lokal di Jawa Tengah	Sinergitas dengan Geopark Kebumen
			Pameran Budaya Jawa Tengah di forum Internasional	Sinergitas dengan Geopark Kebumen
			Pengembangan jejaring Diaspora untuk promosi budaya	Sinergitas dengan Geopark Kebumen
	PA.	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya		
			Menyusun riset investasi berbasis padat karya	Menyusun riset investasi berbasis padat karya
			Menyusun peta investasi berbasis padat karya	Menyusun peta investasi berbasis padat karya
			Identifikasi potensi investasi proyek pemerintah yang padat karya	Identifikasi potensi investasi proyek pemerintah yang padat karya
			Promosi investasi dalam dan luar negeri	Promosi investasi dalam dan luar negeri
	PA.	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa		
			Identifikasi dan Pemetaan Potensi Bibit Ternak Khas Jawa	Identifikasi dan Pemetaan Potensi Bibit Ternak Khas Kebumen
			Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Lokal	Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Lokal
			Pelatihan dan Pendampingan Peternak lokal	Pelatihan dan Pendampingan Peternak lokal
			Penjaminan Kualitas Pakan Ternak	Penjaminan Kualitas Pakan Ternak
	PT.	Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi		
			Pesantren olah sampah	Fasilitasi kepada pesantren
			Pesantren mandiri energi	Fasilitasi kepada pesantren

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
	PT.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan		
			Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir
			Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi petani perempuan	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi petani perempuan
	PT.	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)		
			Pendampingan pembentukan badan hukum untuk Bumdes	Pendampingan pembentukan badan hukum untuk Bumdes
			Penyusunan Regulasi Daerah tentang Bumdes	Mendukung Penyusunan Regulasi Daerah tentang Bumdes
	PT.	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan		
			Penguatan Urban Farming di Perkotaan	Pertanian Pangan Lestari
			Pelatihan dan pembinaan kepada petani urban farming	Pertanian Pangan Lestari
			Promosi hasil urban farming	Pertanian Pangan Lestari
	PT.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha		
			Percepatan perizinan	Percepatan perizinan
			Pemberian insentif bagi investor	Pemberian insentif bagi investor
Tingkat Pengangguran Terbuka				
	PP.	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)		
			Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja	Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja
			Bursa Kerja / Job Fair	Bursa Kerja / Job Fair
	PA.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta		
			Penyetaraan ijazah lulusan pesantren	Penyetaraan ijazah lulusan pesantren
	PA.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan		
			Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal	Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal
			Standarisasi rumah pemotongan hewan	Standarisasi rumah pemotongan hewan
	PA.	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja		

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
			Membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri	Membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri
	PT.	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan		
			Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki-laki	Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki-laki
			Perlindungan atas hubungan industrial	Perlindungan atas hubungan industrial
			Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah	Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah
Indeks Demokrasi Indonesia				
	PA.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan		
			Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan	Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan
			Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas	Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas
	PA.	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan		
		Peningkatan kegiatan forum Kerukunan antar Umat Beragama		
			Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan
	PT.	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan		
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengarusutamaan Gender
			Penguatan perempuan dalam pembangunan daerah berbasis organisasi	Penguatan perempuan dalam pembangunan daerah berbasis organisasi
Indeks Modal Manusia				
	PP.	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren		
			Hibah pesantren	Hibah pesantren
	PP.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin		
			Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin
	PP.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi		
			Insentif Guru	Insentif Guru
			Insentif pengajar agama	hibah guru ngaji

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
	PI.	Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil		
			Balita	Balita
			Pemberian PMT	Pemberian PMT
			Pemberian Suplemen	Pemberian Suplemen
	PA.	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit		
			Lansia	Lansia
			Ibu Hamil	Ibu Hamil
			Disabilitas	Disabilitas
			Pensiunan	Pensiunan
	PA.	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga		
			Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih	Hibah kepada KONI, NPC, KORMI
			Peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga	Hibah kepada KONI, NPC, KORMI
			Meningkatkan alokasi anggaran KONI dan KORMI	Hibah kepada KONI, NPC, KORMI
	PA.	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan		
			Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusif	Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusif
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas
	PT.	Pap smear gratis (skrining Ca serviks)		
			Skrining IVA	Skrining IVA
	PT.	Peningkatan kualitas hidup lansia		
			Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia	Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia
			Pemeriksaan kesehatan	Pemeriksaan kesehatan
			Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi	Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi
	PT.	Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah		
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	PT.	Cek kesehatan gratis		
			Balita	Balita
			anak usia dua tahun	anak usia dua tahun
			Anak usia sekolah Kelas 7	Anak usia sekolah Kelas 7
			skrining TB anak dan dewasa	skrining TB anak dan dewasa
Angka Kemiskinan				

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
	PP.	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional		
			Verifikasi dan Validasi RTLH	Verifikasi dan Validasi RTLH
			Penyediaan Anggaran	Penyediaan Anggaran
	PI.	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa		
			Gubernur	Bantuan Keuangan Khusus
	PI.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari		
		Pembelian hasil panen petani	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Mengoptimalkan Hasil Pertanian (Intensifikasi)	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Mengoptimalkan Hasil Pertanian (Intensifikasi)
			Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen	Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen
		Pembelian hasil panen nelayan	Pelatihan Penggunaan Teknologi GPS pada Nelayan	Pelatihan Penggunaan Teknologi GPS pada Nelayan
			Pelatihan Petambak Garam untuk Peningkatan Kualitas Produksi Garam Industri	Pelatihan Petambak Garam untuk Peningkatan Kualitas Produksi Garam Industri
			Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen	Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen
	PA.	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah		
			Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola CSR	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola CSR
			Penyusunan lembaga pengelola CSR	Penyusunan lembaga pengelola CSR
			Identifikasi program yang dibiayai CSR	Identifikasi program yang dibiayai CSR
	PA.	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana		
			Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah	Identifikasi wilayah rawan bencana
			Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi	Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi
			Monitoring sistem peringatan bencana	Monitoring sistem peringatan bencana
	PT.	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin		
			Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin
	PT.	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya		
			Identifikasi desa mandiri energi	Identifikasi desa mandiri energi
			Melakukan riset potensi mandiri energi berbasis desa	Melakukan riset potensi mandiri energi berbasis desa
	PT.	Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren		
		Penerapan Pendidikan dan pelatihan Perubahan Iklim	SMA/SMK	SD/SMP
			Pesantren	Pesantren

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Provinsi Jawa Tengah			Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2026
		Penerapan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	SMA, SMK, SLB	SD/SMP
			Pesantren	Pesantren
	PT.	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat		
			Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana	Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana
			- BPBD Provinsi	- BPBD
			- Tagana	- Tagana
			- Masyarakat	- Masyarakat
			Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota
IKLH				
	PP.	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai		
			Penanaman mangrove	Penanaman mangrove
	PA.	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa		
			RTH Perkotaan	RTH Perkotaan
	PT.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional		
		Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Penguatan tata kelola KSM	Penguatan tata kelola KSM
			Peningkatan kapasitas KSM	Peningkatan kapasitas KSM
		Pengembangan tempat pengolahan sampah regional	Modernisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)	Modernisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)
			Penguatan Tata kelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)	Penguatan Tata kelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg)
Inflasi				
	PT.	Subsidi Pangan Murah		
			Identifikasi kebutuhan pokok yang sudah disubsidi	Subsidi harga dan GPM
			Identifikasi penerima bantuan	Subsidi harga dan GPM
			Penyiapan anggaran	Subsidi harga dan GPM

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 bersumber dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang telah dirumuskan pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu “Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan;
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Tahun 2024, permasalahan, isu aktual yang, isu strategis, sinkronisasi dengan pokok-pokok pikiran DPRD, pendekatan partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting karena prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mengatasi permasalahan daerah serta tantangan hingga peluang dari munculnya isu-isu aktual maupun isu strategis. Prioritas pembangunan daerah tersebut terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan Tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

Keterkaitan prioritas pembangunan dengan hasil evaluasi sampai dengan Tahun 2024, permasalahan, isu aktual, dan isu strategis selanjutnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Keterkaitan Hasil Evaluasi sampai dengan Tahun 2024, Permasalahan, Isu Aktual, Isu Strategis dan Prioritas Daerah
pada RKPD Tahun 2026

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2024	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026
Dengan angka kemiskinan sebesar 15,71% pada Tahun 2024 masih menjadi Kabupaten/Kota termiskin se-Jawa Tengah	Masih tingginya tingkat kemiskinan;	Penanggulangan kemiskinan;	Prioritas 1: Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
Berdasarkan data BPS menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp.8.910.000,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.10.176.000,00 pada Tahun 2024. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan pengeluaran per kapita dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	
Persentase balita gizi kurang pada tahun 2020 mencapai 0,55% dan meningkat menjadi 4,8% pada Tahun 2024. Sementara itu, persentase balita gizi buruk sempat meningkat dari 0,02% pada Tahun 2020 hingga mencapai 0,059% pada Tahun 2023 dan dapat menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 0,02%. Prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut eletronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) prevalensi stunting Kabupaten Kebumen sebesar 15,34 dan terus menurun menjadi 9,17 pada Tahun 2024. Sedangkan jumlah penderita stunting juga relatif menurun dari 10.484 orang pada Tahun 2020 menjadi 6,752 pada Tahun 2024			
Pasca Pandemi Covid-19, jumlah kasus kematian ibu kembali menurun hingga sebanyak 15 kasus pada Tahun 2024. Namun perhitungan AKI justru menunjukkan hal sebaliknya yaitu cenderung meningkat dari 76,75 pada Tahun 2020 menjadi 108,96 pada Tahun 2024 dikarenakan pembandingnya yaitu jumlah kelahiran menurun			
Data menunjukkan jumlah kasus kematian bayi terus meningkat selama periode 2020-2023 yaitu dari 136 kasus pada Tahun 2020 menjadi 203 kasus pada Tahun 2023, namun demikian berhasil turun kembali menjadi 144 kasus pada Tahun 2024. Hal yang sama juga tercermin pada AKB yang meningkat dari 6,96 pada Tahun 2020 menjadi 12,49 pada Tahun 2023, namun dapat menurun kembali pada Tahun 2024 menjadi 10,46			
Tercermin dari Indeks Pendidikan yang mengukur tingkat pencapaian pendidikan suatu populasi yang diperoleh dari perhitungan komponen IPM dimensi pendidikan yaitu RLS dan HLS. Dalam perhitungannya batas atas untuk RLS adalah 15 tahun (setara dengan tingkat Pendidikan sarjana) dan untuk HLS adalah 18 tahun (perkiraan maksimum dalam sistem pendidikan formal). Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen relatif meningkat dari 62,20 pada Tahun 2020 menjadi 63,34 pada Tahun 2024. Dengan capaian baru sekitar 63,34 menunjukkan perlu upaya peningkatan RLS maupun HLS agar mencapai skala maksimum 100 yaitu RLS sebesar 15 tahun dan HLS sebesar 18 tahun.			

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2024	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026
Kinerja RLS Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 7,54 pada Tahun 2020 menjadi 7,87 pada Tahun 2024. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,87 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten tetangga, menunjukkan RLS Kabupaten Kebumen masih di bawah Kabupaten Purworejo dan Banyumas serta juga masih di bawah tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan kinerja selama Tahun 2023-2024 yang hanya mengalami kenaikan 0,01 menunjukkan kalah cepat dengan kinerja Kabupaten Banyumas dan Purworejo serta Nasional. Masih lemahnya kinerja RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2020-2023			
Sepanjang Tahun 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen terus membaik. Dimulai dengan kontraksi sebesar -1,46% pada Tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kebumen terus menguat dalam nilai positif dengan puncaknya pada Tahun 2022 sebesar 5,79%, walaupun kemudian mengalami pelemahan selama periode Tahun 2022-2024 hingga mencapai 5,30% pada Tahun 2024.	Masih rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	Prioritas 2: Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan
Terjadi penurunan rasio kewirausahaan di Kabupaten Kebumen yang sempat mencapai 4,06% pada Tahun 2022, kemudian menurun menjadi hanya 2,17 pada Tahun 2023 yang merupakan angka terendah sejak Tahun 2020.			
Jumlah industri kecil dan menengah hanya bertambah 58 unit selama periode Tahun 2020-2024 sehingga mencapai 56.466 unit pada Tahun 2024 yang menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan/penambahan industri kecil dan menengah. Sementara itu, jumlah industri besar baru mencapai 4 unit hingga Tahun 2024 yang menunjukkan masih sedikitnya industri besar			
Selain sebagai bahan pangan utama, Kabupaten Kebumen juga masih menjadi lumbung padi nasional. Namun demikian, produktivitas padi cenderung mengalami penurunan dari 6,08 ton/ha pada Tahun 2020 menjadi 5,67 ton/ha pada Tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena anomali cuaca menyebabkan mundurnya musim tanam. Sementara itu, 5 komoditas bahan pangan utama lokal juga mengalami penurunan produktivitas dari 5,72 ton/ha pada Tahun 2020 menjadi 5,61 ton/ha pada Tahun 2024.			
Data menunjukkan produksi perikanan tangkap terus meningkat dari 9.068.530,00 kg pada Tahun 2020 menjadi 12.898.015,49 kg pada Tahun 2023, namun menurun pada Tahun 2024 menjadi 9.522.860 kg atau turun sebesar 26,17% antara periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024			
Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi produksi garam. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir produksi garam cenderung menurun dari 144.620,00 kg pada Tahun 2020 menjadi hanya 54.110,00 kg pada Tahun 2024 atau turun sebesar -62,58% antara periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024			
Terjadi net ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya yaitu dari -7,36% pada Tahun 2020 menjadi -3,71% pada Tahun 2024. Angka minus menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah.			
Rata-rata lama tinggal wisatawan cenderung menurun sejak Tahun 2022 hingga menjadi 1,29 hari pada Tahun 2024.			

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2024	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026
Indeks infrastruktur daerah terus meningkat dari 46,53% pada Tahun 2020 menjadi 68,85% pada tahun 2024. Hal ini ditunjang oleh kenaikan ketiga komponennya yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang meningkat dari 56,15% pada Tahun 2020 menjadi 59,00% pada Tahun 2024. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman menunjukkan peningkatan tajam dari 11,89% pada Tahun 2020 menjadi 71,16% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan meningkat dari 71,56% pada Tahun 2020 menjadi 75,78% pada Tahun 2024. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan kinerja sampai dengan Tahun 2024 baru mencapai 68,85% menunjukkan perlunya peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infarstruktur daerah. Hingga Tahun 2024 terdapat 411,814 km jalan kabupaten dalam kondisi baik atau 40,49%, dalam kondisi sedang sepanjang 335,543 km atau 32,99%, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 166,827 km atau 16,40% dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 102,966 km atau 10,12%. Terjadi penurunan jembatan dalam kondisi baik dari 375 unit atau 49,21% pada Tahun 2020 menjadi hanya 44 unit atau 6,91% pada Tahun 2024. Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga Tahun 2024 yaitu irigasi teknis sekunder sepanjang 186.105 meter dan irigasi teknis tersier sepanjang 28.300 meter. Dari data tersebut menunjukkan proporsi irigasi dalam kondisi baik terus meningkat dari 73,7% pada Tahun 2020 menjadi 78,75% pada Tahun 2024, sedangkan proporsi irigasi kondisi sedang relatif menurun dari 1,73% pada Tahun 2020 menjadi 1,4% pada Tahun 2024. Sementara itu, irigasi kondisi rusak ringan relatif meningkat dari 1,06% pada Tahun 2020 menjadi 1,17% pada Tahun 2024 dan irigasi kondisi rusak berat menurun dari 23,51% pada Tahun 2020 menjadi 18,67% pada Tahun 2024. Secara menyeluruh, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) pada Tahun 2024 telah mencapai 59,21%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan nilai indeks sebesar 59,21% maka kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 73,92 pada Tahun 2020 menjadi 69,86 pada Tahun 2024 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan flukutifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2024 IKA pada posisi 53,11 atau masuk kategori sedang, sementara IKU pada posisi 91,42 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 58,73 atau masuk kategori sedang. Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 47,65% pada Tahun 2020 menjadi 25,69% pada Tahun 2024	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah; Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan;	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah; Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan;	Prioritas 3: Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2024	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2026	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026
penurunan emisi GRK yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO₂eq pada Tahun 2023 menjadi 151.888,21 TonCO₂eq pada Tahun 2024. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada Tahun 2025 yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 206.765,97 TonCO₂eq. IRBI Kabupaten Kebumen cenderung meningkat yang menunjukkan lebih meningkat risiko terhadap bencana yaitu dari 114,67 pada Tahun 2020 menjadi 121,38 pada Tahun 2024. Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 63,84 pada Tahun 2020 menjadi 67,54 pada Tahun 2024 atau masuk kategori B/Baik (Nilai > 60 – 70). Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja diantaranya pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Nilai persepsi korupsi sempat meningkat dari Tahun 2020 sebesar 3,34 menjadi 3,90 pada Tahun 2023 namun turun pada Tahun 2024 menjadi 3,75 yang masih masuk kategori Bersih dari Korupsi. Terdapat tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen. Walaupun kedua pelanggaran tersebut dapat diatasi dan diselesaikan secara penuh sebesar 100, namun hingga Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan pelanggaran K3 sebesar 35.226 kasus dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah sebanyak 35.969 kasus Sepanjang tahun 2020-2024, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada Tahun 2021, 2023 dan 2024 kinerja persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan terus meningkat dari 2,19% pada Tahun 2020 menjadi 11,50% pada Tahun 2024 dimana dengan capaian tersebut masih perlu upaya lebih untuk terus ditingkatkan Jumlah pengunjung tempat bersejarah cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 112.644 orang pada Tahun 2020 menjadi 46.636 orang pada Tahun 2024 Kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir terus sempat meningkat dari 0,21% pada Tahun 2020 menjadi 87,53% pada Tahun 2023, namun turun menjadi 46% dikarenakan penurunan penyelenggaraan even di tahun 2024			
	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	Pengoptimalan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	Prioritas 4: Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
	Belum optimalnya keamanan dan ketertiban;	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;	Prioritas 5: Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan
	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.	Peningkatan pemajuan kebudayaan.	

Sumber : Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilakukan melalui upaya:
 - a) Optimalisasi integrasi program penanggulangan kemiskinan, fokus ketersediaan dan keakuratan data sebagai dasar pengalokasian program-program penanggulangan kemiskinan serta memperkuat kelembagaan dan koordinasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang pokok masyarakat;
 - c) Penanganan dan pencegahan *stunting* melalui pemberian bantuan makanan dan peningkatan gizi;
 - d) Peningkatan ketahanan pangan dan panganekaragaman pangan;
 - e) Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - f) Penanganan dan pencegahan kematian ibu hamil dan kematian bayi;
 - g) Peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular di masyarakat;
 - h) Peningkatan mutu dan akses pelayanan pendidikan;
 - i) Peningkatan pemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan;
 - j) Pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat serta
 - k) Peningkatan kualitas keluarga;
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan, dilakukan melalui upaya:
 - a) Penyiapan tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*;
 - b) Pembinaan sektor informal utamanya PKL;
 - c) Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan inkubasi;
 - d) Peningkatan pemberdayaan UMKM agar UMKM mampu naik kelas;
 - e) Hilirisasi berbasis UMKM termasuk mendukung posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional terkait hilirisasi industri berbasis komoditas pertanian;
 - f) Peningkatan produktivitas pertanian serta pembangunan kawasan pertanian terpadu diantaranya dalam rangka mendukung posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional;
 - g) Peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - h) Peningkatan daya saing perdagangan melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk lokal, memperluas jejaring pemasaran serta peningkatan konsumsi produk lokal;
 - i) Peningkatan promosi, even, paket wisata yang terintegratif, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi *Geopark* Kebumen melalui pengembangan *geosite* prioritas agar wisatawan lebih lama tinggal serta berbelanja di Kabupaten Kebumen; serta
 - j) Peningkatan realisasi investasi.
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan, dilakukan melalui upaya:
 - a) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
 - b) Peningkatan pemeliharaan jaringan dan kinerja sistem irigasi;
 - c) Peningkatan cakupan akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan;
 - d) Peningkatan penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni serta peningkatan kualitas sanitasi masyarakat;
 - e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama mendorong peningkatan kualitas air dan kualitas tutupan lahan melalui peningkatan konservasi air,

- pengurangan dan pengendalian pencemaran air, serta pemeliharaan dan optimalisasi RTH;
- f) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah;
 - g) Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta peningkatan upaya penurunan emisi GRK; serta
 - h) Peningkatan mitigasi dan ketahanan terhadap bencana.
4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan melalui upaya:
- a) Peningkatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan kapasitas fiskal keuangan daerah; serta
 - c) Peningkatan kapabilitas inovasi melalui peningkatan Sentra KI dan peningkatan publikasi ilmiah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan, dilakukan melalui upaya:
- a) Peningkatan kewaspadaan dini;
 - b) Peningkatan penanganan dan pencegahan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) serta pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah;
 - c) Peningkatan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda; serta
 - d) Peningkatan even dan fasilitasi terhadap ekspresi budaya.

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan merupakan konsep **tematik** sebagai arah kebijakan dalam mencapai target-target pembangunan. Selanjutnya konsep **holistik** dilakukan dengan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program prioritas beserta target dan pagu indikatifnya yang secara detail dijabarkan pada Bab V. Program prioritas selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam kegiatan hingga sub kegiatan yang secara lengkap (termasuk target, pagu, lokus dan fokus) telah terentri pada SIPD Tahun 2025 seperti yang tercantum pada Lampiran III. Konsep **integratif** dilakukan dengan melibatkan *multistakeholders* dari beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah, akademisi, jurnalis, komunitas, dunia usaha, legislatif, perangkat daerah tingkat propinsi maupun lembaga/kementerian dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian, pengembangan koridor wilayah, serta pengembangan Geopark Kebumen yang selanjutnya diuraikan secara rinci pada subbab-subbab berikut pada Bab IV ini. Seperti halnya konsep integratif, konsep **spasial** dilakukan memperhatikan lokus prioritas diantaranya dilakukan pada pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian, pengembangan koridor wilayah, serta pengembangan *Geopark* Kebumen yang selanjutnya diuraikan secara rinci pada subbab-subbab berikut pada Bab IV ini.



Gambar 4.1
Konsep THIS pada Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2026. Selanjutnya dukungan program prioritas (termasuk target dan pagu indikatifnya) terhadap Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2026. Secara lengkap keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026 tersaji pada Tabel 4.3.

Tabel 4.5.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2026

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Prioritas 1 Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Prioritas 3 Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter	Prioritas 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas Prioritas 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 2 Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Prioritas 2 Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Prioritas 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Prioritas 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Prioritas 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Prioritas 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 3 Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Prioritas 2 Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Prioritas 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Prioritas 4 Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 1 Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis	Prioritas 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan
Prioritas 5 Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Prioritas 1 Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis Prioritas 3 Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter	Prioritas 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Prioritas 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, Bappeda Prov. Jateng dan Bappenas, 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sejumlah 5 prioritas secara keseluruhan prioritas tersebut selaras dengan 3 prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah, dan 8 prioritas nasional pada RPJMN. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional sebesar 100% karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah telah sesuai dan selaras dengan prioritas nasional.

Selain itu, dalam perumusan prioritas pembangunan RKPd Kabupaten Kebumen Tahun 2026 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 telah selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen dengan indikator dan target pada Tahun 2026 serta Prioritas Daerah Tahun 2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Keselarasan Sasaran RPJMD, Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen
dengan Prioritas Nasional Tahun 2026

Sasaran		Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
1	Sasaran 1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita (rupiah perkapita per bulan)	1.173.461	Prioritas 1 Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Prioritas 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas Prioritas 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
2	Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (indeks)	65,45		
3	Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (indeks)	85,7		
4	Sasaran I.4 Meningkatnya kualitas perempuan Kebumen dan perannya dalam pembangunan daerah	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,305		
5	Sasaran I.5 Meningkatnya kualitas kaum marjinal berbasis keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (indeks)	65,22		
6	Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	2,86	Prioritas 2 Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Prioritas 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Prioritas 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Prioritas 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
7	Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah (persen)	2,13		
8	Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan (persen)	6,62		
9	Sasaran 2.4. Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (persen)	11,47		
10	Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,60*		

Sasaran		Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
					Prioritas 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
11	Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman (indeks)	75,24	Prioritas 3 Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Prioritas 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Prioritas 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan
12	Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan (indeks)	94,05		
13	Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (indeks)	51,41		
14	Sasaran 3.4 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Desa Mandiri (persen)	49,44		
15	Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	74,45-74,76		
16	Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana (indeks)	94,19		
17	Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP (nilai)	70,03	Prioritas 4 Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan
18	Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP (nilai)	3,53		
19	Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,63		
20	Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (persen)	13,38	Prioritas 5 Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Prioritas 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Prioritas 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan

Sasaran		Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
21	Sasaran 5.2 Terwujudnya kondusifitas wilayah	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (indeks)	100		yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan Bappenas, 2025
 Keterangan : *) Target sebagai hasil kesepakatan Rakortek oleh Bappeda Provinsi

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sasaran pembangunan daerah sejumlah 21 sasaran dan telah selaras dengan prioritas nasional. Adapun tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan prioritas nasional pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 sebesar 100%.

4.2.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menyebutkan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dalam rangka penyusunan RKPd dan Renja Perangkat Daerah dengan diselaraskan kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan tahun 2026 yaitu “Pemenuhan Infrastruktur dalam rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”.

Mendasari hal tersebut di atas, pokok-pokok pikiran DPRD akan diprioritaskan pada:

1. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan infrastruktur jalan kewenangan kabupaten. Selain sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2026 yang akan memprioritaskan pemenuhan infrastruktur di awal periode RPJMD, hal ini juga sesuai dengan prioritas 3 yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan.
2. Belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa berupa kegiatan pembangunan/ peningkatan/pemeliharaan infrastruktur jalan dengan prioritas jalan poros desa.
Hal ini juga sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2026 yang akan memprioritaskan pemenuhan infrastruktur di awal periode RPJMD maupun dengan prioritas 3 yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan, utamanya terkait pemerataan infrastruktur sampai ke wilayah desa.
3. Belanja kegiatan prioritas pembangunan daerah lainnya.

Selain terkait prioritas 3 yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan, kebijakan pokok-pokok pikiran juga diarahkan pada ke-4 prioritas yang lain dalam rencana pembangunan Tahun 2026 yaitu:

- a. Prioritas 1, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Prioritas 2, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan;
- c. Prioritas 4, peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; serta
- d. Prioritas 5, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan.

4.2.5. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih menjadi salah satu permasalahan utama yang belum terselesaikan, walaupun berbagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan sudah dilakukan, angka kemiskinan masih tinggi dan tertinggal dengan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan hasil yang membaik. Tingkat kemiskinan sempat kembali meningkat dari 17,59% pada Tahun 2020 menjadi 17,83% pada Tahun 2021 dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19. Namun demikian dengan semakin membaiknya perekonomian daerah mampu memperbaiki kinerja tingkat kemiskinan yang terus menurun menjadi 15,71% pada Tahun 2024. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin. Walaupun sempat meningkat dikarenakan Pandemi Covid-19 dari 211.090 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 212.900 pada Tahun 2021, pasca pandemi jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 187.950 jiwa pada Tahun 2024.

Kenaikan garis kemiskinan masih menjadi isu pelik dalam penanggulangan kemiskinan, selain karena dasar perhitungan tingkat kemiskinan menurut BPS adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus merangkak naik dari Rp.380.557,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp.471.824,00 pada Tahun 2024. Walaupun kenaikan garis kemiskinan dapat berarti terjadinya peningkatan standar hidup, namun disisi lain kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan garis kemiskinan. Seperti yang telah tercantum pada Bab II, menunjukkan kenaikan inflasi (menggunakan perhitungan deflator) tahun sebelumnya cukup mempengaruhi kenaikan garis kemiskinan berikutnya. Sebagai contoh ketika terjadi kenaikan inflasi tertinggi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 4,28% menyebabkan kenaikan garis kemiskinan tertinggi di tahun berikutnya yaitu sebesar 8,58% pada Tahun 2023. Selanjutnya ketika inflasi relatif menurun pada Tahun 2023 menjadi sebesar 3,78% maka kenaikan garis kemiskinan juga relatif menurun menjadi 4,46% pada Tahun 2024. Untuk itu kenaikan garis kemiskinan seharusnya diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan selama kurun waktu 2020-2024 Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Secara umum fluktuasi tingkat kemiskinan memiliki pola yang sama yaitu sempat meningkat pada Tahun 2021 dikarenakan Pandemi Covid-19. Walaupun Kabupaten Kebumen masih menjadi Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, akan tetapi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan utamanya dengan pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan yang tepat lokus, fokus maupun tepat secara waktu. Keberhasilan upaya ini bisa terlihat dengan kinerja penurunan tingkat kemiskinan selama Tahun 2020-2024 Kabupaten Kebumen mencapai 1,88% lebih baik

dibandingkan kinerja Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,94% dan Nasional sebesar 0,75%.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, strategi dari sisi makro adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Menjaga stabilitas ekonomi makro;
3. Menjaga stabilitas harga dan inflasi;
4. Menciptakan iklim yang mendukung investasi;
5. Menciptakan regulasi perdagangan untuk menjamin kelancaran distribusi; serta
6. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mantap di seluruh wilayah (terdepan. terkecil. tertinggal. maupun pusat ekonomi baru).

Sementara itu strategi penanggulangan kemiskinan mikro mendasari determinan penyebab kemiskinan adalah prioritas intervensi sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, akan dilakukan prioritas intervensi pada dimensi:
 - a. Kesehatan dengan kegiatan prioritas:
 - 1) Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas kurang mampu;
 - 2) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi masyarakat miskin; serta
 - 3) Pemberian jaminan kesehatan bagi warga miskin di luar menu BPJS.
 - b. Pendidikan dengan kegiatan prioritas:
 - 1) Mengoptimalkan pesantren/lembaga keagamaan;
 - 2) Memberikan beasiswa; serta
 - 3) Menyelenggarakan pendidikan non formal.
 - c. Infrastruktur dasar dengan kegiatan prioritas:
 - 1) Peningkatan akses sanitasi aman;
 - 2) Peningkatan akses air minum perpipaan; serta
 - 3) Peningkatan akses hunian layak.
 - d. Konsumsi dengan kegiatan prioritas:
 - 1) Pemberian bantuan permakanan dan sandang; serta
 - 2) Edukasi makanan sehat.
 - e. Ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas yaitu pengembangan desa berbasis pertanian
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat, akan dilakukan prioritas intervensi pada dimensi ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas:
 - a. Pengembangan petani milenial;
 - b. Pengembangan *corporate farming*; serta
 - c. Pengembangan *integrated farming*.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, akan dilakukan prioritas intervensi pada dimensi ketenagakerjaan dengan kegiatan prioritas:
 - a. Penyiapan tenaga kerja;
 - b. Perlindungan tenaga kerja formal dan informal;
 - c. Akselerasi pengembangan pusat pertumbuhan baru;
 - d. Pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. Peningkatan kapasitas UMKM;
 - f. Pengembangan inkubasi wirausaha;
 - g. Perluasan akses permodalan bagi UMKM; serta
 - h. Optimalisasi Sentra KI (Kekayaan Intelektual)

Namun demikian, ketersediaan dan keakuratan data sebagai dasar pengalokasian program-program penanggulangan kemiskinan menjadi fokus utama di Tahun 2026. Selain itu juga dilakukan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kebumen

yang ditujukan untuk memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik, responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan termasuk koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan hingga level desa. Penguatan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan juga perlu dilaksanakan untuk menjamin program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak kepada masyarakat. Selanjutnya keterlibatan berbagai sektor dan peran aktif masyarakat menjadi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sumber pembiayaan utama penanggulangan kemiskinan di daerah adalah anggaran pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu dukungan pendanaan di tingkat desa melalui dana desa seringkali digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Lembaga swasta dan dunia usaha seringkali berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pemberian bantuan sosial, bantuan biaya pendidikan, kesehatan, pemenuhan infrastruktur dasar maupun program yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kemitraan dan kerjasama dengan swasta dapat dioptimalkan dalam rangka membangun sinergi penanggulangan kemiskinan selain melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun demikian perlu dilakukan inovasi sumber pendanaan dan atau melakukan pendekatan-pendekatan alternatif sumber pembiayaan agar jangkauan program penanggulangan kemiskinan dapat lebih luas. Terdapat beberapa mekanisme pendanaan yang dapat dilakukan seperti skema *Public-Private Partnership* (PPP) yang dianggap lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya kemungkinan adanya pinjaman lunak untuk skema penanggulangan kemiskinan dan penggalangan *crowdfunding* di era digital yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

4.2.6. Penanganan Stunting

Salah satu isu yang dihadapi oleh Kabupaten Kebumen dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah masih ditemukannya kasus stunting. Meskipun jumlah penderita maupun prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, penanganan stunting tetap menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat dampak negatifnya terhadap kualitas sumberdaya manusia. Stunting dalam jangka panjang memiliki akibat buruk yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan disabilitas di usia tua.

Upaya penurunan stunting akan dilakukan antara lain melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Intervensi sasaran balita resiko stunting dengan skala prioritas tingkat keberhasilan;
2. Pemberian edukasi pada kelompok rentan remaja, pasangan usia subur, ibu hamil;
3. Peningkatan layanan/inovasi pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan wanita usia subur;
4. Peningkatan layanan KB untuk menurunkan unmeet need dan meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan;
5. Penyediaan sarana pendukung seperti jamban sehat, air bersih dan rumah layak huni;

6. Perbaikan manajemen dan koordinasi lintas sektor dalam kerjasama penanganan stunting; serta
7. Validasi data pemantauan tumbuh kembang balita dan data kelompok rentan stunting (remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan wanita usia subur).

Selain beberapa strategi tersebut, peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam melakukan koordinasi, sinergi, dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan juga perlu diperkuat dalam rangka mendukung target penurunan prevalensi stunting se-Jawa Tengah. Hal ini dilakukan secara berjenjang hingga tingkat desa/kelurahan dengan keterpaduan para pelaku dalam memastikan sasaran menerima manfaat program/kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

4.2.7. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Strategi yang akan dijalankan dalam pemenuhan kualitas infrastruktur di Kabupaten Kebumen tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa wilayah dengan memperhatikan perkembangan wilayah tersebut, dalam upaya mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Peningkatan kelengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan memperlancar arus transportasi;
3. Peningkatan pemeliharaan jaringan dan kinerja sistem irigasi hingga tingkat desa untuk mendukung produktivitas pertanian;
4. Pengembangan infrastruktur pemenuhan layanan dasar masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan sarana air minum aman (perpipaan), peningkatan akses sanitasi aman, pemugaran RTLH, peningkatan akses hunian layak; serta penanganan kawasan kumuh;
5. Pemeliharaan dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
6. Optimalisasi pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.

4.2.8. Geopark Kebumen

Sejarah *Geopark* Kebumen dapat ditelusuri kembali ke tahun 2004 ketika Presiden Republik Indonesia menetapkan Kawasan Lanskap Karst Gombang Selatan (KBAK) sebagai kawasan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2006, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan Karangsambung sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kebumen mengusulkan pembentukan *Geopark* Karangsambung – Karangbolong yang kemudian ditetapkan menjadi *Geopark* Nasional pada tanggal 30 November 2018. Saat itu *Geopark* Karangsambung – Karangbolong memiliki luas 543.599 Km² yang meliputi 12 Kecamatan dengan 117 Desa. Kawasan ini meliputi wilayah Utara, Tengah, dan Karst di Selatan dengan morfologi yang bervariasi mulai dari perbukitan, lembah, dataran hingga pantai. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Perbup No. 25 Tahun 2023 berubah nama menjadi *Geopark* Kebumen. Perubahan ini bertepatan dengan perluasan kawasan *geopark* dengan luas daratan 1.138,70 kilometer persegi dan luas laut 21,98 kilometer persegi. Di dalam *geopark* tersebut terdapat 22 kecamatan dengan 374 desa dengan mengangkat tema “*The Glowing Mother Earth of Java*”. Pada Tahun 2025 Geopark Kebumen secara resmi diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).

Sesuai dengan Rencana Induk *Geopark* Kebumen Tahun 2025-2034, visi pengembangannya adalah “Menjadi *Geopark* yang Terkemuka, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat”. Strategi pembangunan Geopark

yaitu strategi pembangunan mengejar pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lokal melalui partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Pembangunan ini merupakan pendekatan yang diselaraskan dengan strategi pengembangan *geopark* yang memiliki misi empat pilar utama, yaitu:

1. Melestarikan keragaman geologi, hayati dan sosial budaya secara berkelanjutan (Konservasi);
2. Membangun masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap *geopark*, serta peningkatan kesadaran terhadap konservasi alam dan budaya (Edukasi);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas, industri kreatif dan digitalisasi (Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan);
4. Membangun tata kelola kelembagaan yang profesional untuk menjamin terwujudnya keterpaduan pembangunan *geopark* yang berkelanjutan (*Means of Implementation*).

Kegiatan pengelolaan *geopark* yang dilakukan atau dalam koordinasi Pengelola Geopark meliputi antara lain:

1. Penataan dan pemeliharaan lingkungan *geopark* sesuai sebaran situs geologi (*geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya dan pariwisata;
2. Pemanfaatan situs geologi, warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya secara berkelanjutan;
3. Pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan situs geologi, warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya;
4. Pelaksanaan program konservasi warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya;
5. Pengembangan edukasi dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
7. Pelestarian sosial budaya;
8. Pengembangan destinasi pariwisata;
9. Pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata; Penyediaan informasi keberadaan *geopark* (*visibility*), antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *geopark*;
10. Pengembangan kelembagaan *geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
11. Promosi nilai ilmiah *geopark* untuk kegiatan pariwisata, edukasi dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan; serta
12. Pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *geopark* nasional, regional dan global; dan internasional.

Sementara itu beberapa rencana aksi pengembangan *Geopark* Kebumen pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi spesies terancam punah;
2. Edukasi tradisi dan seni lokal;
3. Penguatan kerjasama *pentahelix*;
4. Pengembangan wisata berbasis komunitas;
5. Digitalisasi industri kreatif lokal;
6. Pengembangan infrastruktur wisata;
7. Pelatihan UMKM dan industri kreatif;
8. Pembentukan Badan Tata Kelola *Geopark*;
9. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi *Geopark*;
10. Pengembangan produk agrowisata lokal; serta
11. Literasi digital untuk masyarakat.

4.2.9. Penguatan Ekosistem Inovasi

Dalam rangka penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Daerah, Pemerintah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Pembentukan BRIDA dapat berupa Perangkat Daerah tersendiri dan atau diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dengan nama BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah). BRIDA maupun BAPPERIDA dibentuk dalam rangka memperkuat fungsi litbang di daerah, mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti, dan melalui tugas dan fungsinya, menjadikannya memiliki peran strategis yang lebih luas dan powerfull.

Tugas dan fungsi BRIDA/BAPPERIDA sesuai dengan Pasal 67-68 Perpres Nomor 78/2021 tentang Badan dan Riset Inovasi Nasional dan pasal 5-6 Permendagri No 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Peraturan Kepala BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah secara garis besar adalah melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah. BAPPERIDA diharapkan mampu menumbuh kembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Adapun ekosistem inovasi yang dibangun meliputi elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi, elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, elemen kemitraan riset dan inovasi, elemen budaya riset dan inovasi, elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah dan elemen penyelarasan dengan perkembangan global. PerBRIN No 5 Tahun 2023 lebih lanjut mengatur mengani sinergi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dan dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi BRIDA, pemerintah daerah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara riset dan inovasi di daerah melalui forum koordinasi dan sinkronisasi. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menetapkan BRIDA di Kabupaten Kebumen terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang urusan Perencanaan dengan Nomenklatur BAPPERIDA. Dengan dibentuknya BAPPERIDA di Kabupaten Kebumen diharapkan akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. Salah satu tugas pertama dari BAPPERIDA adalah memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerah. Kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan, penguatan kemitraan antar kelembagaan menjadi elemen utama dalam menumbuhkembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Pemerintah daerah melalui Bapperida melakukan penguatan kembali terhadap alternatif produk unggulan daerah untuk mengatasi permasalahan daerah, dan bersama penyelenggara urusan perencanaan bersinergi dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan perencanaan berbasis bukti. Selanjutnya peningkatan promosi fasilitasi invensi dan inovasi, memberikan apresiasi dan perlindungan pengetahuan dan atau teknologi dari masyarakat. Kedepan diharapkan mampu terus melakukan pengembangan, replikasi inovasi, diseminasi hasil riset dan inovasi agar dampak dari riset dan inovasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Selain itu melakukan

pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah.

Langkah awal yang akan ditempuh adalah membentuk forum koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara riset dan inovasi di daerah sebagai upaya meningkatkan kemitraan antar kelembagaan. Kemitraan riset dimulai pada Tahun 2025 dengan melakukan kerjasama penyusunan naskah rekomendasi kebijakan sesuai dengan permasalahan daerah dan disesuaikan dengan kepakaran masing-masing perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kebumen. Terdapat 5 tema rencana naskah kebijakan dengan tema pada lingkup bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan produk/komoditas unggulan daerah, tata kelola pemerintahan, dan pangan. Penguatan invensi dan inovasi didukung melalui lomba Krenova Kabupaten Kebumen sebagai salah satu jejaring inovasi sekaligus bentuk pemberian apresiasi kepada para inventor atas hasil kinerjanya menemukan inovasi-inovasi baru yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar, mengembangkan potensi dan membuka peluang wirausaha baru di masyarakat.

4.3. Inovasi Daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah secara kelembagaan diampu oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kebumen. Adapun kebijakan penelitian dan pengembangan termasuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi daerah antara lain pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjangkauan invensi dan inovasi dari masyarakat, maupun koordinasi dan konsultasi pada bidang penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintah Daerah. Selain itu penguatan jejaring kelitbangan melalui koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan berbasis riset. Hilirisasi hasil-hasil invensi dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian dilaksanakan dalam rangka penyampaian hasil dan meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan. Upaya perlindungan kekayaan intelektual diinisiasi melalui fasilitasi pengajuan hak cipta bagi inventor, pengajuan Kekayaan Intelektual Komunal, Merk, dan inventarisasi potensi indikasi geografis di Kabupaten Kebumen.

4.3.1 Hak Kekayaan Intelektual

Untuk mencapai tujuan dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah, perlu adanya sinergitas multi stakeholder baik dari unsur pemerintahan, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media. Kelima unsur tersebut lebih dikenal dengan penta helix dimana kolaborasi ini digambarkan dalam bentuk hubungan sirkular yang artinya setiap unsur saling berhubungan untuk mencapai goal's secara berkelanjutan. Kolaborasi ini penting dilakukan, dimana perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan saat ini sudah berkembang sangat pesat. Hal ini menjadi salah satu isu global yang mana setiap daerah harus lebih sigap, agile dan untuk selalu berinovasi dalam menghadapi tantangan dan permasalahan. Sebagai bagian dari unsur pemerintah, posisi lembaga penelitian dan pengembangan berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan pemaian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta penyebaran informasi terkait Invensi dan Inovasi sebagai hasil penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, termasuk pencatatan dan pendaftaran hasil Kekayaan Intelektual yang dimiliki.

Kabupaten Kebumen memiliki banyak potensi berupa potensi sumber daya alam, potensi budaya maupun potensi sumber daya manusia yang jika

dioptimalkan akan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing berbagai potensi tersebut adalah dengan melakukan pendaftaran HKI nya. HKI sebagai bentuk perlindungan, pengakuan atas kerja keras para inventor/pencipta, kedua sebagai motivasi untuk mendorong daya inovasi dan kreativitas masyarakat, dan terakhir untuk melindungi dan memberantas penyalahgunaan seperti pembajakan, klaim atas hasil karya seseorang atau komunitas dan sebagainya. Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan perlindungan HKI maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk Sentra Kekayaan Intelektual yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 000.9.1/79 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Kebumen, dimana salah satu tugasnya adalah memberikan fasilitasi berupa pendampingan kepada inventor untuk mendaftarkan atau mencatatkan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki. Saat ini Kabupaten Kebumen sudah melakukan pendampingan untuk pendaftaran merek, paten, pengajuan indikasi geografis, pencatatan hak cipta dan pengajuan KI Komunal pada beberapa potensi baik pengetahuan tradisional, indikasi asal maupun ekspresi budaya tradisional.

Perlindungan HKI akan menjadi salah satu kekuatan pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Kebumen menjadi bagian dari sentra KI yang ada di Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Pati. Hal ini sebagai bukti upaya yang serius dan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memberikan perlindungan HKI dan memperkuat jejaring lintas stakeholder dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang daya saing.

4.3.1.1 HKI Hak Cipta

Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen dalam peningkatan HKI hak cipta yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan insentif kepada pencipta, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka dan melindungi karya mereka dari penggunaan yang tidak sah. Sinergi dan kerjasama juga dilakukan dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut daftar hasil kreasi dan inovasi di Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan HKI hak cipta hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Hasil Kreasi dan Inovasi Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan HKI Hak Cipta

NO	NAMA INOVASI	PENCIPTA	PEMEGANG HAK CIPTA	FASILITATOR
1	Brownchip Boss (Brownies Chip Bonggol Pisang)	Anggita Cintya Salsabilla, Danish Mutia Farida dkk	Anggita Cintya Salsabilla, Danish Mutia Farida dkk	Pemkab Kebumen
2	Es Kriang Salah Satu Pemanfaatan Bahan Pangan Kearifan Lokal Dari Bengkuang Yang Merupakan Ikon Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah	Desy Aquina, M.Pd dan Murniasih	SMAN 1 PREMBUN	Pemkab Kebumen

NO	NAMA INOVASI	PENCIPTA	PEMEGANG HAK CIPTA	FASILITATOR
3	So'taw – Traditional Culinary Kebumen	Evi Agustiyani, S.Pd dan Rahma Aliya Maulida	MAN 2 Kebumen	Pemkab Kebumen
4	Averbi Squash – Minuman Squash Dari Ekstrak Belimbing Wuluh Solusi Bagi Penderita Hipertensi Dan Diabetes	Evi Agustiyani, S.Pd dan Wahyu Ratna Putra, S.Pd	MAN 2 Kebumen	Pemkab Kebumen
5	Eco Sakipa (Edible Coating Ekstrak Daun Sirsak Dan Minyak Kelapa)	Hestin Wirasti	MAN 2 Kebumen	Pemkab Kebumen
6	Himne Kabupaten Kebumen	SLAMET PRAMONO, S.Pd	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN	Pemkab Kebumen
7	Traveat.Id Sebagai Sarana Memperkenalkan Wisata, Kuliner Dan Kerajinan Di Kabupaten Kebumen	Indah Maesaroh, S.E dan Hikmatul Fisa Yasinta, S.E	Indah Maesaroh, S.E dan Hikmatul Fisa Yasinta, S.E	Pemkab Kebumen
8	Media Tanam Demen Tani	Isminatun Khasanah	Isminatun Khasanah	Pemkab Kebumen
9	Logo Geopark Kebumen	H. ARIF SUGIYANTO, S.H.,M.H	H. ARIF SUGIYANTO, S.H.,M.H	Pemkab Kebumen
10	Logo Kebumen Tv	H. ARIF SUGIYANTO, S.H.,M.H	H. ARIF SUGIYANTO, S.H.,M.H	Pemkab Kebumen
11	Mars Kabupaten Kebumen	H. ARIF SUGIYANTO, S.H.,M.H dan SLAMET PRAMONO, S.Pd	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN	Pemkab Kebumen
12	Alat Takar Gula Pasir Manual	Mujiyono	Mujiyono	Pemkab Kebumen
13	Inovasi Lampu Darurat Multifungsi, Ramah Lingkungan, Praktis Dan Hemat Daya	Rudi Muhammad Maulana	Rudi Muhammad Maulana	Pemkab Kebumen
14	Caki Squash	Sinta Pramita Dwi Ayuni	Sinta Pramita Dwi Ayuni	Pemkab Kebumen
15	Remgas (Remote Motor Dengan Google Assistant) V.2	Tabah Bagus Satria dan Panji Damara Putra Arifin	SMK TAMTAMA KARANGANYAR	Pemkab Kebumen
16	Keripik Brownies Singkong	Pawit Sumiyati	Pawit Sumiyati	Pemprov Jateng
17	Minuman Sirup Jahe Kelor Dan Sirup Empon-Empon Produksi Dari Griya Kelor "888"	Rifa Sari Dewi	Rifa Sari Dewi	Pemprov Jateng
18	Sagon Kacang Hijau	Agus Puspo Buntoro dan Gumanti Asih	Agus Puspo Buntoro dan Gumanti Asih	Pemprov Jateng
19	Wedang Jahe Familo	Lina Oktaviana	Lina Oktaviana	Pemprov Jateng
20	Remot Traktor Siluman	Wakhid Hasim	Wakhid Hasim	Pemprov Jateng
21	Cinta Sobat Sirna Cek Dan Input Tanggal Kadaluaarsa Obat Dengan Aplikasi Warna	Wiji Sri Kusumaningsih	Wiji Sri Kusumaningsih	Pemprov Jateng
22	Mie Keriting Makanan Instan Cegah Kerdil Dan Stunting	Wiji Sri Kusumaningsih	Wiji Sri Kusumaningsih	Pemprov Jateng

NO	NAMA INOVASI	PENCIPTA	PEMEGANG HAK CIPTA	FASILITATOR
23	Jamu Srikandhi Jamu Desa Wonosari Dalam Upaya Kuratif,Rehabilitatif,Preventif Untuk Waspada Dan Cegah Covid-19	Wiji Sri Kusumaningsih	Wiji Sri Kusumaningsih	Pemprov Jateng
24	Inovasi Aplikasi Mas Eviro Ramuan Dan Notifikasi Cegah Covid Corona	Wiji Sri Kusumaningsih	Wiji Sri Kusumaningsih	Pemprov Jateng
25	Pengembangan Potensi Lokal Dengan Pengolahan Sabut Kelapa Menjadi Cocopeat Block Dengan Nilai Ekonomi Tinggi	Mastsani Durrotul Jannah, Shivaul Qulub dkk	Mastsani Durrotul Jannah, Shivaul Qulub dkk	Pemkab Kebumen
26	Curcuma Longa Sebagai Sediaan Topikal Alternatif Yang Berpotensi Mengatasi Masalah Kulit	Yudi Setyawan	Yudi Setyawan	Pemkab Kebumen
27	Kukis Kulit Manggis (Kiskis) Yang Tinggi Kalsium Untuk Mencegah Osteoporosis Sejak Dini	Aathifah Dwi Zahra Noor, Dewi Chasnah Ramadhani dkk	Aathifah Dwi Zahra Noor, Dewi Chasnah Ramadhani dkk	Pemkab Kebumen
28	KOPI CABE JAWA	Ken Arung Aini Prayoga	Ken Arung Aini Prayoga	Pemkab Kebumen
29	Kopi WA-MEN (Kopi Sarang Burung Walet Dalam Kemasan)	Yuridulloh	Yuridulloh	Pemkab Kebumen
30	Beras Kencur Tersubstitusi Ekstrak Kulit Manggis Sebagai Permen	Laela Ita Agustina, Balqis Talita Az Zahra dkk	MAN 2 Kebumen	Pemkab Kebumen
31	Daur Ulang Limbah Anyaman Pandan Menjadi Kerajinan	Danang Sudrajat, Siti Nurjanah dkk	Danang Sudrajat, Siti Nurjanah dkk	Pemkab Kebumen
32	Mocco Moringa Cookies Sweet And Healthier	Fikri Maulana Andriano dan M. Zaenuri Anwar	MAN 2 KEBUMEN	Pemkab Kebumen
33	JINGLE PANDAN KUNING PARK KEBUMEN	Slamet Pramono, S.Pd	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Pemkab Kebumen
34	PUKOBONAS (Pupuk Kohe Bonggol Damen Dan Limbah Nanas)	Lusi Annafi Fauza D, Bhekti Ardiningtyas dkk	Lusi Annafi Fauza D, Bhekti Ardiningtyas dkk	Pemkab Kebumen
35	(Pemanfaatan Minyak Jelantah Sebagai Upaya Optimalisasi	Mai Satriyani dan Kurotul 'Aeni	Mai Satriyani dan Kurotul 'Aeni	Pemkab Kebumen
36	Alami Dengan Ekstrak Biji Salak Dan Kulit Jeruk Purut Guna Menjaga	Egi Priyatin Ningsih Sukma Dewi, Rifqi Nur Hilmi dkk	POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA	Pemkab Kebumen
37	INOVASI SEPATU DARI ANYAMAN PANDAN	Danang Sudrajat	Danang Sudrajat	Pemkab Kebumen
38	(Semprotan Dari Daun Dlingo Untuk Mengurangi Sakit Sendi Dan	Naomi Zahro, Firdausa Al Barokah dkk	SMA Negeri 1 Kebumen	Pemkab Kebumen
39	Teh Pelangi-Minuman Teh Dari Bahan Bahan Alami Yang Kayak Manfaat	Kiara Nur Adinda Sari, Jeni Fitrianisa dkk	MAN 2 KEBUMEN	Pemkab Kebumen

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen dan BRIDA Prov. Jateng, 2024

4.3.1.2 HKI Indikasi Geografis

Genteng Sokka di Kabupaten Kebumen telah mendapatkan HKI indikasi geografis pada Tahun 2021. Sejarah mencatat sekitar tahun 1920 pemerintah Kolonial Belanda melakukan penelitian pemetaan tanah yang bagus untuk atap bangunan di kawasan Kebumen. Penelitian ini dilakukan karena saat itu terjadi wabah pes dari penggunaan atap rumbia pada bangunan tempat tinggal dan ini merugikan pemerintah Kolonial Belanda karena para pekerja pribumi yang terkena wabah tak bisa bekerja. Maka dari itu pabrik genteng pun mulai didirikan di Sokka (sekarang Kedawung) di tahun tersebut. Setelah beberapa tahun berjalan muncullah pabrik genteng yang dikelola swasta/pribumi dengan merek “AB Sokka” dan “Brezole Sokka” sekitar 200 m dari stasiun Sokka Pejagoan. Atas bantuan guru sekolah teknik Belanda, didatangkanlah mesin pabrik pembuat genteng dari Jerman. Karena dapat menghasilkan kualitas yang bagus maka produk gentengnya banyak digunakan untuk atap sejumlah pabrik gula di Jawa. Puncak kejayaan genteng ini terjadi pada tahun 1980 sampai dengan 2000, saat itu Genteng Sokka Kebumen banyak direkomendasikan untuk atap gedung pemerintah, sehingga sejak saat itu banyak warga Kebumen yang memproduksi dan membuat genteng ini. Genteng Sokka kemudian menjadi *trade mark* genteng dari Kebumen. Kualitasnya yang bagus dan banyak peminatnya menjadikan pengusaha di luar Kebumen meniru merek Sokka yang ada sehingga genteng Sokka seakan bukan menjadi milik Kebumen saja.

Kerjasama antara pengrajin genteng Sokka dengan pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikan genteng Sokka menjadi hak milik warga Kebumen, sehingga menjadi aset bangsa yang berbasis pada kearifan lokal Kabupaten Kebumen. Berdasarkan sejarah dan perkembangan nama besar genteng sokka sejak zaman belanda sampai sekarang, kedepan masyarakat Kebumen mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk lokal yang berbasis Indikasi Geografis menjadi produk yang tidak hanya nasional akan tetapi bisa menembus pasar ekspor. Saat ini pemerintah Kabupaten Kebumen juga terus berkomitmen meningkatkan HKI indikasi geografis dengan mengajukan beberapa potensi daerah sebagai HKI indikasi geografis diantaranya Sapi PO (Peranakan Ongole) dan Kelapa Genjah Entog. Berikut daftar resmi HKI indikasi geografis genteng Sokka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Daftar Resmi HKI Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen

NAMA PEMILIK	ALAMAT PENCIPTA	FASILITATOR
Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PP-GSK)	Dusun Klapagada RT 01 RW 01 Desa Sruweng, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah	Pemkab Kebumen

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2024

4.3.1.3 HKI Merek

Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen dalam peningkatan HKI merek dikarenakan merek memainkan peran penting dalam strategi bisnis karena dapat menjadi aset berharga yang membedakan produk atau jasa dan membangun loyalitas pelanggan. Perlindungan merek yang efektif membantu memastikan bahwa nilai dan reputasi merek tetap terlindungi. Berikut daftar hasil kreasi dan inovasi di Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan HKI merek hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Hasil Kreasi dan Inovasi Kabupaten Kebumen yang telah Mendapatkan HKI Merek

No	Nama	Jenis Produk	Merek	Tahun Fasilitas
1	Anhar	Knalpot Motor		2017 Tahap I
2	Nunung Wahyuni	Bandeng Presto		2017 Tahap I
3	Novi Nur Aini	Sabun Pembersih Rumah Tangga (Cair)		2017 Tahap I
4	Pawit Sumiyati	Brownies Singkong		2017 Tahap I
5	Dhiana Setiawan	Keripik Buah		2017 Tahap I
6	Sokhibun	Kue Sagon		2017 Tahap I
7	Ratna Sulistyani P	Kue Kering		2017 Tahap I
8	Al Mira Ana Safitri	Aksesoris Jenitri		2017 Tahap I
9	Erna Masitoh	Abon Ayam		2017 Tahap I
10	Luluk Maida Ningsih	Cake/Roti		2017 Tahap I
11	Laili Ulfiatin	Wingko Babad		2017 Tahap I
12	Mohammad Suwoto	Kerajinan Anyaman Pandan (Jaxee)		2017 Tahap 2
13	H Muhammad Yusuf	Kopyah (Segitiga Bintang Dunia)		2017 Tahap 2
14	Saptono	Produk Kulit (Klebbet)		2017 Tahap 2
15	Abdul Ghoffar	Tepung Bumbu (Koki Asli)		2017 Tahap 2
16	Saiful Rozak	Aksesoris Gelang (Lotus Label)		2017 Tahap 2
17	Ida Fitri Hidayati	Jilbab (Gallery Firtry)		2017 Tahap 2
18	Rafidah Ery Purwati	Aksesoris Bros (Eryanda)		2017 Tahap 2
19	Atika Yuliasari	Aksesoris dan Sovenir (Triat)		2017 Tahap 2
20	Nur Zaidatun	Wingko Babad (Zatu)		2017 Tahap 2
21	Hambar Biworo	Kerupuk Tahu (Ny. Mont)		2017 Tahap 2
22	Hutami Adhiningsih	Kue Kering (Chestar)		2017 Tahap 2
23	Adhinov Prema Riansyah	Beras Kesehatan Jagung, Tiwul, Mutiara (Slimays)		2017 Tahap 2
24	Dwiatmi Puspasari, SH	Aksesoris (Rumah Rayya)		2017 Tahap 2
25	Tiara Desha Rianti	Tas (Bigibag)		2017 Tahap 2
26	Amri Wibowo	Minuman Sirup Jahe		2017 Tahap 3
27	Khanifudin	Makaroni Keju		2017 Tahap 3
28	Anggun Fatmawati	Cake & Bakery		2017 Tahap 3
29	Zuhar Setiawan	Cake & Bakery		2017 Tahap 3
30	Siti Rokhanah Umihani	Jilbab		2017 Tahap 3
31	Khusnul Mar'atus Soliah	Minuman Jus		2017 Tahap 3
32	Awaludin	Sabun Cair		2017 Tahap 3
33	Aji Prasajo	Kaos Oblong/T-Shirt;	2n	2018
34	Dathu Muthia Sari	Kue Kering;	Aleeya Cemal-Cemil	2018
35	Jahanis Setiawan	Rumah Makan	Amad Kusni	2018
36	Tuti Nur Rohmah	Aneka Kue & Roti	Avreza	2018
37	Partimin	Kaos Oblong/T-Shirt;	Blaka Suta	2018
38	Kurnia Dwi Yulistyorini	Ayam Ungkep Kemasan	Es Bening	2018
39	Wahyu Kurniawan	Keripik Jamur; Abon Jamur	Jamur Gombong	2018
40	Zahratun Niam	Pakaian	Kaynay	2018
41	Elok Faisa	Aksesoris	Kitnac	2018
42	Bina Laraswati	Pakaian Muslim	Laraswati	2018
43	Nanang Eko Sulaksono	Pakaian Muslim Pria & Wanita	Malika Hazza	2018
44	Agung Sapto Nugroho	Minuman	Tjabe Djitoe	2018
45	Rahmat Widiyanto	Bakery	Laziza	2018
46	Isnaeni Nur Fauziah	Makanan Ringan		2018
47	Nita Nugraheni	Makaroni	Miss Macarone	2018
48	Eva Susan	The Herbal	Putri Semanding	2018
49	Ahmad Zaenudin	Kaos	Rogo	2018

No	Nama	Jenis Produk	Merek	Tahun Fasilitas
50	Dyan Sih Agustar	Fashion	Tepaq	2018
51	Anggit Widjanarko	Tas Wanita (Sling Bag)	Crunchy. Unch	2019
52	Engkos Kosasih	Kue Sumpia	Lintang	2019
53	Shokhikha A'malana Murdivien	Fashion Busana Muslim	Amalana Attire	2019
54	Sarbiah	Lanting	Ayuma	2019
55	Dwi Handayani	Jilbab, Kaos, Baju Muslim	Az-Dzakwan	2019
56	Ikhsanudin	Gitar (Alat Musik)	Cartesiuz Guitars	2019
57	Sri Endah Lestari	Keripik Singkong, Lanting, Keripik Talas	Cipta Rasa	2019
58	Ning Subekti	Aneka Sambal	Dapur Naomi	2019
59	Ginanjari	Fashion Pakaian Anak Dan Jilbab Anak	Gemi	2019
60	Puput Kuswoyo	Kerajinan Cobek Kayu	Jw Kebumen	2019
61	Isnaeni Noor Azizah	Kopi	Kopi Kuna	2019
62	Pawit Sumiyati	Keripik Brownies Singkong	Kri Boss	2019
63	Nunur Nuraeni	Makanan (Coklat, Seblak Kering, Sistik)	Mahira	2019
64	Ika Gumila Ramantisna	Nugget Ikan	Mareenn Food	2019
65	Arum Budiasih	Abon Ikan	Marina Food	2019
66	Suswadi	Manisan Pepaya	Maya	2019
67	Nisaul Latifah	Jilbab	Nefa	2019
68	Muhajir Wardani	Sabun, Lulur	Putri Jemajar	2019
69	Imanintan Susan	Kue Kering	Kookis	2019
70	Susilo	Sirup Herbal	Sari Alam	2019
71	Linda Rossy Umami	Keripik Talas	RA	2019
72	Nani Wiyarsih	Nugget Ikan	Sambalku	2019
73	Ahmad Siyam	Garam	Mutiara Samudra	2019
74	Yuni Puji Lestari	Keripik Singkong	Yazaco	2019
75	Akhmadi	Minuman Sirup	Zidji	2019
76	Pawit Sumiyati	Keripik Brownis Singkong	Kribow	2020
77	Rifa Sari Dewi	Minuman Sirup Jahe Kelor	"888"	2020
78	Partimin	Percetakan Kaos Oblong	Blakasoeta	2020
79	Ahmad Zaenudin	Rempah-rempah Tradisional	Rogo	2020
80	Drs HM Kusmanto ZA	Kopyah/Songkok	Mata Dunia	2020
81	Karsih	Minyak VCO	Sekar VCO	2020
82	Lina Oktaviana	Madu	Madu Hutan Mazaid	2020
83	Nur Ismalabibah	Jilbab dan Pakaian Muslim	Isa Hijab	2020
84	Amrihatin	Pakaian	Mustafa	2020
85	Ani Daryatun	Es durian dalam botol	DUR'BOT	2020
86	Dwi Handayani	Konveksi Pakaian	Dihas	2020
87	Dyah Ayu Manis	Pakaian dan Produk Kain Perca	Agnia Craft	2020
88	Mu'inatul Khoiriyah	Batik	Batik Pegon	2020
89	Noviyanti Dewi Citra Suci	Beras	SKN	2020
90	Nur Afid	Tas	Afid Bomen	2020
91	Nur Wahid	Peci/Kopyah	Wijaya	2020
92	Setya Widada	Aneka kerajinan tempurung kelapa & bambu	Picathing	2020
93	Pungki Susanti	Produk Kulit	Onesa	2020
94	Umi Asiyah	Keripik Pisang	Masitha Chips	2020
95	Agus Sobikhan	Sangkar Burung	Huk Gusvin	2020
96	Dewi Solikhati	Peyek	Syadha	
97	Surati	Keripik Basreng	Mahesa	
98	Muhsin Syubani	Pakaian	Al - Bani	

No	Nama	Jenis Produk	Merek	Tahun Fasilitas
99	Ida Yuniasih	Pakaian Muslim	Al - Athar Colection	
100	Indra Nugroho	Tepung Bumbu	Bumbu Salman	
101	Nani Wiyarsih	Olahan Ikan	Saminak	
102	Oktavia Elviyana Yuliyani	Keripik Ubi Madu	Mas Luqman	
103	Dwi Jumono	Kasur Busa	Gold Star	
104	Dewi Kristiani	Kopi Nangka	Kopines	
105	Sri Handayani	Tiwul Instan	Cahaya	
106	Ida Sulistyani	Oyek Gemplong	Sari Gunung	
107	Rumini	Rempeyek	Arumi	
108	Afiq Zaidun Amhar	Pakaian Muslim	Alafroh Muslim Wear	
109	Rozan Muhammad Irfan		MEDIXA	2022 Tahap 1
110	Yuli Yono		Tudung Tani	2022 Tahap 1
111	Putri Naeni Maulidah		PuNaMa	2022 Tahap 1
112	Saridjan		SANKOKO	2022 Tahap 1
113	Iriyanti Retnowati		Galengan	2022 Tahap 1
114	Nur Afid		TDOCTOR	2022 Tahap 1
115	Agustin Ariyanti		Omah Batik Ariyanto	2022 Tahap 1
116	Astri Dewi Setyaningrum		Queen Florist Kebumen	2022 Tahap 1
117	Sulastri		SaFaKaFa Home Made	2022 Tahap 1
118	Muhamad Haris Maknun		HM Grup	2022 Tahap 1
119	Yudi Alfian		Pawitah Batik	2022 Tahap 1
120	Bambang Haryadi		Omah Organic	2022 Tahap 1
121	Agung Wibowo Saputro		LAJU	2022 Tahap 1
122	Agung Sapto Nugroho		Gatho Kopi	2022 Tahap 1
123	Dian Yanuar Respati		Diany Etnika	2022 Tahap 1
124	Rahayu Subiyanti		Afiyu	2022 Tahap 1
125	Mustolih		DOY	2022 Tahap 1
126	Rasiman		Gunung Brujul	2022 Tahap 1
127	Sani Haryanti		FAMIRA	2022 Tahap 1
128	Budi Nurhayati, Dra		Telobar Lanting Oven Kebumen	2022 Tahap 2
129	Yulie Herlyn Rokhanah		Karima	2022 Tahap 2
130	Siti Muslikhatun		Zuna Legging	2022 Tahap 2
131	Dwi Lusya Sariningtyas		YM FARM	2022 Tahap 2
132	Setyani		Kaheela	2022 Tahap 2
133	Teguh		KOPI GEMPLONG	2022 Tahap 2
134	Agus Sunarto		CSBA	2022 Tahap 3
135	Agus Suradi		Bersama (Berkah Sambel Mantap)	2022 Tahap 3
136	Anggun Fatmawati		Anna Ratu	2022 Tahap 3
137	Dian Hapsari		Ji Outfit	2022 Tahap 3
138	Diyah Pangesti, S.E		Yu Klenteng	2022 Tahap 3
139	Dyah Ayu Manis		Agnia	2022 Tahap 3
140	Juni Riyadi		Kamlang Nusantara	2022 Tahap 3
141	Mohamad Laudza'I Wafa		MOYAFI	2022 Tahap 3
142	Mulyono		Tugu Banyumudal Kebumen	2022 Tahap 3
143	Novita, S.E		Nenk Ngapak	2022 Tahap 3
144	Puji Haryanti		LIMA DARA	2022 Tahap 3

No	Nama	Jenis Produk	Merek	Tahun Fasilitas
145	Ratih Dewanti		eReM	2022 Tahap 3
146	Riwahyuni		YN	2022 Tahap 3
147	Rodsi Rusdanto		Ngemil Camil	2022 Tahap 3
148	Sheila Arnelia Rahma		Suci Sotang	2022 Tahap 3
149	Siti Aniasih		Difaqis	2022 Tahap 3
150	Vera Hariyati		Vela Food	2022 Tahap 3
151	Yeyen Komala Laksana A		Prima Komala	2022 Tahap 3
152	Alfi Nginayah		AKULA	2022 Tahap 4
153	Dyah Lestari Kurniawati		Zaza Bakery	2022 Tahap 4
154	Indah Ratnasari		Canting Kuning	2022 Tahap 4
155	M Nurul Huda Assanusi		Omah Criping	2022 Tahap 4
156	Rifa Sari Dewi		GK 888	2022 Tahap 4
157	Sugiarto		Asiaji	2022 Tahap 4
158	Sujiarti Prihatiningsih		Larizy	2022 Tahap 4
159	Sri Khayati		Omah Food	2022 Tahap 4
160	Purwaji		Jazz Coffe (Berkah Aji Jaya)	2022 Tahap 4
161	Drajat Arumbi		CIBALL	2023
162	Jati Nur Adi		Sugoi.id	2023
163	Moch Khusni		MATAR	2023
164	Ritam		Oyek Pelangi	2023
165	Ahmad Dimyati		PO PERMATA BIO PURE	2023
166	Desi Suci Dwi Rahayu		DSDR	2023
167	Nur Afid		TDOCTOR	2023
168	Marini		Rhien's	2023
169	Danish Mutia Farida		Brownchip	2023
170	Nurofik		Aqilla Snack	2023
171	Dyah Pangesti, S.E		Yu Klenteng	2023
172	Eko Darningsih		PANDANUS	2023
173	Mukhammad Haikal Fikri		LATANSA	2023
174	Nur Fakhruddin		GNA	2023
175	Budi Santoso		Kristal Kabumian	2024
176	drg. Fitra Andri Kurniasih		F Label	2024
177	Feri Suminar		Blacksweetphoto	2024
178	Fitri Budi Setyarini		WIDI	2024
179	Nanang Wahidin Yusuf		Juragan Pin	2024
180	Febyy Dwi Riskyany		Songkoku	2024
181	Hety Kurniasih		Ar Rahman	2024
182	Krismianto		Shorea	2024
183	Purwadi		NAISHAN	2024
184	Tri Wahyu Erawati		Keripik Tempe “ Bu Tri”	2024
185	Aprilia Pujiyanti Lestari		Hanbytte.co by apparelclothes	2024
186	Khasan Ali Abas		Walet Raincoat	2024
187	Moh Dzulqornain		Orygo Raincoat	2024
188	Mohamad Laudza1 Wafa		Al Kahfi Bakery	2024
189	Sonia Nur Indah Sari		Gravity Raincoat	2024
190	Nadhira Azzahra		RAF Raincoat For You	2024
191	Mustangin		Garuda Raincoat	2024
192	Karminah		Hendz	2024
193	Henny Suryaningsih		Seblak Bonjer	2024

No	Nama	Jenis Produk	Merek	Tahun Fasilitas
194	Fina Oktavia		HCS Raincoat	2024

Sumber: Disperindag dan Bappeda Kab. Kebumen, 2024

4.3.1.4 HKI Paten

Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen dalam peningkatan HKI paten dikarenakan paten mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada penemu untuk mengembangkan teknologi baru, yaitu berupa hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil karya mereka untuk jangka waktu tertentu. Sinergi dan kerjasama juga dilakukan dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut daftar hasil kreasi dan inovasi di Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan HKI paten hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Hasil Kreasi dan Inovasi Kabupaten Kebumen yang telah Mendapatkan HKI Paten

NO	NAMA INOVASI	NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMEGANG PATEN	FASILITATOR
1	Mie Keriting (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting)	Wiji Sri Kusumaningsih, A.Md.,Farm	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Pemprov Jateng
2	Sate Ambal (dalam kemasan)	Titin Agustinah	Desa Tambakrejo, Kec.Buluspesantren, Kab. Kebumen	Kemenristek Dikti

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen dan BRIDA Prov. Jateng, 2024

4.3.1.5 HKI Komunal untuk Optimalkan Potensi dan Kekayaan Sumber Daya Kebumen

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berkomitmen dalam upaya pendaftaran HKI komunal. HKI komunal adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik yang dimiliki oleh komunitas tertentu. HKI komunal berbeda dari bentuk HKI individu karena fokusnya adalah pada perlindungan kekayaan intelektual yang bersifat kolektif dan diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas. HKI komunal merupakan aspek penting dalam melindungi dan mempromosikan keragaman budaya dan pengetahuan tradisional, serta memastikan bahwa komunitas yang memiliki kekayaan ini mendapatkan pengakuan dan manfaat yang layak. Beberapa potensi daerah yang sedang dalam proses HKI komunal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Daftar Kekayaan Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan HKI Komunal

NO	NAMA INOVASI	KOMUNITAS ASAL	KETERANGAN KI	FASILITATOR
1	Ingkungan Suran	Masyarakat Panjer Kebumen	Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)	Pemkab Kebumen
2	Tari Cepetan Kebumen	Paguyubab Kesenian Cepetan Cinta Karya Budaya Desa Karanggayam	Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)	Pemkab Kebumen

NO	NAMA INOVASI	KOMUNITAS ASAL	KETERANGAN KI	FASILITATOR
3	Sapi PO Kebumen	Dinas Petanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Sumber Daya Genetik (SDG)	Pemkab Kebumen
4	Kelapa Genjah Entog Kebumen	Dinas Petanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Sumber Daya Genetik (SDG)	Pemkab Kebumen

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen dan BRIDA Prov. Jateng, 2024

Tabel 4.12.
Daftar Potensi dan Kekayaan Kabupaten Kebumen
yang sedang dan akan diajukan sebagai HKI Komunal

NO	NAMA INOVASI	KETERANGAN	PROSES HKI
1	Jamjaneng	Pada awal mulanya kesenian Jamjaneng merupakan kesenian yang dimainkan untuk tujuan dakwah agama Islam dimasa itu. Bermula dari zaman kerajaan Demak pada sekitar abad ke-7 sampai masa sekarang. Karena merupakan kesenian bertujuan dakwah, lagu-lagu Jamjaneng lebih banyak bernafaskan Islam, seperti misalnya Shalawat Nabi. Kesenian Jamjaneng ini merupakan kebudayaan asli Kebumen, tidak seperti budaya Rebana yang merupakan Budaya turunan dari bangsa Arab. Pada masa sekarang, kesenian Jamjaneng lebih bertujuan untuk melekatkan tali silaturahmi antar masyarakat karena jamjaneng merupakan suatu musik tradisi yang melibatkan banyak pemain.	Proses Review Kemenkumham
2	Sate Ambal	Makanan khas dari daging ayam yang berasal dari daerah Ambal, sebuah kecamatan di pesisir selatan Kabupaten Kebumen. Sate Ambal berbeda dengan sate lainnya yang ada di Indonesia, perbedaannya terletak dari bumbunya. Bumbu Sate Ambal agak lebih encer, berwarna kuning tua kecoklatan dan sekilas terlihat seperti kuah masakan Padang. Istimewanya dari sate ambal adalah, bumbu ini dibuat dari tempe rebus yang dihancurkan hingga halus. Cita rasanya manis-pedas-gurih dengan aroma keharuman rempah yang menggugah selera dengan rasa dan aroma tempunya yang tidak terasa lagi.	Proses Review Kemenkumham
3	Pejagatan	Gerabah Pejagatan bukan sekadar barang kerajinan, melainkan cerminan kekayaan sejarah dan budaya. Di balik setiap tanah yang dibentuk menjadi cobek, mangkuk, piring rintik, kendil, mangkok, kendi, cangkir, pengaron dan padasan serta bentuk dan produk lain tersemat kisah yang panjang. Gerabah Pejagatan dikenal sebagai gerabah anti racun yang berwarna hitam alami. Warna hitam alami gerabah diperoleh dari hasil pembakaran yang menggunakan daun bambu.	Proses Review Kemenkumham
4	Cucur	Cucur merupakan makanan tradisional, berbentuk bundar yang telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dulu, dan memiliki cita rasa legit, manis, gurih dan sedikit renyah di bagian pinggirnya. Dimana, di Desa Temanggal banyak sekali masyarakat yang memproduksi kue tradisional tersebut dan cukup dikenal hingga luar daerah.	Proses Review Kemenkumham

NO	NAMA INOVASI	KETERANGAN	PROSES HKI
5	Garam	Kampung Garam Kebumen adalah produksi garam konsumsi dengan kualitas tinggi, telah kerjasama/MoU dengan PT Kimia Farma untuk pemasaran garam farmasi, telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan Standar Nasional Indonesia, proses produksi dan pengolahan tidak merusak lingkungan/zero waste dan mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Kampung Garam Kebumen berdampak pada produksi dan pengolahan garam yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya dengan kadar NaCl 97,73%. Dampak multiplayer effect bagi pembukaan lapangan kerja baru bagi petambak garam (termasuk rumah tangga miskin dan perempuan) dengan dengan pembinaan kelembagaan kelompok usaha garam rakyat dan koperasi serta pengembangan edu wisata. Kampung Garam Kebumen ini terjamin keberlanjutan karena didukung faktor lahan, bahan baku, iklim, tenaga kerja, kualitas hasil produksi dan pangsa pasar yang tersedia.	Proses Review Kemenkumham
6	Tugu Kemit	Bicara rentetan sejarah di Kebumen memang tidak ada habisnya. Mulai dari masa kerajaan hingga kolonial, Kebumen termasuk bagian penting wilayah pertahanan. Tak ayal bukti bangunan bersejarah kini masih banyak dijumpai. Seperti keberadaan monumen Status Quo (Tugu Kemit) di Desa Grenggeng, Karanganyar. Monumen ini menyimpan sejarah panjang mengenai berdirinya bangsa. Lebih tepatnya sebagai tanda sejarah para pejuang dalam mempertahankan wilayah teritorial Indonesia. Monumen Status Quo menjadi simbol perundingan atas hasil kesepakatan mengenai batas wilayah Indonesia-Belanda. Sejarah singkat mencatat, perundingan berlangsung pada 24 Januari 1948 di sebelah barat Jembatan Kemit, Karanganyar. Kesepakatan Status Quo ini berangkat dari perlakuan Belanda ke Indonesia. Kala itu, sekitar 1947 Belanda secara terang-terangan melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan ekspansi hingga ke wilayah Gombong. Dilain sisi, Indonesia memutuskan mengadakan perlawanan dengan tetap mematuhi perintah gencatan senjata. Hingga tercetuslah perundingan Status Quo. Perundingan tersebut diawasi Komisi Tiga Negara (KTN) besutan PBB sebagai perwakilan juru perdamaian PBB. Berdasar perundingan itu akhirnya Belanda bersedia memundurkan garis wilayah. "Kali Kemit ditetapkan sebagai garis demarkasi atau garis Status Quo. Setelah ada yang menengahi yaitu KTN dari perjanjian yang ada," menurut Sejarawan Kebumen Ravie Ananda. Artinya menurut Ravie, aliran Sungai Kemit menjadi batas terluar bagian barat batas wilayah Indonesia. Atas hal ini pasukan dan pejabat pemerintahan Indonesia yang berada di kantong wilayah kekuasaan Belanda harus ditarik keluar. Dengan kata lain, Sungai Kemit menjadi pintu keluar dari Jawa Barat ke wilayah Jawa Tengah. Menurut Ravie, "Pasukan Siliwangi dan para pejabat dari Jawa Barat diangkut menggunakan kereta api oleh Belanda, lalu diturunkan di stasiun Gombong".	Proses Review Kemenkumham
7	Makam Syech Baribin	Raden Haryo Baribin atau dikenal dengan Syeh Baribin merupakan Keturunan Raja Brawijaya V. Syeh Baribin merupakan tokoh penyebar agama islam di tanah Jawa hingga akhirnya beliau menetap dan wafat di Gunung Wulan yang menjadi cikal bakal Desa Grenggeng.	Proses Review Kemenkumham
8	Cowongan	Cowong adalah boneka yang terbuat dari batok tempurung kelapa yang dihias sedemikian rupa hingga mirip wajah perempuan. Awal mula adanya COWONG pada jaman dahulu kala ketika didesa mengalami kemarau panjang salah satu sesepuh desa mengadakan ritual minta hujan dengan sarana berupa boneka yg dibuat menyerupai manusia dan melakukan beberapa ritual ditempat yg dikeramatkan oleh penduduk dan bersama sama memohon pada Sang Maha Pencipta agar diturunkannya hujan, sampai sekarang tradisi ini masih berjalan terutama dibulan Suro atau tahun baru Hijriah sebagai bentuk pelestarian peninggalan leluhur biar tetap lestari.	Rencana

NO	NAMA INOVASI	KETERANGAN	PROSES HKI
9	Batik Jagatan	Motif batik khas Kebumen ini merupakan motif paling istimewa dan banyak disukai, sebab motif ini menggambarkan kombinasi seluruh isi alam/ jagad raya ini. Terdapat gambar pepohonan, pemandangan alam, umah, bahkan pagar rumah kadang muncul pada motif ini. Untuk membuat batik motif jagatan memakan waktu lebih lama dari motif lainnya, yaitu sekitar 1-2 bulan karena kerumitan motifnya dan proses pewarnaannya. Sebagai perbandingan, untuk motif lain hanya butuh dua kali proses pewarnaan, sedangkan untuk motif jagatan membutuhkan 4 kali proses pewarnaan	Rencana
10	Nasi Penggel	Nasi penggel merupakan sebuah makanan khas dari Kabupaten Kebumen. Kuliner ini termasuk salah satu makanan yang unik karena nasi dibentuk bulat seukuran bola pingpong dan disajikan dengan wadah daun pisang yang dibentuk 'pincuk'. Makanan ini juga disajikan dengan sayur nangka muda, kikil yang dimasak dengan bumbu kuning, tahu, dan tempe mendoan sebagai lauk pendamping.	Rencana
11	Tugu Walet	Tugu Lawet atau Tugu Walet adalah sebuah tugu atau monumen yang berada di pusat kota Kebumen. Keberadaan tugu ini berkaitan erat dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Kebumen yaitu penghasil sarang Burung lawet. Tugu Lawet dibuat untuk menggambarkan aktivitas serta perjuangan para penduduk sarang Burung walet di goa-goa pada tebing karang pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang penuh tantangan serta risiko. Bentuk Tugu Lawet yang tidak beraturan menggambarkan kontur karang pesisir selatan Kebumen terjal. Terdapat lima patung manusia yang menggambarkan para penduduk serta dua ekor patung Burung walet raksasa di puncak tugu. Lima patung manusia yang hanya mengenakan celana pendek untuk menggambarkan kesederhanaan para penduduk zaman dahulu.	Rencana

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen (data diolah dari berbagai sumber), 2024

4.3.2 Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah antara lain inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah dan jaringan inovasi daerah. Dalam rangka mendukung iklim riset dan inovasi daerah dibentuk jejaring riset dan inovasi daerah melibatkan lembaga penelitian, bisnis, masyarakat dan media sebagai perwujudan sinergi pentahelix.

Inovasi dalam pelayanan publik merujuk pada pengembangan dan implementasi ide, proses, produk, atau layanan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat. Inovasi ini penting untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen dan mendorong peningkatan inovasi pelayanan publik, dan beberapa inovasi tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Daftar Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDE R TERKAIT	KETERANGAN HAKI
1	MIE KERITING (MAKANAN INSTAN CEGAH Kerdil dan Stunting)	Manfaat inovasi mie keriting bagi KEMENDAGRI adalah sebagai peluang baru untuk pengembangan produk yang bermanfaat untuk pencegahan stunting dan untuk menunjang pertumbuhan balita, bagi KEMENKES RI adalah sebagai alternatif PMT untuk balita di seluruh Indonesia untuk pencegahan stunting, bagi KEMENRISTEK dan LITBANG KEMENKES RI Sebagai penemuan baru untuk pengembangan Riset dan Inovasi, bagi BRIN dan BRIDA sebagai penemuan baru untuk pengembangan produk sebagai peluang inkubasi dan peluang bagi investor untuk permodalan bagi UMKM, Bagi BAPPEDA kabupaten sebagai peluang untuk mengembangkan riset daerah pada Upaya diversifikasi pangan, bagi DISTAPANG sebagai alternatif untuk pengembangan pertanian pengadaan bahan baku, bagi DINAS KESEHATAN untuk mengurangi kasus stunting di Pemda, bagi Instansi berguna untuk mengurangi prevalensi stunting, di PEMDES berguna untuk peningkatan gizi balita.	Setelah penerapan inovasi mie keriting ada perbedaan yang signifikan pada prevalensi stunting maupun perubahan tingkah laku masyarakat dalam gaya hidup dalam mencegah stunting serta dari segi pendapatan di masyarakat dari hasil penjualan mie keriting. inovasi mie keriting tahun 2021 ada replikasi oleh 3 desa yaitu Wonosari, Adikarso, Mengkowo, Tahun 2022 direplikasi oleh DINKES PPKB dan 34 Puskesmas, Tahun 2023 direplikasi oleh 2 desa yaitu Gesikan dan Tanahsari. inovasi ini telah ditetapkan sebagai Top 45 Nasional Inovasi Pelayanan Publik pada Tahun 2023, dan menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik kelompok keberlanjutan Tahun 2024	Dinkes Kab. Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen BRIDA Provinsi Jawa Tengah Puskesmas Kebumen II Desa di wilayah cakupan Puskesmas Kebumen 2	TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT PATEN DAN HAK CIPTA

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT	KETERANGAN HAKI
2	PUSKESOS RUMAH HARAPAN	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah memilih 5 Kab/kota di Indonesia sebagai sampel pengambilan video kemiskinan ekstrem yaitu: Kabupaten Kebumen, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Buleleng, Kab. Timor Tengah Selatan dan Kota Medan untuk mendokumentasikan pengalaman dan tantangan Pemda dalam menerapkan inisiatif pengurangan kemiskinan ekstrem serta dampak program terhadap penerima manfaat. RUMAH HARAPAN DAN SOBATKU menjadi lokus dan fokus dari kegiatan tersebut.	Sejak tahun 2017, "RUMAH HARAPAN" dialihkan pengelolaannya ke Dinas Sosial. Seiring berjalannya waktu serta menyesuaikan perubahan kebijakan dan nomenklatur di Kementerian Sosial Republik Indonesia (2020), "RUMAH HARAPAN" berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dan memiliki 10 (sepuluh) layanan yaitu: 1. Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 2. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 3. Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 4. Rekomendasi Pelayanan Jamkesda 5. Konsultasi bantuan sosial, PKH dan Sembako 6. Rekomendasi adopsi anak 7. Rehabilitasi PGOT dan ODGJ 8. Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng 9. Rekomendasi perpanjangan dan pendirian LKS 10. Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA) Pada Tahun 2022 Rumah Harapan ditetapkan sebagai program Quick Win Smart City Kabupaten Kebumen. Selain itu Puskesmas merupakan salah	Pentahelix keterlibatan aktor inovasi ditandai dengan 12 MOU terdiri dari: a. Unsur pemerintah: Diskominfo, Disdukcapil, Dispermades P3A b. Lembaga pembiayaan: Bank Mandiri Cabang Gombang, Bank Mandiri Cabang Karanganyar, Bank Mandiri Cabang Kebumen, Bank Mandiri Cabang Kutowinangun, BRI Gombang c. Komunitas: LSM Formasi d. BUMN: PT. Pos Cabang Kebumen, e. Akademisi: Universitas Putera Bangsa f. BAZNAS Kebumen	

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDE R TERKAIT	KETERANGAN HAKI
			satu inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan. Keberadaan Puskesmas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi, saling terkoneksi dengan seluruh pemangku kepentingan, membantu validasi data penerima bansos dan adanya puskesmas pada tingkat desa dapat mendekatkan layanan kesejahteraan sosial dengan masyarakat. PUSKESOS harapan berusaha terus mendekatkan layanan bagi masyarakat miskin, dalam menyampaikan keluhan atau aduan terkait dengan layanan kebutuhan program dan bantuan jaminan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Rumah Harapan (SIRAMAH)		
3	Kebun KITA Agrismart	Manfaat Kebun KITA Agrismart : A. Masyarakat 1) Masyarakat memperoleh informasi tentang pertanian dan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan ketahanan pangan keluarga, 2) Masyarakat memperoleh akses edukasi dan konsultasi tentang program pertanian dan pemanfaatan pekarangan, 3) Masyarakat mendapatkan rekomendasi dan rujukan dalam pemilihan bibit unggul dan bersertifikat/berlabel, 4) Masyarakat	Dengan adanya Demplot kebun KITA Agrismart ini, bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat umum /publik yang berkunjung diantaranya Pendidikan/Edukasi tentang ilmu pertanian, aestetika tata kelola tanaman, data komoditas pangan dan pelaporan serta replikasi demplot di seluruh kecamatan se Kabupaten Kebumen. Fungsi Kebun KITA Agrismart saat ini, selain menjadi wadah Pendidikan, juga sebagai wadah konsultasi	Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Demonstrasi Plot (Demplot) Pemanfaatan Pekarangan di Lingkungan Rumah Dinas Bupati Kebumen (Kebun KITA AGRISMART). Sebagai media edukasi bagi sekolah, perguruan tinggi, dan menjadi salah satu tempat study banding dari luar Kabupaten Kebumen. Lokasi Replikasi Kebun KITA	

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT	KETERANGAN HAKI
		memperoleh informasi inovasi teknologi dan etalase pertanian modern. B. Instansi : 1) Mempermudah transfer informasi teknologi pertanian 2) Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh pertanian	tentang pertanian, baik itu bibit, hama penyakit serta memberikan solusi dan pemecahan masalahnya yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Memberikan informasi inovasi teknologi pemanfaatan pekarangan secara modern, memberikan rekomendasi/rujukan pemilihan bibit bersertifikat/sertifikasi tanaman yang unggul dan baik untuk dibudidayakan di wilayah Kebumen.	Agrismart di 26 Kecamatan yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) dan di BPP (Ayah, Buayan, Rowokele, Puring, Kuwarasan, Gombong, Karangsembung, Sruweng, Buluspesantren, Kutowinangun, Karanggayam dan Karanganyar)	
4	AMAT RAPAT (AKTA KEMATIAN di SERAHKAN CEPAT)	a. Menciptakan Kevalidan data Kependudukan di Data Base kependudukan up to date. b. Mewujudkan pendataan yang akurat untuk pembangunan berkelanjutan	• Keluarga duka tidak perlu lagi datang ke Kantor Kecamatan, dari Desa cukup kirim dokumen melalui whatsapp Kecamatan langsung proses dan menyerahkan Akta Kematian kepada keluarga duka secara langsung. • Lebih Efektif dan Efisien karena keluarga duka tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan • Data Penduduk meninggal langsung terentri sehingga mengurangi bertambahnya data penduduk meninggal yang belum terentri Akta Kematian. • Data meninggal langsung terdeteksi ke banyak layanan seperti BPJS, DINSOS dan lainnya sehingga mempercepat atau memperlancar pada pembangunan berkelanjutan	Kec.karangsambung, desa di wilayah kecamatan karangsambung Disdukcapil kab. Kebumen	

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT	KETERANGAN HAKI
5	Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK) dengan Aplikasi Online untuk Mempercepat Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Kebumen	Dengan inovasi teknologi informasi SIMBOK, harga kebutuhan pokok di pasar-pasar rakyat di wilayah kabupaten kebumen dapat terpantau secara realtime setiap pagi dan dapat diakses oleh seluruh OPD, stakeholder dan masyarakat umum, juga dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kebumen.	SIMBOK dapat menyajikan harga rata-rata kepokmas di Kabupaten Kebumen, harga rata-rata di tiap pasar setiap hari yang disajikan dalam bentuk daftar harga harian, table perubahan harga per pasar, per hari, per bulan, per tahun. Perubahan harga komoditi juga dapat dilihat dalam bentuk grafik perubahan harga. Terdapat pula menu perbandingan harga komoditi antar pasar rakyat yang dapat digunakan untuk membandingkan harga di pasar satu dengan pasar lainnya.	Disperindag Kabupaten Kebumen bersama stakeholder terkait memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk penyediaan data harga kepokmas di Kabupaten Kebumen	
6	"SI PEMIKAT" SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT	Pada kurun waktu 2019-2022, Kebumen mempunyai 5 DESMIGRATIF yang difasilitasi oleh Kemenaker RI, dan 6 DESBUMI yang dibentuk oleh LSM Migran Care. Melalui SK Kadisnaker No. 560/2423 tahun 2023 telah direplikasi 26 DESMIGRATIF yang difasilitasi Dana Desa dan 3 DESBUMI dampingan Migran Care. Salah satu pilar dalam SI PEMIKAT adalah pengembangan Desa Migran Produktif/DESMIGRATIF yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon PMI, PMI dan PMI purna penempatan beserta anggota keluarganya secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan.	SI PEMIKAT mendukung SDG's 8 target nomor 8:"Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting" Progress SI PEMIKAT sampai tahun 2023: penandatanganan Komitmen Bersama oleh Camat dan Kades, Database PMI di 337 desa, 38 lokasi Replikasi Desmigratif, 272 Perdes Pelindungan PMI, 14 Pokja Bina TKI, Terbentuk Tim Psikososial community parenting, sosialisasi media cetak dan elektronik, hotline	Melalui inovasi SI PEMIKAT, DISNAKER telah melakukan kolaborasi pentahelix dalam perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di Kebumen, dengan Universitas, NGO's Migran Care, komitmen dengan kecamatan dan desa hingga saat ini telah tersusun regulasi berupa Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pemberdayaan PMI sebanyak 272 Perdes dan 337 database calon PMI, PMI maupun PMI purna penempatan dari jumlah total	

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT	KETERANGAN HAKI
			layanan pengaduan PMI. Melalui Perbup Nomor 5/2023 teralokasi dana desa untuk kegiatan perlindungan PMI serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah Lokasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) berdasar SK Bupati Nomor 560/1223 menjadi bagian Mal Pelayanan Publik/MPP.	460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen.	
7	BALADA PAK-KIS	1. Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen; 2. Memberikan kemudahan kepada pemohon dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan; 3. Meningkatkan kompetensi faskes dalam memberikan pelayanan (service exelent) pada pasien dan; 4. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.	Inovasi BALADA PAK-KIS saat ini memberikan 4 paket dokumen sekaligus dimana bayi lahir mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). BALADA PAK-KIS mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dan asuransi kesehatan hanya dengan sekali pelaporan di faskes tempat ibu melahirkan, ketika pulang membawa paket dokumen secara gratis dan praktis. Inovasi ini juga sangat diutamakan bagi penduduk rentan dan berkebutuhan khusus (disabilitas). Adapun data penerbitan data administrasi kependudukan ditampilkan dalam tabel berikut: TAHUN 2016: 1720 TAHUN 2017: 3876 TAHUN 2018: 4684 TAHUN 2019: 6399 TAHUN 2020: 5510 TAHUN 2021: 5484 TAHUN 2022: 3387	Koordinasi Pelaksanaan Program Inovasi Balada Pak-Kis dengan BPJS, Rumah sakit/Klinik Bersalin dan Puskesmas Se-Kabupaten Kebumen,	

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT	KETERANGAN HAKI
8	CEGAH STUNTING DENGAN PANTAU KILAT CALON MANTEN (CETING PAK CAMAT)	memonitor status anemia calon bumil. pencegahan stunting dilakukan sejak dini, pada masa prakonsepsi, dengan sasaran calon pengantin. Pada CETING PAK CAMAT ada penambahan pemeriksaan kadar Hb dan pengukuran lingkaran lengan atas untuk menjaring catin dengan status gizi Anemia dan KEK	Inovasi ini mempunyai dampak perubahan yang baik bagi masyarakat, khususnya calon pengantin, karena dapat mengetahui status kesehatan dan kesiapan dalam perencanaan kehamilan sebagai upaya tindakan pencegahan atau penurunan kasus stunting. Adanya edukasi pada catin bisa meningkatkan pengetahuan catin tentang gizi dan kesehatan, karena pemenuhan gizi tidak hanya dibutuhkan oleh anak setelah lahir, tapi sejak prakonsepsi juga oleh pengantin. Pemenuhan gizi menjelang pernikahan ini sebagai upaya mewujudkan generasi bebas stunting.	Puskesmas Alian membentuk tim lintas program (dokter, perawat, bidan, analis, gizi, promkes. dll) terkait pelayanan di dalam gedung dan melibatkan lintas sektor, khususnya KUA untuk memasukkan materi pencegahan stunting bagi catin pada konseling pranikah, dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat sesuai SK Tim Ceting Pak Camat (terlampir).	
9	GENCAR SAPU TBC	Manfaat Inovasi GENCAR SAPU TBC yaitu: 1. Bagi Masyarakat a. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC. b. Mempermudah akses pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan dahak untuk deteksi dini TBC. c. Mencegah pasien TBC putus berobat d. Pasien TBC mendapat pengobatan sesuai standar dan sampai sembuh 2. Bagi Kader a. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kader dalam pencegahan dan penanggulangan	Tahun 2023 Sasaran terduga TBC diperiksa sesuai dengan standart sebanyak 801 orang. Kegiatan GENCAR SAPU TBC (Gerakan Pencarian Suspek dan Penderita TBC) melalui investigasi kontak pasien TBC yang dilakukan sebulan dua kali, kunjungan rumah orang terduga TBC oleh kader dan petugas. Capaian penemuan terduga TBC pada bulan mei 2023 sebanyak 270 orang (34 %).	Untuk menambah semangat kader jumantuk dan meningkatkan partisipasi dari lintas sektor maka diadakan lomba pengiriman suspek tingkat Desa. Kader jumantuk bekerjasama dengan bidan desa, perawat desa, kader wilayah dan perangkat desa dalam mencari suspek TBC.	

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT	KETERANGAN HAKI
		penyakit TBC di masyarakat b. Mendapatkan reward atas peran serta kader dalam membantu meningkatkan capaian SPM Puskesmas Buayan 3. Bagi Desa a. Meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa b. Menjadikan Desa Siaga Aktif yang tanggap dalam pencegahan dan penanggulangan TBC 4. Bagi Puskesmas a. Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) indikator pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar b. Menjadikan Kecamatan Sehat yang tanggap dalam pencegahan dan penanggulangan TBC c. Menuju eliminasi TBC di wilayah Puskesmas Buayan			
10	GESIT MERAYU (GERAKAN SADANIS DAN IVA Test untuk MENCEGAH kanker leher RAhim DAN paYudara)	1. Masyarakat terbantu dengan adanya kunjungan langsung dari petugas puskesmas 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam mencegah kanker leher rahim dan payudara 3. Masyarakat mengetahui berbagai jenis penyakit organ kewanitaan 4. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat secara lebih dini	Inovasi GESIT MERAYU memudahkan akses pelayanan kesehatan, dalam kasus spesifik program deteksi dini untuk kanker leher Rahim dan kanker payudara. Kegiatan dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri driver, petugas IVA dan bidan pemangku wilayah. Tahun 2020 dalam masa pandemic Covid19 pelaksanaan Inovasi tetap dilakukan di Desa yang tidak terdapat kasus Covid19. Pelaksanaan kegiatan Inovasi pada tahun 2021 masih dalam masa	1. Di tingkat programmer Pokja yaitu Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) satu kali dalam sebulan 2. Di tingkat Puskesmas yaitu dalam kegiatan Lokakarya Mini (LOKMIN) satu kali dalam sebulan 3. Di tingkat Kecamatan yaitu dalam kegiatan pertemuan Lintas Sektor (LINSEK) satu kali dalam Triwulan 4. Di tingkat Kabupaten yaitu dalam kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi	

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDE R TERKAIT	KETERANGAN HAKI
			pandemic Covid19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan capaian meningkat 80,14%. Capaian pada tahun 2022 di angka 63%. Pada awal tahun 2023, capaian hingga bulan maret yaitu 16,4%.	(MONEV) satu kali dalam setahun	
11	HANTARO	1) Memberikan layanan telefarmasi dengan memperhatikan kualitas layanan kefarmasian kepada pasien. 2) Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien poliklinik 3) Mengurangi kerumunan antrian di Unit Farmasi Rawat Jalan 4) Mengurangi waktu tunggu obat jadi dan racikan di Unit Farmasi Rawat Jalan	HANTARO mendukung pelayanan RSUD dr. Soeirman yang telah terakreditasi paripurna dengan memberikan pelayanan yang memudahkan pasien dengan tetap memperhatikan kualitas layanan yang sesuai standar diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat terkait kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu, kompetensi petugas, perilaku petugas, kualitas sarpras, penanganan pengaduan	Kolaborasi antara RSUD Dr. Soedirman dengan Kantor POS dalam rangka memberikan pelayanan hantaran obat.	
12	KREDIT SIMIKI	a. Untuk menambah modal usaha. b. Untuk Investasi yang sifatnya mendukung usaha yang dijalani saat ini, misalnya membeli peralatan sebagai penunjang usaha c. Untuk membantu mengurangi ketergantungan dari para rentenir	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten kebumen dengan adanya penambahan modal usaha 2. Meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya 3. Menurunkan ketergantungan nasabah terhadap kredit rentenir 4. Menaikan Outstanding kredit PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	PT BPR Bank Kebumen bersama Pemkab Kebumen saling memberikan dorongan berupa Peruntukam kredit ini yang dikhususkan kepada pedagang mikro yang belum dapat menjangkau perbankan konvensional yang persyaratannya harus didukung dengan agunan.	

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT	KETERANGAN HAKI
13	SIAPPIKE POL (Sistem Aplikasi Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Pembayaran Secara Online)	Bagi Pemerintah · Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan di bidang Pengujian Kendaraan bermotor · Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor · Menciptakan transparansi kepada masyarakat tentang pengujian kendaraan bermotor · Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. · Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara stakeholder terkait dan masyarakat luas · Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat pengguna dan pemegang kendaraan Bagi Masyarakat · Efisiensi waktu bagi masyarakat yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotor. · Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam sistem dan prosedur pengujian kendaraan bermotor secara transparan. · Akuntabilitas hasil pelayanan pengujian dapat dipertanggungjawabkan	SIAPPIKE POL (Sistem Aplikasi Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Pembayaran Secara Online) merupakan Program aplikasi dalam rangka peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan pendaftaran secara online dan pembayaran dilakukan secara non tunai melalui Bank BPD Jateng, ATM, Bima Qris, dan Agen Laku Pandai Serta hasil pengujian kendaraan bermotor berupa Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) dan smart card pada masing – masing kendaraan bermotor wajib uji.	Pemerintah Kabupaten Kebumen (Disperkimhub bersama BPD Jateng)	

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen (data diolah dari berbagai sumber), 2024

Selain itu, beberapa kegiatan prioritas juga dikembangkan secara inovatif oleh Pemerintah Kabupaten bersama multistakeholder, diantaranya:

4.3.2.1 Transformasi Penataan Ruang Terbuka Publik dalam Kerangka Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusi

Sebagaimana wilayah kabupaten di Indonesia yang memiliki kawasan perkotaan, Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan serius mulai dari perencanaan di Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang sejak lama mengandalkan perekonomian

pada sektor pertanian, menghadapi permasalahan diantaranya angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan nyatanya belum mampu secara optimal mengentaskan masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan antara lain masih rendahnya tingkat pendapatan, belum tersedianya peluang usaha yang memadai, serta dipadukan dengan masih minimnya infratraktur dengan menyediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat.

Kabupaten Kebumen merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang membutuhkan ruang publik terbuka dan inklusif pada Kawasan Perkotaan untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk olahraga, hiburan, kesenian, sosial dan kebudayaan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Saat ini Kabupaten Kebumen memiliki beberapa ruang publik yaitu stadion olahraga, taman kota, alun-alun kota, hutan kota dan taman rekreasi dan olahraga. Pemilihan titik awal penataan adalah kawasan perkotaan karena selama ini kawasan perkotaan Kebumen menjadi salah satu ruang publik untuk masyarakat berekreasi, olahraga, dan melakukan aktivitas ekonomi, maupun sosial budaya sehingga kawasan perkotaan Kebumen menjadi lokus favorit para penyelenggara atraksi pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Mendasari hal tersebut, Kabupaten Kebumen melakukan inovasi penataan ruang terbuka publik sebagai bagian dari pengembangan pusat ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi yang dilakukan adalah melalui revitalisasi dan penataan ulang infrastruktur ruang terbuka publik yang ada sehingga tetap mampu berperan sebagai ruang terbuka publik yang inklusif, sekaligus memperluas fungsi sebagai sarana berbagai aktivitas seperti olahraga, kesenian, ekonomi serta sosial budaya.

Mendasari letak dan fungsinya yang strategis telah dibangun Koridor Perkotaan Kebumen, Moro Soetta di sepanjang ruas Jalan Soekarno - Hatta yang dulunya disebut Jalan Pahlawan, hingga Jalan Merdeka di seputaran Alun-alun Kebumen, dilanjutkan sepanjang Jalan Sutoyo hingga terhubung ruas Jalan Kusuma yang berada di pusat perkotaan Kebumen mempunyai nilai fungsi dan aksesibilitas sosial ekonomi yang tinggi sebagai poros pertumbuhan ekonomi. Kondisi sebelum dilakukan revitalisasi infrastruktur, koridor perkotaan Kebumen kurang representatif keberadaannya, ruas jalan tersebut belum mampu mewadahi perkembangan aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Permasalahan yang timbul diantaranya drainase yang kurang lancar sehingga terjadi genangan pada waktu hujan, parkir di kedua bahu jalan, pergerakan transportasi lambat, spesifikasi trotoar yang kurang nyaman sebagai pedestrian, banyaknya PKL dan ruang terbuka hijau (RTH) yang terbatas. Ketersediaan ruang publik diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Ruang publik diharapkan menjadi wadah interaksi antara Pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis.

Inovasi ini berupaya menawarkan sudut pandang baru kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang publik. Masyarakat yang selama ini memiliki kebutuhan terhadap ruang dan menuntut akan pemenuhannya (pusat aktivitas masyarakat dan gedung kesenian) ditawarkan dengan konsep pemanfaatan ruang publik terbuka untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tersebut. Caranya adalah dengan mengubah bentuk, desain, tampilan dan peruntukannya sehingga sesuai dengan kebutuhan akan ruang publik yang ada.

Karena sifatnya yang terbuka, maka ruang publik ini juga akan mampu menopang berbagai aktivitas yang sifatnya lebih massif, utamanya dalam

mewadahi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan peluang usaha dan peningkatan pendapatan. Penciptaan bangunan iconic dan pusat informasi pariwisata/geopark juga diharapkan akan mampu menjadi daya tarik wisata baru, meningkatkan kedatangan wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah yang berujung pada meningkatnya peredaran uang dalam masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu ruang publik diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan luar ruang seperti pelaksanaan event baik lingkup lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. Sebagai pusat kegiatan olahraga, maupun ruang kolaborasi pemuda dan pelaku ekonomi kreatif.

4.3.2.2 Pengembangan Agrobisnis Melalui *Corporate Farming*

Pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Kebumen, meskipun sektor ini belum mampu menjadi sektor andalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bekerja di sektor pertanian. Beberapa masalah dalam sektor pertanian antara lain rendahnya kualitas SDM petani sehingga tingkat adopsi teknologi dan inovasi rendah, terdapat inefisiensi dalam pengelolaan produksi karena kurangnya skala usaha karena pengelolaan lahan pertanian yang sempit yaitu kurang dari 0,25 Ha, produktivitas yang rendah, dan permasalahan manajemen usaha dan akses pemasaran.

Konsep corporate farming diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Corporate farming adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan manajemen. Keberadaan Corporate Farming diharapkan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi petani yang tergabung dalam manajemen Corporate, seperti solusi terkait hambatan permodalan, teknis budidaya, penerapan teknologi, dan pemasaran. Selain itu, Corporate Farming dapat membuka kesempatan hilirisasi dan kemitraan dari berbagai stakeholder, serta masyarakat Kebumen secara umum selaku konsumen dari produk hasil Corporate Farming tersebut. Secara khusus, pelaksanaan Corporate Farming yang ditumbuhkan dan dikembangkan di Kabupaten Kebumen fokus pada sisi hulu, sehingga perlu mengintegrasikan kelembagaan kelompok tani/ Gapoktan/ Kelompok Usaha Bersama dalam suatu manajemen korporasi yang mengelola lahan petani yang menyerahkan lahan sawahnya untuk dikelola oleh manajemen korporasi. Selain penguatan kelembagaan kelompok tani dalam manajemen Corporate Farming, manajemen mekanisasi untuk mendukung pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Corporate Farming perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, revitalisasi kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Brigade Alsintan menjadi fokus pembinaan dan pendampingan secara terpadu. Tujuan jangka panjang dari corporate farming adalah untuk mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi.

Pilot project corporate farming pada MT 1 Tahun 2023 dan MT 2 Tahun 2024 dilaksanakan di 13 desa, 8 kecamatan dengan 13 kelompok tani dengan luasan 83 hektar. Adapun produktivitas pada lokasi percontohan tersebut rata-rata pada MT 1 Tahun 2023 sebesar 59,79 dan rata-rata pada MT 2 Tahun 2024 sebesar 67,72. Pemerintah Kabupaten Kebumen bermitra dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya untuk memberikan bantuan pinjaman penyediaan sarana produksi pertanian, sebagai off taker Gabah Kering Panen (GKP) Kelompok Tani pelaksana corporate farming. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya juga bekerjasama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mendukung akses pemasaran hasil

kelompok tani. Hasil serapan GKP kelompok tani digunakan untuk mendukung gerakan pangan murah (GPM) sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen. Setidaknya pada September 2024 penyerapan Gabah sebanyak 43,99 ton (GKP) di lokasi corporate farming dan mendukung 60% penyediaan beras untuk pelaksanaan program GPM yang dilaksanakan sebanyak 366 kali selama Tahun 2024 di 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Selain pada komoditas padi, corporate farming juga diterapkan pada komoditas jagung pada MT 2 Tahun 2024 di 3 desa pada 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen dengan masing-masing lokasi seluas 5 Hektar. Untuk akses pemasaran jagung, Pemerintah Kabupaten Kebumen menjalin kemitraan dengan PT Semar Sakti di Brebes dan PT Seger Agro Nusantara di Gresik yang menjadi offtaker jagung di Kabupaten Kebumen. Setidaknya terserap sebesar 29.176 ton jagung pada Tahun 2024.

4.3.2.3 Gerakan Pengendalian Harga Pangan Dukung Stabilitas Inflasi dan Penurunan Kemiskinan

Gerakan pengendalian harga pangan dilatar belakangi oleh peningkatan indeks perkembangan harga (IPH) di Kabupaten Kebumen yang terus meningkat terutama di komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan gula pasir. Kenaikan bahan pangan ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi garis kemiskinan. Sebagai salah satu upaya dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kebumen, dilaksanakan secara terintegrasi dari sisi hulu hingga hilir sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Perangkat Daerah terkait dengan ketahanan pangan dan perdagangan, Bulog, BUMD Aneka Usaha Kebumen Jaya dan stakeholder lainnya. Upaya ini sejalan dengan arahan Pemerintah terkait aksi dan kebijakan terkait pengendalian inflasi pangan salah satunya dengan pelaksanaan gerakan pangan murah, pemberian bantuan pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA.

Terobosan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan meluncurkan program prioritas kolaboratif yang mengintegrasikan dari sisi hulu hilir pertanian dan distribusi barang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengendalian harga, stabilitas inflasi dan pengurangan kemiskinan melalui program Gerak Seruni (Gerakan Pengendalian Harga Pangan Dukung Stabilitas Inflasi dan Penurunan Kemiskinan). Implementasi program Gerak Seruni di sisi hulu yaitu dengan penerapan teknologi CSA (*Climate Smart Agriculture*) dan sistem tanam jagor legowo di 580 ha yang kemudian berkembang menjadi corporate farming di 6 kecamatan dengan produktivitas sebesar 10-12 ton Gabah Kering Giling (GKG) per Ha. Penerapan off season dengan tanaman padi biofortifikasi seluas 1000 Ha, pemanfaatan teknologi pompanisasi, penyediaan pupuk dan benih serta peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pekarangan pangan lestari. Pada sisi hilir yang dilaksanakan antara lain menjaga stabilitas harga melalui gerakan pangan murah dan pasar mitra tani secara masif sebanyak 108 kali di tahun 2024, operasi pasar beras dan minyak di pasar tradisional, subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 yaitu untuk komoditas beras, minyak goreng, gula pasir dan bawang putih, membentuk Toko SPHP yaitu toko mitra bulog, mendirikan kios BUMD Aneka Usaha sebagai penyedia beras SPHP dan komoditas pangan dengan harga di bawah harga pasar. Selanjutnya adalah menjaga stabilitas harga di tingkat produsen melalui dana talangan pangan, BUMD sebagai off

taker gabah petani terutama hasil dari peserta corporate farming dengan harga beli sesuai dengan standar harga pemerintah, dan melalui lumbung pangan di kecamatan rawan pangan. Selain itu penguatan stok komoditas strategis penyumbang inflasi, pemantauan harga komoditas pangan melalui aplikasi SIMBOK, penguatan pemanfaatan data dan informasi harga dan untuk mengetahui ketersediaan komoditas dan implementasi pencegahan pemborosan pangan.

Program ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pasokan komoditas, stabilitas inflasi dan keterjangkauan harga, menjaga daya beli konsumen dan meningkatkan kesejahteraan petani. Implementasi program ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugrah penghargaan predikat Terbaik 1 Nasional pada Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Awards dari Badan Pangan Nasional, dan TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Jawa Bali 2024 dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

4.3.2.4 Inovasi dalam Pengembangan Jurnal Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Karya Ilmiah Riset/ Penelitian maupun Kreasi dan Inovasi

Pengembangan publikasi ilmiah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan yang dapat digunakan sebagai informasi maupun referensi dalam pelaksanaan kajian maupun penelitian lanjutan yang hasilnya dapat menjadi input/rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hasil kreasi dan inovasi Masyarakat yang telah terjaring selama ini perlu mendapatkan wadah pendokumentasian yang baik dalam hal ini diciptakan wadah khusus untuk menuliskan hasil-hasil pengembangan kreasi dan inovasi masyarakat, yang kemudian dilakukan penelaahan dan pengkajian dari sisi ilmiah (reviu) sehingga menghasilkan tulisan karya ilmiah disamping produk kreasi dan inovasi yang dihasilkan. Pengembangan jurnal ilmiah ini dapat menjadi salah satu sarana publikasi hasil-hasil riset dan inovasi yang dilakukan baik oleh aparatur pemerintah daerah, akademisi maupun Masyarakat umum. Selain sebagai sarana publikasi hasil riset dan inovasi, juga dapat berfungsi sebagai wahana membangun jaringan riset dan inovasi serta kolaborasi penelitian/pengkajian para peneliti maupun akademisi.

Pengembangan jurnal ilmiah oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dikembangkan secara *online* mendasari aturan jurnal ilmiah elektronik yang berlaku untuk mendorong publikasi ilmiah serta mengatur baku mutu standar publikasi ilmiah sesuai dengan kaidah jurnal ilmiah internasional. Melalui laman internet <https://jurnal.kebumenkab.go.id> terdapat 2 jurnal ilmiah yaitu:

1. JURNAL KRISAKTI (Jurnal Kreativitas Inovasi dan Aktualisasi Teknologi) yang menjadi wadah dalam penulisan karya ilmiah untuk hasil/produk kreasi dan inovasi; serta
2. JURNAL SEMARAK KABUMIAN yang menjadi wadah dalam penulisan karya ilmiah berbentuk riset/penelitian/pengkajian.



Gambar 4.2
Dashboard Jurnal Online Pemerintah Kabupaten Kebumen



Gambar 4.3
Penerbitan Edisi Jurnal Krisakti dan Jurnal Semarak Kabumian

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rencana kerja disusun berdasarkan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan mulai dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintahan termasuk didalamnya lembaga eksekutif dan legislatif, akademisi, dunia usaha, komunitas dan masyarakat Kabupaten Kebumen. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga telah mendasari hasil evaluasi pembangunan sampai dengan Tahun 2024.

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan difokuskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten maka SPM yang akan ditangani melalui program pengelolaan pendidikan meliputi pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan. Untuk mendukung pencapaian SPM tersebut, beberapa kegiatan yang akan kita prioritaskan di Tahun 2026 meliputi Pembangunan sarana prasarana dan *utilitas* sekolah, Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa, Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, Pengelolaan Dana BOS, Pengadaan alat praktik dan peraga, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, Pembinaan kelembagaan dan manajemen, serta Pengelolaan dana BOP PAUD. Selain itu dalam mendukung pencapaian proporsi penduduk berkualifikasi Pendidikan tinggi juga telah dianggarkan beasiswa ke perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara serta dukungan perkembangan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Kebumen.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini difokuskan untuk mendukung pencapaian IKU persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah

/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan. Hal ini dilakukan dengan penyusunan kurikulum muatan local Pendidikan dasar termasuk pelatihan bagi para penyusun kurikulum agar meningkat kompetensinya. Dengan demikian diharapkan satuan Pendidikan SD maupun SMP yang melaksanakan kurikulum muatan local akan terus meningkat.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini difokuskan untuk mendukung kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru. Hal ini dilakukan dengan perhitungan dan pemetaan serta penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Dengan demikian pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan dapat terpenuhi.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini difokuskan untuk mendukung peningkatan pelayanan izin pendidikan. Hal ini dilakukan dengan penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat serta pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu juga dilakukan pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Dalam masa transisi, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada urusan pendidikan diselaraskan dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui program unggulan yaitu Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge serta Anak Soleh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasar. Selain itu urusan bidang Pendidikan juga diarahkan mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis dan Digitalisasi Pendidikan.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan adalah dalam rangka memenuhi SPM Kesehatan. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pembangunan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan serta pengadaan obat/vaksin. Pada strata layanan kesehatan rujukan dilaksanakan melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan. Peningkatan akses dan mutu pada layanan dasar maupun rujukan melalui pelaksanaan akreditasi dan operasional rumah sakit.

Selain itu peningkatan akses dan mutu layanan yang berkaitan dengan SPM kesehatan yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan

usia lanjut. Deteksi dini penyakit tidak menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, *diabetes melitus* dan ODGJ, serta penyakit menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinfeksi HIV. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya, pengelolaan Surveillans kesehatan serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Mangan Wareg Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian SPM bidang Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan melalui Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga serta pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase produk pangan PIRT yang tersertifikasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan untuk advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, pola hidup sehat dalam rangka promotif preventif dan pengembangan serta pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Anak Soleh. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian PHBS tingkat Kabupaten.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air minum. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada Pembangunan embung dan penampung air lainnya, Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya, Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan serta Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sumber air yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian. Dalam masa transisi, program ini juga

diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan serta Njamu Bergas. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator kinerja yaitu persentase infrastruktur sumber daya air kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik.

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM di kawasan perdesaan, dan Peningkatan SPAM di kawasan perdesaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Njamu Bergas. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung persentase pelayanan air bersih dan pemenuhan SPM air minum yang diukur dengan indikator kinerja persentase pelayanan air bersih dan perpipaan.

c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Program ini diarahkan pada pembangunan sistem drainase lingkungan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Njamu Bergas. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase saluran drainase dalam kondisi baik.

d. Program penataan bangunan gedung

Program ini diarahkan pada perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota. Selain itu, fokus implementasi program juga mengarah pada penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sertifikat laik fungsi, peran tenaga ahli bangunan gedung, pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik.

e. Program penataan bangunan dan lingkungannya

Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungannya untuk mendukung pelaksanaan TMMD. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase bangunan dan lingkungan yang tertangani.

f. Program penyelenggaraan jalan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan kabupaten/kota melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan, pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan berkala jembatan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Njamu Bergas. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap.

g. Program pengembangan jasa konstruksi

Program ini diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Njamu Bergas. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja penyedia jasa konstruksi yang telah dibina dan nilainya baik.

h. Program penyelenggaraan tata ruang

Program ini diarahkan pada penetapan peraturan daerah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota, serta koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian lahan dengan pola ruang RTRW.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah dan SPM Perumahan Rakyat. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini untuk mendukung capaian indikator kinerja persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota dan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha melalui pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh. Selain itu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh kewenangan kabupaten. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Program ini juga diarahkan untuk mendukung program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah serta Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota melalui perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilaur kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari dan Biyunge Momong. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rumah tidak layak huni tertangani.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian antara lain sanitasi, angkutan lumpur tinja dan sarana prasarana akses jalan IPLT. Koordinasi sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan antara lain pemeliharaan IPAL/IPLT dan pelayanan pengolahan air limbah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan akses air limbah aman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, SPM Pemadam Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan serta misi kelima yaitu Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam rangka penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan-peraturan Bupati serta sosialisasi penegakan perda dan perkara. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong dan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penegakkan perda.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/Kota (per jenis bencana), pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan pasca bencana serta pengembangan kapasitas tim reaksi cepat/TRC bencana Kabupaten/Kota. Selain itu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui Respon Cepat Darurat Bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, serta penyediaan logistik, penyelematan dan evakuasi korban bencana. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa tangguh bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung *respon time* terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran, kesiapsiagaan SDM Pemadam Kebakaran dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Selain itu, urusan pemerintahan bidang Sosial juga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Sekolah Rakyat, Kartu Kesejahteraan, dan Kartu Usaha Afirmatif. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan untuk penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan melalui Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan warga negara korban tindak kekerasan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan, serta pemberian layanan kedaruratan. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya melalui pemberian layanan data dan pengaduan, penyediaan permakanan, penyediaan sandang, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase PMKS diluar panti kewenangan Kabupaten yang tertangani.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan jaminan sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota melalui penyediaan makanan, penyediaan sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus

bagi kelompok rentan, dan pelayanan dukungan psikososial. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

f. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada pemeliharaan taman makam pahlawan nasional. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase taman makam pahlawan yang dikelola.

5.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja adalah dalam rangka menekan angka pengangguran. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase tenaga kerja yang dilatih bernilai A.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/ Kota dan perluasan kesempatan kerja untuk mendukung persentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja yang terdaftar baik pencari kerja dalam daerah, Antar Lintas Daerah (AKAD) bahkan pencari kerja Antar Lintas Negara (AKAN). Selain itu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/ Kota melalui peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran/pekerja migran, penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penempatan pencari kerja terdaftar.

c. Program hubungan industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah dan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program

unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

b. Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota dan koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu sebagai bentuk promosi difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan program peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada penyediaan data gender dan anak kewenangan Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini diarahkan pada pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten Kebumen serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kategori Kabupaten Layak Anak (KLA).

f. Program perlindungan khusus anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota dengan fokus pada penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Mangan Wareg Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota fokus pada pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi masyarakat. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong serta Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase diversifikasi dan ketahanan pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/ Kota melalui penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa yang tertangani kerawanan pangannya.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pemberian jaminan keamanan bagi konsumen untuk penggunaan produk olahan dan barang pangan yang dijual

dipasarkan dengan kualitas tinggi melalui pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan penguatan kelembagaan keamanan pangan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* serta pelaksanaan penataan aset dan akses pada Urusan Pertanahan sesuai dengan Perpres No.62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan sengketa lahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program ini diarahkan pada pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota melalui penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. Selain itu pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi, penghentian sumber pencemaran dan pelaksanaan restorasi. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/kota dengan fokus pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk

mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dilakukan pembuangan akhir ditempat yang ditentukan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dengan fokus pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH dan pengawasan usaha atas ijin yang telah diterbitkan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Kebumen melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup dan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat di Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dan fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan pengaduan masyarakat.

i. Program pengelolaan persampahan

Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah dengan fokus pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R. Selain itu program ini juga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengelolaan Sampah Terpadu.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk dengan fokus pada pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pendaftaran penduduk serta peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk antara lain melalui penataan pendaftaran penduduk dalam hal pengadaan formulir dan dokumen pendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta sosialisasi pendaftaran penduduk. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan layanan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan sipil

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil dengan fokus pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, pencatatan, penatausahaan dokumen peristiwa penting, peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil serta koordinasi terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan institusi lainnya. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan layanan pencatatan sipil.

c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan melalui pengolahan dan penyajian data kependudukan dan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan dengan fokus pada Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan dan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penggunaan data informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa dengan fokus pada pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa tertata.

b. Program peningkatan kerjasama desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi kerjasama antar desa dengan fokus pada fasilitasi kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak ketiga serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa

Berdaya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan fasilitasi kerjasama desa.

c. Program administrasi pemerintahan desa

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dengan fokus pada fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pembinaan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, serta pelaksanaan penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa. Program ini untuk mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dan cakupan administrasi pemerintahan desa. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Mangan Wareg Bareng Biyunge, Anak Soleh, Desa Berdaya serta Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya.

d. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya serta Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini untuk mendukung capaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat termasuk lembaga ekonomi desa dan mendukung pencapaian indikator kinerja persentase PKK desa/kelurahan tertib administrasi.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah melalui penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta penyusunan kajian dampak kependudukan. Fokus pada implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal dan penyusunan profil kependudukan keluarga dan kajian dampak kependudukan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk.

b. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal fokus pada pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK dan promosi dan penyediaan sarana KIE program KKBPK. Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dengan fokus pada penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB dan Penggerakan Kader Institusi masyarakat pedesaan (IMP). Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah fokus pada pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan, peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB fokus pada Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan peserta KB aktif.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dilaksanakan melalui orientasi bagi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga, promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan dan mitra kerja. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pemberdayaan keluarga sejahtera.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perhubungan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan untuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota melalui penyediaan dan rehabilitasi serta pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan fokus pada pengembangan sarana dan prasarana terminal. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Pengujian berkala kendaraan bermotor melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota melalui pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota fokus pada pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam

trayek lintas daerah melalui fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan serta Njamu Bergas. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks infrastruktur perhubungan. Selain itu, urusan pemerintahan bidang Perhubungan mendukung pembangunan/pengembangan *Double Track* Jawa Selatan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks PPID.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berfokus pada pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan e-government di lingkup pemerintah daerah dan mewujudkan kebumen smart city. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Selain itu, urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Koperasi Merah Putih. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap koperasi aktif yang berada di Kabupaten Kebumen dalam kegiatan operasionalnya. Pengawasan dimaksudkan untuk menjaga operasional koperasi sesuai dengan Undang-undang Koperasi dan AD/ART Koperasi. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu dilaksanakan penilaian koperasi untuk mendata koperasi yang aktif dan

mengadakan pengawasan, pembinaan terhadap koperasi yang kurang sehat dan memberikan penghargaan atas kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase koperasi sehat.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi untuk mendukung capaian persentase SDM koperasi yang kompeten. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase SDM Koperasi yang Kompeten.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemberdayaan koperasi dengan memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi yang bermasalah di wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase advokasi kepada koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan fokus pada Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan UMKM yang berkualitas.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, kemudahan akses modal, serta desain dan teknologi. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan perizinan guna peningkatan PMDN/PMA masuk ke Kabupaten Kebumen termasuk memperkuat daya tarik investasi di kawasan strategis RTRW pada Program penanaman modal seperti WP Keburejo dan koridor Geopark serta penyusunan *roadmap* percepatan realisasi investasi berbasis Kawasan strategis dan sektor unggulan untuk mencapai target PMTB. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pemberian fasilitas/intensif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan penyusunan peta serta rencana umum penanaman modal. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada promosi kepada calon investor untuk dapat menanamkan modal ke Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen kepeminatan investasi daerah. Selain itu pada program ini juga akan memprioritaskan program promosi dan fasilitasi investasi pada sektor industri pangan olahan, pariwisata geopark, dan kawasan WP Keburejo yang merupakan sektor unggulan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RKP Nasional Tahun 2026. Program ini juga akan melakukan penguatan program promosi investasi dan integrasi sistem informasi penanaman modal daerah dengan OSS pusat, serta penguatan program investasi dengan orientasi ekspor dan hilirisasi padat karya sebagaimana amanat RPJMN 2025–2029 dan prioritas RKP 2026 yaitu "Ekonomi Produktif dan Inklusif". Dalam hal ini kebijakan juga mencakup peningkatan kualitas investasi selain kuantitas perizinan itu sendiri. Fokus upaya digitalisasi dan promosi investasi juga akan dikembangkan sistem *dashboard* data investasi dan lokasi strategis Kebumen serta mengoptimalkan media digital dan kerja sama dengan BKPM dalam promosi investasi daerah.

c. Program Pelayanan Penanam Modal

Program ini difokuskan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Kebumen. Peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan termasuk layanan konsultasi dan pemantauan pemenuhan atas komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada pengendalian terhadap penanaman modal sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dalam kewenangan Kabupaten Kebumen dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan non perizinan termasuk kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator

kinerja persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini difokuskan pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota dengan fokus pada koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Muda Kreatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase organisasi pemuda yang aktif.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dengan fokus pada pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*Sport Science*) dan pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota dan pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/Kota serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga melalui pengembangan organisasi keolahragaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Muda Kreatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase prestasi olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan dengan fokus pada partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Muda Kreatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja capaian prestasi kepramukaan.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Statistik secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Persandian secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kebudayaan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kelima yaitu Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Program yang dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini difokuskan pada pelestarian kesenian tradisional yang pelakunya masyarakat dalam daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya, pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesenian yang dikembangkan.

b. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Program ini difokuskan pada pengelolaan cagar budaya kabupaten/kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perpustakaan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan serta Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini difokuskan pada pelestarian koleksi naskah kuno yang ada di Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga

diupayakan didukung oleh program unggulan Plesir Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kearsipan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Selain itu juga diupayakan mendukung program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini berfokus pada pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip baku.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini berfokus pada pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, penyelamatan arsip perangkat daerah, autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, serta pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase OPD yang telah menyelamatkan arsipnya secara NSPK.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini berfokus pada pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja regulasi akses izin penggunaan arsip tertutup.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini difokuskan untuk pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan nelayan kecil melalui penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dan pengembangan kapasitas nelayan kecil, serta penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten dengan fokus pada pembinaan KUB melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil dan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT melalui pelayanan penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan fokus pada pelayanan tanda daftar usaha perikanan budidaya dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan, penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat, serta perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air dari penangkapan yang dapat merusak ekosistem yang ada didalamnya. Pengawasan dilakukan di daerah Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan wilayah yang dilakukan pengawasan.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan melalui pelaksanaan bimbingan penerapan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan untuk mendukung program unggulan Mangan Wareg Bareng Biyunge serta Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pariwisata secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada peningkatan daya tarik destinasi pariwisata melalui Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata dimulai dari perencanaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah dengan fokus pada penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata dan pengelolaan investasi pariwisata. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Plesir Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini difokuskan pada pemasaran daya tarik destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata dalam dan luar negeri melalui

penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Plesir Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisatawan.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia pengelola wisata, pelaku usaha sektor pariwisata dan pemberdayaan perekonomian kreatif pendukung pariwisata di Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Muda Kreatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pertanian secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota dengan upaya peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan melalui pengawasan mutu benih/bibit ternak dengan pendampingan peningkatan kualitas gizi pakan ternak. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer dan pengendalian pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan yang fokus pada peningkatan kualitas bibit ternak sapi PO. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini juga mendukung upaya Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan, dimana Kab. Kebumen merupakan sebagai salah satu daerah sentra padi dengan memfokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas padi diantaranya dengan stimulan bantuan benih padi.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya. Pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, DAM parit, dan jalan usaha tani, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya, dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota melalui pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak serta pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja

persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak. Program ini juga mendukung upaya Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan, dimana Kab. Kebumen merupakan sebagai salah satu daerah sentra padi dengan memfokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas padi diantaranya dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (JITUT dan JIDES) dan pengadaan alsintan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan *zoonosis*. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota fokus pada penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan dan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan fokus pada penyediaan jasa medik veteriner, pendampingan usaha produk hewan, uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan pendampingan penerapan kesejahteraan hewan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penurunan kejadian dan kasus penyakit hewan menular.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan fokus pada pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini juga mendukung upaya Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan, dimana Kab. Kebumen merupakan sebagai salah satu daerah sentra padi dengan memfokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas padi diantaranya dengan pengendalian OPT dan DPI.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini difokuskan pada penerbitan izin usaha pertanian dan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi izin usaha pertanian.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, pembentukan badan usaha milik petani, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani serta pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sektor evaluasi kinerja penyuluhan pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu program pengelolaan energi baru terbarukan yang diarahkan pada pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengelolaan energi baru terbarukan.

5. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perdagangan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini difokuskan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai pendapatan retribusi pasar.

b. Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program ini difokuskan pada pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang akan dilaksanakan melalui upaya menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota dengan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Selain itu pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja inflasi barang kebutuhan pokok pada pasar.

c. Program Pengembangan ekspor

Program ini difokuskan pada pengembangan ekspor produk komoditas Kebumen. Program ini difokuskan untuk mengadakan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor yang menjadi produk unggulan ekspor di Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai ekspor perdagangan.

d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan

didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase UTTP yang tertera.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini difokuskan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan fokus pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pemasaran produk UMKM.

6. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perindustrian secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program perencanaan dan pembangunan industri

Program ini difokuskan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota yang difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi gula kelapa dan rokok bercukai.

b. Program pengendalian ijin usaha industri

Program ini difokuskan pada penerbitan ijin usaha industri kecil dan menengah yang difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase dokumen perizinan yang terfasilitasi.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi industri nasional

Program ini difokuskan pada penyediaan informasi yang dipergunakan untuk kepentingan IPUI, LUI, LUKI dan IPKI yang menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Bakulan Laris. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen informasi industri.

7. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Transmigrasi secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang difokuskan pada Pemindahan dan Penempatan Transmigran Yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase transmigran yang ditempatkan.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat Daerah secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan rincian program sbb:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada administrasi keuangan perangkat daerah dengan fokus pada pelayanan administrasi keuangan pada sekretariat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan fokus pada pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan fokus pada penyediaan layanan umum sekretariat daerah. Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah dengan fokus pada penyediaan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penataan organisasi dengan fokus pada pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Serta protokol dan komunikasi pimpinan dengan fokus pada fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas pimpinan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai IKM Sekretariat Daerah.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada Administrasi Tata Pemerintahan dengan fokus pada penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan fokus pada fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual serta pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan fokus pada fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum, serta pengelolaan informasi hukum. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan fokus pada fasilitasi kerjasama daerah, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD).

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada pelaksanaan kebijakan perekonomian melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, serta pengendalian dan distribusi perekonomian. Pelaksanaan Administrasi pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam melalui koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup serta koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan

Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kualitas kebijakan pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat DPRD secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang dilaksanakan antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada layanan administrasi DPRD dan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan fokus pada penyelenggaraan administrasi, ketata usahaan dan kepegawaian DPRD, Fasilitasi Rapat DPRD, fasilitasi fraksi DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyediaan pakaian dinas DPRD, serta pelaksanaan *medical check up* DPRD. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada pembentukan perda dan peraturan DPRD dengan fokus pada penyusunan dan pembahasan program pembentukan perda, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan naskah akademik. Pembahasan kebijakan anggaran dengan fokus pada pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan pertanggungjawaban APBD dan pembahasan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan fokus pada pengawasan semua urusan pemerintahan dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan fokus pada bimbingan teknis DPRD, penyusunan program kerja DPRD, Penyediaan tenaga ahli fraksi dan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tenaga Ahli. Penerapan penghimpunan aspirasi masyarakat dengan fokus pada kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan pelaksanaan reses. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan fokus pada pengawasan kode etik DPRD. Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan fokus pada fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD dengan fokus pada koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Perencanaan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program pada urusan perencanaan bertujuan untuk mendukung capaian Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100%. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan dengan fokus pada koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Kabupaten/Kota dan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota serta monitoring program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis data dan

informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada monev dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam, koordinasi perencanaan bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan dengan fokus pada koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang infrastruktur. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang akan dilaksanakan meliputi:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan fokus pada penyusunan regulasi bidang anggaran, koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah, penyusunan KUA dan PPAS, dan penyusunan perda APBD murni/perubahan dan Peraturan Bupati Penjabaran APBD murni/perubahan. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan fokus pada koordinasi dan pengelolaan kas daerah, penyusunan laporan realisasi dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta penatausahaan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dengan fokus pada penyusunan perda pertanggungjawaban APBD, konsolidasi laporan keuangan dan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah serta pembinaan pengelolaan BLUD. Kegiatan penunjang urusan dengan fokus pada pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah, penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi, Pelaksanaan Alokasi, pengelolaan dana bagi hasil, pengelolaan dana darurat/mendesak dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase capaian pengelolaan keuangan daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah dengan fokus pada penyusunan perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengamanan, optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan

dan penghapusan, rekonsiliasi dan pelaporan Barang Milik Daerah dan koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan barang milik daerah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pengelolaan barang milik daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada pengelolaan pendapatan daerah fokus pada analisa dan pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan pajak daerah, penyuluhan kebijakan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengelolaan basis data pajak daerah dan penagihan pajak daerah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase capaian pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Kepegawaian yaitu program kepegawaian daerah, secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN dengan fokus pada penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan administrasi dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian melalui mutasi dan promosi ASN dan pengembangan kompetensi ASN dengan pendidikan lanjutan dan pengembangan karir dalam jabatan fungsional ASN. Dalam pelaksanaan evaluasi ASN dengan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan fokus pada pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penempatan PNS dalam jabatan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program pada urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah program pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk penyelenggaraan diklat bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan CPNS. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase ASN yang meningkat kapasitasnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan Pelatihan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan

Daerah yang diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dan pengembangan inovasi dan teknologi yang difokuskan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan bidang pemerintahan umum dan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang difokuskan pada pengawasan kinerja, keuangan pemerintah daerah, pengawasan desa, kerjasama pengawasan internal serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya serta ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja level Kapabilitas APIP.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini difokuskan pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi. Fokus pada perumusan kebijakan bidang pengawasan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, penegakkan integritas dan Monev dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai persepsi korupsi.

5.1.7. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Unsur Kewilayahan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program pada urusan unsur kewilayahan bertujuan untuk mendukung capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan fokus pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya serta Ayam Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.

b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kegiatan pemberdayaan kelurahan dengan fokus pada pelaksanaan padat karya dan swakelola pada pembangunan fisik lingkungan kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang desa/kelurahan,

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kelurahan.

c. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan pemerintah daerah dengan fokus pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya serta Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kondusivitas kecamatan.

d. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan fokus pada fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, fasilitasi kerjasama desa dan antar desa, fasilitasi penyelenggaraan dan ketertiban umum, fasilitasi penyusunan pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Desa Berdaya serta Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri.

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik) secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kelima yaitu Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai kegamaan dan budaya lokal. Program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini difokuskan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan fokus pada perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rasio elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dibidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan fokus pada Pelaksanaan Kebijakan dan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rasio elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan fokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik di daerah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.

Selain program yang termasuk dalam klasifikasi urusan kewenangan pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah yang mencakup:

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan fokus kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
- b. Administrasi Keuangan dengan fokus kegiatan pada pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan perangkat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada lingkup perangkat daerah.
- c. Administrasi umum perangkat daerah dengan fokus kegiatan pada penyediaan barang/jasa pendukung administrasi perkantoran.
- d. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan fokus pada kegiatan pengadaan barang/jasa pendukung operasional perangkat daerah.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan fokus pada penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah meliputi penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor.

Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah.

5.2. Rencana Pendanaan dan Dukungan Program Prioritas Terhadap Prioritas Daerah Tahun 2026

Sebagai upaya pencapaian target-target pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, maka seluruh program prioritas akan mendukung masing-masing 5 Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan tabel di bawah juga dihitung dukungan program prioritas mengecualikan belanja gaji dan tunjangan ASN dan P3K Paruh Waktu, Kepala Daerah, DPRD, belanja Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Belanja Tidak Terduga. Dari perhitungan tersebut menunjukkan perubahan proporsi sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap prioritas 1 penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara agregat 52,42% menjadi 54,90%;
2. Dukungan terhadap prioritas 2 peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan secara agregat 4,09% menjadi 8,40%;
3. Dukungan terhadap prioritas 3 peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan secara agregat 11,99% menjadi 25,17%;
4. Dukungan terhadap prioritas 4 peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara agregat 30,25% menjadi 10,21%; serta
5. Dukungan terhadap prioritas 5 peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan secara agregat 1,24% menjadi 1,31%.

Secara lengkap rencana pendanaan dan dukungan program prioritas terhadap prioritas pembangunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Dukungan terhadap Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PRIORITAS 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1.764.013.454.628	52,42%	1.029.506.116.682	0	0	734.507.337.946	54,90%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	25.393.733.015	0,75%	21.717.277.015	0	0	3.676.456.000	0,27%	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.225.233.015		21.717.277.015			2.507.956.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	440.000.000					440.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	472.000.000					472.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	216.500.000					216.500.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.000.000					40.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.103.564.160	0,45%	4.512.624.832	0	0	10.590.939.328	0,79%	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.611.252.537		4.512.624.832			1.098.627.705		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	101.467.000					101.467.000		Dinas Sosial dan P3A

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.190.000					3.190.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.277.615.223					3.277.615.223		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.506.047.400					5.506.047.400		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	583.611.000					583.611.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	20.381.000					20.381.000		Dinas Sosial dan P3A

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	572.500.680	0,02%	0	0	0	572.500.680	0,04%	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	218.039.680					218.039.680		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	114.332.000					114.332.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.636.000					10.636.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	6.805.000					6.805.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	170.973.000					170.973.000		Dinas Sosial dan P3A

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	51.715.000					51.715.000		Dinas Sosial dan P3A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.543.844.000	0,55%	0	0	0	18.543.844.000	1,39%	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	894.100.000					894.100.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.332.256.000					10.332.256.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.317.488.000					7.317.488.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.285.150.041.721	38,19%	853.727.854.721	0	0	431.422.187.000	32,25%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.055.712.415.721		853.727.854.721			201.984.561.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	222.167.806.000					222.167.806.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	80.000.000					80.000.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.149.820.000					7.149.820.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	40.000.000					40.000.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31.656.085.000	0,94%	0	0	0	31.656.085.000	2,37%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	31.295.631.000					31.295.631.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	360.454.000					360.454.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.182.330.807	0,18%	3.952.697.539	0	0	2.229.633.268	0,17%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.860.930.807		3.952.697.539			908.233.268		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.243.000.000					1.243.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	78.400.000					78.400.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	381.411.355.245	11,33%	145.595.662.575	0	0	235.815.692.670	17,63%	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	227.500.401.406		145.595.662.575			81.904.738.831		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	150.860.165.839					150.860.165.839		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.983.818.000					1.983.818.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	557.948.000					557.948.000		Dinas Kesehatan dan PPKB

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	509.022.000					509.022.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PRIORITAS 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	137.785.857.389	4,09%	25.342.044.603	0	0	112.443.812.786	8,40%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	24.033.596.868	0,71%	0	0	0	24.033.596.868	1,80%	Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.057.436.207					5.057.436.207		Dinas Pertanian dan Pangan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	16.933.585.400					16.933.585.400		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	515.937.000					515.937.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	345.406.519					345.406.519		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	29.180.000					29.180.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.152.051.742					1.152.051.742		Dinas Pertanian dan Pangan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.520.678.000	0,07%	0	0	0	2.520.678.000	0,19%	DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.054.641.000					1.054.641.000		DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.196.231.000					1.196.231.000		DLHKP
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.869.000					38.869.000		DLHKP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	230.937.000					230.937.000		DLHKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	45.960.000.000	1,37%	0	0	0	45.960.000.000	3,44%	Disperindag KUKM

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	45.835.000.000					45.835.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	75.000.000					75.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000					50.000.000		Disperindag KUKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	22.545.352.460	0,67%	14.936.656.392	0	0	7.608.696.068	0,57%	Disperindag KUKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.249.880.460		14.936.656.392			4.313.224.068		Disperindag KUKM

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	13.000.000					13.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	30.000.000					30.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	285.000.000					285.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	102.000.000					102.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.865.472.000					2.865.472.000		Disperindag KUKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	472.925.000	0,01%	0	0	0	472.925.000	0,04%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	472.925.000					472.925.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	23.088.750.000	0,69%	0	0	0	23.088.750.000	1,73%	Disperindag KUKM
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	19.318.164.000					19.318.164.000		Disperindag KUKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.860.822.000					2.860.822.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	30.000.000					30.000.000		Disperindag KUKM

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	138.783.000					138.783.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	740.981.000					740.981.000		Disperindag KUKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.318.528.926	0,16%	0	0	0	5.318.528.926	0,40%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.868.528.926					2.868.528.926		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.200.000.000					2.200.000.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	250.000.000					250.000.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.719.604.588	0,26%	6.463.257.540	0	0	2.256.347.048	0,17%	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.151.898.588		6.463.257.540			688.641.048		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	14.000.000					14.000.000		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	804.806.000					804.806.000		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	326.400.000					326.400.000		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	422.500.000					422.500.000		Dinas Tenaga Kerja

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	62.000.000	0,002%	0	0	0	62.000.000	0,005%	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62.000.000					62.000.000		Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.064.421.547	0,15%	3.942.130.671	0	0	1.122.290.876	0,08%	DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.670.677.547		3.942.130.671			728.546.876		DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	45.000.000					45.000.000		DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	178.044.000					178.044.000		DPMPTSP

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100.700.000					100.700.000		DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	58.000.000					58.000.000		DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12.000.000					12.000.000		DPMPTSP
PRIORITAS 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	403.492.915.310	11,99%	61.085.158.744	5.596.730.000	0	336.811.026.566	25,17%	

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.773.754.600	0,14%	0	0	0	4.773.754.600	0,36%	Disperkimhub
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	650.551.000					650.551.000		Disperkimhub
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	748.942.000					748.942.000		Disperkimhub
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.252.576.000					2.252.576.000		Disperkimhub
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.121.685.600					1.121.685.600		Disperkimhub
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.671.920.489	0,94%	10.514.065.582	0	0	21.157.854.907	1,58%	Disperkimhub

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.279.743.381		10.514.065.582			2.765.677.799		Disperkimhub
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18.392.177.108					18.392.177.108		Disperkimhub
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.571.649.603	0,40%	4.957.446.834	5.596.730.000	0	3.017.472.769	0,23%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.494.942.603		4.957.446.834			537.495.769		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	25.750.000					25.750.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.075.200.000					1.075.200.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.901.757.000			5.596.730.000		305.027.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.074.000.000					1.074.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	293.624.939.667	8,73%	22.285.713.657	0	0	271.339.226.010	20,28%	DPUPR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.700.012.656		22.285.713.657			6.414.298.999		DPUPR

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.196.501.000					19.196.501.000		DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.550.000.000					9.550.000.000		DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	34.936.200.000					34.936.200.000		DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.230.000.000					8.230.000.000		DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.918.148.840					2.918.148.840		DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	188.454.077.171					188.454.077.171		DPUPR

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.000.000					300.000.000		DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.340.000.000					1.340.000.000		DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.000.000	0,003%	0	0	0	100.000.000	0,01%	DPUPR
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	100.000.000					100.000.000		DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	50.281.606.994	1,49%	19.446.692.444	0	0	30.834.914.550	2,30%	DLHKP

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.261.002.704		19.446.692.444			2.814.310.260		DLHKP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	156.901.000					156.901.000		DLHKP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	635.686.000					635.686.000		DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18.274.286.000					18.274.286.000		DLHKP

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	27.200.000					27.200.000		DLHKP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	42.417.000					42.417.000		DLHKP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.944.000					25.944.000		DLHKP

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.004.000					10.004.000		DLHKP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	9.652.000					9.652.000		DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.838.514.290					8.838.514.290		DLHKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.000.000	0,0003%	0	0	0	10.000.000	0,001%	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	10.000.000					10.000.000		Dinas Tenaga Kerja

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.459.043.957	0,28%	3.881.240.227	0	0	5.577.803.730	0,42%	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.250.740.227		3.881.240.227			1.369.500.000		BPBD
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.208.303.730					4.208.303.730		BPBD
PRIORITAS 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	1.018.005.852.623	30,25%	178.956.642.345	700.446.101.465	2.000.000.000	136.603.108.813	10,21%	
SEKRETARIAT DAERAH	54.600.885.052	1,62%	22.327.480.901	0	0	32.273.404.151	2,41%	Sekretariat Daerah

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.382.031.052		22.327.480.901			11.054.550.151		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.675.000.000					19.675.000.000		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.543.854.000					1.543.854.000		Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	196.900.000	0,01%	0	0	0	196.900.000	0,01%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	166.900.000					166.900.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	27.000.000					27.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	3.000.000					3.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PERENCANAAN	9.408.851.018	0,28%	6.008.253.176	0	0	3.400.597.842	0,25%	Bapperida
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.563.851.018		6.008.253.176			1.555.597.842		Bapperida
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	935.000.000					935.000.000		Bapperida
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	910.000.000					910.000.000		Bapperida
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.280.000.000	0,04%	0	0	0	1.280.000.000	0,10%	Bapperida

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1.280.000.000					1.280.000.000		Bapperida
KEUANGAN	757.591.777.809	22,51%	18.603.955.759	700.446.101.465	2.000.000.000	36.541.720.585	2,73%	BPKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.076.593.940		18.603.955.759			2.472.638.181		BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	730.673.183.869			700.446.101.465	2.000.000.000	28.227.082.404		BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	992.000.000					992.000.000		BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.850.000.000					4.850.000.000		BPKPD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	34.000.000	0,001%	0	0	0	34.000.000	0,003%	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	34.000.000					34.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	86.000.000	0,003%	0	0	0	86.000.000	0,01%	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	86.000.000					86.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
INSPEKTORAT DAERAH	17.100.604.879	0,51%	9.350.406.780	0	0	7.750.198.099	0,58%	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.419.704.879		9.350.406.780			4.069.298.099		Inspektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.450.400.000					2.450.400.000		Inspektorat Daerah

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.230.500.000					1.230.500.000		Inspektorat Daerah
SEKRETARIAT DPRD	61.761.486.469	1,84%	38.845.340.454	0	0	22.916.146.015	1,71%	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.891.340.454		38.845.340.454			3.046.000.000		Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.870.146.015					19.870.146.015		Sekretariat DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	8.454.115.651	0,25%	5.093.986.271	0	0	3.360.129.380	0,25%	Disdukcapil

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.762.446.271		5.093.986.271			668.460.000		Disdukcapi
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.789.000.000					1.789.000.000		Disdukcapi
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	95.500.000					95.500.000		Disdukcapi
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	807.169.380					807.169.380		Disdukcapi
KEPEGAWAIAN	8.857.844.085	0,26%	6.761.864.550	0	0	2.095.979.535	0,16%	BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.428.113.085		6.761.864.550			666.248.535		BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.429.731.000					1.429.731.000		BKPSDM

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.727.200.000	0,08%	0	0	0	2.727.200.000	0,20%	BKPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.727.200.000					2.727.200.000		BKPSDM
KEWILAYAHAN	86.023.682.055	2,56%	67.123.807.006	0	0	18.899.875.049	1,41%	Kecamatan
SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	86.023.682.055		67.123.807.006			18.899.875.049		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.882.505.605	0,29%	4.841.547.448	0	0	5.040.958.157	0,38%	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.642.193.605		4.841.547.448			800.646.157		Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.817.000.000					1.817.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.423.312.000					2.423.312.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
PRIORITAS 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	41.747.174.386	1,24%	24.199.891.644	0	0	17.547.282.742	1,31%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.403.126.618	0,70%	12.775.308.203	0	0	10.627.818.415	0,79%	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.260.022.490		12.775.308.203			5.484.714.287		Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.565.245.960					4.565.245.960		Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	577.858.168					577.858.168		Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.515.715.559	0,31%	7.511.122.559	0	0	3.004.593.000	0,22%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.728.205.559		7.511.122.559			1.217.083.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.607.510.000					1.607.510.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	180.000.000					180.000.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.828.332.209	0,23%	3.913.460.882	0	0	3.914.871.327	0,29%	Bakesbangpol
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.342.997.209		3.913.460.882			429.536.327		Bakesbangpol

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	504.000.000					504.000.000		Bakesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.292.288.000					2.292.288.000		Bakesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	67.000.000					67.000.000		Bakesbangpol

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, P3K PARUH WAKTU, KDH, DPRD	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, P3K, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	207.047.000					207.047.000		Bakesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	415.000.000					415.000.000		Bakesbangpol
TOTAL	3.365.045.254.336	100%	1.319.089.854.018	706.042.83.465	2.000.000.000	1.337.912.568.853	100%	

Sumber : SIPD, Tahun 2026 (data diolah)

5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan pendanaan yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.
Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran
1	SPM Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	38.131.823.000
		Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	113.161.094.000
		Pendidikan Kesehatan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66.410.260.000
				Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	4.464.629.000

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran
2	SPM Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.564.253.839
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		Pelayanan kesehatan balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan Pada Usia Lanjut			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus			
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
3	SPM Pekerjaan Umum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.550.000.000
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.121.685.600
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	29.500.000
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	621.051.000

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran
				Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.252.576.000
5	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Kabupaten/Kota	1.336.080.760
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	6.979.000
		Pelayanan informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	412.000.000
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	622.000.000
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.806.303.730
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.368.000.000
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	518.967.168
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	16.638.000
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	42.253.000
6	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.597.422.023
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial			

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	494.034.000
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	89.577.000

Sumber: SIPD 2026 (data diolah)

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 telah menyesuaikan dengan dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan. Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar beserta targetnya di tahun 2026.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. IKU terdiri dari Indikator Tujuan RPJMD dan Indikator Sasaran RPJMD. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Kebumen dan targetnya tahun 2026:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Kebumen Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026
Indikator Tujuan RPJMD			
Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera			
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.80*
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,30-13,40*
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing			
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80-6,30*
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	Juta rupiah	33.75
Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan			
5	Indeks Infrastruktur	Indeks	74.04
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	TonCO2Eq	1303133.41
Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan			
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86.33

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026
Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan			
8	Indeks Kebudayaan	Persen	14.72
9	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82.79
Indikator Sasaran RPJMD			
1	Pengeluaran per Kapita	Rupiah perkapita perbulan	1.173.460,60
2	Indeks Pendidikan	Indeks	65.45
3	Indeks Kesehatan	Indeks	85.7
4	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,305
5	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	65,22
6	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.86
7	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	%	2,13
8	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6.62
9	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	11.47
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,60*
11	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Poin	75.24
12	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	94.05
13	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	51.41
14	Persentase Desa Mandiri	Persen	49.44
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,45-74,76
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	94.19
17	Nilai SAKIP	Nilai	70.03
18	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.53
19	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.63
20	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	13.38
21	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	100

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

*) Target sebagai hasil kesepakatan Rakortek oleh Bappeda Provinsi

6.1.2. Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kabupaten Kebumen Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81.85
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	8.75
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	21.50
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	58.10
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,45-74,76
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen RT	11.95
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	57.84
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	TonCO2Eq	1303133.41
9	Indeks Risiko Bencana	Indeks	94.19
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.17
11	Rasio Penduduk	Persen	103
12	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	1149
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80-6,30*
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,30-13,40*
3	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	33.75
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.60*
5	Indeks Gini	Indeks	0.32
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.80*
7	Indeks Kesehatan	Indeks	85.7
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.82
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	14
10	Prevalensi Stunting	Persen	9.08
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	95.25
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90.56
13	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99.07
14	Indeks Pendidikan	Indeks	65.45
15	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.94
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.04

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
17	Literasi Membaca SD	Persen	84.79
18	Literasi Membaca SMP	Persen	87.8
19	Numerasi Membaca SD	Persen	74.19
20	Numerasi Membaca SMP	Persen	82.85
21	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8.26
22	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	86.53
23	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0.57
24	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Rupiah perkapita perbulan	20,38-21,48
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	42.45
26	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif	Persen	11.73
27	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	13.38
28	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	54654
29	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Persen	23,04
30	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persen	64.55
31	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82.79
32	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Persen	86.09
33	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Anggaran	Angka	238
34	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Pendampingan	Angka	129
35	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	poin	64.45
36	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0.28
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka Ketergantungan	Persen	47.41
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	23.23
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6.62

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3.18
5	LPE kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	11.47
6	Rasio Kewirausahaan	Persen	3.42
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1.7
8	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	4.15
9	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	27
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78.25
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	67.46
12	Kapabilitas Inovasi	Angka	3.32
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	19.16
14	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	0.2
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	96.76
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	49.44
18	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	89.63
19	Indeks Infrastruktur	Indeks	74.04
20	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	75.24
21	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	94.05
22	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	51.41
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0.41
24	Disparitas Harga	Persen	±10
25	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.86
26	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6.62
27	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.86
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86.33
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98.62
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4.10
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.63
5	Indeks Integritas Nasional	Indeks	80.36
6	Nilai SAKIP	Nilai	70.03
7	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.53
8	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.61
9	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	100

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
10	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1.61
11	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1.45

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
 *) Target sebagai hasil kesepakatan Rakortek oleh Bappeda Provinsi

6.2. Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dengan indikator SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3.
Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan Dan
Format Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun					
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	manusia, dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM di	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

BAB VII PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 akan menjadi pedoman penyusunan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang merupakan dasar pelaksanaan kebijakan fiskal pembangunan daerah Tahun 2026. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan telah disesuaikan dengan visi misi Bupati Kebumen, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga diharapkan terjadi keselarasan pembangunan di pusat dan daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan Masyarakat.

Untuk itu, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2026. Selain itu, RKPD Kabupaten Kebumen diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya yang memiliki perhatian dan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen. Hal ini sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas seluruh pelaku pembangunan daerah baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai organisasi masyarakat agar lebih terintegrasi dalam upaya bersama mencapai sasaran pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 telah mengacu pada sistem nomenklatur yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) Kemendagri. Dengan adanya dokumen RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026, seluruh Perangkat Daerah diharapkan secara konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8	22	72	Rp 1.120.317.204.721
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8	28	98	Rp 399.955.199.245
3	RSUD dr. SOEDIRMAN	1	1	1	Rp 133.211.847.000
4	RSUD PREMBUN	2	2	3	Rp 63.750.000.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	22	76	Rp 293.724.939.667
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	6	22	40	Rp 36.445.675.089
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	13	35	Rp 23.403.126.618
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	11	42	Rp 9.459.043.957
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13	23	58	Rp 15.676.064.840
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11	32	71	Rp 49.427.329.883
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	14	27	69	Rp 52.802.284.994
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	14	34	Rp 8.454.115.651
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	11	44	Rp 13.571.649.603

1	2	3	4	5	6
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	11	28	Rp 10.002.505.605
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	14	22	52	Rp 91.594.102.460
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	13	35	Rp 5.064.421.547
17	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6	15	34	Rp 15.834.244.485
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6	19	44	Rp 6.379.230.807
19	DINAS TENAGA KERJA	7	15	36	Rp 8.791.604.588
20	SEKRETARIAT DAERAH	3	18	55	Rp 54.600.885.052
21	SEKRETARIAT DPRD	2	16	56	Rp 61.761.486.469
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	4	15	35	Rp 10.688.851.018
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	13	55	Rp 757.591.777.809
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	13	30	Rp 11.585.044.085
25	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	37	Rp 17.100.604.879
26	KECAMATAN AYAH	4	9	27	Rp 2.997.673.467
27	KECAMATAN BUAYAN	4	9	24	Rp 2.721.858.665
28	KECAMATAN PURING	4	9	29	Rp 2.420.424.444
29	KECAMATAN PETANAHAN	4	9	31	Rp 2.730.498.065
30	KECAMATAN KLIRONG	4	9	29	Rp 2.397.220.222
31	KECAMATAN BULUSPESANTREN	4	9	27	Rp 2.320.792.438
32	KECAMATAN AMBAL	4	9	28	Rp 2.373.500.218
33	KECAMATAN MIRIT	4	9	29	Rp 2.452.606.356
34	KECAMATAN BONOROWO	4	9	31	Rp 2.543.091.988
35	KECAMATAN PREMBUN	4	9	29	Rp 2.548.927.384
36	KECAMATAN PADURESO	4	9	27	Rp 2.443.271.415
37	KECAMATAN KUTOWINANGUN	4	9	28	Rp 2.413.995.291

1	2	3	4	5	6
38	KECAMATAN ALIAN	4	9	28	Rp 2.512.473.377
39	KECAMATAN PONCOWARNO	4	9	25	Rp 2.330.402.085
40	KECAMATAN KEBUMEN	5	10	33	Rp 12.456.448.266
41	KECAMATAN PEJAGOAN	4	9	29	Rp 2.622.118.493
42	KECAMATAN SRUWENG	4	9	32	Rp 2.838.585.559
43	KECAMATAN ADIMULYO	4	9	27	Rp 2.655.013.122
44	KECAMATAN KUWARASAN	4	9	26	Rp 2.402.909.044
45	KECAMATAN ROWOKELE	4	9	28	Rp 2.472.580.743
46	KECAMATAN SEMPOR	4	9	28	Rp 2.725.540.328
47	KECAMATAN GOMBONG	5	10	32	Rp 5.976.892.834
48	KECAMATAN KARANGANYAR	5	11	32	Rp 9.102.450.416
49	KECAMATAN KARANGGAYAM	4	9	28	Rp 2.471.115.255
50	KECAMATAN SADANG	4	9	30	Rp 2.491.875.300
51	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	4	9	28	Rp 2.601.417.280
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	31	Rp 7.828.332.209

BUPATI KEBUMEN,

ttd

LILIS NURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
														Nasional		Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						1.120.317.204.721,00								1.238.279.318.100,00				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.088.188.194.721,00								1.220.542.088.100,00				
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.088.188.194.721,00								1.220.542.088.100,00				
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-			70,03 Nilai 90,4 Nilai	858.750.568.721,00						-	950.715.824.000,00					
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	-			18 Dokumen	108.082.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen	-	108.082.000,00					
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	52.592.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		52.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kineria Perangakat Daerah																	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	55.490.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		55.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	853.930.069.721,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen	-	947.827.010.000,00		
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8158 Orang/bulan	853.727.854.721,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		947.621.514.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	202.215.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		205.496.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	-			10 Dokumen	205.496.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Disdikpora Kab Kebumen	-	205.496.000,00		
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penvusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	205.496.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Disdikpora Kab Kebumen		205.496.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	-			12 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Disdikpora Kab Kebumen	-	100.000.000,00	
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					117 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Disdikpora Kab Kebumen		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	963.736.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen	-	874.735.000,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	105.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		107.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		119.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	393.736.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		393.735.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	220.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	660.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		670.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	392.951.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		392.951.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		14 Unit	2.118.484.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen	-	405.000.000,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	428.484.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.690.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Disdikpora Kab Kebumen		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/Paket A APK PAUD (3-6 Tahun) APK SMP/MTs/Paket B	-		100 Persen 44,80 Persen 86,03 Persen	222.167.806.000,00						-	257.376.444.100,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	-			99,9 Persen	113.161.094.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan	-	138.018.804.000,00	
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	610.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		3.675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		5.512.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				15 Paket	350.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		1.156.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				15 Paket	1.620.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		7.620.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					250 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					718 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					763 Dokumen	150.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					4 Komunitas	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					2 Kegiatan	164.560.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		164.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					4 Ruang	1.200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		3.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					30 Unit	6.626.700.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		1.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					6500 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		1.840.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					746 Satuan Pendidikan	108.284.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		108.284.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					30 Ruang	3.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga kependidikan		6.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2700 Peserta Didik	1.130.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		7.072.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	-			99,48 Persen	66.410.260.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan	-	80.781.592.100,00	
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Wonoharjo Kab. Kebumen, Sempor, Kenteng Kab. Kebumen, Padureso, Padureso Kab. Kebumen, Karangsembung, Plumbon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan		1.760.466.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				16 Ruang	2.850.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Sitiadi Kab. Kebumen, Buluspesantren, Buluspesantren Kab. Kebumen, Mirit, Winong Kab. Kebumen, Gombang, Kemukus Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan		5.002.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							0				7 0	1.684.750.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo Kab. Kebumen, Kuwarasan, Mangli Kab. Kebumen, Gombong, Kemukus Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		1.023.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	175.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Mangli Kab. Kebumen, Rowokele, Wonoharjo Kab. Kebumen, Bonorowo, Patukrejo Kab. Kebumen, Karangsambung, Plumbon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		262.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				4 Unit	350.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		1.222.679.100,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1910 Peserta Didik	2.025.791.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		12.226.791.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

[illegible]

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							0					112 0	122.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		122.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						112 Orang	26.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan															
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan						112 Orang	38.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						56 Dokumen	40.101.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						112 Kegiatan	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				112 Satuan Pendidikan	272.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	600.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Kab. Kebumen, Karangasambung, Pujotirto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				112 Orang	777.326.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		777.326.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
						0				350 0	520.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		950.101.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				6 Paket	608.667.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Kabuaran Kab. Kebumen, Pejagoan, Kebulusan Kab. Kebumen, Rowokele, Wonoharjo Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		637.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	-		86,53 Persen 76,92 Persen	38.131.823.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan	-	34.916.823.000,00		
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	36.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2809 Orang	11.891.400.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		11.891.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				55 Satuan Pendidikan	178.744.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		178.744.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1131 Satuan Pendidikan	20.206.800.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		20.206.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				1131 Orang	113.100.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		113.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	32.130.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		32.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				180 Orang	306.760.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		306.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				520 Paket	76.889.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		76.889.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							0				2 0	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwaranan, Ori	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				40 Unit	3.010.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				30 Paket	1.850.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		1.560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				520 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	-			11,00 Persen	4.464.629.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan	-	3.659.225.000,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	200.025.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		200.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	74.404.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	118.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		8.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan													
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				4 Paket	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peserta Didik, Pendidik , Tenaga Kependidikan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah /seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	-		64,51 Persen	80.000.000,00						-	110.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan SD dan SMP yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	-			87,85 Persen	80.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan pendidikan , Pendidik	-	110.000.000,00	
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				100 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan pendidikan , Pendidik		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	-			16,59 Persen	7.149.820.000,00					-	12.299.820.000,00		
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Ditribusi Guru	-			0 Persen	7.149.820.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga pendidik dan kependidikan	-	12.299.820.000,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				306 Dokumen	6.649.820.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga pendidik dan kependidikan		10.649.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga pendidik dan kependidikan		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentase Pengajuan Izin yang dilayani	-		100 Persen	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		2 Satpen	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan pendidikan	-	30.000.000,00	
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan pendidikan		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
						Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan pendidikan		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		2 Satpen	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan pendidikan	-	10.000.000,00	
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan pendidikan		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.129.010.000,00							17.737.230.000,00		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						32.129.010.000,00								17.737.230.000,00	
6	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	-			69,77 Persen	472.925.000,00						-	890.683.000,00		
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Pemuda yang aktif	-			31 organisasi	472.925.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pemuda , Organisasi Pemuda Kabupaten Kebumen	-	890.683.000,00		
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota															
							0				30 0	472.925.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pemuda , Organisasi Pemuda Kabupaten Kebumen		890.683.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
7	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi Olahraga	-			16 Persen	31.295.631.000,00						-	16.468.928.000,00		
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	-			100 Persen	27.230.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Atlit, Pelatih, Cabang Olahraga di Kabupaten Kebumen	-	12.352.312.000,00		
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota															

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				5 Pelatda	144.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Atlit, Pelatih, Cabang Olahraga di Kabupaten Kebumen		162.932.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	-		3 Kegiatan	2.820.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Atlit, Pelatih, Cabang Olahraga di Kabupaten Kebumen	-	2.500.485.000,00	
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait													
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2.820.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Atlit, Pelatih, Cabang Olahraga di Kabupaten Kebumen		2.500.485.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Prestasi Kepramukaan	-		66,67 Persen	360.454.000,00						-	377.619.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-		13 Kegiatan	360.454.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pramuka, Organisasi Kepramukaan	-	377.619.000,00	
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan													
						0				10	360.454.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pramuka, Organisasi Kepramukaan		377.619.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					399.955.199.245,00							381.519.877.299,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					381.411.355.245,00							362.356.104.299,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					381.411.355.245,00							362.356.104.299,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat	-			70,03 Nilai 90,4 Nilai	227.500.401.406,00					-	233.128.075.264,00			
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			16 Dokumen	131.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	135.000.000,00		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	86.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		88.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		47.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	145.745.662.576,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	150.138.694.574,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1910 Orang/bulan	145.595.662.576,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		149.985.694.574,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		153.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-			150 Orang	47.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	50.000.000,00	
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				150 Orang	47.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	297.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	314.000.000,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		25 Unit	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	210.000.000,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		155.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					35 Unit Kerja	79.767.942.830,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		81.039.380.690,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	-			100 %	150.860.165.839,00						-		126.085.713.135,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	-			39 Paket	38.930.067.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	36.602.038.000,00		
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun					16 Unit	10.705.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		11.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas															
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					13 Unit	10.870.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		11.231.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															

[illegible]

1	2				3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13311 Orang	4.510.160.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			4.600.364.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13311 Orang	33.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			36.300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13261 Orang	38.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			42.350.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					65289 Orang	42.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			46.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					182734 Orang	308.700.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			324.135.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					607162 Orang	42.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		46.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					173182 Orang	358.880.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		376.824.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					68117 Orang	36.750.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.425.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12338 Orang	42.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		46.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					4912 Orang	306.900.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		322.245.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					4 Dokumen	7.845.381.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			7.963.062.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					2 Dokumen	197.709.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			207.595.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					4 Dokumen	271.370.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			284.939.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					6 Dokumen	642.827.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			704.969.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					3 Dokumen	26.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			28.875.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

[illegible]

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			46.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	6.493.831.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			6.623.708.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Dokumen	620.925.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			525.972.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota															
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				63 Unit	52.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			57.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	73.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			80.850.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2959 Orang	115.566.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		127.123.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				825 Orang	31.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		34.650.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				18 Orang	29.940.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		32.934.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				35 Dokumen	1.255.628.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.280.741.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				36 Dokumen	385.488.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		404.763.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	-			100 %	117.412.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		119.761.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	117.412.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		119.761.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	-			11 Unit	178.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	182.070.000,00	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				63 Unit	178.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		182.070.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-			94,25 %	1.983.818.000,00					-		2.043.333.900,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	-			3 Dokumen	120.841.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		124.466.900,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		54.075.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	68.341.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.391.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK Tingkat Daerah Kab / kota	-			450 Orang	1.862.977.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	1.918.867.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				450 Orang	1.862.977.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.918.867.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	-			100 %	557.948.000,00						-	574.688.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian Ijin dan pengawasan apotik, toko obat, toko alat kesehatn dan optikal (UMOT)	-			100 Dokumen	36.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	37.853.000,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				8 Dokumen	36.750.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		37.853.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produkPIRT	-			315 Dokumen	269.464.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	277.548.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				8 Dokumen	269.464.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		277.548.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah kegiatan dalam rangka pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar danPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-			3 Kegiatan	251.734.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		259.287.000,00	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	251.734.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		259.287.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat	-			19 %	509.022.000,00					-		524.294.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan operasional aktifitas fisik	-			3 Dokumen	68.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	70.298.000,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	68.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.298.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan pembudayaan hidup sehat	-			8 Kegiatan	87.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		90.125.000,00		
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	87.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		90.125.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-			100 %	353.272.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	363.871.000,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	353.272.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		363.871.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.543.844.000,00							19.163.773.000,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						18.543.844.000,00							19.163.773.000,00		
14	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	-			14,25 Angka 2,15 Angka	894.100.000,00						-		921.863.000,00	

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	362.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			369.240.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan															
							Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	31.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			33.705.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)															
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			57.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	-			10,2 % 67,3 %	10.332.256.000,00						-		10.721.092.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-			4 Kegiatan	2.214.836.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		-	2.358.622.000,00	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1.347.632.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.463.556.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	408.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		420.498.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	147.804.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		155.195.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	286.150.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		291.873.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader IMP yang diberdayakan	-			5559 Orang	3.510.274.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		-	3.615.583.000,00		
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					460 Orang	3.083.729.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			3.176.241.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					1 Laporan	426.545.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENGUSAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			439.342.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	-				34 %	3.955.696.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		-	4.082.408.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					1 Laporan	75.176.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			82.694.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				11712 Orang	3.840.840.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- PENUGASAN- KELUARGA BERENCANA, DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		3.956.066.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	39.680.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		43.648.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-		1 Kegiatan	651.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	664.479.000,00	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				105 Kampung	651.450.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		664.479.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-		62 %	7.317.488.000,00						-	7.520.818.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	-			3 Kegiatan	416.738.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		443.510.000,00	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	76.800.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		80.640.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	53.688.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		59.057.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				15 Unit	221.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		232.313.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		71.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentasi Keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	-			80 %	6.900.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			7.077.308.000,00		
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					1 laporan	3.120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			3.182.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					1 laporan	3.744.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			3.856.320.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02	0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga																
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga					1 Laporan	36.750.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			38.588.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						RSUD dr. SOEDIRMAN						133.211.847.000,00								134.538.900.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						133.211.847.000,00								134.538.900.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						133.211.847.000,00								134.538.900.000,00		
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP RSUD Dr. Soedirman Kebumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			100 % 70.03 Nilai 90.4 Nilai	133.211.847.000,00						-			134.538.900.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Dr. Soedirman Kebumen	-			85.00 %	133.211.847.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	134.538.900.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	133.211.847.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		134.538.900.000,00	RSUD DR. SOEDIRMAN
						RSUD PREMBUN						63.750.000.000,00							66.637.500.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						63.750.000.000,00							66.637.500.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						63.750.000.000,00							66.637.500.000,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP RSUD Prembun Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Prembun	-			70,03 Nilai 90,40 %	63.750.000.000,00						-	66.637.500.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Prembun	-			83 %	63.750.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	RSUD PREMBUN	-	66.637.500.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	63.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	RSUD PREMBUN		66.637.500.000,00	RSUD PREMBUN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00								
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	RSUD PREMBUN	-	0,00								
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																					
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					1 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	RSUD PREMBUN		0,00	RSUD PREMBUN							
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																					
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	RSUD PREMBUN		0,00	RSUD PREMBUN							
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												293.724.939.667,00					170.764.823.000,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												293.624.939.667,00							170.664.823.000,00		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												293.624.939.667,00							170.664.823.000,00		
20	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	28.700.012.656,00						-	25.608.428.000,00								
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	175.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	195.000.000,00								
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					

[illegible]

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					30 Dokumen	275.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	80.000.000,00	
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	90.000.000,00	
	1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		28.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan					12 Unit	2.890.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					20 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	559.299.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	542.000.000,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penvediaan Jasa Surat Menyurat														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	330.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	227.299.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.285.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	1.275.000.000,00	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				127 Unit	500.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				27 Unit	500.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	79,98 %			79,98 %	19.196.501.000,00						79,98 %	14.220.000.000,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung yang Terbangun dan Terpelihara	7Unit			1 Unit	360.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	3Unit	300.000.000,00	
	1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	2 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah areal irigasi yang terlayani (HA)	840Ha			300 Ha	18.836.501.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	120Ha	13.920.000.000,00	
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan													
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM			0,3 KM	2.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	0,30 KM	1.020.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12 KM			0,35 KM	13.738.800.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	2 KM	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 KM			1,3 KM	1.972.701.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	2 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota													

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	10 Liter/Detik				2 Liter/Detik	2.500.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Prembun, Mulyosri Kab. Kebumen, Kebumen, Jemur Kab. Kebumen, Pejagoan, Kebagoran Kab. Kebumen, Pejagoan, Jemur Kab. Kebumen, Padureso, Sendangdalem Kab. Kebumen, Karangsambung, Karangsambung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	1 Liter/Detik	2.143.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	12 Liter/Detik				5 Liter/Detik	6.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Ayah, Jatijajar Kab. Kebumen, Ayah, Srati Kab. Kebumen, Prembun, Sembirkadipaten Kab. Kebumen, Kutowinangun, Triwarno Kab. Kebumen, Alian, Kaliputih Kab. Kebumen, Alian, Kalijaya Kab. Kebumen, Sruweng, Sidoagung Kab. Kebumen, Sruweng, Pengempon Kab. Kebumen, Sempor, Kenteng Kab. Kebumen, Sempor, Tunjungseto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	3 Liter/Detik	2.058.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara					500 Meter	2.675.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen		2.133.899.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														
						Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan					5 Sistem Drainase Lingkungan	24.836.200.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen		5.811.496.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun					4 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	8.230.000.000,00						-	8.870.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	8.230.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	8.870.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				5 Bangunan Gedung	500.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														
							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				50 Bantuan Teknis	180.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	7.350.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				150 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				500 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	16 %			16 %	2.918.148.840,00						16 %	580.000.000,00	

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	10 Dokumen			5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	5 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	32 Dokumen			8 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	8 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1017,15 KM			1017,15 KM	650.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kabupaten Kebumen	1017,15 KM	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0049	Pelebaran Jembatan														
							Panjang jembatan yang dilebarkan	22 Meter			12 Meter	1.960.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kabupaten Kebumen	8 Meter	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	36 KM			9 KM	15.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	9 KM	13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
						Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	117,2 KM			45 KM	350.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	29,60 KM	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan														
						Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	7,2 KM			13 KM	50.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	1,6 KM	12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	60 KM			15 KM	82.323.952.171,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	15 KM	35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	16 Meter			5 Meter	3.100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	4 Meter	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	14 Jembatan			5 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	2 Jembatan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	12 KM			8 KM	14.820.125.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	3 KM	9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan														
							Panjang jembatan yang dibangun	2 Meter			30 Meter	18.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kabupaten Kebumen	1 Meter	20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Terampil	65,16 %			65,16 %	300.000.000,00						65,16 %	300.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terampil	-			2 Kegiatan 50 Orang	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kabupaten Kebumen	-	200.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	-		1 Dokumen 62 Kegiatan	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	-	100.000.000,00	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW Persentase Kinerja Pelaksanaan Penataan Tata Ruang Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	91,75% 91,75%		0 % 79 % 91,55 %	1.340.000.000,00						91,65% 91,65%	1.340.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	8Dokumen			3 Dokumen	515.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	2Dokumen	515.000.000,00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota													
						dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota													
						dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	4 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang													

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	400 Laporan			100 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	100 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperkada RDTR	12Dokumen		2 Dokumen	600.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	3Dokumen	600.000.000,00	
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar													
						Jumlah data SHP Peta Dasar	8 Peta			1 Peta	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	2 Peta	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota													
						Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	8Dokumen		2 Dokumen	175.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	2Dokumen	175.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang													

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	24 Dokumen			6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	6 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang													
						Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	300 Layanan			75 Layanan	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kabupaten Kebumen	75 Layanan	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang													
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	4 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4 Sistem Informasi			1 Sistem Informasi	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kabupaten Kebumen	1 Sistem Informasi	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN						36.445.675.089,00							39.386.947.435,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.773.754.600,00							4.622.754.150,00	
	1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						4.773.754.600,00							4.622.754.150,00	
30	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %			100 %	650.551.000,00						100 %	652.078.550,00	
	1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Data Rumah di Lokasi Bencana yang ditangani	-			1 Dokumen	29.500.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	30.975.000,00	
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	29.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		30.975.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Bencana yang tertangani	-			16 Unit	621.051.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	621.103.550,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				16 Unit Rumah	621.051.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		621.103.550,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prsentase Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh	56,58 %			56,58 %	748.942.000,00						56,58 %	1.653.445.300,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	-			1,2 Ha	320.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	1.575.000.000,00	
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	320.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		1.575.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah lokasi permukiman kumuh yang ditangani	-			1 Lokasi	428.942.000,00			-	-	-	-	78.445.300,00	
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				2 Dokumen	320.122.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.122.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	108.820.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		58.323.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
32	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	41,53 %			41,53 %	2.252.576.000,00						41,53 %	905.704.800,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	-			103 Unit	2.252.576.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	905.704.800,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				103 Unit Rumah	2.252.576.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		905.704.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
33	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	11,95 %			11,95 %	1.121.685.600,00						11,95 %	1.411.525.500,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic (SPM)	-			100 %	1.121.685.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	1.411.525.500,00	
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	347.319.600,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		459.504.150,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	774.366.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		952.021.350,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	130.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		136.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.875.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		8.268.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	95.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		99.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	-		1 Paket	62.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	65.100.000,00		
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		7.350.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					59 Unit	287.973.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		302.371.650,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					5 Unit	7.875.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		8.268.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	44.023.600,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		46.224.780,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	728.400.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		764.820.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
35	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Capaian Fasilitas Perelengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	88,31 %			88,31 %	18.392.177.108,00						88,31 %	21.818.600.598,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang tersedia kelengkapan jalan sesuai standar	-			53,26 %	16.722.323.108,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	19.574.049.398,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				486 Unit	6.370.988.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		9.195.295.490,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				110 Unit	10.351.335.108,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		10.378.753.908,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Presentase terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	-			100 %	30.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	-	31.500.000,00	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		31.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rekomendasi izin pengelolaan parkir	-			12 Dokumen	166.959.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	291.240.000,00	
	2	15	02	2.04	0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	659.619.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		692.599.950,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penilaian andalalin	-			12 Laporan	13.425.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		14.096.250,00	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				12 Laporan	13.425.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		14.096.250,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Pengelolaan Pos Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api	-			18 Unit	156.928.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		452.671.000,00	
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
							Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12 Laporan	156.928.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		452.671.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Armada Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	-			4 Unit	391.086.600,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		440.437.000,00	
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					295 Orang	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Kantor Satpol PP Kabupaten Kebumen		27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-			12 Bulan	83.700.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-	-	91.095.000,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					137 Paket	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		9.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1064 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		31.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2390 Paket	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		9.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		1.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				203 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		12.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		23.625.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	-		100 %	2.576.576.287,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kantor Satpol PP Kabupaten Kebumen	-	1.150.899.700,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kantor Satpol PP Kabupaten Kebumen		1.064.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	420.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Kantor Satpol PP Kabupaten Kebumen		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Karyawan Satpol PP Kabupaten Kebumen		21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	252.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Karyawan Satpol PP Kabupaten Kebumen		76.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
37	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	100 Persen			100 Persen	4.565.245.960,00						100 Persen	4.281.516.524,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-			100 %	3.222.186.200,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-	-	2.965.428.464,00	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	1.088.800.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		1.177.301.940,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	1.366.319.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		1.312.319.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpool PP dan Satlinmas														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				60 Orang	73.614.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		73.614.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				4 laporan	693.453.200,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		402.193.524,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	-			100 %	1.336.080.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-	-	1.308.760.110,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	89.783.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		66.583.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	1.222.856.760,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		1.222.856.760,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	23.441.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		19.320.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				4 Dokumen	213.792.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder terkait		53.909.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase terlaksananya inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	-		100 %	16.638.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder terkait	-	21.725.000,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran													
						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				30 Dokumen	16.638.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder terkait		21.725.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	-		100 %	42.253.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-	-	42.253.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				83 Orang	42.253.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		42.253.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					9.459.043.957,00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					9.459.043.957,00								
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9.459.043.957,00								
39	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPBD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	-		71,27 Nilai 90,4 Indeks	5.250.740.227,00						-	5.426.287.189,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	28.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kantor BPBD Kabupaten Kebumen	-		22.000.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	18.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kantor BPBD Kabupaten Kebumen			16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	10.100.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kantor BPBD Kabupaten Kebumen			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	3.924.640.227,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-		4.054.287.189,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.881.240.227,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-			4.004.287.189,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	43.400.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		95.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			17 Unit	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen	-	400.000.000,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	-		12 Bulan	327.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen	-	327.000.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Karyawan BPBD Kabupaten Kebumen		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-		64 Unit	605.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kantor BPBD Kabupaten Kebumen	-	425.000.000,00	

1	2				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					40 Unit	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	275.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
40	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD	-			0,76 Skor 0,86 Skor 0,89 Skor	4.208.303.730,00						-	3.617.789.193,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Presentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-			100 Persen 100 %	412.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	300.000.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				9000 Orang	260.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	152.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			100 Persen	622.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	865.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				50 Unit	87.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				400 Orang	105.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				10 Kawasan	130.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				90 Orang	78.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota													
						Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana													
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	87.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	2				3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				100 Persen	1.806.303.730,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		1.577.789.193,00	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					2 Dokumen	1.541.303.730,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		1.277.789.193,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					100 Orang	135.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1000 Orang	130.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rerata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				95 Persen	1.368.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	875.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana					4 Dokumen	43.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				50 Orang	43.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1.100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					15.676.064.840,00								16.551.209.766,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.103.564.160,00								16.065.137.546,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.103.564.160,00								16.065.137.546,00	
41	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINSOS Indeks Kepuasan Masyarakat DINSOS	-		70.03 Nilai 90.4 Nilai	5.611.252.537,00					-		5.748.397.523,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			18 dokumen	67.645.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A, Dinas Sosial P3A	-	72.645.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	50.347.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A, Dinas Sosial P3A		55.347.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	17.298.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A, Dinas Sosial P3A		17.298.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	4.556.528.737,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Dinas Sosial P3A	-	4.710.792.523,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	4.512.624.831,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Dinas Sosial P3A		4.654.224.523,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5 Dokumen	43.903.906,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		56.568.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	192.589.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A	-	192.589.000,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	8.065.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		8.065.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	50.088.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		50.088.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	30.591.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		30.591.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		2.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	20.723.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		20.723.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	71.122.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		71.122.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	ASN Dinas Sosial P3A		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 Unit	72.179.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Sosial P3A	-	72.179.000,00	
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	19.865.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Sosial P3A		19.865.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	52.314.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Sosial P3A		52.314.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah	-			12 bulan	266.718.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Sosial P3A	-	244.600.000,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.079.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Sosial P3A		2.079.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	183.624.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Sosial P3A		183.624.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	81.015.800,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Sosial P3A		58.897.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			113 Unit	455.592.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A	-	455.592.000,00	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				63 Unit	143.580.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		143.580.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	287.012.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ASN Dinas Sosial P3A		287.012.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	100 %			100 %	101.467.000,00						100 %	101.467.000,00	
	1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	-			3 Kegiatan	101.467.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, Anggota LK3	-	101.467.000,00	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	21.880.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, Anggota LK3		21.880.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	8.840.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, Anggota LK3		8.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				126 Orang	70.747.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, Anggota LK3		70.747.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
43	1	06	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %			100 %	3.190.000,00						100 %	10.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	11.294.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti		11.294.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan													
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-		7 Kegiatan	680.193.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ODGJ Rumah Singgah Dosaraso dan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)	-	477.812.000,00	
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan													

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ODGJ Rumah Singgah Dosaraso dan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					1 Dokumen	26.994.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	ODGJ Rumah Singgah Dosaraso dan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)		26.994.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	cakupan perlindungan jaminan sosial	92 %			92 %	5.506.047.400,00						92 %	5.526.047.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	-			26 Kecamatan	5.506.047.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Keluarga Penerima Manfaat (KPM), PKH	-	5.526.047.000,00	
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
						Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					4.300 Orang	5.398.047.400,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Keluarga Penerima Manfaat (KPM), PKH		5.398.047.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					92 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Korban Bencana Alam dan Sosial		96.176.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					280 Orang	48.276.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Korban Bencana Alam dan Sosial		48.276.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota					300 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Korban Bencana Alam dan Sosial		112.050.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	-			2 Kegiatan	89.577.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	-	66.351.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
						Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					6 Kampung	29.328.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)		34.328.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	50.663.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengarusutan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah		50.663.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	167.376.680,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media	-	113.681.000,00	
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				30 Lembaga	167.376.680,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media		113.681.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
49	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan	-			100 %	114.332.000,00					-	79.332.000,00		
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	67.537.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-	32.537.000,00	
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				1 Lembaga	67.537.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat		32.537.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	'Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	-			2 Kegiatan	46.795.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	perempuan korban kekerasan	-	46.795.000,00	
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				50 orang	46.795.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	perempuan korban kekerasan		46.795.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	'Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-			100 %	10.636.000,00					-	10.636.000,00		
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	'Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	10.636.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-	10.636.000,00	
	2	08	04	2.01	0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
							Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				20 Lembaga	10.636.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat		10.636.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
51	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	'Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	-			100 %	6.805.000,00					-	6.805.000,00		

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	31.641.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat		31.641.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	'Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-		3 Kegiatan	88.938.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-	91.205.220,00	
	2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	31.909.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat		34.176.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				54 Lembaga	25.382.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat		25.382.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				50 Lembaga	31.647.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat		31.647.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
53	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	'Cakupan Perlindungan Anak	-			100 %	51.715.000,00						-	51.715.000,00		
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-			1 kegiatan	51.715.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	-	51.715.000,00	
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota															
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota					50 Orang	51.715.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat		51.715.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						49.427.329.883,00									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.393.733.015,00								25.690.195.588,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						25.393.733.015,00								25.690.195.588,00	
54	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Distapang Indeks Kepuasan Masyarakat Distapang	-			77,69 Nilai 90,50 Nilai	24.225.233.015,00						-	23.982.880.069,00		
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			40 Dokumen	107.943.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait	-	107.943.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 Dokumen	53.764.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		53.764.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	54.179.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		54.179.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 bulan	21.758.065.015,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait	-	22.466.508.866,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				211 Orang/bulan	21.717.277.015,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		22.400.288.866,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	40.788.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		66.220.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		4 Laporan	4.438.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait	-	4.438.000,00	
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4.438.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		4.438.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 bulan	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	-	50.000.000,00	
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				290 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	208.092.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait	-	255.342.312,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.473.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		4.473.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	47.148.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		94.398.312,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	5.605.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		5.605.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	336.262.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		336.262.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.250.933.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		161.653.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			32 Unit	294.794.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait	-	386.026.891,00	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	67.244.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		158.476.891,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	11.550.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		11.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	216.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		216.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola dengan baik	89.76 %			89.76 %	440.000.000,00						89.76 %	924.547.000,00	
	2	09	02	2.01			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dikelola dengan baik	359Unit			342 Unit	440.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Poktan (Kelompok Tani)	353Unit	924.547.000,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya															
								Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit			2 Unit	440.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Poktan (Kelompok Tani)	4 Unit	850.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penvediaan Infrastruktur Logistik															

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat	12 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	44,73%			17.89 %	325.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat	44,73%	350.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	50 Ton			20 Ton	325.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat	50 Ton	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	94,85%			1 Laporan	76.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Poktan (Kelompok Tani)	94,25%	129.004.519,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan			4 Laporan	76.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Poktan (Kelompok Tani)	4 Laporan	129.004.519,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
57	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase penanganan daerah rawan pangan	54.35 %			54.35 %	216.500.000,00						54.35 %	148.710.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	4Dokumen			4 Dokumen	12.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait	4Dokumen	7.473.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	4 Dokumen			4 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait	4 Dokumen	7.473.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	4Desa		25 Desa	204.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat	4Desa	141.237.000,00	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen			4 Dokumen	204.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat	4 Dokumen	69.237.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat	3 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	12 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat	12 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
58	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase pangan segar aman	93.53 %			93.53 %	40.000.000,00						93.53 %	45.564.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Aman	170sampel			159 Sampel	40.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, dan Steakholder terkait	170sampel	45.564.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, dan Steakholder terkait	4 Dokumen	15.136.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Laporan			4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, dan Steakholder terkait	4 Laporan	30.428.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						24.033.596.868,00							25.055.836.597,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						24.033.596.868,00							25.055.836.597,00	
59	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.31 %			9.31 %	5.057.436.207,00						9.31 %	2.574.345.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian	74Persen		70 %	401.787.207,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	72Persen	469.842.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan			1 Laporan	359.656.207,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	1 Laporan	429.640.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan			2 Laporan	42.131.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	2 Laporan	40.202.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG yang ditingkatkan, yang dimanfaatkan dan yang dijamin kemurniannya	2Komoditas			11 Komoditas	396.696.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	2Komoditas	559.992.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen			3 Dokumen	260.809.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Geblug Kab. Kebumen, Ambal, Singosari Kab. Kebumen, Mirit, Selotumpeng Kab. Kebumen, Mirit, Tlogodepok Kab. Kebumen, Mirit, Miritpetikusan Kab. Kebumen, Mirit, Sarwogadung Kab. Kebumen, Rowokele, Bumiagung Kab. Kebumen, Sempor, Sampang Kab. Kebumen, Poncowarno, Soka Kab. Kebumen, Karangsembung, Banioro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	3 Dokumen	275.241.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen			3 Dokumen	100.859.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Jatijajar Kab. Kebumen, Buayan, Geblug Kab. Kebumen, Buayan, Purbowangi Kab. Kebumen, Puring, Bumirejo Kab. Kebumen, Klirong, Sitirejo Kab. Kebumen, Buluspesantren, Tanjungsari Kab. Kebumen, Ambal, Ambarwinangun Kab. Kebumen, Mirit, Selotumpeng Kab. Kebumen, Prembun, Tunggalroso Kab. Kebumen, Kutowinangun, Pekunden Kab. Kebumen, Alian, Krakal Kab. Kebumen,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	3 Dokumen	125.291.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman													
						Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)			1 Varietas Unggul Baru (VUB)	35.028.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Geblug Kab. Kebumen, Buayan, Sikayu Kab. Kebumen, Buluspesantren, Sidomoro Kab. Kebumen, Mirit, Winong Kab. Kebumen, Mirit, Sarwogadung Kab. Kebumen, Prembun, Bagung Kab. Kebumen, Kutowinangun, Babadsari Kab. Kebumen, Kutowinangun, Jlegiwinangun Kab. Kebumen, Alian, Bojongsari Kab. Kebumen, Poncowarno, Karangtengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	159.460.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KTT yang terfasilitasi untuk menerapkan pemberian pakan/HPT unggul	10Kelompok			10 Kelompok	19.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani Ternak	10Kelompok	26.511.000,00	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan			1 Laporan	19.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Pandansari Kab. Kebumen, Kuwarasan, Purwodadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani Ternak	1 Laporan	26.511.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	8unit usaha			8 Unit Usaha	10.953.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang Obat Hewan	8unit usaha	8.000.000,00	
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan			1 Laporan	10.953.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kembaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang Obat Hewan	1 Laporan	8.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar melalui kegiatan inseminasi buatan	5.000Dosis			11000 Dosis	950.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani Ternak	5.000Dosis	1.450.000.000,00	
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan			1 Laporan	950.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani Ternak	1 Laporan	1.450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok Tani ternak yang mendapatkan Bantuan Bibit ternak	3kelompok			8 Kelompok	3.279.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani Ternak	3kelompok	60.000.000,00	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	12 Ekor			105 Ekor	3.279.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani Ternak	12 Ekor	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
60	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	29.16 %			29.16 %	16.933.585.400,00						29.16 %	19.140.553.855,00	

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Candi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	5 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit			2 Unit	672.597.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	2 Unit	1.072.597.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit			2 Unit	11.050.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	5 Unit	11.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	470.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Sidoarjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	5 Unit	803.104.455,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi		Puskesmas												
							Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit			1 Unit	200.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi		Rumah Potong Hewan												
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit			2 Unit	1.131.055.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	2 Unit	1.131.055.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah sumber bibit sapi PO yang difasilitasi	6Kecamatan			6 Kecamatan	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani Terna	6Kecamatan	275.000.000,00	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani Terna	1 Laporan	275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
61	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan yang tertangani	100 %			100 %	515.937.000,00						100 %	1.140.593.000,00	

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan			1 laporan	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat Veteriner	1 laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
							Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan			1 Laporan	64.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat Veteriner	1 Laporan	197.301.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pengobatan penyakit hewan	7.900Ekor			10000 Ekor	270.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat Veteriner	7.700Ekor	427.424.000,00	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan			1 Laporan	270.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat Veteriner	1 Laporan	427.424.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang dibina	30Unit Usaha			30 Unit Usaha	16.937.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat Veteriner	30Unit Usaha	289.984.000,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan			1 Laporan	16.937.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat Veteriner	1 Laporan	289.984.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	1.63 %			1.63 %	345.406.519,00						1.63 %	427.648.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	740Ha			605 Ha	345.406.519,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	720Ha	427.648.000,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	640 Ha			555 Ha	263.087.519,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	620 Ha	301.002.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 Ha			50 Ha	48.750.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	100 Ha	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
							Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2 Laporan			2 Laporan	33.569.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kelompok Tani / Gapoktan	2 Laporan	51.646.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
63	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha Pertanian dan Perternakan	100 %			100 %	29.180.000,00						100 %	29.180.000,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang difasilitasi	48unit usaha			48 Unit Usaha	14.599.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pelaku Usaha Pertanian	48unit usaha	14.599.000,00	
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelavakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	4 Dokumen			4 Dokumen	14.599.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pelaku Usaha Pertanian	4 Dokumen	14.599.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah izin usaha peternakan yang difasilitasi	60unit usaha			60 Unit Usaha	14.581.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pelaku Usaha Peternakan	60unit usaha	14.581.000,00	
	3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
							Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	4 Dokumen			4 Dokumen	14.581.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pelaku Usaha Peternakan	4 Dokumen	14.581.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
64	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	75 %			75 %	1.152.051.742,00						75 %	1.743.516.742,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rata-rata skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	68Skor		60 Skor	1.152.051.742,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan,Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani	64Skor	1.743.516.742,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	34 Unit		34 Unit	327.694.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan,Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani	36 Unit	800.330.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Unit		30 Unit	127.453.742,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan,Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani	30 Unit	203.824.742,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	7 Unit			2 Unit	65.941.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan,Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani	5 Unit	101.449.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	128 Orang			128 Orang	603.680.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan,Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani	128 Orang	603.680.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
							Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit			1 Unit	27.283.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan,Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani	1 Unit	34.233.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN													33.217.960.093,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													31.517.378.093,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													31.517.378.093,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	22.261.002.704,00						-	21.141.240.093,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			7 Dokumen	124.439.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	68.937.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	72.921.260,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		47.419.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	51.518.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		21.518.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	19.545.303.444,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	20.232.354.000,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/bulan	19.446.692.444,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		20.152.957.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	98.611.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		79.397.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			1 Kegiatan	44.808.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	20.074.000,00	
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	44.808.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		20.074.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	221.671.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	81.165.019,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12.976.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		5.813.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						0					12 0	5.766.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		1.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	61.491.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		24.189.019,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	19.684.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.818.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6.454.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		2.891.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	29.176.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		13.071.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	83.822.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		24.112.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	2.302.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		1.031.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		4 Unit	374.433.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	75.045.000,00	
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	90.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	284.433.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		55.045.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	5.532.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		2.478.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.674.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	140.994.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		63.612.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
66	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	-			100,00 %	156.901.000,00						-	50.984.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	-			2 dokumen	156.901.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Masrarakat di Kabupaten Kebumen	-	50.984.000,00	
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	156.901.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		50.984.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	-			74,45 % 74,45 Indeks	635.686.000,00						-	405.012.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-			3 kegiatan	399.894.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen	-	188.068.000,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	15.290.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		4.739.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	46.941.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		6.219.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				700 Dokumen	337.663.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		177.110.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-			11 Kegiatan	124.895.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen	-	117.579.000,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				10 Laporan	81.921.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		73.403.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan					3 Titik	42.974.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		44.176.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atu kerusakan lingkungan hidup	-			15 Kegiatan	110.897.000,00			Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen	-	99.365.000,00	
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan					1 Dokumen	3.066.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		2.747.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi														
						Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan					0 Kegiatan	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
						Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan					4 Kegiatan	107.831.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		96.618.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
68	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	-			53,33 %	18.274.286.000,00						-	1.815.679.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati	-			1 Dokumen	18.274.286.000,00			Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen	-	1.815.679.000,00	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masarakat di Kabupaten Kebumen		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				839,15 Ha	18.260.567.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masarakat di Kabupaten Kebumen		1.803.387.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
						Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				20 Orang	2.996.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masarakat di Kabupaten Kebumen		2.684.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	10.723.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masarakat di Kabupaten Kebumen		9.608.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
69	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	-		55 %	27.200.000,00						-	6.450.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB	-		30 Kali	27.200.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	-	6.450.000,00	
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan	Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)												
						Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				5 Dokumen	13.001.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	-		2.688.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				6 Usaha	14.199.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		3.762.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
70	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	-			19,63 %	42.417.000,00						-	24.565.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	-			125 Unit	42.417.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen	-	24.565.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	8.829.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		7.910.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				40 Badan Usaha	33.588.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masrarakat di Kabupaten Kebumen		16.655.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
71	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	-			24,13 %	25.944.000,00						-	14.285.000,00	

1	2				3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	-				19 Lokasi	25.944.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	-	14.285.000,00	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup															
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					15 Dokumen	17.321.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	-		6.559.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat															
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH					6 Lembaga	8.623.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	-		7.726.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
72	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup	-				100 %	10.004.000,00						-	8.963.000,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	-				16 Lokasi	10.004.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	8.963.000,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					16 Entitas	10.004.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.963.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
73	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	-				100 %	9.652.000,00						-	8.648.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	-				15 Kasus	9.652.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	8.648.000,00	
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				15 Pengaduan	9.652.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.648.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	
74	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	-			30 %	8.838.514.290,00					-	8.041.552.000,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah	-			5 Kegiatan	8.838.514.290,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	8.041.552.000,00	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					5 Kelompok	9.186.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.230.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					22 Unit	2.975.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan					2 Dokumen	7.562.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		6.775.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
						Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah					0 Laporan	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	216.072.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		104.003.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				3 Unit	232.765.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		11.437.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan	-			35 Kelompok	52.476.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	47.059.000,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	44.411.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		39.793.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	8.065.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		7.266.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	-		8 Unit	547.328.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	577.984.000,00	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				8 Layanan	547.328.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		577.984.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kapal perikanan yang berijin	-			45,46 %	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	3.584.000,00	
	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
							Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				25 Rekomendasi	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		3.584.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
76	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	-			30 %	1.196.231.000,00						-	737.165.000,00	

[illegible]

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-			44.801.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokumen	11.378.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-			10.194.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				18 Unit	783.792.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-			326.397.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				130 Unit	120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		107.522.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
							Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				1 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		179.204.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
							Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		67.201.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	-			100 %	38.869.000,00						-	12.426.000,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	-			9 Lokasi	38.869.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	12.426.000,00	
	3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk				20 Orang	38.869.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		12.426.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
78	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	-			55 %	230.937.000,00						-	206.924.000,00	

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				42,74 Ton	25.716.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		23.042.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	192.022.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		172.056.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.454.115.651,00								8.661.202.101,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.454.115.651,00								8.661.202.101,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.454.115.651,00								8.661.202.101,00	
79	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP DISDUKCAPIL IKM DISDUKCAPIL	-			70,03 Nilai 90,40 Nilai	5.762.446.271,00						-	6.000.207.132,00		
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			10 dokumen	36.369.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	37.461.000,00		
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	25.051.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		25.803.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	11.318.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		11.658.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	5.119.773.271,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	5.285.031.132,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	5.093.986.271,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		5.258.470.132,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	25.787.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		26.561.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			38 Orang	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	30.900.000,00	
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				38 Orang	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		30.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	21.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		21.630.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		5.408.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			23 Unit	89.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	91.929.000,00	
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	26.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		27.038.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	53.550.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		55.157.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	9.450.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		9.734.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 bulan	217.886.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	277.639.000,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	960.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	104.160.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		160.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	112.766.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		116.149.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintah daerah	-			75 Unit	188.893.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	194.561.000,00	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	75.458.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		77.722.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				28 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		6.180.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	57.435.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		59.159.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		51.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
80	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	79,5 %			79,5 %	1.789.000.000,00						79,5 %	1.842.670.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	-			7 Layanan	220.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	226.600.000,00	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				11000 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		92.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		128.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
							Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				27 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		5.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	-			1 Laporan	1.560.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	1.606.800.000,00	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia					2 Dokumen	1.560.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		1.606.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	-			1 Kegiatan	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	9.270.000,00	
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		9.270.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
81	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	99,75 %			99,75 %	95.500.000,00						99,75 %	98.365.000,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-			1 Kegiatan	87.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	89.610.000,00	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		22.660.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		66.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			1 Kegiatan	8.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	8.755.000,00	
	2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				2 Laporan	8.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kayawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		8.755.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
82	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100 %			100 %	807.169.380,00						100 %	719.959.969,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah buku data kependudukan	-			2 Buku	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	25.750.000,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		25.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			3 Kegiatan	782.169.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	-	694.209.969,00			
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	766.169.380,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		677.729.969,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		8.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Pemohon, ASN dan Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen		8.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										13.571.649.603,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										13.571.649.603,00						
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										13.571.649.603,00						
83	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat	100%			70,03 Nilai 90,40 Nilai	5.494.942.603,00						100%	5.619.832.884,00			

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	36.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	36.000.000,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	4.975.446.833,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	5.125.336.666,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan	4.957.446.833,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		5.107.336.666,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					8 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 bulan	20.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	20.000.000,00	
	2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					51 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	106.970.770,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	106.971.218,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					7 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	51.750.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		51.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	7.500.770,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		7.501.218,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12.400.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		12.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74 Laporan	20.750.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		20.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	3.570.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		3.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			8 Unit	62.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	47.600.000,00	
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		10.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	17.350.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		17.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	173.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	173.300.000,00	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.650.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		2.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.650.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		70.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			20 Unit	120.625.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	110.625.000,00	
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	65.300.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		65.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	7.300.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		7.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	14.550.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		14.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.475.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		23.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
84	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang ditetapkan dengan Perbup Penegasan Batas Desa	34,79 Persen			34,79 Persen	25.750.000,00						34,79 Persen	22.750.000,00	
	2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	-			1 Dokumen	25.750.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	22.750.000,00	
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa													
						Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	25.750.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		22.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
85	2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas dari kerja s a m a	100 Persen			100 Persen	1.075.200.000,00						100 Persen	1.072.200.000,00	
	2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-			37 Dokumen	1.075.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	1.072.200.000,00	
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				26 Dokumen	28.200.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		25.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				6 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase dokumen administrasi desa yang disusun dan diperbarui secara rutin	56 Persen			56 Persen	5.901.757.000,00						56 Persen	5.897.653.000,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			12 Bulan	5.901.757.000,00			-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen	-	5.897.653.000,00	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				4 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				2 Dokumen	15.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				449 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				100 Orang	23.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		15.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		10.769.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	2					3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					4 Dokumen	23.475.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		19.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		108.427.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2 Laporan	16.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					3 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					30 Orang	17.852.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		15.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa																
							Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa					449 Dokumen	5.674.130.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		5.539.130.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti diklat	-			41 Orang	25.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	25.000.000,00	
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				41 Orang	25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	59.400.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	59.400.000,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2					3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	2.400.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		2.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	8.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	20.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	6.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Unit	50.000.000,00	-			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	50.000.000,00		
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	50.000.000,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			12 Bulan	511.500.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	543.032.834,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	400.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		431.532.834,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	110.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	126.746.156,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	126.745.707,00	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	70.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	1.746.156,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		1.745.707,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Komunikasi dan Informatika		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
89	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kategori Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Informatif Kategori			Informatif Kategori	1.817.000.000,00						Informatif Kategori	1.817.000.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dalam keadaan baik	94Nilai			220 PPID OPD dan Desa	1.817.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD	92Nilai	1.817.000.000,00	
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	11 Komunitas			11 Komunitas	52.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD	11 Komunitas	52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik														
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan			12 Permohonan	275.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD	12 Permohona n	275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	-			Tinggi Kategori	86.000.000,00						-	86.000.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesiapan PSE	-			Cukup Baik Tingkat	86.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD	-	86.000.000,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	21.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD		21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				50 Perangkat Daerah	65.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						91.594.102.460,00							28.559.246.080,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.545.352.460,00							18.497.836.080,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						22.545.352.460,00							18.497.836.080,00	
93	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persentase	19.249.880.460,00						-	16.853.305.080,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	-			11 Dokumen	75.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	82.500.000,00	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	14.990.709.460,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	15.502.744.080,00	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/bulan	14.936.656.460,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15.447.744.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				51 Dokumen	54.053.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun	-			0 Kegiatan	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	62.000.000,00	
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		62.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			12 Bulan	173.600.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		195.750.000,00	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		9.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		46.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	13.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		14.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		4 Unit	229.055.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	50.000.000,00	
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	229.055.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	3.468.995.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	562.600.000,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.100.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	515.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		520.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2					3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.931.895.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-			20.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	-			106 Unit	312.521.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-		397.711.000,00		
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				77 Unit	210.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-			230.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	52.521.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		92.461.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
94	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	-			12 Persentase	13.000.000,00						-	14.447.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel	-			49,14 Persentase	13.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Koperasi	-	14.447.000,00	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	13.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Koperasi		14.447.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
95	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	-			6,27 Persentase	30.000.000,00						-	40.000.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-			25 Persentase	30.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Koperasi	-	40.000.000,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				25 Orang	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Koperasi		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
96	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	-			25,89 Persentase	285.000.000,00						-	120.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	-			5 koperasi	285.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Koperasi	-	120.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi													
						Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				5 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Koperasi		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota													
						Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	270.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Koperasi		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
97	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	-		12,74 Persentase	102.000.000,00						-	70.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan jumlah usaha mikro yg terbina	-			225 UMKM	102.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UMKM	-	70.000.000,00	
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				200 Unit Usaha	54.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UMKM		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				25 Unit Usaha	48.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UMKM		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
98	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro	-			2,08 Persentase	2.865.472.000,00					-	1.400.084.000,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Volume Usaha Mikro yang difasilitasi	-			1129700000 Rupiah	2.865.472.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UMKM	-	1.400.084.000,00	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro														
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				128 Unit Usaha	2.865.472.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UMKM		1.400.084.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						69.048.750.000,00							10.061.410.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						23.088.750.000,00							9.093.410.000,00	
99	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	-			0.5 Persentase	19.318.164.000,00						-	6.598.110.000,00	

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang				0 Kegiatan	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang		610.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	30	03	2.01	0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota															
							Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang				0 laporan	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-			11.58 Persentase	217.156.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang	-	630.000.000,00		
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4 Dokumen	64.656.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang		480.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				9 Dokumen	152.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
100	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Provinsi	-			±10 Persentase	2.860.822.000,00						-	1.755.850.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Barang yang tersedia Agen dan Distributor	-		97.5 Persentase	72.822.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang	-	80.850.000,00	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat													
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			381 Laporan	72.822.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang		80.850.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-		24 Dokumen	2.788.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang	-	1.675.000.000,00	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					365 Laporan	68.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					4 Laporan	2.720.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pedagang		1.600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
101	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	-			1.1 Persentase	30.000.000,00						-	60.000.000,00		
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor Perdagangan	-			42.207.302.028 Rupiah (Juta)	30.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pelaku Usaha	-	60.000.000,00		
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				3 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pelaku Usaha		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
102	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) yang tertera	-			13.09 Persentase	138.783.000,00						-	188.871.000,00	
	3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU)	-			1 Unit	138.783.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UTTP	-	188.871.000,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3500 Unit	107.881.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UTTP		155.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				70 Orang	25.902.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UTTP		27.871.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal														
							Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UTTP		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
103	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaksanaan belanja Produk Dalam Negeri	-			92.40 Persentase	740.981.000,00						-	490.579.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Omset UMKM yang difasilitasi Pameran Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri	-			525.000.000 Rp	740.981.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UMKM	-	490.579.000,00	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				40 UMKM	725.981.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UMKM		475.579.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				15 UMKM	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	UMKM		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						45.960.000.000,00						968.000.000,00		

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	77.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	IKM		91.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	IKM		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	515.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	IKM		530.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	IKM		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
105	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase Dokumen yang terfasilitasi	-			76 Persentase	75.000.000,00						-	90.000.000,00	
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah izin usaha industri yang terfasilitasi	-			15 Pelaku Usaha	75.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	IKM	-	90.000.000,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
						-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				110 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	IKM		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	IKM		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						5.064.421.547,00							5.214.269.825,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.064.421.547,00							5.214.269.825,00	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.064.421.547,00							5.214.269.825,00	
107	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai IKM perangkat daerah	-			76,73 Persen 90,27 Persen	4.670.677.547,00						-	4.816.069.825,00	
	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	-			8 Dokumen	18.700.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen	-	19.900.000,00	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan	Kabupaten Kebumen		13.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	5.700.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan	Kabupaten Kebumen		6.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	3.970.130.671,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan	Kabupaten Kebumen	-	4.095.604.347,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.942.130.671,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		4.067.004.347,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		28.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat dan pelatihan pegawai	-			100 Persen	50.000.000,00			-	2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pegawai DPMTSP dan Petugas Loker Layanan	-	51.000.000,00	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Pegawai DPMTSP dan Petugas Loker Layanan		51.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		20.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		1.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		20.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	200.846.876,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		203.815.478,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		125.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			44 Unit	156.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen	-		158.300.000,00	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	111.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		112.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				13 Unit	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		1.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	26.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		26.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		17.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
108	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	418 Miliar Rupiah			418 Miliar Rupiah	45.000.000,00						418 Miliar Rupiah	45.700.000,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah	-			2 Dokumen	20.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen	-	20.300.000,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				0 Daerah	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		25.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
109	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kepedinan penanaman modal	18,18 Persen			18,18 Persen	178.044.000,00						18,18 Persen	179.500.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen kepeminatan penanaman modal kabupaten/kota Jumlah kegiatan promosi penanaman modal Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	-			13 Dokumen 5 Kegiatan 5 Kegiatan	178.044.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen	-	179.500.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	178.044.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		179.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5000 Pelaku Usaha	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		80.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		12.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
111	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	100 Persen			100 Persen	58.000.000,00						100 Persen	59.100.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	-			838 Kegiatan Usaha	58.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen	-	59.100.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		14.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				40 Pelaku Usaha	19.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		19.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal														

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Kabupaten Kebumen		12.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						15.834.244.485,00							15.932.737.289,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.515.715.559,00							9.852.303.639,00	
	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						10.515.715.559,00							9.852.303.639,00	
113	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP dan IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	-			74,25 dan 90,40 Nilai dan Indeks	8.728.205.559,00						-	9.014.303.639,00	
	2	22	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun,ditambah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	-			6 Dokumen	42.905.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	45.000.000,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	31.600.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		33.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	11.305.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	7.741.122.559,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	8.002.117.639,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	7.511.122.559,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		7.762.117.639,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		240.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			12 Bulan	140.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	149.600.000,00	
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		32.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		26.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	145.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	444.478.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	447.286.000,00	
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		2.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	142.478.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		145.286.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		99 Unit	184.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	189.300.000,00	
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					1 Objek	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Seni dan Budaya, Lembaga dan Komunitas Budaya, Masyarakat, Pemangku Kepentingan, Pemerintah dan Institusi Pendidikan		82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					110 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Seni dan Budaya, Lembaga dan Komunitas Budaya, Masyarakat, Pemangku Kepentingan, Pemerintah dan Institusi Pendidikan		82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	-			23,04 %	1.447.510.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Sanggar Seni dan Komunitas Budaya, Seniman dan Budayawan Lokal, Masyarakat, Lambaga/ Institusi	-	510.000.000,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					4 Objek	1.317.510.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Sanggar Seni dan Komunitas Budaya, Seniman dan Budayawan Lokal, Masyarakat, Lambaga/ Institusi		375.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	130.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Sanggar Seni dan Komunitas Budaya, Seniman dan Budayawan Lokal, Masyarakat, Lembaga/ Insititusi		135.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
115	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah	1,59 %			1,59 %	180.000.000,00						1,59 %	164.000.000,00	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	-			54654 Orang	180.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pemilik atau Pengelola Cagar Budaya, /embaga Akademik dan Peneliti, Masyarakat, Lembaga/ Insititusi	-	164.000.000,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				133 Objek	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pemilik atau Pengelola Cagar Budaya, /embaga Akademik dan Peneliti, Masyarakat, Lembaga/ Insititusi		82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				17 Objek	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pemilik atau Pengelola Cagar Budaya, /embaga Akademik dan Peneliti, Masyarakat, Lembaga/ Insititusi		82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.318.528.926,00							6.080.433.650,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5.318.528.926,00							6.080.433.650,00	
116	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	14,84 %			14,84 %	2.868.528.926,00						14,84 %	3.615.433.650,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) dikawasan strategis parwisata yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-			19 Objek	300.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Masyarakat, Pelaku Usaha, Insitusi/Lembaga, Wisatawan	-	110.000.000,00	
	3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				133 Orang	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Masyarakat, Pelaku Usaha, Insitusi/Lembaga, Wisatawan		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obwis yang dibangun atau diperbaiki milik pemerintah daerah	-			6 Objek	2.522.528.926,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat	-	3.458.433.650,00	
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				53 Unit	551.006.926,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat		488.619.650,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	1.891.522.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat		2.889.814.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi atau workshop terkait TDUP/Ijin Usaha yang diselenggarakan	-			1 Kali	46.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat, Investor dan Mitra Usaha	-	47.000.000,00	
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota														
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat, Investor dan Mitra Usaha		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				1 Laporan	31.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat, Investor dan Mitra Usaha		32.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
117	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara	100 %			100 %	2.200.000.000,00						100 %	2.205.000.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	-			28 Orang	2.200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara, Pelaku Industri Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat	-	2.205.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Kegiatan	2.200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara, Pelaku Industri Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat		2.205.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
118	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	12,85 %			12,85 %	250.000.000,00						12,85 %	260.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-			1 Kegiatan	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Pelaku Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Stakeholde, Insitusi/ Lembaga	-	105.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				80 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Pariwisata, Pelaku Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Stakeholde, Insitusi/ Lembaga		105.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-			1 Kegiatan	150.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, SDM Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Lembaga/ Institusi	-	155.000.000,00	
	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				15 Orang	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, SDM Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Lembaga/ Institusi		155.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						6.379.230.807,00								6.533.677.166,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.379.230.807,00								6.533.677.166,00
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						6.182.330.807,00								6.335.108.166,00
119	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Disarpus Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disarpus	-			70,03 Nilai 90,4 Nilai	4.860.930.807,00						-	5.000.794.166,00	

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.600.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai Disarpus		18.786.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai Disarpus		12.625.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				18 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pegawai Disarpus		2.424.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	18.600.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pegawai Disarpus		18.786.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	41.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pegawai Disarpus		41.412.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai Disarpus		5.959.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			5 unit	41.392.446,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Disarpus	-	38.492.115,00	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Disarpus		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	41.392.446,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Disarpus		38.492.115,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	528.600.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pegawai Disarpus	-	533.866.000,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pegawai Disarpus		2.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	258.600.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pegawai Disarpus		261.186.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	268.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Disarpus		270.680.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			99 unit	124.500.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Disarpus	-	128.245.000,00				
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	65.800.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Disarpus		66.458.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Disarpus		7.070.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	14.100.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Disarpus		16.741.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	37.600.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Disarpus		37.976.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
120	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-			16.75 %	1.243.000.000,00						-	1.259.877.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	-			35.99 %	623.446.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Perpustakaan (sekolah, perguruan tinggi, Kecamatan, Desa, Pondok Pesantren, Disarpus, Sekolah dan TBM)	-	655.894.000,00	
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				4 Perpustakaan	166.964.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Perpustakaan (sekolah, perguruan tinggi, Kecamatan, Desa, Pondok Pesantren, Disarpus, Sekolah dan TBM)		161.903.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 Orang	112.962.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Perpustakaa n (sekolah, perguruan tinggi, Kecamatan, Desa, Pondok Pesantren, Disarpus, Sekolah dan TBM)		126.250.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	334.520.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Perpustakaa n (sekolah, perguruan tinggi, Kecamatan, Desa, Pondok Pesantren, Disarpus, Sekolah dan TBM)		339.663.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perpustakaa n (sekolah, perguruan tinggi, Kecamatan, Desa, Pondok Pesantren, Disarpus, Sekolah dan TBM)		28.078.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengunjung ke perpustakaan	-			20.00 %	619.554.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	-	603.983.000,00	
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat		7.575.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	576.840.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Masyarakat		549.443.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	13.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat		12.827.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat													
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				64 Lokus	21.214.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Masyarakat		34.138.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
121	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	100 %		100 %	78.400.000,00						100 %	74.437.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional	-		1 dokumen	78.400.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Masyarakat	-	74.437.000,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno													

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Laporan	31.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	OPD		31.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten	-			2 kegiatan	31.200.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	LKD dan OPD	-	31.200.000,00	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				4 Arsip	31.200.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	LKD dan OPD		31.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip yang diunggah melalui JIKN	-			24 berkas	62.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	OPD dan Masyarakat	-	63.669.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				24 Pengguna	58.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	OPD dan Masyarakat		59.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	OPD dan Masyarakat		4.669.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				1 Arsip	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	OPD		3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
124	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-			-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	-			1 Arsip	3.000.000,00			-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat	-	3.000.000,00	
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1 Arsip	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat		3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						DINAS TENAGA KERJA														11.166.985.794,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														10.996.186.794,00
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														10.996.186.794,00
125	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.151.898.588,00						-	7.549.959.344,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		42.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-	-	77.690.000,00	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		52.184.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		25.506.000,00	DINAS TENAGA KERJA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	6.484.258.523,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-	-	6.590.457.344,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	6.463.258.523,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		6.561.867.217,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		28.590.127,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2.600.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		13.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.900.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		13.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	8.300.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		20.186.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	5.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		6.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	68.349.065,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	279.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-	-	318.515.000,00	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		11.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	155.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	123.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		137.315.000,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		20.471.490,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				2 Orang	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
127	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	804.806.000,00						-	1.971.995.960,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	758.806.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-	-	1.866.995.960,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				176 Orang	692.806.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		1.696.995.960,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	66.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-		-	11.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-	-	40.000.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				30 Lembaga	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-	-	65.000.000,00	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
128	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	326.400.000,00						-	938.760.000,00	

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					30 Orang	72.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.343.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	321.148.000,00		
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)															
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya					150 Orang	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		183.276.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran															
						Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani					1400 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan															

1	2					3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				125 Orang	40.343.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		52.872.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
129	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	422.500.000,00						-	-	485.000.000,00	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	422.500.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-	-		485.000.000,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah				6 Perkara	112.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1500 Orang	310.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	-		335.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						72.000.000,00							170.799.000,00	
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						10.000.000,00							40.000.000,00	
130	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-				-	10.000.000,00						-	40.000.000,00	
	3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	10.000.000,00			-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-	-	40.000.000,00	
	3	29	05	2.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						62.000.000,00							130.799.000,00	
131	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	62.000.000,00						-	130.799.000,00	

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				161 Orang/bulan	20.937.085.501,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		21.576.084.723,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	125.550.151,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		127.950.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-		12 Bulan	175.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	79.000.000,00	
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		52.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	2.130.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	2.140.000.000,00	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		102.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	950.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		42.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		37.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			4 Paket	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		37.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 Laporan	950.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Paket	2.600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	653.000.000,00	
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		103.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2.200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	2.368.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	2.425.500.000,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		72.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	500.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		570.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	-			12 Bulan	1.596.395.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	942.995.400,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	664.395.400,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		664.395.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				7 Orang/Bulan	726.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		72.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-		12 Bulan	900.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	920.000.000,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	650.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen fasilitasi penataan organisasi	-		3 Dokumen	355.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	400.000.000,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi															
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	-			8 Layanan	625.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	644.000.000,00		
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan															
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					3 Laporan	370.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan															
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					2 Laporan	140.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		142.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan															
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					3 Laporan	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		127.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
133	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD	3,29 Nilai			3,29 Nilai	19.675.000.000,00							3,29 Nilai	8.675.102.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang disusun tepat waktu	-			5 Dokumen	410.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	416.000.000,00		
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		252.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang sesuai ketentuan	-			16 Dokumen	18.700.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	7.785.000.000,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	17.550.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7.030.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				7 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		755.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-			83,33 Persen	500.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	407.102.000,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				550 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		102.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		305.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				626 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		102.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Capaian Fasilitasi kerja sama daerah yang disepakati	-			5 Dokumen	65.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	67.000.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				5 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		67.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,37 Nilai			84,37 Nilai	1.543.854.000,00						84,37 Nilai	468.500.000,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan	-			3 Laporan	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	BUMD, BLUD, Perangkat Daerah, Masyarakat	-	204.000.000,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	BUMD, BLUD, Perangkat Daerah, Masyarakat		127.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	BUMD, BLUD, Perangkat Daerah, Masyarakat		77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	-			2 Dokumen	230.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	235.000.000,00	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		153.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Layanan Pengadaan	-			1 Laporan	720.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				200 Orang	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan	-			3 Laporan	393.854.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	29.500.000,00	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	366.854.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						SEKRETARIAT DPRD					61.761.486.469,00						66.060.708.000,00			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					61.761.486.469,00							66.060.708.000,00		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					61.761.486.469,00							66.060.708.000,00		
135	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	41.891.340.454,00							-	44.300.858.000,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	22.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	27.100.000,00		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		2.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	4.405.014.454,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	4.691.521.000,00		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	4.345.014.454,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		4.622.221.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		69.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	130.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	136.500.000,00	
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	90.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		94.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				31 Orang	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		42.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	348.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	439.425.000,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		157.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		126.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		3.675.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	40.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	SEKRETARIAT DPRD		52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		78.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	180.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD	-	155.000.000,00	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD		52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD		52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	530.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	560.805.000,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		525.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		262.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	280.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		297.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	441.664.000,00	
4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				34 Unit	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		315.664.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel																			
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		15.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		57.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-						Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	36.987.843.000,00	
4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	34.500.326.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		36.225.343.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	550.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD		712.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	720.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD	-	861.000.000,00	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD		21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	700.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	SEKRETARIAT DPRD		840.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
136	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	19.870.146.015,00						-	21.759.850.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	4.220.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	DPRD	-	4.381.000.000,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					1 Dokumen	420.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	DPRD		441.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					15 Dokumen	2.400.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	DPRD		2.520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan					4 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		168.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					4 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		252.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah					1000 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	660.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD	-	798.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS					1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		168.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan														
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	4.127.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD	-	4.360.100.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	3.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				13 Orang	540.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		567.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	252.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		264.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		95.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD													
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		178.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				1.505.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD	-	1.605.250.000,00	
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD													
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		5.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses													
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-			-	1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD	-	1.050.000,00	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD													
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-			-	9.253.146.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD	-	10.505.250.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			1 Dokumen	7.448.146.015,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		8.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD													
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		5.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1.800.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	DPRD		2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					10.688.851.018,00								11.030.661.000,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					10.688.851.018,00							11.030.661.000,00	
	5	01				PERENCANAAN					9.408.851.018,00							9.833.661.000,00	
137	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Bapperida IKM Bapperida	90,60Nilai 75,00Nilai		70,03 Nilai 90,40 Nilai	7.563.851.018,00						90,50Nilai 72,51Nilai	7.952.661.000,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10Dokumen		10 Dokumen	42.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	10Dokumen	63.042.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	7 Dokumen	51.465.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	3 Laporan	11.577.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12Bulan			12 Bulan	6.027.351.018,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12Bulan	6.438.941.000,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan			56 Orang/bulan	6.008.253.176,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	56 Orang/bulan	6.418.236.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen			6 Dokumen	19.097.842,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	6 Dokumen	20.705.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun	1Kegiatan			1 Kegiatan	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	1Kegiatan	105.000.000,00	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang			56 Orang	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	56 Orang	105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12Bulan			12 Bulan	583.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12Bulan	552.521.000,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	4 Paket	16.538.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	185.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12 Paket	174.791.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	125.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12 Paket	105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12 Dokumen	3.859.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket			6 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	6 Paket	21.833.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235 Laporan			235 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	235 Laporan	220.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37Unit			37 Unit	332.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	37Unit	273.826.000,00	
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			20 Unit	90.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	20 Unit	121.826.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	130.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	10 Unit	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit			8 Unit	112.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bandung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	7 Unit	82.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12Bulan			12 Bulan	219.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12Bulan	226.393.000,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12 Laporan	4.631.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	105.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12 Laporan	106.943.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	12 Laporan	114.819.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	99Unit		99 Unit	330.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	99Unit	292.938.000,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit			36 Unit	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	36 Unit	110.250.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit			49 Unit	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	49 Unit	82.688.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	1 Unit	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
138	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD dengan APBD	100 Persen		100 Persen	935.000.000,00						100 Persen	953.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	11Dokumen			2 Dokumen	725.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	4Dokumen	737.000.000,00	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	12 Berita Acara			2 Berita Acara	320.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	2 Berita Acara	325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen			2 Dokumen	405.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	412.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah	5Dokumen			1 Dokumen	105.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	1Dokumen	108.000.000,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen			1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	1 Dokumen	108.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	10Dokumen			2 Dokumen	105.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	2Dokumen	108.000.000,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan			2 Laporan	105.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda dan Stakeholder terkait	2 Laporan	108.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen			2 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah	2 Dokumen	98.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	35Urusan		8 Urusan	205.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen	8Urusan	208.000.000,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen			2 Dokumen	205.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	208.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.280.000.000,00							1.197.000.000,00	
140	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	100 %		100 %	1.280.000.000,00						100 %	1.197.000.000,00	
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	50Dokumen		10 Dokumen	825.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, Perguran Tinggi dan Masyarakat Kabupaten Kebumen	10Dokumen	755.000.000,00	
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
						Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	15 Laporan			3 Laporan	825.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, Perguran Tinggi dan Masyarakat Kabupaten Kebumen	3 Laporan	755.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Persentase fasilitasi pengembangan invensi dan inovasi	100Persentase		100 %	455.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen	100Persentase	442.000.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual														
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	10 Laporan			2 Laporan	130.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen	2 Laporan	128.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2 Laporan			2 Laporan	215.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen	2 Laporan	207.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah														
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	2 Laporan			2 Laporan	110.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen	2 Laporan	107.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						757.591.777.809,00							711.906.033.766,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						757.591.777.809,00							711.906.033.766,00	
	5	02				KEUANGAN						757.591.777.809,00							711.906.033.766,00	
141	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BPKPD IKM BPKPD	-			70,03 Nilai 90,40 Nilai	21.076.593.940,00						-	21.530.596.144,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	101.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	100.420.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	31.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		30.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	18.808.955.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	19.225.326.813,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			92 Orang/bulan	18.603.955.755,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		19.016.226.813,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			12 Dokumen	205.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		209.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-			92 Orang	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	101.600.000,00	
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			92 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		101.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	489.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	495.180.000,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		18.360.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3 Unit	86.638.185,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		359.149.331,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	85.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	BPKPD Kabupaten Kebumen		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah	-			12 Bulan	611.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	643.220.000,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		5.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	310.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		316.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	296.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		321.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			62 Unit	675.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	500.700.000,00	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					40 Unit	240.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		241.640.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		59.060.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	375.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	BPKPD Kabupaten Kebumen		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
142	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	95,40 %			95,40 %	730.673.183.869,00						95,40 %	684.483.421.763,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	-			11 Dokumen	862.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen	-	874.440.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					41 Laporan	95.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		94.540.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait															
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					22 Dokumen	82.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		81.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan															
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					3 Dokumen	108.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		110.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					100 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			20 Dokumen	394.700.003,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen	-	400.234.000,00		
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran															
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					17 Laporan	79.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		80.580.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	19.189.911.466,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		20.254.395.963,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
143	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan	100 %		100 %	992.000.000,00						100 %	981.240.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	-		13 Dokumen	992.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen	-	981.240.000,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga													
							Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		85.680.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			3 Laporan	314.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		304.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			4 Laporan	398.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		390.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			5 Dokumen	116.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		118.320.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			100 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
144	5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100 %			100 %	4.850.000.000,00						100 %	4.910.775.859,00	
	5	02	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jenis Pajak Daerah yang dikelola	-			8 Jenis	4.850.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen	-	4.910.775.859,00	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah															
								Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kabupaten Kebumen		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	890.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah															
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		40.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah															
								Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		102.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah															
								Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1398345 Dokumen	380.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		387.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					8 Dokumen	3.100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		3.179.575.859,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		102.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					4 Laporan	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		59.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						11.585.044.085,00							35.432.115.457,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.585.044.085,00							35.432.115.457,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						8.857.844.085,00							32.692.115.457,00	
145	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BKPSDM IKM BKPSDM	-			70,03 Nilai 90,40 Nilai	7.428.113.085,00						-	31.224.840.457,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-			10 Dokumen	37.578.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen	-	39.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		29.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	9.578.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	6.781.864.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen	-	30.556.599.915,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	6.761.864.550,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		30.535.599.915,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	22.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		23.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.150.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	23.100.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	-			10 Unit	42.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil - Negara Kabupaten Kebumen		44.415.000,00	
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							0				10 0	42.300.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		44.415.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan penunjang Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	196.022.535,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil - Negara Kabupaten Kebumen		201.325.542,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.100.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		2.205.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	155.572.535,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		160.001.542,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	38.350.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		39.119.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		47 Unit	197.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen	-	202.000.000,00	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			23 Unit	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		116.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			22 Unit	37.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		38.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
146	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata capaian 5 layanan kepegawaian	91 Persen		91 Persen	1.429.731.000,00						91 Persen	1.467.275.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			3 kegiatan	734.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil - Negara Kabupaten Kebumen		757.700.000,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	560.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi														
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				610 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		35.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan mutasi dan promosi yang dilaksanakan	-			2 Kegiatan	550.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil - Negara Kabupaten Kebumen		557.000.000,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		157.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				6 Dokumen	395.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	-		2 Kegiatan	54.231.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen	-	56.500.000,00	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				150 Orang	35.225.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		36.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional													
						Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				200 Orang	19.006.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-			2 Kegiatan	91.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen	-	96.075.000,00	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				6 Dokumen	41.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		43.575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		52.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
147	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	80,05 Persen			80,05 Persen	2.727.200.000,00						80,05 Persen	2.740.000.000,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-			220 ASN	170.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen	-	175.000.000,00	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				220 Orang	170.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-			5 Laporan	2.557.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen	-	2.565.000.000,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	2.557.200.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen		2.565.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT DAERAH					17.100.604.879,00								17.420.837.230,00
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					17.100.604.879,00							17.420.837.230,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH					17.100.604.879,00							17.420.837.230,00	
148	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah IKM Inspektorat Daerah	-		70,03 Nilai 90,4 Nilai	13.419.704.879,00						-	13.704.937.230,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		10 Dokumen	47.679.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	51.000.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	31.540.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		34.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	16.139.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		17.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	9.366.638.879,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	9.647.592.230,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	9.350.406.780,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		9.631.307.793,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	16.232.099,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		16.284.437,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah admnistrasi kepegawaian perangkat daerah	-			73 Orang	829.065.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	874.065.000,00	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				73 Orang	829.065.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		874.065.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			12 Bulan	246.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	284.250.000,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		18.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		15.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		15.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		6.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		7.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	152.228.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	80.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		82.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		73 Unit	445.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	317.000.000,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	175.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
149	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	85,50 %			85,50 %	2.450.400.000,00						85,50 %	2.471.400.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelenggaraan pengawasan internal	-			105 Laporan	1.900.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes	-	1.915.400.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					20 Laporan	275.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		278.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					20 Laporan	275.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		278.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja					4 Laporan	249.400.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		249.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					15 Laporan	275.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		278.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				40 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		253.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	176.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		179.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	-		27 Laporan	550.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, ASN, Masyarakat Kab.Kebumen	-	556.000.000,00		
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian														
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, ASN, Masyarakat Kab.Kebumen		256.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				25 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, ASN, Masyarakat Kab.Kebumen		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
150	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Penambahan Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK	1 unit kerja		1 unit kerja	1.230.500.000,00						1 unit kerja	1.244.500.000,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	-			4 Dokumen	30.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	32.500.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	15.500.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		17.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	-			24 OPD	1.200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, Kecamatan, Masyarakat	-	1.212.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				24 perangkat daerah	275.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, Kecamatan, Masyarakat		277.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				13 perangkat daerah	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, Kecamatan, Masyarakat		151.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Kegiatan	575.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah, Kecamatan, Masyarakat		580.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Kecamatan Ayah		24.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	43.209.139,00			-	-		Kecamatan Ayah	-	43.217.202,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Kecamatan Ayah		2.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Kecamatan Ayah		20.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Kecamatan Ayah		5.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Kecamatan Ayah		2.400.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	8.549.139,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Kecamatan Ayah		8.557.202,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	3.260.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Kecamatan Ayah		3.260.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Kecamatan Ayah		2.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-		3 Unit	35.000.000,00			-	-		Kecamatan Ayah	-	35.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Kecamatan Ayah		35.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	75.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Kecamatan Ayah	-	75.200.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	200.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		200.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		40.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		35.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			39 Unit	59.000.000,00			-	-	Kecamatan Ayah	-	59.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Ayah		40.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Ayah		4.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Ayah		15.000.000,00	KECAMATAN AYAH
152	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-			100 Persen	14.967.000,00						-	14.967.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	-			100 Persen	14.967.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah	-	14.967.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	14.967.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		14.967.000,00	KECAMATAN AYAH
153	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Ayah	-			100 Persen	32.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Kegiatan	32.000.000,00			-	-	Kecamatan Ayah	-	30.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	32.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Ayah		30.000.000,00	KECAMATAN AYAH
154	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	118.620.000,00						-	118.620.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	-			100 Persen	118.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah	-	118.620.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		25.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		2.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		5.000.000,00	KECAMATAN AYAH		
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		7.000.000,00	KECAMATAN AYAH		
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		20.000.000,00	KECAMATAN AYAH		
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					3 Dokumen	49.620.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		49.620.000,00	KECAMATAN AYAH		
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ayah		10.000.000,00	KECAMATAN AYAH		
						KECAMATAN BUAYAN						2.721.858.665,00								2.805.061.509,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.721.858.665,00								2.805.061.509,00		
	7	01				KECAMATAN						2.721.858.665,00								2.805.061.509,00		
155	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-			72,55 Nilai	2.597.487.683,00						-	2.650.826.526,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	3.770.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN	-	4.033.000,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.345.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		2.530.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.425.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		1.503.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	2.439.213.012,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN	-	2.513.728.338,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.432.003.012,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		2.506.518.338,00	KECAMATAN BUAYAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9 Dokumen	7.210.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		7.210.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	24.852.671,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN	-	32.746.188,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		2.525.000,00	KECAMATAN BUAYAN

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				67 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Buayan		0,00	KECAMATAN BUAYAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	58.520.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN	-	68.687.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	770.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		1.100.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	29.543.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		37.740.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	28.207.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		29.847.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-		20 Unit	31.132.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN	-	31.632.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	27.152.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		27.652.000,00	KECAMATAN BUAYAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.980.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		3.980.000,00	KECAMATAN BUAYAN
156	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-			100 Persen	9.122.000,00						-	14.722.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			4 Jenis	9.122.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN	-	14.722.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	9.122.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		14.722.000,00	KECAMATAN BUAYAN
157	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 %	20.850.000,00						-	26.605.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 kegiatan	20.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN	-	26.605.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				55 Orang	20.850.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		26.605.000,00	KECAMATAN BUAYAN

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	3.583.000,00	Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN BUAYAN		5.959.000,00	KECAMATAN BUAYAN		
					KECAMATAN PURING						2.420.424.444,00							2.491.986.172,00			
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						2.420.424.444,00								2.491.986.172,00		
	7	01			KECAMATAN						2.420.424.444,00								2.491.986.172,00		
159	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Puring	-			70,03 Indeks	2.262.108.702,00						-	2.328.279.282,00			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			15 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-	10.000.000,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		5.000.000,00	KECAMATAN PURING		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		5.000.000,00	KECAMATAN PURING		
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	2.052.098.702,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-	2.115.319.282,00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.048.098.702,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		2.110.319.282,00	KECAMATAN PURING
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		5.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	42.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-	44.260.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		2.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		20.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		4.500.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		1.700.000,00	KECAMATAN PURING	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	5.250.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		6.250.000,00	KECAMATAN PURING	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	4.810.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		4.810.000,00	KECAMATAN PURING	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		5.000.000,00	KECAMATAN PURING	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			2 Unit	53.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-	57.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	53.300.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		57.000.000,00	KECAMATAN PURING	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	46.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-	43.700.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		500.000,00	KECAMATAN PURING
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		18.000.000,00	KECAMATAN PURING
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	27.700.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		25.200.000,00	KECAMATAN PURING
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			10 Unit	57.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-	58.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	26.500.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		26.500.000,00	KECAMATAN PURING
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	250.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		500.000,00	KECAMATAN PURING
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		6.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		25.000.000,00	KECAMATAN PURING
160	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Puring Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	-			100 % 90,40 %	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Puring	-			9 Jenis 100 %	8.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-	8.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				100 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		8.000.000,00	KECAMATAN PURING
161	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 %	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Kegiatan	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-	20.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring			20.000.000,00	KECAMATAN PURING
162	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	-			100 %	130.315.742,00						-		135.706.890,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	130.315.742,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring	-		135.706.890,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					16 Dokumen	21.700.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring			20.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	200.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring			3.200.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa															
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring			2.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		7.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		15.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				5 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		33.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5 Dokumen	48.415.742,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		49.506.890,00	KECAMATAN PURING
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Puring, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Puring		6.000.000,00	KECAMATAN PURING
						KECAMATAN PETANAHAN					2.730.498.065,00								2.809.071.727,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.730.498.065,00								2.809.071.727,00
	7	01				KECAMATAN					2.730.498.065,00								2.809.071.727,00
163	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Petanahan	-		70,03 Nilai	2.598.998.065,00						-	2.669.071.727,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	9.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		5.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		4.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	2.378.967.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	2.451.682.095,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.367.967.100,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		2.439.394.922,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		12.287.173,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	44.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	47.789.632,00	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		2.789.632,00	KECAMATAN PETANAHAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	13.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		14.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	7.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		7.600.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		3.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		13.700.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		5.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		1.700.000,00	KECAMATAN PETANAHAN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah	-		4 unit	50.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	65.500.000,00		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		15.500.000,00	KECAMATAN PETANAHAN	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		20.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		30.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	-		12 bulan	56.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	34.100.000,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		600.000,00	KECAMATAN PETANAHAN	

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					2 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		21.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
166	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa di Kecamatan Petanahan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	-			100 Persen	100.500.000,00						-	107.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	-			100 %	100.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	107.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					13 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		30.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		3.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					2 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		15.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		10.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN				
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		21.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN				
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		21.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN				
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					2 Laporan	6.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Petanahan		7.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN				
						KECAMATAN KLIRONG											2.397.220.222,00				2.469.554.191,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											2.397.220.222,00				2.469.554.191,00			
	7	01				KECAMATAN											2.397.220.222,00				2.469.554.191,00			
167	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-			70,03 Nilai	2.264.652.222,00						-	2.312.554.191,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			70.03 Persen	9.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong	-	13.000.000,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		7.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		6.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		70.03 Persen	2.040.029.687,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong	-	2.104.157.007,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						0				15 0	2.032.029.687,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		2.094.157.007,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		10.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	-		70.03 Persen	49.690.535,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong	-	57.397.184,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		4.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		22.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		9.897.184,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		2.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	9.190.535,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		11.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		5.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		3.500.000,00	KECAMATAN KLIRONG

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	57.432.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		11.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		70.03 Persen	46.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong	-	51.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		30.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		2.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		10.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		9.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
168	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-		100 Persen	6.568.000,00						-	14.000.000,00	

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					24 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		19.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG	
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa															
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		3.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					2 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		18.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		12.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG	
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif															
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		25.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG	
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa															
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					8 Dokumen	38.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		40.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Klirong		12.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG					
					KECAMATAN BULUSPESANTREN						2.320.792.438,00							2.344.967.662,00						
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						2.320.792.438,00								2.344.967.662,00					
	7	01			KECAMATAN						2.320.792.438,00								2.344.967.662,00					
171	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Buluspesantren	-		70,03 Nilai	2.202.553.487,00							-	2.232.951.719,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	-		11 Dokumen	3.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en	-	3.500.000,00						
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		1.500.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN					
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		2.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN					
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan	-		12 Bulan	1.981.893.487,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en	-	2.042.291.719,00						
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.974.393.487,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		2.034.791.719,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		7.500.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	59.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en	-	59.500.000,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		2.500.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		30.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		5.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		3.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		12.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		5.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		2.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan pemerintah Daerah	-	1 Paket	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		0,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		45.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		6.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		15.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
172	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren	-		100 Persen	7.500.000,00						-	7.500.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		9 Laporan	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en	-	7.500.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	7.500.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		7.500.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
173	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Buluspesantren	-		100 Persen	18.000.000,00						-	18.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	-			2 Kegiatan	18.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en	-	18.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantr en, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		18.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
174	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa Di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	92.738.951,00					-	86.515.943,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			8 Kegiatan	92.738.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en	-	86.515.943,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantr en, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		8.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantr en, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		3.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		0,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN			
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		15.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN			
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		20.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN			
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	36.738.951,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		35.515.943,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN			
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Kecamatan Buluspesantr en		5.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN			
						KECAMATAN AMBAL					2.373.500.218,00									2.391.003.643,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.373.500.218,00							2.391.003.643,00		
	7	01			KECAMATAN						2.373.500.218,00								2.391.003.643,00	
175	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Ambal	-			70,03 Nilai	2.210.389.218,00						-		2.221.138.243,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			undefined Dokumen undefined Dokumen	10.962.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa	-	10.500.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	5.644.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		5.250.000,00	KECAMATAN AMBAL	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.318.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		5.250.000,00	KECAMATAN AMBAL	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan	-			100 %	2.046.912.901,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa	-	2.082.994.778,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.032.525.901,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		2.067.244.778,00	KECAMATAN AMBAL	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	14.387.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		15.750.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	38.241.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa	-	35.848.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		1.050.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		12.600.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	6.010.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		6.310.500,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		2.625.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		8.400.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		2.520.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.231.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		2.342.500,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	9.500.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	9.500.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-		12 bulan	45.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa	-	46.347.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	550.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		577.500,00	KECAMATAN AMBAL

1	2				3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	17.440.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		18.312.000,00	KECAMATAN AMBAL	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	27.950.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		27.457.500,00	KECAMATAN AMBAL	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-				undefined Unit	58.833.317,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa	-	45.448.465,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	41.633.317,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		32.638.465,00	KECAMATAN AMBAL	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara					4 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		0,00	KECAMATAN AMBAL	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					9 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		5.250.000,00	KECAMATAN AMBAL	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

[illegible]

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				12 Dokumen	27.668.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		29.051.400,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	42.250.000,00	Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Ambal dan Desa		44.362.500,00	KECAMATAN AMBAL
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						0				0 0	6.134.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Ambal dan Desa		6.440.700,00	KECAMATAN AMBAL
						KECAMATAN MIRIT					2.452.606.356,00								2.520.655.505,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.452.606.356,00								2.520.655.505,00
	7	01				KECAMATAN					2.452.606.356,00								2.520.655.505,00
179	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Mirit	-		70,03 Nilai	2.311.606.356,00						-	2.377.655.505,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		11 Dokumen	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		3.000.000,00	KECAMATAN MIRIT

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Dokumen Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		3.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	2.112.804.735,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	2.176.067.686,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang Orang/bulan	2.095.804.735,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2.159.067.686,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		17.000.000,00	KECAMATAN MIRIT

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	53.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit	-	53.900.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		1.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	28.400.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		28.400.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		4.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	500.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		500.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		15.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	3.200.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		4.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		1.000.000,00	KECAMATAN MIRIT

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			8 Unit 8 Unit	42.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	kecamatan mirit	-	40.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	kecamatan mirit		10.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		30.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan 12 Bulan	51.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit	-	54.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		500.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		21.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	33.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		33.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			21 Unit	46.201.621,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	47.187.819,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	35.201.621,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		36.187.819,00	KECAMATAN MIRIT	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5.000.000,00	KECAMATAN MIRIT	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		6.000.000,00	KECAMATAN MIRIT	
180	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-			100 Persen	16.000.000,00						-		16.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			100 Persen	16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit	-		16.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan															

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		15.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		4.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		3.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		10.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		12.000.000,00	KECAMATAN MIRIT	
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		18.000.000,00	KECAMATAN MIRIT	
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		36.000.000,00	KECAMATAN MIRIT	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	kecamatan mirit		11.000.000,00	KECAMATAN MIRIT	
						KECAMATAN BONOROWO					2.543.091.988,00								2.618.309.140,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.543.091.988,00								2.618.309.140,00	
	7	01				KECAMATAN					2.543.091.988,00								2.618.309.140,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
183	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Bonorowo	-			70.55 Nilai	2.444.206.988,00					-	2.513.764.140,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-			11 Dokumen	6.223.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo	-	6.223.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.223.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		4.223.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		2.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	-			12 Bulan	2.276.109.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo	-	2.345.977.140,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16/12 Orang/bulan	2.264.101.936,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		2.333.969.041,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	12.008.052,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		12.008.099,00	KECAMATAN BONOROWO	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	28.760.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo	-	28.760.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		2.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	13.760.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		13.760.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		2.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		1.400.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		5.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		3.600.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		1.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			19 Unit	25.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo	-	25.420.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					33 Unit	4.970.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		4.970.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	12.030.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		12.030.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8.420.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		8.420.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	27.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo	-	27.200.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	300.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		400.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.900.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Bonorowo		21.900.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.900.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		4.900.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-		19 Unit	80.594.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo	-	80.184.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	56.007.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		56.007.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	500.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		500.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		5.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	19.087.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo		18.677.000,00	KECAMATAN BONOROWO
184	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang tepat waktu di Kecamatan Bonorowo	-			100 Persen	5.340.000,00						-	5.340.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat..	-			11 Laporan	5.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa	-	5.340.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	5.340.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		5.340.000,00	KECAMATAN BONOROWO
185	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 %	16.295.000,00						-	16.295.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Kegiatan	16.295.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa	-	16.295.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia					75 Orang	16.295.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		16.295.000,00	KECAMATAN BONOROWO
186	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa di Kecamatan Bonorowo yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	77.250.000,00						-	82.910.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	-			25 Dokumen	77.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa	-	82.910.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					11 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		12.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		8.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		2.500.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		8.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		4.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	15.500.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		13.160.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		30.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	5.250.000,00	Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Bonorowo dan Desa		5.250.000,00	KECAMATAN BONOROWO
						KECAMATAN PREMBUN												2.548.927.384,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												2.548.927.384,00	
	7	01				KECAMATAN												2.548.927.384,00	

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
187	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Prembun	-			70,03 Nilai	2.440.927.384,00						-	2.515.112.423,00	
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		2.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		4.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	2.228.752.364,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	2.296.481.362,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.218.752.364,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		2.286.481.362,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	56.875.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	53.281.061,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.500.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		7.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.875.020,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		9.221.061,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		1.560.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		15.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		5.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 bulan Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		5.500.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			4 Unit	59.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	62.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	37.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		40.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		12.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	43.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	45.550.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		550.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		37.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		8.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			10 Unit	46.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	51.800.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					24 Unit	29.800.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		29.800.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		7.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		15.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
188	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-			100 Persentase	7.000.000,00						-	8.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			100 % Persentase	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	8.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		8.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
189	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Indeks Kondusivitas Kecamatan Prembun	-			100 % 100 Persen	14.000.000,00						-	15.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Kegiatan	14.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	15.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-			100 % Orang	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		15.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
190	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	-			100 Persentase	87.000.000,00						-	84.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	-			100 % Persentase	87.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun	-	84.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-			13 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		7.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					9 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					9 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		12.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		6.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					3 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		19.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					6 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		20.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					13 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Prembun		10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN	
						KECAMATAN PADURESO						2.443.271.415,00							2.500.025.862,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.443.271.415,00								2.500.025.862,00	
	7	01				KECAMATAN						2.443.271.415,00								2.500.025.862,00	
191	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Padureso	-			70,03 Nilai	2.324.271.415,00							-	2.375.425.862,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso	-	16.000.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		11.000.000,00	KECAMATAN PADURESO	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		5.000.000,00	KECAMATAN PADURESO	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	2.091.538.472,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso	-	2.154.911.055,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.073.538.472,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		2.136.911.055,00	KECAMATAN PADURESO	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		18.000.000,00	KECAMATAN PADURESO	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	67.232.943,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso	-	71.214.807,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.500.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		6.800.000,00	KECAMATAN PADURESO	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	23.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		24.000.000,00	KECAMATAN PADURESO	

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	24.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		2.800.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		40.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-		12 bulan	33.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso	-	34.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		2.500.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		25.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		7.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-		15 Unit	53.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso	-	56.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		53.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		3.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		0,00	KECAMATAN PADURESO
192	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Padureso	-		91,15 Persen	8.000.000,00						-	9.600.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-		91,15 Persen	8.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso	-	9.600.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		9.600.000,00	KECAMATAN PADURESO
193	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-		100 Persen	13.000.000,00						-	13.000.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 kegiatan	13.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso	-	13.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		13.000.000,00	KECAMATAN PADURESO	
194	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	-			100 Persen	98.000.000,00						-	102.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	98.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso	-	102.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		16.000.000,00	KECAMATAN PADURESO	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Padureso		3.000.000,00	KECAMATAN PADURESO	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		9.500.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		5.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 bulan	2.070.179.327,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun	-	2.136.569.943,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.061.179.327,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		2.124.569.943,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		12.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	37.128.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun	-	54.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		3.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	16.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		18.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2.428.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		2.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		16.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		3.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		12.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	49.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun	-	55.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		38.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		5.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN	
196	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-		100 Persen	10.000.000,00						-	18.000.000,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangu n	-	18.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangu n		18.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
197	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 Persen	18.572.000,00						-	18.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Kegiatan	18.572.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangu n	-	18.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	18.572.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangu n		18.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
198	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan	-			100 Persen	127.883.000,00						-	147.383.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	127.883.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangu n	-	147.383.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendavagunaan Aset Desa														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				19 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		38.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		10.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				100 Dokumen	25.383.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		25.383.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				100 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		38.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				100 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		31.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				100 Laporan	4.500.000,00	Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kutowinangun		5.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
						KECAMATAN ALIAN												2.512.473.377,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												2.512.473.377,00	
	7	01				KECAMATAN												2.512.473.377,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
199	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Alian	-			70,03 Nilai	2.380.973.377,00						-	2.434.661.075,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	11.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian	-	13.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		6.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		7.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	2.188.194.230,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian	-	2.255.107.676,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.171.194.230,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		2.237.107.676,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		18.000.000,00	KECAMATAN ALIAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	48.779.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian	-	57.053.399,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		6.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		20.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4.500.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		6.053.399,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		1.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		16.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.479.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		5.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		2.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-		18 Unit	26.000.147,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kecamatan Alian	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	5.000.147,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kecamatan Alian		0,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	21.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		6.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	37.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kecamatan Alian	-	38.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kecamatan Alian		1.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		26.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		11.000.000,00	KECAMATAN ALIAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			24 Unit	69.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian	-	64.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	44.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		44.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	5.500.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		5.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		15.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
200	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-			100 Persen	11.000.000,00					-	11.000.000,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			100 Persen	11.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian	-	11.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		11.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	0,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Alian		0,00	KECAMATAN ALIAN
201	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Alian	-			100 Persen	21.000.000,00					-	21.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 kegiatan	21.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian	-	21.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	21.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		21.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
202	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan	-			100 Persen	99.500.000,00					-	108.500.000,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	-			16 Desa	99.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian	-	108.500.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		14.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		3.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		16.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		25.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5 Dokumen	45.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		46.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Alian, Krakal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Alian		4.500.000,00	KECAMATAN ALIAN				
					KECAMATAN PONCOWARNO						2.330.402.085,00							2.385.314.570,00					
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						2.330.402.085,00								2.385.314.570,00				
	7	01			KECAMATAN						2.330.402.085,00								2.385.314.570,00				
203	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Poncowarno	-			70,03 Nilai	2.197.739.085,00						-	2.246.648.944,00					
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			6 Dokumen	9.156.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	9.156.000,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																4.700.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.700.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		4.700.000,00					
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																4.456.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4.456.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		4.456.000,00					
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 bulan	2.013.312.070,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	2.073.889.052,00					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							0				0 0	1.993.312.070,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		2.053.889.052,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		20.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			12 bulan	39.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	39.250.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.750.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		1.750.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		15.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		6.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		2.500.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		10.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		4.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		9 unit	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	40.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		40.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		12 bulan	45.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	45.350.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	550.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		550.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		39.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.800.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		5.800.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-		21 unit	50.671.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	39.003.892,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	23.503.892,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		23.503.892,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		3.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24.167.123,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		12.500.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
204	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	-		100 Persen	7.800.000,00						-	8.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat poncowarno	-			100 %	7.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	8.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7.800.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		8.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO	
205	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 Persen	16.733.000,00					-	17.500.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakanya Pembinaan Wawasan Kebangsaan	-			1 kali	16.733.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	17.500.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	16.733.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		17.500.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO	
206	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	-			100 Persen	108.130.000,00					-	113.165.626,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	108.130.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	-	113.165.626,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendavagunaan Aset Desa														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		14.650.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	10.820.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		11.470.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	15.400.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		16.174.169,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	18.900.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		19.550.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	39.010.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		40.671.457,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen		10.650.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
						KECAMATAN KEBUMEN					7.338.437.614,00							7.540.735.832,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					7.338.437.614,00							7.540.735.832,00	
	7	01				KECAMATAN					7.338.437.614,00							7.540.735.832,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Kebumen	-			70,03 Nilai	7.126.187.614,00						-	7.328.485.832,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	12.725.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Kebumen	-	12.725.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.810.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Kecamatan Kebumen		6.810.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.915.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		5.915.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	6.901.421.013,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen	-	7.114.324.590,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	6.889.421.013,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		7.102.324.590,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		12.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	3.950.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		3.950.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		1.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		14 Unit	42.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen	-	40.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		4.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	32.900.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		26.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.100.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		10.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	66.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen	-	66.950.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	550.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		550.000,00	KECAMATAN KEBUMEN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		27.600.000,00	KECAMATAN KEBUMEN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	38.800.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		38.800.000,00	KECAMATAN KEBUMEN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			22 Unit	58.941.601,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen	-	50.336.242,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	27.431.601,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		27.826.242,00	KECAMATAN KEBUMEN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		6.500.000,00	KECAMATAN KEBUMEN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.010.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		16.010.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
208	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			92,2 Persen	26.000.000,00						-	26.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			92,2 %	26.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen	-	26.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	26.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		26.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
209	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 Persen	32.000.000,00						-	32.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Kegiatan	32.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen	-	32.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	32.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		32.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		60.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	7.700.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kebumen		7.700.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
						KELURAHAN PANJER						1.124.734.696,00							836.018.896,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.124.734.696,00							836.018.896,00	
	7	01				KECAMATAN						1.124.734.696,00							836.018.896,00	
211	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer	-			92,2 %	153.921.200,00						-	144.292.304,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun	-			6 Dokumen	2.536.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer	-	2.544.304,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		1.900.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	636.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		644.304,00	KELURAHAN PANJER

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				12 Bulan	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer	-		10.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer			10.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				12 Bulan	23.427.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer	-		24.290.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	1.427.200,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer			1.200.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer			3.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer			3.500.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		3.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	11.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		12.590.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		1.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		30 Unit	27.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer	-	17.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				26 Unit	27.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		17.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	-		12 Bulan	66.238.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer	-	66.238.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		9.000.000,00	KELURAHAN PANJER

1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57.238.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		57.238.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		17 Unit	24.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer	-	24.220.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	9.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		9.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	5.220.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		5.220.000,00	KELURAHAN PANJER
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		10.000.000,00	KELURAHAN PANJER
212	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjer	-		100 %	970.813.496,00						-	691.726.592,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kelurahan Panjer	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Wilayah Kelurahan Panjer	-		4 Kegiatan	970.813.496,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer	-	691.726.592,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	16.300.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		16.300.000,00	KELURAHAN PANJER		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	699.294.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		418.762.000,00	KELURAHAN PANJER		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	254.019.496,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		255.464.592,00	KELURAHAN PANJER		
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan															
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	1.200.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Panjer		1.200.000,00	KELURAHAN PANJER		
						KELURAHAN SELANG					773.604.061,00							722.793.696,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					773.604.061,00								722.793.696,00		
	7	01				KECAMATAN					773.604.061,00									722.793.696,00	
213	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	-		92,2 %	116.900.000,00						-		107.146.800,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	-		6 dokumen	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang	-		4.500.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang		3.500.000,00	KELURAHAN SELANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang		1.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 bulan	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang	-	11.500.000,00	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang		11.500.000,00	KELURAHAN SELANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 bulan	21.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang	-	16.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang		2.500.000,00	KELURAHAN SELANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang		4.000.000,00	KELURAHAN SELANG

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Keurahan Selang		5.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	-		92,2 %	12.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Selang	-	12.646.800,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	1.100.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Selang		1.096.800,00	KELURAHAN SELANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	9.300.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Selang		9.300.000,00	KELURAHAN SELANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Selang		2.250.000,00	KELURAHAN SELANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	-		92,2 %	44.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Selang	-	40.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Selang		9.000.000,00	KELURAHAN SELANG

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Selang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Selang		4.500.000,00	KELURAHAN SELANG				
					KELURAHAN TAMANWINANGUN						1.494.100.664,00							789.684.434,00					
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						1.494.100.664,00								789.684.434,00				
	7	01			KECAMATAN						1.494.100.664,00								789.684.434,00				
215	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun	-			92,2 %	163.100.664,00						-	158.684.434,00					
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	-			6 dokumen	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun	-	6.000.000,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																3.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun							
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																3.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun							
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun	-	14.000.000,00					
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		14.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	32.912.664,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun	-	33.496.434,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		2.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		8.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		7.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		1.800.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12.112.664,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		12.696.434,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		1.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		1.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		3 Unit	17.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun	-	12.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		7.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		5.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah	-		12 Bulan	71.188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun	-	71.188.000,00	

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		10.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN		
216	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan Tamanwinangun	-			100 %	1.331.000.000,00					-	631.000.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kelurahan Tamanwinangun	-			4 Kegiatan	1.331.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun	-	631.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		17.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	1.025.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		325.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	286.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		286.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN		
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan															
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Tamanwinangun		3.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN		
						KELURAHAN KEBUMEN					810.009.750,00									818.457.271,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					810.009.750,00									818.457.271,00	

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		3.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		5.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		5.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		1.500.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		10.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		3.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		18.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		30.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		20 Unit	53.141.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen	-	53.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		8.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.141.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		5.500.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		40.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
218	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Kebumen	-		100 %	628.551.800,00						-	628.657.271,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kelurahan Kebumen	-			4 Kegiatan	628.551.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen	-	628.657.271,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	22.600.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		22.600.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	333.660.800,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		333.660.800,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	264.561.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		264.666.471,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	7.730.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Kebumen		7.730.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
						KELURAHAN BUMIREJO						915.561.481,00								752.717.600,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						915.561.481,00								752.717.600,00
	7	01				KECAMATAN						915.561.481,00								752.717.600,00
219	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo	-			100 % 92,2 %	125.793.481,00						-	131.449.600,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	-			6 Dokumen	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo	-	4.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		3.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		1.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	16.181.481,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo	-	13.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.181.481,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		13.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	27.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo	-	27.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		2.500.000,00	KELURAHAN BUMIREJO

1	2				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		8.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		3.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		2.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					3 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		10.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		1.500.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				2 Unit	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo	-	15.837.600,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		15.837.600,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	41.772.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo	-	41.772.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	800.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		800.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	11.472.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		11.472.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						0				2 0	29.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		29.500.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	29.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo	-	29.840.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	9.750.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		9.750.000,00	KELURAHAN BUMIREJO	

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Bumirejo		3.500.000,00	KELURAHAN BUMIREJO					
					KECAMATAN PEJAGOAN						2.622.118.493,00							3.765.011.400,00						
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						2.622.118.493,00							3.765.011.400,00						
	7	01			KECAMATAN						2.622.118.493,00							3.765.011.400,00						
221	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Pejagoan	-			70,50	2.510.033.493,00						-	2.579.230.400,00						
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	4.736.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan	-	4.736.878,00						
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2.696.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		2.696.878,00	KECAMATAN PEJAGOAN					
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.040.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		2.040.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN					
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	2.313.549.109,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan	-	2.383.872.320,00						
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16 Orang/bulan	2.305.226.109,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		2.375.549.320,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	8.323.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		8.323.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	17.554.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan	-	17.554.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	2.254.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		2.254.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		6.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		1.500.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		1.800.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		2.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		3.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		1.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-		4 unit	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan	-	40.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		40.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		12 bulan	77.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan	-	71.320.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	8.120.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		8.120.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		10.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	13.900.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		13.900.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5 Dokumen	35.400.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		35.400.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	7.667.000,00	Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Pejagoan		7.667.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
						KECAMATAN SRUWENG					2.838.585.559,00								2.940.651.413,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.838.585.559,00								2.940.651.413,00
	7	01				KECAMATAN					2.838.585.559,00								2.940.651.413,00
225	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Sruweng	-		70,50 Nilai	2.724.866.559,00						-	2.814.161.653,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				1 Urusan	5.370.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah	-		5.370.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							0					7 0	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah			2.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	3.370.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Perangkat Daerah			3.370.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	-				12 Bulan	2.549.512.027,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-		2.626.670.006,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21 Orang/bulan	2.546.012.027,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-			2.623.170.006,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-			3.500.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				12 Bulan 12 Bulan	35.023.985,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan sruweng	-		39.049.985,00	

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2.974.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan sruweng		3.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Unit	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng	-	25.000.002,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		1,00	KECAMATAN SRUWENG	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		1,00	KECAMATAN SRUWENG	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		25.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan 12 Bulan	76.960.547,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng	-	73.071.660,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		2.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG	

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	21.224.979,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		27.536.092,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	54.535.568,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		43.535.568,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	41 Unit 41 Unit	28.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng.	-	45.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	19.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng.		30.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
						Jumlah Mebel yang Dipelihara			2 Unit	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng.		5.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng.		5.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		12.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG		
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					2 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		27.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG		
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					5 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		30.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG		
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					2 Laporan	5.219.000,00	Kab. Kebumen, Sruweng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sruweng		5.719.000,00	KECAMATAN SRUWENG		
						KECAMATAN ADIMULYO						2.655.013.122,00								2.731.243.085,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.655.013.122,00								2.731.243.085,00		
	7	01				KECAMATAN						2.655.013.122,00								2.731.243.085,00		
229	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Adimulyo	-			70,03 Nilai	2.489.574.122,00						-	2.557.902.085,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	13.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	13.000.000,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		6.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	6.500.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		6.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	2.296.389.733,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	2.363.220.235,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.281.389.733,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		2.350.220.235,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		13.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Adminstrasi Umun Perangkat Daerah	-		12 Bulan	30.673.389,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	30.656.850,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.200.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		2.200.000,00	KECAMATAN ADIMULYO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.400.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		14.400.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.507.389,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		1.490.850,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		1.440.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	4.800.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		4.800.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3.200.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		3.200.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	3.126.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		3.126.000,00	KECAMATAN ADIMULYO

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			2 Unit	38.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	38.600.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	38.600.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		38.600.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	53.476.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	55.250.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		1.650.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.820.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		22.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30.156.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		31.600.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			14 Unit	57.435.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	57.175.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	35.435.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		35.675.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		0,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		8.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		13.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
230	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-		100 Persen	11.000.000,00						-	11.500.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-		100 persen	11.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	11.500.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		11.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
231	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 Persen	23.039.000,00						-	24.191.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 Persen	23.039.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	24.191.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	23.039.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		24.191.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
232	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	-			100 Persen	131.400.000,00						-	137.650.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	131.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo	-	137.650.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		31.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	12.700.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		13.300.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		13.650.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					4 Dokumen	30.500.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		32.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		36.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					2 Laporan	10.200.000,00	Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Adimulyo		11.200.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
						KECAMATAN KUWARASAN						2.402.909.044,00							2.440.409.538,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.402.909.044,00							2.440.409.538,00	
	7	01				KECAMATAN						2.402.909.044,00							2.440.409.538,00	
233	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP KECAMATAN KUWARASAN	-			69,85 Nilai	2.263.555.044,00						-	2.300.409.538,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	4.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan	-	4.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		2.500.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		2.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Dareah	-		12 Bulan	2.075.181.331,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan	-	2.137.423.198,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2.069.181.331,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		2.132.423.198,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		5.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	22.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan	-	24.160.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		2.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		7.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		4.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		2.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		7.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1.160.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		1.160.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		1.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			4 Unit	37.705.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan	-	30.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	37.705.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		30.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	82.213.713,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan	-	57.326.340,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	250.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		250.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.225.713,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		27.144.340,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56.738.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		29.932.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			31 Unit	41.295.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan	-	47.000.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		35.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6.500.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		4.500.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4.795.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		7.500.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
234	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-			100 Persen	12.500.000,00						-	12.500.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			100 Persen	12.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan	-	12.500.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	12.500.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		12.500.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
235	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 Persen	20.000.000,00						-	25.000.000,00	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Kegiatan	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan	-	25.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Kuwarasan		25.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN	
236	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes	-			100 Persen	106.854.000,00						-	102.500.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 persen	106.854.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	-	102.500.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				22 Dokumen	12.270.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		10.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		6.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		7.500.000,00	KECAMATAN KUWARASAN		
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	36.876.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		37.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN		
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5 Dokumen	36.708.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		37.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN		
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kuwarasan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri		5.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN		
						KECAMATAN ROWOKELE						2.472.580.743,00										
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.472.580.743,00										
	7	01				KECAMATAN						2.472.580.743,00										
237	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Rowokele	-			70,03 Nilai	2.347.474.743,00						-	2.408.439.931,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	4.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele	-	4.000.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		2.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		2.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	2.064.823.271,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele	-	2.130.510.797,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2.054.703.271,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		2.117.510.797,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	10.120.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		13.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	39.819.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele	-	45.060.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		2.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		15.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.759.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		6.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		2.100.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		15.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.960.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		2.960.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		2.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		10.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	0,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		0,00	KECAMATAN ROWOKELE
239	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Rowokele	-			100 Persen	20.655.000,00						-	20.655.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 kegiatan	20.655.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele	-	20.655.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	20.655.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		20.655.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
240	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan	-			100 Persen	94.451.000,00						-	94.476.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	-			100 Persen	94.451.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele	-	94.476.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		18.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	3.975.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		4.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	5.523.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		5.523.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	20.953.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		20.953.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		40.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Rowokele		6.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
						KECAMATAN SEMPOR												2.725.540.328,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												2.725.540.328,00	
	7	01				KECAMATAN												2.725.540.328,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
241	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Sempor	-			71,90 Nilai	2.573.340.328,00					-	2.640.056.720,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			11 Dokumen	5.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor	-	6.200.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.450.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		4.600.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		1.600.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 Bulan	2.320.592.197,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor	-	2.391.225.391,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.308.892.197,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		2.379.325.391,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	11.700.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		11.900.000,00	KECAMATAN SEMPOR

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		2.400.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		2.200.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		6 Unit	32.500.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor	-	24.200.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	4.050.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		3.200.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	28.450.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		21.000.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-		12 Bulan	97.338.131,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor	-	99.831.329,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	750.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		800.000,00	KECAMATAN SEMPOR

1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.588.131,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		41.031.329,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57.000.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		58.000.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-		28 Unit	83.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor	-	83.900.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	54.000.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		56.400.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		6.200.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		13.000.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		8.300.000,00	KECAMATAN SEMPOR
242	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Sempor	-		100 Persen	13.100.000,00						-	13.300.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-		100 %	13.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor	-	13.300.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	13.100.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		13.300.000,00	KECAMATAN SEMPOR
243	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Sempor	-		100 Persen	24.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen)	-		2 Kegiatan	24.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor	-	25.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				140 Orang	24.000.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		25.000.000,00	KECAMATAN SEMPOR

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				16 Laporan	4.900.000,00	Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Sempor		5.000.000,00	KECAMATAN SEMPOR					
					KECAMATAN GOMBONG						4.235.032.423,00							4.363.232.514,00						
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						4.235.032.423,00								4.363.232.514,00					
	7	01			KECAMATAN						4.235.032.423,00								4.363.232.514,00					
245	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Gombang	-			70.03 Nilai	4.111.347.423,00						-	4.236.199.514,00						
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombang	-	6.000.000,00						
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	4.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombang		4.000.000,00						
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombang		2.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG					
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	3.876.256.423,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombang	-	3.996.337.514,00						
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					28 Orang/bulan	3.858.256.365,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		3.976.336.910,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	18.000.058,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		20.000.604,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	49.230.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong	-	49.980.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		3.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	28.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		28.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	4.500.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		5.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		2.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		9.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1.480.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		1.480.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.250.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		1.500.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-		3 Unit	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong	-	30.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		30.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		6.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		22.500.000,00	KECAMATAN GOMBONG
246	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gombong	-			100 Persen	9.000.000,00						-	9.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			100 %	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong	-	9.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		9.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
247	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong	-			100 %	11.885.000,00						-	12.533.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Keg	11.885.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong	-	12.533.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1 Dokumen	8.300.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		8.500.000,00	KECAMATAN GOMBONG		
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					3 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		22.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG		
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					12 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		36.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG		
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Gombong		4.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG		
						KELURAHAN GOMBONG						869.756.063,00								880.496.765,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						869.756.063,00								880.496.765,00		
	7	01				KECAMATAN						869.756.063,00								880.496.765,00		
249	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Gombong	-			90,4 indeks	99.606.000,00						-	110.532.744,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong	-	1.020.000,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	700.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		750.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	250.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		270.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 bulan	13.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong	-	14.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		14.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 bulan	20.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong	-	20.900.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	900.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		900.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		3.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG

1	2				3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Gombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombang			3.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Gombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombang			2.700.000,00	KELURAHAN GOMBONG	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	11.300.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Gombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombang			11.300.000,00	KELURAHAN GOMBONG	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				2 Unit	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombang	-		21.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Gombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombang			21.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				12 bulan	17.356.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombang	-		16.112.744,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		1.200.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		13.756.744,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.156.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		1.156.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			14 Unit	37.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong	-	37.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		6.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6.100.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		6.500.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		25.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan Gombong	-		100 %	770.150.063,00						-	769.964.021,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gombong	-		4 kegiatan	770.150.063,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong	-	769.964.021,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12 Lembaga Kemasyarakatan	10.506.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		11.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	628.526.063,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		628.614.021,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokmas / Ormas	130.818.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		130.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan													
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	300.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Gombong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kelurahan Gombong		350.000,00	KELURAHAN GOMBONG
						KELURAHAN WONOKRIYO												679.898.742,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												679.898.742,00	
	7	01				KECAMATAN												679.898.742,00	

[illegible]

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kelurahan Wonokiryo		10.650.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	25.671.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kelurahan Wonokiryo	-	24.281.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.250.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kelurahan Wonokiryo		1.250.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kelurahan Wonokiryo		12.410.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.421.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kelurahan Wonokiryo		10.621.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			11 Unit	39.322.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kelurahan Wonokiryo	-	32.488.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	13.008.000,00	Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kelurahan Wonokiryo		10.100.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO	

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	956.000,00	Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kelurahan Wonokiryo		1.004.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
						KECAMATAN KARANGANYAR						6.251.180.274,00							6.430.472.291,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						6.251.180.274,00							6.430.472.291,00	
	7	01				KECAMATAN						6.251.180.274,00							6.430.472.291,00	
253	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan Karanganyar	-			70,03 Nilai	6.141.980.274,00						-	6.321.272.291,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	13.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar	-	13.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		8.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		5.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	5.909.580.274,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar	-	6.088.872.291,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	5.894.187.694,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		6.073.346.179,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	15.392.580,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		15.526.112,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	67.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar	-	67.900.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		7.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		12.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		2.400.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		25.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		3.500.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		3.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			8 Unit/Tahun	45.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kecamatan Karanganyar	-	45.000.000,00	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kecamatan Karanganyar		45.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	53.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar	-	53.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		1.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							0				0 0	20.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		20.500.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	32.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		32.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			24 unit	53.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar	-	53.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	29.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		29.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		12.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		12.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
254	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	-			100 %	11.000.000,00					-	11.000.000,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			9 Jenis	11.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar	-	11.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		11.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
255	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	-			100 %	15.000.000,00					-	15.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase gangguan ketertiban yang ditangani	-			100 %	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar	-	15.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				55 Orang	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
256	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDES sesuai Ketentuan	-			100 Persen	83.200.000,00					-	83.200.000,00		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDES sesuai Ketentuan	-			100 %	83.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar	-	83.200.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		13.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		2.200.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		17.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR	
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa															
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				11 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		30.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karanganyar		6.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR	
						KELURAHAN JATILUHUR						656.495.160,00								692.432.659,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						656.495.160,00								692.432.659,00	
	7	01				KECAMATAN						656.495.160,00								692.432.659,00	
257	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	-			100 %	114.528.000,00						-	125.750.000,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR	-	3.650.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		2.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.260.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		1.650.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	4.432.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR	-	5.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	4.432.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		5.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	34.807.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR	-	35.950.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		1.650.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.900.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		15.800.000,00	KELURAHAN JATILUHUR

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.395.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		2.500.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.680.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		2.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12.094.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		13.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	238.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		1.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-			3 Unit	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR	-	15.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		15.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN JATILUHUR		1.500.000,00	KELURAHAN JATILUHUR		
					KELURAHAN PLARANGAN						861.117.210,00							699.160.389,00			
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						861.117.210,00							699.160.389,00			
	7	01			KECAMATAN						861.117.210,00							699.160.389,00			
259	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	-			100 %	133.370.210,00						-	136.094.389,00			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	1.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN	-	1.250.000,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	750.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		750.000,00	KELURAHAN PLARANGAN		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		500.000,00	KELURAHAN PLARANGAN		
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN	-	6.500.000,00			
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		6.500.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	27.942.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN	-	29.442.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		2.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	9.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		10.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan					1 Paket	5.042.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		5.042.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		2.400.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		9.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		1.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-		5 Unit	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN	-	16.400.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		16.400.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	41.519.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN	-	42.800.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.600.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		1.800.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		11.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					17 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		12.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3 Unit	627.247.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		455.566.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					12 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		95.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan														
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					3 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PLARANGAN		500.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
						KELURAHAN PANJATAN						661.152.652,00							625.162.672,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						661.152.652,00							625.162.672,00	
	7	01				KECAMATAN						661.152.652,00							625.162.672,00	
261	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	-			100 %	145.842.052,00						-	95.350.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	4.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN	-	4.700.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		3.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.700.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		1.700.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		100 %	12.492.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN	-	12.500.000,00	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12.492.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		12.500.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		7 pakett	15.851.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN	-	16.100.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.750.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		3.800.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		4.100.000,00	KELURAHAN PANJATAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.001.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		2.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		2.600.000,00	KELURAHAN PANJATAN	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		3.600.000,00	KELURAHAN PANJATAN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			7 unit	76.699.052,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN	-	20.350.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	52.907.052,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		6.100.000,00	KELURAHAN PANJATAN	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	23.792.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		14.250.000,00	KELURAHAN PANJATAN	

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6 Unit	5.600.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		6.100.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11.500.000,00	KELURAHAN PANJATAN
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	-			83,00 %	515.310.600,00						-	529.812.672,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	6.213.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN	-	6.500.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					18 Lembaga Kemasyarakatan	6.213.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		6.500.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-			35 Pokmas / Ormas 100 %	509.097.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN	-	523.312.672,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					11 Unit	429.102.600,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		443.312.672,00	KELURAHAN PANJATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdavaan Masvarakat di Kelurahan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	79.995.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		80.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
						KELURAHAN KARANGANYAR						672.505.120,00							682.908.677,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						672.505.120,00							682.908.677,00	
	7	01				KECAMATAN						672.505.120,00							682.908.677,00	
263	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-		-	151.434.000,00						-	102.534.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		-	6.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							0				80 0	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1.500.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	9.434.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		9.434.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2.500.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		6.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			8 unit	69.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN	-	20.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		5.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	64.500.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KELURAHAN PANJATAN		15.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
264	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	521.071.120,00						-	580.374.677,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	521.071.120,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	580.374.677,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							0				6 0	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		7.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	2.113.115.255,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM	-	2.178.759.452,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16 Orang/bulan	2.095.687.302,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		2.160.890.777,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4 Dokumen	17.427.953,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		17.868.675,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	32.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM	-	32.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		8.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		3.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		3.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		3.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		3.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	57.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		57.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	56.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM	-	56.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		40.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		10.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
266	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-			100 Persen	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di tangani	-			100 %	18.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM	-	18.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		10.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		10.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		15.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		39.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KARANGGAYAM		8.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
						KECAMATAN SADANG												2.491.875.300,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												2.491.875.300,00	
	7	01				KECAMATAN												2.491.875.300,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
269	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Sadang	-			71,03 Nilai	2.377.555.300,00						-	2.443.581.315,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang	-	7.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		4.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		3.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-		12 Bulan	2.185.274.523,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang	-	2.251.849.187,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.180.274.523,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		2.246.849.187,00	KECAMATAN SADANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		5.000.000,00	KECAMATAN SADANG

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		3.500.000,00	KECAMATAN SADANG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.400.777,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		1.495.128,00	KECAMATAN SADANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	-		6 Unit	49.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang	-	41.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		8.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	44.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		33.500.000,00	KECAMATAN SADANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	-		12 Bulan	47.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang	-	47.037.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		1.000.000,00	KECAMATAN SADANG

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		16.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		12.000.000,00	KECAMATAN SADANG
270	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Sadang	-			100 Persen	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			100 Persen	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang	-	5.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang		5.000.000,00	KECAMATAN SADANG
271	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan Sadang	-			100 Persen	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Sadang	-			2 Kegiatan	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kantor Kecamatan Sadang	-	15.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														

[illegible]

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-		12 bulan	2.294.242.084,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung	-	2.363.666.966,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20/12 Orang/bulan	2.288.242.084,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		2.357.666.966,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		6.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-		12 bulan	44.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung	-	45.800.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	16.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		17.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		7.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		1.800.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		10.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		2.500.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsambung		2.500.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan barang milik daerah	-			2 Unit	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsamb ung	-	15	20.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsamb ung			20.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 bulan	68.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kecamatan Karangsamb ung	-		68.496.663,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kecamatan Karangsamb ung			1.800.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsamb ung			30.196.663,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	36.500.000,00	Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Kecamatan Karangsamb ung			36.500.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG

[illegible]

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsembung		5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsembung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsembung		5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsembung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsembung		5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				6 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsembung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsembung		20.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsembung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsembung		45.510.024,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Karangsembung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Karangsembung		5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												8.035.339.000,00	
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												8.035.339.000,00	
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												8.035.339.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
277	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			72.90 Nilai 90,40 Nilai	4.342.997.209,00					-	4.475.004.000,00		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			10 Dokumen	22.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	-	24.000.000,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 bulan	3.926.460.882,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-	-	4.044.642.328,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3.913.460.882,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		4.031.642.328,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

[illegible]

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					17 Unit	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		76.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					8 Unit	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	35.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-		36.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
278	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	77 persen			77 persen	504.000.000,00						77 persen	515.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2kegiatan			2 kegiatan	504.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-	2kegiatan	515.000.000,00	
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	504.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	-	1 Dokumen	515.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
279	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	77 persen			77 persen	2.292.288.000,00						77 persen	2.298.288.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2kegiatan			2 kegiatan	2.292.288.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	2kegiatan	2.298.288.000,00	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang			100 Orang	2.292.288.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	200 Orang	2.298.288.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
280	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	74 persen			74 persen	67.000.000,00						74 persen	72.000.000,00	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2kegiatan			2 kegiatan	67.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	2kegiatan	72.000.000,00	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	236 Orang				100 Orang	67.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	236 Orang	72.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
281	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman terhadap Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	77 persen			77 persen	207.047.000,00						77 persen	171.047.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3kegiatan			3 kegiatan	207.047.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	3kegiatan	171.047.000,00	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang				100 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	250 Orang	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang				100 Orang	127.047.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	200 Orang	86.047.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	390 Orang			100 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	390 Orang	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan			1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kembaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	1 Laporan	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen			4 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	Masyarakat di Kabupaten Kebumen	4 Dokumen	197.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H										3.365.045.254.336,00								3.240.637.807.094,00

BUPATI KEBUMEN,

 ttd.

 LILIS NURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

**DAFTAR USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026**

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
1	Abdul Rouf	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pembangunan Sarpras Pagar Masjid Surya AL Ikhlas 1 Paket 25.000.000	Dusun Kesingan Desa Peneket RT 003 RW 002 Kec Ambal Kab Kebumen Jateng, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Lembaga	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2	Abdul Rouf	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Rehabilitasi Masjid Nurul Huda Desa Sidomulyo RT RW 004/001 Kec Ambal Kab Kebumen (1 Unit) sebesar 25.000.000	Masjid Nurul Huda Desa Sidomulyo RT RW 004/001 Kec Ambal Kab Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
3	Abdul Rouf	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa 100.000.000	Desa Peneket Dukuh Kesingan Rt/rw 03/03 dan Jenengan Rt/Rw 04/03 Kec Ambal Kab Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
4	Abdul Rouf	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa 200.000.000	Desa Wirogaten Pedukuhan Pesutren rt rw 04/03 Mirit Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
5	Abdul Rouf	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehab Ruang Kelas MI Maarif Wirogaten 50 juta	Desa Wirogaten Pedukuhan Karang Tengah RT RW 006/002 Kecamatan Mirit Kab Kebumen Jawa Tengah, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.000.000	1	Paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
6	Abdul Rouf	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Rabat Beton Jalan Desa Ambarwinangun RT 001 RW 00 Kecamatan Ambal Kab. Kebumen sebesar 100 juta	Desa Abarwinangun RT/RW 001/005 Kec Ambal Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
7	Abdul Rouf	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Rabat Beton Jalan Poros Desa Kertodeso RT 001 RW 002 Kec Mirit Kebumen 150.000.000	Kertodeso RT 001 RW 002 Kec Mirit Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
8	Abdul Rouf	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pemenuhan Sarpras (Pagar) Masjid Nurul Huda Surobayan Rp. 25.000.000	Masjid Nurul Huda Surobayan RT 003 RW 001Ambal Kebumen, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
9	Abdul Rouf	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rp. 150.000.000	Desa Merden RT 03 RW 01 Kec. Padureso Kab Kebumen Jawa Tengah, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
10	Abdul Rouf	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Talud Poros Desa Desa Bener Kulon Pedukuhan Juru Tengah RT 01 DAN 04 RW 01 Keca. Ambal, Kab. Kebumen sebesar Rp. 100.000.000	Desa Bener Kulon Pedukuhan Juru Tengah RT 01 DAN 04 RW 01 Keca. Ambal, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
11	Abdul Rouf	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	PEMBANGUNAN SARPAS Masjid Jami Al Washilatul Huda Kaibon Petangkuran Rp.25.000.000	Masjid Jami Al Washilatul Huda Desa Kaibon Petangkuran RT/RW 002/002Kec.Ambal, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
12	Abdul Rouf	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	REHABILITASI MASJID JAMI KAUMAN PEKUTAN SENILAI Rp. 25.000.000	MASJID JAMI KAUMAN PEKUTAN DESA PEKUTAN DUKUH KARANGANYAR RT/RW 004/ 001 KEC. MIRIT KEBUMEN, KAB. KEBUMEN, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
13	Abdul Rouf	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pemenuhan Sarpas Masjid At Thoyyibah Wirogaten Rp. 25.000.000	Desa Wirogaten RT 07 RW 03 Kec. Mirit Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
14	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	BKK Infrastruktur Pembangunan Rabat Beton Jalan Dukuh Luwung RT 01/ RW 02 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Luwung RT 01/ RW 02 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
15	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Luwung RT 01 RW 02 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Luwung RT 01 RW 02 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
16	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Lurakarsa RT 01 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Lurakarsa RT 01 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
17	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Pembangunan Rabat Beton Jalan RT02/RW01 Dukuh Margomulyo Kidul Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele sebesar Rp 80.000.000,00	RT02/RW01 Dukuh Margomulyo Kidul Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	80.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
18	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Keungan Khusus Infrastruktur Pembangunan Rabat Beton Jalan RT04/RW04 Dukuh Mulyosari Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele sebesar Rp 100.000.000,00	RT04/RW04 Dukuh Mulyosari Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
19	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Lurakarsa RT 03 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Lurakarsa RT 03 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
20	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Lurakarsa RT 04 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Lurakarsa RT 04 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
21	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Lurakarsa RT 09 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Lurakarsa RT 09 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
22	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Lurakarsa RT 10 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Lurakarsa RT 10 RW 06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
23	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Kedunggondang RT 04 RW 01 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 4.539.400	Dukuh Kedunggondang RT 04 RW 01 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.539.400			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
24	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Kedunggondang RT 05 RW 01 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Kedunggondang RT 05 RW 01 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
25	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Kedunggondang RT 08 RW 01 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 4.539.400	Dukuh Kedunggondang RT 08 RW 01 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.539.400			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
26	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Kemanjuran RT 01 RW 03 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Kemanjuran RT 01 RW 03 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
27	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Kemanjuran RT 06 RW 03 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Kemanjuran RT 06 RW 03 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
28	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Kemanjuran RT 05 RW 03 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Kemanjuran RT 05 RW 03 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
29	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Giyanti RT 04 RW 02 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Giyanti RT 04 RW 02 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
30	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Giyanti RT 05 RW 02 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Giyanti RT 05 RW 02 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
31	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atas nama Bapak Tugiman Dukuh Wagiaer RT 004 RW 004 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan sebesar Rp 20.000.000,00	Dukuh Wagiaer RT 004 RW 004 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan , Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	20.000.000			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
32	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Pembangunan Rabat Beton Jalan Dukuh Slirap RT 01 RW 04 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele sebesar Rp 90.000.000,00	Dukuh Slirap RT 01 RW 04 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	141.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
33	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pembangunan/Rehab Masjid Al-Maanar Dukuh Temetes RT 03 RW 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele sebesar Rp 25.000.000,00	Dukuh Temetes RT 03 RW 15 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
34	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Infrastruktur Pembangunan Rabat Beton dukuh Kalimangir RW07 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Kalimangir RW07 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
35	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Hibah alat-alat kesenian Gamelan Kelompok Sanggah Berkah Putra Mahameru Dukuh Cuntelan RT 03 RW 04 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Cuntelan RT 03 RW 04 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
36	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Kalibatur RT 03 RW 05 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Kalibatur RT 03 RW 05 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
37	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan Semen Dukuh Kalibatur RT 03 RW 04 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele sebesar Rp 9.078.800,00	Dukuh Kalibatur RT 03 RW 04 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.896.800			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
38	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Pengaspalan Jalan Dukuh Kebonagung RT01/RW01 Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Kebonagung RT01/RW01 Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
39	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kebumen membutuhkan bantuan matras ketebalan 5 cm, body protector silat, dan patching sebesar Rp 50.000.000,00	Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
40	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	BKK infrastruktur pengaspalan jalan Dukuh Luwung RT02/RW01 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele sebesar Rp 79.000.000,00	Dukuh Luwung RT02/RW01 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	79.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
41	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pokdakan Margo Manunggaljati Dukuh Jatisawit RT 001 RW 001 Desa Mergosono Kecamatan Buayan membutuhkan bantuan perikanan berupa kolam bundar, bibit ikan lele dan pakan sebesar Rp 19.000.000,00	Dukuh Jatisawit RT 001 RW 001 Desa Mergosono Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.000.000			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
42	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bantuan UMKM Individu atas nama Ary Saputro dengan usaha produksi kopi kemasan di Desa Rowokele Pdudutan rt 003 rw 003 kecamatan Rowokele senilai 50 juta	Desa Rowokele Pdudutan rt 003 rw 003 kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
43	Adhitya Whisnu Bayu Aji, ST	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bantuan UMKM individu atas nama Windi Wulandari dengan usaha air kemasan galon (R.O) di Desa Rowokele (Pedudutan rt 003 rw 002 Kecamatan Rowokele senilai 50 Juta	Desa Rowokele (Pedudutan rt003 rw 002 Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000			Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
44	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bank Sampah "Resik Mulya" di RW 2 Desa Wajasari, membutuhkan kendaraan roda 3 dengan biaya sebesar Rp 40.000.000	Bank Sampah "Resik Mulya" RW 2 Desa Wajasari, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000	1	Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
45	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Kelompok kesenian Kuda Lumping Langgeng Sari Budoyo Desa Wajasari, Kec. Adimulyo membutuhkan bantuan alat kesenian dengan biaya sebesar Rp 10.000.000 untuk melestarikan kesenian tradisional	RT 1 RW 3 Desa Wajasari, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
46	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Belum memadainya sarpras Masjid Baitul Muttaqin, perlu dilakukan renovasi dengan biaya sebesar Rp 25.000.000	RT 2 RW 1 Dukuh Wanatawang, Desa Arjomulyo, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	20.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
47	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan desa rusak sehingga perlu adanya pembangunan berupa rabat beton di RT 2 RW 2 Desa Temanggal dengan biaya sebesar Rp 100.000.000	Jalan desa RT 2 RW 2 Desa Temanggal, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Unit	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
48	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Belum optimalnya kelompok peternakan, membutuhkan bantuan ternak kambing betina sejumlah 20 ekor untuk KTT Jaya Lestari dengan biaya sebesar Rp 60.000.000 agar bisa lebih berkembang	RT 1 RW 2 Desa Purwosari, Kec. Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	60.000.000	20	ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
49	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Belum optimalnya kelompok peternakan, membutuhkan bantuan ternak kambing betina sejumlah 25 ekor untuk KTT Budi Rukun dengan biaya sebesar Rp Rp 75.000.000	Jalan Pantai Suwuk RT 3 RW 4, Desa Tambakmulyo, Kec. Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	60.000.000	25	ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
50	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak sehingga perlu adanya pembangunan jalan poros desa berupa rabat beton di RT 1 RW 1 Desa Kedaleman Kulon dengan biaya sebesar Rp 100.000.000	RT 1 RW 1 Desa Kedaleman Kulon, Kec. Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
51	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Belum memadainya sarpras Mushola Darul Iman, perlu dilakukan renovasi dengan biaya sebesar Rp 30.000.000	RT 2 RW 2 Dukuh Karang Sari, Desa Krandegan, Kec. Puring, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
52	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan desa rusak sehingga perlu adanya pembangunan berupa rabat beton di Jalan Panembahan RT 4 RW 1 Desa Kuwarasan dengan biaya sebesar Rp 50.000.000	Jalan Panembahan RT 4 RW 1 Desa Kuwarasan, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
53	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan desa Madureso perlu rabat beton Rp. 75 Jt. Pemerintah Desa siap dana sharing 20%	Jalan RT 1 RW 3 Dukuh Pangkalan Desa Madureso Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
54	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Belum memadainya sarpras TPQ Nurul Ummah dan pembangunannya belum selesai 100% sehingga membutuhkan biaya sebesar Rp 60.000.000 untuk melanjutkan pembangunan	RT 4 RW 2 Dukuh Kepuh, Desa Trikarso, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
55	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KTT Kotama Desa Mangunweni memerlukan bantuan bebek petelur 500 ekor Rp. 70.000.000	KTT Kotama Desa Mangunweni Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	70.000.000	1	Paket	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
56	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan di Desa Bonjok rusak perlu pembangunan berupa rabat beton dengan biaya sebesar Rp 100.000.000	RT 03 RW 02 Dukuh Bendasari, Desa Bonjok, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
57	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan di Desa Giwangretno rusak perlu pembangunan berupa pengaspalan dengan biaya sebesar Rp 100.000.000	RT 02 RW 05 Dukuh Jimbun, Desa Giwangretno, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
58	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan di Desa Sidoagung rusak perlu pembangunan berupa rabat beton dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000	RT 01 RW 05 Dukuh Sipendok, Desa Sidoagung, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
59	Agung Nur Wahid, S.H.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan desa kalitengah rusak memerlukan pengaspalan Rp. 100 Juta, Pemerintah Desa siap dana sharing minimal 20%	Desa Kalitengah RW 08 Kec. Gombong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
60	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Dk Beji Desa Clapar RT 06 RW 01 Kecamatan Karanggayam	Dk Beji Desa Clapar RT 06 RW 01 Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
61	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Dk Kemit RT 06 RW 01 Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar	Dk Kemit RT 06 RW 01 Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
62	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Dk Tedor Cilik RT 01 RW 09 Desa Kalibejl Kecamatan Karanganyar	Dk Tedor Cilik RT 01 RW 09 Desa Kalibejl Kecamatan Karanganyar, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.447.280	60	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
63	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan Dk Paksen RT 01 RW 02 Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar	Dk Paksen RT 01 RW 02 Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.447.280	60	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
64	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan Dk Pengilon RT 05 RW 01 Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar	Dk Pengilon RT 05 RW 01 Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.447.280	60	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
65	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Dk Siwalak RT 01 RW 01 Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar	Dk Siwalak RT 01 RW 01 Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.619.590	62	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
66	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Dk Purwosari RT 02 RW 06 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam	Dk Purwosari RT 02 RW 06 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
67	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Dk Kaliwuluh RT 02 RW 01 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam	Dk Kaliwuluh RT 02 RW 01 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.618.200	150	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
68	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan Dk Jatiwera RT 03 RW 05 Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam	Dk Jatiwera RT 03 RW 05 Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800	100	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
69	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Desa Karangkemiri RW 03 Kecamatan Karanganyar	Desa Karangkemiri RW 03 Kecamatan Karanganyar, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.440.620	115	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
70	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dk Kaliwuluh RT 06 RW 01 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam (400 m x 2,5 m) Rp.200.000.000	Dk Kaliwuluh RT 06 RW 01 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
71	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan di Dk Purwodadi RT 01 RW 03 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam (panjang 240 m, lebar 2,5 m) Rp. 100.000.000	Dk Purwodadi RT 01 RW 03 Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
72	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan di Dk Munthuk RT 01 RW 03 Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam (panjang 365 m, lebar 2,5 m) Rp. 150.000.000	Dk Munthuk RT 01 RW 03 Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
73	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan RT 02 RW 06 Desa Kalitengah Kecamatan Gombong (panjang 110 m lebar 2,5 m) Rp. 50.000.000	Gang Warudoyong RT 02 RW 06 Desa Kalitengah Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
74	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Karangkemiri RT 01 RW 03 Kecamatan Karanganyar (150 m)Rp.75.000.000	Desa Karangkemiri RT 01 RW 03 Kecamatan Karanganyar , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
75	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Belum Optimalnya Gedung KB IT Al Hikmah Jl Kelurahan RT 08 RW 02 Desa Selokerto Kecamatan Sempor Dana Hibah Rehab Kelas Rp. 100.000.000	KB IT Al Hikmah Jl Kelurahan RT 08 RW 02 Desa Selokerto Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.000.000	1	Paket	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik PAUD
76	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan di Dk Kedondong Bawah RT 05 RW 04 Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam (panjang 110 m lebar 2,5 m) Rp.50.000.000	Dk Kedondong Bawah RT 05 RW 04 Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
77	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Belum Optimalnya Penyediaan Traktor di Kelompok Tani Puji Lestari Dk Entak RT 02 RW 01 Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Rp. 33.600.000	Kelompok Tani Puji Lestari Dk Entak RT 02 RW 01 Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	33.585.750	1	Unit	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
78	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan di Dk Kutosari RT 02 RW 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Rp.50.000.000	Dk Kutosari RT 02 RW 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
79	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Dk Karanggedang RT 06 RW 04 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam	Dk Karanggedang RT 06 RW 04 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800	100	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
80	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada Koperasi KJKS Bina Arta Mandiri Jalan Perlawanan No.43 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Rp.100.000.000	Koperasi KJKS Bina Arta Mandiri Jalan Perlawanan No.43 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000	1	Paket	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
81	Agus Supriyanto	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk jalan Aspal di RW 03 Desa Sampang Kecamatan Sempor Rp. 100.000.000	RW 03 Desa Sampang Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
82	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Nurul Ikhsan Dk. Karangpontang RT.03 RW.01 Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam, 25 Juta	Dk. Karangpontang RT.03 RW.01 Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
83	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Ruang Kelas Baru SD Negeri 3 Giritirto RT.02 RW.06 Dukuh Tedunan Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam, 60 Juta	RT.02/ RW.06 Dukuh Tedunan Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.000.000	1	Paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
84	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Alat Kesenian Kuda Lumping SEKAR BUDAYA LARAS Desa donorojo RT 04/03 Dukuh menganti, Kecamatan Sempor sebesar Rp.10.000.000	Desa donorojo RT 04/03 Dukuh menganti, Kecamatan Sempor , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
85	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Alat Kesenian Kuda Lumping BUDAYA Lestari Dukuh Kalikumbang Desa donorojo RT 01/04 , Kecamatan Sempor, Kebumen sebesar Rp.10.000.000	Dukuh Kalikumbang Desa donorojo RT 01/04 , Kecamatan Sempor, Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
86	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Alat Kesenian Rebana, Grup Seni Nurul Jabal Dukuh Kalikumbang RT.01/RW.04 Desa Donorojo Kecamatan Sempor Kebumen, sebesar Rp.10.000.000	Dukuh Kalikumbang RT.01/RW.04 Desa Donorojo Kecamatan Sempor Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
87	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Rehab Gereja Kristem Jawa Desa Giritirto kec Karanggyam Kab. Kebumen Rp.15.000.000	Desa Giritirto kec Karanggyam, Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
88	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Alat Kesenian Paguyuban Seni Kuda Kepang Wargo Budoyo Dk. Kaliputih rt. 10 rw.02 desa Donorojo Kecamatan Sempor Kebumen Sebesar Rp.10.000.000	Dk. Kaliputih rt. 10 rw.02 desa Donorojo Kecamatan Sempor Kebumen , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
89	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan uang alat kesenian GROUP REBANA AL-QODAR RT 005 RW 004 GUNUNG TUGEL KEDUNG WRINGIN Kec. Sempor Kebumen Sebesar Rp.10.000.000	RT 005 RW 004 GUNUNG TUGEL KEDUNG WRINGIN KECAMATAN SEMPOR KEBUMEN, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
90	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Alat Kesenian Group Rebana Al Istiqomah RW 03 Sidokangan Sidoharum RT.02/RW03 Kecamatan Sempor Kebumen sebesar Rp.10.000.000	Sidokangan Sidoharum RT.02/RW03 Kecamatan Sempor Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
91	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Krido Manggolo Laras Dukuh Cawangan RT 02 RW 02 Desa Kalirejo Kec. Karanggayam alat Kesenian Kuda Kepang/Kuda Lumping Bantuan Uang Alat Kesenian sebesar Rp. 10.000.000	Dukuh Cawangan RT 02 RW 02 Desa Kalirejo Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
92	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehab TK Pangeran Diponegoro 1 Giritirto, Desa Giritirto Kec. Karanggayam Rp. 20.000.000	Dukuh Lokidang, RT 03 RW 01 Desa Giritirto Kec. Karanggyam, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.000.000	1	paket	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
93	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cabang Olahraga Organisasi di bawah naungan KONI "Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina)" membutuhkan peralatan untuk latihan berupa (Ring, Sarung Tinju, Hand Wraps, Samsak, Bantalan tinju, dll) dan pembinaan atlet tinju. Jl. Ronggowarsito No.18, Sudagaran, Kedawung, Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54361 Rp. 50.000.000	Pertina. sekretariat, Gedung UPB Jl. Ronggowarsito No.18, Sudagaran, Kedawung, Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54361, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	40.000.000	1	paket	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
94	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Alat Kesenian Kuda Lumping Grup Seni TURONGGO MUDO KARANGJOHO SEMPOR RT 01 RW 03 Karangjoho Kec.Sempor Rp. 10.000.000	RT 01 RW 03 Desa Karangjoho Kec.Sempor, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
95	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehab TK Bina Bangsa Wonotirto Dk. Binangun RT 01 RW 02 Wonotirto Kec.Karanggayam Kab.Kebumen NPSN 69833833 Sebesar Rp.15.000.000	Dk. Binangun RT 01 RW 02 Desa Wonotirto Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.000.000	1	paket	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
96	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bantuan APE Luar TK Pertiwi 14.19.12 Dukuh Gajah Putih RT.04 RW.01 Desa Kalibening Kec. Karanggayam Kab. Kebumen NPSN:69833835 sebesar Rp.10.000.000	TK Pertiwi 14.19.12 Dukuh Gajah Putih RT.04 RW.01 Desa kalibening Kec. Karanggayam Kab. Kebumen NPSN:69833835 , Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
97	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Alat Kesenian Organisasi Seni Campursari Argo Bima Entertainment Dk. Kayu Pari RT 10 RW 03 Desa Logandu Kec. Karangsambung, Kebumen sebesar Rp. 10.000.000	Dk. Kayu Putih RT 10 RW 03 Desa Logandu Kec. Karangsambung, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
98	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Alat Kesenian Hadroh Alfatah Dk Kaliputih RT 11 RW 02 Desa Donorojo Kec. Sempor Kab. Kebumen sebesar Rp.10.000.000	Dk Kaliputih RT 11 RW 02 Desa Donorojo Kec. Sempor Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
99	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	PC IPNU Kabupaten Kebumen Jl.Kusuma No.96, Bumirejo, Kebumen, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311 sebesar Rp. 25.000.000	Jalan Kusuma No. 96 RT 02 RW 05 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
100	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Jl.Plipitan RT 03 RW 04 Jalur Tedunan Desa Giritirto Anggaran 100 jt	l.Plipitan RT 03 RW 04 Jalur Tedunan Desa Giritirto , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
101	Akhmad Sudiyo	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dukuh Trenggulun RT 003 RW 003 Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Sebesar 200 Juta	Dukuh Trenggulun RT 003 RW 003 Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
102	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Rabat Beton RT01/RW04 Penusupan Desa Kedungwringin Kec. Sempor Kebumen sebesar 120 juta	RT01/RW04 Penusupan Desa Kedungwringin Kec. Sempor Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	120.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
103	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan atau rehabilitasi Jalan rabat Beton Desa Kedungwringin Dukuh Gunungtugel RT 0/RW04 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen anggaran 200 Juta	Desa Kedungwringin Dukuh Gunungtugel RT 0/RW04 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
104	Akhmad Sudiyono	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Rehab Jembatan Dukuh Era Rt 02 Rw 02 Desa giritirto Kecamatan Karanggayam Kebumen anggaran 80jt	"Dukuh Era Rt 02 Rw 02 Desa giritirto Kec Karanggayam Kebumen, Kab. Kebumen" , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	80.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
105	Alim Gunawan	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan bantuan pengaspalan jalan untuk RT 04 RW 06 Desa Kenteng, Kec. Sempor sebesar Rp 150.000.000	RT 04 RW 06 Desa Kenteng, Kec. Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
106	Alim Gunawan	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan bantuan pengaspalan hotmix untuk RT 02 RW 02 Desa Pagebangan, Kec. Karanggayam sebesar Rp 150.000.000	RT 02 RW 02 Desa Pagebangan, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
107	Alim Gunawan	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan bantuan pengaspalan jalan untuk RW 04 Desa Sidoharum Kec. Sempor sebesar Rp 150.000.000	RW 04 Desa Sidoharum Kec. Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
108	Alim Gunawan	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Permohonan bantuan 5 ekor kambing Jantan dan 25 ekor kambing betina untuk KTT Sidolestari RT 04 RW 02 Dk. Kaliputih, Desa Sempor, Kec. Sempor sebesar Rp 100.000.000	KTT Sidolestari RT 04 RW 02 Dk. Kaliputih, Desa Sempor, Kec. Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000	30	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
109	Alim Gunawan	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan bantuan pengaspalan jalan untuk RT 02 RW 01 Desa Kalibej, Kec. Sempor sebesar Rp 150.000.000	RT 02 RW 01 Desa Kalibej, Kec. Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
110	Alim Gunawan	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan bantuan rabat beton untuk RT 05 RW 08 Desa Grenggeng, Kec. Karanganyar sebesar Rp 150.000.000	RT 02 RW 02 Desa Grenggeng, Kec. Karanganyar, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
111	Alim Gunawan	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan jalan untuk RT 01 RW 04 Desa Selokerto, Kec. Sempor sebesar Rp 150.000.000	RT 01 RW 04 Desa Selokerto, Kec. Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
112	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan Poros Desa Dukuh Petunggulan RT 005 RW 004 Desa Purbowangi - Jogomulya Kec. Buayan panjang 450 m lebar 2,5 m sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Petunggulan RT 005 RW 004 Desa Purbowangi - Jogomulya Kec. Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
113	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dukuh Pucung RT 003 RW 001 Desa Banyumudal Kec. Buayan sebesar Rp 150.000.000,00	Dukuh Pucung RT 003 RW 001 Desa Banyumudal Kec. Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
114	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pembangunan Masjid Al Huda Dukuh Kewunen RT 001 RW 003 Desa Sikayu Kec. Buayan sebesar Rp 15.000.000,00	Dukuh Kewunen RT 001 RW 003 Desa Sikayu Kec. Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
115	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pembangunan/Rehab Mushola Al Ikhlas Desa Rangkah RT 002 RW 005 Kec. Buayan sebesar Rp 25.000.000,00	Desa Rangkah RT 002 RW 005 Kec. Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
116	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Dukuh Combong RT 005 - RT 007 RW 001 Desa Jogomulyo Kec. Buayan sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Combong RT 005 - RT 007 RW 001 Desa Jogomulyo Kec. Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
117	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan RT 001 - RT 006 RW 003 Desa Jatiroto Kec. Buayan sebesar Rp 100.000.000,00	RT 001 - RT 006 RW 003 Desa Jatiroto Kec. Buayan , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
118	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/Peningkatan Jalan Dukuh Jurig RT 001 - RT 002 RW 002 Desa Nogoraji Kec. Buayan panjang 500 m lebar 2,5 m sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Jurig RT 001 - RT 002 RW 002 Desa Nogoraji Kec. Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
119	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Keuangan Sanggar Seni Karawitan "Samudra Budaya" Desa Karangduwur Kec. Ayah sebesar Rp 50.000.000,00	"Samudra Budaya" Desa Karangduwur Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
120	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Lingkungan Dukuh Jeblosan RT 001-RT 002 RW 005 Desa Sikayu Kec. Buayan sebesar Rp 20.000.000,00	Dukuh Jeblosan RT 001-RT 002 RW 005 Desa Sikayu Kec. Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
121	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa Dukuh Semende RT 002 RW 001 Desa Sikayu Kec. Buayan sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Semende RT 002 RW 001 Desa Sikayu Kec. Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
122	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa RT 004 - RT 005 RW 002 Desa Karangsari Kec. Buayan sebesar Rp 75.000.000,00	RT 004 - RT 005 RW 002 Desa Karangsari Kec. Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
123	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Desa Semampir RT 001 - RT 003 RW 001 Kec. Buayan sebesar Rp 135.000.000,00	Desa Semampir RT 001 - RT 003 RW 001 Kec. Buayan , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	135.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
124	Amin Lukmantoro	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Gelar Seni Budaya Wayang Kulit Desa Rogodono Kec. Buayan sebesar Rp 50.000.000,00	Desa Rogodono Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
125	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Rukun Dukuh Krajan RT 003 RW 002 Desa Kradenan Kec. Ambal membutuhkan bantuan kambing sebesar Rp 45.000.000,00	Dukuh Krajan RT 003 RW 002 Desa Kradenan Kec. Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	45.000.000			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
126	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Kauman RT 001 RW 005 Desa Ambarwinangun Kec. Ambal sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Kauman RT 001 RW 005 Desa Ambarwinangun Kec. Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
127	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton RT 001 RW 001 Desa Sidomulyo Kec. Ambal sebesar Rp 100.000.000,00	RT 001 RW 001 Desa Sidomulyo Kec. Ambal , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
128	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Group Rebana Al Hikmah RT 001 RW 004 Desa Sidorejo Kec. Ambal membutuhkan bantuan sebesar Rp 10.000.000,00	RT 001 RW 004 Desa Sidorejo Kec. Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
129	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani "Tani Usodo" RT 002 RW 001 Desa Sidorejo Kec. Ambal membutuhkan bantuan traktor sebesar Rp 33.585.750,00	RT 002 RW 001 Desa Sidorejo Kec. Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	33.585.750			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
130	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Hot Mix Dukuh Kutosari RT 001 RW 003 Desa Mangunranan Kec. Mirit sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Kutosari RT 001 RW 003 Desa Mangunranan Kec. Mirit , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
131	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Pejakunan Kulon RT 006 RW 004 Desa Mangunranan Kec, Mirit sebesar Rp 150.000.000,00	Dukuh Pejakunan Kulon RT 006 RW 004 Desa Mangunranan Kec, Mirit , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
132	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Hot Mix Dukuh Kertonolo RT 001 RW 004 Desa Pekutan Kec. Mirit sebesar Rp 200.000.000,00	Dukuh Kertonolo RT 001 RW 004 Desa Pekutan Kec. Mirit , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
133	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Manunggal RT 007 RW 001 Desa Wirogaten Kec. Mirit membutuhkan bantuan sapi dalam bentuk uang sebesar Rp 60.000.000,00	RT 007 RW 001 Desa Wirogaten Kec. Mirit , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	60.000.000			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
134	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pelatihan Kelompok UMKM Desa Wirogaten Kec. Mirit membutuhkan bantuan sebesar Rp 40.000.000,00	Desa Wirogaten Kec. Mirit , Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	40.000.000			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
135	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Bedahan Wetan RT 001 RW 001 Desa Mirit Kec. Mirit sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Bedahan Wetan RT 001 RW 001 Desa Mirit Kec. Mirit , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
136	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Siwuni RT 002 RW 003 Desa Patukrejo Kec. Mirit sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Siwuni RT 002 RW 003 Desa Patukrejo Kec. Mirit , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
137	Andy Risdianto	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Yayasan Tali Jiwo Alkaromah RT 005 RW 001 Desa Wirogaten Kec. Mirit membutuhkan bantuan sebesar Rp 11.000.000,00	RT 001 RW 004 Desa Sidorejo Kec. Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	11.410.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
138	Bambang Suparjo	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN PENGASPALAN JALAN POROS DESA (Rp. 300.000.000) (Sudah Melengkapi LPJ BKK, Informasi dari Kades Sirnobojo sudah masuk Ke Dinas PMD)	PEDUKUHAN BABAH PASAR/JETAK REJO RT 02-03 RW 04 DESA SIRNOBOYO KECAMATAN BONOROWO, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	PAKET	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
139	Bambang Suparjo	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN PENGASPALAN JALAN POROS DESA (Rp. 300.000.000)	PEDUKUHAN ROWO PASAR RT 05 RW 2 DESA ROWO KECAMATAN MIRIT, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000	1	PAKET	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
140	Bambang Suparjo	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN PENGASPALAN JALAN POROS DESA (Rp. 300.000.000)	PEDUKUHAN MANISJANGAN RT 01 RW 03 DESA AMBAL RESMI KECAMATAN AMBAL, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000	1	PAKET	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
141	Bambang Suparjo	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN PENGASPALAN JALAN POROS DESA (Rp. 200.000.000)	DUKUH TAMPINGAN RT 01 RW 01 DESA WERGONAYAN KECAMATAN MIRIT, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	PAKET	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
142	Bambang Suparjo	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN HOTMIX DK. TANJUNGREJO RT 01, RT 02 DAN RT 03 RW 05 DESA SIRNOBOYO KECAMATAN BONOROWO (Rp 200.000.000)	DK. TANJUNGREJO RT 01, RT 02 DAN RT 03 RW 05 DESA SIRNOBOYO KECAMATAN BONOROWO, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
143	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Sudagaran Rt 02 Rw 02 Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam rusak sehingga membutuhkan bantuan pengaspalan jalan sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Sudagaran Rt 02 Rw 02 Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	250	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
144	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Prapatan RT 03 RW 02 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan Bantuan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp 100.000.00,00	Dukuh Prapatan RT 03 RW 02 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	250	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
145	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Krajan Rt 04 Rw 01 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam rusak sehingga membutuhkan bantuan pembangunan rabat beton sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Krajan Rt 04 Rw 01 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	50	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
146	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Krajan Rt 02 Rw 04 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam rusak sehingga membutuhkan bantuan rabat beton sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Krajan Rt 02 Rw 04 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	50	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
147	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Jatisari Rt 04 Rw 03 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam rusak sehingga membuthkan bantuan pembangunan rabat beton sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Jatisari Rt 04 Rw 03 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	100	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
148	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Kepudang Rt 04 Rw 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp 70.000.000,00	Dukuh Kepudang Rt 04 Rw 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	70.000.000	150	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
149	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jembatan Dukuh Kepudang RT 04 RW 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan bantuan sebesar Rp 30.000.000,00	Dukuh Kepudang RT 04 RW 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	30.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
150	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Pengempon Rt 07 Rw 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Pengempon Rt 07 Rw 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	250	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
151	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Siglintor Rt 03 Rw 01 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan rabat beton sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Siglintor Rt 03 Rw 01 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	70	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
152	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Kalipetung 1 Rt 01 Rw 01 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan rabat beton sebesar Rp 75.000.000,00	Dukuh Kalipetung 1 Rt 01 Rw 01 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000	100	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
153	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Karangsambung 3 Rt 06 Rw 02 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan rabat beton sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Karangsambung 3 Rt 06 Rw 02 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	70	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
154	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pembangunan Mushola AN NAHL Dukuh Karangendep Rt 02 Rw 03 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam sebesar Rp 15.000.000,00	Dukuh Karangendep Rt 02 Rw 03 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
155	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Karanggedang 1 Rt 03 Rw 04 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Karanggedang 1 Rt 03 Rw 04 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	100	m	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
156	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kelengkapan Sarana Olah Raga Volly Karang Taruna Desa Glontor Kecamatan Karanggayam berupa jaring nett dan bola mengalami kerusakan sehingga membutuhkan bantuan uang sebesar Rp 10.000.000,00	Karang Taruna Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	Paket	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
157	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT Kesenian	Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Alat - Alat Musik SMP Pangeran Diponegoro Kecamatan Karanggayam sebesar Rp 100.000.000,00	SMP Pangeran Diponegoro Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	100.000.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
158	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Pager Kunir RT 003 RW 001 Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan Bantuan Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp 100.000.000,00	Pager Kunir RT 003 RW 001 Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
159	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Pengempon Rt 05 Rw 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan Bantuan Pengaspalan sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Pengempon Rt 05 Rw 02 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
160	Bambang Sutrisno, SE	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Keuangan pengadaan kelengkapan alat musik angklung dan gamelan grup kesenian angklung kreasi bangkit budoyo Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam sebesar Rp 100.000.000,00	Kreasi Bangkit Budoyo Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	100.000.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
161	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/Pengerasan/Rehabilitasi Jalan Aspal Dukuh Dramanganti RT 003 RW 001 Desa Somagede Kecamatan Sempor sebesar Rp 150.000.000,00	Dukuh Dramanganti RT 003 RW 001 Desa Somagede Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
162	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/Pengerasan/Rehabilitasi Jalan Aspal RT 003 RW 001 Desa Pekuncen Kecamatan Sempor sebesar Rp 150.000.000,00	RT 003 RW 001 Desa Pekuncen Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
163	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Rabat Beton RT 006 RW 001 Desa Pekuncen Kecamatan Sempor sebesar Rp 100.000.000,00	RT 006 RW 001 Desa Pekuncen Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
164	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/Pengerasan/Rehabilitasi Jalan Aspal RT 001 - RT 002 RW 005 Desa Jatinegoro Kecamatan Sempor sebesar Rp 150.000.000,00	RT 001 - RT 002 RW 005 Desa Jatinegoro Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
165	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/Pengerasan/Rehabilitasi Jalan Aspal Dukuh Kebonan RT 002 RW 002 Desa Sidoharum Kecamatan Sempor sebesar Rp 150.000.000,00	Dukuh Kebonan RT 002 RW 002 Desa Sidoharum Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
166	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/Pengerasan/Rehabilitasi Jalan Aspal Dukuh Kempul RT 004 RW 002 Desa Kedungwringin Kec. Sempor sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Kempul RT 004 RW 002 Desa Kedungwringin Kec. Sempor , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
167	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Ternak Lembu Suro 2 RT 004 RW 003 Desa Somagede Kecamatan Sempor membutuhkan bantuan ternak kambing sebesar Rp 50.000.000,00	RT 004 RW 003 Desa Somagede Kecamatan Sempor , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	16	Ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
168	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Mendo Renden RT 006 RW 002 Desa Donorojo Kecamatan Sempor membutuhkan bantuan ternak kambing sebesar Rp 150.000.000,00	RT 006 RW 002 Desa Donorojo Kecamatan Sempor , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	150.000.000	1	Paket	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
169	Basir	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Poros untuk Dusun Jemenar Desa Argopeni-Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	Dusun Jemenar Desa Argopeni-Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
170	Basir	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Rabat Beton untuk RT 06 RW 03 ke RT 01 RW 03 Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	RT 06 RW 03 ke RT 01 RW 03 Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
171	Basir	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pembukaan jalan baru menggunakan alat berat (eksavator) untuk RT 01 RW 03 Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	RT 01 RW 03 Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
172	Basir	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Poros dari Desa Kalibangkang ke Desa Argosari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	Desa Kalibangkang ke Desa Argosari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
173	Basir	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Desa untuk Dukuh Kaligalang, Desa Tlagasari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	Dukuh Kaligalang, Desa Tlagasari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
174	Basir	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan menuju tempat wisata Sawangan Advanture Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 200.000.000	Jalan Menuju Wisata Sawangan Advanture Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
175	Basir	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan rehab Musola Thorigul Huda RT 02 RW 02 Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 15.000.000	Musola Thorigul Huda RT 02 RW 02 Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
176	Basir	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan Pembangunan tempat wudhu Mushola Al Hikmah RT 03 RW 03 Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 15.000.000	Mushola Al Hikmah RT 03 RW 03 Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
177	Basir	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan Rehab Musola Ar rohmah RT 02 RW 02 Desa Nagaraji, Kec. Buayan, Kab. Kebumen sebesar Rp 15.000.000	Musola Ar rohmah RT 02 RW 02 Desa Nagaraji, Kec. Buayan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
178	Basir	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Huda Dukuh Kedawung RT 06 RW 05, Desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 50.000.000	Masjid Nurul Huda Dukuh Kedawung RT 06 RW 05, Desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
179	Basir	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan Pembangunan Masjid AN NUR Dukuh Blankunang Selatan RT 06 RW 05 Desa Jatijajar, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 50.000.000	Masjid AN NUR Dukuh Blankunang Selatan RT 06 RW 05 Desa Jatijajar, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
180	Basir	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan Pembangunan TPQ Al Ma'rifah RT 03 RW 01 Desa Kalipoh, Kec. Ayah sebesar Rp 50.000.000	TPQ Al Ma'rifah RT 03 RW 01 Desa Kalipoh, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
181	Basir	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan Pembangunan Musola Miftahul Khoir RT 03 RW 04 Desa Kalibangkang, Kec. Ayah sebesar Rp 50.000.000	Musola Miftahul Khoir RT 03 RW 04 Desa Kalibangkang, Kec. Ayah , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
182	Basir	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Rabat Beton untuk Desa Ayah, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 65.000.000	Desa Ayah, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	55.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
183	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PEM ELIHARAAN JALAN POROS DESA KARANGTANJUNG 1 KM Rp 200.000.000	JALAN POROS DESA RT 2 RW 2 DUKUH TANJUNG DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN ALIAN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	KM	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
184	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KENDARAAN RODA 3 , 1 UNIT Rp 40.000.000	KELOMPOK BERKAH BUMI RT 01 RW 01 DESA SUROTRUNAN KECAMATAN ALIAN, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000	1	UNIT	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
185	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN JALAN POROS DESA KARANGTANJUNG 0,7KM Rp 150.000.000	JALAN POROS DESA RT 01 RW 02 DUKUH SOKA DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN ALIAN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	0,7	KM	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
186	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	BANTUAN SERAGAM GRUP REBANA AN NURIYAH 1 KELOMPOK Rp 10.000.000	GRUP REBANA AN NURIYAH DUKUH KALIKUDU RT 02 RW 04 DESA KALIRANCANG KECAMATAN ALIAN, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	KELOMPOK	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
187	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMELIHARAAN JALAN POROS DESA KOROWELANG 0.5 KM RP. 120.000.000	JALAN POROS DESA KOROWELANG RT.02 RW. 03 KECAMATAN KUTOWINANGUN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	120.000.000	0,5	KM	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
188	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN POROS DESA TUNJUNGSETO 0,5 KM Rp.120.000.000	JALAN POROS DESA RT 05 RW 02 DESA TUNJUNGSETO KECAMATAN KUTOWINANGUN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	120.000.000	0,5	KM	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
189	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN ASPAL JALAN POROS DESA SOKARENI 1 KM RP. 150.000.000	JALAN POROS DESA RT 05 RW 01 DESA SOKARENI KECAMATAN PONCOWARNO, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	KM	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
190	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN RABAT BETON BLOK WULUH RT 02 RW 05 DESA KARANGTENGAH 0,5 KM RP. 120.000.000	BLOK WULUH RT 02 RW 05 DESA KARANGTENGAH, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	120.000.000	0,5	KM	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
191	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bantuan UMKM Fresh Premium (Usaha Telur Bebek Asin) Pemilik : Latiful Hidayat Alamat : Dukuh Tanjung RT 3 RW 1 Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Bantuan : 10jt	Alamat : Dukuh Tanjung RT 3 RW 1 Desa Karangtanjung Kecamatan Alian	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	40.000.000	0,5	KM	Pengembangan Usaha Mikro
192	Erni Widi Astuti, S.Ak.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Mamah Aan Culinary (Rica - Rica Entok) Pemilik : Siti Roanah Alamt : Dukuh Jelarang RT 4 RW 2 Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Bantuan : 25jt	Dukuh Jelarang RT 4 RW 2 Desa Karangtanjung Kecamatan Alian	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000	1	KM	Pengembangan Usaha Mikro
193	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Pengaspalan Jalan desa Dukuh Siwajik Rt 08 Rw 03 - Rt 05 Rw 03 Desa JOGOMULYO KEC BUAYAN Rp.100.000.000;	Dukuh Siwajik Rt 08 Rw 03 - Rt 05 Rw 03 Desa JOGOMULYO KEC BUAYAN , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
194	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan RT 01 RW 06 desa SUKOMULYO KEC ROWOKELE (Bankue Kab) Pagu Rp 75.000.000;	RT 01 RW 06, desa SUKOMULYO KEC ROWOKELE, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
195	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Beton RW 01 menuju RW 02, DESA PAKURAN KEC BUAYAN (Bankue Kab) Pagu Rp.100.000.000;	RW 01 menuju RW 02, DESA PAKURAN KEC BUAYAN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	200	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
196	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan RT 05-06 Rw 01 desa BUAYAN KECAMATAN BUAYAN Pagu Rp. 100.000.000; (Bankeu Kab/BKK)	RT 05 RW 01 Desa Buayan Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	215	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
197	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Aspal RT 07 Rw 01 menuju RT 01 RW 03 dusun Borang desa WAGIRPANDAN KEC.ROWOKELE Pagu Rp. 100.000.000; (Bankue Kab/BKK)	RT 07 RW 01 menuju RT 01 RW 03 dusun Borang desa Wagirpandan Kec. Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	250	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
198	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan RT 01 RW 03 desa RANGKAH KEC BUAYAN Pagu Rp 100.000.000; (Bankue Kab/ BKK)	RT 01 RW 03 Desa Rangkah Kec. Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	220	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
199	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanann Pokmaswas Mina Sari Rowokele Rt 03 Rw 03 Desa Rowokele Kec. Rowokele 1 paket sebesar Rp. 25.000.000;	RT 03 RW 03 Desa Rowokele Kec. Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.000.000	1	paket	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
200	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Semen untuk RT 04 RW 06 Desa Tlogosari Kec. Ayah, 50 zak Rp. 4.539.400;	RT 04 RW 06 Desa Tlogosari Ke. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.447.280	50	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
201	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Semen untuk RT 02 RW 03 Desa Tlogosari Kec. Ayah, 50 zak Rp. 4.539.400;	RT 02 RW 03 Desa Tlogosari Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.447.280	50	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
202	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Semen untuk RT 03 RW 03 Desa Tlogosari Kec. Ayah, 50 zak Rp. 4.539.400;	RT 03 RW 03 Desa Tlogosari Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.447.280	50	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
203	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Semen untuk RT 05 RW 02 Desa Tlogosari Kec. Ayah, 50 zak Rp. 4.539.400;	RT 05 RW 02 Desa Tlogosari Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.447.280	50	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
204	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Semen untuk RT 01 RW 05 Desa Tlogosari Kec. Ayah, 50 zak Rp. 4.539.400;	RT 01 RW 05 Desa Tlogosari Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.447.280	50	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
205	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Semen untuk RT 05 Rw 01 Desa Karang Sari Kec. Buayan, 100 zak Rp. 9.078.800	RT 05 RW 01 Desa Karang Sari Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.078.800	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
206	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD "Pos PAUD MUTIARA BUNDA" 1 paket Rp. 10.000.000;	RT 06 RW 02 Desa Buayan Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
207	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bantuan Sarana dan Prasarana TK PERTIWI 14.25.07 Desa Wonodadi Kec. Buayan, 1 paket, Rp. 10.000.000;	RT 01 RW 01 Desa Wonodadi Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
208	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD "POS PAUD TUNAS BANGSA" Desa Rangkah Kec. Buayan, 1 paket Rp. 10.000.000;	RT 01 RW 03 Desa Rangkah Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
209	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bantuan Hibah Ternak Kambing untuk KTT SUBUR JAYA Desa Buayan. Ketua : Rudi Tamtomo Nomor Register : 33.05.020.009.1.2.1.05. 1 unit. Rp. 40.000.000;	RT 02 RW 02 Desa Buayan Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	40.000.000	12	ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
210	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya, Bantuan untuk pokdakan Mina Rahayu Sikayu 2 untuk budidaya ikan tawar sebesar Rp. 25.000.000,-	Desa Sikayu Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.000.000	1	Paket	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
211	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Bantuan alat usaha UMKM untuk Kustolani. 1 Paket. Rp. 8.300.000;	Dukuh Legok RT 01 RW 05 Desa Purbowangi Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.300.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
212	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Bantuan alat usaha UMKM untuk Amtinah. 1 Paket. Rp 8.300.000;	Dukuh Palamarta RT 04 RW 07 Desa Jatijajar Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.300.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
213	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Bantuan alat usaha UMKM untuk Sukur. 1 Paket. Rp. 8.300.000;	RT 06 RW 03 Desa Tugu Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.300.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
214	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Bantuan Alat Usaha UMKM untuk Waliyem. 1 Paket. Rp 8.300.000;	Dukuh Pengada RT 02 RW 05 Desa Rangkah Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.300.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
215	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Permohonan Bantuan Semen 80 Zak	Dukuh Sumberan Rt 1 Rw 3 Desa Tugu, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.263.040	80	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
216	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Permohonan bantuan semen 80 zak	Dukuh Sumberan Rt 2 Rw 3 Desa Tugu, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.263.040	80	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
217	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Permohonan Bantuan Semen 80 Zak	Dukuh Sumberan Rt 6 Rw 3 Desa Tugu , Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.263.040	80	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
218	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dana hibah untuk yayasan Mitra Maju Kebumen dalam program pelatihan peningkatan kapasitas perempuan sebesar Rp 50.000.000	Jl. Kejayan No 26 F , Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.695.680	1	Paket	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
219	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan Rehab Masjid At Taubah Rp 25.000.000	Dukuh Legok Rt 1 Rw 5 Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
220	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Hibah Alat Kesenian untuk Majelis Sholawat Qulubul Musthofa, Desa Nogoraji Kec. Buayan 1 paket Rp. 10.000.000	Dukuh Jatiwayang RT 05 RW 01 Desa Nogoraji Kec. Buayan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
221	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Rehabilitasi Mushola Al Amin 1, 1 paket Rp. 10.000.000	RT 02 RW 01 Desa Karang Sari Kec. Buayan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
222	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pengadaan tenda tarub untuk Mudhakhir, alamat Dukuh Jetak RT 02 RW 02 Desa Purbowangi 1 Paket. Rp. 10.000.000	Dukuh Jetak RW 02 Desa Purbowangi Kec. Buayan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.000.000	1	paket	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
223	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pengadaan alat olah raga untuk Karang Taruna TUNAS HARAPAN Desa Buayan. 1 Paket. Rp. 10.000.000;	Desa Buayan Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	paket	Pengembangan Usaha Mikro
224	Erwin Puji Oktiana, S.E.	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PENGASPALAN JALAN DUKUH METO TENGAH RT 01 RW 01, DESA ROGODADI KEC BUAYAN. Bankeu Kabupaten/BKK Rp. 50.000.000	Dukuh Meto Tengah RT 01 RW 01 Desa Rogodadi Kec. Buayan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
225	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan di desa sembirkadipaten rusak parah, perlu pengaspalan jalan (Rp 100.000.000)	RT 02 RW 02 Sembirkadipaten, Prembun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
226	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan di desa tersobo rusak parah, perlu pengaspalan jalan (Rp 100.000.000)	RT 02 RW 02 Desa Tersobo, Prembun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
227	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan di desa prembun rusak parah, perlu pengaspalan jalan (Rp 100.000.000)	RT 03 RW 02 Desa Prembun, Prembun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
228	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan rusak parah, perlu pemeliharaan rabat beton (Rp 100.000.000)	desa Wirogaten, Mirit, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
229	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan di desa mulyosri rusak parah, perlu pemeliharaan rabat beton (Rp 100.000.000)	RT 04 RW 01 Desa Mulyosri, Prembun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
230	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perlu pembangunan/ Rehabilitasi JUT (Rp 100.000.000)	RT 01 RW 02 Blok Kebaderan, Kedungbulus, Prembun, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
231	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perlu penerangan jalan di sekitar Sidogede (Rp 38.500.000)	Sidogede, Prembun, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	38.500.000			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
232	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Karangtaruna membutuhkan Sarpras Olahraga Volly (Rp 10.000.000)	Karangtaruna Satria Muda Desa Pujodadi, Kec. Bonorowo, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
233	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan di desa tunggalroso rusak parah, perlu pemeliharaan rabat beton (Rp 100.000.000)	RT 01 RW 01 Desa Tunggalroso, Prembun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
234	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Karangtaruna membutuhkan Sarpras Olahraga Volly (Rp 10.000.000)	Karangtaruna Pemuda berkarya, Desa Lembupurwo Kec. Mirit, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
235	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Perlu adanya rehab TPQ Anak Pintar Desa Mulyosri (Rp 15.000.000)	TPQ Anak Pintar Desa Mulyosri, RT 05 RW 01, Prembun, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
236	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Karangtaruna membutuhkan sarpras olahraga Volly (Rp 10.000.000)	Karangtaruna Tunas Mekar Desa Peneket, Kec. Ambal, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
237	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Karangtaruna membutuhkan Sarpras Olahraga Volly (Rp 10.000.000)	Karang Taruna Ngudi Rahayu Desa Bonorowo Kec. Bonorowo, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
238	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Belum memiliki lapangan volly, sehingga perlu pembangunan lapangan volly desa (Rp 10.000.000)	Desa Patuk Rejo, Bonorowo, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
239	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Perlu pembangunan Musholla SD N Kedungbulus (Rp 50.000.000)	SD N Kedungbulus, Prembun, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.000.000			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
240	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan di desa patuk gawemulyo rusak parah, perlu pengaspalan jalan (Rp 150.000.000)	Desa Patuk Gawemulyo, Mirit, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
241	Faiq Hasan	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan perbaikan aspal/rabat senilai Rp. 96,5 Jt	Dk. Kalapacung RT 05/RW 01, Desa Sidototo, Kec. Padureso, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	96.500.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
242	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Rahab TPQ JAMINGATUL MUSLIMIN, sebesar 50.000.000	RT 001/ RW 001, Desa Jabres, Kecamatan Sruweng, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
243	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN PEMBANGUNAN JALAN COR DESA, SEBESAR 100.000.000	RW 002 DESA JABRES, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
244	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMOHONAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA, SEBESAR 350.000.000	RW 002 DAN 003, DESA JABRES, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
245	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN JALAN ASPAL DESA, SEBESAR 100.000.000	RT 02, RW 05 DESA SIDOAGUNG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
246	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN JALAN ASPAL, SEBESAR 100.000.000	RT 01, RW 06 Dukuh Karangjati, DESA SIDOAGUNG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
247	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PEREMOHONAN BANTUAN ITIK, SEBESAR 50.000.000	KTT LEMBU SARI RT01, RW06, DESA SIDOAGUNG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
248	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PELATIHAN PKK DESA SIDOAGUNG, SEBESAR 35.000.000	DESA SIDOAGUNG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	35.000.000			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
249	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pembinaan Pengelolaan Cadangan Pangan LUMBUNG PANGAN (GABAH) untuk POKTAN SIDOMAJU sebesar 25.000.000	RT-3, RW08 DESA SIDOAGUNG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	25.000.000			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
250	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pembinaan Pengelolaan Cadangan Pangan LUMBUNG PANGAN (GABAH) untuk POKTAN NGUDI RAHAYU sebesar 25.000.000	RT04, RW01 DESA SIDOAGUNG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	25.000.000			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
251	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BANTUAN BENIH IKAN GURAMEH UNTUK KELOMPOK TERNAK IKAN BERKAH MAKMUR, SEBESAR 30.000.000	RT03, RW02, DESA PANDANSARI, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.000.000			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
252	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERMOHONAN BANTUAN WAYANGAN MERDI DESA, SEBESAR 50.000.000	DESA PANDANSARI, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
253	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	PERMOHONAN BANTUAN REHAB MUSHOLA NURUL JANNAH, SEBESAR 15.000.000	DUKUH PITA PITU, RT 2, RW 6, DESA PANDANSARI, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
254	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD HSS TUNAS BANGSA, SEBESAR 10.000.000	DESA KARANGSARI, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
255	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD AYUNDA, KARANGPULE, SEBESAR 10.000.000	DESA KARANGPULE, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
256	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (APE) POS PAUD PERMATA HATI, TANGGERAN, SEBESAR 10.000.000	DESA TANGGERAN, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
257	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD ANAK CERIA, KARANGJAMBU, SEBESAR 10.000.000	DESA KARANGJAMBU, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
258	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD HARAPAN BANGSA, PAKURAN, SEBESAR 10.000.000	DESA PAKURAN, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
259	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD CAHAYA, JABRES, SEBESAR 10.000.000	DESA JABRES , KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
260	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD PUTRA MULIA, SIDOHARJO, SEBESAR 10.000.000	DESA SIDOHARJO, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
261	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD CERIA, TRIKARSO, SEBESAR 10.000.000	DESA TRIKARSO, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
262	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD PUTRA KARTINI, MENGANTI, SEBESAR 10.000.000	DESA MENGANTI, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
263	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD PUTRA MANDIRI, KARANGGEDANG, SEBESAR 10.000.000	DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
264	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD SANGGAR PERTIWI, KLEPUSANGGAR	DESA KLEPUSANGGAR, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
265	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD TERATAI INDAH NURUL BAROKAH, SIDOAGUNG	DESA SIDOAGUNG, KECAMTAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
266	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD MEKARSARI, PENUSUPAN, SEBESAR 10.000.000	DESA PENUSUPAN, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
267	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (LAPTOP) POS PAUD AT-TAQWA, CONDONG CAMPUR, SEBESAR 10.000.000	DESA CONDONG CAMPUR, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
268	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (APE) POS PAUD MELATI, GIWANGRETNO, SEBESAR 10.000.000	DESA GIWANGRETNO, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
269	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (APE) POS PAUD PERMATA BUNDA, PANDANSARI, SEBESAR 10.000.000	DESA PANDANSARI, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
270	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERHONAN BANTUAN (APE) KB AMONGPUTRO, DONOSARI, SEBESAR 10.000.000	DESA DONOSARI, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
271	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	OERMOHONAN BANTUAN (APE) KB PKBM BINA INSANI, KARANGJAMBU, SEBESAR 10.000.000	DESA KARANGJAMBU, DESA SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
272	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (APE) KB AL FATH, KARANGGEDANG, SEBESAR 10.000.000	DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN KEBUMEN, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
273	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (APEA) KB AISYIYAH, SRUWENG, SEBESAR 10.000.000	DESA SRUWENG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
274	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	PERMOHONAN BANTUAN REBANA DAN ORGEN, UNTUK KARANGTARUNA TUNAS LESTARI, SEBESAR 43.000.000	DESA SIDOAGUNG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	43.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
275	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERMOHONAN BANTUAN KAMBING, KTT JUANG MANDIRI, SEBESAR 50.000.000	DESA KRETEK, KECAMATAN ROWOKELE, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
276	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNA JALAN ASPAL DESA , SEBESAR 100.000.000	DESA JATIMULYO, KECAMATAN KUWARASAN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
277	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	PERMOHONAN BANTUAN REHAB PONDOK PESANTREN RIYADLUL'ULUM, SEBESAR 100.000.000	DUKUH KEPUTIHAN, RT04, RW04 DESA KALIREJO, KECAMATAN KEBUMEN, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
278	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (APE) TK PURNAMA PGRI, SEBESAR 10.000.000	RT02, RW03, DESA BANIORO, KECAMATAN KARANGSAMBUNG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
279	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERMOHONAN BANTUAN (APE) TK KUNCUP MEKAR BONOROWO, SEBESAR 10.000.000	RT02, RW02 DESA BONOROWO, KECAMATAN BONOROWO, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
280	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	PERMOHONAN BANTUAN MESIN OBRAS (FAJAR RIZKI), SEBESAR 6.000.000	RT02, RW02, DESA JABRES, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
281	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	PERMOHONAN BANTUAN ALAT PERBENGKELAN (KUNCI SET LENGKAP, PEMOTONG LOGAM, BOR MESIN) UNTUK NUR SOLIHIN SEBESAR 10.000.000	RT002, RW003 DESA GIWANGRETNO, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
282	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	PERMOHONAN BANTUAN ETALASE (RATNASARI), SEBESAR 6.000.000	RT02, RW03 DESA JABRES, KECAMATANSRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
283	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	PERMOHONAN BANTUAN MESIN JAHIT, ALAT PERTUKANGAN KAYU, PERALATAN CUCIAN MOTOR (MENIK) SEBESAR 50.000.000	RT3, RW1, DESA PURWODADI, KECAMATAN KUWARASAN, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
284	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	PERMOHONAN BANTUAN REHAB TEMPAT IBADAH (GEREJA KRISTEN JAWA MENARA KASIH) SEBESAR 25.000.000	RT4, RW1, DESA SRUWENG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
285	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	PERMOHONAN BANTUAN ORGEN, UNTUK SANGGAR SENI TRADISIONAL CIPTO ROSO, SEBESAR 10.000.000	RT001, RW001 DESA KARANGSARI, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
286	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	PERMOHONAN REHAB MASJID JAMI NURUL IMAN, SEBESAR 25.000.000	DESA PENGEMPON, RT01, RW01 KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
287	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN ASPAL, SEBESAR 100.000.000	DUSUN WERA RT2, RW6, DESA SRUWENG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
288	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERMOHONAN BANTUAN PERALATAN OLAH RAGA (BolaVolly 6 buah, Net Volly 1 buah, Bola Sepak 12 buah), untuk Karang Taruna TUNAS HARAPAN, Sebesar 10.000.000	DESA JABRES, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
289	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	PERMOHONAN BANTUAN ALAT PERBRNGKELAN (SUDI PRIYOKO), SEBESAR 10.000.000	RT001, RW002 DESA ADILUHUR, KECAMATAN ADIMULYO, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
290	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	PERMOHONAN BANTUAN ALAT KESENIAN (REBANA) UNTUK MUSLIMAT NU, SEBESAR 10.000.000	DESA TRIKARSO, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
291	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Pembangunan Jalan Desa Kalijirek Kec. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
292	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan pembangunan infrastruktur pengaspalan jalan Desa, sebesar 100.000.000	RT03/ RW 14 Dukuh Padasan Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
293	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan pengaspalan jalan Desa, sebesar 100.000.000	Grjugan Rt 01 Rw 01 kecamatan Petanahan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
294	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp 100.000.000	Dukuh Krajan Wetan RT 002 RW 002 Desa Sidoluhur Kec. Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
295	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Pembangunan Jalan Desa RT 03 RW 01, RT 01 RW 02, RT 02 RW 02 Desa Rogodono Kecamatan Buayan sebesar 100jt	RT 03 RW 01, RT 01 RW 02, RT 02 RW 02 Desa Rogodono Kec. Buayan , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
296	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan bantuan Jalan Aspal Desa, sebesar 100.000.000	Purwogondo Rt 03. Rw 03 Desa Kalipurwo, Kecamatan Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
297	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan bantuan pembangunan jalan Desa, sebesar 50.000.000	RT 5, RW 4 Desa Sidayu, Kec.Gombong , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
298	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	permohonan bantuan Pengaspalan Jalan Desa, sebesar 50.000.000	RT. 02 RW.01 Desa Pekuncen, Kec. Sempor, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
299	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN JALAN ASPAL, SEBESAR 100.000.000	DUKUH JIMBUN, RT 5, RW 4, DESA GIWANGRETNO, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
300	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN BANTUAN JALAN POROS DESA DONOSARI, SEBESAR 100.000.000	DESA DONOSARI, KECAMATAN SRUWENG (Jl. Donosari Pandansari RT2 RW2, Jl. Donosari Karang Jambu RT1, RW1), Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
301	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	PERMOHONAN BANTUAN (SOUND SYSTEM) KUBE SORBAN SRUWENG, SEBESAR 100.000.000	WERA, RT02, RW 06 DESA SRUWENG, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
302	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan bantuan Pengaspalan Jalan, sebesar 100.000.000	RT 03 RW 04 , Desa Surotrunan (menuju Tambangsari), Kec. Alian, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
303	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN RABAT BETON RT1 RW4, DESA ENTAK, KECAMATAN AMBAL, sebesar 100.000.000	RT1 RW4, DESA ENTAK, KECAMATAN AMBAL, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
304	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PERMOHONAN JALAN ASPAL POROS DESA, SEBESAR 100.000.000	RT01, RW01 DESA KLEPUSANGGAR, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
305	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Bantuan benih ikan untuk Pokdakan Surya Mina Lestari, sebesar 35.000.000	RT2, RW4 Desa Jabres, Kecamatan Sruweng, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.000.000			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
306	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Permohonan bantuan tarub dan panggung, KUBE BERKAH SEJAHTERA, sebesar 100.000.000	RT3, RW3 Desa Jabres, Kecamatan Sruweng, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
307	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	BANTUAN REBANA UNTUK RT2 DESA JABRES, SEBESAR 10.000.000	RT2 RW2 DUKUH SERUT, DESA JABRES, KECAMATAN SRUWENG, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
308	Fitria Handini, SH	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Dukuh Muntuk RT 003 RW 003 Desa Kajoran Kec. Karanggayam rusak sehingga membutuhkan bantuan pembangunan rabat beton sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Muntuk RT 003 RW 003 Desa Kajoran Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
309	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Musiran Membutuhkan Bahan dan Alat UMKM Penunjang Usaha Sebesar Rp.5.000.000	RT 03 RW 02 Desa Bumirejo Kecamatan Puring , Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
310	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Guna Peningkatan KTT Sido Mulyo No. 33.05.030.003.1.2.1.11 Membutuhkan 8 Ekor Sapi Senilai Rp. 180.000.000	KTT Sido Mulyo Desa Waluyorejo Kecamtan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	180.000.000			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
311	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Guna Pemenuhan Sarpras Peribadatan Masjid Baitul Abidin No. ID MASJID 01.4.14.05.03.000010 Dk. Juru Tengah RT 03 RW 01 PURING , KAB. KEBUMEN JAWA TENGAH membutuhkan dana Sebesar Rp. 50.000.000	Masjid Baitul Abidin Dk. Juru Tengah RT 03 RW 01 PURING , KAB. KEBUMEN JAWA TENGAH, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
312	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perlunya Alat Giling Jagung Usaha Milik Suwandi membutuhkan dana sebesar Rp. 10.000.000	RT 01 RW 03 Desa Banjarejo Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
313	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Ludiman Membutuhkan Bahan dan Alat UMKM Penunjang Usaha Sebesar Rp.5.000.000	RT 01 RW 03 Desa Banjareja Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
314	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Titik Widiaryanti Membutuhkan Bahan dan Alat UMKM Penunjang Usaha Laundry Sebesar Rp.15.000.000	RT 03 RW 02 Desa Tuki Gedong Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
315	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Dibyo Apriyono Membutuhkan Bahan dan Alat UMKM Penunjang Usaha Sound Sistem Sebesar Rp.30.000.000	RT 02 RW 02 Desa Sidoharjo Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	30.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
316	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Sehudin Membutuhkan Bahan dan Alat UMKM Penunjang Usaha Pertukangan Sebesar Rp.10.000.000	RT 02 RW 02 Desa Pakurang Kecamatan Sruweng, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.000.000			Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
317	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jembatan desa Pembangunan rabat beton jalan desa Sugihwaras RW 01 Senilai Rp. 150.000.000	Jalan desa Sugihwaras RW 01, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
318	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Guna Peningkatan Pokdakan Padang Wulan Desa Sрати Membutuhkan Usaha Lele Senilai Rp. 30.000.000	Pokdakan Padang Wulan Desa Sрати, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.000.000			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
319	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Ahmad Dian Syafi'i Membutuhkan Bahan dan Alat UMKM Catering Penunjang Usaha Sebesar Rp.25.000.000	RT 02 RW 05 Sitiadi Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	25.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
320	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Guna Pemenuhan Sarpras Peribadatan Mushola Al Furqon RT 01 RW 01 Desa Puliharjo Kecamatan Puring Membutuhkan dana Sebesar Rp. 15.000.000	Mushola Al Furqon RT 01 RW 01 Desa Puliharjo Kecamatan Purin, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
321	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Guna Pemenuhan Sarpras Peribadatan Mushola Miftahul Huda RT 03 RW 01 Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Membutuhkan dana Sebesar Rp. 15.000.000	Mushola Miftahul Huda RT 03 RW 01 Desa Caruban Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
322	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Ihdina Ahmad Syah Membutuhkan Bahan dan Alat UMKM Mesin Potong Kayu Penunjang Usaha Sebesar Rp.15.000.000	RT 03 RW 02 Desa Arjowinangun Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.000.000			Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
323	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Islakhudin Membutuhkan Bahan dan Alat Perbengkelan Penunjang Usaha Sebesar Rp.11.000.000	RT 08 RW 04 Desa Puliharjo Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
324	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Perbaikan Jalan Desa Waluyorejo Kecamatan Puring Sebesar Rp.150.000.000; (BKK)	Desa Waluyorejo Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
325	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kondisi lingkungan RW 5 Desa Srti memerlukan pembangunan dengan membutuhkan bantuan berupa semen sejumlah 200 zak seharga Rp 18.156.000	RW 5 Desa Srti, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.000.000			Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
326	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Perlunya Pengembangan Usaha Penjahit Atas Nama Umi Nurjanah Sebesar Rp. 15.000.000	RT 07 RW 02 Desa Kebulusan Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
327	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Yufi Syaefulloh Membutuhkan Bahan dan Alat UMKM Penunjang Usaha Ruko Sembako Sebesar Rp.10.000.000	RT 10 RW 05 Desa Puliharjo Kec. Puring, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
328	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	"Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Aspal Jalan Desa di Dukuh Brondong Kidul RW.02 Dsa Banjareja kec. Kuwarasan Kab. Kebumen Senilai Rp. 175.000.00"	di Dukuh Brondong Kidul RW.02 Dsa Banjareja kec. Kuwarasan Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	175.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
329	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	"Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Aspal Jalan Desa Sidoharjo Kec Puring RW. 01, Kab. Kebumen sebesar 150.000.000"	"Desa Sidoharjo Kec Puring RW. 01, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
330	Fuad Wahyudi, S.T	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	"Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Aspal Jalan Desa di Dukuh Siangkrek RT.010 RW.05 Desa Puliharjo Kec. Puring Kab. Kebumen Sebesar 150.000.000"	di Dukuh Siangkrek RT.010 RW.05 Desa Puliharjo Kec. Puring Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
331	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Rehab jalan desa Entak RT 02 RW 01, Ambal Rp 100.000.000	desa Entak RT 02 RW 01, Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1000	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
332	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Talud Jalan Sipanggang RT 01 RW 01, Desa Lajer, Ambal Rp 200.000.000	Sipanggang RT 01 RW 01, Desa Lajer, Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1000	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
333	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pemeliharaan Jalan Desa Sumberjati RT 03 RW 03, Ambal Rp 150.000.000	Desa Sumberjati RT 03 RW 03, Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1000	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
334	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Rehab Jalan Desa Tunjung - Sabrang Desa Sidoluhur RT 01 RW 03, Ambal Rp 100.000.000	Desa Tunjung - Sabrang Desa Sidoluhur RT 01 RW 03, Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1000	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
335	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Jarakah RT 02 RW 02 Desa Sinungrejo, Ambal Rp 150.000.000	Desa Dukuh Jarakah RT 02 RW 02 Desa Sinungrejo, Ambal , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1000	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
336	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pemeliharaan jalan Desa Dukuh Karangtengah RT 03 RW 03, Desa Ambalresmi Rp 150.000.000	Dukuh Karangtengah RT 03 RW 03, Desa Ambalresmi, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
337	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Mebutuhkan pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Sidogede RT 02 RW 04, Prembun sebesar Rp 150.000.000	Desa Sidogede RT 02 RW 04, Prembun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
338	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Mebutuhkan Rehab Mushola Baitul Mukmin Dukuh Tlogosari RT 01 RW 04, Desa Sirnobojo, Kec. Bonorowo dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000	Dukuh Tlogosari RT 01 RW 04, Desa Sirnobojo, Kecamatan Bonorowo, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
339	H Munawar Cholil BA	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Mebutuhkan Pemeliharaan Aspal Desa Rt 03 RW 03, Desa Prasutan, Kec. Ambal dengan anggaran sebesar Rp 125.000.000	Rt 03 RW 03, Desa Prasutan, Kec. Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	125.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
340	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	jalan poros desa Rt 05 Rw 04 Dukuh Brenggang rusak, perlu dilakukan perbaikan/ pengaspalan. (Rp.200.000.000)	Desa Argosari Rt 05 Rw 04 Dukuh Brenggang Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	400	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
341	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	kondisi jalan poros desa caruban rawan longsor, perlu adanya talud jalan. Pembangunan talud jalan poros Desa Caruban Rt 03 Rw 04 Dukuh Gentan Kidul, Kecamatan Buayan (Rp.100.000.000)	Desa Caruban Rt 03 Rw 04 Dukuh Gentan Kidul, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	200	Meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
342	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa di Desa Demangsari rusak, menghambat transportasi masyarakat, Bantuan Keuangan Khusus Pengaspalan jalan poros desa Demangsari Rt 04 Rw 02 S/d Rt 02 Rw 02 Dukuh Wanasari Kecamatan Ayah (Rp.200.000.000)	Desa Demangsari Rt 04 Rw 02 S/d Rt 02 Rw 02 Dukuh Wanasari Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	400	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
343	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jembatan jalan poros desa di Desa Geblug Kecamatan Buayan rusak, Bantuan keuangan khusus jembatan poros desa Geblug Kecamatan Buayan (Rp.200.000.000) P = 15, L=3 M	Desa Geblug Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	450	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
344	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan Poros Desa di Desa Jatiroto Rt 01 Rw 04 Dukuh Wagier rusak, susah dilewati ketika musim hujan menghambat akses pendidikan dan ekonomi masyarakat, Bantuan Keuangan Khusus Rabat Beton jalan poros desa (Rp.200.000.000)	Desa Jatiroto Rt 01 Rw 04 Dukuh Wagier Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	450	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
345	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa di Desa Jladi rusak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, Bantuan Keuangan Khusus Pengaspalan jalan poros desa di Rt 2 Rw 10 Dukuh Bedug (Rp.200.000.000)	Desa Jladri, Rt 2 Rw 10 Dukuh Bedug Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	500	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
346	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	jalan antar dukuh didukuh pendekel desa mergasana rusak dan sulit dilalui, membutuhkan Bantuan Keuangan Khusus Rabat Beton (Rp.200.000.000)	Desa Mergasana RW 5 dukuh pendekel Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	600	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
347	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	jalan di Desa Pakuran Rt 01 Rw 03 rusak membutuhkan Bantuan Keuangan Khusus untuk Rabat Beton (Rp.200.000.000)	Desa Pakuran Rt 01 Rw 03 Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	450	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
348	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan Poros Desa di Desa Wanadadi yang digunakan untuk aktivitas masyarakat rusak membutuhkan Bantuan Keuangan Khusus pengaspalan Jalan Poros Desa (Rp.200.000.000)	Desa Wanadadi Rw 01 Dukuh Blanakan Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	400	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
349	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa di desa Tugu yang menghubungkan beberapa desa kondisinya rusak, membutuhkan Bantuan Keuangan Khusus pengaspalan Jalan Poros Desa (hotmix) (Rp.200.000.000)	Desa Tugu Rt 2 RW 1 Dukuh Curug gintung Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	400	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
350	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa di desa watukelir belum ada talud jalannya dan berpotensi longsor, membutuhkan Bantuan Keuangan Khusus Talud Jalan Poros Desa (Rp.100.000.000)	Desa Watukelir Rt 04 Rw 003 Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	200	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
351	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Ruas jalan poros desa di Desa Pringtutul rusak sehingga sulit dilalui, perlu Bantuan Keuangan Khusus Pengaspalan jalan poros desa (Rp.200.000.000)	Desa Pringtutul Rt 05 Rw 03 Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	300	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
352	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	jalan poros desa rusak di desa Jladri Dukuh Londeng, perlu Bantuan Keuangan Khusus Rabat Beton (Rp.150.000.000)	Desa Jladri Rt 002 Rw 04 Dukuh Londeng Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	150	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
353	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	menurunnya produktivitas padi, masyarakat membutuhkan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan, Bantuan Ketahanan Pangan Poktan Sri Tanijajar (Rp.30.000.000)	Desa Jatijajat Rt 04 Rw 03 Dusun Nusawaru Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30.000.000	1	kelompok	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
354	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok KTT Sri Margi Mulyo, membutuhkan permodalan ternak untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok, perlu ada bantuan ternak kambing betina dan pembinaan (Rp.30.000.000)	KTT Sri Margi Mulyo Desa Pakuran Dkh. Klesem Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30.000.000	10	ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
355	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KAWASAN PERMUKIMAN	masih terdapat rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat kurang mampu, Perlu adanya bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Rp.20.000.000)	Rasmidi Saring Rt 03 Rw 06 Desa Sikayu Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	20.000.000	1	unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
356	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KAWASAN PERMUKIMAN	masih terdapat rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat kurang mampu, Perlu adanya bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Rp.20.000.000)	Suratifah Rt 02 Rw 02 Dk.Semende Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	20.000.000	1	unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
357	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	jalan lingkungan di Desa Adiwarno Rt 07 Rw 02 Dukuh Ketos rusak, masyarakat akan melakukan swadaya tetapi masih kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Adiwarno Rt 07 Rw 02 Dukuh Ketos Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
358	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan di Desa Banjararjo Rt 03 Rw 01 Dkh. Perangkokerusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Banjararjo Rt 03 Rw 01 Dkh. Perangkokerusak Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
359	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak d iDesa Sikayu Rt 01 Rw 08, masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Sikayu Rt 01 Rw 08 Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
360	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Sikayu Rt 02 Rw 06 Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
361	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Sikayu Rt 03 Rw 06 Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
362	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Purbowangi Rt 06 Rw 01Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
363	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Pringtutul Rt 6 Rw 3 Dkh.Pesetran, Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
364	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Pringtutul Rt 1 Rw 3 Dkh Pesetran Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
365	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Rowokele Rt 08 Rw 04 Dkh. Rawawungu Kec. Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
366	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Tugu Rt 03 Rw 02 Dkh. Kaliori, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
367	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Jladri Rt 02 Rw 04 (Blok. Gadungan), Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
368	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jalan lingkungan rusak masyarakat akan berswadaya melakukan perbaikan tetapi kekurangan PC/Semen (Rp.8.000.000)	Desa Purbowangi RT 3 RW 4 Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000	100	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
369	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Karang Taruna Karya Manunggal Desa Tugu membutuhkan sarpras voli dan sepakbola (Rp.10.000.000) Bola, Seragam/jersey	Karang Taruna Karya Manunggal Desa Tugu Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	paket	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
370	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Gedung TPQ AL HIDAYAH mengalami kerusakan dan membutuhkan rehab, (Rp.100.000.000)	TPQ AL HIDAYAH Desa Jogomulyo Rt 02 Rw 02 Dkh. Jagabela Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
371	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Gedung pendidikan RA Nurul Istikomah rusak dan membahayakan anak-anak ketika tidak diperbaiki, perlu Rehab TK/RA (Rp.20.000.000)	RT 03 RW 01 Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.000.000	1	paket	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
372	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Musholla Tanbihul Insan sedang melakukan rehab dan membutuhkan anggaran, (Rp.15.000.000)	Musholla Tanbihul Insan RT.01 RW.03 Dkh.Wringin Desa Nogoraji Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
373	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	TPQ Baitul Izza di Desa Geblug sedang dilakukan rehab, Rehab TPQ (Rp.10.000.000)	Desa Geblug RT 1 RW 1, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
374	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persak Kebumen membutuhkan sarpras olahraga untuk mengikuti kompetisi (Rp.25.000.000) Bola standar kompetisi, Jersey	Persak Kebumen, Kafe Teman Hati Pejagoan Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.000.000	1	paket	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
375	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Mushola A Hikmah rusak memerlukan rehab untuk meningkatkan kenyamanan beribadah masyarakat (Rp.15.000.000)	RT 6 RW 1 Desa Purbowangi Dukuh Lemahtenggar Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
376	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KAWASAN PERMUKIMAN	Terdapat masyarakat miskin dengan kondisi rumah tidak layak, Perlu Adanya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Rp.20.000.000)	Sidik Maryanto, RT 01 RW 02 Karang Sari, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	20.000.000	1	unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
377	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Masjid Masjid Mambaul Hikmah RT3 RW3 Dukun Gandusuli Desa Buayan Kec. Buayan perlu dilakukan rehab untuk meningkatkan kenyamanan jamaah. Rehab Tempat Ibadah (Rp.39.000.000)	Masjid Mambaul Hikmah RT3 RW3 Dukun Gandusuli Desa Buayan Kec. Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	39.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
378	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan di RW 01 sampai RW 03 dukuh Pedati, Desa Arjomulyo Rusak, menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, Pengaspalan Jalan Poros di RW 03 Dukuh Pedati Desa Arjomulyo Kec. Adimulyo Rp.	Desa ARJOMULYO RW 01 - RW 03, dukuh Pedati Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	200	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
379	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa Banyumudal di barat pasar rusak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, pengaspalan jalan poros desa Banyumudal barat pasar RW 3 Desa Banyumudal Kec. Buayan Rp.200.000.000	Barat pasar RW 3 Desa Banyumudal Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	600	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
380	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan Desa Giyanti di RT 03 RW 03 Dukuh Kemanjuran rusak, Bantuan Keuangan Khusus Rabat Beton Rp.150.000.000	RT 03 RW 03 Dukuh Kemanjuran Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	300	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
381	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa kretek yang merupakan akses antar dusun rusak dan sulit dilalui, membutuhkan Bantuan Keuangan Khusus Pengaspalan jalan poros Desa Kretek di RT 3 RW 1 sampai dengan RT 4 RW 1 Dukuh Sawangan Rp.200.000.000	Desa Kretek di RT 3 RW 1 sampai dengan RT 4 RW 1 Dukuh Sawangan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	400	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
382	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa di Desa Purbowangi RT 03 RW 04 rusak, jalan tersebut merupakan akses untuk anak sekolah, kegiatan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya, perlu Bantuan Keuangan Khusus Rabat Beton Rp.100.000.000	Desa Purbowangi RT 03 RW 04 Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	200	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
383	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa Nogoraji di wilayah RT 3 RW 5 Dukuh Pesarean belum ada talud jalannya, membutuhkan Bantuan Keuangan Khusus talud jalan poros desa Rp.200.000.000	Desa Nogoraji di wilayah RT 3 RW 5 Dukuh Pesarean, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	400	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
384	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kondisi gedung kelas MI MA'Arif NU Wagirpandan rusak dan adanya kekurangan ruang kelas, Rehab Ruang Kelas MI Ma'arif NU Wagirpandan Kecamatan Rowokele Rp.150.000.000	Desa Wagirpandan RT 03 RW 01 Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	150.000.000	1	paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
385	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pada saat panen raya harga padi menurun dan pada musim-musim tertentu harga naik dan kekurangan stok padi/pangan, perlu Bantuan Ketahanan Pangan Poktan Sedyo Mulyo Desa Adiwarno Rp.40.000.000	Desa Adiwarno Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	40.000.000	1	paket/kelompok	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
386	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Yayasan Pusat MAQRO Nusantara, membutuhkan alat sound sistem untuk kegiatan Rp.10.000.000	Desa Buayan RT 6 RW 2, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
387	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jembatan Desa Giwangretno rusak dan perlu perbaikan, Perbaikan Jembatan Desa Rp.150.000.000. P=8 L=3 Meter	RT 03 RW 02 Desa Giwangretno Kec. Sruweng, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	24	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
388	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	jalan poros desa Adiwarno mengalami kerusakan, perlu pengaspalan jalan poros desa RT 7, RW 3 dukuh adisana	RT 7, RW 3 dukuh adisana, Desa Adiwarno Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	150	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
389	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Gedung kelompok bermain Ibu Pertiwi rusak perlu perbaikan, rehab gedung kelompok bermain ibu pertiwi (Rp.30.000.000)	Kelompok Bermain/ PAUD Ibu Pertiwi Desa Geblug Kecamatan Buayan Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.000.000	1	paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
390	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Gedung Pos PAUD Kenanga Desa Rogodadi rusak memerlukan perbaikan, Rehab Gedung PAUD (Rp.30.000.000)	PAUD Kenanga Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.000.000	1	paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
391	H. Saman Halim Nurrohman	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Gedung TK Pertiwi Desa Geblug, rusak memerlukan perbaikan. Rehab Gedung TK (Rp.30.000.000)	TK Pertiwi Desa Geblug Kecamatan Buayan Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.000.000	1	paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
392	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Permohonan Bantuan LPJU Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 60.000.000	Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	60.000.000	2	titik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
393	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Permohonan Bantuan RTLH Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 60.000.000	1. ANIFUDIN (3305061908870003) (RT 02/04 DESA TAMBAKREJO, BULUSPESANTREN) 2. SINWANI (3305061311740003) (RT 02/05 DESA TAMBAKREJO, BULUSPESANTREN) 3. IBNU NGIMAD (3305052812890002) (RT 02/04 DESA TAMBAKREJO, BULUSPESANTREN), Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	60.000.000	3	unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
394	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Permohonan Bantuan RTLH Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 60.000.000	1. Sutomo (3305062508560001) (RT 02/01 Ambalkumolo, Buluspesantren) 2. Mustolih (33051209870001) (RT 02/01 Ambalkumolo, Buluspesantren) 3. , Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	60.000.000	3	unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
395	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan Ruas Jalan Rusak Dukuh Kandangan Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 100.000.000	Dukuh Kandangan Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
396	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Permohonan Bantuan LPJU Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 60.000.000	Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	60.000.000	2	titik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
397	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan Bantuan Penyelesaian Pembangunan TPQ Lubabuth Tholibin Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 60.000.000	TPQ Lubabuth Tholibin Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	60.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
398	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Pengaspalan Ruas Jalan Rusak Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 100.000.000	Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
399	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan untuk RW 1 Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 130.000.000	RW 1 Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	130.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
400	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan untuk RW 2 Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 200.000.000	RW 2 Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
401	H. Sri Susilowati	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan untuk Desa Buluspesntren Kecamatan Buluspesantren sebesar Rp 170.000.000	Desa Buluspesntren Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	170.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
402	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Sido Muncul Rt07/RW 02 Desa Gondang legi Kec.Ambal membutuhkan bantuan ternak ayam Sebesar Rp 100.000.000	Rt07/RW 02 Desa Gondang legi Kec.Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
403	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Karang Taruna Desa Ambal Resmi membutuhkan bantuan sarpras olahraga berupa seragam Persatuan Sepakbola Ambal (PSA) sebesar Rp 10,000,000	RT 01 RW 01 Desa Ambal Resmi Kec Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
404	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Karangjiad RT 002 RW 001 Desa Kaibonpetangkuran Kec. Ambal sebesar Rp 150.000.000,00	Dukuh Karangjiad RT 002 RW 001 Desa Kaibonpetangkuran Kec. Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
405	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Renovasi Makam KRAA Poerbonegoro RT 01 RW 04 Desa Benerwetan Kec Ambal membutuhkan Bantuan Rp 20.000,000	RT 01 RW 04 Desa Benerwetan Kec Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	20.000.000			Pelindungan Cagar Budaya
406	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Karang Taruna Desa Pagedangan RT 02/RW 02 Kecamatan Ambal membutuhkan Alat-alat olahraga untuk Kelompok Sepak bola Pagedangan (PERSEPA) sebesar Rp 10.000.000,00	RT 02/RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Ambal, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
407	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Cor Jalan Ampel RT 02 RW 03 Desa Kenoyajayan Kecamatan Ambal (akses jalan keluar parkir Barat lokas Wisata pantai mliwis) membutuhkan bantuan sebesar Rp 100.000.000,00	RT 02 RW 03 Desa Kenoyajayan Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
408	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Poros Desa Dukuh Pagedangan Lor RT 04 RW 04 Desa Pagedangan Kec. Ambal Rp 150.000.000	Dukuh Pagedangan Lor RT 04 RW 04 Desa Pagedangan Kec. Ambal , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
409	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Grup Rebana Modern "Hikmah Nada" RT 03 RW 01 Desa Bener Kulon Kecamatan Ambal membutuhkan bantuan alat Rebana Rp 10,000,000,00	RT 03 RW 01 Desa Bener Kulon Kecamatan Ambal, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
410	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Grup Rebana Maha Baturrosul Desa Bener Kulon RT 02 RW 02 Kec Ambal Membutuhkan alat Rebana Rp 10,000,000	Desa Bener Kulon RT 02 RW 02 Kec Ambal, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
411	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Grup Rebana Mutiara Kalbu Desa Benerwetan RT 02 RW 02 Kecamatan Ambal Membutuhkan bantuan alat Rebana Rp 10,000,000	Desa Benerwetan RT 02 RW 02 Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
412	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelompok Budidaya Ikan "Suka maju " RT 001 RW 004 Desa Sinungrejo Kec Ambal Membutuhkan bantuan Rp 25.000.000	RT 001 RW 004 Desa Sinungrejo Kec Ambal , Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.000.000			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
413	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Kelompok Yasin dan Tahlil CSSB AL ISTIQOMAH Dusun Krajan, RT 01 RW 02 Desa Kembang sawit Kec. Ambal membutuhkan alat Rebana sebesar Rp 10,000,000,00	Dusun Krajan, RT 01 RW 02 Desa Kembang sawit Kec. Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
414	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Poros Desa Banjarsari RT 02 RW 03 Kecamatan Ambal membutuhkan bantuan sebesar Rp 50.000.000	Desa Banjarsari RT 02 RW 03 Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
415	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Grup rebana Al Jannah Dukuh Pranji RT 01 Rw 04 Desa Entak Kecamatan Ambal membutuhkan Bantuan alat Rebana Rp 10.000.000	Dukuh Pranji RT 01 Rw 04 Desa Entak Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
416	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Uang Perlengkapan Pakaian Pengantin Khas Kebumen Lawet Mas Rinonce (Harpi Melati Cabang Kabupaten Kebumen) sebesar Rp 62,700,0000	Sekretariat Bersama, Jl Rumah Sakit Lama No 13 Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	62.700.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
417	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Peni Dukuh Krajan RT 02 RW 02 Desa Benerwetan Kecamatan Ambal membutuhkan bantuan cultivator sebesar Rp 22,300,000,00	Dukuh Krajan RT 02 RW 02 Desa Benerwetan Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	22.300.000			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
418	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jembatan Dukuh Entak RT 002 RW 002 Desa Surobayan Kecamatan Ambal membutuhkan bantuan Rp 75,000,000,00	Dukuh Entak RT 002 RW 002 Desa Surobayan Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
419	H. Yulianto, S.E.	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Dukuh Noloprayan Rt 02 RW 02 - RT 02 RW 04 Desa Benerwetan, Kec. Ambal membutuhkan sebesar Rp 125.000.000	Dukuh Noloprayan Rt 02 RW 02 - RT 02 RW 04 Desa Benerwetan, Kec. Ambal, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	125.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
420	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Rehabilitasi atap Masjid Darun Na'im Alamat RT 05 RW 07 Kelurahan Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen dan kelengkapan sarana prasarana masjid sebesar 25 Juta	Dukuh Banaran RT 05 RW 07 Kelurahan Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Unit	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
421	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum tersedianya prasarana jalan yang memadai bagi masyarakat menuju masjid (masih berupa jalan tanah) Dukuh Wringin Desa Rantewringin RT 01 / 02 Kecamatan Buluspesantren 100 Juta	Dukuh Wringin Desa Rantewringin RT 01 / 02 Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	200	Meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
422	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum optimalnya sarpras jalan desa Dukuh Waja Desa Jogopaten RT 01/ 03 Kecamatan Buluspesantren 150 Juta	Dukuh Waja Desa Jogopaten RT 01/ 03 Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	200	Meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
423	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum optimalnya keadaan jalan desa Dukuh Karang Sambung Desa Tanahsari RT 01/03 Kecamatan Kebumen 150 Juta	Dukuh Karang Sambung Desa Tanahsari RT 01/03 Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	200	Meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
424	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KEBUMEN	Keadaan jalan warga yang rusak di Dukuh Kemitir RT 04 RT 07 dan RT 08 / RW 01 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 100 Juta	Dukuh Kemitir melintasi RT 04 RT 07 RT 08 / RW 01 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	KECAMATAN KEBUMEN	100.000.000	200	Meter	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
425	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan yang kurang memadai Dukuh Darussalam RT 04 / RW 01 Desa Bandung Kecamatan Kebumen 100 Juta	Dukuh Darussalam RT 04 / RW 01 Desa Bandung Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	200	Meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
426	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	"Tidak Optimalnya Pengembangan UMKM berupa (Tarub plong , tangga, kursi, kompor, terpal) milik (Kelompok Usaha Bersama ""Jaya Sesarengan"") SK Usaha NOMOR: 400.9.14/140 di Dukuh Keposan RT 01, RT 06, RT 07 / RW 05 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen sebesar 75 Juta"	Dukuh Keposan RT 01, RT 06, RT 07 / RW 05 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	75.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
427	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Belum tersedianya alat rebana untuk Lembaga Jami'iyah Yasin Muslimat Syuhada Dukuh Syuhada RT 03/RW 01 dan Lembaga Jami'iyah Yasin Muslimat Sungada Dukuh Sungada RT 04/RW 01 di Desa Bandung sebesar 20 Juta	1. Dukuh Syuhada RT 03/RW 01 Desa Bandung Kecamatan Kebumen. 2. Dukuh Sungada RT 04/RW 01 Desa Bandung Kecamatan Kebumen , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	20.000.000	2	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
428	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tidak optimalnya pengelolaan sistem drainase di Dukuh Kuwarisan melintasi RT 02 / RW 07, RT 02/ RW 09, RT 03/ RW 08 Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen sebesar 100 Juta	Dukuh Kuwarisan melintasi RT 02 / RW 07, RT 02/ RW 09, RT 03/ RW 08 Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	KECAMATAN KEBUMEN	100.000.000	1	Paket	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
429	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Peningkatan Akses Jalan sebesar 50 Juta	Makam Syech Yusuf, Dukuh Krajan Desa Buluspesantren RT 01 / 01 Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	100	Meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
430	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KEBUMEN	Tidak optimalnya pengelolaan pengangkutan sampah karena belum tersedianya kendaraan roda 3 (Viar) di Dukuh Banaran RW 07 Kelurahan Tamanwinangun sebesar 40 Juta untuk Komunitas Peduli Lingkungan Sahabat Anda	Dukuh Banaran RW 07 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000	1	Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
431	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KEBUMEN	Tidak optimalnya pengelolaan pengangkutan sampah karena belum tersedianya kendaraan roda 3 (Viar) di Dukuh Kuwarisan RT 01 / RW 09 Kelurahan Panjer sebesar 35 Juta untuk Komunitas Peduli Lingkungan Murakabi Care	Dukuh Kuwarisan RT 01 / RW 09 Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.000.000	1	Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
432	Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan yang tidak memadai di Dukuh Ganggeng, RT 06 / RW 03 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen sebesar 55 Juta	Dukuh Ganggeng, RT 06 / RW 03 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	55.000.000	145	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
433	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	JALAN RUSAK MEMERLUKAN PENGASPALAN JALAN SENILAI, Rp. 185.000.000	WILAYAH DESA BEJIRUYUNG, SEMPOR, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
434	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	MUSHOLLA PERLU PERBAIKAN, SENILAI Rp. 25.000.000	MUSHOLLA AN NUR JALAN RAYA KALIBENING RT 05 RW 04, DESA KALIBENING KEC. KARANGGAYAM, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
435	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	JALAN RUSAK, MEMERLUKAN PENGASPALAN SENILAI Rp. 175.000.000	RT 003 RW 003 DESA PEKUNCEN, KEC. SEMPOR, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	175.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
436	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	JALAN RUSAK, MEMERLUKAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI RABAT BETON SENILAI, RP. 200.000.000	WILAYAH DESA JATINEGARA, KEC. SEMPOR, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
437	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KONDISI SALURAN IRIGASI RUSAK, MEMERLUKAN PERBAIKAN, SENILAI RP. 200.000.000	RT 01/RW 02 dukuh Wanalela Desa Kemukus, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	200.000.000	1	Paket	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
438	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	JALAN MEMERLUKAN PENGASPALAN, SENILAI RP. 200.000.000	RT 01 RW 02 DESA SELOKERTO, KEC. GOMBONG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
439	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	KONDISI JALAN RUSAK, MEMERLUKAN PENGSAHALAN JALAN, SENILAI RP. 200.000.000	RW 005 DAN RW 006 DESA SEMANDING, KEC GOMBONG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
440	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	WISATA DI DESA SIDOHARUM MEMERLUKAN BANTUAN HIBAH UANG SENILAI RP. 200.000.000	DESA SIDOHARUM, KEC. SEMPOR, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	200.000.000	1	Paket	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
441	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	KONDISI JALAN RUSAK MEMERLUKAN PEMBANGUNAN RABAT BETON SENILAI RP. 200.000.000	DK. SAJAMERTAN DESA TUNJUNGSETO, KEC. SEMPOR, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
442	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	KONDISI JALAN RUSAK, MEMERLUKAN PENGASPALAN SENILAI RP. 200.000.000	WILAYAH DESA WONOKRIYO, KEC. GOMBONG, Kab. Kebumen	KECAMATAN GOMBONG	200.000.000	1	Paket	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
443	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sarana dan Prasarana sekolah memerlukan renovasi senilai Rp. 100.000.000	SD NEGERI 1 TUNJUNGSETO SEMPOR, NPSN : 20305808, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.000.000	1	Paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
444	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	JALAN RUSAK, MEMERLUKAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL SENILAI 200JT	DESA KALITENGAH, KEC. GOMBONG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
445	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sarana dan Prasarana sekolah memerlukan renovasi senilai Rp. 100.000.000	SMP Muhammadiyah Kenteng, Desa Kenteng, Kec. Sempor, Kab. Kebumen , Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.000.000	1	paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
446	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Memerlukan bantuan JUT senilai Rp 100 Jt	Kelompok Tani Catur Rahayu, Desa Panjangsari, Kec. Gombang., Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000	1	Paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
447	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan rabat beton (185x3,2x0,12) senilai Rp 150 Jt	RW 2 RT 1 dan RT 3, desa Wero, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
448	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KARANGANYAR	PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL DIWILAYAH DESA PLARANGAN SENILAI Rp. 200 JT	WILAYAH KELURAHAN PLARANGAN, KEC. KARANGANYAR, Kab. Kebumen	KECAMATAN KARANGANYAR	200.000.000	1	Paket	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
449	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN GOMBONG	PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL DI WILAYAH KELURAHAN GOMBONG	Wilayah Kelurahan Gombong, Kec. Gombong, Kab. Kebumen	KECAMATAN GOMBONG	200.000.000	1	Paket	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
450	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	JALAN RUSAK, MEMERLUKAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL, SENILAI Rp. 200 JT	RT 001 RW 002, DESA SEMONDO KEC GOMBONG, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
451	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	JALAN RUSAK, MEMERLUKAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL, SENILAI Rp. 200 JT	RT 001 RW 002 DESA KEDUNGJATI, KEC. SEMPOR, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
452	Khanifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan Poros Desa, Desa Kalibagor Dukuh Kedondong RW 04 Kec. Kebumen sebesar Rp 150.000.000,00	Desa Kalibagor Dukuh Kedondong RW 04 Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
453	Khanifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan Poros Desa, Desa Jlegiwinangun RT 04 RW 04 Kec. Kutowinangun sebesar Rp 150.000.000,00	Desa Jlegiwinangun RT 04 RW 04 Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
454	Khanifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Jalur Watukuwuk RT 02 - RT 13 RW 03 Desa Wonokromo Kec. Alian sebesar Rp 200.000.000,00	Jalur Watukuwuk RT 02 - RT 13 RW 03 Desa Wonokromo Kec. Alian , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
455	Khanifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan Poros Desa, Desa Pejagatan RW 01 Kec. Kutowinangun sebesar Rp 100.000.000,00	Desa Pejagatan RW 01 Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
456	Khanifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan Poros Desa, Desa Kambang Sari RT 01 RW 01 dan RT 02 RW 03 Kec. Alian sebesar Rp 100.000.000,00	Desa Kambang Sari RT 01 RW 01 dan RT 02 RW 03 Kec. Alian, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
457	Khanifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan RT 03 RW 04 Desa Surotrunan menuju Tambangsari Kec. Alian sebesar Rp 100.000.000,00	RT 03 RW 04 Desa Surotrunan menuju Tambangsari Kec. Alian , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
458	Khanifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton RT 04 RW 06 Desa Sawangan Kecamatan Alian sebesar Rp 200.000.000,00	RT 04 RW 06 Desa Sawangan Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
459	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum optimalnya pengembangan umkm (Laundry Milik Syarif Tofa NIB:1911210019092) dukuh Mendit Desa Kritig Kecamatan Petanahan sebesar 75 Juta	Dukuh Mendit Desa Kritig Kecamatan Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000		umkm individu	Pengembangan Usaha Mikro
460	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Sragam Yasinan rt.02/rw.02 Dukuh Perna Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong 10 Juta	rt.02/rw.02 Dukuh Perna Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000		Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
461	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Alat Rebana : Grup Rebana Azzuhrofiah Muslimat NU Ranting Karangglonggong Kecamatan Klirong Kebumen sebesar 10 Juta	Muslimat NU Desa Karangglonggong Kecamatan Klirong Kebumen sebesar 10 Juta, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000		Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
462	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Alat Rebana: Grup Al Hikmah Rt.03/Rw.02 Desa Podoluhur Kecamatan Klirong 10 Juta	Rt.03/Rw.02 Desa Podoluhur Kecamatan Klirong, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000		Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
463	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Madrasah Diniyah Takmiliyah MDT Madinatul Ahbab Kritig RT02 RW 02 Kecamatan Petanahan senilai Rp 270.000.000	Desa Kritig RT 02 RW 02 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	70.000.000		Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
464	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi: Hibah Rp 100.000.000 Koperasi Pondok Pesantren Sa'adah dukuh Bulus desa Kritig Kecamatan Petanahan	KOPONTREN Sa'adah Dukuh Bulus, Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000		Paket	Pengembangan Usaha Mikro
465	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Masih perlunya bantuan pengembangan umkm Dekorasi berupa peralatan (Kursi, Meja, Backdrop, Hiasan Bunga, Ornamen, Lampu dan Pencahayaan, Panggung Pelaminan) dengan NOMOR INDUK BERUSAHA: 1006250116864 Pemilik M RIFQI ALHABIB Alamat : DK SOKA KEDAWUNG PEJAGOAN, Desa/Kelurahan Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah NO HP: +6283866314141 Email : habib.alhabib.al2@gmail.com senilai Rp 50 Juta	Alamat : DK SOKA KEDAWUNG PEJAGOAN, Desa/Kelurahan Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000		Paket	Pengembangan Usaha Mikro
466	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di Desa Watulawang Dukuh Era RT 10/ RW 02 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen membutuhkan pengaspalan jalan sebesar 150 juta	Desa Watulawang Dukuh Era RT10/ RW 02 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000		Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
467	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di Desa Aditirto RT 08 RW 02 Kalibalong Aditirto Pejagoan Kabupaten Kebumen membutuhkan Rabat Beton sebesar 150 Juta	Desa Aditirto RT 08 RW 02 Kalibalong Aditirto Pejagoan Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000		Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
468	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di Dukuh Lempong Desa Prigi RT 06, RT 05/ RW 02 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen membutuhkan Rabat Beton sebesar 100 juta	Dukuh Lempong Desa Prigi RT 06, RT 05/ RW 02 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000		Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
469	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di RT 05 RW 11 Dukuh Sibango Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen membutuhkan Rabat Beton sebesar 100 juta	RT 05 RW 11 Dukuh Sibango Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000		Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
470	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di RT 006 RW 002 Desa Pengaringan Kec. Pejagoan Kabupaten Kebumen membutuhkan pengaspalan sebesar 100 juta	RT 006 RW 002 Desa Pengaringan Kec. Pejagoan Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000		Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
471	Khotimah, S.Pd	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di RT 1 RW 1 Dukuh Lirap samai RT 01 RW 02 Dukuh Sumber Desa Banjarwinangun Kec. Petanahan Kabupaten Kebumen membutuhkan Pengaspalan sebesar 100 juta	RT 1 RW 1 Dukuh Lirap samai RT 01 RW 02 Dukuh Sumber Desa Banjarwinangun Kec. Petanahan Kabupaten Kebumen , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000		Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
472	Krismawati	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Drainase RT 02 RW 01 Desa Kaliputih, Kec. Kutowinangun Rp 100.000.000	Desa Kaliputih RT 02 RW 01 , Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000	1000	meter	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
473	Krismawati	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pembangunan LPJU RT 01 RW 02 Dusun Gunung Desa Kaliputih, Kec. Kutowinangun Rp 130.000.000	Dusun Gunung Desa Kaliputih RT 01 RW 02 , Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	130.000.000	9	unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
474	Krismawati	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Talud Jalan Desa RT 01 RW 05 Dk. Klepu Rubung, Desa Triwarno, Kec. Kutowinangun Rp 300.000.000	Dk. Klepu Rubung, Desa Triwarno RT 01 RW 05, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000	1000	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
475	Krismawati	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 01 RW 02 Dk. Sikambang, Desa Karang Sari, Kec. Kutowinangun Rp 130.000.000	Dk. Sikambang, Desa Karang Sari RT 01 RW 02, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	130.000.000	1000	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
476	Krismawati	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Aspal RT 02 RW 02 Dk. Lerep, RT 04 RW 02 Dk. Kembaran Desa Karang Sari, Kec. Kutowinangun Rp 340.000.000	Dk. Lerep RT 02 RW 02, Dk. Kembaran RT 04 RW 02, Desa Karang Sari, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	340.000.000	1000	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
477	Kurniawan	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Rusaknya jalan Desa Rt 04/ Rw 01 Desa Sidogede, Kecamatan Prembun Rp 500.000.000	Rt 04/ Rw 01 Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
478	Kurniawan	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	rusaknya jalan Desa Dukuh Kranji Rt 03/ Rw 04 Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Rp. 300.000.000	Dukuh Kranji Rt 03/ Rw 04 Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
479	Kurniawan	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	rusaknya jalan Desa Dukuh Babah Anyar Rt 02/ Rw 02 Desa Kertodeso Kecamatan Mirit Rp. 300.000.000	Dukuh Babah Anyar Rt 02/ Rw 02 Desa Kertodeso Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
480	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bantuan untuk KTT Jadi Mukti Bersama kambing betina 30 ekor Jantan 3 ekor, senilai (Rp. 105 Jt)	KTT Jadi Mukti Bersama, desa Madurejo, Kec. Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	105.000.000	1	Paket	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
481	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Ayam petelur 1 paket (Rp70.000.000) untuk KTT Sri Rejeki, Desa Banjareja, Kecamatan Puring	KTT Sri Rejeki, Desa Banjareja, Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35.000.000	1	paket	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
482	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bantuan untuk KTT Lestari kambing betina 30 ekor Jantan 3 ekor, senilai (Rp. 105 Jt)	KTT Lestari Desa Gumawang, Kecamatan Kuwarasan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	105.000.000	1	Paket	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
483	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	BKK Pembangunan Jalan Poros Desa untuk RW 06 Desa Lemahduwur, Kecamatan Kuwarasan 1 Paket (Rp200.000.000)	RW 06 Desa Lemahduwur, Kecamatan Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	280.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
484	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Musholla memerlukan Renovasi senilai Rp. 15 Jt	Mushola Maqomul Muttaqin RW 05 RT 3 desa Lemahduwur Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
485	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bebek petelur 1 paket untuk KTT Terus Maju desa Tambaharjo, Kec. Adimulyo senilai (Rp. 70 Jt)	KTT Terus Maju, desa Tambaharjo Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	70.000.000	1	Paket	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
486	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan Memerlukan Pengaspalan (500x3x0.04) senilai Rp. 190 Jt	RW 4 RT 1 RT 2 RT 3, desa Banjareja Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	190.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
487	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan pengaspalan 270x1,8x0,10 senilai Rp. 70 jt	RT 02 RW 01, desa Madureso, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	70.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
488	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan rabat beton (300x2x0,15) senilai Rp 130 Jt	RW 1 RT 1 DAN RT 2, desa tambaksari, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	130.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
489	M Madkhan Anis, S.Kep Ns	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan pengaspalan 250x3 senilai Rp. 100 jt	RT 03 RW 02, desa Madureso, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
490	M. Fauhan Fawaqi, S.I.P, M.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	pembangunan/peningkatan/pemeliha aan jalan poros desa (MEMERLUKAN ASPAL) Rp 200.000.000	RT 04 RW 04 (arah masjid Al- Falah Kalikudu) Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
491	M. Fauhan Fawaqi, S.I.P, M.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan/rehabilitasi/pemeliha aan Jalan Poros Desa RT 01 RW 05 Dukuh Kalikudu, Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, senilai Rp 200.000.000	RT 01 RW 05 Dukuh Kalikudu, Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
492	M. Fauhan Fawaqi, S.I.P, M.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PEMELIHARAAN JALAN POROS DESA MEMERLUKAN ASPAL Rp 200.000.000	Dk. Sokareja RT 002 RW 001 Desa Tlogowulung, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
493	M. Fauhan Fawaqi, S.I.P, M.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PEM ELIHARAAN JALAN POROS DESA (RABAT PELEBARAN JALAN) Rp. 200.000.000	"DUKUH WIDORO PAYUH BARAT RW 04 SAMPAI RW 05 DESA WIDORO KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN, Kab. Kebumen" , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	km	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
494	M. Fauhan Fawaqi, S.I.P, M.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PEM ELIHARAAN JALAN POROS DESA (MEMBUTUHKAN ASPAL) Rp. 200.000.000	DUKUH ERA GOMBONG RT 01 SAMPAI RT 02 DESA PLUMBON KEC. KARANGSAMBUNG, KAB. KEBUMEN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	km	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
495	M. Fauhan Fawaqi, S.I.P, M.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	embangunan/peningkatan/pemeliha aan jalan poros desa (MEMERLUKAN ASPAL) Rp 200.000.000	Dari RT 02 RW 04 Sampai RT 04 RW 05 Desa Kaligending, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
496	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan rehab Mushola Miftakhul Hidayah Desa Jlegiwinangun RT 04 RW 01 Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen sebesar Rp 15.000.000	Mushola Miftakhul Hidayah Desa Jlegiwinangun RT 04 RW 01 Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
497	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan rehab Mushola Al Barokah Desa Jlegiwinangun RT 03 RW 03, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen sebesar Rp 15.000.000	Mushola Al Barokah Desa Jlegiwinangun RT 03 RW 03, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
498	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan rehab Mushola Al Amin Desa Kutowinangun RT 01 RW 03, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen sebesar Rp 15.000.000	Mushola Al Amin Desa Kutowinangun RT 01 RW 03, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
499	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan rehab Masjid Al Muttaqin Desa Karangsembung RT 01 RW 04, Kec. Karangsembung, Kab. Kebumen sebesar Rp 25.000.000	Masjid Al Muttaqin Desa Karangsambung RT 01 RW 04, Kec. Karangsembung, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
500	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan seragam rebana untuk PKK Dukuh Kemawuran Desa Ungaran, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen sebesar Rp 10.000.000	PKK Dukuh Kemawuran Desa Ungaran, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
501	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan seragam rebana untuk PKK Desa Jatimulyo RT 02 RW 02 Kec. Alian, Kab. Kebumen sebesar Rp 10.000.000	PKK Desa Jatimulyo RT 02 RW 02 Kec. Alian, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
502	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan seragam rebana untuk PKK Desa Tunjungseto RT 06 RW 01 Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen sebesar Rp 10.000.000	PKK Desa Tunjungseto RT 06 RW 01 Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
503	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Peningkatan kualitas jalan desa untuk Dukuh Penajung RW 01 Desa Tunjungseto, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen sebesar Rp 150.000.000	Dukuh Penajung RW 01 Desa Tunjungseto, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
504	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan desa untuk Dk Lubang RT 01 RW 02 Desa Tirtomoyo, Kec. Poncowarno Kab. Kebumen sebesar Rp 150.000.000	Dk Lubang RT 01 RW 02 Desa Tirtomoyo, Kec. Poncowarno Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
505	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan desa untuk Dk Kubang RT 05 RW 02 Desa Jembangan, Kec. Poncowarno, Kab. Kebumen sebesar Rp 250.000.000	Dk Kubang RT 05 RW 02 Desa Jembangan, Kec. Poncowarno, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	250.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
506	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pembangunan rabat beton jalan desa untuk DK Jombret RW 04 Desa Seboro, Kec. Sadang Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	DK Jombret RW 04 Desa Seboro, Kec. Sadang Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
507	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Pengaspalan Jalan Desa untuk Dk Krajan RW 01 Dan RW 02 Desa Mrinen, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	Dk Krajan RW 01 Dan RW 02 Desa Mrinen, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
508	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Pengaspalan Jalan Desa untuk Dk Gunung Puyuh RT 01 RW 03 Desa Soka, Kec. Poncowarno, Kab. Kebumen sebesar Rp 150.000.000	Dk Gunung Puyuh RT 01 RW 03 Desa Soka, Kec. Poncowarno, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
509	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan jalan Poros Desa Rt 01 Rw 04 Dukuh Kebebekan Desa Surotrunan Kecamatan Alian Rp 100.000.000	Dukuh Kebebekan Rt 01 rw 04 Desa Surotrunan Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	500	m 2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
510	Maksum Sodik	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pembangunan Jalan Poros Desa untuk Dukuh Kresek RT 02 RW 05, Desa Karangtengah, Kec. Poncowarno sebesar Rp 100.000.000	Dukuh Kresek RT 02 RW 05, Desa Karangtengah, Kec. Poncowarno, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
511	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan rusak, memerlukan pengaspalan senilai Rp. 100.000.000	RT 02 RW 02, Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
512	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelompok Perikanan memerlukan keramba, bibit dan pakan senilai Rp. 50.000.000	Kelompok Perikanan Bumi Makmur Sejahtera (BMS) desa Kedawung Kec. Pejagoan , Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000	1	Paket	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
513	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelompok Perikanan memerlukan bibit ikan dan pakan senilai Rp. 30.000.000	Wilayah Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.000.000	1	Paket	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
514	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KTT Unggul Tani memerlukan bibit ternak Kambing 2 Jantan 6 Betina senilai, Rp. 31.000.000	KTT Unggul Tani desa Kuwayuhan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	31.000.000	1	Paket	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
515	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak, memerlukan pengaspalan, senilai Rp. 100.000.000	Wilayah desa Podoluhur, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
516	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelompok perikanan memerlukan bantuan Kolam Ikan, bibit ikan lele, sebesar Rp. 150.000.000	Wilayah Desa Kuwayuhan Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000	1	Paket	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
517	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak, memerlukan pengaspalan jalan, senilai Rp 100.000.000	Wilayah RW 06, Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
518	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak, memerlukan pengaspalan, senilai Rp. 100.000.000	Wilayah Desa Kuwayuhan Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
519	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan rusak memerlukan pengaspalan senilai Rp. 100.000.000	Wilayah Desa Jemur, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
520	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelompok Perikanan membutuhkan Bibit ikan Lele, senilai Rp 50.000.000	Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.000.000	1	Paket	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
521	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan pengaspalan senilai Rp 100 Jt	RT 1 RW 2, desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
522	Munarso	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan pemaspalan senilai Rp 100 Jt	RT 1 RW 2, desa Kedungwinangun Kec. Klirong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
523	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Bantuan Peralatan Tenda atas nama Indra Sastra Gularso Alamat RT 05 RW 01 Kelurahan Panjer Kec. Kebumen sebesar Rp 100.000.000,00	RT 05 RW 01 Kelurahan Panjer Kec. Kebumen , Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
524	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Bantuan Peralatan Tenda atas nama Saefudin Zuhri Alamat RT 03 RW 01 Desa Gemeksekti Kec. Kebumen sebesar Rp 100.000.000,00	RT 03 RW 01 Desa Gemeksekti Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
525	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KEBUMEN	Kondisi Jalan RW 02 Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen Rusak sehingga membutuhkan Bantuan Pembangunan Jalan sebesar Rp 200.000.000,00	RW 02 Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen , Kab. Kebumen	KECAMATAN KEBUMEN	200.000.000			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
526	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KEBUMEN	Kondisi Jalan RW 03 Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen Rusak sehingga membutuhkan Bantuan Pembangunan Jalan sebesar Rp 200.000.000,00	RW 03 Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen , Kab. Kebumen	KECAMATAN KEBUMEN	200.000.000			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
527	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KEBUMEN	Kondisi Jalan RW 07 Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen Rusak sehingga membutuhkan Bantuan Pembangunan Jalan sebesar Rp 200.000.000,00	RW 07 Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	KECAMATAN KEBUMEN	200.000.000			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
528	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KEBUMEN	Pembangunan Drainase RT 07 RW 01 Kelurahan Panjer Kec. Kebumen sebesar Rp 200.000.000,00	RT 07 RW 01 Kelurahan Panjer Kec. Kebumen , Kab. Kebumen	KECAMATAN KEBUMEN	200.000.000			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
529	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KEBUMEN	Pembangunan Drainase RW 007 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen sebesar Rp 100.000.000,00	RW 007 Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	KECAMATAN KEBUMEN	100.000.000			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
530	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	BANTUAN REBANA DESA BERCONG RT 3 RW 5 KEC BULUSPESANTREN, KEBUMEN Rp 10.000.000	DESA BERCONG RT 3 RW 5 KEC BULUSPESANTREN, KEBUMEN, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	set	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
531	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN PERUMAHAN	BANTUAN RTLH PADUKUHAN PELEM DESA WALUYO DADAP RT 1 RW 3 KEC. BULUSPESANTREN, KEBUMEN Rp 20.000.000	PADUKUHAN PELEM DESA WALUYO DADAP RT 1 RW 3 KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	20.000.000	1	PAKET	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
532	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN BANTUAN ASPAL JALAN HOTMIX JALAN POROS DESA ARJOWINANGUN RT 01 RW 02, KEC. BULUSPESANTREN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 200.000.000	DESA ARJOWINANGUN RT 01 RW 02, KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	PAKET	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
533	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN BANTUAN RABAT BETON JALAN POROS DESA BANJUR PASAR RT 03 RW 02, KEC. BULUSPESANTREN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 200.000.000	DESA BANJUR PASAR RT 03 RW 02, KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	set	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
534	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	BANTUAN TRACKTOR 1 UNIT DESA MADURETNO RT 01 RW 03, BULUSPESANTREN Rp 35.000.000	DESA MADURETNO RT 01 RW 03, BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35.000.000	1	unit	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
535	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	BANTUAN SERAGAM GRUP REBANA ADDLIYAU LAMI PADUKUHAN PINGGIRKALI DESA BOCOR RT 5 RW 3, KEC. BULUSPESANTREN, KEBUMEN Rp 10.000.000	DESA BOCOR RT 5 RW 3, KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	set	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
536	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	BANTUAN REBANA KELOMPOK PKK PADUKUHAN BANJURPASAR DESA BANJURPASAR, KEC. BULUSPESANTREN, KEBUMEN Rp 10.000.000	PADUKUHAN BANJURPASAR DESA BANJURPASAR, KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	set	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
537	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	BANTUAN REBANA KELOMPOK PKK DUKUH LAKUNG DESA BRECONG RT 03 RW 05, KEC. BULUSPESANTREN, KEBUMEN Rp 10.000.000	DUKUH LAKUNG DESA BRECONG RT 03 RW 05, KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	set	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
538	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BANTUAN SEMEN 200 ZAK DUKUH KINANTI UTARA DESA BOCOR RT 03 RW 03, BULUSPESANTREN, KEBUMEN Rp 14.000.000	DUKUH KINANTI UTARA DESA BOCOR RT 03 RW 03, BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.000.000	200	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
539	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	BANTUAN PERBAIKAN MUSHOLA ASOBIRIN DUKUH JURU TENGAH RT 02 RW 02 DESA BANJURPASAR, BULUSPESANTREN, KEBUMEN Rp 20.000.000	DUKUH JURU TENGAH RT 02 RW 02 DESA BANJURPASAR, BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	20.000.000	1	set	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
540	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	MEMBUTUHKAN BANTUAN TERNAK UNTUK KELOMPOK TERNAK BEKUR DESA ARJOWINANGUN, KEC. BULUSPESANTREN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 100.000.000	DESA ARJOWINANGUN, KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.000.000	1	PAKET	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
541	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN BANTUAN ASPAL JALAN POROS DESA AMPIH RT 01 RW 02, KEC. BULUSPESANTREN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 200.000.000	DESA AMPIH RT 01 RW 02, KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	set	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
542	Ratna Yulianti, SH	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN BANTUAN RABAT BETON JALAN POROS DESA WALUYO RT 03 RW 04, KEC. BULUSPESANTREN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 271.000.000	DESA WALUYO RT 03 RW 04, KEC. BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	271.000.000	1	PAKET	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
543	Restu Gunawan	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN LAPANGAN FUTSAL DESA KEMUJAN, ADIMULYO DENGAN ANGGARAN SEBESAR Rp 300.000.000	DESA KEMUJAN, KEC. ADIMULYO, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	300.000.000	1	Paket	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
544	Restu Gunawan	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN DESA RT 03 RW 02, DUKUH PECANGKRINGAN, DESA MANGUNHARJO, KEC. ADIMULYO DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 100.000.000	RT 03 RW 02, DUKUH PECANGKRINGAN, DESA MANGUNHARJO, KEC. ADIMULYO, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
545	Restu Gunawan	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN RABAT BETON JALAN DESA RT 02 RW 07, DUKUH SRUWO KULON, DESA BANYURATA, KEC. ADIMULYO DENGAN ANGGARAN RP 150.000.000	RT 02 RW 07, DUKUH SRUWO KULON, DESA BANYURATA, KEC. ADIMULYO, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
546	Restu Gunawan	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN PENGASPALAN JALAN DESA PEKUWON RW 2 SAMPAI RW 1, KEC. ADIMULYO, KEBUMEN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 150.000.000	DESA PEKUWON RW 2 SAMPAI RW 1, KEC. ADIMULYO, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
547	Restu Gunawan	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN DESA RT 01 RW 01 DUKUH KESUGRAN, DESA ADILUHUR, KEC. ADIMULYO DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 150.000.000	RT 01 RW 01 DUKUH KESUGRAN, DESA ADILUHUR, KEC. ADIMULYO , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	PAKET	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
548	Restu Gunawan	GOLKAR DEMOKRAT	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN DESA RT 04 RW 02 DUKUH PAGAKSARI, DESA KEMUJAN, KEC. ADIMULYO DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 150.000.000	RT 04 RW 02 DUKUH PAGAKSARI, DESA KEMUJAN, KEC. ADIMULYO , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	PAKET	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
549	Saefudin	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak, perlu Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton RT 05 -04 - 06 RW 03 Desa Gemeksekti Kec Kebumen, senilai Rp. 400.000.000	RT 05 -04 - 06 RW 03 Desa Gemeksekti Kec Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
550	Saefudin	Nasdem	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan tembusan dari RW 01 ke RW 03, kondisi rusak dan kurang memadai, memerlukan pembangunan jalan untuk mempermudah akses masyarakat, senilai Rp 600.000.000	RW 01 RW 03 Desa Jemur, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000	1800	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
551	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perlunya rehab ruang kelas, karena kondisi bangunan sudah sangat tua. 100.000.000	TK Jaya Bakti RT 01 RW 03 Desa Kritig Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.000.000	1	Paket	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
552	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perluanya bantuan untuk Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan untuk Karangtaruna Desa Dorowati dengan "Pembelian seragam karang taruna dan alat olahraga sepak bola (bola, sarung tangan kiper, dll) senilai 10.000.000	RT 03 RW 02 Dk. Entak Desa Dorowati Kecamatan Klirong , Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA	10.000.000	1	Paket	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
553	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Masih Perlunya Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Poros Desa di DK. TEGONG RT 02 RW 09 DESA PENIRON KECAMATAN PEJAGOAN SENILAI 150.000.000	DK. TEGONG RT 02 RW 09 DESA PENIRON KECAMATAN PEJAGOAN, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
554	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Masih Perlunya Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Poros Desa, DK. ENTAK RT 03 RW 02 DESA DOROWATI KEC. KLIRONG SENILAI 150.000.000	DK. ENTAK RT 03 RW 02 DESA DOROWATI KEC. KLIRONG, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
555	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	MASIH PERLUNYA BANTUAN DAN PEMBINAAN GUNA PENGEMBANGAN KELOMPOK TERNAK SAPI "KTT HARAPAN KITA" , BERUPA EMPAT (4) EKOR SAPI PO DI DESA KEBADONGAN SENILAI 90.000.000	RT 01 RW 03 DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	90.000.000	4	EKOR	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
556	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	MASIH PERLUNYA BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN UMKM INDIVIDU ATAS NAMA AHMAD ZAENUDIN DENGAN USAHA PERTUKANGAN DI DESA JEMUR KEC. PEJAGOAN SENILAI 50.000.000	RT 02 RW 03 DESA JEMUR KECAMATAN PEJAGOAN, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000	1	PAKET	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
557	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	MASIH PERLUNYA PERBAIKAN JALAN UNTUK DESA PODOLUHUR SENILAI 118.000.000 (BKK)	DESA KEDUNGWINANGUN KECAMATAN KLIRONG 7,692S 109,651504 E, ALTITUDE:51.0 m , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	118.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
558	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	MASIH PERLUNYA BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN UMKM INDIVIDU ATAS NAMA MURTOFIQ DENGAN USAHA PERTUKANGAN DESA KEBADONGAN SENILAI 50.000.000	RT 02 RW 03 DESA KEBADONGAN KEC. KLIRONG, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000	1	PAKET	Pengembangan Usaha Mikro
559	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	MASIH PERLUNYA BANTUAN UNTUK KARANG TARUNA GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS KEPEMUDAAN KARANG TARUNA "MANUNGGAL" DESA KEBADONGAN KEC. KLIRONG dengan Pembelian seragam karang taruna dan alat olahraga sepak bola (bola, sarung tangan kiper, dll) SENILAI 10.000.00	DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	PAKET	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
560	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	MASIH PERLUNYA BANTUAN SEGARAM UNTUK KELOMPOK SENI DAN BUDAYA "MAFAZA" DESA KEBADONGAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN KREATIF KELOMPOK, DI DESA KEBADONGAN SENILAI 10.000.000	RT 02 RW 03 DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	PAKET	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
561	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun Petilasan RT 003/ RW 004 Desa Logede Kec. Pejagoan guna memperlancar aktivitas pertanian. senilai 150.000.000	Dusun Petilasan RT 003/ RW 004 Desa Logede Kec. Pejagoan , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
562	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Masih Perlunya Pembangunan atau rehabilitasi Jalan Poros Desa, RT 01 RW 02 Desa Bumiharjo Kec. Klirong Kabupaten Kebumen senilai 150.000.000(BKK)	RT 01 RW 02 Desa Bumiharjo Kec. Klirong Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
563	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Masih perlunya bantuan untuk pengembangan usaha mikro, nama usaha "KUE SAGON", Farida Fitriani dengan kebutuhan mesin oven Desa Kebulusan senilai Rp 16.842.359	Dukuh Tegalsari RT 12 RW 03 Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.000.000	2	Unit	Pengembangan Usaha Mikro
564	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Butuh semen RT. 02 RW. 04 Desa Wonodadi Kec. Buayan 200 zak Rp. 14 juta	RT. 02 RW. 04 Desa Wonodadi Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
565	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Butuh semen RT. 02 RW. 01 Desa Wonodadi Kec. Buayan 100 zak 7 juta	RT. 02 RW. 01 Desa Wonodadi Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
566	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	butuh semen RT. 03 RW. 06 Desa Pakuran Kec. Buayan 50 zak 3,5 Juta	RT. 03 RW. 06 Desa Pakuran Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
567	Saiful Anwar	PKB	BELUM TERSEDIAINYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Kelompok Kesenian Desa Pasir RT. 01 RW. 02 membutuhkan alat kesenian kuda lumping sebesar 12 juta	Desa Pasir RT. 01 RW. 02 Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
568	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Mushola El Firdaus Desa Pasir RT. 01 RW. 03 Kec. Ayah membutuhkan sarpras peribadatan	Mushola El Firdaus Desa Pasir RT. 01 RW. 03 Kec. Ayah, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
569	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Mushola Al Hikmah Desa Pasir RT. 03 RW. 03 Kec. Ayah membutuhkan sarpras peribadatan	Mushola Al Hikmah Desa Pasir RT. 03 RW. 03 Kec. Ayah, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
570	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Desa Pasir membutuhkan bantuan keuangan untuk rabat beton jalan poros desa di RT. 04 RW. 02 sebesar 200 juta	RT. 04 RW. 02 Desa Pasir Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
571	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KTT Mugi Rahayu RT. 02 RW. 02 Desa Kalibangkang Kec. Ayah membutuhkan bantuan ternak kambing sebesar 30 juta	KTT Mugi Rahayu RT. 02 RW. 02 Desa Kalibangkang Kec. Ayah , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30.000.000	10	ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
572	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan poros desa RT 03 s.d. RT. 04 pada RW. 04 Desa Kalibangkang Kec. Ayah membutuhkan perbaikan senilai 200 juta	Jalan poros desa RT 03 s.d. RT. 04 pada RW. 04 Desa Kalibangkang Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
573	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Hibah masjid Nurul Istiqomah Dusun Manggis rt 2 rw 1 Karangbolong 100juta	masjid Nurul Istiqomah Dusun Manggis rt 2 rw 1 Karangbolong Kec. Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
574	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Mushola An Nur rt 4 rw 1 desa karangbolong butuh perbaikan	Mushola An Nur rt 4 rw 1 desa karangbolong Kec. Buayan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
575	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	butuh semen rt 01 rw 03 Desa Karangbolong Kec. Ayah 150 zak 11juta	semen rt 01 rw 03 Desa Karangbolong Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
576	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	butuh semen rt 2 rw 1 Desa Karangbolong Buayan 200sak 14juta	rt 2 rw 1 Desa Karangbolong Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
577	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	butuh semen rt 3 rw 1 Desa Karangbolong Kec. Buayan 200sak 14juta	rt 3 rw 1 Desa Karangbolong Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
578	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	butuh semen rt 2 rw 3 Desa Karangbolong Kec. Buayan 100 sak 7juta	rt 2 rw 3 Desa Karangbolong Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
579	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	butuh semen rt 1 rw 1 Desa Karangbolong Kec. Buayan 150 sak 11juta	rt 1 rw 1 Desa Karangbolong Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
580	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	butuh semen rt 4 rw 1 Desa Karangbolong Kec. Buayan 150 sak 11juta	rt 4 rw 1 Desa Karangbolong Kec. Buayan , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
581	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	jalan poros desa butuh rabat beton di rt 04 rw 01 desa kretek kec. rowokele senilai 200juta	rt 04 rw 01 desa kretek kec. rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
582	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	rehab masjid al falah rt 02 rw 01 desa argosari Kec. Ayah 25juta	rehab masjid al falah rt 02 rw 01 desa argosari Kec. Ayah , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
583	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 02 rw 05 Desa Srati Kec. Ayah 100 sak 7juta	rt 02 rw 05 Desa Srati Kec. Ayah , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
584	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 01 rw 04 100 sak 7juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 01 rw 04 100 sak 7juta Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
585	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 1 rw 1 50 zak 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 1 rw 1 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
586	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 2 rw 1 50 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 2 rw 1 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
587	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 3 rw 1 50 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 3 rw 1 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
588	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 4 rw 1 100 7juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 4 rw 1 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
589	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 5 rw 1 70 5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 5 rw 1 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
590	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 6 rw 1 50 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 6 rw 1 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
591	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 1 rw 2 50 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 1 rw 2 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
592	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 2 rw 2 100 7juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 2 rw 2 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
593	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 3 rw 2 100 7juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 3 rw 2 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
594	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 4 rw 2 50 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 4 rw 2 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
595	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 5 rw 2 50 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 5 rw 2 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
596	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 3 rw 4 50 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 3 rw 4 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
597	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	semen rt 2 rw 3 50 3.5juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	rt 2 rw 3 Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
598	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	kelompok ternak engal mulya III (kambing 30 ekor) 50juta Desa Banjararjo Kec. Ayah	kelompok ternak engal mulya III Desa Banjararjo Kec. Ayah, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30.000.000	10	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
599	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	rabat beton rt 03 rw 04 dukuh karangdempel 150juta Desa Demangsari Kec. Ayah	rt 03 rw 04 dukuh karangdempel Desa Demangsari Kec. Ayah, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
600	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT 5/5 DUSUN JATIBUNGKUS DESA SRATI KEC. AYAH 50 ZAK	RT 5/5 DUSUN JATIBUNGKUS DESA SRATI KEC. AYAH, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
601	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT 1/5 DUSUN JATIBUNGKUS DESA SRATI KEC. AYAH	RT 1/5 DUSUN JATIBUNGKUS DESA SRATI KEC. AYAH, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
602	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT 2/5 DUSUN JATIBUNGKUS DESA SRATI KEC. AYAH	RT 2/5 DUSUN JATIBUNGKUS DESA SRATI KEC. AYAH, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
603	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT 6/5 DUSUN JATIBUNGKUS DESA SRATI KEC. AYAH	RT 6/5 DUSUN JATIBUNGKUS DESA SRATI KEC. AYAH, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
604	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT. 01/04 DESA SRATI KEC. AYAH 50 ZAK	RT. 01/04 DESA SRATI KEC. AYAH, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
605	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Musholla Baitul Muttaqin RT 01/01 DESA JINTUNG KEC. AYAH BUTUH BANTUAN RENOVASI DLL 30 JUTA	Musholla Baitul Muttaqin RT 01/01 DESA JINTUNG KEC. AYAH, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
606	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Renovasi Musholla Nurul Iman RT. 03/01 DESA JINTUNG KEC. AYAH 15 JUTA	Musholla Nurul Iman RT. 03/01 DESA JINTUNG KEC. AYAH , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
607	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Renovasi Musholla Al Mubarak RT.07/01 DESA JINTUNG KEC. AYAH 15 JUTA	Musholla Al Mubarak RT.07/01 DESA JINTUNG KEC. AYAH, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
608	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Renovasi Musholla Nurul Huda RT. 02/02 DESA JINTUNG KEC. AYAH 15 JUTA	Musholla Nurul Huda RT. 02/02 DESA JINTUNG KEC. AYAH , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
609	Saiful Anwar	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pembangunan Gedung TPQ Manbaul Ulum RT. 06/02 DESA JINTUNG KEC. AYAH 15 JUTA	TPQ Manbaul Ulum RT. 06/02 DESA JINTUNG KEC. AYAH , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
610	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT. 03/07 DESA JLADRI KEC. BUAYAN 200 ZAK	RT. 03/07 DESA JLADRI KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
611	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT. 01/09 DESA JLADRI KEC. BUAYAN 150 ZAK	RT. 01/09 DESA JLADRI KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
612	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT. 02/09 DESA JLADRI KEC. BUAYAN 150 ZAK	RT. 02/09 DESA JLADRI KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
613	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT. 03/09 DESA JLADRI KEC. BUAYAN 150 ZAK	RT. 03/09 DESA JLADRI KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
614	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT. 02/02 DESA JLADRI KEC. BUAYAN 100 ZAK	RT. 02/02 DESA JLADRI KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.455	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
615	Saiful Anwar	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	BUTUH SEMEN RT. 02/04 DESA JLADRI KEC. BUAYAN 200 ZAK	RT. 02/04 DESA JLADRI KEC. BUAYAN , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.545.450	50	ZAK	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
616	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	membutuhkan bibit kambing 10 ekor 30.000.000	kelompok tani ternak ngudi rukun desa bejiruyung rt 02 rw 01 , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30.000.000	10	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
617	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TK tunas mekar membutuhkan APE 10.000.000	TK TUNAS MEKAR, Banaran rt 2 rw 1 desa tunjungseto, sempor, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
618	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	pos PAUD KARUNIA membutuhkan APE 10.000.000	pos paud Karunia Desa Sempor rt 4 rw 1, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
619	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TK PGRI JATINEGARA 1 membutuhkan APE 10.000.000	TK PGRI JATINEGORO 1 Desa Jatinegara rt 7 rw 2 kec. sempor, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
620	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TK TUNAS BANGSA membutuhkan APE 10.000.000	TK TUNAS BANGSA Desa Kenteng Rt 2 Rw 4 Kec. Sempor, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
621	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan gang desa membutuhkan rabat beton Rp. 100.000.000	Dukuh Karang kemiri Desa Purbowangi Rt. 04 Rw 05 Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
622	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Pengaspalan jalan desa 200 m x 2 m ,Rp 100.000.000	Dukuh Pejaten , Desa Kedungjati, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	400	m2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
623	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Perbaikan Aspal jalan poros desa, Rp 200.000.000	Dukuh Tegal Kotak, Desa Bejiruyung RW 2 Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	450	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
624	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Rabat baton jalan poros desa Rp 150.000.000	Dukuh Masaran wilayah RW 3 Desa Bonosari, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	170.000.000	200	meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
625	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan cor jalan poros desa Rp 150.000.000	Dukuh Ratan Desa Donorojo RT 3 RW 2 Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	300	Meter	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
626	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PEMASARAN PARIWISATA	Pembuatan tempat informasi geopark kebumen barat utara Rp 100.000.000	Pokdarwis Setro Rahayu, Desa Tunjungseto RT 04 RW 02 Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	100.000.000	1	Paket	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
627	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Belum memiliki seragam group rebana Rp 10.000.000	Group rebana Cahaya Tebu Dukuh BUA RT 2 RW 3 Desa Kedungwringin Kec Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
628	Sigit Ragil Sapto Hadi	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Wilayah Dukuh Karet Desa Kedungringin RW 1 selalu kekurangan air bersih dimusim kemarau Rp 150.000.000	Dukuh Karet, Desa Kedungringin RT 2 RW 1 Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.000.000	1	paket	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
629	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan untuk Jalan timur SMPN 1 Puring RT.03/RW.02 s/d RT.04/RW.01 Desa Sitiadi Kecamatan Puring sebesar Rp 150.000.000	Jalan timur SMPN 1 Puring RT.03/RW.02 s/d RT.04/RW.01 Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
630	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Rabat Beton Blok jalan kepek Dk. Luangkandang RT 13 dan RT 14 Desa Waluyorejo, Kec. Puring sebesar Rp 150.000.000	Blok jalan kepek Dk. Luangkandang RT 13 dan RT 14 Desa Waluyorejo, Kec. Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
631	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Pengaspalan Jalan Poros Desa untuk Dk. Putat RT 03 RW 01 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong Rp 150.000.000	Dk. Putat RT 03 RW 01 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
632	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Rabat beton RT 02/03 Dk. Emprak Desa Wonoyoso Kec. Kuwarasan sebesar Rp 150.000.000	RT 02/03 Dk. Emprak Desa Wonoyoso Kec. Kuwarasan , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
633	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Rabat Beton untuk Desa Pondokgebangsari RT 01 RW 01 Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen sebesar Rp 150.000.000	Desa Pondokgebangsari RT 01 RW 01 Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
634	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan RT 01, 02 RW 05 Desa Sawangan, Kec. Kuwarasan sebesar Rp 150.000.000	RT 01, 02 RW 05 Desa Sawangan, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
635	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan untuk Dukuh Jimbun RT 01 RW 05, Desa Giwangretno, Kec. Sruweng sebesar Rp 150.000.000	Dukuh Jimbun RT 01 RW 05, Desa Giwangretno, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
636	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Pengaspalan jalan untuk Dukuh Kebanaran RT 02 RW 01, Desa Sidoharjo, Kec. Sruweng sebesar Rp 150.000.000	Dukuh Kebanaran RT 02 RW 01, Desa Sidoharjo, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
637	Solatun	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan bantuan pembangunan mushola untuk RT 03 RW 01 Desa Rowo Kecamatan Mirit sebesar Rp 100.000.000	RT 03 RW 01 Desa Rowo Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
638	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan untuk Jalan Desa RT 05 RW 01 Desa Penimbun Kec. Karanggayam sebesar Rp 150.000.000	RT 05 RW 01 Desa Penimbun Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
639	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan untuk Dukuh Jetis RT 01 RW 04, Desa Patemon, Kec. Gombang sebesar Rp 150.000.000	Dukuh Jetis RT 01 RW 04, Desa Patemon, Kec. Gombang, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
640	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Pengaspalan Jalan untuk Dukuh Wanalela RT 01 RW 02, Desa Kemukus Kec. Gombang sebesar Rp 150.000.000	Dukuh Wanalela RT 01 RW 02, Desa Kemukus Kec. Gombang, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
641	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Pembangunan Peningkatan Jalan Poros Desa untuk Dk. Jatisalam RW 03 Desa Jatisari, Kec. Kebumen sebesar Rp 150.000.000	Dk. Jatisalam RW 03 Desa Jatisari, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
642	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan rabat beton untuk Desa Purwodadi RT 02/02 Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen sebesar Rp 150.000.000	Desa Purwodadi RT 02/02 Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
643	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Pengaspalan jalan RT 05 RW 02 Desa Bandung sebesar Rp 100.000.000	RT 05 RW 02 Desa Bandung Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
644	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Rabat beton untuk RT 01 RW 03 Dk. Karangsembung, Desa Tanahsari, Kec. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	RT 01 RW 03 Dk. Karangsembung, Desa Tanahsari, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
645	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan jalan Desa Sangubanyu RW 02 Kec. Buluspesantren sebesar Rp 150.000.000	RW 02 Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
646	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa untuk Dk. Kayuapu RW 02 Desa Adikarso Kec. Kebumen sebesar Rp 150.000.000	Dk. Kayuapu RW 02 Desa Adikarso Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
647	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan rabat beton untuk Jalan batas Desa RW 09-RW 01, Desa Kaleng, Kec. Puring sebesar Rp 150.000.000	Jalan batas Desa RW 09-RW 01, Desa Kaleng, Kec. Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
648	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan rabat beton untuk Jalan batas Desa RT 01 RW 03 Desa Tukinggedong, Kec. Puring sebesar Rp 150.000.000	Jalan batas Desa RT 01 RW 03 Desa Tukinggedong, Kec. Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
649	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Bantuan 2 unit perahu lengkap untuk KUB MINA TIRTA Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen sebesar Rp 150.000.000	KUB MINA TIRTA Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000	2	unit	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
650	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Bantuan pengadaan buku sejarah tentang Kebumen, Buku "Kebumen Kota yang Kehilangan Pahlawannya" untuk PT RNA Publishing Group Kec. Kebumen sebesar Rp 50.000.000	PT RNA Publishing Group Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	50.000.000	1	Paket	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
651	Solatun	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Bantuan pengaspalan Jalan Desa RT 01 RW 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Puring sebesar Rp 150.000.000	RT 01 RW 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
652	Solichudin	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan Hibah keuangan untuk pembangunan TPQ Al Amin, Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, sebesar Rp 75.000.000,-	Rt 04 Rw 03, Dusun Sidandang, Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	60.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
653	Solichudin	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di Rt 04 Rw 04, Dusun Tegalsari, Desa Jabres, Kecamatan Suweng, sangat rusak dan membutuhkan pengaspalan jalan dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,-	Rt 04 Rw 04, Dusun Tegalsari, Desa Jabres, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	140.000.000	0,75	km	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
654	Solichudin	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di Rt 01 Rw 03, Dusun Andongrejo, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, sangat rusak dan membutuhkan pengaspalan jalan dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,-	Rt 01 Rw 03, Dusun Andongrejo, Desa Kaleng, Kecamatan Puring., Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	140.000.000	0,75	km	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
655	Solichudin	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan Hibah keuangan untuk rehab Mushola Kalimasada, Desa Sidomulyo, Kecamatan Adimulyo, sebesar Rp 30.000.000,-	Rt 001 Rw 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Adimulyo., Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
656	Solichudin	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di RT 05 RW 02, Desa Waluyorejo, Kecamatan Puring, masih sangat jelek dan membutuhkan pembangunan jalan rabat beton dengan anggaran sebesar Rp 140.000.000,-	RT 05 RW 02, Dukuh Gemawang Desa Waluyorejo, Kecamatan Puring, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	140.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
657	Solichudin	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kelompok Bank sampah Mulyo Jaya Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo sangat membutuhkan kendaraan Viar roda 3 sebagai sarana pengangkutan sampah dengan anggaran Rp 40.000.000,-	Rt 01 Rw 02, Dusun Karangmangu, Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo , Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000	1	Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
658	Solichudin	PKB	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kelompok Bank sampah Mulyo Bakti, Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo sangat membutuhkan kendaraan Viar roda 3 sebagai sarana pengangkutan sampah dengan anggaran Rp 40.000.000,-	Rt 02 Rw 04, Dusun Kedungbunder, Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000	1	Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
659	Solichudin	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan Hibah keuangan untuk rehab Masjid Al Hikmah, Desa Condongcampur, Kecamatan Sruweng, sebesar Rp 50.000.000,-	Rt 01 Rw 02 Dusun Condong, Desa Condongcampur, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
660	Solichudin	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan Hibah keuangan untuk rehab Masjid Nurul Huda, Desa Menganti, Kecamatan Sruweng, sebesar Rp 25.000.000,-	Rt 01 Rw 03, Dusun Pekalangan, Desa Menganti, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
661	Solichudin	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan Hibah keuangan untuk rehab Masjid Miftahul Huda, Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, sebesar Rp 50.000.000,-	Rt 05 Rw 04, Dusun Watugede, Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
662	Solichudin	PKB	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan Hibah keuangan untuk rehab Masjid Baiturrokhim, Desa Banjareja, Kecamatan Kuwarasan, sebesar Rp 100.000.000,-	Rt 03 Rw 04, Dusun Pacor 1, Desa Banjareja, Kecamatan Kuwarasan., Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000	4	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
663	Solichudin	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di Rt 01, Rt 02 Rw 04, Desa Wonoyoso, Kecamatan Kuwarasan, masih sangat jelek dan membutuhkan pembangunan jalan rabat beton dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,-	Rt 01, Rt 02 Rw 04, Desa Wonoyoso, Kecamatan Kuwarasan., Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	145.000.000	0,75	km	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
664	Solichudin	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di Rt 01 Rw 04, Desa Mangli, Kecamatan Kuwarasan, sangat rusak dan membutuhkan pengaspalan jalan dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,-	Rt 01 Rw 04, Desa Mangli, Kecamatan Kuwarasan., Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	140.000.000	0,75	km	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
665	Solichudin	PKB	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Poros Desa di RT 01 RW 04, Dusun Bendungan, Desa Bendungan, Kecamatan Kuwarasan, sangat membutuhkan pembangunan pengaspalan jalan dengan anggaran sebesar Rp 140.000.000,-	RT 01 RW 04, Dusun Bendungan, Desa Bendungan, Kecamatan Kuwarasan., Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	140.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
666	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan desa Ayamputih memerlukan rabat beton Rp. 50 Juta	Jalan desa Ayamputih Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
667	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan desa Bandung memerlukan rabat beton Rp. 75 Juta	Jalan desa Bandung, Dukuh Bandung Kidul RT 03 RW 03 Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
668	Sri Halimah	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Madin Mamba'ul 'ulum Desa Jatisari memerlukan bantuan sarpras Rp. 30 Juta	Madin Mamba'ul 'ulum RT 02 RW 01 Dukuh Kedungjati Desa Jatisari Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	30.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
669	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan jembatan penghubung desa Kalirejo dan sumberadi Rp. 375 Juta	desa Kalirejo RT 03 RW 06 Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	375.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
670	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan desa Murtirejo membutuhkan rabat beton Rp. 75 Juta	Jalan desa Murtirejo Dukuh Karangmalang RT 02 RW 04 Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
671	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya prasarana Usaha kecil laundry Ibu Sudartik, memerlukan pengembangan Rp. 50 juta	Ibu Sudartik RT 01 RW 05 Kec. Kebumen Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	50.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
672	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pos PAUD Dewi Sri RT 02 RW 01 Desa Tanahsari memerlukan APE Rp. 15 Juta	Pos PAUD Dewi Sri RT 02 RW 01 Desa Tanahsari Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	Paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
673	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KTT Kreatif Desa Wirogaten memerlukan bantuan usaha ayam petelur 500 ekor Rp. 70 Juta	KTT Kreatif Dukuh Pesutren RT 04 RW 03 Desa Wirogaten Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	70.000.000	1	Paket	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
674	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Usaha kecil laundry Ibu Siti Sarofah memerlukan bantuan prasarana Rp. 30 Juta	Ibu Siti Sarofah RT 03 RW 05 Desa Madureso Kec. Kuwarasan , Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	30.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
675	Sri Halimah	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Mushola Roudlotut Toibin memerlukan bantuan sarpras Rp. 15 Juta	Mushola Roudlotut Toibin RT 01 RW 01 Desa Kalirejo Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
676	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan desa lemahduwur mengalami kerusakan perlu pengaspalan Rp. 100 Jt	Kadus 01 RW 02 Desa Lemahduwur Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
677	Sri Halimah	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	TPQ Darusalam Desa Roworejo memerlukan bantuan Rp. 25 jt	TPQ Darusalam Desa Roworejo RT 02 Rw 03, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
678	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Karang Taruna Eka Karya Desa Kalirejo memerlukan perlatan Tennis Meja Rp. 10 Jt	Karang Taruna Eka Karya Desa Kalirejo , Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	Paket	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
679	Sri Halimah	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	TPQ Al Ma'rifat Kel. Tamanwinangun memerlukan bantuan Rp. 25 jt	TPQ Al-Ma'rifat RT 05 RW 02 Kel. Tamanwinangun Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
680	Sri Halimah	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan jembatan dukuh robahan desa Kalirejo memerlukan bantuan Rp. 135 Juta	dukuh robahan RW 07 desa Kalirejo Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	135.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
681	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak memerlukan perbaikan senilai Rp. 228.500.000	RT 01 RW 02 dan RT 03 RW 06, Desa Redisari Kec. Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	210.460.600	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
682	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Kurangnya sarana dan prasarana, membutuhkan bantuan speaker aktif Rp. 10.000.000	RT 04 RW 03 Desa Kalisari Kec. Rowokele, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
683	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Insfrastruktur rabat beton rt 04 rw 03 desa Kalisari Kecamatan Rowokele senilai 50 juta	rt 04 rw 03 desa Kalisari Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
684	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Insfrastruktur Aspal Jalan Rt 04 rw 04 desa Bumiagung kecamatan Rowokele senilai 50 juta	Rt 04 rw 04 desa Bumiagung kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
685	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bantuan semen Desa Bumiagaung rt 01 rw 04 Kecamatan Rowokele 50 zak senilai 4.539.400 juta	Desa Bumiagaung rt 01 rw 04 Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.539.400	50	Zak	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
686	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Insfrastruktur Rabat Beton rt 03 rw 02 desa Jatiluhur kecamatan Rowokele senilai 50 Juta	rt 03 rw 02 desa Jatiluhur kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
687	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Insfrastruktur rabat beton desa Sрати rt 01 rw 02 senilai 75 juta	desa Sрати rt 01 rw 02, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
688	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Insfrastruktur Talud desa Purbowangi Kec.Buayan RT 03 RW 04 senilai 100 juta	desa Purbowangi KEc. Buayan RT 03 RW 04, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
689	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	pembangunan insfrastruktur rabat beto desa Jatiroto rt05 rw02 Senilai 100 juta	desa Jatiroto rt05 rw02 , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
690	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	dana Hibah untuk pengecoran halaman masjid Desa Argosari rt 1 rw05 senilai 25 juta	Desa Argosari rt 1 rw05, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
691	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Insfrastruktur jalan rabat beton Desa Pringtutul rt 07 rw 03 Kecamatan Rowokele senilai 100 Juta	Desa Pringtutul rt 07 rw 03 Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
692	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Insfrastruktur rabat beton desa Rowokele rt 1 sampai rt 6 rw 4 Kecamatan Rowokele senilai 100 juta	desa Rowokele rt 1 sampai rt 6 rw 4 Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
693	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan Talud desa Tugu rt 02 rw 04 Kecamatan Buayan senilai 75 juta	desa Tugu rt 02 rw 04 Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.000.000	1	paket	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
694	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan insfrastruktur rabat beton Desa Rowokele RT 1 - 6 Kecmatan Rowokele senilai Rp 70.000.000	Desa Rowokele RT 1 - 6 RW 04 Kecmatan Rowokele , Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	60.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
695	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KAWASAN PERMUKIMAN	RTLH senilai rp 20 Jt	Poniran NIK 3305020304850005, RT 01 RW 03 Desa Jatiroto Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	20.000.000	1	Paket	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
696	Sri Parwati, A.Ma.	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KAWASAN PERMUKIMAN	RTLH senilai Rp 20 Jt	Catur Priyanto, RT 01 RW 02 Desa Jatiroto Kec. Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	20.000.000	1	Paket	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
697	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pos Paud Permata Desa Bojongsari memerlukan APE senilai Rp. 10.000.000	Pos Paud Permata Desa Bojongsari, Kec. Alian, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
698	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Kelompok Jamjaneng desa Bojongsari memerlukan seragam senilai Rp. 10.000.000	Desa Bojongsari Kec. Alian, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
699	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan desa Bojongsari, senilai Rp. 40.000.000	Desa Bojongsari Kec. Alian, Kab. Kebumen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40.000.000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
700	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Peningkatan Jalan Poros Desa senilai Rp. 100 Jt	Desa Bojongsari, Kec. Alian, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
701	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak memerlukan perbaikan senilai Rp. 100.000.000	Dk. Prupuk, RT 01 RW 04 Desa Tirtomoyo, Kec. Poncowarno , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
702	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak memerlukan perbaikan senilai Rp. 100.000.000	Dk. Kwaron RT 01 RW 03 Desa Blater, Kec. Poncowarno , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
703	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak, memerlukan perbaikan (talud dan aspalisasi) senilai Rp. 200.000.000	RW 03 Desa Bojongsari Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
704	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Peningkatan Jalan Poros Desa, senilai Rp 200.000.000	Desa Bojongsari, Kec. Alian, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
705	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bank Sampah "Berkah" Desa Bojongsari kurang sarana dan prasaran untuk pengelolaan sampah, membutuhkan Kendaraan Roda 3, senilai Rp 40.000.000	Desa Bojongsari, Kec. Alian, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
706	Sri Tuntasari	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi Jalan Rusak memerlukan perbaikan senilai Rp 200.000.000	RT 2 RW 3 Desa Bojongsari, Kec. Alian, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
707	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan Desa perlu ditingkatkan dengan betonisasi di RT 01 RW 02 dukuh bango Desa Klampis biaya Rp. 200.000.000	Ruas Jalan desa RT 01 RW 02 Dukuh Bango Desa Klegenrejo Kec. Klirong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
708	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Mushola Al-Hikmah Desa Ranterejo memerlukan pembangunan menara biaya Rp. 20.000.000	Mushola Al-Hikmah RT 01 RW 02 Desa Ranterejo Kec. Klirong, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	20.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
709	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Kurangnya asrama santri putri Ponpes Darul Anwar Desa Wotbuwono Kec. Klirong biaya pembangunan Rp. 100.000.000	Ponpes Darul Anwar Desa Wotbuwono RT 02 RW 02 Kec. Klirong , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
710	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Masjid Miftahul Huda desa Bendogarap Kec. Klirong membutuhkan bantuan finishing renovasi pembangunan Biaya Rp. 50.000.0000	Masjid Miftahul Huda RT 01 RW 03 Desa Bendogarap Kec. Klirong, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
711	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan desa Bendogarap RT 01 RW 02 Kec. Klirong mengalami kerusakan perlu perbaikan Rp. 200 juta	Jalan desa Bendogarap RT 01 RW 02 Kec. Klirong, pertigaan Bu Yati kebarat & Pertigaan Balaidesa Kebarat, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
712	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan desa perlu diaspal biaya Rp. 200 Juta	Jalan desa Kedungsari Rt. 01 & Rt. 03 RW 1 Dukuh Singkil Kecamatan Klirong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
713	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Mushola Baitul Abror Desa Ranterejo memerlukan renovasi tempat wudhu & toilet, Rp. 20 Juta	Mushola Baitul Abror, dukuh mendit RT 03 RW 03 Desa Ranterejo Kec. Klirong, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	20.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
714	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Grup Rebana Nisa Nurohmani memerlukan bantuan alat & seragam Rebana Rp. 10.000.000	Grup Rebana Nisa Nurohmani Dukuh Buwana Desa Wotbuwono Kec. Klirong, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
715	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Usaha kecil cucian motor Bapak tri Yugo memerlukan bantuan alat steam Rp. 6 Juta	Bapak Tri Yugo RT 01 RW 01 Desa Kuwaru Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.000.000	1	Unit	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
716	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Ibu Siti Khulalil Karomah memerlukan bantuan Prasarana penjualan Es teh Desa Rp. 12 juta	Ibu Siti Khulalil Karomah Dukuh Klapasawit Desa Peniron RT 02 RW 02 Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.000.000	1	paket	Pengembangan Usaha Mikro
717	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Usaha kecil Bpk. Ahmad Fajri Memerlukan bantuan prasarana jualan Es Teh Desa Rp. 12 Juta	Bpk. Ahmad Fajri Dukuh Bak RT 05 RW 12 Desa Peniron Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
718	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KTT Ngudi Mulyo Desa Arjomulyo membutuhkan bibit ayam petelur 500 ekor, pemeliharaan & pakan Rp. 70 Juta	KTT Ngudi Mulyo Desa Arjomulyo Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	70.000.000	1	Paket	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
719	Subroto, S.Pd.	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan desa Tambaksari mengalami kerusakan perlu rabat beton Rp. 100 Juta	Jalan desa RW 01 dan RW 02 Desa Tambaksari Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
720	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bantuan Bibit Kambing dan Pembinaan untuk KTT KAIDIS , Rp 50.000.000	KTT KAIDIS Rt 3 Rw 2 , Desa Jogopaten , Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	20	Ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
721	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Belum Optimalnya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian dalam Pembuatan Irigasi / Drainase desa 100 m , Rp 70.000.000	Rt 1 Rw 2 Dk Waja,Desa Roworejo, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	70.000.000	100	m	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
722	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bantuan Bibit Kambing untuk KTT MAJU LANJAR , Rp 50.000.000	Rt 2 Rw 1 Desa Sidoharjo, Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	20	Ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
723	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Tembusan 1800 m x 4 m, Rp 150.000.000	Dukuh Sidomukti Rw 1 sampai Dukuh Kedung Krasak Rw 3 , Desa Jemur , Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	7200	m2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
724	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa Untuk Rabat Beton Jalan Desa DK Sitiadi Rt 01 Rw 03 , Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren , Volume 140 x 2,10 x 0,15 , Biaya Sebesar Rp. 80.000.000	DK Sitiadi Rt 01 Rw 03 , Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	80.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
725	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Desa 250 m x 3,5 m x 0,2 m , Rp 185.000.000	Dukuh Kaliduren Rt 1 Rw 2, Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	190.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
726	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Desa 110 m x 4 m x 0,2 m Rp 75.000.000	RT 1 RW 1 Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
727	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Permohonan mesin jahit untuk kelompok, Rp 85.000.000	Dukuh Pesangrahan RT 3 RW 1 Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	80.000.000	1	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
728	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Desa 870 m x 3 m x 0,2 m , Rp 180.000.000	RT 1 RW 1 Desa Sidoharjo , Kecamatan Puring, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	180.000.000	1	paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
729	Suhartono	AMANAT SEJAHTERA	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Permohonan Bibit Kambing KTT MULIA 20 Ekor (Jantan 2 Ekor Betina 18 Ekor) , Rp 50.000.000	RT 2 RW 4 Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	20	Ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
730	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Hibah uang untuk Pertina Kebumen Rp. senilai Rp. 20.000.000	Pertina Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
731	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak, memerlukan perbaikan senilai Rp. 200.000.000	RT 002 RW 001, Desa Jatinegara, Kec. Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
732	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan rusak, memerlukan pengaspalan senilai Rp. 150.000.000	RT 4 dan RT 5 RW 3 Desa Sidoharum, Kec. Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
733	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Masjid memerlukan renovasi senilai Rp. 25.000.000	Masjid Nurul Hidayah, RT 002 RW 004 Desa Selokerto Kec. Sempor, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
734	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok tani memerlukan bantuan bibit hortikultura, sebesar Rp. 10.000.000	RT 002 RW 005, Bonagung, Desa Jatinegara, Kec. Sempor, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	10.000.000			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
735	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Musholla membutuhkan bantuan pembuatan kanopi senilai Rp. 11.000.000	Musholla Al Muhajirin, RT 2 RW 1 desa Sidayu, Kec. Gombong, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	11.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
736	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Minimnya sarana dan prasarana, Judo WAZA memerlukan bantuan alat olahraga berupa Matras senilai Rp. 30.000.000	Judo Waza Jl. Kenanga, Dukuh Wanalela, Desa Kemukus RT 01 RW 01 Kec Gombong., Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.000.000			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
737	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	KTT membutuhkan bantuan bibit kambing senilai Rp 14.000.000	KTT Sidoharum Maju Bersama, Desa Sidoharum, Kec. Sempor, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14.000.000			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
738	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan memerlukan pengaspalan senilai Rp 150 Jt	Jalan Lingkar RW 1 dk Petahunan, desa Sempor, Kec. Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
739	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Kondisi jalan memerlukan pengaspalan senilai Rp 150 Jt	RW 2 dan RW 4 desa Banjarsari, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
740	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan pengaspalan senilai Rp 150 Jt	RW 6 dan RW 7 desa Kalitengah, Kec. Gombang, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
741	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan memerlukan pengaspalan senilai Rp 100 Jt	RT 2 dan RT 3 RW 3 dk Blimbing, desa Bejiruyung, Kec. Sempor, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
742	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	UMKM Kedai Mie Heme Gombang memerlukan bantuan alat usaha senilai Rp 35 Jt	Kedai Mie Heme Desa Wonosigro Kec. Gombang, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	35.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
743	Sulistiyo Widodo	NASDEM	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Studio Musik Sikloes Membutuhkan sarpras Mixer Audio, senilai Rp. 15 Jt	Studio Musik Sikloes, RT 1 RW , desa Bejiruyung Kec. Sempor, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.000.000			Pengembangan Usaha Mikro
744	Sunardi	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Desa untuk Dukuh Weton RT 02 RW 02 - RT 03 RW 02 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 200.000.000	Dukuh Weton RT 02 RW 02 - RT 03 RW 02 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
745	Sunardi	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Desa untuk Dukuh Entak RT 01 RW 03 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 200.000.000	Dukuh Entak RT 01 RW 03 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
746	Sunardi	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Desa untuk Dukuh Entak RT 02 RW 03 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 200.000.000	Dukuh Entak RT 02 RW 03 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
747	Sunardi	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan rehab Masjid Baitulthaqwa Wal Ulum Dukuh Putat RT 02 RW 01 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	Masjid Baitulthaqwa Wal Ulum Dukuh Putat RT 02 RW 01 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
748	Sunardi	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan rehab Masjid Baitul Muttaqin Dukuh Tuaburu RT 02 RW 04 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 50.000.000	Masjid Baitul Muttaqin Dukuh Tuaburu RT 02 RW 04 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
749	Sunardi	GERINDRA	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Permohonan rehab Masjid Roudlotul Muhtadiin Dukuh Entak RT 02 RW 03 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 100.000.000	Masjid Roudlotul Muhtadiin Dukuh Entak RT 02 RW 03 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
750	Sunardi	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Permohonan Bantuan Pembangunan Paud Tulip Ceria Dukuh Putat Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 15.000.000	Paud Tulip Ceria Dukuh Putat Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.000.000	1	Paket	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
751	Sunardi	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah TK Peritis 1 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 25.000.000	TK Peritis 1 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.000.000	1	Paket	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
752	Sunardi	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Permohonan Bantuan Pembangunan sekolah TK Peritis 2 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen sebesar Rp 10.000.000	TK Peritis 2 Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	1	Paket	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
753	Sunardi	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 02 RW 01 Dukuh Pecangkringan Desa Pandanlor, Kec. Klirong sebesar Rp 50.000.000	RT 02 RW 01 Dukuh Pecangkringan Desa Pandanlor, Kec. Klirong , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
754	Sunardi	GERINDRA	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 03 RW 02 Dukuh Weton Desa Tanggulangin Kec. Klirong sebesar Rp 50.000.000	RT 03 RW 02 Dukuh Weton Desa Tanggulangin Kec. Klirong, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
755	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Banasari Selatan RT 001 RW 001 Desa Sidobunder Kec. Puring sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Banasari Selatan RT 001 RW 001 Desa Sidobunder Kec. Puring , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
756	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Jetis RT 002 RW 001 Desa Kedaleman Wetan Kec. Puring sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Jetis RT 002 RW 001 Desa Kedaleman Wetan Kec. Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
757	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Karang Sari RT 001 RW 007 Desa Sidodadi Kec. Puring sebesar Rp 150.000.000,00	Dukuh Karang Sari RT 001 RW 007 Desa Sidodadi Kec. Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
758	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Sido Mamur Dukuh Jurutengah RT 002 RW 001 Desa Puliharjo Kec. Puring membutuhkan bantuan kambing betina 15 ekor dan jantan 1 ekor sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Jurutengah RT 002 RW 001 Desa Puliharjo Kec. Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	16	Ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
759	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Budi Rahayu Dukuh Klapaturi RT 001 RW 004 Desa Sitiadi Kec. Puring membutuhkan bantuan kambing betina 15 ekor dan jantan 1 ekor sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Klapaturi RT 001 RW 004 Desa Sitiadi Kec. Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	16	ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
760	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Kedungbule RT 002 RW 004 Desa Banjarejo Kec. Puring sebesar Rp 150.000.000,00	Dukuh Kedungbule RT 002 RW 004 Desa Banjarejo Kec. Puring, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
761	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Setiyo Budi Utomo Dukuh Joho RT 002 RW 003 Desa Kedaleman Kulon Kec. Puring membutuhkan bantuan kambing betina 15 ekor dan jantan 1 ekor sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Joho RT 002 RW 003 Desa Kedaleman Kulon Kec. Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	16	ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
762	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Margo Mulyo Dukuh Gudang RT 004 RW 001 Desa Surorejan Kec. Puring membutuhkan bantuan kambing betina 15 ekor dan jantan 1 ekor sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Gudang RT 004 RW 001 Desa Surorejan Kec. Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	16	Ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
763	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Purwogondo RT 003 RW 003 Desa Kalipurwo Kec. Kuwarasan sebesar Rp 130.000.000,00	Dukuh Purwogondo RT 003 RW 003 Desa Kalipurwo Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
764	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Maju Makmur Dukuh Pejenun RT 003 RW 005 Desa Tambakmulyo Kec. Puring membutuhkan bantuan kambing betina 15 ekor dan jantan 1 ekor sebesar Rp 50.000.000,00	Dukuh Pejenun RT 003 RW 005 Desa Tambakmulyo Kec. Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	16	Ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
765	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Melati Dukuh Comba Kulon RT 002 RW 002 Desa Sidodadi Kecamatan Puring membutuhkan bantuan kambing betina 30 ekor dan jantan 2 ekor sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Comba Kulon RT 002 RW 002 Desa Sidodadi Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	50.000.000	32	Ekor	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
766	Suyono	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Jalan Poros Desa Dukuh Madugawe RT 12 RW 01 Desa Puliharjo Kec. Puring sebesar Rp 100.000.000,00	Dukuh Madugawe RT 12 RW 01 Desa Puliharjo Kec. Puring , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
767	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil sriping milik Reni Wijiasih sebesar Rp. 8.2 juta	RT. 04 RW. 02 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.200.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
768	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil bakso dan mie ayam milik Sadiyah sebesar Rp 15.9 juta	RT. 02 RW. 02 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.900.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
769	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil pembuatan roti milik Miskem sebesar 6,5 juta	RT. 06 RW. 02 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.500.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
770	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil Teh Desa milik Agum Gumelar W sebesar Rp 12 juta	RT. 01 RW. 02 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
771	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil Pertukangan Kayu milik Yasmono sebesar Rp 9,8 juta	RT. 03 RW. 01 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.800.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
772	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil jahit manual milik Ani Nurwanti sebesar Rp 2,9 juta	RT. 04 RW. 01 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.900.000	1	Unit	Pengembangan Usaha Mikro
773	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan jenitri milik Naryo sebesar Rp 7 juta	RT. 02 RW. 01 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.000.000	1	Unit	Pengembangan Usaha Mikro
774	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan jenitri milik Moh Alwan sebesar Rp 7 juta	RT. 04 RW. 03 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
775	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan tepung dan kelapa milik Suwarno sebesar Rp 11,3 juta	RT. 06 RW. 03 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.300.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
776	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan jenitri milik Ahmadi sebesar Rp 7 juta	RT. 02 RW. 03 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.000.000	1	Unit	Pengembangan Usaha Mikro
777	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil jahit listrik milik Priyati sebesar Rp 4,8 juta	RT. 03 RW. 04 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.800.000	1	Unit	Pengembangan Usaha Mikro
778	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan jenitri milik Saring sebesar Rp 14 juta	RT. 02 RW. 04 Desa Kaliputih Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	14.000.000	2	Unit	Pengembangan Usaha Mikro
779	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan tepung dan kelapa milik Nurodin sebesar Rp 11,3 juta	RT. 02 RW. 02 Desa Kaliputih Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.300.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
780	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil sound system milik Tanto sebesar Rp 49,2 juta	RT. 02 RW. 05 Desa Kaliputih Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	41.200.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
781	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan jenitri milik Noto Diharjo sebesar Rp 7 juta	RT. 02 RW. 07 Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.000.000	1	Unit	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
782	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan jenitri milik Bawon Rusmadi sebesar Rp 7 juta	RT. 03 RW. 07 Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.000.000	1	Unit	Pengembangan Usaha Mikro
783	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Jalan desa Krakal perlu Pengaspalan Rp. 175 Jt. Pemerintah Desa Siap dana sharing 20%	Jalan Ds. Krakal Dukuh Jatiwera RT 01 RW 07 Kec. Alian, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	175.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
784	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil Teh Desa milik Supriyanto sebesar 12 juta	RT. 05 RW. 01 Desa Semampir Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
785	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil usaha giling dan cetak bakso Milik Fitri Istiananingsih sebesar Rp. 48 juta	RT. 04 RW. 06 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	48.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
786	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan jenitri milik Ari Sugianto sebesar Rp 14 juta	RT. 02 RW. 03 Desa Kaliputih Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	14.000.000	2	Unit	Pengembangan Usaha Mikro
787	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan jenitri milik Muhamad Heriyanto sebesar Rp 7 juta	RT. 04 RW. 01 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.000.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
788	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil jahit listrik milik Solihah sebesar Rp 4,8 juta	RT. 03 RW. 04 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.800.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
789	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN UMKM	Belum terpenuhinya peralatan usaha kecil penggilingan tepung dan kelapa milik Taryono sebesar Rp 11,3 Juta	Bpk. Taryono RT. 06 RW. 02 Desa Pujotirto Kec. Karangsambung, Kab. Kebumen	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.300.000	1	Paket	Pengembangan Usaha Mikro
790	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum terbangunnya jalan kewenangan desa membutuhkan anggaran untuk pengaspalan Jalan sebesar Rp 100 Juta dan Pihak Pemerintah Desa siap Dana Sharing minimal 20%	Dukuh Kalipuru Kidul RT. 02 RW. 03 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
791	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum terbangunnya jalan kewenangan desa membutuhkan anggaran untuk Rabat Beton Jalan sebesar Rp 175 Juta dan Pihak Pemerintah Desa siap Dana Sharing minimal 20%	Dukuh Sumberan RT. 01 RW. 06 Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	175.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
792	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum terbangunnya jalan kewenangan desa membutuhkan anggaran untuk Pengaspalan Jalan sebesar Rp 100 Juta dan Pihak Pemerintah Desa siap Dana Sharing minimal 20%	Dukuh Kedalamen Kulon RT. 03 RW. 03 Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
793	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum terbangunnya jalan kewenangan desa membutuhkan anggaran untuk Pengaspalan Jalan sebesar Rp 100 Juta dan Pihak Pemerintah Desa siap Dana Sharing minimal 20%	Dukuh Karangturi Kulon RT. 01 RW. 01 Desa Semampir Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
794	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Belum terbangunnya jalan kewenangan desa membutuhkan anggaran untuk Rabat Beton Jalan sebesar Rp 50 Juta dan Pihak Pemerintah Desa siap Dana Sharing minimal 20%	Dukuh Kempyung RT. 06 RW. 03 Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
795	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	bangunan Musholla kurang memadai dan belum 100% membutuhkan anggaran sebesar Rp. 15 Juta	Mushola Al Husna Dukuh Era Gemiwang RT. 01 RW. 05 Desa Pujotirto Kec. Karangsambung Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
796	Wahid Mulyadi A.Md	PPP	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	bangunan Musholla kurang memadai dan belum 100% membutuhkan anggaran sebesar Rp. 15 Juta	Mushola Baitussalam Dukuh Era Gemiwang RT. 02 RW. 05 Desa Pujotirto Kec. Karangsambung Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
797	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan Dukuh Plesung RT 002 RW 002 Desa Karangreja Kec. Petanahan sebesar Rp 200.000.000,00	Dukuh Plesung RT 002 RW 002 Desa Karangreja Kecamatan Petanahan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
798	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Suro Madu RT 004 RW 002 Desa Karangreja Kec. Petanahan membutuhkan bantuan ternak kambing betina sebesar Rp 60.000.000,00	RT 004 RW 002 Desa Karangreja Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	45.000.000	20	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
799	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Tri Rejeki RT 002 RW 003 Desa Karangreja Kec. Petanahan membutuhkan handsprayer sebesar Rp 5.335.011,00	RT 002 RW 003 Desa Karangreja Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5.335.011	3	Unit	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
800	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Ternak Andini Mulyo RT 001 RW 004 Desa Munggu Kec. Petanahan membutuhkan bantuan ternak kambing betina sebesar Rp 45.000.000,00	RT 001 RW 004 Desa Munggu Kec. Petanahan , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000	15	ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
801	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Alat Musik Gitar Listrik Grup Xramotak Legendaris Pimpinan Bapak Rusman RT 002 RW 003 Desa Munggu Kec. Petanahan sebesar Rp 10.000.000,00	RT 002 RW 003 Desa Munggu Kec. Petanahan , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
802	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Melati Unggul RT 002 RW 003 Desa Munggu Kec. Petanahan membutuhkan handsprayer sebesar Rp 15.000.000,00	RT 002 RW 003 Desa Munggu Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14.226.696	8	Unit	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
803	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Bantuan Pembuatan Pagar Masjid Al Hidayah RT 001 RW 002 Desa Karanggadung Kec. Petanahan sebesar Rp 25.000.000,00	RT 001 RW 002 Desa Karanggadung Kec. Petanahan , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
804	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Karya Rezeki RT 003 RW 003 Desa Karanggadung Kec. Petanahan membutuhkan kambing sebesar Rp 45.000.000,00	RT 003 RW 003 Desa Karanggadung Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000	15	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
805	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Talud Dukuh Baleng RT 001 RW 004 Desa Tegalretno Kec. Petanahan sebesar Rp 150.000.000,00	Dukuh Baleng RT 001 RW 004 Desa Tegalretno Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
806	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pembangunan Musholla Al Asnawi Dukuh Pandean RT 003 RW 001 Desa Jagamertan Kec. Petanahan sebesar Rp 15.000.000,00	Dukuh Pandean RT 003 RW 001 Desa Jagamertan Kec. Petanahan , Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
807	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Ternak Mitra Abadi Sejahtera Dukuh Daleman Kidul RT 003 RW 002 Desa Jagamertan Kec. Petanahan membutuhkan bantuan ternak kambing sebesar Rp 45.000.000,00	Dukuh Daleman Kidul RT 003 RW 002 Desa Jagamertan Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000	15	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
808	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera RT 001 RW 001 Desa Tresnorejo Kec. Petanahan membutuhkan bantuan kambing sebesar Rp 45.000.000,00	RT 001 RW 001 Desa Tresnorejo Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000	15	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
809	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Talud Dukuh Pekuncen RT 003 RW 003 Desa Grogol Penatus Kec. Petanahan sebesar Rp 70.000.000,00	Dukuh Pekuncen RT 003 RW 003 Desa Grogol Penatus Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
810	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Bibit Makmur RT 001 RW 001 Desa Grogol Penatus Kec. Petanahan membutuhkan bantuan kambing sebesar Rp 45.000.000,00	RT 001 RW 001 Desa Grogol Penatus Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000	15	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
811	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Rebana Elshanum Mayrai RT 004 RW 001 Desa Ampelsari Kec. Petanahan membutuhkan bantuan alat-alat rebana sebesar Rp 10.000.000,00	Elshanum Mayrai RT 004 RW 001 Desa Ampelsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
812	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIAANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Grup Ngudi Rahayu RT 004 RW 002 Desa Ampelsari Kec. Petanahan membutuhkan bantuan alat-alat musik sebesar Rp 10.000.000,00	RT 004 RW 002 Desa Ampelsari Kec. Petanahan , Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.000.000	1	Lembaga	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
813	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Leken Jaya RT 005 RW 002 Desa Ampelsari Kec. Petanahan membutuhkan bantuan kambing sebesar Rp 45.000.000,00	RT 005 RW 002 Desa Ampelsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000	15	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
814	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Tani Ternak Tunas Rejeki RT 003 RW 001 Desa Podourip Kec. Petanahan membutuhkan bantuan kambing sebesar Rp 45.000.000,00	RT 003 RW 001 Desa Podourip Kec. Petanahan , Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000	15	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
815	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pokdakan Mina Urip RT 008 RW 002 Desa Podourip Kec. Petanahan membutuhkan bantuan budidaya ikan lele sebesar Rp 20.000.000,00	RT 008 RW 002 Desa Podourip Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000	1	Kelompok	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
816	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS RUMAH PERIBADATAN	Pembangunan Musholla Al Manar RT 001 RW 001 Desa Grogol Beningsari Kec. Petanahan sebesar Rp 15.000.000,00	RT 001 RW 001 Desa Grogol Beningsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000	1	Paket	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
817	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kelompok Ternak Pinuju Mukti Dukuh Putian RT 001 RW 004 Desa Grogol Beningsari Kec. Petanahan membutuhkan bantuan kambing sebesar Rp 45.000.000,00	Dukuh Putian RT 001 RW 004 Desa Grogol Beningsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.000.000	15	Ekor	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
818	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM TERSEDIANYA SERAGAM/ALAT-ALAT KESENIAN	Bantuan Kelompok Eko Wahyu Sejati Dukuh Beji RT 4 RW 1 Desa Karangreja Kec. Petanahan membutuhkan bantuan sebesar Rp 10.000.000	Dukuh Beji RT 4 RW 1 Desa Karangreja Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10.400.000	1	Paket	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
819	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Plesung RT 03 - RT 04 RW 02 Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan sebesar Rp 150.000.000	Dukuh Plesung RT 03 - RT 04 RW 02 Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	150.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
820	Y. Anifudin	PDI Perjuangan	BELUM OPTIMALNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	Pengaspalan Jalan RT 01 - RT 02 RW 03 Desa Munggu Kecamatan Petanahan sebesar Rp 100.000.000	RT 01 - RT 02 RW 03 Desa Munggu Kecamatan Petanahan , Kab. Kebumen	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	1	Paket	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
TOTAL							62.199.048.327			

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

An aerial photograph of a vast, lush green rice field. The field is divided into numerous rectangular plots by narrow irrigation canals. In the middle ground, there is a small, irregularly shaped pond surrounded by greenery. Beyond the pond, a small village with several houses and buildings is visible. In the background, there are rolling hills and mountains covered in dense green forest, under a blue sky with scattered white clouds.

RKPD TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah